



2022



PERATURAN DAERAH NOMOR 3
TAHUN 2022 TENTANG

**RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN
LABUHANBATU TAHUN
2021 – 2026**

BAPPEDA
KABUPATEN LABUHANBATU
2022



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 3 TAHUN 2022

BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
dan
BUPATI LABUHANBATU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD Dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Labuhanbatu untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
13. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

14. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan Pembangunan daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II VISI, MISI DAN PROGRAM

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan dan program Bupati hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2021-2024.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJPD, RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi pedoman bagi:

- a. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD;
- b. Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra - Perangkat Daerah; dan
- c. Perangkat Daerah dalam menyusun Renja - Perangkat Daerah.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) RPJMD disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah;
 - c. Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peridanaan;
 - d. Bab IV Analisis Isu-Isu Strategis;
 - e. Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
 - f. Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan;
 - g. Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah;
 - h. Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan;
 - i. Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah;
 - j. Bab X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan;
 - k. Bab XI Penutup.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Bupati wajib menyusun RKPD pada tahun terakhir pemerintahannya.
- (2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun berikutnya dengan berpedoman pada RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2021-2026 sebelum RPJMD periode berikutnya tersusun.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun pertama periode Pemerintahan Bupati terpilih berikutnya.
- (4) RPJMD dijadikan dasar laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

BAB V PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN MENENGAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - c. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Kepala Daerah wajib menyusun RKPD pada tahun akhir pemerintahannya.
- (2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun berikutnya dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 sebelum RPJMD periode berikutnya tersusun.

- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah terpilih berikutnya.
- (4) RPJMD dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 30 Mei 2022

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ERIK ADTRADA RITONGA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Labuhanbatu

Nomor : 3 Tahun 2022

Tanggal : 30 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd

MUHAMMAD YUSUF SIAGIAN

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU PROVINSI
SUMATERA UTARA : (3-65/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,

 KHAIKUR RAHMI

PEMBINA TINGKAT II

NIP.19710315 199703 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN 2022 NOMOR 3
PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2021-2016

I. UMUM

Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi dan program Bupati Labuhanbatu yang memuat kebijakan penyelenggaraan pembangunan perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai landasan dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Labuhanbatu yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Provinsi Sumatera Utara serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah disertai rencana kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RKPD Kabupaten Labuhanbatu pada setiap tahun anggaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah yang diwujudkan dalam RKPD Kabupaten Labuhanbatu, disusun berdasarkan RPJPD serta mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RPJMN.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU NOMOR

1

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas Limpahan rahmat dan Hidayah-Nya sehingga saat ini Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 dengan baik.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 ini merupakan tahap awal dari rangkaian kegiatan perencanaan pembangunan jangka menengah yang bertumpu pada pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spacial untuk menghasilkan isu – isu strategis, yang kemudian menjadi acuan bagi penyusunan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026.

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu yang dimulai pada Akhir Tahun 2020 dalam Dokumen RPJMD Teknokratik, terjadi keterlambatan penyusunan Dokumen Rancangan Akhir dikarenakan Pemilihan Kepala Daerah yang prosesnya cukup Panjang. Dokumen ini memiliki perbedaan dengan dokumen periode – periode sebelumnya, dimana Pada awal tahun 2020, terjadi keadaan yang luar biasa (extradinary circumstance) akibat pandemi Covid -19. Dampak pandemi Covid -19 ini telah mengganggu kehidupan manusia terutama pada aspek kesehatan sehingga mengakibatkan resesi ekonomi global. Saat ini terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi akibat dampak pandemi Covid -19 lebih parah dibandingkan krisis keuangan global tahun 2008-2009.

Namun demikian, meskipun sedang dihadapkan pada keadaan yang sulit diprediksi dan penuh dengan ketidakpastian, segenap masyarakat dan seluruh stakeholder pembangunan Kabupaten Labuhanbatu perlu tetap optimis dalam menatap pembangunan periode 2021-2026. Pandemi Covid – 19 perlu dipandang

sebagai titik tolak dalam penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten Labuhanbatu yang lebih baik melalui pendekatan Teknokratik, Top Down, Bottom Up, Politik dengan berorientasi pada peningkatan ketahanan (resilience) untuk seluruh sektor pembangunan. Dukungan dan peran serta masyarakat dan seluruh stakeholder di Kabupaten Labuhanbatu sangat diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif dari Pandemi Covid -19 dan mewujudkan masyarakat labuhanbatu yang berkarakter, maju dan sejahtera 2024 dan mengajak untuk Bersama – sama “bolo Labuhanbatu” .

Akhir kata, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran hingga selesainya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026.

Rantauprapat, Mei 2022

BUPATI LABUHANBATU,

Dr. H. ERIK ADTRADA RITONGA, MKM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	I -1
1.1. Latar Belakang.....	I - 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I - 2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I - 8
1.4. Maksud dan Tujuan	I -19
1.5. Sistematika Pelaporan	I -19
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II -1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	II - 2
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II -31
2.3. Aspek Pelayanan Umum	II - 72
2.4. Aspek Daya Saing Daerah.....	II - 198
2.5. Penguatan Sistem Inovasi Daerah	II - 214
2.5. Hasil Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2017 - 2021	II - 251
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III - 1
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	III - 1
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III - 23
3.3. Kerangka Pendanaan.....	III - 26
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH.....	IV - 1
4.1. Permasalahan Pembangunan	IV - 2
4.1.1. Permasalahan Makro Daerah	IV - 2
4.1.2. Permasalahan Per Urusan Pembangunan Daerah .	IV - 8
4.1.3. Urusan Pilihan	IV -19
4.2. Isu Strategis	IV -24
4.2.1. Isu Strategis International	IV -24
4.2.2. Isu atau Kebijakan Nasional	IV -32
4.2.3. Isu Strategis atau Kebijakan Provinsi	

	Sumatera Utara	IV -39
	4.2.3. Hasil Telaahan KLHS RPJMD Labuhanbatu	
	TAHUN 2021 - 2026	IV -45
	4.2.5. Isu Strategis Kabupaten Labuhanbatu	IV - 47
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V - 1
	5.1. Visi	V- 1
	5.2. Misi	V - 2
	5.3. Tujuan dan Sasaran	V - 3
BAB VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	VI-1
	6.1. Strategi.....	V- 1
	6.2. Arah Kebijakan.....	V- 1
	6.3 Program Prioritas dan Kegiatan Strategis Daerah	V- 14
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....	VII -1
	7.1. Kerangka Pendanaan.....	VII -1
	7.2. Program Perangkat Daerah.....	VII -1
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ..	VII -1
BAB X	PENUTUP	X- 1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen I - 8

Gambar 1.2 Sinergitas RPJMN dan RPJMD – RKP dan RKPD I - 18

Gambar 1.3 Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan..... I - 18

Gambar 2.1 Peta Adminstratif Kabupaten Labuhanbatu..... II – 2

Gambar 2.2 Banyaknya Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 II - 132

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Hubungan Antar Misi RPJMD Provinsi dan Misi RPJMD Kabupaten Labuhanbatu	I - 16
Tabel 2.1	Jumlah Desa, Kelurahan, Lingkungan dan Dusun Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021	II - 3
Tabel 2.2	Luas Kecamatan dan Rasio Terhadap Luas Kabupaten	II - 4
Tabel 2.3	Jarak Ibukota Kecamatan Ke Ibukota Labuhanbatu	II - 5
Tabel 2.4	Data Curah Hujan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021	II - 8
Tabel 2.5	Rencana Luasan Pertanian Lahan Basah Di Kabuapten Labuhanbatu	II - 19
Tabel 2.6	Rencana Luasan Pertanian Lahan Kering Di Kabuapten Labuhanbatu	II - 20
Tabel 2.7	Perencana Luasan Perkebunan Di Kabupaten Labuhanbatu .	II - 21
Tabel 2.8	Rencana Luasan Perkebunan Karet Di Kabupaten Labuhanbatu	II - 21
Tabel 2.9	Frekuensi dan jenis Bencana Menurut Kecamatan Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021	II - 26
Tabel 2.10	Daerah Genangan/Desa/Kelurahan Rawan Bencana Banjir Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021	II - 27
Tabel 2.11	Peduduk Kabuapten Labuhanbatu Tahun 2017-2021	II - 28
Tabel 2.12	Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017 – 2021	II – 29
Tabel 2.13	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupten Labuhanbatu Tahun 2021	II – 30
Tabel 2.14	PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupten Labuhanbatu Tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah)	II – 34
Tabel 2.15	PDRB atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2017-2021 Menurut Jenis Pengeluarannya Kabupaten Labuhanbatu (miliar Rupiah).....	II – 39
Tabel 2.16	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 - 2021 (Persen)	II – 41
Tabel 2.17	Nilai Inflasi Rata-Rata (%) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021	II – 42
Tabel 2.18	Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Labuhanbatu	

	Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2017 – 2021	II – 43
Tabel 2.19	Indeks Gini Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021	II – 44
Tabel 2.20	Kemiskinan di Kab. Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021	II – 41
Tabel 2.21	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021	II – 49
Tabel 2.22	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021	II – 51
Tabel 2.23	Angka Kriminalitas Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 – 2020	II – 52
Tabel 2.24	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2017 – 2021	II – 53
Tabel 2.25	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Kab. Labuhanbatu Tahun 2016 – 2020	II – 54
Tabel 2.26	Harapan Lama Sekolah Penduduk Kab. Labuhanbatu Tahun 2017 – 2020	II – 56
Tabel 2.27	Angka Harapan Hidup di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021	II – 57
Tabel 2.28	Pengeluaran per Kapita Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021 (dalam ribu rupiah)	II – 58
Tabel 2.29	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021	II – 60
Tabel 2.30	Persentase Jumlah Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimilikidi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021	II – 60
Tabel 2.31	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021	II – 62
Tabel 2.32	Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021	II – 63
Tabel 2.33	Angka Kematian Balita (AKABA) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021	II – 64
Tabel 2.34	Rasio Posyandu per Satuan Balita Tahun 2017 – 2021 di Kabupaten Labuhanbatu	II – 65
Tabel 2.35	Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021	II – 66

Tabel 2.36	Morbiditas/ Angka Kesakitan diKabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021	II – 67
Tabel 2.37	Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021	II – 68
Tabel 2.38	Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021	II – 69
Tabel 2.39	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021	II – 70
Tabel 2.40	Penyelenggaraan festival seni/sarana di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017- 2021	II – 71
Tabel 2.41	Jumlah Kegiatan Kepemudaan dan Olahragadi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017- 2021	II – 71
Tabel 2.42	Jumlah Organisasi Olahragadi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017- 2021	II – 72
Tabel 2.43	Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021	II – 73
Tabel 2.44	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah diKabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021	II – 75
Tabel 2.45	Rasio Guru terhadap Murid di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021	II – 76
Tabel 2.46	Penduduk Berusia > 15 tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021	II – 77
Tabel 2.47	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021	II – 78
Tabel 2.48	Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021	II – 78
Tabel 2.49	Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 - 2021	II – 79
Tabel 2.50	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021	II – 80
Tabel 2.51	Angka Kelulusan SD/MI di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 – 2021	II – 81
Tabel 2.52	Angka Kelulusan SMP/MTs di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016-2021	II – 82
Tabel 2.53	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021	II – 83
Tabel 2.54	Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Tahun	

	2016-2020 Kabupaten Labuhanbatu	II – 83
Tabel 2.55	Jumlah Guru Menurut Ijazah Tertinggi Labuhanbatu Tahun 2017-2021	II – 84
Tabel 2.56	Jumlah Guru Bersertifikat Pendidik di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021	II – 84
Tabel 2.57	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 - 2021	II – 85
Tabel 2.58	Rasio Posyandu per Satuan Balita di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021	II – 86
Tabel 2.59	Rasio Posyandu per Satuan Balita Per Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 - 2021	II – 87
Tabel 2.60	Jumlah dan Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Per Satuan Penduduk di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021	II – 88
Tabel 2.61	Jumlah dan Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Per Satuan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021	II – 89
Tabel 2.62	Cakupan Puskesmas di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 - 2021	II – 91
Tabel 2.63	Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021	II – 92
Tabel 2.64	Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021	II – 93
Tabel 2.65	Persentase Puskesmas Mampu Poned di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021	II – 95
Tabel 2.66	Rasio Dokter per Satuan Penduduk di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 - 2021	II – 95
Tabel 2.67	Rasio Dokter per Satuan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021	II – 96
Tabel 2.68	Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021	II – 98
Tabel 2.69	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021	II – 99
Tabel 2.70	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021	II – 100
Tabel 2.71	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir di Kabupaten	

	Labuhanbatu Tahun 2017-2021	II – 101
Tabel 2.72	Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021	II – 102
Tabel 2.73	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021	II – 104
Tabel 2.74	Persentase Anak Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 - 2021	II – 105
Tabel 2.75	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 - 2021	II – 106
Tabel 2.76	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 - 2021	II – 107
Tabel 2.77	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Tahun 2017-2021 Kabupaten Labuhanbatu.....	II – 108
Tabel 2.78	Persentase Orang Dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standar Tahun 2017-2021 Kabupaten Labuhanbatu....	II - 109
Tabel 2.79	Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Tahun 2017-2021 Kabupaten Labuhanbatu	II – 110
Tabel 2.80	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Tahun 2017-2020 Kabupaten Labuhanbatu	II – 111
Tabel 2.81	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2020	II – 115
Tabel 2.82	Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2020	II – 116
Tabel 2.83	Persentase Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum Berkualitas Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 - 2021	II – 117
Tabel 2.84	Persentase Penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi layak Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 - 2021	II – 118
Tabel 2.85	Tingkat Capaian Pelayanan Rumah Sakit di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 - 2021	II – 119
Tabel 2.86	Daftar tenaga medis RSUD Rantauprapat di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 - 2021	II – 121

Tabel 2.87	Panjang Jalan Menurut Pemerintahan Yang Berwenang di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021	II – 123
Tabel 2.88	Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017- 2021	II – 123
Tabel 2.89	Data Jaringan Irigasi Berdasarkan Daerah Irigasi di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021	II – 125
Tabel 2.90	Data Daerah Irigasi Berdasarkan Kondisi Irigasi di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021	II – 126
Tabel 2.91	Banyaknya Air Bersih Yang Disalurkan Menurut Jenis Konsumen di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021	II – 126
Tabel 2.92	Rencana Fungsi Utama Sistem Perkotaan Kabupaten Labuhanbatu	II – 128
Tabel 2.93	Banyaknya Pelanggan PDAM Menurut Jenis Konsumen di Kabupaten Labuhanbatu 2017 - 2021	II – 130
Tabel 2.94	Banyaknya Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu 2017 - 2021	II – 131
Tabel 2.95	Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Labuhanbatu 2017 - 2021	II – 133
Tabel 2.96	Jumlah dan Kebutuhan Minimal Satuan Linmas Tahun 2017 - 2021	II – 135
Tabel 2.97	Jumlah dan Kebutuhan Minimal Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2017 - 2021	II – 136
Tabel 2.98	Jumlah LSM di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021	II – 136
Tabel 2.99	Jumlah Urusan Wajib Kesbang dan Politik dalam Negeri di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021	II – 136
Tabel 2.100	Frekuensi Diskusi Lintas Agama Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021	II – 137
Tabel 2.101	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021	II – 138
Tabel 2.102	Jumlah Sarana Sosial di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021	II – 139
Tabel 2.103	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Labuhanbatu, Tahun 2021	II – 141
Tabel 2.104	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan di Kabupaten	

	Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021.....	II – 143
Tabel 2.105	Jumlah sengketa pengusaha dan pekerja di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 - 2021	II – 144
Tabel 2.106	Jumlah perusahaan yang telah melaporkan mengenai Ketenagakerjaannya tahun 2017 - 2021	II – 145
Tabel 2.107	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kab. Labuhanbatu Tahun 2017 - 2021	II – 145
Tabel 2.108	Rasio KDRT Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021 ..	II – 146
Tabel 2.109	Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021	II – 148
Tabel 2.110	Jumlah Desa Rawan Pangan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021	II – 149
Tabel 2.111	Banyaknya Sertifikat Tanah Yang Dikeluarkan Menurut Jenis Hak Atas Tanah di Kabupaten Labuhanbatu 2017-2021	II – 150
Tabel 2.112.	Persentase Penyelesaian Izin Lokasi di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015-2021	II – 151
Tabel 2.113.	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017- 2021	II – 151
Tabel 2.114	Jumlah Wajib KTP dan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017- 2021	II – 152
Tabel 2.115	Jumlah Kepemilikan KTP di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021	II – 153
Tabel 2.116	Rasio Penduduk yang Memiliki Akte Perkawinan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021	II – 153
Tabel 2.117	Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 penduduk di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017- 2021	II – 154
Tabel 2.118	Kelompok Binaan PKK di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 -2021	II – 154
Tabel 2.119	PKK Aktif Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 -2021	II – 155
Tabel 2.120	Jumlah Kelompok Binaan LPM Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021	II – 155
Tabel 2.121	Posyandu aktif Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021	II – 156
Tabel 2.122	Cakupan Akseptor Keluarga Berencana Aktif Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 -2021	II – 156
Tabel 2.123	Rasio Akseptor Keluarga Berencana	

	Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 -2021	II – 157
Tabel 2.124	Persentase Pra Sejahtera dan Sejahtera Tahun 2017 -2021 Di Kabupaten Labuhanbatu	II – 157
Tabel 2.125	Jumlah Tangkahan Boat dan Terminal BisDi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021	II – 159
Tabel 2.126	Jumlah Kepemilikan KIR Angkutan UmumDi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017- 2021	II – 159
Tabel 2.127	Persentase Pemasangan Rambu-RambuDi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 - 2021.....	II – 160
Tabel 2.128	Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021	II – 161
Tabel 2.129	Jumlah Penyiaran radio di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 - 2021.....	II – 162
Tabel 2.130	Jumlah Anggota Koperasi Dan Jenis Lainnya di Kab. Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021.....	II – 163
Tabel2.131	Jumlah Koperasi Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 –2021	II – 164
Tabel 2.132	Jumlah Organisasi Pemuda di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017- 2021	II – 167
Tabel 2.133	Jumlah Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017- 2021	II – 168
Tabel 2.134	Jumlah Organisasi Olahraga di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017- 2021	II – 168
Tabel 2.135	Jumlah Gelanggang / Balai Remaja di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 - 2021	II – 169
Tabel 2.136	Jumlah Lapangan Olahraga di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 - 2021.....	II – 169
Tabel 2.137	Penyelenggaraan festival seni/sarana di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 - 2021	II – 171
Tabel 2.138	Kondisi Kunjungan dan Koleksi Buku pada Perpustakaan Daerah Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 - 2021.....	II – 172
Tabel 2.139	Pengelolaan Arsip Secara Baku Tahun Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 - 2021	II – 173
Tabel 2.140	Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Kearsipan Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021	II – 174
Tabel 2.141	Perkembangan Produksi Ikan Menurut Jenis Komoditi Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021	II – 174

Tabel 2.142	Kontribusi Subsektor Perikanan terhadap PDRB Total ADHB di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021	II – 175
Tabel 2.143	Luas Tanaman dan Produksi Padi di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 - 2021	II – 176
Tabel 2.144	Luas Panen dan Produksi Perkebunan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 - 2021	II – 177
Tabel 2.145	Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) berdasarkan status kepegawaian di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021	II – 178
Tabel 2.146	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB Atas ADHB Di Kabupaten Labuhanbatu (Miliar Rupiah) Tahun 2017 - 202	II – 179
Tabel 2.147	Perkembangan Populasi Ternak menurut Jenis Ternak Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 - 2021	II – 180
Tabel 2.148	Perkembangan Produksi Daging menurut Jenis Ternak di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 - 2021	II – 181
Tabel 2.149	Perkembangan Populasi Unggas Menurut Jenis Unggas Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 - 2021	II – 181
Tabel 2.150	Perkembangan Produksi Daging menurut Jenis Unggas Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 - 2021	II – 182
Tabel 2.151	Kontribusi Subsektor Kehutanan terhadap PDRB Atas ADHB di Kabupaten Labuhanbatu (Miliar Rupiah) Tahun 2017 - 2021	II – 183
Tabel 2.152	Kontribusi Sektor Penggalian terhadap PDRB Atas ADHB di Kabupaten Labuhanbatu (miliar rupiah) Tahun 2017 – 2021	II – 184
Tabel 2.153	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Atas ADHB Di Kabupaten Labuhanbatu (Miliar Rupiah), Tahun 2017 - 2021	II – 185
Tabel 2.154	Jumlah Sarana Perdagangan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 - 2021	II – 186
Tabel 2.155	Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB ADHB di Labuhanbatu (Miliar Rupiah) Tahun 2017 - 2021	II – 187
Tabel 2.156	Jumlah Industri Besar Sedang dan Industri Kecil di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 - 2021	II – 187
Tabel 2.157	Data Industri Besar di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021	II – 188

Tabel 2.158	Potensi Pariwisata di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021	II – 189
Tabel 2.159	Dokumen Perencanaan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021	II – 190
Tabel 2.160	Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021	II – 191
Tabel 2.161	Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Latar Belakang Pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021	II – 193
Tabel 2.162	Rasio Realisasi Anggaran Pengembangan Sumber Daya dengan Belanja Pegawai Tahun 2018-2020.....	II – 195
Tabel 2.163	Capaian Indikator Kinerja Utama Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021	II – 197
Tabel 2.164	Komposisi Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Berdasarkan Partai Politik Dan Gender Periode 2019-2024	II – 197
Tabel 2.165	Angka Konsumsi RT per Kapita Kab. Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021	II – 198
Tabel 2.166	Persentase Konsumsi RT Non Pangan Kab. Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021	II – 199
Tabel 2.167	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 –2021	II – 201
Tabel 2.168	Persentase Penumpang Kereta Api Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017- 2021	II – 201
Tabel 2.169	Jumlah orang yang melalui Dermaga Sei Berombang Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017- 2021	II – 202
Tabel 2.170	Jenis dan Jumlah Penginapan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021	II – 205
Tabel 2.172	Jumlah Akomodasi Kamardan Tempat Tidur yang Tersedia Pada Hotel Bintang dan Non Bintang Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu, 2017-2021	II – 206
Tabel 2.172	Persentase Rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 –2021	II – 207
Tabel 2.173	Ketersediaan Daya Listrik Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021	II – 208
Tabel 2.174	Persentase Rumah tangga (RT) yang menggunakan listrik Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 –2021	II – 208

Tabel 2.175	Angka Kriminalitas Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021	II – 210
Tabel 2.176	Jumlah dan Macam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021	II – 211
Tabel 2.177	Jumlah Desa/Kelurahan Swasembada di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017- 2021	II – 212
Tabel 2.178	Rasio Ketergantungan Kabupaten LabuhanbatuTahun 2017 – 2021	II – 213
Tabel 2.179	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018 - 2021	II – 215
Tabel 2.180	Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018 - 2021	II – 216
Tabel 2.181	Inovasi Daerah lainnya sesuai denganUrusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018 - 2021	II – 218
Tabel 2.182	Capaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 - 2021	II – 222
Tabel 2.183	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 - 2021	II – 222
Tabel 2.184	Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021	II – 252
Tabel 2.185	Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2017-2021 Kabupaten Labuhanbatu	II – 253
Tabel 2.186	Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2017-2021 Kabupaten Labuhanbatu.....	II – 254
Tabel 2.187	Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2017-2021 Kabupaten Labuhanbatu.....	II – 255
Tabel 2.188	Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021	II – 256
Tabel 2.189	Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial Tahun 2017-2021 Kabupaten Labuhanbatu	II – 257
Tabel 2.190	Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's) Tahun 2016-2020 Kabupaten Labuhanbatu	II – 158
Tabel 3.1	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021	III - 3
Tabel 3.2	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	

	Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021	III - 4
Tabel 3.3	Kontribusi Komponen PAD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021	III - 5
Tabel 3.4	Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021	III - 6
Tabel 3.5	Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021	III - 6
Tabel 3.6	Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021	III - 7
Tabel 3.7	Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021	III - 8
Tabel 3.8	Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021	III - 9
Tabel 3.9	Realisasi dan Proporsi Pendapatan Transfer Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021	III - 10
Tabel 3.10	Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021	III - 11
Tabel 3.11	Realisasi dan Proporsi Dana Perimbangan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 - 2021	III - 11
Tabel 3.12	Target dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 - 2021	III - 12
Tabel 3.13	Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 - 2021	III - 13
Tabel 3.14	Target dan Realisasi Pendapatan Hibah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 - 2021	III - 14
Tabel 3.15	Target dan Realisasi Pendapatan Lainnya Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 - 2021	III - 14
Tabel 3.16	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 - 2021	III - 16
Tabel 3.17	Proporsi Jenis Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 - 2021	III - 17
Tabel 3.18	Realisasi Jenis Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 - 2021	III - 18
Tabel 3.19	Realisasi Rata-Rata Pertumbuhan dan Proporsi Belanja Operasi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 - 2021	III - 18
Tabel 3.20	Realisasi Rata-Rata Pertumbuhan dan Proporsi Jenis	

	Belanja Modal Kabupaten Labuhanbatu	
	Tahun 2017 - 2021	III - 19
Tabel 3.21	Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 - 2021	III - 21
Tabel 3.22	Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 - 2021 (Rp.)	III - 21
Tabel 3.23	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 - 2021	III - 22
Tabel 3.24	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021	III - 24
Tabel 3.25	Defisit Anggaran Aparatur Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021	III - 25
Tabel 3.26	Komposisi Penutup Defisit Anggaran Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021	III - 26
Tabel 3.27	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 s.d 2026.....	III - 29
Tabel 3.28	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 s.d 2026.....	III - 33
Tabel 3.29	Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026	III - 34
Tabel 3.30	Proyeksi Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026	III - 35
Tabel 3.31	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2021-2026.....	III - 36
Tabel 3.32	Rencana Alokasi Pagu Indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2021 s/d 2026.....	III - 36
Tabel 3.33	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tahun 2021 s/d 2026.....	III - 39
Tabel 3.34	Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Tahun 2021 s/d 2026.....	III - 42
Tabel 5.1	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026	V - 6
Tabel 5.2	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJPD Kabupaten Labuhanbatu periode 2005-2025 dengan RPJMD	

	Kabupaten Labuhanbatu Periode 2021-2026.....	V - 16
Tabel 6.1	Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 1	VI - 5
Tabel 6.2	Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 2	VI - 6
Tabel 6.3	Strategi dan Arah Kebijakan di Misi 3.....	VI - 8
Tabel 6.4	Strategi dan Arah Kebijakan di Misi 4.....	VI - 12
Tabel 6.5	Strategi dan Arah Kebijakan di Misi 5.....	VI - 13
Tabel 6.6	Program Prioritas dan Kegiatan Strategis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022-2026	VI - 14
Tabel 6.7	Program Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026	VI - 19
Tabel 7.1	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026	VII - 1
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten labuhanbatu.....	VII - 22
Tabel 8.1	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Labuhanbatu	VIII - 2
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	VIII - 4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih yaitu dr. H. ERIK ADTRADA RITONGA, MKM sebagai Bupati Labuhanbatu dan Hj. ELLYA ROSA SIREGAR, S.Pd, MM sebagai Wakil Bupati Labuhanbatu sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12 – 3990 Tahun 2021 Tanggal 24 Agustus 2021 Tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12 – 354 Tahun 2021 tentang pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara. RPJMD ini memuat tujuan, sasaran, strategis, arah kebijakan, pembangunan daerah yang disertai dengan kerangka berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 yang disusun ini memiliki beberapa karakteristik waktu yang harus diperhatikan dan menjadi pedoman Bersama, baik dalam hal sinkronisasi dengan dokumen RPJPD Kabupaten Labuhanbatu 2005-2025, penjabaran kedalam RKPD, ataupun dalam hal evaluasi pada akhir periode RPJMD.

Karakteristik yang lain dari RPJMD Tahun 2021 – 2026 yang akan disusun ini menyangkut waktu pemberlakuan RPJMD, dimana RPJMD Tahun 2021 – 2026 ini secara normal akan mulai berlaku pada bulan Maret 2022 (Penetapan RPJMD paling lambat 6 bulan sejak dilantiknya Kepala Daerah terpilih). Sementara itu, sesuai dengan Pasal 355 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Perubahan RKPD paling lambat minggu ketiga bulan Juli. Sehingga, apabila mengacu pada kedua ketentuan ini, maka Perubahan RKPD Tahun 2021 akan mengacu pada RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016-2021.

Namun demikian, dengan memperhatikan masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang baru dimulai pada tanggal 13 September 2021, maka implementasi program dan kegiatan yang dituntut oleh masyarakat akan mewarnai awal masa kepemimpinan, yang dituangkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yang dimulai dengan perubahan RKPD Tahun 2021, kondisi ini menempatkan perencanaan dan penganggaran tahun 2021 sebagai tahun transisi yaitu sebagian masih mengacu pada perencanaan jangka menengah sebelumnya (Tahun 2016-2021)

RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 – 2026 disusun pada era pandemik Covid -19 belum berakhir. Dampak pandemik ini tidak hanya menyasar permasalahan di bidang kesehatan, namun juga berpengaruh buruk terhadap sektor – sektor lain, mulai dari Pendidikan, ekonomi dan keuangan, infrastruktur, budaya, agama, pariwisata, dan lain -lain. Salah satu indikator yang dapat dilihat adalah pertumbuhan ekonomi yang tertekan hingga mencapai angka -3,44. Angka ini menggambarkan bahwa begitu parahnya dampak pandemik ke hamper semua sektor. Oleh karena itu, RPJMD ini mendapatkan tantangan yang cukup besar untuk dapat membuat skenario – skenario pembangunan yang strategis untuk dapat membangkitkan gairah perekonomian secara bertahap di Kabupaten Labuhanbatu. Gambaran visioner atas kondisi diakhir periode masa bhakti atau pada tahun 2026 nanti (sebagaimana dapat dilihat pada Bab V) menjadi salah satu pemacu agar upaya yang akan dilakukan dari segenap komponen pemerintah dan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu yang dapat terarah dan sejalan dengan pencapaian Visi dan Misi tersebut.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang – undang Nomor 7 drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1902);
2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3651);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara;
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang – undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
17. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
18. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
19. Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
20. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4817);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
24. Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan lembaran Negara Nomor 6178);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
28. Peratuan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

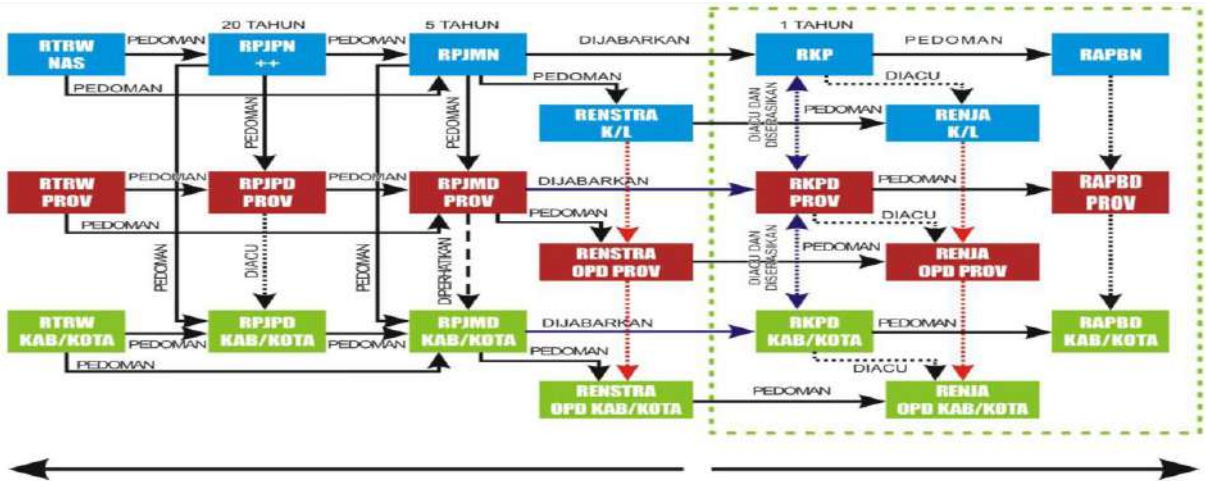
32. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
33. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017, tentang Tatacara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018, tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2019, tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2020, tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

41. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
42. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 – 2037;
43. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2005 - 2025;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Labuhanbatu;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2019 Nomor 1);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 Nomor 3);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2019 Nomor 9);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 Nomor 2);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 Nomor 3).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 merupakan kelanjutan dari rencana pembangunan yang telah dicapai dalam kurun waktu 2016-2021. Untuk mewujudkan suatu dokumen perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara, maka RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 disesuaikan dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.



Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen
Sumber : Bappeda Kabupaten Labuhanbatu, 2021

1.3.1. Amanat RPJMN Tahun 2020-2024

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong” yang dilakukan melalui 9 (sembilan) misi pembangunan yaitu :

- 1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan tujuh agenda pembangunan dengan tema “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”, yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pembangunan nasional jangka menengah yang dilaksanakan guna menuju pada sasaran utama pembangunan nasional di tahun 2020-2024, yang meliputi antara lain :

- a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 - 6,0 %;
- b. Indeks Gini sebesar 0,360-0,374;
- c. Tingkat kemiskinan sebesar 6,0-7,0%;
- d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,54;
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,6 – 4,3 %.
- f. Penurunan Emisi gas Rumah Kaca : 27,3 %

1.3.2. Amanat RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

1.3.2.1 Visi dan Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 diarahkan untuk mewujudkan Visi : Membangun Desa Menata Kota” untuk mewujudkan Visi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan 5 (Lima) Misi sebagai berikut :

1. Bermartabat dalam Kehidupan

Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, Pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga – harga yang terjangkau

2. Bermartabat Dalam Politik

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, serta tata kelola pemerintah yang adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi social yang kuat serta harmonis

3. Bermartabat dalam Pendidikan

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri

4. Bermartabat dalam Pergaulan

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia

5. Bermartabat Dalam Lingkungan

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berprikemanusiaan dan beradab.

1.3.2.2 Program Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 juga didukung dengan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2019-2013 yaitu :

1. Peningkatan dan Pemenuhan akses Pendidikan

Peningkatan kompetensi dan kualitas tenaga pendidik sekolah menengah kejuruan khususnya vokasi di Sumatera Utara, peningkatan dan pemenuhan akses pemerataan layanan Pendidikan melalui pembangunan unit sekolah baru menengah, kejuruan dan khusus di Sumatera Utara, pemberian bantuan operasional Pendidikan (BOP) untuk siswa/I jenjang SMA dan SLB Negeri dengan prioritas intervensi siswa/I kurang mampu, revitalisasi sekolah serta peningkatan sarana prasarana fasilitas belajar, pembangunan kampung beasiswa/scholarship booth (wadah informasi beasiswa/wadah informasi center untuk informasi beasiswa S1,S2,S3, Optimalisasi link and match sekolah menengah kejuruan/vokasi dengan dunia usaha dan industri, pembangunan pojok baca dan gerobak baca serta pengembangan perpustakaan berbasis digital (e-Library) yang menjangkau 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, dan penguatan pembelajaran jarak jauh (Distance learning).

2. Peningkatan Derajat Kesehatan masyarakat

Percepatan penanganan Kesehatan Pandemi Covid 19, peningkatan pelayanan kesehatan rumah sakit Provinsi Sumatera Utara, penurunan prevalensi stunting di Sumatera Utara, peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi dan lansia, peningkatan pemberdayaan perilaku hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS), peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, dan peningkatan ketersediaan obat dan Vaksinasi.

3. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan

Pelatihan kompetensi tenaga kerja yang terintegrasi dengan pasar kerja (kerjasama dengan dunia usaha- dunia industry melalui MoU penempatan tenaga kerja hasil pelatihan, penumbuhan sektor UMKM dan IKM baru serta pemasaran hasil produksi UMKM dan IKM melalui model E-Commerce, reindustrialisasi Indonesia di Sumatera Utara, dan Pengembangan bursa kerja online.

4. Peningkatan Daya Saing melalui sektor agraris

Pembangunan Kawasan pertanian terpadu melalui system pertanian terintegrasi dengan target keberhasilan populasi ternak sapi terbesar se Kawasan pulau sumatera dan 6 besar nasional, peningkatan produktivitas pertanian melalui program swasembada 4 komoditas pangan yaitu beras, jagung, cabe merah dan bawang merah, dan peningkatan produktivitas perikanan melalui pencapaian produksi perikanan tangkap terbesar sekawasan pulau sumatera dan 3 (tiga) besar nasional.

5. Peningkatan daya saing sektor pariwisata

Penataan Kawasan wisata dan cagar budaya dengan cara pengembangan Kawasan pariwisata langkat (tangkahan, barohok/bukit lawing) Kawasan pariwisata madina, Kawasan pariwisata Nias), Desa Wisata tematik, Penataan Cagar Budaya Daerah dan Cagar Budaya Nasional), Dukungan Pengembangan Destinasi Pariwisata super prioritas danau toba, pemosisian sultan dan orang melayu yang tepat dalam bingkai NKRI pengkajian yang objektif beserta implikasi – implikasinya.

6. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi

Mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian ((WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah provinsi, peningkatan capaian nilai system akuntabilitas pemerintah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan target predikat BB pada Tahun 2023, peningkatan capaian indeks pelayanan public dengan target predikat A pada Tahun 2023

7. Peningkatan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga

Peningkatan Keamanan dan Ketentraman, Ketertiban masyarakat, Peningkatan Kebebasan berkumpul, berpendapat dan berkeyakinan, Peningkatan pelayanan panti yang menjadi kewenangan provinsi Sumatera Utara, peningkatan pembinaan atlet berprestasi dan tenaga keolahragaan serta peningkatan sarana dan prasarana olahraga dan fasilitasi olahraga dan sports center di Daerah kualanamu dan pembangunan masjid agung medan.

8. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan

Pencapaian strategis Provinsi dalam kondisi baik yang terdiri dari jalan strategis mendukung fungsi daya dukung lingkungan, susur pantai timur, Kawasan strategis prioritas nasional Danau Toba, Kawasan

Ekonomi Khusus, Kawasan Strategis Nasional Mebidangro, Kawasan Daerah tertinggal sepanjang 506,41KM, Tata Ruang yaitu penyelesaian maksimal masalah pertanahan di Sumatera Utara yang telah berlanngsung puluhan tahun, pembangunan TPA regional Kawasan PTPN 2 STM Hilir, Pembangunan SPAM Mebidang Kawasan Medan Binjai Deli Serdang, Role Model pengurangan luas Kawasan kumuh terintegrasi di Sei Bllah Langkat, pengendalian pencemaran air, udara, tutupan lahan, dan pesisir pantai serta peninngkatan pengelolaan dan penanganan persampahan dan penyediaan fasilitas – fasillitas fisik publik dan penyediaan energi seperti listrik dan infrastruktur yang supportif terhadap pertanian dan perikanan.

1.3.3. Amanat RPJPD Kabupaten Labuhanbatu 2005 – 2025

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 4 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 dalam mewujudkan Visi Kabupaten Labuhanbatu yaitu “terwujudnya masyarakat labuhanbatu yang berkarakter, maju dan sejahtera tahun 2024” yang diwujudkan melalui 5 (lima) misi.

Adapun arah kebijakan daerah yang tertuang dalam RPJPD pada 5 (lima) Tahun keempat (2021 – 2025) sebagai berikut :

- a. Pengembangan masyarakat untuk menjadi pelaku utama industrialisasi Kabupaten Labuhanbatu dengan kondisi masyarakat yang mampu memiliki dan berdaya saing dalam usaha industri pengolahan, masyarakat yang berkembang menjadi masyarakat informasi, masyarakat yang mampu menjalin jaringan usaha, masyarakat yang mampu bersaing dalam tata niaga global dan masyarakat yang memiliki semangat patriotisme demi keutuhan NKRI
- b. Pembangunan Kawasan industri berskala global
- c. Membangun jaringan agribisnis berskala global
- d. Pengembangan sarana dan prasarana tata prasarana tata niaga global.

1.3.4 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015 – 2035.

Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026, RTRW Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015 – 2035 dijadikan pedoman menetapkan lokasi pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu terkait pemanfaatan ruang baik dari sisi rencana pola ruang, rencana struktur ruang dan Kawasan strategis kabupaten maupun sebagai dasar penyusunan prioritas sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Berdasarkan kebijakan penetapan Kawasan strategis Provinsi Sumatera Utara yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kabupaten Labuhan batu, dimana Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai arahan kebijakan sebagai berikut :

1. Rencana Struktur Ruang Wilayah, dimana Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air pada Kawasan rawa yang tersebar di Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu, KabupatenAsahan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Karo, Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Rencana Pengembangan Pola Ruang Wilayah, 1). rencana Pengembangan Kawasan memberikan perlindungannya terhadap Kawasan bawahannya, Kawasan gambut yang menyebar di wilayah Kabupaten Langkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias, 2). rencana pengembangan Kawasan peternakan, dimana pengembangan Kawasan budidaya peternakan hewan besar dilakukan di wilayah yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan perternakan hewan besar antara lain kabupaten Labuhanbatu, 3). Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan pertambangan, pengembangan Kawasan pertambangan dilakukan di

wilayah yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan pertambangan antara lain :

- Tambang minyak dan gas di Kabupaten Labuhanbatu
- Tambang Timah di Kabupaten Labuhanbatu
- Tambang Arsen di Kabupaten Labuhanbatu

3. Rencana Kawasan Strategis, Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Labuhanbatu dan sekitarnya.

Kabupaten Labuhanbatu memiliki Pusat kegiatan Wilayah (PKW) yang pengembangannya difokuskan pada peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki, Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor impor yang mendukung PKN, Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.



1.3.5. KLHS Kabupaten Labuhanbatu

KLHS merupakan salah satu dokumen yang mampu memberikan rekomendasi dengan focus utama mengintegrasikan pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, yakni pada arah kebijakan, rencana dan program pembangunan.

Dalam Rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang tujuannya untuk memandu pemerintah dalam merumuskan skenario pencapaian 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan 203 indikator Kabupaten Labuhanbatu, yang selanjutnya akan menjadi masukan dalam penyusunan RPJMD yang diharapkan akan terwujud pembangunan daerah yang mensejahterakan, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan pembangunan serta keberlangsungan lingkungan hidup.

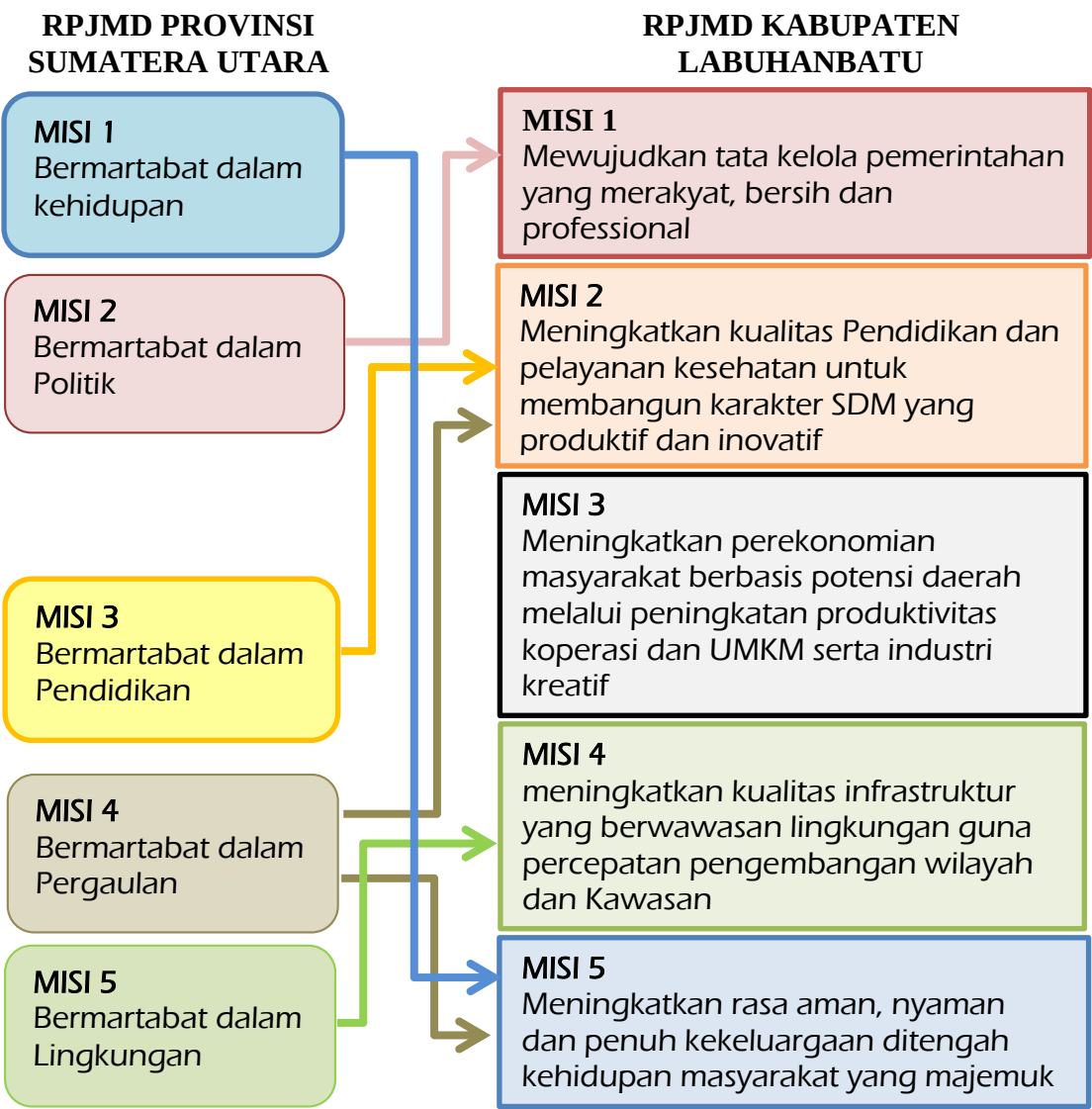
1.3.6. Hubungan Antar Dokumen

Dari Gambaran Berbagai Dokumen Perencanaan tersebut, baik ditingkat Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional, maka hubungan dokumen perencanaan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dalam rangka mewujudkan kehidupan yang demokratis, transparan, partisipatif, akuntabel, berkeadilan sosial, melindungi hak azasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat daerah yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju dan sejahtera dan sejalan dengan Visi Provinsi Sumatera Utara yaitu Membangun Desa menata Kota. Dan dalam rangka mewujudkan masyarakat Labuhanbatu yang berkarakter, maju dan sejahtera 2024.
2. Dalam Upaya Mewujudkan Misi 1 RPJMD Provinsi Sumatera Utara yaitu Bermartabat dalam kehidupan, dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu dalam Misi 5 yaitu Meningkatkan rasa aman, nyaman dan penuh kekeluargaan ditengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
3. Dalam Upaya mewujudkan Misi 2 RPJMD Provinsi Sumatera Utara yaitu Bermartabat dalam politik, dijabarkan dalam RPJMD kabupaten Labuhanbatu dalam Misi 1 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang merakyat, bersih dan professional.

4. Upaya mewujudkan Misi 3 RPJMD Provinsi Sumatera Utara yaitu bermartabat dalam Pendidikan, dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu pada Misi 2 yaitu Meningkatkan kualitas Pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk membangun karakter SDM yang produktif dan inovatif.
5. Dalam Upaya mewujudkan Misi 4 RPJMD Provinsi Sumatera Utara yaitu Bermartabat dalam Pergaulan, dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu dalam Misi 2 yaitu Meningkatkan kualitas Pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk membangun karakter SDM yang produktif dan inovatif dan pada Misi 5 yaitu Meningkatkan rasa aman, nyaman, dan penuh kekeluargaan ditengah kehidupan masyarakat yang majemuk
6. Dalam upaya mewujudkan Misi 5 dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara yaitu Bermartabat dalam lingkungan, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu melalui RPJMDnya tertuang dalam Misi 4 yaitu meningkatkan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan guna percepatan pengembangan wilayah dan Kawasan.

Table 1.1 Hubungan Antar Misi RPJMD Provinsi dan Misi RPJMD Kabupaten Labuhanbatu



1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Maksud Penyusunan Dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 – 2026 adalah untuk memberikan arahan awal perencanaan dan pelaksanaan strategis pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan.

1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 adalah :

1. Menyediakan dokumen Rancangan Awal yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen selanjutnya, yaitu dokumen rancangan RPJMD
2. Menyediakan bahan pembahasan bersama antara Pemerintah dengan DPRD Kabupaten Labuhanbatu, yang nantinya akan menjadi penyempurnaan sebelum diajukan fasilitasi kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Bappeda Provinsi Sumatera Utara.

1.5. Sistematika Penyusunan

Penyusunan Dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menyajikan tentang gambaran tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab II menyajikan tentang gambaran secara logis dasar – dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah

Menguraikan tentang gambaran kondisi kinerja dan kebijakan keuangan daerah yang telah dilaksanakan dan analisis gambaran kerangka pendanaan yang berisikan rumusan kebijakan pendapatan, belanja, serta pembiayaan

untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk periode 2021-2026.

Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah Kabupaten Labuhanbatu

Memberikan gambaran tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintah yang relevan dan isu strategis Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 dengan mempertimbangkan RPJPD Tahap IV dan Analisis Lingkungan Strategis.

Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Dalam Bab ini menguraikan tentang uraian Visi Kepala Daerah terpilih, artikulasi atau penjelasan kata – kata kunci dari pernyataan Visi dan Misi jangka waktunya, pernyataan dan penjelasan masing – masing misi yang merupakan penjabaran Visi, rumusan dan pernyataan masing – masing tujuan dan sasaran, serta gambaran keterkaitan elemen – elemen perencanaan dalam table/matriks.

Bab VI Strategis, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Dalam bab ini diuraikan strategis yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategis terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategis dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kemudian untuk program pembangunan daerah dirumuskan dari masing – masing strategis untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran melalui strategis yang dipilih.

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra perangkat daerah beserta indikator target, dan perangkat daerah penanggungjawab berdasarkan bidang urusan,

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini membahas penetapan indikator kinerja daerah dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Akhir Periode masa jabatan.

Bab IX Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Dimana terdapat 33 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara, yang terdiri dari 8 kota dan 25 kabupaten. Luas wilayah Kabupaten Labuhanbatu sebesar 2,95% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Labuhanbatu merupakan kawasan Pantai Timur Pulau Sumatera dan merupakan salah satu simpul strategis karena dilintasi jalur antar provinsi dan berada dipersimpangan antara Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Peninjauan perencanaan dalam jangka menengah atau 5 (lima) tahun berdasarkan penyesuaian asumsi dengan efek shock pandemi Covid-19 dan dampak ekonomi yang disebabkan. Dengan adanya peninjauan perencanaan daerah ini dapat disimpulkan bahwa perencanaan daerah dapat diselaraskan dengan penyelenggaraan program/kegiatan pemerintahan akibat Covid-19.

Pada tahun 2019 merupakan awal terjadinya pandemi Covid-19 yang dengan cepat tersebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia memberikan dampak sosial dan ekonomi yang besar untuk Indonesia. Bukan hanya Pemerintah Pusat, namun Pemerintah Daerah harus memikirkan langkah-langkah dalam menangani Covid-19 untuk meminimalisir dampak negatif terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Kebijakan pertama yang harus diambil adalah yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan dengan melakukan peninjauan terhadap target – target di RPJMD karena pada tahun 2020 semua program/kegiatan dilakukan pengalihan anggaran untuk penanganan Covid-19 termasuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

Dalam menyusun sebuah perencanaan pembangunan daerah, perlu diketahui gambaran umum kondisi daerah yang ada pada tahun penyusunan perencanaan sebagai basis atau pijakan dalam merencanakan pembangunan daerah tersebut. Gambaran umum kondisi daerah dimaksud meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan

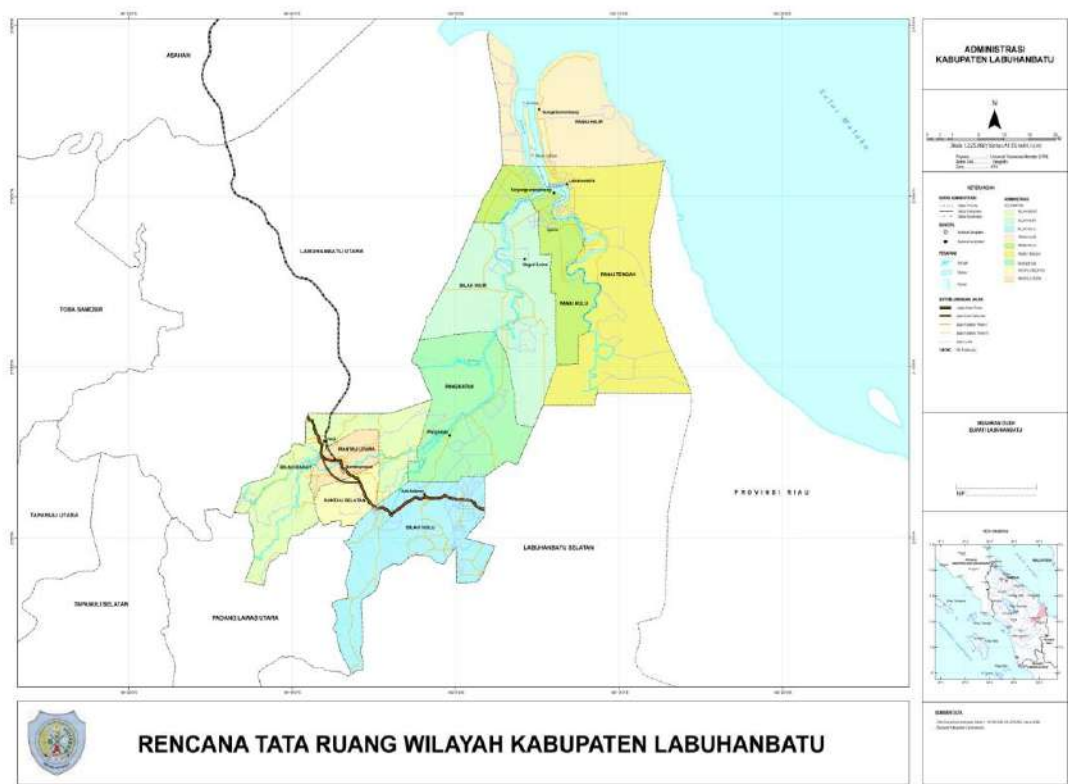
masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah, dilengkapi dengan hasil analisis terhadap lingkungan strategis yang melingkupinya. Secara umum, gambaran umum kondisi Kabupaten Labuhanbatu dapat diuraikan sebagai berikut :

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administratif

Kabupaten Labuhanbatu memiliki luas wilayah 256.138 Ha atau 2.561,38 Km². Batas wilayah Kabupaten Labuhanbatu secara administratif adalah :

- Sebelah Utara : Selat Malaka dan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Sebelah Timur : Provinsi Riau.
- Sebelah Selatan : Kab. Labuhanbatu Selatan dan Padang Lawas Utara.
- Sebelah : Kabupaten Toba Samosir dan Tapanuli Utara.



Gambar 2.1 Peta Adminstratif Kabupaten Labuhanbatu

Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 dan 23 tahun 2008 terdiri dari 9 (sembilan) wilayah

kecamatan dengan 75 (tujuh puluh lima) desa dan 23 (dua puluh tiga) kelurahan serta 208 (dua ratus delapan) lingkungan, dan 526 (lima ratus dua puluh enam) dusun. Banyaknya desa, kelurahan, lingkungan dan dusun menurut kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Desa, Kelurahan, Lingkungan dan Dusun Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Lingk.	Dusun
1	Bilah Hulu	24	-	-	115
2	Pangkatan	7	-	-	55
3	Bilah Barat	10	-	-	82
4	Bilah Hilir	11	2	16	90
5	Panai Hulu	7	-	-	57
6	Panai Tengah	9	1	7	86
7	Panai Hilir	7	1	8	41
8	Rantau Selatan	-	9	84	-
9	Rantau Utara	-	10	93	-
Jumlah		75	23	208	526

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022

Besaran rasio luas masing-masing kecamatan terhadap total luas secara keseluruhan, tidak merata. Kecamatan yang paling luas dari total luas wilayah Kabupaten Labuhanbatu yang mencapai 256.138 ha atau 2.561,38 km² atau 27,77 % dari luas total wilayah Kabupaten Labuhanbatu adalah Kecamatan Panai Tengah yang merupakan salah satu kecamatan yang terletak di wilayah pesisir pantai Kabupaten Labuhanbatu dengan total luas wilayah mencapai 48.374 ha atau 18,89 %. Dimana kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Rantau Selatan yang merupakan kecamatan terdekat dengan Ibukota Kabupaten dengan luas wilayah 6.432 ha atau 2,51 % luas kecamatan, ibukota kecamatan serta rasio terhadap total luas kabupaten secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Luas Kecamatan dan Rasio terhadap Luas Kabupaten

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas(Ha)	Rasio (%)
1	Bilah Barat	Janji	20.298	7,92
2	Rantau Utara	Rantauprapat	11.247	4,39
3	Rantau Selatan	Sioldengan	6.432	2,51
4	Bilah Hulu	Aek Nabara	29.323	11,45
5	Pangkatan	Pangkatan	35.547	13,88
6	Bilah Hilir	Negeri Lama	43.083	16,82
7	Panai Hulu	Tjg. S. Elang	27.631	10,79
8	Panai Tengah	Labuhanbilik	48.374	18,89
9	Panai Hilir	Sei Berombang	34.203	13,35
Jumlah			256.138	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu 2022

Dapat dilihat dari total sembilan kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu, kecamatan yang memiliki jarak paling jauh dengan ibukota Kabupaten Labuhanbatu adalah wilayah Kecamatan Panai Hilir yang berada di kawasan pesisir pantai dan berjarak 101 km, diikuti Kecamatan Panai Tengah dan Kecamatan Panai Hulu, yang juga berada di kawasan pesisir pantai, yang masing-masing berjarak sejauh 95 km dan 91 km dari ibukota Kabupaten Labuhanbatu. Sedangkan ibukota kecamatan paling dekat dan menjadi ibukota Kabupaten Labuhanbatu adalah Kecamatan Rantau Utara dengan Ibukota Kecamatan Rantauprapat. Kecamatan Selatan dengan Ibukota Kecamatan Sioldengan juga salah satu kecamatan yang terdekat selain Kecamatan Rantau Utara. Jarak ibukota kecamatan ke ibukota Kabupaten Labuhanbatu seperti pada tabel berikut :

Tabel. 2.3
Jarak Ibukota Kecamatan Ke Ibukota Kabupaten Labuhanbatu

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)
1	Bilah Barat	Janji	6
2	Rantau Utara	Rantauprapat	-
3	Rantau Selatan	Rantau Selatan	-
4	Bilah Hulu	Aek Nabara	19
5	Pangkatan	Pangkatan	30
6	Bilah Hilir	Negeri Lama	56
7	Panai Hulu	Tj. Sarang Elang	91
8	Panai Tengah	Labuhanbilik	95
9	Panai Hilir	Sei Berombang	101

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu 2022

Dari total sembilan kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu, tiga diantaranya merupakan kecamatan di wilayah pesisir pantai yaitu Kecamatan Panai Hulu, Panai Tengah dan Kecamatan Panai Hilir. Aktivitas perekonomian di Kecamatan Panai Hilir dan Panai Tengah sangat tergantung dari lancarnya arus transportasi darat dan air karena dua kecamatan tersebut dapat ditempuh melalui jalur darat dan jalur perairan. Jalur darat dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat. Jalur darat memiliki waktu tempuh yang lebih lama dibandingkan dengan jalur perairan. Kecamatan Panai Hilir yang beribukota Sei Berombang merupakan Kecamatan yang tepat berada dibibir Selat Malaka dan berbatasan langsung dengan Provinsi Riau juga Kabupaten Labuhanbatu Utara.

2.1.2. Topografi dan Jenis Tanah

Kondisi Wilayah Kabupaten Labuhanbatu berada pada kemiringan antara 0-2% seluas 224.886 ha (87,80%), kemiringan antara 2-15% seluas 13.738ha (5,36%), kemiringan antara 15-40% seluas 12.537 ha (4,89%) dan lebih dari 40% seluas 4,977 ha (1,94%). Menurut ketinggian tanahnya, Kabupaten Labuhanbatu terdiri dari daerah dataran rendah dan perbukitan, wilayah yang terletak pada ketinggian 0-10 m di atas permukaan laut (DPL) seluas 172,770 (67,45%), 11-25 m di atas permukaan laut (DPL) seluas 72,697 ha (28,38%), 26-100 m di atas permukaan laut (DPL) seluas 49,67 ha (0,02%) dan lebih dari 100 m di atas permukaan laut (DPL) seluas 10,621 ha (4,15%).

Kondisi topografi Kabupaten Labuhanbatu pada umumnya memiliki ketinggian yang rendah dengan kelerengan yang relatif datar dari Kecamatan Panai Hilir hingga Kecamatan Pangkatan dan sebagian kecil merupakan wilayah dengan kelerengan yang besar di bagian paling selatan (Kecamatan Bilah Hilir dan Bilah Hulu). Kondisi topografi dan kelerengan Kabupaten Labuhanbatu menguntungkan berdasarkan data yang ada karena luasnya wilayah dengan kelerengan yang relatif datar ($> 50\%$). Hal ini memberikan peluang bagi Kabupaten Labuhanbatu untuk mengembangkan wilayahnya untuk kawasan budidaya lebih luas.

Letak dan Kondisi geologi Kabupaten Labuhanbatu secara umum didominasi oleh tekstur tanah halus seluas 205.404 ha (80,19%) dan tekstur tanah sedang seluas 50.734 ha (19,81%). Wilayah dengan kedalaman efektif antara 30-60 cm mencapai 69.019 ha (26,95%), kedalaman 60-90 cm mencapai 98.026 ha (38,27%), lebih dari 90 cm seluas 10.800 ha (4,22%) dan lahan gambut seluas 78.293 ha (30,57%). Untuk kondisi geologi, berdasarkan jenisnya di wilayah Labuhanbatu terdiri dari alluvial seluas 115.519 ha (45,10%), pasir kerikil seluas 70.800 ha (27,64%), batu pasir seluas 31.051 ha (12,12%) dan jenis lainnya seluas 38.767 ha (15,14%). Sedangkan menurut jenis tanah wilayah Labuhanbatu terdiri atas potsolik seluas 61.237 ha (23,91%), organosol seluas 180.936 ha (70,64%) dan jenis lainnya seluas 13.965 ha (5,45%).

2.1.3. Geologi

Perkembangan suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh karakteristik fisik daerah tersebut, khususnya kondisi geologi atau batuan. Karena hal ini memberikan daya dukung terhadap jenis penggunaan lahan yang dapat berkembang di atasnya. Berdasarkan Peta Geologi Lembar Pematang Siantar Sumatera, yang disusun pada tahun 1982 dengan skala 1 : 250.000, bahwa kondisi geologi di Kabupaten Labuhanbatu terdiri dari, Batuan Sedimen dan Metasedimen, antara lain :

- Qh : Aluvium Muda (pasir, kerikil, rawa bakau, fluviatil, asallaut dan lakustrin), Jenis batuan ini membentang luas dari bagian utara hingga ke arah selatan Kabupaten Labuhanbatu khususnya dari Kecamatan Panai Hilir hingga Kecamatan Pangkatan.

- Qp : Aluvium Tua (kerikil, pasir, lempung), Jenis batuan ini banyak terdapat di sekitar sungai yang mengalir ke arah laut khususnya dari Kecamatan Pangkatan hingga Panai Hilir yang dilingkupi oleh aluvium muda.
- Tup : Formasi Petani (serpih abu-abu kehijauan dengan batu lanau dan dan batu lumpur, kadang-kadang dengan struktur bioturbasi), Jenis batuan ini terdapat di Kecamatan Bilah Hilir dan Kecamatan Bilah Hulu. Jika dilihat lapisannya membentang dengan arah dari tenggara ke arah barat laut.

Sebaran batuan / geologi yang ada di Kabupaten Labuhanbatu bervariasi di bagian utara atau bagian pantai terdapat aluvial, regosol dan organosol. Jenis batuan ini berada persis di pinggiran laut dan sungai. Setelah itu diikuti oleh padsolik merah kekuningan sebagian yang paling besar dan berada di bagian tengah Kabupaten Labuhanbatu dan pada wilayah selatan didominasi oleh batuan padsolik kuning.

2.1.4. Hidrologi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11 A / PRT / M / 2006 tentang Kriteria dan Pembagian Wilayah Sungai, wilayah Kabupaten Labuhanbatu merupakan bagian dari Wilayah Sungai (WS) Barumun-Kualuh dan secara khusus merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Bilah dan DAS Panai. Wilayah sungai Barumun Kualuh ini merupakan wilayah sungai lintas kabupaten.

Dari DAS tersebut banyak dilalui oleh sungai-sungai di Kabupaten Labuhanbatu. Sungai Bilah mengalir mulai dari Kecamatan Bilah Barat hingga Kecamatan Panai Hilir melewati sebagian besar wilayah kabupaten Labuhanbatu. Sungai ini merupakan drainase primer bagi banyak sungai kecil di sekitarnya. Untuk Sungai Panai mengalir membelah Kecamatan Panai Tengah dan Panai Hulu serta bermuara di Sungai Bilah. Dengan kondisi tersebut dan untuk menjaga sumber air maka DAS dan WS di Labuhanbatu harus dikelola dengan menjaga sempadan sungainya.

Berdasarkan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Labuhanbatu, yaitu Sungai Barumun dan Sungai Bilah dengan lebar antara 16 m - 250 m, maka dapat diperkirakan debit sungai tersebut diatas adalah 97 - 195 m³/det. Wilayah Kabupaten Labuhanbatu memiliki daerah yang tergenang secara

periodik seluas ± 151,208 ha atau 59,03% dan daerah yang tergenang terus menerus atau daerah rawa seluas ± 5,210 ha atau 2,03%. Hal ini dapat memberikan peluang untuk menambah lahan persawahan menggunakan irigasi rawa dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Labuhanbatu.

2.1.5. **Klimatologi**

Kabupaten Labuhanbatu termasuk daerah yang beriklim tropis, yang memiliki 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Secara umum rata-rata temperature di Kabupaten Lauhanbatu adalah 22,5⁰ C dengan suhu maksimum 33⁰ C dan suhu minimum 21⁰ C. Rata-rata curah hujan di Kabupaten Labuhanbatu didominasi pada bulan Januari, September dan Oktober seperti halnya wilayah lain di Pulau Sumatera. Selama tahun 2021, rata-rata hari hujan di Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 11,64 hari per bulan dengan rata-rata curah hujan 211,95 mm per bulan.

Tabel 2.4
Data Curah Hujan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021

No	Bulan	Hari Hujan (Hari)	Curah Hujan (mm)
1	Januari	17	347,7
2	Februari	2	20,7
3	Maret	10	38,9
4	April	15	73,9
5	Mei	10	72,7
6	Juni	18	205,6
7	Juli	12	189,3
8	Agustus	16	345,9
9	September	18	330,7
10	Oktober	12	316,6
11	Nopember	25	395,5
12	Desember	15	205,9

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu 2022

2.1.6. **Penggunaan Lahan Perkotaan**

Penggunaan lahan di Kabupaten Labuhanbatu meliputi kawasan lindung dan budidaya disesuaikan dengan RT/RW Kabupaten Labuhanbatu yang diatur dalam PERDA Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015-2035.

a. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Sampai dengan tahun 2030 jenis kawasan budidaya yang terdapat di Kota Rantauprapat meliputi :

- Kawasan Perumahan

Kawasan perumahan atau permukiman perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Pengembangan kawasan perumahan dan permukiman baru di Kota Rantauprapat diarahkan diluar pusat kota, antara lain : Kecamatan Rantau Utara di Desa/Kelurahan Padang Bulan dan Kecamatan Rantau Selatan di Desa/Kelurahan Sioldengan, Desa/Kelurahan Bakaran Batu, Desa/Kelurahan Ujung Bandar, Desa/Kelurahan Lobusona dan Desa/Kelurahan Urung Kompas. Sampai dengan Tahun 2030 luas wilayah perumahan di Kota Rantauprapat direncanakan mencapai 1.371 Ha yang terdiri dari perumahan padat, sedang dan rendah.

- Kawasan Perdagangan dan Jasa

Kawasan Perdagangan dan Jasa adalah kegiatan yang mendominasi kegiatan di pusat kota dengan luasan yang direncanakan sebesar 53,97 Ha. Untuk fasilitas perdagangan dapat dibedakan antara perdagangan skala lokal/kota dan perdagangan regional, masing-masing memiliki karakter dan jangkauan pelayanan yang berbeda. Perdagangan skala lokal/kota mempunyai jangkauan pelayanan lokal/kota sedangkan perdagangan regional mempunyai pelayanan lebih luas sehingga lokasinya di pusat kota harus strategis atau mudah di jangkau dari segala penjuru kota maupun regional dan mempunyai tingkat aksesibilitas yang tinggi. Peruntukan jasa dibedakan menjadi dua yaitu jasa komersial dan jasa perkantoran. Untuk peruntukan perkantoran dapat digabungkan dengan perkantoran, dimana fungsi jasa ditekankan untuk melayani fungsi dari perkantoran yang ada disekitarnya. Pada kenyataannya di

lapangan, perdagangan yang berskala regional dan kota sulit dibedakan, tetapi secara teoritis dapat dibedakan. Perdagangan regional lebih bersifat grosir atau berupa pasar umum dan untuk komoditi tertentu (kegiatan jasa komersial regional) mencakup perdagangan seperti kendaraan bermotor, perbengkelan atau service dan cuci mobil, bahan bangunan (material) dan komoditi untuk kebutuhan regional lainnya. Disamping itu pada kawasan tersebut juga dikembangkan fasilitas pergudangan, penginapan dan lainnya. Pada perdagangan lokal/kota pencampuran antara grosir dan barang tertentu (eceran) lebih berimbang, perdagangan skala kota ini bersifat grosir untuk jenis komoditi kebutuhan rumah tangga/harian.

Adapun jenis perdagangan dan jasa yang direncanakan di Kota Rantauprapat sampai dengan Tahun 2030, antara lain:

1. Pasar Tradisional

Pengembangan pasar tradisional diarahkan di Pusat Pelayanan Kota (PPK) dan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK);

2. Pusat Perbelanjaan

Pusat perbelanjaan diarahkan di Kecamatan Rantau Selatan Desa/Kelurahan Sioldengan dan Desa/Kelurahan Bakaran Batu.

3. Pusat Pertokoan Modern

Pusat Pertokoan Modern diarahkan di Kecamatan Rantau Utara Desa/Kelurahan Padang Bulandan Kecamatan Rantau Selatan Desa/Kelurahan Lobusona.

- ***Kawasan Perkantoran***

Berdasarkan kondisi eksistingnya, kawasan perkantoran di Kota Rantauprapat tersebar di beberapa kawasan. Sampai dengan Tahun 2030 arahan pengembangan kawasan perkantoran diarahkan :

1. Kawasan Perkantoran Pemerintahan diarahkan di Desa/Kelurahan Ujung Bandar (Kecamatan Rantau Selatan/PPK II),
2. Kawasan Perkantoran Swasta diarahkan bersatu di pusat-pusat perdagangan dan jasa atau kegiatan perekonomian lainnya, seperti :

PPK I (Pusat Pelayanan Kota I), PPK II (Pusat Pelayanan Kota II), PPK III (Pusat Pelayanan Kota III) dan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) lainnya yang tersebar di Kota Rantauprapat

- ***Kawasan Industri dan Perdagangan***

Pengembangan kawasan industri di Kota Rantauprapat pada prinsipnya saat ini sudah berkembang hanya saja belum terbentuk pada satu kawasan. Sampai dengan Tahun 2030 pengembangan industri (*aglomerasi*) dan pergudangan diarahkan pada :

1. Kawasan Industri (aglomerasi industri) di Desa/Kelurahan Danaubale (Kecamatan Rantau Selatan/SPPK II B);
2. Kawasan Pergudangan di Desa/Kelurahan Danaubale (Kecamatan Rantau Selatan/SPPK 4) dan Desa/Kelurahan Padang Matinggi (Kecamatan Rantau Utara/SPPK I B).
3. Kawasan Home Industri di Desa/Kelurahan Urung Kompas (Kecamatan Rantau Selatan/SPPK III A) dan Desa/Kelurahan Danaubale (Kecamatan Rantau Selatan/SPPK II B).

- ***Kawasan Pariwisata***

Pengembangan kawasan pariwisata di Kota Rantauprapat diarahkan dengan potensi wisata budaya dan wisata buatan. Sampai Tahun 2030 jenis kegiatan pariwisata dan arahan lokasi wisata tersebut adalah :

1. Wisata budaya diarahkan di Kawasan Cagar Budaya (bangunan bersejarah/Kawasan Pecinan Lama) direncanakan tetap pada PPK I.
2. Wisata buatan diarahkan pada pengembangan Kawasan Perdagangan Terpadu di Desa/Kelurahan Padang Bulan (Kecamatan Rantau Utara/SPPK I A) dan Desa/Kelurahan Lobusona (Kecamatan Rantau Selatan/SPPK II A).

- ***Ruang Terbuka Non Hijau***

Ruang terbuka non hijau adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupabadian air. Sampai dengan Tahun 2030 rencana pengembangan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) di Kota Rantauprapat

diarahkan disetiap bangunan kegiatan, seperti : RTNH di Lingkungan Bangunan Rumah, RTNH di Lingkungan Bangunan Hunian Bukan Rumah, RTNH di Lingkungan Bangunan Pemerintahan dan Pelayanan Umum, RTNH di Lingkungan Bangunan Komersial, RTNH di Lingkungan Bangunan Sosial Budaya, RTNH di Lingkungan Bangunan Pendidikan, RTNH di Lingkungan Sarana Olahraga, RTNH di Lingkungan Bangunan Kesehatan, RTNH di Lingkungan Sarana Transportasi.

- ***Kawasan Budidaya Pertanian***

Kawasan budidaya pertanian di Kota Rantauprapat diarahkan dengan kegiatan budidaya pertanian lahan basah (padi). Sampai dengan Tahun 2030 pengembangan budidaya pertanian tetap dipertahankan di Kecamatan Rantau Selatan.

- ***Kawasan Budidaya Perikanan***

Sampai dengan Tahun 2030 pengembangan budidaya perikanan di Rantauprapat diarahkan di Desa/Kelurahan Pulo Padang dan Desa/Kelurahan Urung Kompas.

- ***Kawasan Peruntukkan lainnya***

1. Peruntukan Ruang Bagi Sektor Informal

Kegiatan sektor informal di Kota Rantauprapat diarahkan kepada kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL), seperti penjualan jajanan dan makanan serta pedagang asongan. Peruntukan bagi sektor informal ini direncanakan menempati lokasi sekitar pusat perdagangan dan jasa dan disekitar pasar tradisional.

2. Peruntukan Pelayanan Umum

Penyebaran pelayanan umum disesuaikan dengan skala kebutuhan, baik yang bersifat regional maupun lokal. Sampai dengan Tahun 2030 kebutuhan akan penambahan sarana pelayanan umum di Kota Rantauprapat, terdiri dari :

- Pelayanan Kesehatan;

Sampai dengan Tahun 2030, rencana pengembangan beberapa fasilitas kesehatan di Kota Rantauprapat antara lain :

- Rencana pengembangan dan peningkatan pelayanan Rumah Sakit kelas C : 1 unit di Kelurahan Bakaran Batu (Kecamatan Rantau Selatan);
- Rencana pengembangan dan peningkatan pelayanan Puskesmas yang sudah ada;
- Rencana pengembangan Balai Pengobatan disetiap desa/kelurahan;
- Rencana pengembangan Posyandu di seluruh desa/kelurahan.

- Pelayanan Pendidikan;

Sampai dengan Tahun 2030 rencana pengembangan beberapa fasilitas pendidikan di Kota Rantauprapat adalah :

- Rencana pengembangan fasilitas TK disetiap lingkungan permukiman;
- Rencana pengembangan fasilitas SD disetiap kelurahan;
- Rencana pengembangan fasilitas SLTP hampir disetiap kelurahan;

- Fasilitas Peribadatan;

Fasilitas pelayanan peribadatan yang perlu disediakan di Kota Rantauprapat sampai dengan Tahun 2030 disesuaikan dengan jumlah penganut agamanya.

3. Peruntukkan Kawasan Militer

Kawasan militer yang terdapat di Kota Rantauprapat berada di Desa/Kelurahan Padang Matinggi/SPPK I B (Kecamatan Rantau Utara). Sampai dengan Tahun 2030 pengembangan kawasan ini direncanakan berada diluar pusat kota.

b. Kawasan Lindung

Penetapan kawasan lindung dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Kota Rantauprapat selain bertujuan untuk melindungi sumber daya alam atau buatan yang ada di dalamnya, juga ditujukan untuk mencegah berbagai kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan baik pada kawasan lindung maupun sekitarnya.

Penetapan kawasan lindung Kota Rantauprapat mengacu pada Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Rencana pengembangan kawasan lindung di Kota Rantauprapat sampai dengan Tahun 2030 terdiri dari kawasan perlindungan setempat, kawasan rawan bencana, kawasan cagar budaya dan ruang terbuka hijau dengan luas 3.215 Ha atau 43,3%.

- *Kawasan Perlindungan Setempat*

Kawasan perlindungan setempat terdiri dari sempadan sungai. Kawasan perlindungan setempat yang diarahkan di Kota Rantauprapat sampai dengan Tahun 2030 yaitu:

1. Sempadan Sungai Bilah diarahkan 50 - 100 meter kiri - kanan sungai, dengan arahan lokasi seluruh desa/kelurahan yang dilalui sungai;
2. Sempadan sungai-sungai kecil dibangun jalan-jalan inspeksi selebar 10 - 25 meter, dengan arahan lokasi seluruh kelurahan yang dilalui sungai-sungai kecil.

- *Kawasan Cagar Budaya*

Kawasan Cagar Budaya yaitu tempat serta ruang disekitar bangunan bernilai budaya tinggi yang telah mempunyai umur lebih dari 50 tahun dan perlu untuk dilestarikan. Dari kriteria-kriteria tersebut, di Kota Rantauprapat yang merupakan kawasan cagar budaya adalah : Kawasan Pertokoan Pecinan Lama dan Gedung Nasional yang berlokasi di sekitar Desa/Kelurahan Cendana dan Desa/Kelurahan Kartini. Oleh karena itu perlu ditetapkan melalui peraturan daerah mengenai cagar budaya yang perlu untuk dipertahankan maupun dilestarikan keberadaannya yang merupakan salah satu potensi pariwisata bagi Kota Rantauprapat.

- *Kawasan Rawan Bencana*

Kawasan rawan bencana alam di Kota Rantauprapat sesuai dengan analisa SKL adalah kawasan rawan banjir/genangan yang berada disebagian wilayah Kecamatan Rantau Utara, meliputi sebagian Desa/Kelurahan Cendana, Desa/Kelurahan Sirandorung dan Desa/Kelurahan Padang Bulan.

- *Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)*

Ruang Terbuka Hijau (RTH), adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, dimanfaatkan sebagai tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dikawasan Perkotaan, maka pengembangan RTH yang diarahkan di Kota Rantauprapat sampai dengan Tahun 2030 seluas 200 Ha. Luasan ini mencapai 43,3 % dari luas Kota Rantauprapat. Adapun proyeksi kebutuhan RTH berdasarkan standar yang di butuhkan di Kota Rantauprapat adalah:

1. Taman Rukun Tetangga (RT)

Taman Rukun Tetangga (RT) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut. Luas taman ini adalah minimal 1 m² per penduduk RT, dengan luas minimal 250 m². Lokasi taman berada pada radius kurang dari 300 m dari rumah-rumah penduduk yang dilayani. Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 70% - 80% dari luas taman. Pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman, juga terdapat minimal 3 (tiga) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang.

2. RTH Taman Rukun Warga

RTH Taman Rukun Warga (RW) disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat

lainnya di lingkungan RW tersebut. Luas taman ini minimal 0,5 m² per penduduk RW, dengan luas minimal 1.250 m². Lokasi taman berada pada radius kurang dari 1.000 m dari rumah-rumah penduduk yang dilayani.

Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 70% - 80% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas. Selain ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat minimal 10 (sepuluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang.

3. RTH Taman Kota

RTH Taman kota adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota. Taman ini melayani minimal 480.000 penduduk dengan standar minimal 0,3 m² per penduduk kota, dengan luas taman minimal 144.000 m². Taman ini dapat berbentuk sebagai RTH (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olah raga, dengan kompleks olah raga minimal RTH 80%-90%. Semua fasilitas tersebut terbuka untuk umum. Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar berfungsi sebagai pohon pencipta iklim mikro atau sebagai pembatas antar kegiatan. Kriteria pemilihan vegetasi untuk taman lingkungan dan taman kota adalah :

- Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu pondasi;
- Tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap;
- Ketinggian tanaman bervariasi, warna hijau dengan variasi warna lain seimbang;
- Perawakan dan bentuk tajuk cukup indah;
- Kecepatan tumbuh sedang;
- Berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya;
- Jenis tanaman tahunan atau musiman;
- Jarak tanam setengah rapat sehingga menghasilkan keteduhan yang optimal;

- Tahan terhadap hama penyakit tanaman;
- Mampu menyerap dan menyerap cemaran udara;
- Sedapat mungkin merupakan tanaman yang mengundang burung.

4. Pemakaman

Penyediaan ruang terbuka hijau pada areal pemakaman disamping memiliki fungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah juga memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup hewan lainnya seperti burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti tempat beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

5. RTH Jalur Hijau Sempadan Rel Kereta Api

Penyediaan RTH jalur hijau pada garis sempadan jalan rel kereta api merupakan RTH jalur hijau yang memiliki fungsi utama untuk membatasi interaksi antara kegiatan masyarakat dengan jalan rel kereta api. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dengan tegas menentukan lebar garis sempadan jalan kereta api di kawasan perkotaan. Kriteria garis sempadan jalan kereta api yang dapat digunakan untuk RTH jalur hijau adalah sebagai berikut:

- Garis sempadan jalan rel kereta api adalah ditetapkan dari as jalan rel terdekat apabila jalan rel kereta api itu lurus;
- Garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak di tanah timbunan diukur dari kaki tanggul;
- Garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak di dalam galian, diukur dari puncak galian tanah atau atas serongan;
- Garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak pada tanah datar diukur dari as jalan rel kereta api;
- Garis sempadan jalan rel kereta api pada belokan adalah lebih dari 23 meter diukur dari lengkung dalam sampai as jalan. Dalam peralihan jalan lurus ke jalan lengkung diluar as jalan harus ada jalur tanah yang bebas, yang secara berangsur–angsur melebar dari jarak lebih dari 11 sampai lebih dari 23 meter. Pelebaran tersebut

dimulai dalam jarak 20 meter di muka lengkungan untuk selanjutnya menyempit lagi sampai jarak lebih dari 11 meter;

- Garis sempadan jalan rel kereta api sebagaimana dimaksud pada butir 1) tidak berlaku apabila jalan rel kereta api terletak di tanah galian yang dalamnya 3,5 meter;
- Garis sempadan jalan perlintasan sebidang antara jalan rel kereta api dengan jalan raya adalah 30 meter dari as jalan rel kereta api pada titik perpotongan as jalan rel kereta api dengan as jalan raya dan secara berangsur–angsur menuju pada jarak lebih dari 11 meter dari as jalan rel kereta api pada titik 600 meter dari titik perpotongan as jalan kereta api dengan as jalan raya.

2.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Labuhanbatu

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Labuhanbatu diarahkan kepada pengembangan kawasan budidaya. Pengembangan kawasan budidaya diarahkan kepada Kawasan Peruntukkan Pertanian, Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit, Kawasan Perkebunan Karet, Kawasan Budidaya Perikanan, Kawasan Peruntukkan Industri, Kawasan Peruntukkan Permukiman dan Kawasan Peruntukkan Lainnya.

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya manusia. Dalam lingkup RTRW Kabupaten Labuhanbatu, pengarahan kawasan budidaya diarahkan untuk:

- Memberikan arahan pola ruang kawasan budidaya secara optimal dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
- Memberikan arahan untuk menentukan prioritas pola ruang antara kegiatan budidaya yang berlainan.
- Memberikan arahan bagi perubahan jenis pola ruang dari jenis kegiatan budidaya tertentu kejenis lainnya.

Dalam RTRW Kabupaten Labuhanbatu, penentuan kawasan budidaya didasarkan pada:

- Kawasan lindung yang telah ditetapkan sebelumnya dan menjadi limitasi

bagi penetapan kawasan budidaya di wilayah Kabupaten Labuhanbatu.

- Kriteria kawasan budidaya menurut pedoman penyusunan rencana tata ruang.
- Hasil analisis kesesuaian lahan.

1. Kawasan Peruntukkan Pertanian

a. Pertanian Lahan Basah

Pertanian lahan basah ditentukan menurut hasil analisis kesesuaian lahan serta dukungan sarana dan prasarana penunjangnya terhadap aktivitas pertanian seperti jaringan jalan, irigasi dan lain-lain. Kawasan dengan peruntukan pertanian lahan basah ini potensial untuk pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan.

Kawasan yang sesuai untuk tanaman pangan lahan basah yang mempunyai sistem atau potensi pengembangan pengairan dengan mempertimbangkan faktor-faktor:

- Ketinggian<1.000 m.
- Kelerengan< 40%.
- Kedalaman efektif lapisan tanah atas> 30cm.

Berdasarkan kriteria tersebut maka ditetapkan kawasan pertanian lahan basah di Kabupaten Labuhanbatu dengan luas total kurang lebih24.586.00Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Rencana Luasan Pertanian Lahan Basah di Kabupaten Labuhanbatu

Kecamatan	Jenis	Luas (Ha)
Bilah Barat	Pertanian Lahan Basah	156
Bilah Hilir	Pertanian Lahan Basah	6.288
Panai Hilir	Pertanian Lahan Basah	7.460
Panai Hulu	Pertanian Lahan Basah	6.942
Panai Tengah	Pertanian Lahan Basah	3.307
Pangkatan	Pertanian Lahan Basah	399
Rantau Selatan	Pertanian Lahan Basah	36
Jumlah		24.586

Sumber : RTRW Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015-2035

b. Pertanian Lahan Kering

Kawasan pertanian lahan kering adalah kawasan yang tidak mempunyai system dan atau potensi pengembangan pengairan dengan mempertimbangkan faktor-faktor :

- Ketinggian<1.000m
- Kelerengan< 40%.
- Kedalaman efektif lapisan tanah atas> 30cm.

Berdasarkan kriteria tersebut maka ditetapkan kawasan pertanian lahan kering di Kabupaten Labuhanbatu dengan luas total kurang lebih 10.286Ha. Kawasan pertanian lahan kering tersebar disemua Kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.6
Rencana Luasan Pertanian Lahan Kering di Kabupaten Labuhanbatu

Kecamatan	Jenis	Luas (Ha)
Bilah Barat	Pertanian Lahan Kering	2.474
Bilah Hilir	Pertanian Lahan Kering	2.003
Bilah Hulu	Pertanian Lahan Kering	1.423
Panai Hilir	Pertanian Lahan Kering	1.544
Panai Hulu	Pertanian Lahan Kering	1.643
Panai Tengah	Pertanian Lahan Kering	1.053
Pangkatan	Pertanian Lahan Kering	128
Rantau Utara	Pertanian Lahan Kering	20
Jumlah		10.286

Sumber : RTRW Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015-2035

2. Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit

Kawasan perkebunan tanaman sawit ditentukan dengan mempertimbangkan faktor- factor :

- Ketinggian<2.000 m.
- Kelerengan< 40%.
- Kedalaman efektif lapisan tanah atas> 30cm
- Kondisi saatini (existing) merupakan tanaman sawit.

Berdasarkan kriteria tersebut maka ditetapkan kawasan perkebunan di Kabupaten Labuhanbatu dengan luas total kurang lebih194.241 Ha. Kawasan peruntukan meliputi :

Tabel 2.7
Rencana Luasan Perkebunan di Kabupaten Labuhanbatu

Kecamatan	Jenis	Luas(Ha)
Bilah Barat	Perkebunan	21.966
Bilah Hilir	Perkebunan	33.297
Bilah Hulu	Perkebunan	32.004
Panai Hilir	Perkebunan	3.011
Panai Hulu	Perkebunan	11.410
Panai Tengah	Perkebunan	47.858
Pangkatan	Perkebunan	34.722
Rantau Selatan	Perkebunan	4.230
Rantau Utara	Perkebunan	5.743
Jumlah		194.241

Sumber : RTRW Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015-2035

3. Kawasan Perkebunan Karet

Selain untuk perkebunan sawit, kawasan yang sesuai untuk perkebunan karet yang mempunyai sistem pengembangan, mempertimbangkan faktor-faktor

- Ketinggian < 2.000 mdpl
- Kelerengan < 40%
- Kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30 cm.
- Kondisi saat ini (existing) merupakan tanaman karet.

Berdasarkan kriteria tersebut maka ditetapkan kawasan perkebunan tanaman karet di Kabupaten Labuhanbatu dengan luas total kurang lebih 8.832,90 Ha. Kawasan peruntukan perkebunan tanaman karet meliputi :

Tabel. 2.8
Rencana Luasan Perkebunan Karet di Kabupaten Labuhanbatu

No	Kecamatan	Jenis	Luas (Ha)
1	Bilah Barat	Perkebunan Karet	3.573,00
2	Bilah Hulu	Perkebunan Karet	3.727,40
3	Panai Hulu	Perkebunan Karet	600,00
4	Pangkatan	Perkebunan Karet	635,30
5	Rantau Selatan	Perkebunan Karet	20,80
6	Rantau Utara	Perkebunan Karet	276,40
Jumlah			8.832,90

Sumber : RTRW Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015-2035

4. Kawasan Peternakan

Sebagaimana diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara bahwa di wilayah Kabupaten Labuhanbatu berpotensi untuk dikembangkan jenis ternak besar.

5. Kawasan Budidaya Perikanan

Kawasan yang sesuai untuk budidaya perikanan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :

- Ketinggian < 1.000 mdpl
- Kelerengan < 15%

Berdasarkan kriteria di atas Kabupaten Labuhanbatu mempunyai kawasan budidaya perikanan dengan luas 120,38 Ha yang berada di Kecamatan Panai Hilir.

6. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Wilayah Kabupaten Labuhanbatu terdapat potensi pertambangan non logam yang berada di Kecamatan Bilah Barat, Bilah Hulu dan Rantau Selatan.

7. Kawasan Peruntukkan Industri

Kriteria kawasan peruntukan industri adalah sebagai berikut :

- Harus memperhatikan kelestarian lingkungan;
- Harus dilengkapi dengan unit pengolahan limbah;
- Harus memperhatikan suplai air bersih;
- Jenis industri yang dikembangkan adalah industri yang ramah lingkungan dan memenuhi kriteria tambang limbah yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup;
- Pengelolaan limbah untuk industri yang berkumpul di lokasi berdekatan sebaiknya dikelola secara terpadu;
- Pembatasan pembangunan perumahan baru di kawasan peruntukan industri;
- Harus memenuhi syarat AMDAL sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Memperhatikan penataan kawasan perumahan di sekitar kawasan industri;
- Pembangunan kawasan industri minimal berjarak 2 Km dari

permukiman dan berjarak 15-20 Km dari pusat kota;

- Kawasan industri minimal berjarak 5 Km dari sungai tipe C atau D;
- Penggunaan lahan pada kawasan industri terdiri dari penggunaan kaveling industri, jalan dan saluran, ruang terbuka hijau, dan fasilitas penunjang.

Berdasarkan kriteria tersebut maka ditetapkan kawasan peruntukan industri di Kabupaten Labuhanbatu dengan luas total 175 (seratus tujuh puluh lima) Ha. Kawasan peruntukan industri berada di Kecamatan Bilah Hulu yang berupa pengolahan hasil perkebunan sedangkan untuk pengolahan hasil perikanan berada di Kecamatan Panai Hilir.

8. Kawasan Peruntukkan Permukiman

Kriteria lokasi untuk peruntukan permukiman adalah sebagai berikut :

- Kesesuaian lahan dengan masukan teknologi yang ada.
- Ketersediaan air terjamin.
- Lokasi yang terkait dengan kawasan hunian yang telah ada/ berkembang.
- Tidak terletak di kawasan tanaman pangan lahan basah.
- Dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung sesuai kebutuhan

Kawasan permukiman dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan. Kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Labuhanbatu seluas kurang lebih 2.011 Ha, sedangkan untuk kawasan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 811 Ha berada di seluruh wilayah kabupaten di luar kawasan permukiman perkotaan.

9. Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan peruntukan lainnya di Kabupaten Labuhanbatu adalah kawasan Bandara. Lokasi Bandara tersebut terletak di Aek Nabara yang berada di Kecamatan Bilah Hulu dengan alokasi luas kawasan diperuntukannya adalah 150 Ha, dengan rincian rencana penggunaan lahan 80 ha untuk pembangunan sarana prasarana fasilitas sisi udara, 40 ha untuk pembangunan sarana prasarana fasilitas sisi darat dan 30 ha

untuk Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP). Untuk progress pembebasan lahan HGU PTPN III (Pesero) Kebun Aek nabara mekanisme pembebasan lahan tersebut sedang dalam proses dan kondisi saat ini sudah masuk dalam tahap pengajuan permohonan pembebasan kepada Kementerian Negara BUMN serta Dewan Komisaris PTPN III (Persero).

a. Ketentuan Umum Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Nasional

Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, bahwa di Kabupaten Labuhanbatu tidak terdapat kawasan strategis nasional.

b. Ketentuan Umum Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Provinsi Sumatera Utara

Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan strategis provinsi berfungsi:

- a. Untuk memwadahi penataan ruang kawasan yang tidak bias terakomodasi dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;
- b. sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah provinsi yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah provinsi ; dan
- c. sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi.

Berdasarkan RTRW Provinsi Sumatera Utara 2017-2037 penetapan kawasan strategis Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Labuhanbatu yaitu:

- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi adalah kawasan Labuhanbatu dan sekitarnya.
- b. Kawasan strategis untuk perikanan.

c. Ketentuan Umum Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten Labuhanbatu

Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan. Penentuan kawasan strategis kabupaten lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis kabupaten akan ditetapkan lebih lanjut di dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis

Ada pun pertimbangan yang harus diperhatikan dalam menilai penetapan kawasan strategis Kabupaten Labuhanbatu adalah dengan memperhatikan kriteria dibawah ini:

- a. Kawasan Strategis harus memperhatikan kawasan strategis yang sudah ditetapkan pada RTRWN dan/atau rencana tata ruang jenjang di atasnya, artinya apabila sudah ditetapkan menjadi kawasan strategis nasional dan provinsi maka Kabupaten Labuhanbatu dapat mengakomodasi didalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Labuhanbatu.
- b. Kawasan Strategis dapat berhimpitan dengan Kawasan Strategis Nasional dan/ atau kawasan strategis jenjang diatasnya,namun harus saling mendukung.
- c. Kawasan Strategis merupakan suatu kawasan fungsional yang batasan fisiknya tidak harus mengikuti batasan wilayah administrasi.
- d. Dianjurkan agar jumlah Kawasan Strategis sedikit mungkin,terbatas pada kawasan yang benar-benar memiliki nilai strategis,
- e. Semua Kawasan Strategis yang ditetapkan dalam RTRW harus memiliki indikasi program yang konkrit untuk mewujudkannya di dalam Arahana Pemanfaatan Ruang.

Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Labuhanbatu sudah memperhatikan:

- Besarnya kontribusi kawasan terhadap perekonomian Kabupaten Labuhanbatu sendiri.
- Skala pelayanan dan dampak kegiatan sosial budaya terhadap tataruang di sekitarnya.
- Nilai-nilai ekologis.
- Kawasan-kawasan yang sangat tertinggal perkembangannya yang perlu perlakuan khusus.

10. Wilayah Rawan Bencana

Bencana alam adalah segala jenis bencana yang sumber, perilaku dan faktor penyebab/pengaruhnya berasal dari alam yaitu banjir, tanah longsor, gempa bumi, erupsi gunung berkapi, kekeringan, angin ribut dan tsunami. Berikut ini kondisi frekuensi dan Jenis Bencana disepanjang tahun 2021.

Tabel 2.9.
Frekuensi dan Jenis Bencana Menurut Kecamatan
di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021

NO	JENIS BENCANA	FREKUENSI
1.	Kebakaran	3 kali
2.	Banjir	10 kali
3.	Banjir Bandang	1 kali
4.	Longsor	-
5.	Angin puting beliung	11 kali

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Labuhanbatu 2022.

Bencana banjir dapat dikategorikan sebagai proses alamiah atau fenomena alam, yang dipicu oleh beberapa penyebab, antara lain Fenomena alam, Aktivitas manusia (Proses Man-Made) yang tidak terkendali dalam mengeksploitasi alam, yang mengakibatkan kondisi alam dan lingkungan menjadi rusak. Daerah genangan rawan banjir di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10
Daerah Genangan/Desa/ Kelurahan Rawan Bencana Banjir di
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021.

NO	DAERAH GENANGAN	LOKASI	DESA/KEL
1.	Sei Tali Horan	Aek Nabara	Aek Nabara
2.	Aek Tapa	Aek Tapa (R. Selatan)	Kel. Bakaran Batu
			Kel. Ujung Bandar
3.	Aek Kundur	R. Selatan	Sidorejo
			Kel Ujung Bandar
4.	Sei Bilah	R. Selatan	Kel.Selodengan
			Kel.Urung Kompas
		R. Utara	Kel. Kartini
			Kel. Rantau Prapat
		Pangkatan	Desa T. Linggara
			T. Harapan
			Sennah
			Bomban Bidang
		Bilah Hilir	Kel.Negeri Lama
			Kel.Negeri Baru
5	Sei Tawar	Rantau Utara	Kel.Bina Raga
			Kel.Padang Bulan
			Kel.Silandorung

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022.

2.1.8. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2021 berjumlah 499.982 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 195 jiwa per Km² terdiri dari 253.645 laki-laki dan 246.337 perempuan.

Jumlah penduduk di Kabupaten Labuhanbatu dari tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11
Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Bilah Hulu	63.615	64.440	62.267	64.416	64.949
2.	Pangkatan	33.809	33.972	34.177	37.766	38.229
3.	Bilah Barat	40.042	40.850	41.620	39.953	40.422
4.	Bilah Hilir	52.548	52.711	52.953	59.370	60.094
5.	Panai Hulu	39.142	39.907	40.637	38.028	38.359
6.	Panai Tengah	39.779	40.576	41.335	41.143	41.767
7.	Panai Hilir	37.488	37.576	37.725	42.761	43.300
8.	Rantau Selatan	75.631	78.206	80.579	73.977	75.395
9.	Rantau Utara	96.539	98.242	99.885	96.485	97.467
Jumlah		478.593	486.480	494.178	493.899	499.982

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Labuhanbatu 2022

Berdasarkan tabel diatas, selama lima tahun, yaitu dari tahun (2017-2021) penyebaran penduduk terbesar berada di Kecamatan Rantau Utara. Pada tahun 2021 jumlah penduduk Kecamatan Rantau Utara sebanyak 97.467 jiwa atau 19,49 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu seluruhnya dan penyebaran penduduk terkecil berada di Kecamatan Pangkatan yaitu sebanyak 38.229 jiwa atau 7,64 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu seluruhnya. Jumlah penduduk Kabuapten Labuhanbatu tahun 2021 sebanyak 499.982 jiwa, bila dibandingkan dengan tahun 2020, terjadi penambahan sebesar 6.083 Jiwa dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan penduduk cenderung lebih tinggi di wilayah yang dekat dengan ibukota Kabupaten, yaitu Rantau Utara dan Rantau Selatan. Ini menggambarkan bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Labuhanbatu lebih memilih tinggal di dua kecamatan dimaksud diatas untuk tinggal dan menetap serta beraktifitas disektor perdagangan dan jasa serta disektor pendidikan dan kesehatan.

Pada masa yang akan datang, banyaknya jumlah penduduk di dua kecamatan diatas (berdekatan dengan wilayah kota kabupaten) dapat diantisipasi dengan percepatan pembangunan diwilayah pesisir pantai diantaranya melalui program dan kegiatan pengembangan wilayah pesisir.

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin ditiap kecamatan rata-rata didominasi oleh Pria seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12
Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	Penduduk									
		2017		2018		2019		2020		2021	
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
1.	Bilah Hulu	31.952	31.663	32.369	32.071	32.790	32.477	32.685	31.731	32.987	31.962
2.	Pangkatan	17.095	16.714	17.179	16.793	17.285	16.892	19.134	18.632	19.372	18.857
3.	Bilah Barat	20.355	19.687	20.768	20.082	21.162	20.457	20.305	19.648	20.542	19.880
4.	Bilah Hilir	26.853	25.695	26.939	25.772	26.402	26.696	30.333	29.037	30.701	29.393
5.	Panai Hulu	19.882	19.260	20.273	19.634	20.647	19.990	19.441	18.587	19.622	18.737
6.	Panai Tengah	20.330	19.449	20.739	19.837	21.130	20.205	21.177	19.966	21.512	20.255
7.	Panai Hilir	19.129	18.359	19.176	18.400	19.255	18.470	21.988	20.733	22.281	21.019
8.	Rantau Selatan	38.150	37.481	39.453	38.753	40.656	39.923	37.216	36.761	37.919	37.476
9.	Rantau Utara	48.054	48.485	48.906	49.336	49.730	50.153	48.202	48.283	48.709	48.758
Jumlah		241.800	236.793	245.802	240.678	249.772	244.456	250.481	243.418	253.645	246.337

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Labuhanbatu, 2022.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Pada tahun 2021 jumlah penduduk laki-laki sebesar 253.645 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 246.337 jiwa.

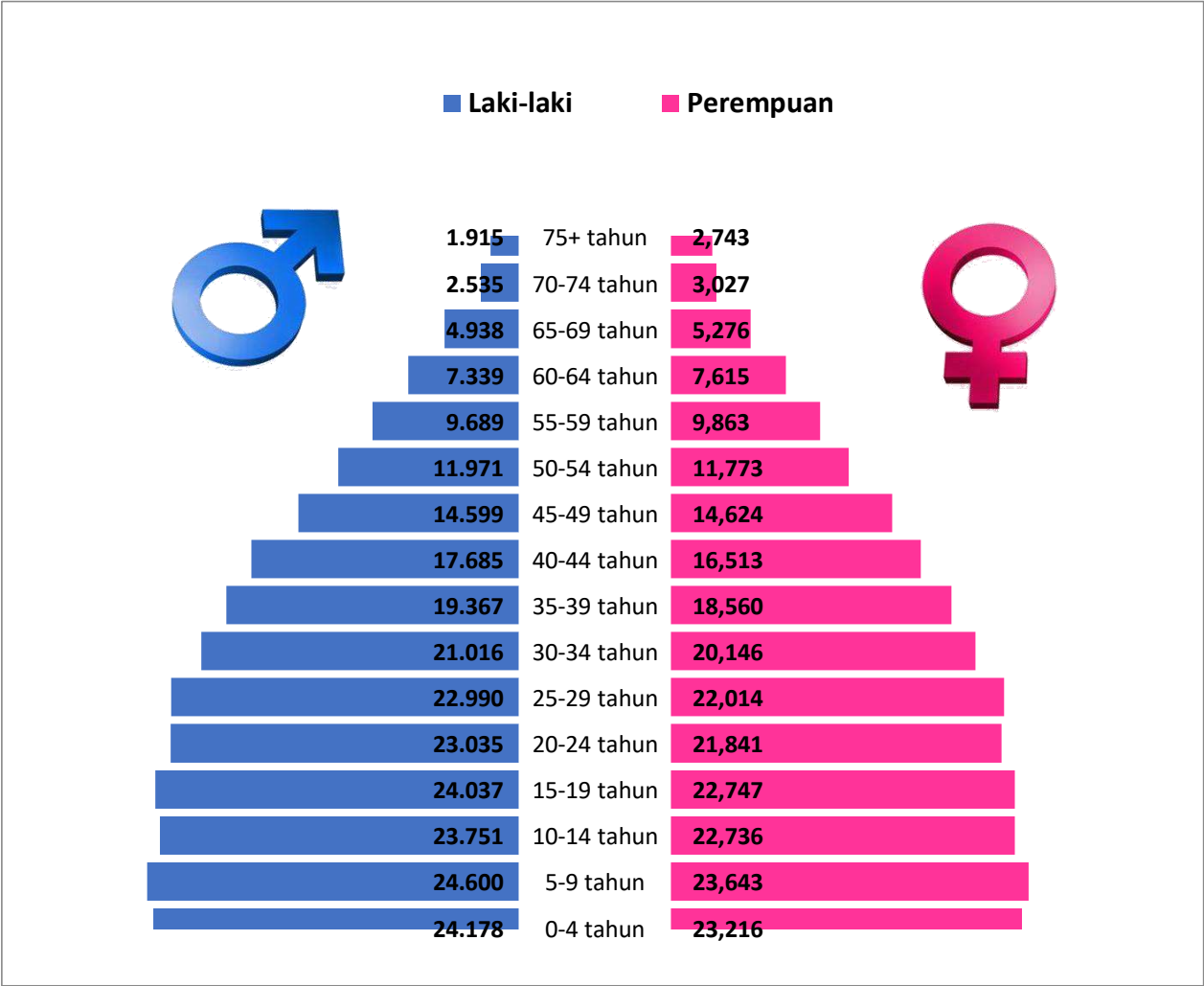
Tabel 2.13
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021

No	Kelompok Umur	Penduduk Laki-laki	Penduduk Perempuan	Jumlah Penduduk
1	0-4	24.178	23.216	47.394
2	5-9	24.600	23.643	48,243
3	10-14	23.751	22.736	46.487
4	15-19	24.037	22.747	46.784
5	20-24	23.035	21.841	44.876
6	25-29	22.990	22.014	45.004
7	30-34	21.016	20.146	41.162
8	35-39	19.367	18.560	37.927
9	40-44	17.685	16.513	34.196
10	45-49	14.599	14.624	29.223
11	50-54	11.971	11.773	23.744
12	55-59	9.689	9.863	19.552
13	60-64	7.339	7.615	14.954
14	65-69	4.938	5.276	10.214
15	70-74	2.535	3.027	5.562
16	75+	1.915	2.743	4.658
Jumlah/total		253.645	246.337	499.982

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Labuhanbatu Tahun 2022.

Apabila digambarkan dalam bentuk piramida dapat dilihat pada grafik 2.1, sebagian besar penduduk berada pada usia muda (0-29) tahun, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk di Kabupaten Labuhanbatu masih cukup tinggi.

Grafik 2.1
Piramida Penduduk di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021

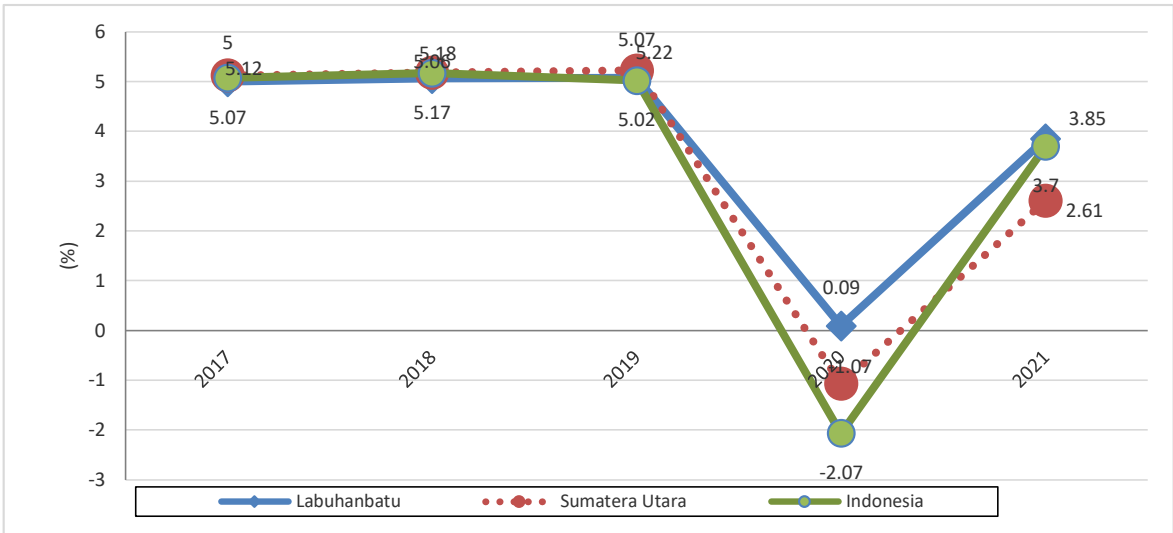


2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh dalam suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kinerja perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya pertumbuhan negatif menunjukkan penurunan. Pertumbuhan ekonomi yang rendah menggambarkan rendahnya kinerja perekonomian suatu daerah, kondisi ini dapat menghambat pembangunan diberbagai sektor yang pada akhirnya menghambat proses pembangunan.

Grafik 2.2
Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Harga Konstan Kabupaten
Labuhanbatu, Sumatera Utara dan Indonesia
Tahun 2017-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu 2022.

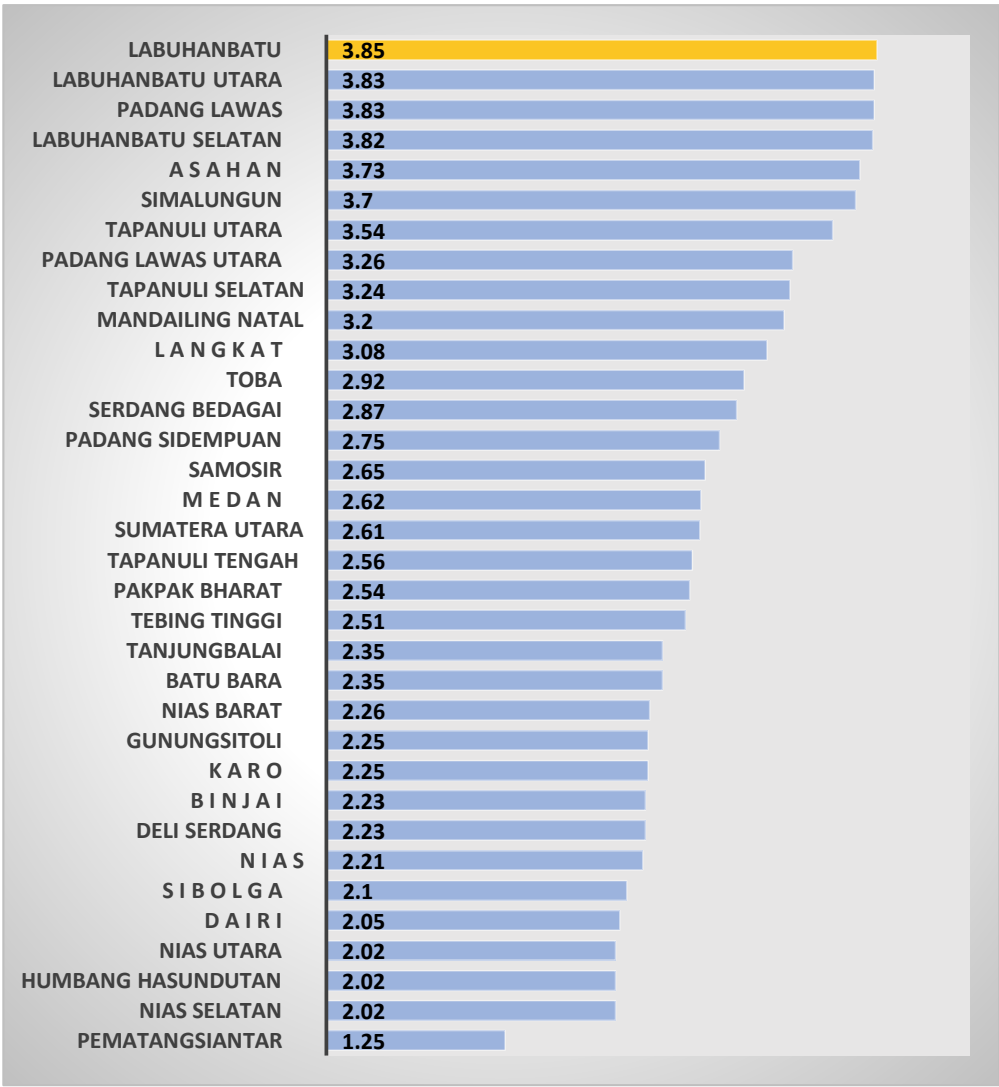
Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijakan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah.

Pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 tergolong pada kategori moderat, berada pada kisaran antara 5,18 persen hingga 5,22 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 melambat sebesar 0,09 persen dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 3,85 persen.

Persentase pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu sepanjang lima tahun terakhir rata-rata berada di atas pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Jika diperbandingkan dengan pertumbuhan Ekonomi Nasional, Kabupaten Labuhanbatu selalu di atas persentase pertumbuhan ekonomi Nasional sepanjang lima tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu berada pada posisi tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 5,22 persen, dan posisi terendah pada tahun 2020 sebesar

0,09 persen. Selama tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu meningkat menjadi 3,85 persen.

Grafik 2.3
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu,
Dibandingkan Dengan kabupaten/kota
Se-Sumatera Utara Tahun 2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu 2022

Jika dibandingkan dengan Daerah setara seperti Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Labuhanbatu secara umum berada di posisi teratas diantara ketiga Daerah tersebut. Dimana pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu berada di atas Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

2.2.2. Struktur Ekonomi

PDRB Kabupaten Labuhanbatu menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha dan sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi subkategori. Pemecahan menjadi subkategori ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017-2021 (Miliar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2017	2018	2019	2020*	2021**
1.	Pertanian,kehutanan,dan perikanan	7.047,77	7.398,82	7.914,23	8.465,90	9.724,26
2.	Pertambangan dan Penggalian	197,85	209,08	221,55	226,56	250,46
3.	Industri pengolahan	10.269,39	11.131,39	11.693,16	12.035,48	13.049,57
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	16,39	17,36	18,87	19,89	20,63
5.	Pengadaan Air,pengolahan sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,48	9,98	10,65	10,95	11,30
6.	Konstruksi	2.616,56	2.780,96	3.046,83	2.979,7	3.129,58
7.	Perdagangan Besar dan Eceran dan Sepeda motor	4.827,05	5.418,87	6.054,30	6.170,04	6.581,07
8.	Transportasi dan pergudangan	516,35	557,38	611,47	619,45	630,70
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	455,90	482,54	508,96	495,15	495,14
10.	Informasi dan komunikasi	191,26	213,71	229,05	242,50	260,98
11.	Jasa keuangan dan Asuransi	369,26	384,38	396,62	401,87	422,92
12.	Real estat	836,99	904,40	958,36	973,76	1002,92
13.	Jasa Perusahaan	51,36	54,92	60,30	62,98	63,23

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2017	2018	2019	2020*	2021**
14.	Admistrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	959,52	1.012,30	1.087,59	1.115,07	1.118,88
15.	Jasa Pendidikan	504,55	550,45	601,78	633,73	644,04
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human	130,49	142,34	158,94	362,73	162,32
17.	Jasa lainnya	31,38	33,39	37,77	37,39	38,90
Produk Domestik Regional Bruto		29.031,57	31.302,58	33.610,43	34.653,18	37.606,88

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu 2022

Terdapat 3 lapangan usaha yang mendominasi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Labuhanbatu yaitu Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 13.049,57 (miliar rupiah), Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 9.724,26 (miliar rupiah), dan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran dan Sepeda Motor sebesar 6.581,07 (miliar rupiah).

Struktur Perekonomian Labuhanbatu tahun 2021 jika berdasarkan PDRB harga Konstan dibandingkan tahun sebelumnya tumbuh sebesar 3,85 persen. Berdasarkan pendekatan produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Pertambang an dan penggalian sebesar 8,99 persen mengikuti meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha konstruksi. Diikuti oleh Lapangan Usaha Pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 6,30 persen dan Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 4,46 persen. Berdasarkan pendekatan pengeluaran, pertumbuhan tertinggi pada komponen Ekspor sebesar 8,17 persen, namun komponen lain mengalami kontraksi. Perkembangan setiap lapangan usaha diuraikan di bawah ini.

a. Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan

Kategori ini mencakup subkategori usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terdiri atas tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan, sub kategori usaha Kehutanan dan Penebangan Kayu, dan subkategori usaha Perikanan. Lapangan usaha ini menjadi salah satu dalam penyerapan tenaga kerja.

Pada tahun 2021, peranan pada kategori atau lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku adalah sebesar 25,86%. Peranan kategori ini mengalami fluktuasi. Tahun 2020, peranan kategori ini sebesar 24,43%.

b. Pengolahan Industri

Kategori ini memiliki peranan dalam sektor perekonomian PDRB Kabupaten Labuhanbatu sebesar 34,73% pada tahun 2020. Peran kategori ini cenderung stabil hingga tahun 2021, yakni sebesar 34,70% persen.

c. Pengadaan Listrik Dan Gas

Kategori Pengadaan Listrik dan Gas, mempunyai peran sebesar 0,06% terhadap perekonomian Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2020, pada tahun 2021 mengalami penurunan yaitu 0,05%. Peran kategori ini dalam struktur perekonomian masih dapat dikatakan cukup stabil.

d. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian tidak termasuk dalam kategori ini. Peranan kategori ini terhadap struktur perekonomian di Kabupaten Labuhanbatu stabil selama 2017-2021 yaitu sebesar 0,03 persen.

e. Konstruksi

Pada tahun 2021 kategori konstruksi mempunyai peran dalam struktur perekonomian sebesar 8,32 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Labuhanbatu. Sedangkan pertumbuhan konstruksi di tahun 2020 besarnya 8,60 persen.

f. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mempunyai peran terhadap PDRB sebesar 17,81 persen. Pada tahun

2020, Pada tahun 2021 kategori ini sebesar 17,50 persen, menurun 0,31 persen dibandingkan tahun 2020.

g. Transportasi dan Pergudangan

Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri dari 6 (enam) sub kategori, yaitu Angkutan Rel, Angkutan Darat, Angkutan Laut, Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Angkutan Udara, serta Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan. Kategori ini peranannya terhadap struktur perekonomian Kabupaten Labuhanbatu sebesar 1,79 persen di tahun 2020. Dan pada tahun 2021 sebesar 1,68 persen.

h. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dalam struktur perekonomian Kabupaten Labuhanbatu sebesar 1,43 persen pada tahun 2020. Dan pada tahun 2021 sebesar 1,32 persen.

i. Informasi dan Komunikasi

Kategori informasi dan komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan kategori ini menjadi indikator kemajuan suatu daerah, terutama jasa telekomunikasi. Peranan kategori ini terhadap PDRB Kabupaten Labuhanbatu tahun 2020 sebesar 0,70 persen dan pada tahun 2021 sebesar 0,69 persen.

j. Jasa Keuangan dan Asuransi

Kegiatan kategori jasa keuangan dan asuransi pada tahun 2021, perannya sebesar 1,12 persen terhadap PDRB Kabupaten Labuhanbatu. Secara umum, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 1,16 persen.

k. Real Estate

Kategori real estate memberikan peran yang relatif stabil bagi PDRB Kabupaten Labuhanbatu dengan peranan sekitar 2,67 persen pada tahun 2021. Laju pertumbuhan ekonomi kategori ini cukup signifikan dengan pertumbuhan selalu di atas 1%.

l. Jasa Perusahaan

Selama tahun 2017 sampai dengan 2020 peran dalam struktur perekonomian di Kabupaten Labuhanbatu kategori jasa perusahaan relatif tidak banyak berubah, yaitu sebesar 0,18 persen. Namun pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 0,17 persen. Hal ini menunjukkan pula peranan kategori ini relatif kecil dibandingkan peranan kategori-kategori lainnya pada perekonomian Kabupaten Labuhanbatu.

m. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Selama tahun 2019 s/d 2020 peranan kategori ini relatif stabil namun menunjukkan sedikit penurunan pada tahun 2021 menjadi 2,98 persen.

n. Jasa Pendidikan

Pada tahun 2021, jasa pendidikan mempunyai peranan 1,71 persen dalam struktur perekonomian Kabupaten Labuhanbatu. Angka ini menurun dibandingkan pada tahun 2020 yang peranannya sebesar 1,83 persen.

o. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Selama tahun 2019-2020 peranannya relatif stabil yaitu sebesar 0,47% tetapi pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 0,43 persen.

p. Jasa Lainnya

Peranan Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kabupaten Labuhanbatu relatif kecil yaitu sebesar 0,11%, tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2021 Peranan Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kabupaten Labuhanbatu hanya sebesar 0,10 persen.

2.2.2.1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik suatu daerah merupakan Jumlah semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut. Sedangkan Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan Pendapatan Domestik. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah seluruh sektor kegiatan ekonomi yang terjadi disuatu daerah pada periode tertentu. Secara umum data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) disajikan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB Kabupaten Labuhanbatu Atas Dasar Harga Berlaku sebagai salah satu pengukur kinerja perekonomian daerah selalu mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

Dari tahun 2017-2021, PDRB Kabupaten Labuhanbatu atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 hanya sebesar Rp. 29.033,57 (miliar rupiah) dan terus meningkat setiap tahunnya pada tahun 2021 PDRB Kabupaten Labuhanbatu atas dasar harga berlaku sebesar 37.606,88 . Demikian juga halnya PDRB berdasarkan harga konstan, mengalami peningkatan dari tahun 2017-2021 seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.15
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2017-2021 Menurut Jenis Pengeluarannya Kabupaten Labuhanbatu (miliar Rupiah).

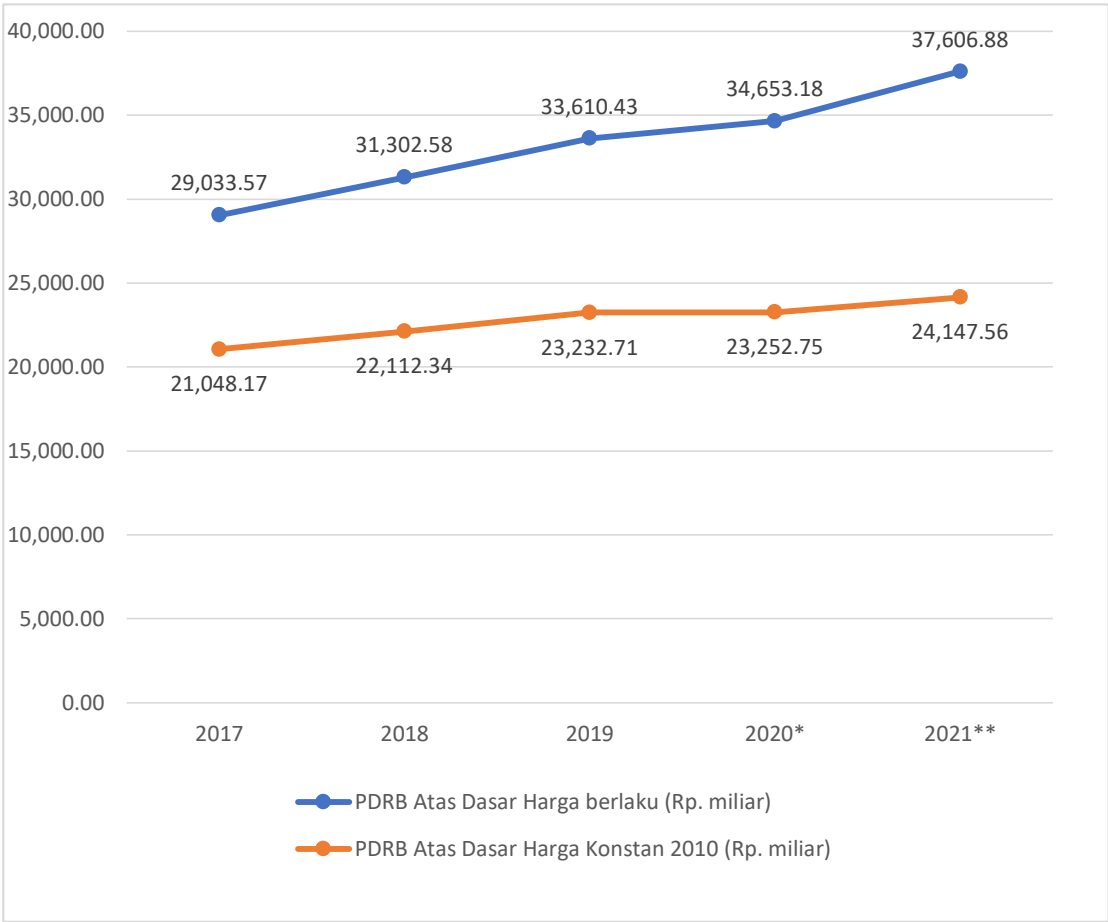
No	TAHUN	PDRB Atas Dasar Harga berlaku (Rp. miliar)	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Rp. miliar)
1	2017	29.033,57	21.048,17
2	2018	31.302,58	22.112,34
3	2019	33.610,43	23.232,71
4	2020*	34.653,18	23.252,75
5	2021**	37.606,88	24.147,56

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu 2022.

Keterangan : * = Angka Sementara

** = Angka Sangat Sementara

Grafik 2.4
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 dan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2021 Menurut Jenis Pengeluarannya Kabupaten Labuhanbatu (miliar Rupiah)



Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kabupaten Labuhanbatu tidak bergeser dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Pengolahan dan konstruksi yang terlihat dari peranan setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Labuhanbatu selama lima tahun.

Penghitungan PDRB yang digunakan untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi secara riil adalah PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan secara berkala. Namun, PDRB atas dasar harga berlaku tetap disajikan untuk melihat dan menelaah perkembangan PDRB sebelum dan sesudah pengaruh harga diperhitungkan. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.16
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Atas Dasar
Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2017-2021 (Persen)

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2017	2018	2019	2020*	2021**
1.	Pertanian,kehutanan,dan perikanan	4,38	5,78	7,02	3,20	6,30
2.	Pertambangan dan Penggalian	5,02	5,31	4,41	-1,23	8,99
3.	Industri pengolahan	4,42	4,80	2,79	-0,61	3,21
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	3,94	1,41	4,30	5,35	3,09
5.	Pengadaan Air,pengolahan sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,67	5,18	6,55	2,21	2,26
6.	Konstruksi	6,79	1,19	6,35	-5,72	2,99
7.	Perdagangan Besar dan Eceran dan Sepeda motor	5,96	6,41	6,47	-1,40	3,28
8.	Transportasi dan pergudangan	8,56	6,50	6,97	-2,10	-0,97
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,60	4,21	4,45	-3,44	-0,16
10.	Informasi dan komunikasi	8,57	8,99	3,90	4,74	4,46
11.	Jasa keuangan dan Asuransi	0,83	2,22	1,40	1,73	2,56
12.	Real estat	7,56	3,35	0,27	1,49	0,25
13.	Jasa Perusahaan	7,46	4,19	2,37	0,76	-0,62
14.	Admistrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	2,52	4,77	5,66	-0,03	0,39
15.	Jasa Pendidikan	4,93	6,55	5,01	2,96	1,29
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human	4,24	4,46	4,13	-1,37	-1,30
17.	Jasa lainnya	4,96	4,26	7,51	-3,61	3,33
Produk Domestik Regional Bruto		5,00	5,06	5,07	0,09	3,85

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Labuhanbatu Tahun 2022.

Keterangan : * = Angka Sementara

** = Angka Perbaikan

2.2.3. Inflasi

Unsur yang layak dipertimbangkan dalam perekonomian wilayah adalah besarnya laju inflasi. Indikator ini pada prinsipnya menggambarkan kenaikan indeks harga konsumen di Kabupaten Labuhanbatu. Pada tahun 2017, 2018, dan 2019, angka inflasi mengalami penurunan masing-masing sebesar 3,1 persen, 2,15 persen, dan 1,5 persen. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan dari 1,54 persen menjadi 2,78 persen. Namun di tahun 2021 turun menjadi 2,12 persen.

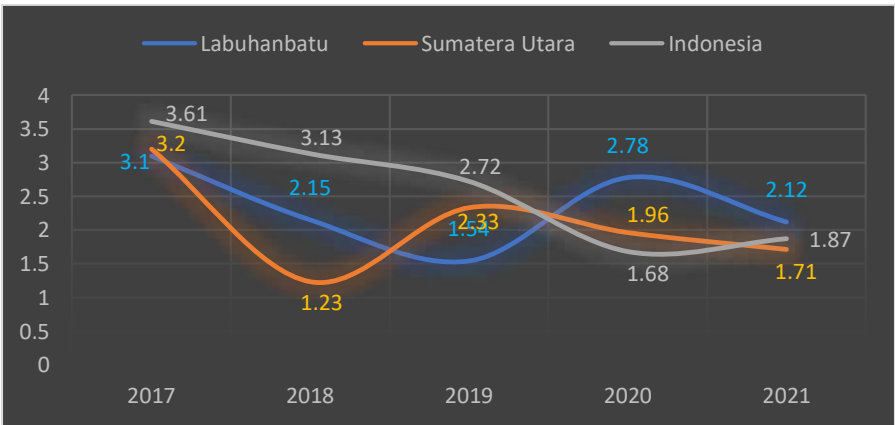
Tabel 2.17
Nilai Inflasi Rata-Rata (%) Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017 – 2021

NO	TAHUN	ANGKA INFLASI
1	2017	3,10
2	2018	2,15
3	2019	1,54
4	2020	2,78
5	2021	2,12

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu 2022

Secara umum inflasi Sumatera Utara Tahun 2020 sebesar 1,71 persen dan inflasi nasional sebesar 1,87 persen. Jika dibandingkan dengan tingkat inflasi Kabupaten Labuhanbatu sebesar 2,12 persen maka tingkat inflasi Kabupaten Labuhanbatu masih di atas inflasi Sumatera Utara dan nasional. Kondisi ini secara dominan dipengaruhi oleh krisis global akibat covid-19 yang berimbas terhadap perekonomian lokal.

Grafik 2.5
Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Labuhanbatu
Dengan Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia
Tahun 2017 – 2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu 2022.

2.2.4. PDRB Perkapita

PDRB Perkapita adalah rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB per kapita diperoleh dengan membagi nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

PDRB Perkapita di Kabupaten Labuhanbatu terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, seiring pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto yang relatif tinggi setiap tahun. Kondisi ini sangat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat, namun demikian variabel pertumbuhan jumlah penduduk sangat berperan dalam besaran angka PDRB perkapita. Bilamana pertumbuhan penduduk di Kabupaten Labuhanbatu lebih tinggi pada pertengahan tahun daripada pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto pada tahun yang sama, maka PDRB Perkapitanya akan semakin kecil dan sebaliknya, bila pertumbuhan jumlah penduduk terjadi lebih lambat, maka PDRB Perkapitanya akan semakin besar dan berpengaruh positif pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.18
Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Labuhanbatu Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2017 – 2021

NO	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020*	2021**
1.	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Ribu Rupiah)	60.662,34	64.345,06	68.012,08	70.162,48	75.216,46
2.	Laju Pertumbuhan	7,13	6,00	5,39	4,69	6,77
3.	PDRB Per Kapita atas Harga Konstan(Ribu Rupiah)	43.979.26	45.453,76	47.012,83	47.079,96	48.296,86
4.	Laju Pertumbuhan	5,00	5,06	5,07	0,09	3,85

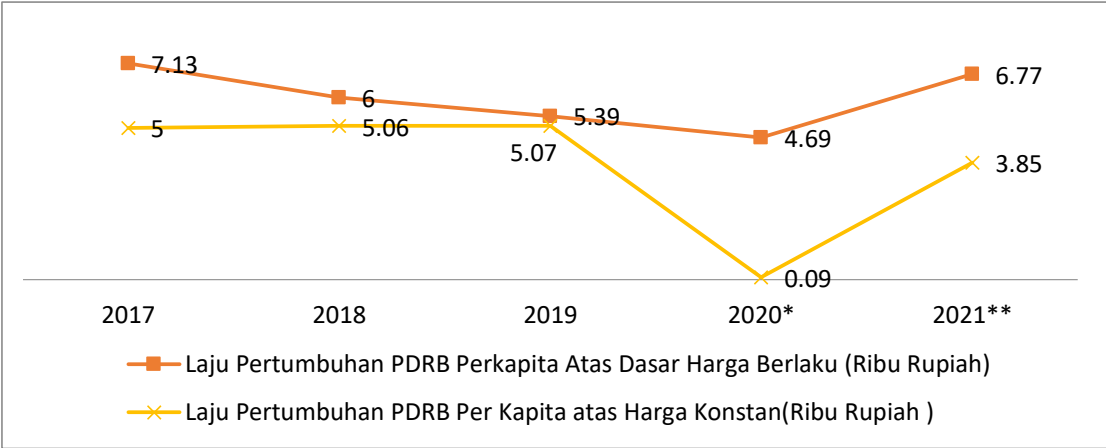
Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Labuhanbatu Tahun 2022.

Keterangan : * = Angka Sementara

** = Angka Perbaikan

Pada tahun 2021 PDRB per Kapita Kabupaten Labuhanbatu atas dasar harga konstan mengalami kenaikan dari tahun 2020 menjadi sebesar 48.296,86 (ribu rupiah), sehingga laju pertumbuhannya menjadi 3,85 persen. Namun PDRB per kapita cukup tinggi, tidak secara umum menggambarkan pemerataan pendapatan di Kabupaten Labuhanbatu.

Grafik 2.6
Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku dan harga konstan di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2017-2021



2.2.5. Indeks Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa. Untuk mengkategorikan tingkat ketimpangan, indeks Gini dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

- Ketimpangan rendah (Indeks Gini < 0,3)
- Ketimpangan sedang (Indeks Gini ≤ 0,3 Indeks Gini ≤ 0,5)
- Ketimpangan tinggi (Indeks Gini > 0,5)

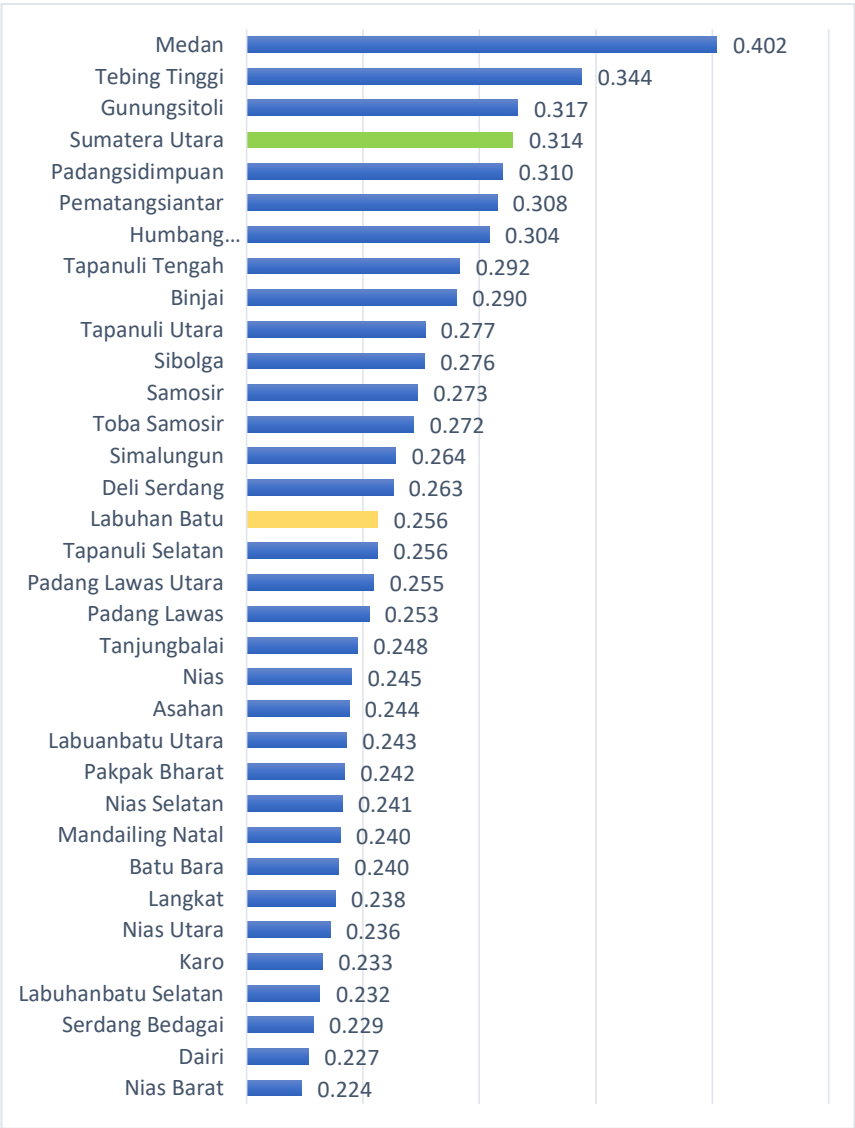
Tabel 2.19
Indeks Gini Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021.

NO	Tahun	Labuhanbatu	Sumatera Utara	Nasional
1	2017	0,280	0,315	0,391
2	2018	0,294	0,318	0,384
3	2019	0,277	0,317	0,380
4	2020	0,271	0,316	0,381
5	2021	0,256	0,315	0,381

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu 2022

Indeks Gini Labuhanbatu dalam lima tahun terakhir terus menunjukkan perbaikan yaitu dari tahun 2017 sebesar 0,280. angka ini lebih besar jika dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 0,256 ini berarti terjadi sedikit penurunan kesenjangan pendapatan diantara penduduk Kabupaten Labuhanbatu dalam 5 (lima) tahun terakhir, tetapi angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan angka gini ratio Provinsi Sumatera Utara dan Nasional yaitu sebesar 0,316 dan 0,381. Hal ini berarti tingkat ketimpangan di Kabupaten Labuhanbatu berada pada kategori sedang.

Grafik 2.7
Gini Rasio Sumatera Utara Menurut Kabupaten/ Kota
Tahun 2021



- Terdapat 3 Kab/Kota dengan Gini Ratio di atas Gini Ratio Sumatera Utara
- Gini Ratio tertinggi tercatat di Kota Medan sebesar 0,402
- Gini Ratio terendah tercatat di Kabupaten Nias Barat sebesar 0,224

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2022

Gini Rasio Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2021 berada di bawah angka gini rasio Provinsi Sumatera Utara dan berada di urutan ke 16 tertinggi dari 33 Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara.

2.2.6. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang kompleks, baik faktor penyebabnya maupun dampaknya. Selain itu, kemiskinan menjadi salah satu indikator yang sangat diperhatikan oleh Pemerintah karena menjadi salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat.

Angka kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2017 sebesar 8,89 persen dan menurun pada tahun-tahun berikutnya yaitu sebesar 8,61 persen, 8,44 persen, 8,44 persen dan 8,74 persen pada tahun 2021. Kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2.20
Kemiskinan di Kab. Labuhanbatu Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka kemiskinan (%)	8,89	8,61	8,44	8,44	8,74
2	Jlh. Penduduk miskin (000)	42,35	41,70	41,52	42,17	45,03
3	Garis Kemiskinan (Rp/kapita)	352.622	368.357	389.402	425.035	457.021

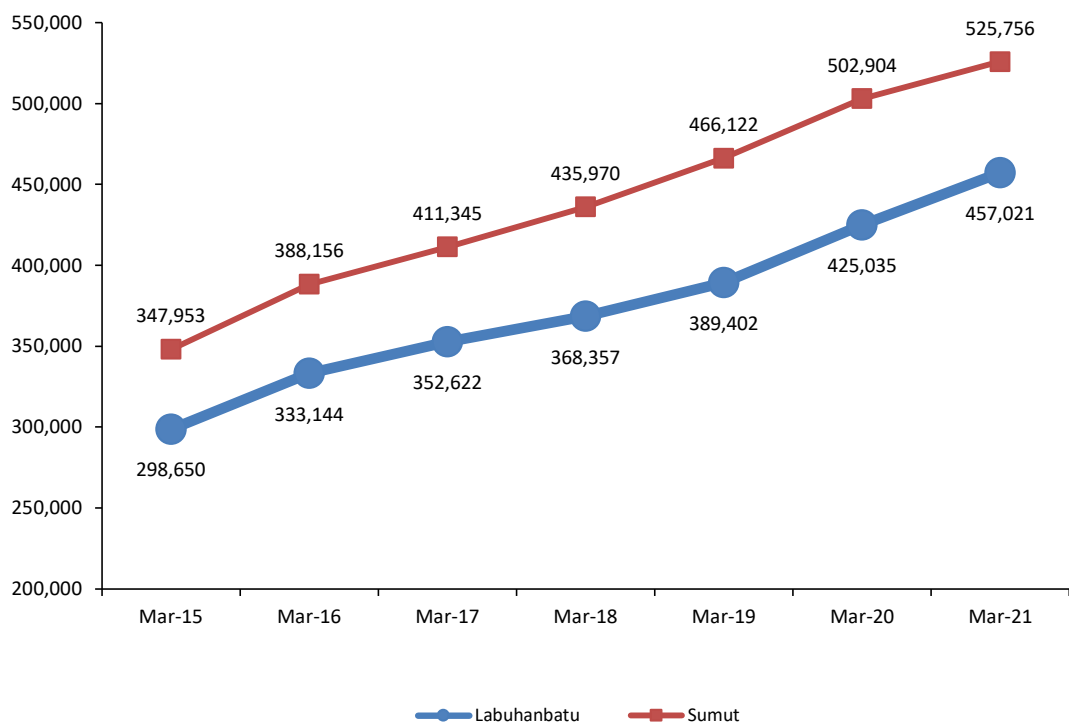
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu, 2022

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Labuhanbatu adalah masalah kemiskinan, dewasa ini pemerintah pusat maupun daerah belum mampu menghadapi atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional, Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kemiskinan merupakan masalah yang masih terus mendapat perhatian serius baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam hal upaya penanggulangan kemiskinan Pemerintah pusat

telah mengeluarkan kebijakan melalui program-program penanggulangan kemiskinan yang harus ditindaklanjuti dengan serius oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Pada tahun 2021 Kabupaten Labuhanbatu berada dibawah garis kemiskinan rata-rata Provinsi Sumatera Utara, dan dapat dilihat pada table dibawah ini :

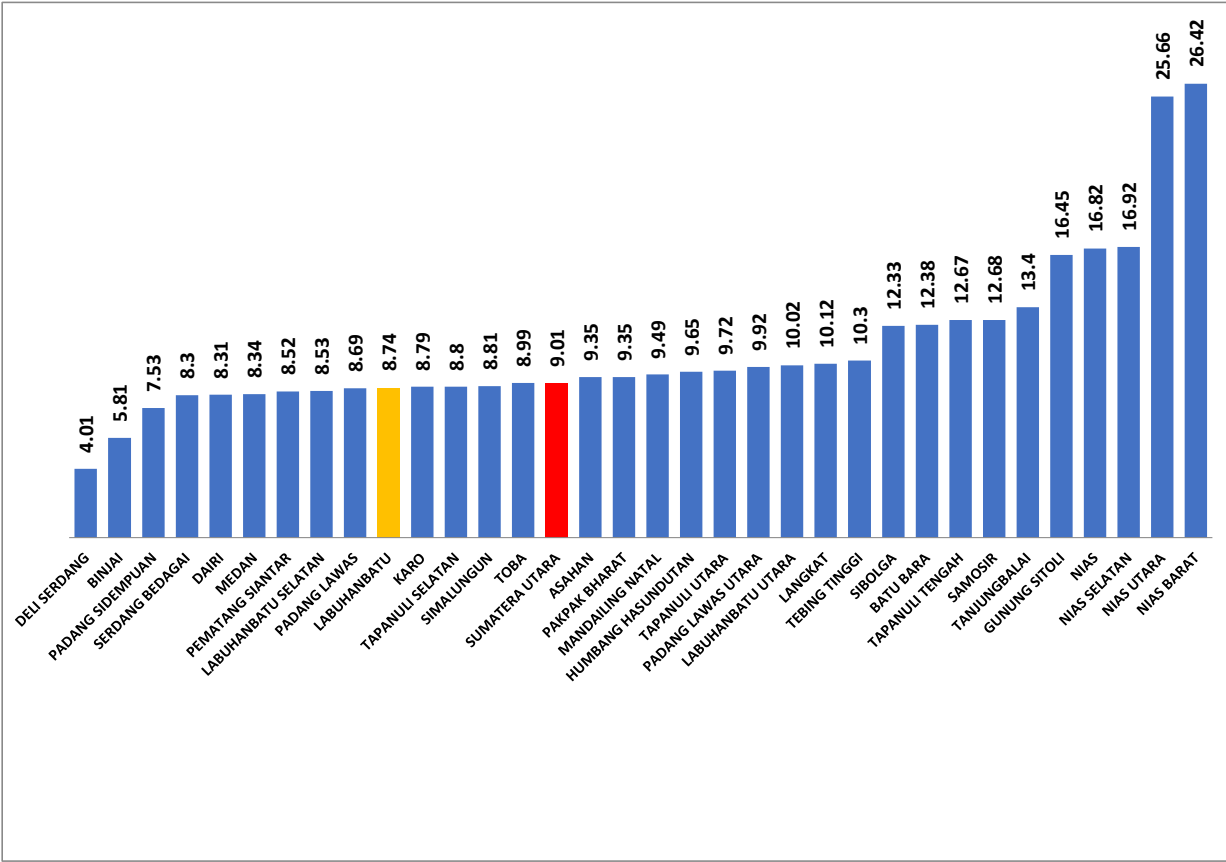
Grafik 2.7
Perkembangan Garis Kemiskinan Labuhanbatu
Dan Sumatera Utara Tahun 2017-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu 2022.

Kabupaten Labuhanbatu terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan dibawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-poor*), pemerintah daerah mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar dari golongan miskin juga meningkatkan efektifitas dan efisiensi berbagai kebijakan dan program pengurangan kemiskinan (Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Sumatera Utara 2015).

Grafik 2.8
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota
di Sumatera Utara Tahun 2021



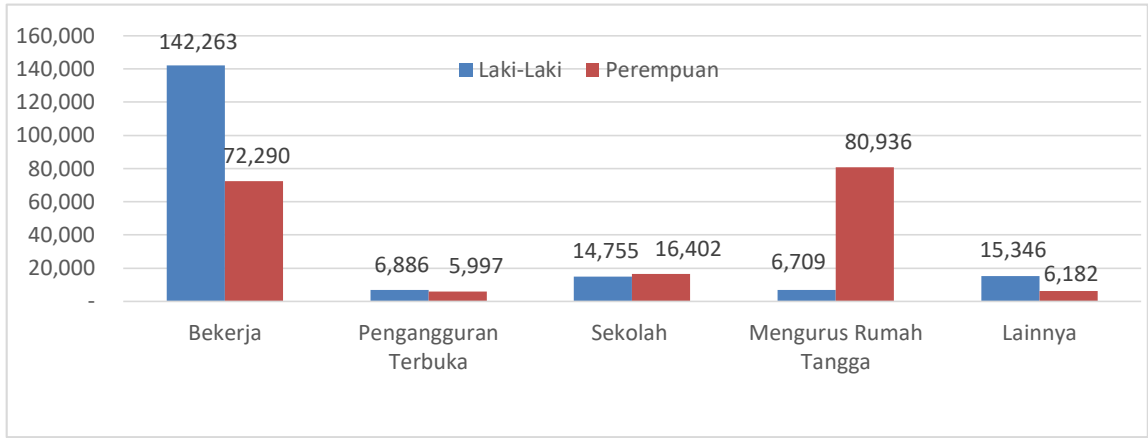
Sumber : Badan Pusat Statistik 2022.

Persentase penduduk miskin yang ada di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2021 sebesar 8,74 persen. Persentase penduduk miskin Kabupaten Labuhanbatu berada di antara persentase penduduk miskin yang ada di kabupaten yang bersebelahan yaitu Labuhanbatu Utara sebesar 10,02 persen dan Labuhanbatu Selatan sebesar 8,53 persen.

2.2.7. Angka Rasio Penduduk Yang Bekerja

Penduduk usia kerja dibagi kedalam dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang dilakukannya, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri atas penduduk yang bekerja dan penduduk yang menganggur atau pengangguran terbuka, sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk yang sekolah, mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya.

Grafik 2.9
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin, 2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu 2022

Pada grafik di atas Penduduk laki-laki umumnya merupakan tulang punggung keluarga sehingga mereka yang seharusnya bekerja, sedangkan pekerjaan rumah tangga lebih dibebankan pada kaum perempuan.

Tabel 2.21
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021

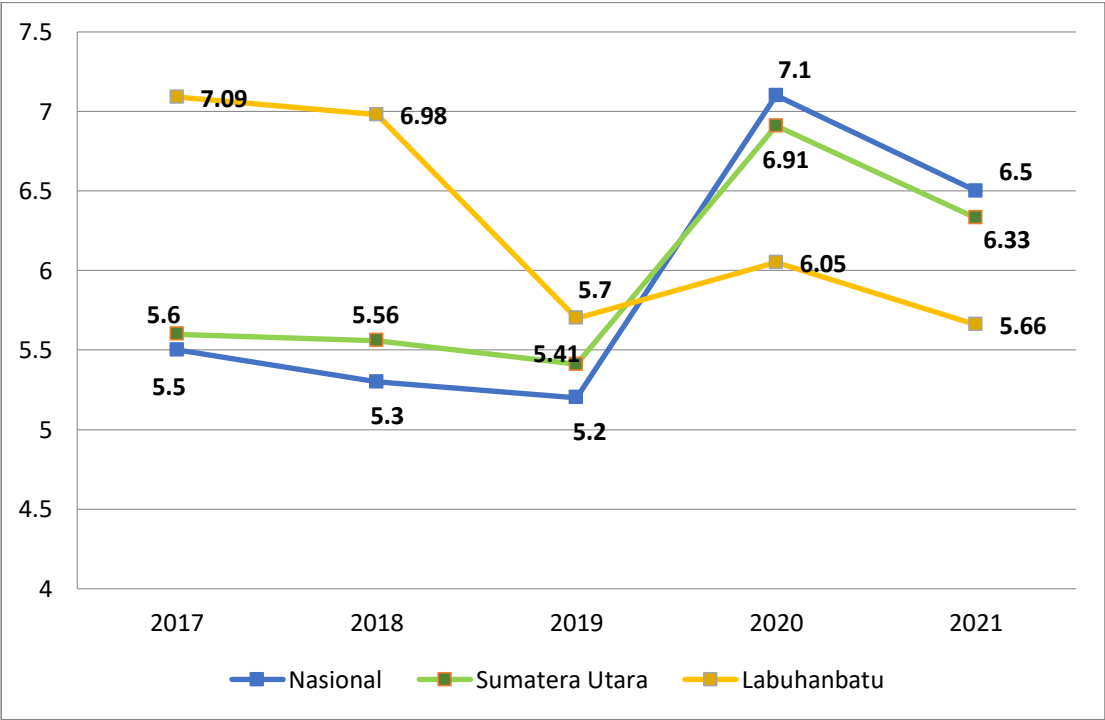
No	Jenis Kegiatan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Angkatan Kerja			
	a. Bekerja	142.263	72.290	214.533
	b. Pengangguran Terbuka	6.886	5.997	12.883
2	Bukan Angkatan Kerja			
	a. Sekolah	14.755	16.402	31.157
	b. Mengurus RT	6.709	80.936	87.645
	c. lainnya	15.346	6.182	21.528
	Jumlah	185.959	181.807	367.766
	TPAK	-	-	61,84
	TPT	-	-	5,66

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu 2022.

Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021, dapat diketahui bahwa dari jumlah penduduk Labuhanbatu yang berumur 15 tahun ke atas laki-laki yang bekerja sebesar 142.263 dan perempuan 72.290.

Salah satu hal yang dapat digunakan untuk melihat kesejahteraan masyarakat adalah angka tingkat pengangguran terbuka. Makin rendahnya angka TPT, berarti kesejahteraan masyarakat makin meningkat, demikian pula sebaliknya. Angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) berguna sebagai salah satu acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Hal ini penting karena tingginya angka pengangguran akan menimbulkan konsekuensi negatif bagi masyarakat, misalnya meningkatnya kriminalitas. Disamping itu, pergerakan indikator ini akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, angka pengangguran (TPT) di Kabupaten Labuhanbatu sebesar 5.66 persen.

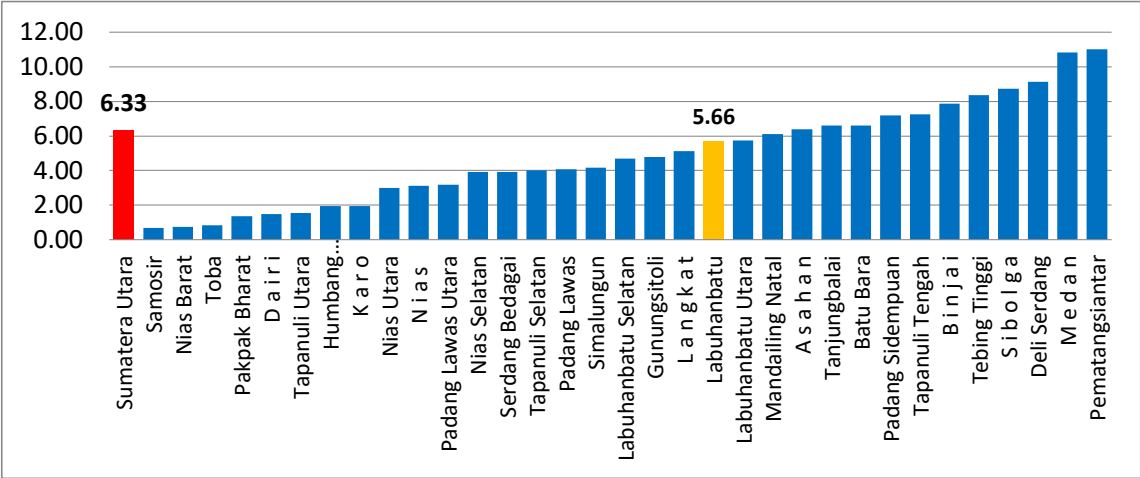
Grafik 2.10
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara dan Indonesia
Tahun 2017-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu 2022.

Dari grafik diatas dijelaskan bahwa TPT Kabupaten Labuhanbatu dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan trend penurunan. TPT Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2021 masih berada dibawah rata-rata PTP Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. TPT Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2019 paling rendah dalam 5 (lima) tahun terakhir, yaitu sebesar 5,7 persen.

Grafik 2.11
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu 2022

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Labuhanbatu berada diantara kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu sebesar 5,66 persen.

Jumlah pencari kerja di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2021 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.22
Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	TERDAFTAR			DITEMPATKAN		
		LK	PR	JLH	LK	PR	JLH
1	SD	1	-	1	-	-	-
2	SMP	1		1	-	-	-
3	SMA	31	13	44	11	5	16
4	SMK	29	9	38	8	9	17
5	D-I/D-II/D-III	7	5	12	1	-	1
6	S-I/D-IV	46	25	71	1	3	4
7	S-II	-	-	-	-	-	-

Sumber :SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022.

Berdasarkan Tabel diatas Pada tahun 2021, Tingkat Pendidikan SMA 44 orang dan SMK 38 orang. Pada Tingkat pendidikan S-I/D-IV yang terdaftar di Kabupaten Labuhanbatu berjumlah 71 orang. Jumlah pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2021 berjumlah 38 orang.

2.2.8. Angka Kriminalitas Yang Ditangani

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu aspek strategis yang perlu dijaga untuk mewujudkan stabilitas daerah. Data lengkap tentang angka kriminalitas di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.23
Angka Kriminalitas Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017 – 2021

No	Jenis Kriminalitas	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kasus Narkoba	740	588	936	202	257
2	Jumlah Kasus Pembunuhan	29	16	19	–	2
3	Jumlah Kasus Seksual	9	5	8	4	12
4	Jumlah Kasus Penganiayaan	63	11	51	15	30
5	Jumlah Kasus Pencurian	122	110	284	147	214
6	Jumlah Kasus Penipuan	6	1	18	4	3
7	Jumlah Kasus Materai, Merk dan Surat	-	0	–	–	2
8	Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	1.337	884	1.629	485	637

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu 2022.

Jumlah kasus narkoba meningkat dari tahun 2020 sebanyak 202 kasus menjadi 257 kasus pada tahun 2021, hal ini disebabkan belum tertanganinya secara optimal peredaran narkoba. Oleh karena itu perlu dilakukan optimalisasi program pembinaan pemuda.

2.2.9. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur empat dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu Angka Harapan Hidup saat lahir, capaian tingkat pendidikan yang terdiri dari Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah dan pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan guna mengukur akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak.

Tabel 2.24
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Labuhanbatu,
Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Kabupaten Labuhanbatu	71,00	71,39	71,94	72,01	72,09
2	Provinsi Sumatera Utara	70,57	71,18	71,74	71,77	72,00
3	Nasional	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29

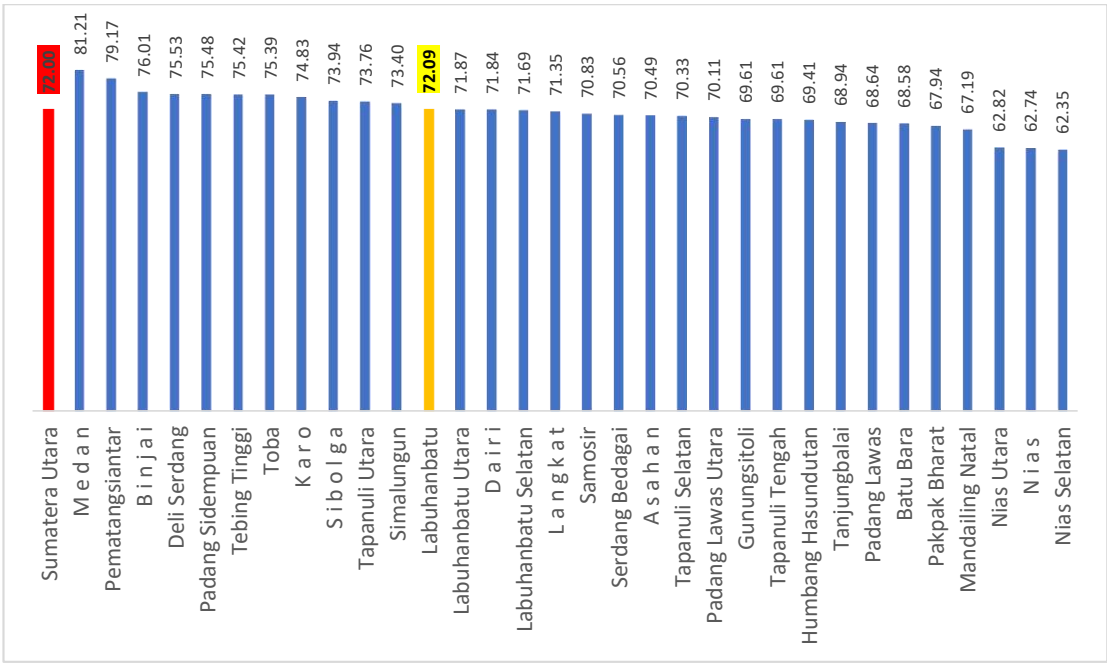
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu 2022.

Perkembangan IPM Kabupaten Labuhanbatu terus meningkat dari tahun 2017 yang hanya sebesar 71,00 menjadi 72,09 di tahun 2021. Dibandingkan dengan IPM rata-rata Provinsi Sumatera Utara, IPM Kabupaten Labuhanbatu diatas rata-rata Provinsi Sumatera Utara yaitu sebesar 72,00.

Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2016 juga mengalami perubahan. Komponen yang ada sekarang berubah menjadi : Angka Harapan Hidup (tetap), Harapan Lama Sekolah (baru), Rata-rata Lama Sekolah (tetap), dan Pengeluaran per Kapita per bulan (baru). Baik secara nilai ataupun secara peringkat, penghitungan ini telah menggeser posisi pemeringkatan IPM secara nasional, termasuk di Sumatera Utara. Namun demikian, terdapat pendekatan baru yang harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu, yaitu dengan dimasukkannya komponen Harapan Lama Sekolah. Angka harapan lama sekolah meskipun memiliki kecenderungan mengalami peningkatan, namun masih belum sesuai harapan yang tentunya berimplikasi terhadap IPM Kabupaten Labuhanbatu.

Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Labuhanbatu dari tahun ke tahun berada diatas Indeks Pembangunan Manusia Sumatera utara dan nasional. Sedangkan jika dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitarnya seperti Kabupaten Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan dan Kabupaten Asahan, maka Kabupaten Labuhanbatu berada diatas ketiga kabupaten/kota tersebut. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.12
IPM Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu, 2022

2.2.10. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

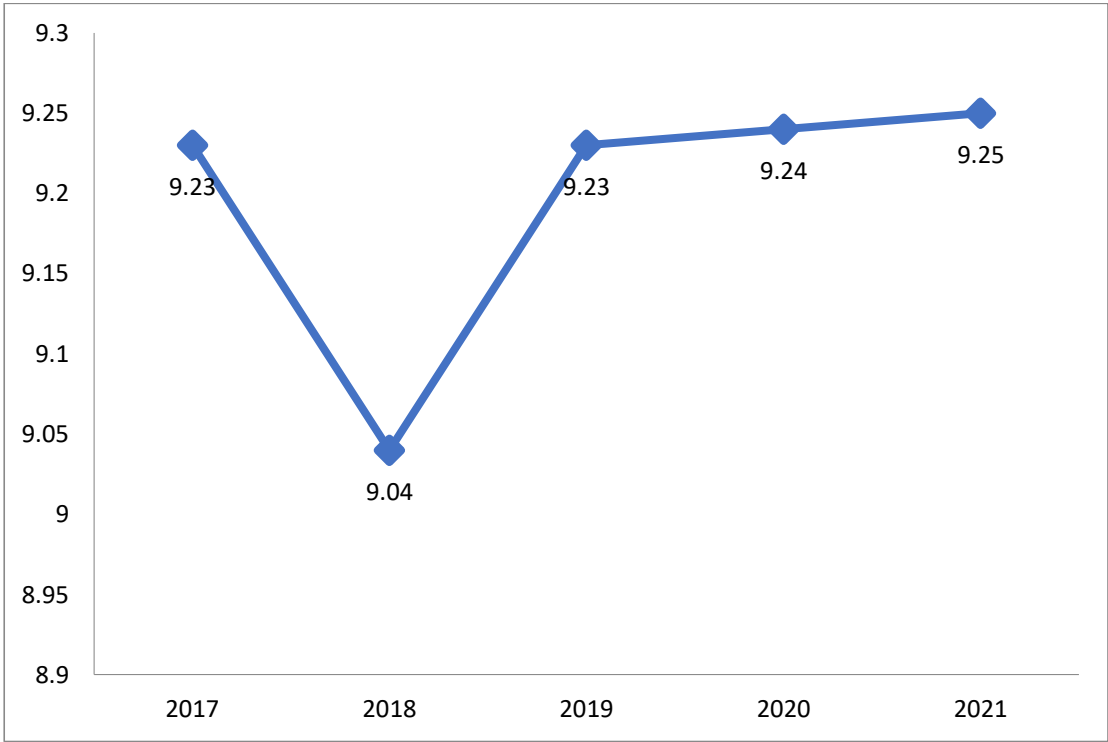
Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.25
Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017 - 2021.

No	Tahun	Rata-rata Lama Sekolah (persen)
1	2017	9,23
2	2018	9,04
3	2019	9,23
4	2020	9,24
5	2021	9,25

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu tahun 2022.

Grafik 2.13
Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017 – 2021



Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu tahun 2022.

Sesuai dengan target pemerintah melalui program nasional wajib belajar 12 tahun, rata-rata lama sekolah penduduk diharapkan dapat mencapai sebesar 12 tahun (Pendidikan Dasar), yaitu minimal tamat jenjang pendidikan SLTP/MTs. Pada tahun 2021, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Labuhanbatu mencapai angka 9,25 lebih tinggi dari angka yang dicapai dari tahun-tahun sebelumnya.

2.2.11. Harapan Lama Sekolah

Salah satu variabel dari komponen IPM adalah angka Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Tabel 2.26
Harapan Lama Sekolah Penduduk Kabupaten
Labuhanbatu Tahun 2017 - 2021.

No	Tahun	Rata-rata Lama Sekolah (persen)
1	2017	12,59
2	2018	12,60
3	2019	12,67
4	2020	12,73
5	2021	12,74

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu tahun 2022.

Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Labuhanbatu selama dua tahun terakhir yaitu tahun 2020 dan 2021 berada di bawah Provinsi Sumatera Utara dan cenderung meningkat di tiap tahunnya yaitu sebesar 13,27. Pada tahun 2021, angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Labuhanbatu sebesar 12,74 tahun, artinya bahwa penduduk Kabupaten Labuhanbatu yang berumur 7 tahun ke atas diharapkan masih bersekolah selama minimal 12 tahun ke depan atau minimal di umur 19 tahun masih sekolah.

2.2.12. Usia Harapan Hidup

Kebijaksanaan peningkatan kesehatan antara lain bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membiasakan diri untuk hidup sehat, sehingga sangat membantu memperpanjang angka harapan hidup penduduk. Di samping itu, adanya peningkatan taraf sosial ekonomi masyarakat memungkinkan penduduk untuk memperoleh perawatan kesehatan yang lebih baik sehingga dapat memperpanjang usia. Sejalan dengan penurunan IMR, maka AHH menunjukkan peningkatan.

Tabel 2.27
Angka Harapan Hidup di Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017 – 2021

NO	Tahun	Angka Harapan Hidup
1	2017	69,44
2	2018	69,60
3	2019	69,86
4	2020	69,93
5	2021	69,95

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu 2022.

Grafik 2.14
Angka Harapan Hidup di Kab. Labuhanbatu
Tahun 2017 – 2021



Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu 2022.

Berdasarkan Grafik diatas dapat dilihat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 angka harapan hidup terus mengalami peningkatan yaitu rata-rata sebesar 0,13 persen per tahun, yang mana pada tahun 2020 menjadi 69,93. Kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 69,95. Kondisi yang positif ini, ditandai dengan meningkatnya pelayanan kesehatan dan peningkatan kondisi sosial ekonomi, sehingga memungkinkan terjadinya perbaikan gizi serta kesehatan dan lingkungan hidup yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan angka harapan hidup.

2.2.13. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduknya pada suatu wilayah. Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.

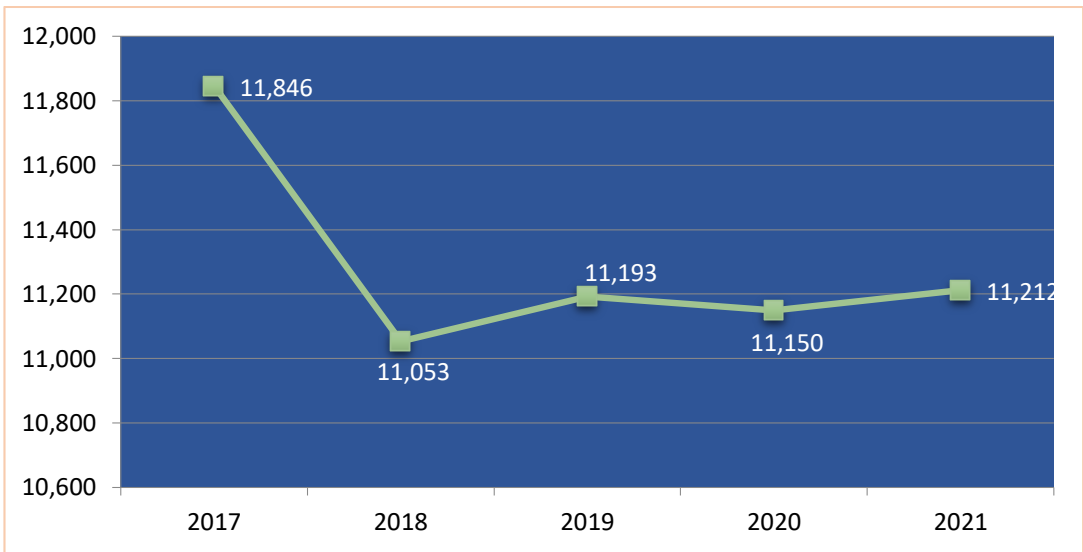
Kesejahteraan penduduk Kabupaten Labuhanbatu terus mengalami fluktuasi sepanjang 2017- 2021. Pada tahun 2017 pengeluaran per kapita Kabupaten Labuhanbatu sebesar Rp.11.846.000, kemudian menurun menjadi Rp.11.053.000 pada tahun 2018. Di tahun 2019 mengalami kenaikan di angka Rp.11.193.000, kemudian di tahun 2020 menurun menjadi Rp.11.150.000. Namun pada tahun 2021 pengeluaran per kapita Kabupaten Labuhanbatu mulai mengalami kenaikan kembali menjadi Rp.11.212.000.

Tabel 2.28
Pengeluaran per Kapita Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017 – 2021 (dalam ribu rupiah)

NO	Tahun	Pengeluaran per kapita
1	2017	11.846
2	2018	11.053
3	2019	11.193
4	2020	11.150
5	2021	11.212

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu 2022

Grafik 2.15
Pengeluaran per Kapita Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017 – 2021 (dalam ribu rupiah)



Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu 2022

2.2.14. Angka Partisipasi Kasar

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM).

APK adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. APK Kabupaten Labuhanbatu sepanjang 5 (lima) tahun terakhir mulai dari tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi, baik di jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK. Berikut diuraikan perkembangan APK Kabupaten Labuhanbatu selama periode 2017-2021.

Tabel 2.29
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017– 2021

NO	Tingkat Pendidikan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	APK SD	107,22	109,51	108,19	106,06	107,75
2	APK SLTP	101,07	90,83	94,56	101,79	92,28
3	APK SLTA/SMK	82,38	94,39	94,72	87,26	99,79
4	Diploma/Sarjana	16,28	11,89	12,69	12,77	9,62

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022.

2.2.15. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) merupakan persentase jumlah penduduk, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkannya. Pendidikan yang ditamatkan seseorang secara langsung menunjukkan tingkat pendidikan yang dicapainya. Sejalan dengan itu, pola dan distribusi pendidikan menurut tingkat pendidikan dapat menggambarkan taraf pendidikan penduduk secara keseluruhan. Semakin tinggi persentase penduduk yang menamatkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi menunjukkan kondisi pendidikan yang semakin membaik. Angka pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2017 s/d 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.30
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah/STTB
Tertinggi yang Dimiliki di Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017 – 2021

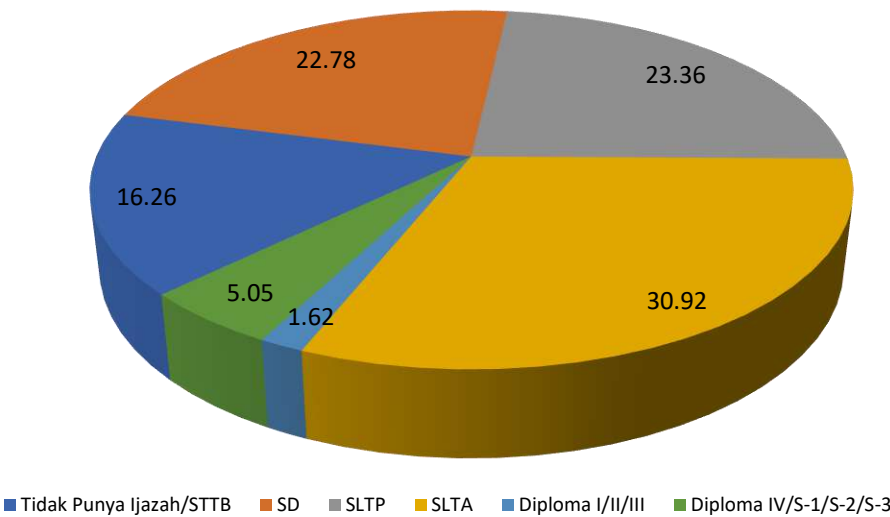
No	Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Tidak Punya Ijazah/STTB	14,83	17,24	17,47	18,82	16,26
2	SD	27,55	27,73	26,34	22,61	22,78
3	SLTP	24,38	22,45	25,69	23,46	23,36
4	SLTA	26,25	27,34	23,96	28,35	30,92
5	Diploma I/II/III	2,57	1,51	1,7	2,44	1,62
6	Diploma IV/S-1/S-2/S-3	4,42	3,73	4,55	4,42	5,05

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu 2022

Tahun 2020 yang berhasil menamatkan pendidikan SD sederajat sampai dengan perguruan tinggi sebesar 81,18 persen, selebihnya sekitar 18,82 persen adalah mereka yang berpendidikan belum/tidak tamat SD dan bahkan tidak sekolah.

Pada tahun 2021, persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas di Kabupaten Labuhanbatu yang belum/tidak tamat SD dan bahkan tidak sekolah menurun sebesar 16,26 persen, sedangkan yang berhasil menamatkan pendidikan mulai dari tingkat SD sederajat sampai dengan perguruan tinggi meningkat sebesar 2,56 persen dari tahun 2020 menjadi sebesar 83,74 persen.

Grafik 2.16
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021



Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu 2022

2.2.16. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu.

Tabel 2.31
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021

No	Tingkat Pendidikan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	SD/MI	97,32	99,79	99,37	99,21	99,23
2	SLTP/MTs	86,83	85,50	86,94	86,14	86,17
3	SLTA/MA	64,65	67,24	68,22	69,80	70,59

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu 2022

Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Labuhanbatu dari tahun 2017 s/d 2021 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 APM untuk tingkat pendidikan SD/MI sebesar 99,23 persen. Begitu juga dengan tingkat pendidikan SLTP/MTs/Paket B meningkat sebesar 86,17 persen dan untuk jenjang pendidikan SLTA/MA sebesar 70,59 persen. Berikut ini diuraikan gambaran mengenai perkembangan APK Kabupaten Labuhanbatu selama periode 2017-2021.

2.2.17. Angka Kematian Bayi (AKB)

Kematian bayi merupakan kejadian kematian yang terjadi pada periode sejak bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Kematian bayi dipengaruhi oleh jumlah kematian neonatal, yang merupakan masalah yang kontribusinya sangat tinggi terhadap kematian bayi. Penyebab kematian neonatal antara lain adanya infeksi (pneumonia, tetanus, diare), prematur/BBLR, dan kelainan congenital. Status kesehatan bayi tersebut sangat terkait dengan beberapa faktor ibu selama hamil dan ibu melahirkan, seperti rendahnya persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, rendahnya pemeriksaan selama masa kehamilan, dan juga status gizi ibu hamil yang masih rendah.

Angka Kematian Bayi dihitung berdasarkan jumlah kematian bayi (0-11 bulan) per 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi (AKB) dari tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi. Angka Kematian Bayi tertinggi terjadi pada tahun 2018 dan 2019 sebesar 6 per 1.000 kelahiran hidup dan terendah pada tahun 2020 dan 2021 sebesar 3 per 1.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Bayi berbanding terbalik dengan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB). Jika tren Angka Kematian Bayi di suatu wilayah cenderung meningkat maka trend Angka Kelangsungan Hidup Bayi akan semakin menurun. Angka Kelangsungan Hidup Bayi dari tahun 2017 sampai 2021 per 1.000 kelahiran mengalami fluktuasi seiring dengan naik turunnya Angka Kematian Bayi. Angka Kelangsungan Hidup Bayi terendah terjadi pada tahun 2018 dan 2019 dengan angka 994 bayi per 1.000 kelahiran hidup dan tertinggi terjadi pada tahun 2020 dan 2021 dengan angka 997 dan 998 bayi per 1.000 kelahiran hidup. Adapun penyebab Angka Kematian Bayi di Kabupaten Labuhanbatu diantaranya disebabkan oleh kasus BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah), asfiksia, kelainan kongenital, kelainan saluran pencernaan, pnemonia, diare dan adanya penyakit penyerta lainnya.

Tabel 2.32
Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)
di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017– 2021

No	Tahun	AKB per 1000 kelahiran	AKHB per 1000 kelahiran
1	2017	5,0	995
2	2018	5,9	994
3	2019	5,6	994
4	2020	3,0	997
5	2021	2,5	998

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022

2.2.18. Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup (KH). AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan balita, tingkat pelayanan kesehatan pada balita dan kondisi sosial, ekonomi dan sanitasi lingkungan tempat balita tinggal.

Tabel 2.33
Angka Kematian Balita (AKABA) Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017 – 2021

No	Tahun	Jumlah Kematian Ibu
1	2017	5,14
2	2018	5,89
3	2019	0,57
4	2020	2,96
5	2021	2,65

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022

Capaian AKABA dalam kurun waktu Tahun 2017-2021 cenderung berfluktuasi. AKABA tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 5,89 per 1.000 KH kemudian menurun menjadi 0,57 per 1.000 KH pada Tahun 2019. Namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 2,96 per 1.000 KH. Dan kembali menurun pada tahun 2021 menjadi 2,65 per 1.000 KH. Tingginya Angka Kematian Balita (AKABA) di Kabupaten Labuhanbatu disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya disebabkan oleh adanya penyakit penyerta pada Balita seperti ISPA, Diare, DBD, Campak ataupun kombinasi dari penyakit menular lainnya serta kurangnya pemahaman orang tua tentang deteksi dini balita sakit.

Rasio Posyandu Terhadap Jumlah Balita

Rasio posyandu terhadap jumlah balita di perlukan dalam upaya peningkatan fasilitasi pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan.Rasio posyandu per satuan balita adalah ketersediaan jumlah posyandu terhadap jumlah balita. Rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.34
Rasio Posyandu per Satuan Balita di Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Posyandu	540	540	540	541	548
2	Jumlah Balita	54.991	54.991	54.538	54.295	50.207
3	Rasio	1 : 101	1 : 101	1 : 101	1:100	1:92

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Rasio Jumlah posyandu pada tahun 2017 sampai tahun 2019, satu unit posyandu melayani 101 balita dan meningkat menjadi 100 balita pada tahun 2020. Pada tahun 2021 satu unit posyandu dapat melayani 92 balita. Rasio ideal nasional untuk rasio posyandu per satuan balita adalah satu unit posyandu melayani seratus orang balita. Hal ini berarti bahwa jumlah posyandu di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2021 telah ideal dan perlu dipertahankan.

2.2.19. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) menggambarkan jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh, dll di setiap 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu mencerminkan risiko yang dihadapi ibu-ibu selama kehamilan dan melahirkan yang dipengaruhi status gizi ibu, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri. Tingginya Angka Kematian Ibu menunjukkan keadaan sosial ekonomi yang rendah dan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri yang rendah pula.

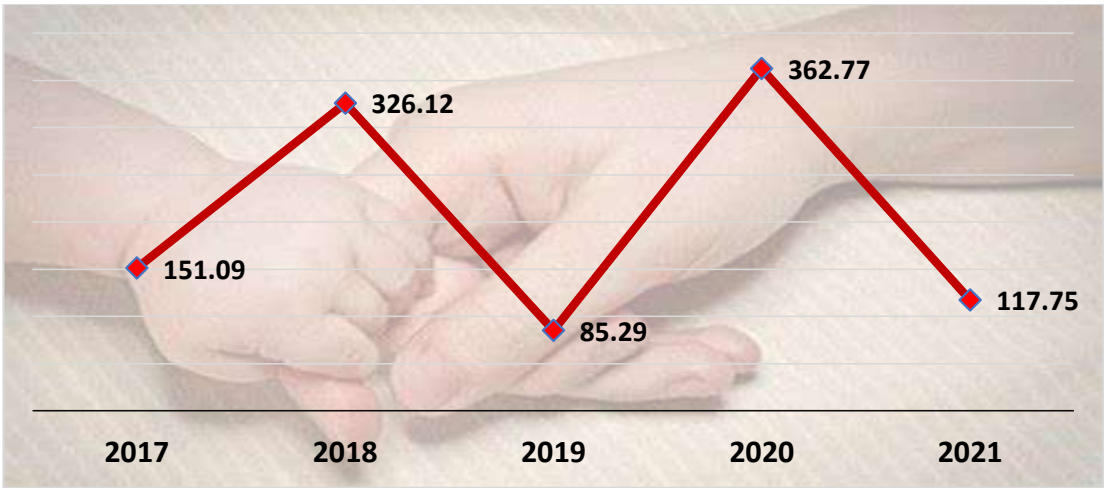
Tabel 2.35
Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021

No	Tahun	Angka Kematian Ibu
1	2017	151,09
2	2018	326,12
3	2019	85,29
4	2020	362,77
5	2021	117,75

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2021

Kondisi Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Labuhanbatu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2017 AKI sebesar 151,09 dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 326,12, namun pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu berhasil menurunkan jumlah kasus kematian ibu menjadi 85,29. Pada Tahun 2020 angka kematian ibu di Kabupaten Labuhanbatu kembali mengalami peningkatan menjadi 362,77 dan pada tahun 2021 pemerintah Kabupaten Labuhanbatu kembali dapat menekan angka kematian ibu menjadi 117,75. Adapun penyebab langsung kematian Ibu di Kabupaten Labuhanbatu diantaranya disebabkan karena kasus pre eklamsia berat, perdarahan dan emboli air ketuban.

Grafik 2.17
Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021



2.2.20. Morbiditas

Angka Kesakitan/Morbiditas/Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan merupakan indikator yang dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan, yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata.

Tabel 2.36
Morbiditas/ Angka Kesakitan di Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017 – 2021

No	Tahun	Morbiditas (%)
1	2017	14,31
2	2018	28,69
3	2019	30,02
4	2020	27,43
5	2021	26,97

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu 2022

Angka kesakitan di Kabupaten Labuhanbatu dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif. Pada tahun 2017, angka kesakitan berada di angka 14,31 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar 28,69 dan 30,02. Namun pada tahun 2020 sampai dengan 2021 Angka tersebut terus mengalami penurunan sebesar 27,43 dan 26,97 yang dapat dilihat pada tabel 2.36. di atas.

2.2..21 Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang

Prevalensi balita gizi buruk dan Kurang merupakan salah satu indikator untuk tingkat derajat kesehata masyarakat di suatu daerah/wilayah. Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang di Kabupaten Labuhanbatu selama periode 2016- 2020, dapat dilihat tabel pada tabel berikut:

Tabel 2.37
Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang di Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017 – 2021

No	Tahun	Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang (persen)
1	2017	2,91
2	2018	4,62
3	2019	1,45
4	2020	9,05
5	2021	5,05

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2017 prevalensi balita gizi buruk dan kurang di Kabupaten Labuhanbatu mencapai 2,91 persen, dan Hasil dari Pemantauan Status Gizi Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu angka prevalensi balita gizi buruk dan kurang di Kabupaten Labuhanbatu mencapai 5,05 persen. Angka ini jika dibandingkan dengan standar WHO; 5-9% rendah, 10-19% sedang/medium, 20-39% tinggi, >40% sangat tinggi, maka prevalensi balita gizi buruk dan kurang di Kabupaten Labuhanbatu berada pada kategori rendah. Hal ini tetap menjadi fokus prioritas ke depan Program Pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan masalah gizi masyarakat terutama pada anak balita.

Dampak gizi buruk pada balita adalah salah satu penyebab stunting. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Kabupaten Labuhanbatu menjadi lokus prioritas pencegahan dan penanggulangan stunting karena diemukannya kasus stunting pada tahun 2018-2021 sebesar 452 kasus, 398 kasus, 237 kasus, dan 284 kasus (sumber: SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2021). Dengan adanya kasus stunting ini Kabupaten Labuhanbatu perlu mendukung Strategis Nasional Percepatan Penurunan Stunting.

2.2.22. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan nilai IPG.

Tabel 2.38
Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017 – 2021

No	Tahun	IPG
1	2017	90,79
2	2018	91,02
3	2019	91,05
4	2020	90,86
5	2021	90,88

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2022

Perkembangan IPG Kabupaten Labuhanbatu sepanjang tahun 2017-2021 cenderung relatif stabil. IPG Kabupaten Labuhanbatu masih berada di atas rata-rata Provinsi Sumatera Utara yang sebesar 90,73 pada tahun 2021, IPG Kabupaten Labuhanbatu sebesar 90,88 mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia perempuan di Kabupaten Labuhanbatu semakin membaik khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan dan upaya peningkatan pendapatan.

2.2.23. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2017 sampai dengan 2021, nilai IDG Kabupaten Labuhanbatu berfluktuasi. Pada tahun 2017, nilai IDG

Kabupaten Labuhanbatu sebesar 77,74, kemudian menurun hingga tahun 2019 yaitu sebesar 71,47 dan pada tahun 2021 mulai mengalami peningkatan menjadi 71,96.

Tabel 2.39
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017 – 2021

No	Tahun	IPG
1	2017	77,74
2	2018	75,49
3	2019	71,47
4	2020	71,52
5	2021	71,96

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2022

2.2.24. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan keseluruhan gagasan, perilaku dan karya cipta manusia yang dapat menuntun kehidupan manusia agar lebih bermartabat. Pembangunan kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya baru di era globalisasi. Pengaruh budaya global dapat disesuaikan dengan identitas nasional yang mengandung nilai-nilai luhur yang sesuai dengan falsafah Pancasila.

Sebagai wahana untuk melestarikan seni dan budaya yang ada di masyarakat, Kabupaten Labuhanbatu setiap tahun menyelenggarakan festival seni dan budaya bagi warga masyarakat. Pada urusan kebudayaan, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dilaksanakan penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata melalui kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah dengan menggelar pesta budaya lokal yang melibatkan semua etnis di Kabupaten Labuhanbatu. Sarana penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya dimaksud diatas antara lain ; Gedung Kesenian Kabupaten Labuhanbatu di Jalan Pramuka Rantauprapat, Gedung Nasional di Jalan

Ahmad Yani Rantauprapat dan Lapangan Ika Bina Jalan Ahmad Yani Rantauprapat.

Tabel 2.40
Penyelenggaraan festival seni/sarana di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017- 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	3	3	3	3	3
2	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	2	2	2	2	5

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022.

2.2.25. Pemuda Dan Olahraga

Kegiatan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Labuhanbatu setiap tahun kerap dilaksanakan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta. Di antaranya Turnamen Bola Kaki, Tournamen Volly, Tournamen Basket, Tournamen Bola Futsal, Tournamen Badminton, Tournamen Bilyard, Tinju, Atletik, Maraton dan Motor Cross. Kegiatan ini selalu disambut meriah oleh para pemuda dalam menuangkan hoby dan mengejar prestasi dalam bidang olahraga.

Tabel 2.41
Jumlah Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017- 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah kegiatan kepemudaan	3	3	-	2	2
2.	Jumlah Kegiatan olah raga	5	6	6	4	3

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022.

Tabel 2.42
Jumlah Organisasi Pemuda di Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017- 2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Organisasi Pemuda	50	50	50	50	49

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022.

2.3. Aspek pelayanan umum

Aspek pelayanan umum menjelaskan kondisi pelayanan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi jangkauan pelayanan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib

2.3.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib dengan Pelayanan Dasar

2.3.1.1.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu bidang penting dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia dalam pembanguna. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan modal yang sangat berharga bagi pembangunan, baik pembangunan manusia itu sendiri maupun pembangunan ekonomi. Pendidikan yang baik akan membentuk generasi bangsa yang terampil, cerdas, kreatif serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi guna menghadapi tantangan global.

Masyarakat yang mendapatkan pendidikan yang baik akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam menghasilkan barang dan jasa, melakukan inovasi teknologi, menjaga keteraturan sosial, mengembangkan perekonomian dan pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas hidup manusia secara keseluruhan.

Data mengenai pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk melihat kualitas penduduk. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan di suatu daerah dikaitkan oleh beberapa indikator pendidikan sebagai berikut:

a. **Angka Partisipasi Sekolah (APS)**

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dengan memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah, sehingga naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan semakin meningkatnya partisipasi sekolah. karena kenaikan tersebut dapat dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan bertambahnya infrastruktur sekolah.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan perbandingan antara jumlah siswa pada kelompok usia pendidikan yang bersekolah sesuai tingkat pendidikan dengan jumlah penduduk kelompok usia sekolah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.43
Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017 – 2021

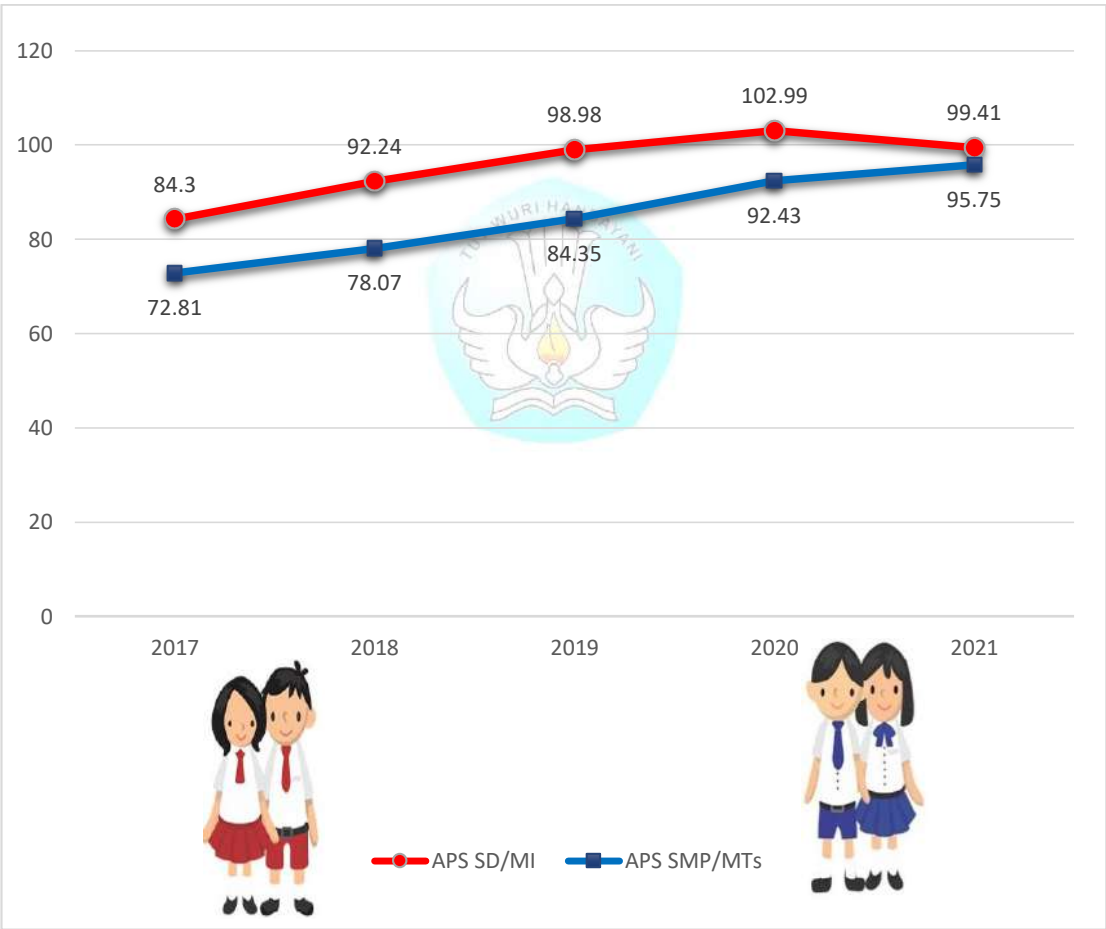
No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	SD/MI					
1	Jumlah murid Usia 7-12 tahun	53.566	58.471	62,768	65,089	62,277
2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	63.544	63.388	63,409	63,202	62,647
3	APS SD/MI	84,30	92,24	98.98	102.99	99,41
2	SMP/MTs					
1	Jumlah murid Usia 13-15 tahun	23.531	24.893	26,858	29,340	30,420
2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	32.319	31.884	31,840	31,744	31,770
3	APS SMP/MTs	72,81	78,07	84,35	92,43	95,75

Sumber :SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022. (dinas pendidikan)

Pada tahun 2017 Angka Partisipasi Sekolah untuk murid usia 7-12 tahun sebesar 84,30 persen. Namun terjadi kenaikan pada tahun 2018 menjadi sebesar 92,24 persen. Kenaikan Angka Partisipasi Sekolah ini mengindikasikan bahwa sudah mencukupi kesadaran masyarakat terhadap program pemerintah tentang wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Pada tahun 2021 menjadi sebesar 99,41 persen.

Angka Partisipasi Sekolah pada tahun 2017 untuk murid usia 13-15 tahun sebesar 72,81persen dan pada tahun 2018 sebesar 78,07 persen yang artinya mengalami peningkatan sebesar 5,26 persen. Pada tahun 2021 menjadi sebesar 95,75 persen.

Grafik 2.18
Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017 – 2021



b. Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah adalah jumlah sekolah pada tingkat pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.44
Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah
di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021

No	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1	SD/MI					
1	Jumlah sekolah	325	323	328	327	327
2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	63.544	63.388	63,409	63,202	62.647
3	Rasio	1:195	1:196	1:193	1:193	1:192
2	SMP/MTs					
1	Jumlah sekolah	127	127	135	133	135
2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	32.319	31.884	31,840	31,744	31.770
3	Rasio	1:254	1:251	1:235	1:239	1:235

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu, 2022
SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022..(dinas pendidikan)

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs masih fluktuatif karena adanya perubahan jumlah sekolah dan jumlah penduduk di Kabupaten Labuhanbatu.

d. Rasio Guru terhadap Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru pada tingkat pendidikan terhadap jumlah murid kelompok usia pendidikan. Rasio guru terhadap murid di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.45
Rasio Guru terhadap Murid di Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017 – 2021

No	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
I	SD/MI					
1	Jumlah Guru	2.743	2.325	3.449	3,765	3.615
2	Jumlah Murid	61.116	64.498	64.784	63.989	62.327
3	Rasio	1:22	1:28	1:19	1:17	1:17
II	SMP/MTs					
1	Jumlah Guru	1.747	1.567	1.818	2.057	2.150
2	Jumlah Murid	27.150	28.652	29.363	30.428	30.304
3	Rasio	1:16	1:18	1:16	1:15	1:14

Sumber : Badan Pusat StatistikKabupaten Labuhanbatu 2022.

Rasio guru terhadap murid menggambarkan ketersediaan tenaga pengajar untuk melayani atau membimbing murid yang ada. Dengan melihat rasio ini maka dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan tenaga pengajar dalam memberikan pelayanan pendidikan sekaligus juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Pada tahun 2021 rasio guru terhadap murid untuk jenjang pendidikan SD/MI adalah 1:17 dan jenjang pendidikan SMP/MTs adalah 1:14. Dapat diartikan bahwa untuk jenjang pendidikan SD/MI satu guru melayani 17 murid dan jenjang pendidikan SMP/MTs satu guru melayani 14 murid. Berdasarkan ketetapan Kementerian Pendidikan bahwa rasio standar atau ideal untuk jenjang pendidikan SD/MI adalah 1:25 dan jenjang pendidikan SMP/MTs adalah 1:16,Dengan demikian rasio guru terhadap murid di Kabupaten Labuhanbatu untuk semua jenjang pendidikan sudah memenuhi standar.

e. **Penduduk berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)**

Penduduk berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) adalah jumlah capaian kinerja penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf di Kabupaten Labuhanbatu terhadap jumlah seluruh penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf di Kabupaten Labuhanbatu. Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.46
Penduduk Berusia > 15 tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)
di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah capaian kinerja penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf di Kabupaten Labuhanbatu	383.323	288.641	331.302	349.520	-
2	Jumlah seluruh penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf di Kabupaten Labuhanbatu	383.515	288.823	494.178	352.232	-
3	Rasio	99,94	99,93	99,78	99,23	98,75

Sumber :Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu 2022

Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 penduduk berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) di Kabupaten Labuhanbatu tidak mencapai rasio 100 persen.

f. **Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik**

Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik adalah jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik terhadap jumlah seluruh sekolah SD/MI. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.47
Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik
di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	278	290	-	-	219
2	Jumlah seluruh sekolah SD/MI	325	323	328	327	327
3	Rasio	85,54	89,78	-	-	66,97

Sumber :SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022. (dinas pendidikan)

Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik di Kabupaten Labuhanbatu terus meningkat dari tahun 2017 sebesar 85,54 persen dan mencapai rasio 89,78 persen pada tahun 2018. Namun ditahun 2021 menjadi 66,97 persen.

g. Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik

Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik adalah jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik terhadap jumlah seluruh sekolah SMP/MTs. Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.48
Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik
di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	-	-	-	-	80
2	Jumlah seluruh sekolah SMP/MTs	127	127	135	133	135
3	Rasio	-	-	-	-	59,50

Sumber :SIPDKabupaten Labuhanbatu 2021 (dinas pendidikan)

Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2021 mencapai rasio 59,50 persen.

h. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana merupakan suatu alat atau bagian yang memiliki peran sangat penting bagi keberhasilan dan kelancaran suatu proses, termasuk juga dalam lingkup pendidikan. Sarana dan prasarana adalah fasilitas yang mutlak dipenuhi untuk memberikan kemudahan dalam menyelenggarakan suatu kegiatan walaupun belum bisa memenuhi sarana dan prasarana dengan semestinya.

Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien. Prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti : halaman, kebun atau taman sekolah, jalan menuju ke sekolah, tata tertib sekolah, dan sebagainya.

Tabel 2.49
Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017 - 2021

No.	Sarana dan prasarana	SD/MI					SMP/MTs				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah sekolah	452	450	328	328	328	127	127	133	133	133
2	Jumlah ruang kelas	2113	2325	2596	2596	2577	517	898	861	861	849
3	Jumlah ruang perpustakaan	173	173	187	187	190	49	49	92	92	92
4	Lapangan olahraga	199	197	210	210	210	15	15	54	54	54
5	UKS	40	40	65	65	65	15	15	58	58	58
6	Laboratorium	14	11	9	9	9	44	44	134	134	136
7	Ruang keterampilan	10	10	2	2	2	12	12	15	15	15
8	Ruang BP	-	-	9	9	9	21	21	61	61	61
9	Ruang serbaguna	-	2	8	8	8	2	2	0	0	0
10	Tempat ibadah	-	-	38	38	38	24	24	61	61	61
11	Toilet	724	759	606	606	876	378	378	586	586	586
12	Air bersih	180	180	220	220	220	67	67	131	131	131
13	Listrik	180	180	328	328	328	50	50	133	133	133

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu, 2022

Departemen Agama Kabupaten Labuhanbatu, 2022

Lanjutan Tabel 2.49...

No.	Sarana dan prasarana	SMA/MA					SMK				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah sekolah	60	61	61	62	62	31	31	31	31	31
2	Jumlah ruang kelas	475	472	464	473	479	288	306	321	323	328
3	Jumlah ruang perpustakaan	48	49	48	50	50	24	23	23	23	23
4	Lapangan olahraga	77	79	78	80	82	39	40	40	40	40
5	UKS	40	41	41	42	44	20	20	20	20	21
6	Laboratorium	98	90	100	104	104	46	48	47	48	48
7	Ruang keterampilan	5	5	5	6	6	11	11	13	13	12
8	Ruang BP	26	26	26	27	28	21	21	21	21	19
9	Ruang serbaguna	8	7	8	8	9	17	17	17	17	17
10	Tempat ibadah	42	43	43	44	45	23	23	25	24	25
11	Toilet	302	305	305	313	327	143	145	157	163	165
12	Air bersih	63	62	63	66	67	51	50	51	51	52
13	Listrik	77	77	76	78	78	37	36	37	37	37

Sumber : UPT Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2022
Departemen Agama Kabupaten Labuhanbatu, 2022

i. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak terhadap jumlah anak usia 4-6 tahun. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.50
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah siswa pada jenjang TK/RA	9.858	12.323	11.383	14.884	13,255
2	Jumlah anak usia 4-6 tahun	25.021	25.738	26.255	26.400	28,776
3	Rasio	39,40	47,87	43.36	56.29	46,06

Sumber :SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022. (dinas pendidikan)

Rasio anak berusia 4-6 tahun yang bersekolah pada jenjang TK/RA di Labuhanbatu pada tahun 2020 sebesar 56,29 persen. Kemudian di tahun 2021 menjadi sebesar 46,06 persen..

j. **Angka Kelulusan SD/MI**

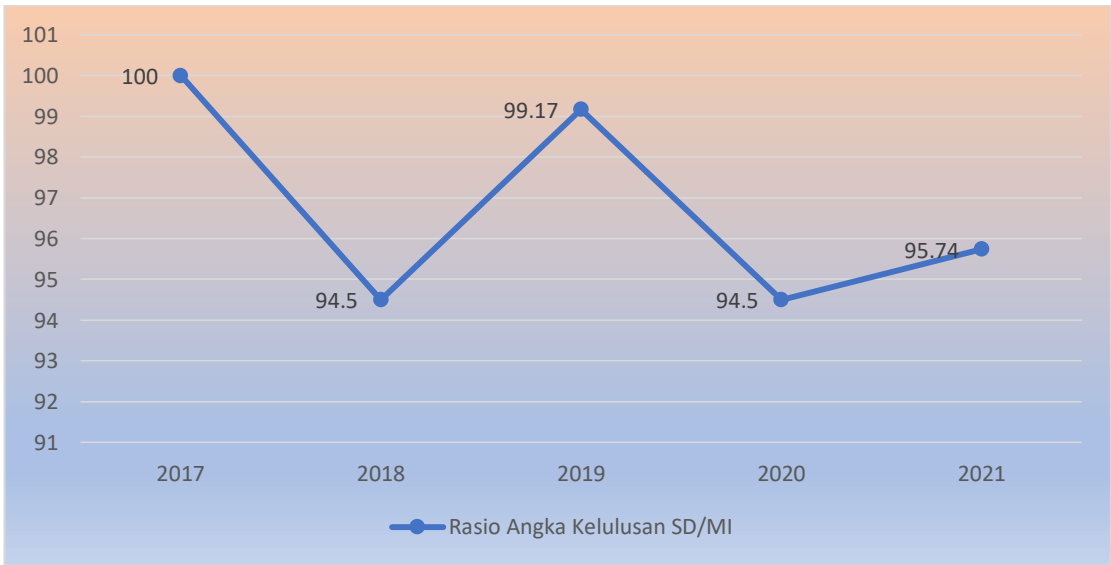
Angka kelulusan SD/MI adalah jumlah lulusan pada jenjang SD/MI terhadap jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya. Angka kelulusan SD/MI di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.51
Angka Kelulusan SD/MI di Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	11.882	9.552	9.923	10.133	8.761
2	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya	11.882	10.108	10.006	10.203	9.151
3	Rasio	100	94,50	99,17	94,50	95,74

Sumber :SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022. (dinas pendidikan)

Grafik 2.19
Angka Kelulusan SD/MI di Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017 – 2021



Angka kelulusan SD/MI di Kabupaten Labuhanbatu telah mencapai 100 persen pada tahun 2017 dan mengalami penurunan sebesar 5,5 persen pada tahun 2018. Kemudian tahun 2021 rasionya meningkat menjadi 95.74 persen.

k. **Angka Kelulusan SMP/MTs**

Angka kelulusan SMP/MTs adalah jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs terhadap jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya. Angka kelulusan SMP/MTs di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.52
Angka Kelulusan SMP/MTs di Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs	14.935	8.666	8.716	9.247	5.775
2	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya	14.935	9.092	8.774	9.247	5.775
3	Rasio	100	95,31	99,34	100	100

Sumber :SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022. (dinas pendidikan)

Angka kelulusan SMP/MTs di kabupaten Labuhanbatu telah mencapai 100 persen pada tahun 2020 dan tahun 2021.

l. **Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTS**

Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs adalah jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs terhadap jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya. Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.53
Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs di Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs	11.839	9.070	10,063	10,101	5.792
2	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya	11.882	9.552	12,313	10,133	6.100
3	Rasio	99,63	94,95	81.73	94.50	94,95

Sumber :SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022.(dinas pendidikan)

Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 94,95 persen.

m. Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA adalah jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA terhadap jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya. Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.54
Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA	8.457	8.834	8,800	8.739	5.832
2	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya	14.935	8.666	8,716	9,247	5.775
3	Rasio	56,62	101,93	100.96	94.50	101,94

Sumber :SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022. (dinas pendidikan)

Rasio angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2017- 2021 cukup baik.

n. Jumlah Guru Menurut Ijazah Tertinggi tahun 2017-2021 menurut Jenjang Sekolah

Jumlah guru lulusan S-1 dan S-2 sudah mengajar di semua jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA, SMK). Yang perlu ditingkatkan adalah kualitas dan keahlian para guru.

Tabel 2.55
Jumlah Guru Menurut Ijazah Tertinggi di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021

No	Jenjang Pendidikan guru sekolah	Tahun									
		2017		2018		2019		2020		2021	
		S-1	S-2	S-1	S-2	S-1	S-2	S-1	S-2	S-1	S-2
1	SD	2.565	24	2.227	11	2.565	24	2.227	11	2.364	9
2	SMP	1.076	20	777	17	1.076	20	777	17	927	17
3	SMA	460	30	748	14	460	30	748	14	1.256	16
4	SMK	263	14	739	4	263	13	739	4	999	4
	Jumlah	4.364	88	4.491	46	4.364	88	4.491	46	5.546	46

Sumber :SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022 (dinas pendidikan)

o. Jumlah Guru bersertifikat Pendidik tahun 2017-2021 menurut jenjang sekolah

Pada tahun 2020-2021 jumlah guru yang bersertifikat (SD,SMP) mengalami penurunan sebanyak 74 guru, Sedangkan jumlah guru yang belum bersertifikat bertambah sebanyak 13 guru.

Tabel 2.56
Jumlah Guru Bersertifikat Pendidik di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021

No	Jenjang Sekolah	Jumlah Guru									
		2017		2018		2019		2020		2021	
		Berser tifikat	Belum Berser Tifikat	Berser tifikat	Belum Berser Tifikat	Berser Tifikat	Belum Berser Tifikat	Berser tifikat	Belum Berser Tifikat	Berser tifikat	Belum Berser Tifikat
1	SD	2.925	-	2.821	6	2.925	-	2.821	6	1.244	-
2	SMP	870	-	880	-	870	-	880	-	539	-
3	SMA	664	-	669	-	664	-	669	-	354	918
4	SMK	485	-	500	7	485	-	500	7	199	804
	Jumlah	4.944	-	4.870	13	4.994	-	4.870	13	2.336	1.722

Sumber :SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022. (dinas pendidikan)

p. **Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV**

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV adalah jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV terhadap jumlah guru SD/MI dan SMP/MTs. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.57
Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017– 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV	4.490	3.979	4,331	4,555	4.684
2	Jumlah guru SD/MI dan SMP/MTs	4.647	4.786	4,633	5,151	5.765
3	Rasio	96,62	83,13	93,48	94,50	81,24

Sumber :SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022. (dinas pendidikan)

Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2017 mencapai rasio 96,62 persen dan pada tahun 2018 mencapai rasio 83,13 yang artinya mengalami Penurunan sebesar 13,49 persen. Namun pada tahun 2020 menjadi sebesar 94.50 persen dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 81,24 persen.

2.3.1.1.2. Kesehatan

Kesehatan merupakan suatu hal yang menjadi komponen terpenting dalam kehidupan manusia. Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan yang lebih baik.

Pemerintah berperan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, karena kesehatan merupakan investasi untuk meningkatkan sumber daya manusia. Di samping itu, setiap individu bertanggung jawab terhadap kesehatan dirinya, keluarganya dan lingkungannya.

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Labuhanbatu terkait urusan kesehatan dapat dilihat dari beberapa indikator kesehatan sebagai berikut :

1) Rasio Posyandu per Satuan Balita

Rasio posyandu per satuan balita adalah ketersediaan jumlah posyandu terhadap jumlah balita. Rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.58
Rasio Posyandu per Satuan Balita di Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017– 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Posyandu	540	540	540	541	548
2	Jumlah Balita	54.991	54.991	54.538	54.295	50.207
3	Rasio	1 : 101	1 : 101	1 : 101	1:100	1:92

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Rasio Jumlah posyandu pada tahun 2017-2019, satu unit posyandu melayani 101 per satuan balita, pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan rasio masing-masing 1:100 dan 1:92. Rasio ideal nasional untuk rasio posyandu per satuan balita adalah satu unit posyandu melayani seratus orang balita. Hal ini berarti bahwa jumlah posyandu di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2020 dan 2021 telah ideal dan perlu dipertahankan. Selanjutnya rasio posyandu per satuan balita per kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.59
Rasio Posyandu per Satuan Balita Per Kecamatan
di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021

No	Kecamatan	Uraian	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Bilah Barat	JumlahPosyandu	50	50	50	50	52
		Jumlah Balita	4.600	4.599	4.597	4.593	4.245
		Rasio	1 : 92	1 : 91	1 : 109	1:92	2:82
2	Rantau Utara	Jumlah Posyandu	86	86	86	89	89
		Jumlah Balita	11.092	11.061	11.022	10.984	10.160
		Rasio	1 : 128	1 : 129	1 : 128	1:123	1:114
3	Rantau Selatan	Jumlah Posyandu	47	47	47	47	47
		Jumlah Balita	8.690	8.804	8.891	9.030	8.351
		Rasio	1 : 184	1 : 187	1 : 189	1:192	1:178
4	Bilah Hulu	Jumlah Posyandu	72	72	72	72	73
		Jumlah Balita	7.313	7.255	7.202	7.138	6.603
		Rasio	1 : 101	1 : 101	1 : 100	1:99	1:90
5	Pangkatan	Jumlah Posyandu	47	47	47	47	49
		Jumlah Balita	3.883	3.825	3.773	3.708	3.425
		Rasio	1 : 82	1 : 81	1 : 80	1:79	1:70
6	Bilah Hilir	Jumlah Posyandu	74	74	75	74	74
		Jumlah Balita	6.036	5934	5.843	5.728	5.294
		Rasio	1 : 81	1 : 80	1 : 77	1:77	1:72
7	Panai Hulu	Jumlah Posyandu	47	47	47	47	47
		Jumlah Balita	4.498	4.493	4.486	4.480	4.142
		Rasio	1 : 95	1 : 96	1 : 95	1:95	1:88
8	Panai Tengah	Jumlah Posyandu	69	69	67	67	67
		Jumlah Balita	4.572	4.568	4.560	4.559	4.215
		Rasio	1 : 66	1 : 66	1 : 68	1:68	1:63
9	Panai Hilir	Jumlah Posyandu	46	46	48	48	50
		Jumlah Balita	4307	4230	4.164	4.075	3.770
		Rasio	1 : 93	1 : 88	1 : 86	1:85	1:75

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio jumlah posyandu per satuan balita di tingkat kecamatan bernilai fluktuatif, yaitu satu unit posyandu

ada yang melayani lebih atau kurang dari seratus balita. Pada tahun 2021 dari 9 kecamatan yang ada di Labuhanbatu, kecamatan Rantau Selatan merupakan Kecamatan yang rasio nya paling besar yaitu 178 balita. Hal Ini disebabkan besarnya jumlah balita yang bertambah kurang diseimbangi oleh banyaknya jumlah posyandu, sehingga menyebabkan menurunkan angka rasio posyandu per satuan balita baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan.

2) Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Rasio puskesmas, poliklinik dan pustu adalah jumlah puskesmas, poliklinik, pustu per 1.000 penduduk. Rasio puskesmas, poliklinik dan pustu bermanfaat untuk mengetahui cakupan pelayanan kesehatan tersebut dalam memenuhi pelayanannya kepada penduduk, dengan demikian pelayanan kesehatan dapat terpenuhi sesuai dengan standar pelayanan. Berikut adalah Tabel jumlah dan rasio puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2017-2021.

Tabel 2.60
Jumlah dan Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Per Satuan Penduduk di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017– 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Puskesmas	15	15	15	15	15
2	Jumlah Poliklinik	54	49	54	45	45
3	Jumlah Pustu	49	49	51	43	50
4	Jumlah Penduduk	478.593	486.480	494.178	493.899	499.982
5	Rasio Puskesmas Persatuan Penduduk	1 : 31.906	1 : 32.432	1 : 32.945	1:32.926	1:33.332
6	Rasio Poliklinik Persatuan Penduduk	1 : 8.863	1 : 9.928	1 : 9.151	1:10.975	1:11.111
7	Rasio Pustu Persatuan Penduduk	1 : 9.767	1 : 9.928	1 : 9.690	1:11.486	1:10.000

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu 2022.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Rasio puskesmas persatuan penduduk cenderung mengalami peningkatan dimana pada tahun 2020, satu unit puskesmas dapat melayani 32.926 penduduk, dan pada tahun 2021 meningkat menjadi satu unit puskesmas dapat melayani 33.332 penduduk. Untuk poliklinik pada tahun 2020, satu unit poliklinik dapat melayani 10.975

penduduk meningkat menjadi satu unit poliklinik dapat melayani 11.111 penduduk pada tahun 2021. Untuk Rasio Puskesmas pembantu di Kabupaten Labuhanbatu menunjukkan trend yang menurun, pada tahun 2020 satu unit pustu dapat melayani 11.486 penduduk, menjadi satu unit pustu dapat melayani 10.000 penduduk pada tahun 2021. Berikut disajikan data jumlah dan rasio puskesmas, poliklinik, dan pustu per satuan penduduk per kecamatan tahun 2017-2021.

Tabel 2.61
Jumlah dan Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Per Satuan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017– 2021

No	Kecamatan	Uraian	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Bilah Barat	Jumlah Puskesmas	2	2	2	2	2
		Jumlah Poliklinik	2	2	3	2	2
		Jumlah Pustu	7	7	7	7	7
		Jumlah Penduduk	40.042	40.850	41.620	39.953	40.442
		Rasio Puskesmas	1:20.021	1:20.425	1 : 20.810	1:19.977	1:20.221
		Rasio Poliklinik	1:20.021	1:20.425	1 : 20.810	1:19.977	1:20.221
		Rasio Pustu	1:5.720	1:5.836	1 :5.946	1:5.708	1:5.778
2	Rantau Utara	Jumlah Puskesmas	2	2	2	2	2
		Jumlah Poliklinik	12	16	14	13	12
		Jumlah Pustu	5	5	5	5	5
		Jumlah Penduduk	96.539	98.242	99.885	96.485	97.467
		Rasio Puskesmas	1:48.270	1:49.121	1 : 49.943	1:48.242	1:48.733
		Rasio Poliklinik	1:8.045	1:6.140	1 : 7.135	1:7.422	1:8.122
		Rasio Pustu	1:19.308	1:19.648	1:19.977	1:19.297	1:19.493
3	Rantau Selatan	Jumlah Puskesmas	1	1	1	1	1
		Jumlah Poliklinik	7	12	11	12	10
		Jumlah Pustu	4	4	4	4	4
		Jumlah Penduduk	78.631	78.206	80.579	73.977	75.395
		Rasio Puskesmas	1:78.631	1:78.206	1:80.579	1:73.977	1:75.395
		Rasio Poliklinik	1:10.804	1:6.517	1 : 7.325	1:6.165	1:7.540
		Rasio Pustu	1:18.907	1:19.552	1 : 20.145	1:18.494	1:18.849
4	Bilah Hulu	Jumlah Puskesmas	3	3	3	3	3
		Jumlah Poliklinik	5	5	4	5	3
		Jumlah Pustu	8	8	8	8	9
		Jumlah Penduduk	63.615	64.440	65.267	64.416	64.949
		Rasio Puskesmas	1:21.205	1:21.480	1 : 21.776	1:21.472	1:21.650
		Rasio Poliklinik	1:12.723	1:12.888	1 :16.317	1:12.883	1:21.650

No	Kecamatan	Uraian	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
		Rasio Pustu	1:7.952	1:8.055	1 :8.158	1:8.052	1:7.217
5	Pangkatan	Jumlah Puskesmas	1	1	1	1	1
		Jumlah Poliklinik	4	4	3	4	3
		Jumlah Pustu	7	7	7	7	7
		Jumlah Penduduk	33.809	33.972	34.177	37.766	38.229
		Rasio Puskesmas	1:33.809	1:33.972	1:34.177	1:37.766	1:38.229
		Rasio Poliklinik	1:8.452	1:8.493	1 :11.392	1:9.442	1:12.743
		Rasio Pustu	1:4.830	1:4.853	1 :4.882	1:5.395	1:5.461
6	Bilah Hilir	Jumlah Puskesmas	2	2	2	2	2
		Jumlah Poliklinik	9	11	10	10	9
		Jumlah Pustu	5	5	6	6	6
		Jumlah Penduduk	52.548	52.711	52.953	59.370	60.049
		Rasio Puskesmas	1:26.274	1:26.356	1 : 26.476	1:29.685	1:30.205
		Rasio Poliklinik	1:5.839	1:4.793	1:5.295	1:5.937	1:6.672
		Rasio Pustu	1:10.510	1:10.542	1: 8.826	1:9.895	1:10.008
7	Panai Hulu	Jumlah Puskesmas	1	1	1	1	1
		Jumlah Poliklinik	3	3	4	-	-
		Jumlah Pustu	4	4	4	4	4
		Jumlah Penduduk	39.142	39.907	40.637	38.028	38.359
		Rasio Puskesmas	1:39.142	1:39.907	1:40.637	1:38.028	1:38.359
		Rasio Poliklinik	1:13.047	13.302	1:10.159	-	-
		Rasio Pustu	1:9.786	1:9.977	1 : 10.159	1:9.507	1:9.590
8	Panai Tengah	Jumlah Puskesmas	1	1	1	1	1
		Jumlah Poliklinik	3	3	3	6	6
		Jumlah Pustu	5	5	5	5	5
		Jumlah Penduduk	39.779	40.576	41.335	41.143	41.767
		Rasio Puskesmas	1:39.779	1:40.576	1:41.335	1:41.143	1:41.767
		Rasio Poliklinik	1:13.260	1:13.525	1 : 13.778	1:6.857	1:6.961
		Rasio Pustu	1:7.956	1:8.115	1 : 8.267	1:8.229	1:8.353
9	Panai Hilir	Jumlah Puskesmas	2	2	2	2	2
		Jumlah Poliklinik	-	-	-	-	-
		Jumlah Pustu	5	5	4	4	4
		Jumlah Penduduk	37.488	37.576	37.725	42.761	43.300
		Rasio Puskesmas	1:18.744	1:18.788	1 : 18.863	1:21.380	1:21.650
		Rasio Poliklinik	-	-	-	-	-
		Rasio Pustu	1:7.497	1:7.515	1 : 9.431	1:10.690	1:10.850

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu 2022.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio puskesmas per satuan penduduk di kabupaten tahun 2017-2021 yaitu cenderung mengalami kenaikan, disebabkan pertambahan penduduk sedangkan jumlah puskesmas tetap. Untuk poliklinik di Kabupaten Labuhanbatu terdapat dua Kecamatan yang tidak tersedia poliklinik yaitu kecamatan Panai Hulu dan Kecamatan Panai Hilir sehingga layanan kesehatan berpusat pada puskesmas yang ada di dua kecamatan tersebut. Untuk Rasio Puskesmas pembantu per kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu menunjukkan trend yang cenderung meningkat, dimana dari 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu terdapat 8 kecamatan yang cenderung mengalami peningkatan dan hanya 1 kecamatan yang cenderung mengalami penurunan yaitu kecamatan Bilah Hulu.

3) Cakupan Puskesmas

Cakupan Puskesmas adalah banyaknya jumlah puskesmas terhadap jumlah seluruh kecamatan. Cakupan puskesmas di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.62
Cakupan Puskesmas di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017- 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah puskesmas	15	15	15	15	15
2	Jumlah seluruh kecamatan	9	9	9	9	9
3	Cakupan (%)	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67

Sumber : Badan Pusat StatistikKabupaten Labuhanbatu 2022.

Puskesmas bertanggung jawab melaksanakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya agar terlaksana derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Guna meningkatkan kunjungan pasien ke puskesmas maka puskesmas harus dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas sehingga mampu meningkatkan kunjungan pelayanan masyarakat. Cakupan puskesmas pada tahun 2021 mencapai peningkatan sebesar 166,67 yang

artinya setiap kecamatan telah memiliki puskesmas dan di beberapa kecamatan ada yang memiliki lebih dari 1 puskesmas. Tetapi, jika dilihat dari rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk, dimana standar nasional rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk adalah 1:30.000 penduduk, maka dengan jumlah puskesmas 15 dan jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2021 sebanyak 499.982 jiwa maka rasio baru mencapai 1 puskesmas melayani 33.332 penduduk. Sehingga jika dilihat dari rasio tersebut maka ke depan perlu dilakukan pemekaran puskesmas atau penambahan fasilitas kesehatan dasar puskesmas untuk mengimbangi tingginya pertumbuhan jumlah penduduk.

4) Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk

Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 10.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk. Berikut adalah Tabel jumlah dan rasio Rumah Sakit di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2017- 2021.

Tabel 2.63
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk
di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Rumah Sakit	6	7	7	7	6
2.	Jumlah Penduduk	478.593	486.480	494.178	493.899	499.982
3.	Rasio	1 : 79.765	1: 69.497	1 : 70.597	1:70.557	1:83.330

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu 2022.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk menunjukkan trend yang cenderung fluktuatif yaitu pada tahun 2017,satu unit Rumah Sakit dapat melayani 79.765 penduduk, menjadi satu unit Rumah Sakit dapat melayani 70.557 penduduk pada tahun 2020 di Kabupaten Labuhanbatu dan satu unit Rumah Sakit dapat melayani 83.330 penduduk pada tahun 2021. Berikut disajikan pula tabel jumlah dan rasio rumah sakit per satuan penduduk per kecamatan tahun 2017-2021 di Kabupaten Labuhanbatu.

Tabel 2.64
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Per Kecamatan di
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017– 2021

No	Kecamatan	Uraian	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Bilah Barat	Jumlah Rumah Sakit	0	0	0	0	0
		Jumlah Penduduk	40.042	40.850	41.620	39.953	40.442
		Rasio	0	0	0	0	0
2	Rantau Utara	Jumlah Rumah Sakit	5	5	5	5	4
		Jumlah Penduduk	67540	98.242	99.885	96.485	97.467
		Rasio	1 : 13.508	1 : 19.648	1 : 19.977	1:19.297	1:24.368
3	Rantau Selatan	Jumlah Rumah Sakit	1	1	2	2	2
		Jumlah Penduduk	75.631	78.206	80.579	73.977	75.395
		Rasio	1 : 75.631	1 : 78.206	1 : 40.290	1:36.988	1:37.697
4	Bilah Hulu	Jumlah Rumah Sakit	0	0	0	0	0
		Jumlah Penduduk	63.615	64.440	65.267	64.416	64.949
		Rasio	0	0	0	0	0
5	Pangkatan	Jumlah Rumah Sakit	0	0	0	0	0
		Jumlah Penduduk	33.809	33.972	34.177	37.766	38.229
		Rasio	0	0	0	0	0
6	Bilah Hilir	Jumlah Rumah Sakit	0	0	0	0	0
		Jumlah Penduduk	52.548	52.711	52.953	59.370	60.094
		Rasio	0	0	0	0	0
7	Panai Hulu	Jumlah Rumah Sakit	0	0	0	0	0
		Jumlah Penduduk	39.141	39.907	40.637	38.028	38.359
		Rasio	0	0	0	0	0
8	Panai Tengah	Jumlah Rumah Sakit	0	0	0	0	0
		Jumlah Penduduk	39.779	40.576	41.335	41.143	41.767
		Rasio	0	0	0	0	0
9	Panai Hilir	Jumlah Rumah Sakit	0	0	0	0	0
		Jumlah Penduduk	37.488	37.576	37.725	42.761	43.300
		Rasio	0	0	0	0	0

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu 2022.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hanya 2 kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu yang memiliki rumah sakit yaitu Kecamatan Rantau Utara, Rantau Selatan. Rasio rumah sakit per satuan penduduk per kecamatan

tahun 2021 dari 2 kecamatan tersebut, dua diantaranya cenderung mengalami penurunan rasio yaitu kecamatan Rantau Utara, dimana pada tahun 2020 , satu rumah sakit dapat melayani 19.287 penduduk menurun menjadi 24.368 pada tahun 2021.

5) Persentase Puskesmas yang Terakreditasi

Puskesmas Akreditasi adalah puskesmas yang telah menerapkan sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan dan upaya pokok sesuai standar yang telah ditetapkan melalui proses penilaian eksternal oleh Komisi Akreditasi dan/atau Perwakilan di Provinsi yang ditandai dengan adanya sertifikat akreditasi.

Untuk Kabupaten Labuhanbatu sampai tahun 2021 seluruh Puskesmas sudah terakreditasi dengan status akreditasi madya sebanyak 4 Puskesmas (Janji, Kota Rantauprapat, Sigambal, dan Sei Penggantung) dan status akreditasi dasar sebanyak 11 Puskesmas (Tanjung Haloban, Teluk Sentosa, Labuhan Bilik, Sei Berombang, Negeri Lama, Gunung Selamat, Perbaungan, Pangkatan, Suka Makmur, Lingga Tiga, dan Perlayuan).

Untuk Meningkatkan Mutu Layanan Fasilitas kesehatan ke depan upaya utama yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan status akreditasi Puskesmas mengingat kondisi status akreditasi puskesmas masih sebagian besar (73,33%) berstatus akreditasi dasar.

6) Persentase Puskesmas Mampu PONED

PONED merupakan kepanjangan dari Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar. Puskesmas mampu Poned adalah puskesmas yang mempunyai fasilitas dan kemampuan penanganan kegawatdaruratan obstetri neonatal emergensi dasar. Puskesmas PONED yang dibentuk merupakan puskesmas yang sudah berstatus puskesmas perawatan. Berikut ditampilkan data puskesmas Poned yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021.

Tabel 2.65
Persentase Puskesmas Mampu Poned di Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Puskesmas Mampu Poned	4	4	4	4	4
2	Puskesmas perawatan	4	4	5	5	5
3	Persentase (%)	100	100	80	80	80

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pembentukan puskesmas mampu Poned baru dilaksanakan pada tahun 2012 sebanyak 3 (tiga) puskesmas yaitu Puskesmas Labuhan Bilik, Puskesmas Negeri Lama dan Puskesmas Sei Berombang. Pada tahun 2013 ada penambahan 1 (satu) puskesmas mampu Poned yaitu Puskesmas Teluk Sentosa. Sehingga jumlah puskesmas mampu Poned yang ada di kabupaten Labuhanbatu sampai dengan tahun 2017 sebanyak 4 (empat) puskesmas mampu Poned. Sampai tahun 2021, jumlah puskesmas yang menyelenggarakan Poned sudah sesuai target nasional yaitu 4 puskesmas tiap kabupaten/kota.

7) Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Rasio dokter per satuan penduduk adalah banyaknya jumlah dokter terhadap jumlah penduduk. Rasio dokter per satuan penduduk di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut :

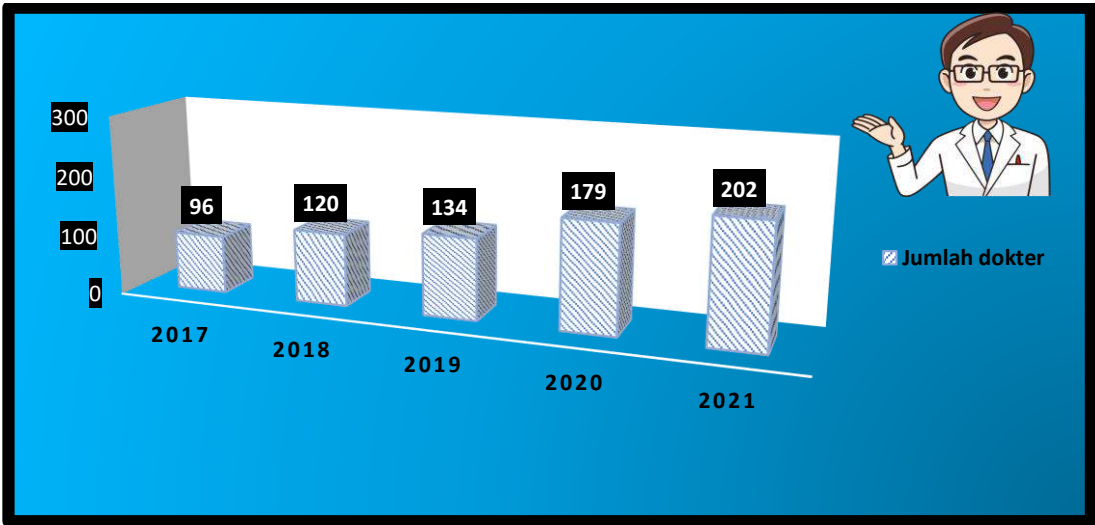
Tabel 2.66
Rasio Dokter per Satuan Penduduk di Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017- 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah dokter	96	120	134	179	202
2	Jumlah penduduk	478.593	486.480	494.178	493.899	499.982
3	Rasio	1 : 4.985	1 : 4.054	1 : 3.688	1:2.759	1:2.475

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu 2022.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021, rasio jumlah dokter terhadap jumlah penduduk mencapai standar ideal, dimana pada tahun 2021 setiap 1 dokter melayani 2.475 penduduk. Berdasarkan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, cakupan ideal pelayanan satu orang dokter adalah melayani 2.500 penduduk. Sedangkan Pada tahun 2017-2020 cakupan dokter per satuan penduduk belum mencapai standar ideal. Berikut disajikan tabel rasio dokter per satuan penduduk per kecamatan tahun 2017-2021 di Kabupaten Labuhanbatu. Berikut disajikan tabel rasio dokter per satuan penduduk per kecamatan tahun 2017-2021 di Kabupaten Labuhanbatu.

Grafik 2.20
Rasio Dokter per Satuan Penduduk di Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017- 2021



Tabel 2.67
Rasio Dokter per Satuan Penduduk Per Kecamatan
di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021

No	Kecamatan	Uraian	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Bilah Barat	Jumlah Dokter	12	10	14	20	29
		Jumlah Penduduk	40.042	40.850	41.620	39.953	40.442
		Rasio	1 : 3336	1 : 4085	1 : 2.973	1:1.998	1:1.395
2	Rantau Utara	Jumlah Dokter	20	41	40	83	47
		Jumlah Penduduk	67.540	98.242	99.885	96.485	97.467
		Rasio	1 : 75.631	1 : 78.206	1 : 2.497	1:1.177	1:2.074

No	Kecamatan	Uraian	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
3	Rantau Selatan	Jumlah Dokter	32	38	42	133	117
		Jumlah Penduduk	75.631	78.206	80.579	73.977	75.395
		Rasio	1 : 2.363	1 : 2.058	1 : 1.919	1:556	1:644
4	Bilah Hulu	Jumlah Dokter	12	12	14	18	14
		Jumlah Penduduk	63.615	64.440	65.267	64.416	64.949
		Rasio	1 : 5.301	1 : 5.370	1 : 4.662	1:3.579	1:4.639
5	Pangkatan	Jumlah Dokter	1	1	3	8	7
		Jumlah Penduduk	33.809	33.972	34.177	37.766	38.229
		Rasio	1 : 33.809	1 : 33.972	1 : 11.392	1:4.721	1:5.461
6	Bilah Hilir	Jumlah Dokter	3	6	4	7	6
		Jumlah Penduduk	52.548	52.711	52.953	59.370	60.094
		Rasio	1 : 17.516	1 : 8.785	1 : 13.238	1:8.481	1:10.016
7	Panai Hulu	Jumlah Dokter	3	3	3	4	4
		Jumlah Penduduk	39.142	39.907	40.637	38.028	38.359
		Rasio	1 : 13.047	1 : 13.302	1 : 13.546	1:9.757	1:9.590
8	Panai Tengah	Jumlah Dokter	4	4	8	3	3
		Jumlah Penduduk	39.779	40.576	41.335	41.143	41.767
		Rasio	1 : 9.944	1 : 10.144	1 : 5.167	13.714	1:13.922
9	Panai Hilir	Jumlah Dokter	4	7	6	5	3
		Jumlah Penduduk	37.488	37.576	37.725	42.761	43.300
		Rasio	1 : 9.372	1 : 5.368	1 : 6.288	1:8.552	1:14.433

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu 2022.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021, rasio jumlah dokter terhadap jumlah penduduk per kecamatan terdapat 1 kecamatan yang mengalami peningkatan dan 8 kecamatan yang mengalami penurunan. Tetapi cakupan ideal satu orang dokter di semua kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu hanya 3 kecamatan yaitu Rantau Utara, Rantau Selatan dan Bilah Barat yang memenuhi standar yang telah ditetapkan, dimana standar nasional sebesar 1 dokter per 2500 penduduk.

8) Rasio Tenaga Medis Per satuan Penduduk

Rasio Tenaga Medis Per satuan Penduduk per satuan penduduk adalah banyaknya jumlah Tenaga Medis Per satuan Penduduk terhadap jumlah penduduk. Rasio Tenaga Medis Per satuan Penduduk per kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.68
Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Per Kecamatan
di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017– 2021

No	Kecamatan	Uraian	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Bilah Barat	Jumlah Tenaga Medis	80	124	171	156	191
		Jumlah Penduduk	40.042	40.850	41.620	39.953	40.442
		Rasio	1 : 501	1 : 329	1 : 243	1 : 256	1 : 212
2	Rantau Utara	Jumlah Tenaga Medis	159	270	289	347	352
		Jumlah Penduduk	96.539	98.242	99.885	96.485	97.467
		Rasio	1 : 607	1 : 364	1 : 346	1 : 278	1 : 277
3	Rantau Selatan	Jumlah Tenaga Medis	415	513	589	553	810
		Jumlah Penduduk	78.631	78.206	80.579	73.977	75.395
		Rasio	1 : 189	1 : 152	1 : 137	1 : 134	1 : 93
4	Bilah Hulu	Jumlah Tenaga Medis	89	146	144	152	173
		Jumlah Penduduk	63.615	64.440	65.267	64.416	64.949
		Rasio	1 : 715	1 : 441	1 : 453	1 : 424	1 : 375
5	Pangkatan	Jumlah Tenaga Medis	33	51	51	50	63
		Jumlah Penduduk	33.809	33.972	34.177	37.766	38.229
		Rasio	1 : 1.025	1 : 666	1 : 670	1 : 755	1 : 607
6	Bilah Hilir	Jumlah Tenaga Medis	48	115	144	127	137
		Jumlah Penduduk	52.548	52.711	52.953	59.370	60.094
		Rasio	1 : 1.095	1 : 458	1 : 368	1 : 467	1 : 439
7	Panai Hulu	Jumlah Tenaga Medis	32	63	55	53	59
		Jumlah Penduduk	39.142	39.907	40.637	38.028	38.359
		Rasio	1 : 1.223	1 : 633	1 : 739	1 : 718	1 : 650
8	Panai Tengah	Jumlah Tenaga Medis	27	89	130	122	122
		Jumlah Penduduk	39.779	40.576	41.335	41.143	41.767
		Rasio	1 : 1.473	1 : 456	1 : 318	1 : 337	1 : 342
9	Panai Hilir	Jumlah Tenaga Medis	58	115	97	71	97
		Jumlah Penduduk	37.488	37.576	37.725	42.761	43.300
		Rasio	1 : 646	1 : 327	1 : 389	1 : 602	1 : 446

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu 2022.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021, jumlah tenaga medis mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya kecuali kecamatan Panai Tengah walaupun tenaga medis tetap namun akibat pertambahan penduduk rasio tenaga medis per satuan penduduk menurun.

9) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Pelayanan Kesehatan ibu hamil merupakan salah satu jenis layanan dasar

pada SPM Bidang Kesehatan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten. Pelayanan antenar sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga umur kehamilan. Capaian kinerja Pelayanan kesehatan ibu hamil dinilai dari persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.69
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil
di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017- 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta	10.301	11.037	10.870	10.173	10.624
2	Jumlah semua ibu hamil di wilayah kab/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	12.199	12.143	12.086	12.025	11.358
3	Cakupan (%)	84,44	90,89	89,94	84,60	93.54

Sumber : Badan Pusat StatistikKabupaten Labuhanbatu 2022. (dinas kesehatan).

Cakupan ibu hamil K4 pada dari tahun 2017 s/d 2021 meningkat setiap tahunnya, yaitu tahun 2017 mencapai 84,44 persen dan meningkat menjadi 90,88 persen pada tahun 2018, pada tahun 2019 dan tahun 2020 menurun menjadi 89,94 persen dan 84,60 persen dimana hal ini disebabkan tingginya tingkat kehamilan yang belum ditangani dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 93,54 persen. Jika dibandingkan dengan target nasional (SPM) 95% maka capaian masih belum mencapai target.

10) Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu terhadap jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.70
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di satu wilayah kerja	9.833	10.561	10.564	10.466	10.191
2	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja	11.644	11.591	11.530	11.479	10.841
3	Cakupan (%)	84,45	91,11	91,62	91,18	94,00

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022.

Perkembangan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan pada jenis layanan dasar pelayanan kesehatan ibu bersalin di kabupaten Labuhanbatu mengalami perbaikan setiap tahunnya. Jika pada tahun 2017 cakupannya baru mencapai 84,45 persen, maka pada tahun 2021 sudah mencapai 94,00 persen. Kondisi ini merupakan keberhasilan tenaga kesehatan dalam perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Tetapi, jika dibandingkan dengan target nasional (SPM) 90 % sudah mencapai target pada tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, indikator Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan mengalami perubahan nama menjadi

persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan pada jenis layanan dasar Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin. Sehubungan dengan hal tersebut, maka indikator kinerja SPM yang digunakan untuk perencanaan 5 (lima) tahun ke depan mengacu pada indikator sesuai Peraturan tersebut.

11) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir menjadi jenis layanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh kabupaten/kota, dengan indikatornya adalah Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari . Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.71
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir di Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017- 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	9.696	10.353	9.989	10.187	9.962
2	Jumlah semua bayi lahir di wilayah Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu 1 tahun	9.928	11,039	10.552	10.475	10.325
3	Persentase (%)	97,66	93,79	94,66	98,33	96,48

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022

Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu kepada pelayanan neonatal esensial sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh bidan dan atau perawat dan atau dokter dan atau dokter spesialis anak yang memiliki surat tanda register (STR).

Pelayanan kesehatan tersebut dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (polindes, poskesdes, puskesmas, bidan praktek swasta, klinik pratama, klinik utama, klinik bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, rumah sakit pemerintah maupun swasta), posyandu dan atau kunjungan rumah.

Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir dengan indikator kinerja Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2021 mencapai 96,48 persen lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2020 sebesar 98,33 persen. Jika dibandingkan dengan target SPM maka angka capaian tersebut masih dibawah target.

12) Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar oleh dokter, bidan dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit empat kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.72
Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017- 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja	9.118	10.728	10.193	10.187	9.927
2	Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja	10.997	10.956	10.912	10.475	10.325
3	Cakupan (%)	82,91	97,86	93,41	97,25	96,10

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022

Kunjungan bayi adalah kunjungan bayi umur 29 hari – 11 bulan di sarana pelayanan kesehatan (poskesdes, pustu, puskesmas, rumah bersalin dan rumah sakit) maupun di rumah, posyandu, tempat penitipan anak, panti asuhan dan sebagainya melalui kunjungan petugas. Setiap bayi memperoleh pelayanan kesehatan minimal empat kali yaitu satu kali pada umur 29 hari–3 bulan, satu kali pada umur 3-6 bulan, satu kali pada umur 6-9 bulan, dan satu kali pada umur 9-11 bulan.

Pelayanan kesehatan tersebut meliputi pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/HB 1-3, Polio 1-4, Campak, Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) bayi dan penyuluhan perawatan kesehatan bayi meliputi konseling ASI eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI sejak usia 6 bulan, perawatan dan tanda bahaya bayi sakit (sesuai MTBS), pemantauan pertumbuhan dan pemberian vitamin A kapsul biru pada usia 6-11 bulan. Indikator ini untuk mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam melindungi bayi sehingga kesehatannya terjamin melalui penyediaan pelayanan kesehatan.

Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2019 sebesar 93,41 persen lebih tinggi dibandingkan pencapaian cakupan tahun 2017 yang hanya sebesar 82,91persen. Mengalami peningkatan pada tahun 2020 yaitu sebesar 97,25 persen dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 96,10 persen maka dibandingkan dengan target nasional (SPM) 100% maka capaian hampir mencapai target.

a. Pelayanan Kesehatan Balita

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Pelayanan Kesehatan Balita juga merupakan salah satu jenis layanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan. Pelayanan Kesehatan Balita adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada anak usia 0-59 bulan dan dilakukan oleh bidan dan atau perawat dan atau dokter/DLP dan atau dokter spesialis anak yang memiliki surat tanda register (STR) dan diberikan di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM dengan indikator kinerja adalah Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan

balita sesuai standar. Pelayanan Kesehatan Balita di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.73
Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Labuhanbatu balita Tahun 2017- 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai dengan standar dalam kurun waktu 1 tahun	39.590	47.970	39.830	39.835	32.138
2	Jumlah balita 0-59 bulan yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu 1 tahun yang sama	43.994	54.769	54.538	54.295	40.133
3	Persentase (%)	89,99	87,60	73,03	73,37	80,08

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022

Pelayanan Kesehatan tersebut meliputi penimbangan minimal 8 kali setahun, pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali setahun, pemberian kapsul vitamin A 2 kali setahun dan pemberian imunisasi dasar lengkap.

Pelayanan Kesehatan Balita di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2020 sebesar 73,37 peren meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 80,08 persen. Tetapi jika dibandingkan target SPM 100% maka angka ini masih dibawah target.

b. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar adalah penjangrian kesehatan yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar, minimal 1 kali pada kelas 1 dan kelas 7 yang dilakukan oleh Puskesmas.Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Kesehatan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

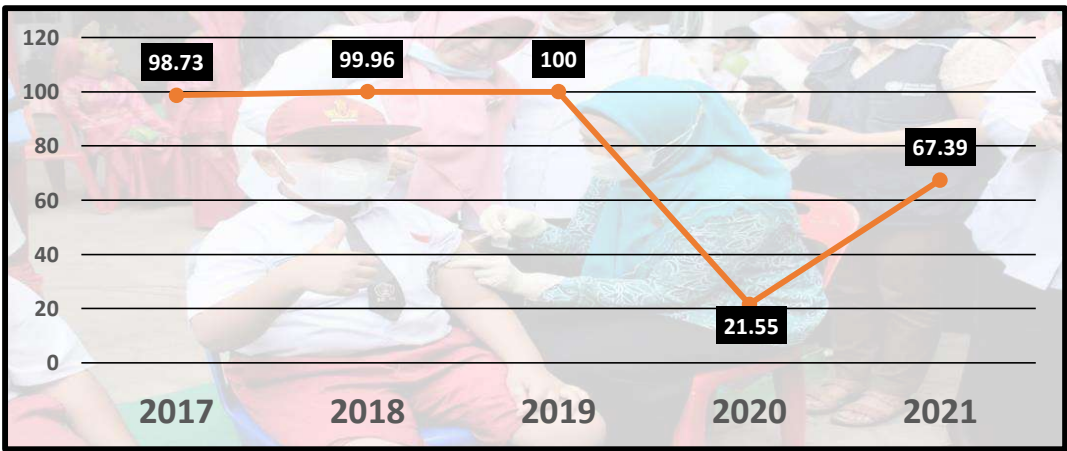
Tabel 2.74
Persentase Anak Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Kesehatan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017- 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah anak pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan	14.805	28.514	25.647	6.010	51.100
2	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang ada di wilayah kerja di wilayah kab/kota tersebut dalam kurun waktu 1 tahun ajaran	14.995	28.526	25.647	27.893	75.830
3	Persentase (%)	98,73	99,96	100	21,55	67,39

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022

Persentase anak pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2017 hingga tahun 2019 cenderung meningkat dan telah mencapai 100% pada tahun 2019 dimana persentase ini merupakan target SPM Bidang Kesehatan. Pada tahun 2020 dikarenakan covid-19 yang melanda Labuhanbatu dan terjadi refocusing maka Persentase Anak Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Kesehatan pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis menjadi 21,55 persen dan pada tahun 2021 mulai meningkat kembali menjadi 67,39 persen.

Grafik 2.21
Persentase Anak Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Kesehatan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017- 2021



c. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut juga merupakan salah satu jenis layanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut :

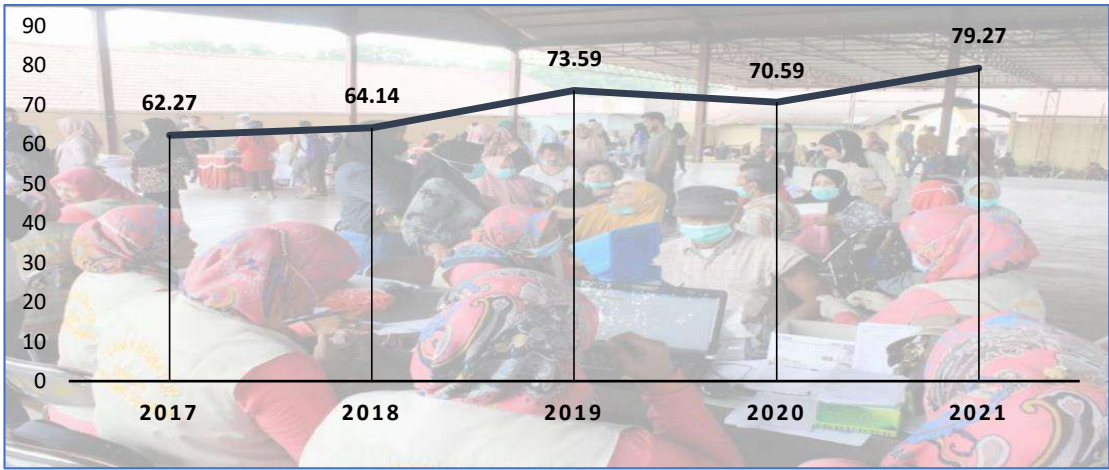
Tabel 2.75
Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017- 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun keatas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu 1 tahun	17.384	18.670	23.109	23.449	30.203
2	Jumlah semua penduduk berusia 60 tahun keatas yang ada di wilayah Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu 1 tahun perhitungan	27.915	29.121	31.403	33.220	38.102
3	Persentase (%)	62,27	64,14	73,59	70,59	79,27

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022

Pelayanan Skrining Kesehatan tersebut dilakukan oleh dokter, bidan, perawat, nutrisisionis/tenaga gizi dan kader posyandu lansia/posbindu. Pelayanan tersebut diberikan di Puskesmas dan jaringannya, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, maupun pada kelompok lansia, bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Grafik 2.22
Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017- 2021



Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut yang dilihat dari indikator persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar, untuk Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2021 sebesar 79,27 persen lebih tinggi dibandingkan capaian cakupan tahun 2020 yang hanya sebesar 70,59 persen, maka dibandingkan dengan target SPM 100%, maka capaian masih di bawah target.

13) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah banyaknya jumlah desa/kelurahan UCI terhadap jumlah seluruh desa/kelurahan. Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.76
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017- 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Desa/Kelurahan UCI	91	96	96	97	96
2	Jumlah Seluruh Desa/Kelurahan	98	98	98	98	98
3	Cakupan (%)	92,86	97,91	97,96	98,98	97,96

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022

Indikator keberhasilan program imunisasi adalah tercapainya Universal Child Immunization (UCI) yaitu cakupan imunisasi dasar lengkap bayi secara merata pada bayi di 100% desa/kelurahan. Pertumbuhan pencapaian desa/kelurahan UCI selama ini belum secara merata mencapai 100% bahkan masih banyak yang belum mencapai target. Jika dibandingkan dengan target nasional (SPM) 100% maka capaian masih belum mencapai target.

14) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA adalah banyaknya jumlah penderita baru TBC BTA yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 tahun terhadap jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA dalam kurun waktu yang sama. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.77
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Tahun 2017- 2021 Di Kabupaten Labuhanbatu

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Penderita baru TBC BTA yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 tahun	–	–	1.533	775	716
2	Jumlah Perkiraan penderita baru TBC BTA dalam kurun waktu yang sama	–	4.717	1.797	1800	1.800
3	Cakupan (%)	–	–	85,31	43,06	39,78

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022

Cakupan penemuan dan penanggulangan penderita panyakit TBC BTA pada tahun 2017 hingga tahun 2021 di Kabupaten Labuhanbatu bersifat fluktuatif. pada tahun 2019 menjadi 85,31 persen dan mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 menjadi 43,06 persen. pada tahun 2021 mengalami penurunan kembali menjadi 39,78 persen, jika melihat target SPM Nasional 100 %, maka target masih belum tercapai.

15) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB) adalah jenis layanan dasar yang wajib diselenggarakan. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB) adalah pelayanan kesehatan diberikan kepada seluruh orang dengan TB yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya di FKTP (Puskesmas dan jaringannya) dan di FKTL baik pemerintah maupun swasta dengan indikator kinerja layanan adalah persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB) di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.78
Persentase Orang Dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standar di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017- 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun	–	–	3.702	2.038	1.612
2	Jumlah orang dengan TB yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun yang sama	–	967	5.823	6.300	7.733
3	Persentase(%)	94,30	72,18	63,58	32,35	20,85

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022

Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi penegakan diagnosa TB dilakukan secara bakteriologis dan klinis serta dapat didukung dengan pemeriksaan penunjang lainnya, selanjutnya dilakukan pemeriksaan pemantauan kemajuan pengobatan pada akhir pengobatan intensif, bulan kelima dan akhir pengobatan. Kemudian diberikan pengobatan dengan menggunakan obat anti tuberkulosis (OAT) dengan panduan OAT standar.

Prinsip pelayanan TB adalah penemuan orang dengan TB sedini mungkin, ditata laksana sesuai standar sekaligus pemantauan hingga sembuh atau “TOSS TB” (Temukan, Obati Sampai Sembuh).

Pada tahun 2017-2021 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB) belum mencapai 100% dan jika dibandingkan dengan SPM nasional 100% maka belum mencapai target. Tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 20,85 persen jika dibandingkan dengan tahun 2020.

16) **Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, pasien TB, pasien infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan, dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya dan diberikan di FKTP (puskesmas dan jaringannya) dan FKTL baik pemerintah maupun swasta serta di lapas/rutan narkotika. Pelayanan Kesehatan Orang Beresiko Terinfeksi HIV di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.79
Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV/ AIDS Mendapatkan Pemeriksaan HIV/ AIDS di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017- 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV/Aids yang mendapatkan pemeriksaan HIV/Aids sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	–	6.348	6.151	6.656	9.543
2	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV/Aids yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama	–	11.180	11.860	27.276	24.438
3	Persentase	–	53,0	51,86	24,40	39,19

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV/AIDS Mendapatkan Pemeriksaan HIV/AIDS Tahun 2017- 2021 cenderung mengalami penurunan, dimana pada tahun 2019 sebesar 51,86 persen menurun tajam pada tahun 2020 menjadi 24,40 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 39,19 persen. Selain itu, dalam rangka penanggulangan penyakit HIV/AIDS Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu juga mendapat Bantuan luar negeri “GF-ATM” serta dukungan dari pihak swasta (LSM) dan KPA. Namun demikian, angka capaian ini jika dibandingkan dengan target nasional (SPM)100%, maka angka ini masih jauh dibawah target.

17) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD adalah banyaknya jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja selama 1 tahun terhadap jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.80
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja selama 1 tahun	80	71	109	89	113
2	Jumlah Penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama	80	71	109	89	113
3	Cakupan (%)	100	100	100	100	100

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat angka kejadian kasus DBD di Kabupaten Labuhanbatu mengalami angka yang fluktuatif. Dimana pada tahun 2017 terdapat 80 kasus DBD, dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 109, pada tahun 2020 menurun menjadi 89 kasus namun pada tahun 2021 terjadi peningkatan menjadi 113 kasus. Angka ini jika

dibandingkan dengan target nasional (SPM) < 51 per 100.000 penduduk, maka angka kesakitan DBD di Kabupaten Labuhanbatu sudah mencapai target dan bahkan melampaui.

Selanjutnya, setiap penderita DBD yang berkunjung ke Puskesmas ditangani dengan baik. Apabila penderita DBD tidak dapat ditangani di Puskesmas maka dirujuk ke Rumah Sakit dan semua penderita yang ditemukan sudah ditangani sesuai dengan prosedur. Hal ini dapat dilihat dari jumlah persentase cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2017 hingga tahun 2021 yang mencapai 100%. Jika dibandingkan dengan target nasional (SPM) 100% maka capaian telah mencapai target.

18) Persentase Penderita Hipertensi Mendapat Pelayanan Kesehatan

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan perubahan dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi juga merupakan salah satu jenis layanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan yang dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Pada tahun 2019, persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 6,68% atau sebanyak 6.905 penderita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dari estimasi jumlah penderita hipertensi Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 103.327 penderita. Dan Pada tahun 2020 persentase jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah sebesar 45.00% atau jumlah penderita hipertensi mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai standar adalah 50.267 dari estimasi jumlah penderita hipertensi Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 111.711 penderita, dan pada tahun 2021 menurun menjadi 24,29% atau sebanyak 26.281 penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dari

jumlah penderita Hipertensi di Kabupaten Labuhanbatu 108.199 orang, dan bila dibandingkan dengan target nasional 100%, angka capaian tersebut masih jauh dari target. Sehingga hal ini ke depan akan menjadi salah satu prioritas layanan kesehatan yang harus ditingkatkan, karena Pemerintah Kabupaten memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya.

19) Persentase Penyandang Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus juga merupakan salah satu jenis layanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan. Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan sesuai standar, yang meliputi Pengukuran gula darah, Edukasi, dan Terapi farmakologi.

Pada tahun 2021, persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 91,79% atau sebanyak 4.732 penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dari 5.155 estimasi jumlah penyandang DM di Kabupaten Labuhanbatu. Jika data capaian di atas dibandingkan dengan capaian Nasional 30% maka capaian Labuhanbatu batu sudah cukup baik tetapi bila dibandingkan dengan target nasional 100%, angka capaian tersebut masih jauh dari target. Sehingga hal ini ke depan juga akan menjadi salah satu prioritas layanan kesehatan yang harus ditingkatkan, karena Pemerintah Kabupaten memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita DM sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya.

20) Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Pada tahun 2004 telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ini mengamanatkan bahwa program jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk program Jaminan Kesehatan melalui

suatu badan penyelenggara jaminan sosial. Badan penyelenggara jaminan sosial telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, implementasinya telah dimulai sejak 1 Januari 2014. Program tersebut selanjutnya disebut sebagai program JKN.

JKN diselenggarakan untuk memberikan perlindungan kesehatan dalam bentuk manfaat pemeliharaan kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Manfaat JKN terdiri atas dua jenis, yaitu manfaat medis dan manfaat non-medis. Manfaat medis berupa pelayanan kesehatan yang komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) sesuai dengan indikasi medis yang tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan. Manfaat non-medis meliputi akomodasi dan ambulans.. Manfaat JKN mencakup pelayanan pencegahan dan pengobatan termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis.

Peserta jaminan kesehatan adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN, PBI APBD, Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBUP)/ Mandiri dan Bukan Pekerja (BP). Jumlah kepesertaan JKN Kabupaten Labuhanbatu sampai dengan tahun 2020 adalah sebanyak 248.138 jiwa yang terdiri dari PBI APBN sebanyak 137.499 jiwa, PBI APBD 19.173 jiwa, PPU 37.232 jiwa dan PBUP/Mandiri sebanyak 49.573 jiwa, dan Bukan Pekerja (BP) sebanyak 4.661 jiwa. Sehingga berdasarkan data tersebut persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk penduduk Kabupaten Labuhanbatu baru mencapai 50,24%. Persentase ini jika dibandingkan dengan target Nasional 2020 95% maka capaian masih jauh dari target yang diharapkan. Hal ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk meningkatkan kepesertaan penduduk Kabupaten Labuhanbatu kedalam sistem jaminan kesehatan nasional melalui konversi jamkesda secara bertahap ke dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional-KIS.

21) Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin adalah jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin dibagi dengan jumlah seluruh masyarakat miskin di wilayah dalam kurun waktu yang sama. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.81
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kunjungan pasien miskin selama 1 tahun	42.542	20.704	11.090	19.173	3.535 (peserta askesda)
2	Jumlah seluruh miskin di wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	-	354.984	169.552	307.847	220.992
3	Cakupan (%)	-	5,83	6,54	6,23	1,60

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2018 sebesar 5,83 % dan terus meningkat pada tahun 2020. Pada tahun 2021 menjadi 1,60 % di mana pasien miskin yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang terdata sebesar 1,60%, hanya untuk peserta Askesda.

22) Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu melalui Dinas Kesehatan menerapkan program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.PHBS merupakan suatu tindakan pencegahan agar masyarakat terhindar dari penyakit dan gangguan kesehatan.

PHBS dapat dilakukan di berbagai tatanan masyarakat, seperti tatanan rumah tangga, sekolah, tempat kerja dan tempat-tempat umum. PHBS di tatanan rumah tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau, dan mampu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Persentase Rumah Tangga ber PHBS di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.82
Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS di Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat disuatu wilayah pada periode waktu tertentu	52.940	9.235	34.856	28.616	16.078
2	Jumlah rumah tangga yang dipantau/survei di wilayah pada kurun waktu yang sama	107.833	109.610	57.431	54.977	27.062
3	Persentase (%)	49,09	68,55	60,69	52,05	54,91

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022

Untuk mencapai rumah tangga ber-PHBS, terdapat sepuluh upaya yang harus dilakukan,yaitu: 1. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan; 2. Memberi bayi ASI eksklusif; 3. Menimbang balita setiap bulan; 4. Menggunakan air bersih; 5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun; 6. Menggunakan jamban sehat; 7. Memberantas jentik di rumah sekali seminggu; 8. Makan sayur dan buah setiap hari; 9. Melakukan aktivitas fisik setiap hari; 10. Tidak merokok di dalam rumah.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat persentase rumah tangga ber PHBS di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2018-2021 cenderung menurun. Pada tahun 2018 mencapai 68,55 persen dan pada tahun 2019 menurun menjadi 60,69 persen, pada tahun 2020 menjadi 52.05 persen dan pada tahun 2021 menjadi 54,91 persen , jika dibandingkan dengan target Nasional 70 persen, maka belum mencapai target.

23) Persentase Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas adalah air minum berkualitas yang memenuhi syarat kesehatan yang digunakan dalam keluarga pada kurun waktu tertentu.

Persentase Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.83
Persentase Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap sumber air minum berkualitas	371.580	382.130	401.273	404.454	424.107
2	Jumlah penduduk di wilayah dan pada periode yang sama	478.593	486.480	494.178	493.899	499.982
3	Persentase (%)	77,64	78,55	81,20	81,89	84,80

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022

Grafik 2.23
Persentase Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas Tahun 2017-2021 Kabupaten Labuhanbatu



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase penduduk yang memiliki akses air minum di Kabupaten Labuhanbatu dari tahun 2017-2021 cenderung meningkat. Pada tahun 2017 persentase penduduk yang memiliki air minum sebesar 77,64 persen meningkat menjadi 78,55 persen pada tahun 2018. Selanjutnya, dari angka capaian 2021 sebanyak 84,80 persen tersebut dapat diartikan bahwa masih terdapat sekitar 15,18 perse penduduk Labuhanbatu yang belum memiliki akses air minum yang berkualitas.

24) Persentase Penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi layak

Akses terhadap sanitasi layak merupakan salah satu pondasi inti dari masyarakat yang sehat. Sanitasi yang baik merupakan elemen penting yang menunjang kesehatan manusia. Sanitasi berhubungan dengan kesehatan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Buruknya kondisi sanitasi akan berdampak negatif di banyak aspek kehidupan, mulai dari turunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat, tercemarnya sumber air minum bagi masyarakat, meningkatnya jumlah kejadian diare dan munculnya beberapa penyakit. Berdasarkan konsep dan definisi SDGs, disebut akses sanitasi layak apabila penggunaan fasilitas tempat buang air besar milik sendiri atau bersama, jenis kloset yang digunakan memenuhi syarat kesehatan antara lain dilengkapi dengan leher angsa, tanki septik (*septic tank*)/Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL). Persentase Penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.84
Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Rumah Tangga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) di suatu wilayah pada periode tertentu	-	-	90.745	92.062	91.758

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
2	Jumlah Rumah Tangga di wilayah dan pada periode yang sama	-	-	111.344	112.960	112.586
3	Persentase (%)	54,43	59,94	72,44	79,06	81,50

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2022.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Kabupaten Labuhabatu dari tahun 2017-2021 cenderung meningkat. Pada tahun 2021 persentase penduduk yang memiliki akses sanitasi layak sebesar 81,50% dapat dilihat bahwa penduduk Labuhanbatu hampir seluruhnya memiliki akses terhadap sanitasi layak.

25) **Tingkat Capaian Pelayanan Rumah Sakit**

Tingkat capaian pelayanan Rumah Sakit digunakan untuk mengetahui tingkat pemanfaatan, mutu dan efisiensi pelayanan rumah sakit. Berikut tingkat capaian pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat kabupaten Labuhanbatu yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.85
Tingkat Capaian Pelayanan Rumah Sakit
di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	B.O.R	80.32%	79.78%	80,18%	64,23%	42,78%
2	T.O.I	0.86	0.89	0,60	2,02 hari	4,22 hari
3	L.O.S	3.52	3.49	3.28	3,62 hari	2,90 hari
4	B.T.O	83.25	83.38	89.16	35,98 kali	49,52 kali
5	G.D.R	43.37%	41.89%	41,55%	20,77%	32,90%

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022

Bed Of Occupancy Rate (BOR) adalah persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Nilai parameter

BOR yang ideal adalah antara 60-85%. Jika dilihat dari standar Nasional tabel diatas menunjukkan RSUD Rantauprapat sampai tahun 2021 nilai parameter BOR belum berada pada kondisi ideal yaitu 42,78 persen .

Turn Over Interval (TOI) adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati, dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1-3 hari. Untuk RSUD Rantauprapat dari tahun 2017 sampai tahun 2021 nilai parameter TOI masih kurang ideal karena dibawah dari standar Nasional. Pada tahun 2021 mengalami perubahan menjadi kondisi yang tidak ideal yaitu 4,22 hari.

Average Length of Stay (LOS) adalah rata-rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan, apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan yang lebih lanjut. Secara umum nilai LOS yang ideal antara 6-9 hari. Untuk RSUD Rantauprapat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 nilai parameter LOS kurang ideal karena dibawah standar Nasional.

Bed Turn Over (BTO) adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. Idealnya dalam satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali. Untuk RSUD Rantauprapat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 nilai parameter BTO kurang baik karena melebihi standar Nasional.

Gross Death Rate (GDR) adalah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dengan tidak lebih dari 45. Untuk RSUD Rantauprapat pada tahun 2021 nilai parameter GDR sudah sesuai dengan standar.

26) Akreditasi Rumah Sakit

Akreditasi Rumah Sakit adalah pengakuan terhadap Rumah Sakit yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, setelah dinilai bahwa Rumah Sakit memenuhi standar pelayanan yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit secara berkesinambungan.

Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat sejak tahun 2012 sudah terakreditasi 16 (enam belas) pelayanan dengan status Lulus Tingkat Lengkap. Tahapan akreditasi selanjutnya akreditasi versi 2012 dan akreditasi JCI (Joint Comission International). Pada tahun 2017 sudah terakreditasi menjadi bintang 4 Madya dan meningkat menjadi Paripurna Bintang 5 pada tahun 2018.

27) Tenaga Media Rumah Sakit

Tenaga medis adalah tenaga ahli kedokteran dengan fungsi memberikan pelayanan medis kepada pasien dengan mutu sebaik-baiknya dan menggunakan tata cara dan teknik berdasarkan ilmu kedokteran dan etik yang berlaku. Tenaga medis di rumah sakit adalah dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi. Saat ini rumah sakit umum daerah rantauprapat merupakan kelas B Non Pendidikan.

Berikut daftar tenaga medis Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat TA. 2017-2021

Tabel 2.86
Daftar tenaga medis RSUD Rantauprapat di Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017-2021

No	Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Spesialis Penyakit Dalam	2	3	4	4	7
2	Spesialis Anak	2	2	2	4	3
3	Spesialis Bedah	2	2	2	4	4
4	Spesialis Obgyn	6	6	6	6	5
5	Spesialis THT	3	3	2	2	2
6	Spesialis Kulit dan Kelamin	1	1	1	1	1
7	Spesialis Mata	1	2	2	2	3
8	Spesialis Patologi Klinik	2	2	2	2	2
9	Spesialis Anastesi	2	2	2	2	2
10	Spesialis Radiologi	1	1	1	2	1
11	Spesialis Neurologi	2	2	2	2	2
12	Spesialis Psikiatri	1	1	1	1	1

No	Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
13	Spesialis Paru	1	1	1	2	2
14	Spesialis Orthopedi	1	1	1	1	1
15	Spesialis Bedah Vaskuler	-	-	-	-	2
16	Spesialis Kardiologi	1	1	1	1	2
17	Spesialis Patologi Anatomi	-	-	1	2	1
18	Spesialis Periodonsia	-	-	1	1	1
19	Spesialis Forensik	-	-	-	-	1
20	Dokter Umum	25	25	26	26	32
21	Dokter Gigi	5	6	7	7	8

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022

Berdasarkan peraturan menteri kesehatan no. 56 tahun 2014 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit, tenaga kesehatan medis di RSUD Rantauprapat belum memenuhi standar ketenagaan rumah sakit kelas B Non Pendidikan.

2.3.1.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Pekerjaan Umum

Infrastruktur jalan merupakan sarana yang sangat vital bagi perkembangan daerah, selain sebagai sarana mobilitas penduduk juga digunakan untuk mengangkut hasil-hasil ekonomi di Kabupaten Labuhanbatu. Ketersediaan infrastruktur yang layak dan memadai merupakan aspek dasar yang diperlukan dalam proses pembangunan. Status pengawasan jalan terbagi menjadi jalan negara, jalan propinsi dan jalan kabupaten/kota. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam system jaringan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional serta jalan tol, dan jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam system jaringan jalan prinmer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota atau antar ibukota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi, sementara jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota

kabupaten dengan pusat kegiatan local, antar pusat kegiatan local, serta jalan umum dalam system jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. Kondisi panjang jalan menurut pemerintahan yang berwenang di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.87
Panjang Jalan Menurut Pemerintahan Yang Berwenang
di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 - 2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jalan Negara	47,55	47,55	47,55	-	-
2.	Jalan Propinsi	129,16	141,5	141,50	141,50	127,20
3.	Jalan Kabupaten	806,08	806,08	1.107,17	1.107,17	1.107,17
Jumlah/Total		982,79	995,13	1.296,22	1.248,67	1.234,37

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Labuhanbatu 2022

Dari tabel diatas pada tahun 2021 jumlah panjang jalan di Kabupaten Labuhanbatu mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 1.248,67 menjadi 1.234,37.

Kondisi baik jaringan jalan menggambarkan ruas jalan dengan permukaan kekerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis, sehingga arus lalu lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan disain dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan. Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

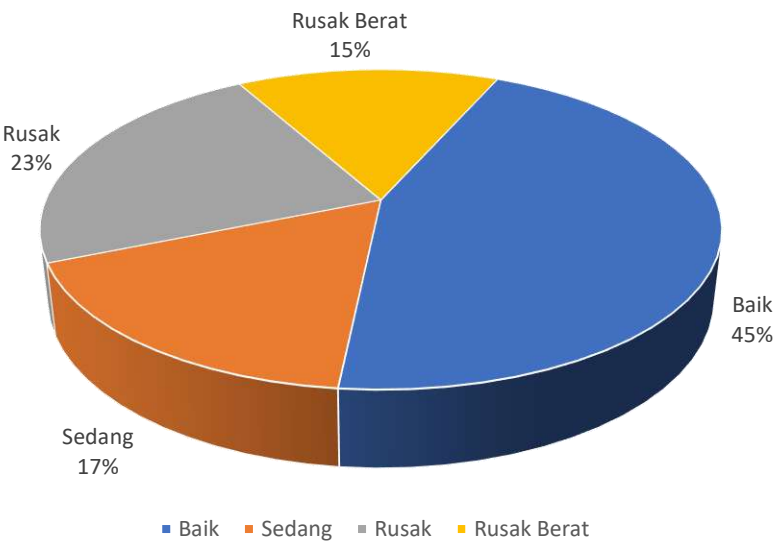
Tabel 2.88
Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017- 2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Baik	497,04	529,37	639,65	527,74	498,18
2.	Sedang	40,33	40,33	196,14	273,79	189,79
3.	Rusak	57,99	57,99	210,15	244,34	255,07
4.	Rusak Berat	387,43	367,43	250,28	202,80	164,13

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Labuhanbatu 2022

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik setiap tahunnya mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat, Pada tahun 2020 panjang jaringan jalan dalam kondisi baik sepanjang 527,74 km, pada tahun 2021 panjang jalan dalam kondisi baik sepanjang 489,18 km.

Grafik 2.24
Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021



Pada tahun 2021 panjang jaringan jalan kondisi rusak mengalami peningkatan menjadi 255,07 km dengan kondisi rusak berat mengalami penurunan sebesar 164,13 km. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa proporsi panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Labuhanbatu masih berada pada tingkatan yang belum memadai guna mendukung pergerakan orang dan barang. Pembangunan sumber daya air ditujukan pada pengendalian dan pengurangan dampak kerusakan akibat banjir, abrasi dan erosi pantai terutama pada wilayah berpenduduk padat, wilayah strategis dan pusat-pusat perekonomian. Pengembangan sarana irigasi diarahkan pada sentra-sentra produksi padi sawah Luas irigasi di Kabupaten Labuhanbatu.

Daerah Irigasi di Kabupaten Labuhanbatu terbagi menjadi 2 (dua) daerah irigasi yaitu Daerah Irigasi Permukaan dan Daerah Irigasi Rawah. Pada tahun 2021 Daerah Irigasi Permukaan di Kabupaten Labuhanbatu seluas 118 Ha dan Daerah Irigasi Rawa seluas 2218 Ha. Data daerah Irigasi di Kabupateen Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.89
Data Jaringan Irigasi Berdasarkan Daerah Irigasi
di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021

No.	Nama Daerah Irigasi		Luas (Ha)			
			Berdasarkan Permen 14/2015	Baku (Pemetaan IGT)	Potensial (Pemetaan IGT)	Fungsional (Pemetaan IGT)
1	Permukaan	Aek Riung/Aek Tapa	64	64	64	64
		Aek Paing	54	54	54	54
		Sigabu	-	-	-	-
		Sibargot	-	-	-	-
Total			118	118	118	118
2	Rawa	Sei Tampang	100	0	0	0
		Tapian Nauli	200	0	0	0
		Nahodaris	500	500	500	500
		Negeri L. Seberang	500	0	0	0
		Selat Besar Kecil	768	768	768	768
		Aek Bilah	926	0	0	0
		Sei Tarolat	950	950	950	950
Total			3944	2218	2218	2218

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan Permen nomor 14 tahun 2015 luas Daerah Irigasi Permukaan di Kaupaten Labuhanbatu seluas 118 Ha dan pada tahun 2021 semua Daerah Irigasi Permukaan telah di fungsikan dan sebesar 59,32 persen Irigasi Permukaan masih dalam kondisi baik dan rusak ringan.

Daerah Irigasi Rawa di Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Permen nomor 14 tahun 2015 di rencanakan seluas 3.944 Ha dan pada tahun 2021 luas Daerah Irigasi Rawa yang di fungsionalkan seluas 2218 Ha yang terdiri dari 1.268 Ha telah di bangun permanen dan 950 Ha masih belum dibangun secara permanen. Perbedaan luas data daerah irigasi rawa yang ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah dengan yang difungsionalkan dikarenakan adanya areal per sawahan yang telah beralih fungsi menjadi lahan perkebunan. Kondisi daerah irigasi rawa di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2021 seluas 718 Ha atau 56,6 persen dengan kondisi rusak sedang dan rusak berat.

Tabel 2.90
Data Daerah Irigasi Berdasarkan Kondisi Irigasi
di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021

No.	Nama Daerah Irigasi		Luas (Ha)			
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
1	Permukaan	Aek Riung/Aek Tapa	20	20	12	12
		Aek Paing	15	15	12	12
	Total		35	35	24	24
2	Rawa	Nahodaris	100	100	150	150
		Selat Besar Kecil	180	170	200	218
	Total		280	270	350	368

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022

Untuk pelayanan air bersih di Kabupaten Labuhanbatu belum sepenuhnya dapat dilayani oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM), sehingga kebutuhan air bersih masyarakat masih dilakukan dengan menampung air hujan, air sumur, mata air, dan air sungai. Berdasarkan data PUDAM Tirta Bina Kabupaten Labuhanbatu pada Tahun 2021 jumlah air minum yang dapat didistribusikan sebanyak 2.665.274 m³, seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.91
Banyaknya Air Bersih Yang Disalurkan Menurut Jenis Konsumen di
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 - 2021.

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Sosial	54.750	73.221	88.943	90.149	106.544
2.	Rumah Tangga	1.443.412	1.592.753	1.809.683	2.046.536	2.187.039
3.	Instansi Pemerintah	35.027	23.035	30.311	19.765	15.231
4.	Niaga Kecil	121.761	194.379	244.737	261.775	298.894
5.	Niaga besar	37.148	43.319	49.806	66.159	57.566
Jumlah		1.692.098	1.926.707	2.223.480	2.484.389	2.665.274

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Labuhanbatu 2022.

Sebagian besar jumlah air minum yang disalurkan setiap tahunnya adalah pada rumah tangga dimana pada tahun 2020 sebanyak 2.046.536 m³ dan pada tahun 2021 bertambah menjadi 2.187.039 m³.

b. Penataan Ruang

Penataan ruang merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan wilayah. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Labuhanbatu mencerminkan keterpaduan pembangunan antarsektor, antarkecamatan, dan antarpemangku kepentingan yang memiliki andil besar dalam pengembangan dan penataan ruang. Tujuan penataan ruang Kabupaten Labuhanbatu pada masa yang akan datang tidak akan terlepas dari peran, fungsi, dan kedudukannya dalam lingkup wilayah yang lebih luas. Untuk mendukung pengembangan peran dan fungsi Kabupaten Labuhanbatu sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di bagian Timur-Utara Provinsi Sumatera Utara, serta tanggap dengan dinamika perkembangan dan permasalahan Kabupaten Labuhanbatu saat ini, dibutuhkan penataan ruang yang baik.

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang, bahwa penataan ruang Kabupaten Labuhanbatu luas wilayah/lahan yang terpakai pada tahun 2017- 2019 sebesar 2015.95 Ha. dengan rincian Permukiman perkotaan 66,26, Permukiman perdesaan 1,42, Perkebunan 1685,39, Sempadan sungai 60,6, Pertanian lahan basah 3,38, Pertanian lahan kering 33,29, Hutan lindung 13,13, Hutan produksi 2,55, Bandar udara 149,93.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Labuhanbatu selama periode tahun 2015-2030 seluas 200 Ha. yaitu meliputi , Kota Rantauprapat seluas kurang lebih 35 Ha, DAS sei Bilah seluas kurang lebih 25 Ha, Rantau Selatan seluas 140 Ha.

Selanjutnya untuk mengefektifkan pengembangan Kabupaten Labuhanbatu, maka hierarki sistem kota atau pusat-pusat pelayanan tersebut di kelompokkan menjadi wilayah pengembangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya perwilayahan pengembangan tersebut, antara lain yaitu:

1. Kedudukan dan peran wilayah yang dicerminkan oleh keterkaitan masing-masing bagian wilayah.
2. Sistem jaringan transportasi yang memungkinkan terbentuknya aksesibilitas antar bagian-bagian wilayah.

- 3. Daya tarik-menarik kota,yang diperlihatkan oleh fungsi dan peranan kota terhadap kota-kota lainnya.
- 4. Homogenitas (kesamaan) potensi sumber daya yang dapat didayagunakan.
- 5. Kondisi fisik dan faktor administrasi dan pendeliniasian batas wilayahnya.
- 6. Pertimbanganrencana struktur perwilayahan yang sudah ada.

Berikut ini fungsi dan peran masing-masing sistem perkotaan atau pusat-pusat pelayanan Kabupaten Labuhanbatu:

Tabel 2.92
Rencana Fungsi Utama Sistem Perkotaan Kabupaten Labuhanbatu

No	Pusat Permukiman	Hierarkis	Fungsi Utama	Kebutuhan Pengembangan
1	Rantauprapat	PKW	Pusat Pemerintahan	Kawasan Perkantoran
			Pusat Perdagangan	Pasar Induk
			Pusat Jasa Keuangan, Pendidikan dan Kesehatan	Bank,PerguruanTinggi, RumahSakit.
2	Labuhan Bilik (Kec.Panai Tengah)	PPK	Pusat Perdagangan Lokal	Pasar
			Pusat Jasa Pendidikan	SD,SLTP danSLTA
			Pusat Agro Industri(produk perkebunan)	Kawasan Industri
3	AekNabara (Kec. Bilah Hulu)	PKL	Pusat Perdagangan Lokal	Pasar
			Pusat Transportasi Udara	BandarUdara
			Pusat Jasa Pendidikan dan Kesehatan	SD, SLTP dan SLTA, RumahSakit
4	Sungai Berombang (Kec.Panai Hilir)	PKLP	Pusat Transportasi Laut	PelabuhanLaut
			Pusat Minapolitan	KawasanMinapolitan
			Pusat Jasa Pendidikan dan Kesehatan	SD, SLTP dan SLTA, RumahSakit
5	Negeri Lama (Kec.Bilah Hilir)	PPK	Pusat Perdagangan Lokal	Pasar
			Pusat Jasa Pendidikan	SD,SLTP danSLTA
6	Pangkalan (Kec.Pangkalan)	PPK	Pusat Pengembangan Perkebunan	Lembaga Perkebunan
			Pusat Jasa Pendidikan	SD,SLTP danSLTA
7	Tj. Sarang Elang (Kec.Panai Hulu)	PPK	Pusat Perdagangan Lokal	Pasar
			Pusat jasa Pendidikan	SD,SLTP danSLTA
			Pusat Transportasi Laut	PelabuhanLaut
			Pusat Perdagangan Lokal	Pasar

No	Pusat Permukiman	Hierarkis	Fungsi Utama	Kebutuhan Pengembangan
8	Janji (Kec.BilahBarat)	PPK	Pusat Jasa Pendidikan	SD,SLTP danSLTA
	a. Kec.BilahBarat; b. Kec.Bilah Hulu; c. Kec. Pangkatan; d. Kec.BilahHilir; e. Kec.Panai Hulu; f. Kec.PanaiTengah; g. Kec.Panai Hilir.	PPL	Pusat Lingkungan	Prasarana Lingkungan

Sumber: RTRW Kabupaten Labuhanbatu 2015-2035

2.3.1.1.4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam bidang perumahan indikator kinerja yang dinilai di antaranya adalah indikator rumah tangga pengguna air bersih dan indikator rumah tangga pengguna listrik. Indikator-indikator tersebut diukur berdasarkan jumlah pengguna air bersih dan listrik pada tahun tertentu, dibagi jumlah keseluruhan rumah tangga/KK pada tahun tertentu dikali 100%. Penyelenggaraan urusan perumahan dilaksanakan agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam kondisi yang sehat, harmonis dan berkelanjutan. Fasilitas perumahan merupakan indikator penting untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga. Semakin baik fasilitas perumahan yang digunakan maka semakin baik juga tingkat kesejahteraan rumah tangga.

a. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum

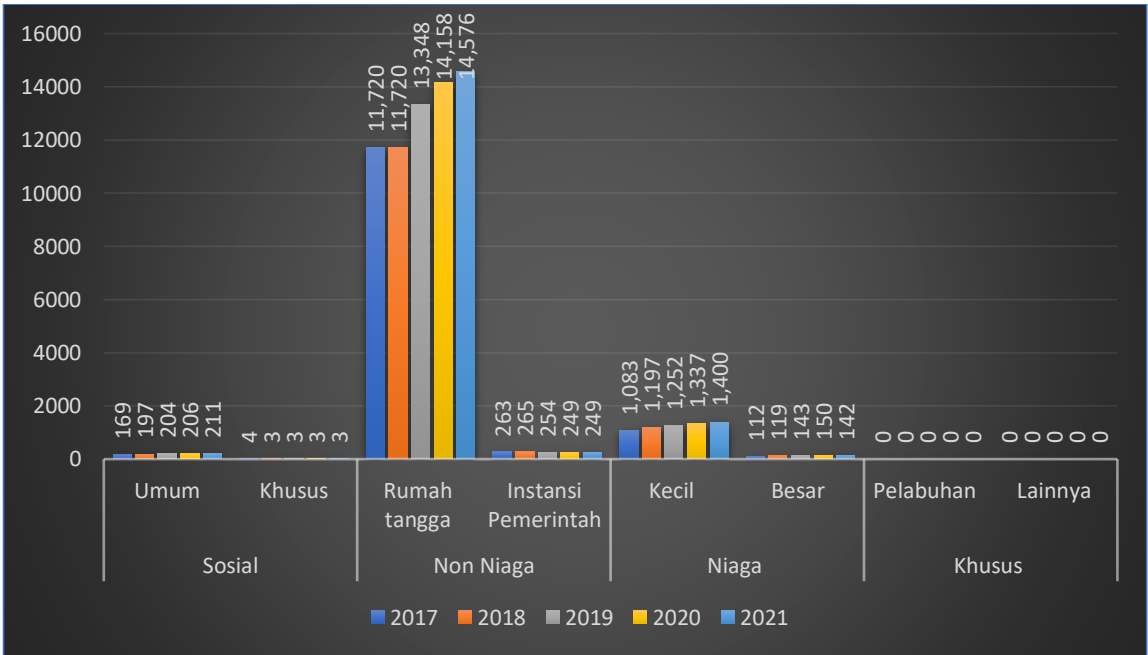
Sumber air minum merupakan indikator penting untuk mengukur kesehatan rumah tangga. Air bersih adalah sumber air minum yang berasal dari PUDAM, pompa, sumur terlindung, mata air terlindung dan air kemasan. Sedangkan sumber air minum tidak bersih berasal dari sumur tidak terlindung, mata air tidak terlindung, sungai, danau/waduk dan air hujan.Pemahaman masyarakat Kabupaten Labuhanbatu tentang penggunaan air bersih sebagai sumber air minum masih relatif kurang dan perlu ditingkatkan lagi. Hal ini tercermin dari realita bahwa masih banyak masyarakat yang menggunakan bukan air bersih untuk dikonsumsi sebagai air minum.

Tabel 2.93
Banyaknya Pelanggan PUDAM Menurut Jenis Konsumen di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021

Jenis konsumen	2017	2018	2019	2020	2021
Sosial					
Umum	169	197	204	206	211
Khusus	4	3	3	3	3
Non Niaga					
Rumah tangga	11.720	11.720	13.348	14.158	14.576
Instansi Pemerintah	263	265	254	249	249
Niaga					
Kecil	1.083	1.197	1.252	1.337	1.400
Besar	112	119	143	150	142
Khusus					
Pelabuhan	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-
Jumlah/Total	13.351	14.461	15.204	16.103	16.581

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Labuhanbatu 2022

Grafik 2.25
Banyaknya Pelanggan PUDAM Menurut Jenis Konsumen di Kabupaten Labuhanbatu 2017-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Labuhanbatu 2022

Pada tahun 2020 Rumah Tangga di Kabupaten Labuhanbatu yang menggunakan air bersih sekitar 14.158 Kemudian meningkat di tahun 2021 menjadi 14.576. Sebagian besar pelanggan PUDAM berasal dari sektor rumah tangga.

b. Banyaknya Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu

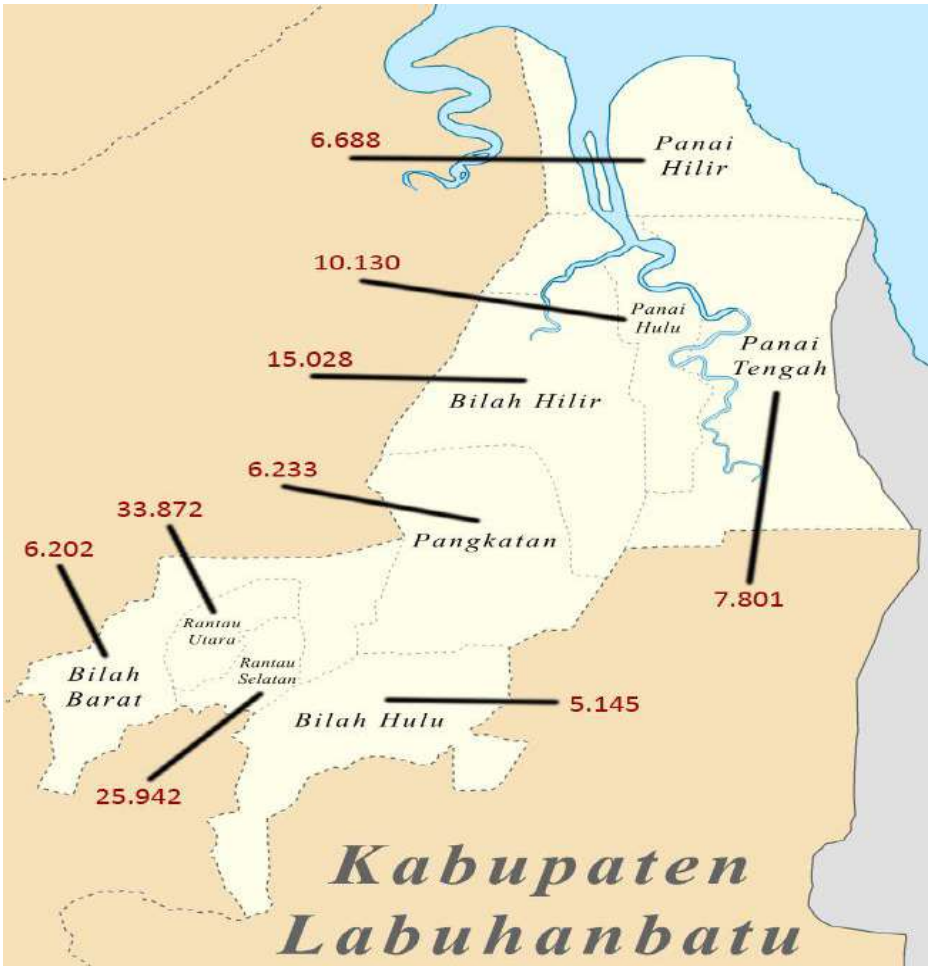
Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang tak kalah pentingnya mengenai fasilitas perumahan adalah pemakaian listrik sebagai sumber penerangan. Indikator ini menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam menjangkau pelayanan penerangan di suatu wilayah. Dalam hal penggunaan listrik jumlah Kecamatan pengguna Listrik PLN Menurun dari tahun 2020 sebesar 7.230 menjadi 117.041 di tahun 2021 seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.94
Banyaknya Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021
050 Bilah Hulu	28.457	30.074	31.857	32.788	5.145
070 Pangkatan	6.752	7.136	7.562	7.781	6.233
080 Bilah Barat	4.956	5.237	5.549	5.711	6.202
130 Bilah Hilir	11.363	12.008	12.723	13.093	15.028
140 Panai Hulu	9.054	9.569	10.138	10.433	10.130
150 Panai Tengah	5.162	5.455	5.780	5.948	7.801
160 Panai Hilir	5.470	5.781	6.125	6.303	6.688
210 Rantau Selatan	16.178	17.097	18.114	18.641	25.942
220 Rantau Utara	20.461	21.622	22.908	23.573	33.872
Jumlah/Total	107.853	113.979	120.756	124.271	117.041

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Labuhanbatu 2022

Gambar 2.2
Banyaknya Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021



c. Penyelenggaraan Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta menjamin kepastian bermukim. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dari tahun 2017-2021 telah menyelenggarakan kawasan permukiman khususnya dan pencegahan dan peningkatan perumahan kumuh dan permukiman kumuh guna mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan

permukiman. Berikut data lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai gambaran pencegahan dan peningkatan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Labuhanbatu.

Tabel 2.95
Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021

Kecamatan	Kelurahan	Lingkungan	Luas Kawasan Kumuh (Ha)				
			2017	2018	2019	2020	2021
Rantau Utara	Aek Paing	Aek Paing Bawah II	5,90	5,90	5,90	5,90	11,28
Rantau Utara	Bina Raga	Sei Tawar	0,41	0,41	0,41	0,41	9,50
		Bakti Lama					-
		Gajah Mada	-	-	-	-	5,70
Rantau Utara	Cendana	Bogor	2,40	2,40	2,40	2,40	9,96
		Bina raga	-	-	-	-	3,66
Rantau Utara	Kartini	Ahmad Yani II	6,51	6,51	6,51	6,51	-
		Ahmad Yani I	-	-	-	-	8,00
Rantau Utara	Padang Bulan	Balai Desa	6,51	6,51	0,00	0,00	-
		Kampung Sawah	-	-	-	-	6,00
Rantau Utara	Padang Matinggi	Bangsai	8,51	8,51	4,20	4,20	4,20
Rantau Utara	Pulo Padang	Bandar Gula Kampung	8,50	8,50	3,00	3,00	-
		Pengkalian					3,00
Rantau Utara	Rantau Prapat	Kampung Tempel	9,50	9,50	9,50	9,50	5,88
		Paindoan					9,00
		Pekan Lama	-	-	-	-	6,00
		Pensiunan	-	-	-	-	8,00
Rantau Utara	Sirandorong	Al-Huda	2,75	2,75	2,75	2,75	4,37
		Aek Matio	-	-	-	-	9,00
		Talak Simin	-	-	-	-	7,35
Rantau Utara	Siringo-ringo	Pemancar	0,90	0,90	0,90	0,90	5,00
		Kampung Tali	-	-	-	-	2,80
Rantau Selatan	Sidorejo	Bulu Cina	7,00	7,00	0,00	0,00	-
		Sidorejo	-	-	-	-	11,70
Rantau Selatan	Sigambal	Kampung Sawah I	-	-	-	-	12,80
		Kampung Sawah II	4,62	4,62	4,62	4,62	6,90
Rantau Selatan	Sioldengan	Sibuaya	6,10	6,10	6,10	6,10	8,72
		Bakaran Batu	-	-	-	-	8,90
		Khairil Anwar	-	-	-	-	9,10
Rantau Selatan	Bakaran Batu	Purwodadi B	1,82	1,82	1,82	1,82	11,62

Kecamatan	Kelurahan	Lingkungan	Luas Kawasan Kumuh (Ha)				
			2017	2018	2019	2020	2021
Rantau Selatan	Danau Balai	Kampung Songo	10,20	10,20	10,20	10,20	-
		Danau Balai A1	-	-	-	-	11,21
		Danau Balai A2	-	-	-	-	13,12
		Danau Balai B	-	-	-	-	17,00
		Danau Balai C	-	-	-	-	18,79
		Kampung Baru	-	-	-	-	12,89
Rantau Selatan	Lobusona	Rukun	2,51	2,51	2,51	2,51	4,86
		Perdamean	-	-	-	-	5,55
Rantau Selatan	Pardamaean	Sepakat	7,00	7,00	7,00	7,00	22,00
Rantau Selatan	Ujung Bandar	Padat Karya	0,47	0,47	0,47	0,47	7,00
Rantau Selatan	Urung Kompas	Suka Dame	2,65	2,65	2,65	2,65	8,00
Panai Hilir	Sei Berombang	Lingkungan I dan II	3,20	3,20	3,20	3,20	-
Panai Hilir	Sei Berombang	Lingkungan V dan VII	3,72	3,72	3,72	3,72	-
Panai Tengah	Labuhanbilik	Lingkungan I dan II	3,20	3,20	3,20	3,20	-

Sumber: SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022

Perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan dengan melakukan kriteria terhadap ketersediaan dan peningkatan kualitas bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan; dan proteksi kebakaran. Penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan secara menyeluruh sehingga tidak hanya meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman di kawasan tersebut tetapi mengurangi luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Labuhanbatu.

Berdasarkan tabel di atas penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Labuhanbatu dari Tahun 2017-2021 dilakukan tetapi tidak menyeluruh terhadap tujuh (7) kriteria di atas sehingga pengurangan luasan hanya terjadi di beberapa lingkungan di Kecamatan Rantau Utara dan Kecamatan Rantau Selatan,

2.3.1.1.4. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum di masyarakat pada Tingkat RT yang tugasnya

membantu pelayanan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut membantu memelihara keamanan, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial lainnya, satuan ini memiliki peran penting secara luas. Mengacu pada Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, maka untuk pencapaian target Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Kabupaten Labuhanbatu dibutuhkan petugas Linmas 1 orang dalam setiap RT.

Tabel 2.96
Jumlah dan Kebutuhan Minimal Satuan Linmas di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Linmas	41	41	28	40	-
2	Kebutuhan minimal	718	718	718	190	-
3	Kekurangan	673	677	690	50	-

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022.

Dari tabel diatas dapat dilihat tahun 2021 tidak tercantum dalam tabel karena sudah melebur menjadi satuan polisi pamong praja.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satunya ialah melalui penegakan Perda yang telah disusun. Penegakan Perda di Kabupaten Labuhanbatu selama ini sudah dilakukan cukup optimal oleh satuan Polisi Pamong Praja, namun besarnya luas wilayah dan objek yang perlu diawasi, kemungkinan masih terdapat pelanggaran perda yang belum terpantau dan ditindak sesuai aturan yang berlaku.

Mengacu pada Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja telah dilakukan kalkulasi dengan kriteria umum meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD dan rasio belanja aparatur serta kriteria teknis klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah, jumlah perda, jumlah perkara, tingkat potensi konflik sosial masyarakat, jumlah kecamatan, aspek karakteristik dan kondisi geografis dengan total skor 676 sehingga diperoleh kebutuhan jumlah satuan polisis pamong praja antara 251 sampai 350 orang.

Tabel 2.97
Jumlah dan Kebutuhan Minimal Satuan Polisi Pamong Praja
di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Polisi Pamong Praja	90	90	89	117	118
2	Kebutuhan Minimal	450	450	450	167	368
3	Kekurangan	360	360	361	50	250

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022.

Penyelenggaraan dalam Urusan Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat khususnya dalam kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP tidak melakukan kegiatan pembinaan pada tahun 2020, Sedangkan dalam pembinaan politik daerah di Kabupaten Labuhanbatu selama periode 2017-2021 juga tidak melaksanakan Kegiatan. Kerjasama antara pemeluk agama dalam pembangunan kota yang saat ini telah berjalan, perlu untuk lebih ditingkatkan terutama melalui forum rutin diskusi lintas agama.

Tabel 2.98
Jumlah LSM di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 - 2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah LSM	114	125	135	-	62

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022.

Tabel 2.99
Jumlah Urusan Wajib Kesbang dan Politik dalam Negeri di Kabupaten
Labuhanbatu Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	0	0	1	0	0
2	Kegiatan pembinaan politik daerah	0	0	1	0	0

Sumber :SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022.

Sehubungan dengan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan telah dilaksanakan berbagai kegiatan Diskusi Lintas Agama dengan frekuensi sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.100
Frekuensi Diskusi Lintas Agama di Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017 - 2021

URAIAN	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Diskusi	3	1	2	0	0

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022.

2.3.1.1.5. Sosial

Ketersediaan sarana sosial bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan merupakan salah satu pelayanan yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah seperti panti asuhan dan panti jompo. Di Kabupaten Labuhanbatu, penanganan tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) telah dilaksanakan pada tahun 2017-2021 yaitu antara lain melalui Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya dengan melaksanakan kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi, kemudian juga dilaksanakan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan melaksanakan kegiatan penertiban penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Selanjutnya juga dilaksanakan program-program lain yaitu Program pembinaan anak terlantar yang dilaksanakan oleh OPD Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Sekretariat Daerah Kabupaten, Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma dengan melaksanakan kegiatan bantuan alat bagi penyandang cacat, Program pembinaan panti asuhan/panti jompo dengan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/panti jompo yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu dan Program pembinaan eks penyandang penyakit

sosial eks narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya yang dilaksanakan oleh OPD Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu dengan melaksanakan kegiatan pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial. Kemudian dapat dijelaskan bahwa Jumlah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.101
Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial
di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	72	78	55	-	-
2	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	27.527	27,335	25,594	21.149	22.095
3	PMKS Yang memperoleh bantuan sosial	0,26	0,29	0,22	—	-

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022.

Dari tabel dapat dilihat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial pada tahun 2020-2021 dari dana APBD Kabupaten tidak ada karena reconfusing anggaran akibat dampak dari pandemi Covid-19, tetapi bantuan sosial dari Pemerintah Pusat diberikan kepada PMKS yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial berupa bantuan untuk PMKS yang tergolong pada kelompok Program Keluarga Harapan (PKH) dan kelompok penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Pada tahun 2017-2021 jumlah sarana sosial yang ada di Kabupaten Labuhanbatu tidak ada penambahan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak

7 Buah dengan jumlah Panti Asuhan sebanyak 6 buah, dan 1 Buah Panti Jompo yang merupakan UPT PS Lanjut Usia Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan Panti Rehabilitasi dan Rumah Singgah belum tersedia di Kabupaten Labuhanbatu. Keberadaan Panti Rehabilitasi dan Rumah singgah sangat dibutuhkan di Kabupaten Labuhanbatu mengingat masih banyaknya PMKS yang memerlukan rehabilitasi dan pembinaan lebih lanjut yang terarah dan terpadu dari Pemerintah Daerah sehingga PMKS diharapkan mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dan meningkatkan kesejahteraan sosial PMKS.

Tabel 2.102
Jumlah Sarana Sosial di Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Panti Asuhan	5	6	6	6	6
2	Jumlah Panti Jompo	1	1	1	1	1
3	Jumlah Panti Rehabilitasi	–	–	–	–	–
4	Jumlah Rumah Singgah	–	–	–	–	–

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022.

2.3.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

2.3.1.2.1. Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang penting untuk dibahas karena sebagai salah satu indikator pembangunan ekonomi. Kondisi ketenagakerjaan yang baik berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Permasalahan ketenagakerjaan yang masih menjadi hambatan di Indonesia diantaranya adalah tingginya tingkat pengangguran, rendahnya kualitas tenaga kerja, pekerja dibawah umur dan lain sebagainya. Terkait dengan kualitas tenaga kerja, partisipasi penduduk dalam dunia kerja harus didukung oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Hal ini

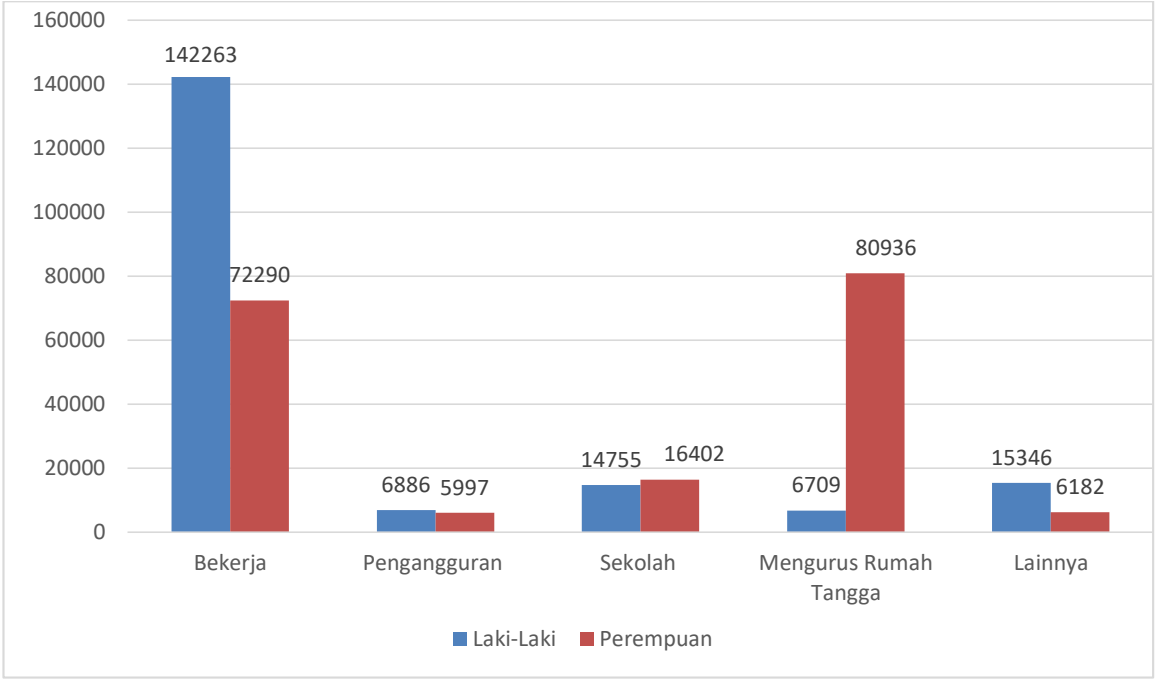
karena tuntutan pada tenaga kerja tidak hanya sebatas kemampuan untuk bekerja, namun dihadapkan pula pada kemampuan untuk berkompetisi sesuai dengan kondisi kerja dan persaingan lapangan kerja. Pembahasan mengenai ketenagakerjaan menjadi lebih menarik apabila dilihat dari partisipasi laki-laki maupun perempuan didalam dunia kerja. Seiring dengan perkembangan zaman, jumlah perempuan yang bekerja mulai meningkat karena adanya tuntutan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, sehingga perempuan sebagai tenaga kerja juga merupakan isu yang menarik untuk dibahas. Karakteristik perempuan sebagai tenaga kerja, kualitas SDM-nya, dan kedudukannya dibandingkan dengan laki-laki merupakan hal yang perlu dijawab untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi ketenagakerjaan di Indonesia dari sudut pandang yang lebih menyeluruh.

Data mengenai ketenagakerjaan yang digunakan dalam publikasi ini diperoleh dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) bulan Agustus tahun 2020 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Keterangan yang dikumpulkan dari hasil Sakernas merupakan keterangan perorangan untuk setiap anggota rumah tangga berumur 10 tahun ke atas, namun uraian yang disajikan dalam publikasi ini mencakup informasi ketenagakerjaan bagi penduduk berumur 15 tahun ke atas. Pembahasan dalam Bab ketenagakerjaan ini mencakup komposisi penduduk usia kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Penduduk yang bekerja menurut karakteristiknya antara lain tingkat pendidikan, status perkawinan, lapangan pekerjaan, status pekerjaan, rata-rata upah dan sektor formal dan informal, serta membahas mengenai pengusaha industri mikro dan kecil.

a. Komposisi Penduduk Usia Kerja

Penduduk usia kerja dibagi kedalam dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang dilakukannya, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri atas penduduk yang bekerja dan penduduk yang menganggur atau pengangguran terbuka, sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk yang sekolah, mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya.

Grafik 2.26
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin, 2021



Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu 2022

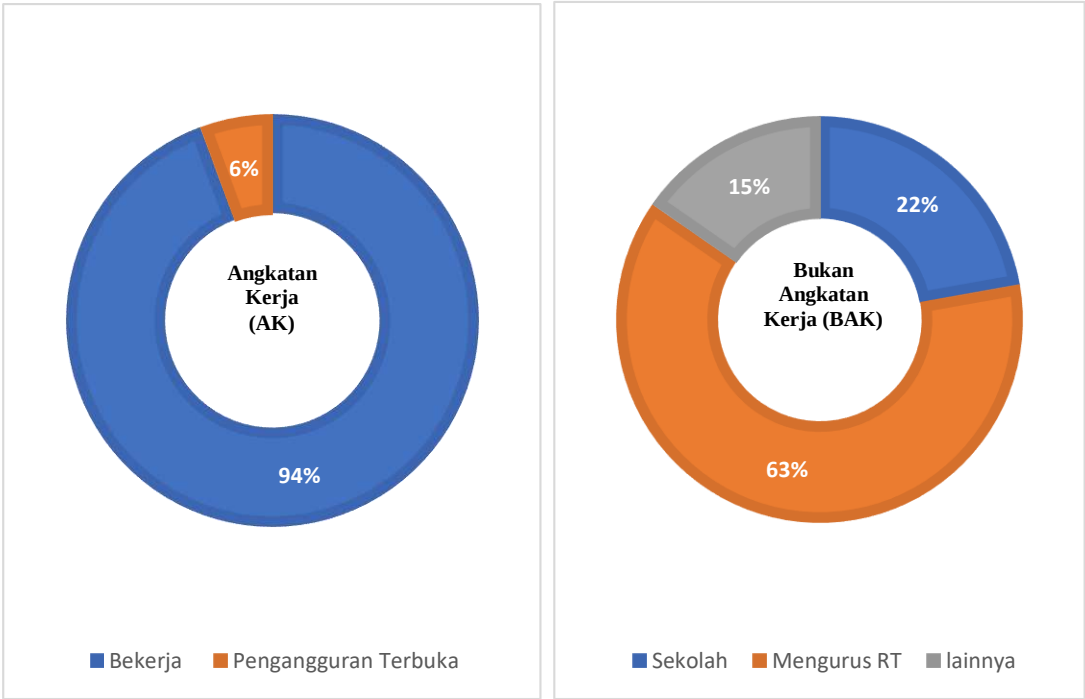
Pada grafik di atas Penduduk laki-laki umumnya merupakan tulang punggung keluarga sehingga mereka yang seharusnya bekerja, sedangkan pekerjaan rumah tangga lebih dibebankan pada kaum perempuan.

Tabel 2.103
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021

No	Jenis Kegiatan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Angkatan Kerja			
	a. Bekerja	142.263	72.290	214.553
	b. Pengangguran Terbuka	6.886	5.997	12.883
2	Bukan Angkatan Kerja			
	a. Sekolah	14.755	16.402	31.157
	b. Mengurus RT	6.709	80.936	87.645
	c. lainnya	15.346	6.182	21.528
	Jumlah	185.959	181.807	367.766

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu 2022.

Grafik 2.27
Persentase Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021



Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021, dapat diketahui bahwa dari jumlah penduduk Labuhanbatu yang berumur 15 tahun ke atas laki-laki yang bekerja sebesar 142.263 dan perempuan 72.290.

Salah satu hal yang dapat digunakan untuk melihat kesejahteraan masyarakat adalah angka tingkat pengangguran terbuka. Makin rendahnya angka TPT, berarti kesejahteraan masyarakat makin meningkat, demikian pula sebaliknya. Angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) berguna sebagai salah satu acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Hal ini penting karena tingginya angka pengangguran akan menimbulkan konsekuensi negatif bagi masyarakat, misalnya meningkatnya kriminalitas. Disamping itu, pergerakan indikator ini akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, angka pengangguran (TPT) di Kabupaten Labuhanbatu sebesar 12.883.

Jumlah pencari kerja di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2021 dapat dilihat pada table berikut

Tabel 2.104
Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan di Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017-2021

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin	2017		2018		2019		2020		2021	
			TERDAFAR	DI TEMPATKAN	TERDAFAR	DI TEMPATKAN	TERDAFAR	DI TEMPATKAN	TERDAFAR	DI TEMPATKAN	TERDAFAR	DI TEMPATKAN
1	SD	Lk	-	-	1	-	6	5	2	-	1	-
		Pr	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
2	SMP	Lk	1	-	3	3	20	12	6	-	1	-
		Pr	-	-	2	2	30	22	6	-	-	-
3	SMA	Lk	256	30	217	15	108	17	29	4	31	11
		Pr	336	152	233	62	126	81	34	3	13	5
4	SMK	Lk	-	-	-	-	105	8	50	8	29	8
		Pr	-	-	-	-	102	60	22	1	9	9
5	D-I/ D-II/ D-III	Lk	-	-	-	-	13	2	4	1	7	1
		Pr	-	-	-	-	20	7	4	2	5	-
6	Universitas	Lk	-	-	-	-	85	23	18	3	46	1
		Pr	-	-	-	-	66	39	17	1	25	3

Sumber :SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022

Berdasarkan Tabel diatas Pada tahun 2021, Tingkat Pendidikan SMA 44 orang dan SMK 38 orang. Pada Tingkat pendidikan S-I/D-IV yang terdaftar di Kabupaten Labuhanbatu berjumlah 71 orang.

b. Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun

Sengketa pengusaha-pekerja per tahun dari tahun 2017-2021 cenderung berfluktuasi, dimana pada tahun 2017 naik menjadi 60 kasus, sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebanyak 52 kasus, tahun 2019 meningkat menjadi 56 kasus kemudian pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 71 kasus dan pada tahun 2021 menjadi 99 kasus, Penyebab terjadinya sengketa antara pengusaha-pekerja disebabkan

oleh kurangnya pemahaman pekerja dan pengusaha terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Tabel 2.105
Jumlah sengketa pengusahan dan pekerja di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Sengketa pengusahan dan pekerja	60 kasus	52 kasus	56 kasus	71 Kasus	99 kasus

Sumber: SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022

c. Produktivitas Kerja

Kondisi penduduk yang bekerja menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Labuanbatu didominasi oleh tingkat pendidikan maksimum SD menyusul mereka yang berpendidikan SLTP dan SLTA Umum.Tingginya penduduk yang bekerja maksimum SD menunjukkan masih rendahnya kualitas pekerjaan yang berakibat terhadap rendahnya produktivitas tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat di Labuhanbatu. Berdasarkan kondisi diatas perlu melakukan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Kerja. Pelatihan Keterampilan Kerja bertujuan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin dan etos kerja pada tingkat dan keterampilan serta keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

d. Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Jumlah perusahaan yang telah melaporkan mengenai ketenagakerjaannya berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Kabupaten Labuhanbatu dari tahun 2015 sampai 2019 mengalami peningkatan 8 (delapan) perusahaan. Pada tahun 2014, 38 perusahaan menjadi 46 perusahaan di tahun 2018, Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.106
Jumlah perusahaan yang telah melaporkan mengenai Ketenagakerjaannya
di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja	45 Prsh	46 Prsh	81 Prsh	82 Prsh	86 Prsh

Sumber :SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022. (data ini sudah tidak ada di disnaker) ada di provinsi)

e. Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah tahun 2017-2021 yaitu tidak terjadi perselisihan, karena tidak ada peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang mengatur tentang ketenagakerjaan.

2.3.1.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2017-2021 terhadap jumlah penduduk perempuan yang berusia 15 (lima belas) tahun keatas pada tahun yang sama, mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2017 berjumlah 36,02% dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 51,97% pada tahun 2019 mengalami penurunan 38,95 %, pada tahun 2020 terjadi peningkatan menjadi 47,32 % dan penurunan pada tahun 2021 menjadi 43,06 % berjumlah jumlah penduduk perempuan berumur 15 (lima belas) tahun keatas, seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.107
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Di Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Angkatan Kerja Perempuan	57.286	84.198	64.315	84.190	78.287
2.	Penduduk Perempuan Berumur 15 Tahun Keatas	159.031	161.992	165,110	177.901	181.807
3	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	36,02	51,97	38.95	47,32	43,06

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Labuhanbatu 2022

b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai yang termaktub dalam pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2018 cukup tinggi yaitu 66 kasus namun mengalami penurunan yang signifikan berkurang 63 kasus menjadi 3 kasus pada tahun 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.108
Rasio KDRT Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah KDRT	71	66	5	15	3
2.	Jumlah Rumah Tangga	104.137	105.101	113.179	139.900	112.586
	Rasio	0,068	0,062	0,004	0,107	0,002

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022

c. Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi Indonesia pada tahun 1990 Bab (1) Pasal (1), yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dari data tahun 2021 penduduk Kabupaten Labuhanbatu yang berumur 0-19 tahun mencapai 188.908 jiwa atau sebesar 37,78 persen dari keseluruhan penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa berinvestasi untuk anak adalah berinvestasi untuk penduduk Labuhanbatu. Gambaran kondisi anak saat ini menjadi dasar yang penting bagi pengambilan kebijakan yang tepat bagi anak. Anak-anak merupakan kelompok penduduk usia muda yang

mempunyai potensi untuk dikembangkan agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan di masa mendatang. Apabila dilihat dari sudut pandang ketergantungan maka sepertiga dari penduduk Kabupaten Labuhanbatu adalah usia anak yang masih membutuhkan perlindungan baik oleh keluarga, masyarakat, ataupun negara.

Berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber (Badan Pusat Statistik dan Lembaga Perasyarakatan Kabupaten Labuhanbatu) pada tahun 2021 terdapat 1 Perempuan yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Labuhanbatu.

Keadaan penduduk Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021 menunjukkan bahwa penduduk perempuan dan laki-laki hampir merata. Persentase penduduk perempuan sebesar 49,27 persen sedangkan laki-laki sebesar 50,73 persen. Munculnya isu gender sebagai upaya untuk memberdayakan perempuan. Dalam pembangunan, perempuan dan laki-laki harus selalu mendapat akses yang sama, dapat berpartisipasi dan bersama-sama mempunyai kesempatan dalam penetapan keputusan dan akhirnya dapat menikmati manfaat pembangunan secara bersama-sama.

Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif serta terwujudnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang. Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah mengukur kapabilitas dasar manusia pada bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang terfokus pada ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2020, angka harapan hidup untuk Kabupaten Labuhanbatu sebesar 69,93 persen dan pada tahun 2021 sebesar 69,95 persen dan jika dibandingkan dengan target nasional 71,57 tahun maka persentase capaian kinerja kabupaten belum mencapai target nasional.

Perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan dapat diimplementasikan melalui berbagai program yaitu program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, program penguatan kelembagaan PUG dan PUHA, program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, program peran serta dan kesetaraan gender

dalam pembangunan. Berbagai program tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak serta meningkatkan kualitas hidup perempuan.

2.3.1.2.3. Pangan

Ketahanan pangan merupakan upaya sistematis dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi pangan setiap individu dalam suatu wilayah yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Upaya peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Labuhanbatu yang dilaksanakan dari tahun 2017 sampai dengan 2021 melalui program peningkatan ketahanan pangan dengan melaksanakan berbagai kegiatan antara lain: Penanganan daerah rawan pangan, analisa rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan, Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan, pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok, pengembangan desa mandiri pangan, Pengembangan Sistem Informasi Pasar, Peningkatan Mutu dan dan Keamanan Pangan.

Tabel 2.109
Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg)	52.158.257	61.005.702	146.944.000	84.292.740	72.104.000
2	Jumlah Penduduk	478.593	486.480	494.178	493.899	499.982
3	Ketersediaan pangan utama	108,98	125,40	297,35	170,67	144,21

Suber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2021 rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg) di Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 72.104.000 kg sehingga ketersedian pangan utama di Kabupaten Labuhanbatu sebesar 144,21 persen

Tabel 2.110
Jumlah Desa Rawan Pangan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Desa / Kelurahan	98	98	98	98	98
2.	Jumlah Desa Rawan Pangan	–	–	–	–	–
3.	Persentase Desa Rawan Pangan	–	–	–	–	–

Sumber: SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022

Regulasi Ketahanan Pangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk mendukung penyelenggaraan Ketahanan Pangan di daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu No. 25 Tahun 2011 tentang Dewan Ketahanan Pangan Daerah.

Sehubungan dengan keluarnya Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan. Maka setiap daerah baik Provinsi maupun Kabupaten membentuk DKP di daerahnya masing. Dewan Ketahanan Pangan ini mempunyai tugas (1) merumuskan kebijakan di bidang ketahanan pangan (2) melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional. Tugas tersebut meliputi kegiatan dibidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulan masalah pangan dan gizi.

Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten diketuai oleh Bupati, yang beranggotakan SKP yang terkait dengan Ketahanan Pangan, rapat pleno minimal diadakan 2 x 1 tahun yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan.

Perda, Perbup yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan Ketahanan Pangan di daerah :

1. Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) Dalam Mendukung Ketahanan Pangan

2. Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan, yang meliputi Ruang Lingkup :
- a. Ketersediaan pangan.
 - b. Penganekaragaman pangan
 - c. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan.
 - d. Distribusi pangan
 - e. Mutu dan gizi pangan.

2.3.1.2.4. Pertanian

Sertifikat merupakan surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah (Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Terjadi kenaikan jumlah Sertifikat Hak atas tanah di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2020 – 2021 sebesar 1996. Data banyaknya sertifikat tanah yang dikeluarkan menurut jenis hak tanah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.111
Banyaknya Sertifikat Tanah Yang Dikeluarkan Menurut Jenis Hak Atas Tanah di Kabupaten Labuhanbatu 2017-2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Hak Milik	2.238	6.344	7.168	7.027	1.846	3.430
2.	Hak Guna Bangunan	2	5	3	8	16	389
3.	Hak Guna Usaha	1	-	10	8	-	3
4.	Hak Pakai	14	7	-	62	67	103
	Jumlah/Total	2.225	6.356	7.181	7.105	1.929	3.925

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Labuhanbatu, 2022

Izin lokasi diperlukan oleh suatu perusahaan untuk memperoleh tanah dalam rangka melaksanakan rencana penanaman modal yang dimilikinya. Izin lokasi ini diatur di dalam Peraturan Menteri Agraria Kepala

Badan Pertanahan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi (**Permenag No. 17/2019**). Setiap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal wajib mempunyai izin lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal yang bersangkutan.

Tabel 2.112
Persentase Penyelesaian Izin Lokasi di Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017- 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Izin Lokasi	2	7	1	2	–
2.	Permohonan Izin Lokasi	2	7	1	2	–
3	Persentase Penyelesaian Izin Lokasi	100	100	100	100	–

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah Permohonan izin lokasi di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2018 sebanyak 7 permohonan dan mengalami penurunan pada tahun 2019 dan 2020 menjadi 1 dan 2 permohonan izin lokasi.

2.3.1.2.5. Lingkungan Hidup

Pelayanan persampahan di Kabupaten Labuhanbatu khususnya dalam hal penanganannya sebagian besar pengolahan sampah di TPA masih dilakukan secara *open dumping*. Persentase jumlah sampah yang tertangani di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2021 hanya sebesar 22,94% tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.113
Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani di Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah sampah yang tertangani (Ton)	-	41,78	39,43	21,43	28,55
2.	Total jumlah timbulan sampah (Ton)	-	137,00	138,88	139,00	124,46
3.	Persentase Jumlah sampah yang tertangani (%)	-	30,50	28,39	15,42	22,94

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022.

2.3.1.2.6. **Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Penyebaran penduduk di Kabupaten Labuhanbatu saat ini masih belum merata. Dari 9 Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu, Pada tahun 2021, Jumlah penduduk Labuhanbatu mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 499.982 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 192 jiwa per km².

Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Rantau Utara yaitu sebanyak 96.485 jiwa dengan kepadatan penduduk 858 jiwa per km² sedangkan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Pangkatan sebanyak 37.766 dengan kepadatan penduduk 94 jiwa per km². Kecamatan Rantau Selatan merupakan kecamatan yang paling padat penduduknya dengan kepadatan penduduk 1.150 jiwa per km² dan Kecamatan Panai Tengah merupakan Kecamatan dengan kepadatan penduduk terkecil yaitu sebesar 94 jiwa per km².

Dengan jumlah penduduk sebanyak 493.899 orang, maka penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan catatan sipil menjadi sangat penting untuk dapat dikelola secara baik. Dalam hal urusan wajib kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Labuhanbatu sampai tahun 2020 pelayanan yang diberikan cukup baik, ini terlihat dari banyaknya kegiatan pengurusan data kelahiran, kematian, KTP, KK, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan anak Adopsi, dan Surat Keterangan.

Tabel 2.114
Jumlah Wajib KTP dan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017- 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Wajib KTP	343.900	317.676	341.324	346.609	348.748
2.	Jumlah Kepala Keluarga	137.963	136.063	135.705	139.900	141.962
3	Jumlah Penduduk yang memiliki KTP	295.950	295.052	291.455	329.850	348.748
4.	Jumlah Penduduk yang memiliki KK	84.192	87.751	92.273	139.900	87.273
5.	Jumlah penduduk yang memiliki akte kelahiran	1.448	21.836	159.551	165.885	173.527
6.	Jumlah penduduk yang memiliki akte perkawinan	484	496	481	4.745	12.153

Sumber: SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022

Jumlah wajib KTP yang terdapat di kabupaten labuhanbatu tahun 2021 sebanyak 348.748 dan Jumlah dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang telah diterbitkan untuk Kartu Keluarga sebanyak 87.273, Kartu Tanda Penduduk sebanyak 348.748 kemudian akte kelahiran pada Tahun 2021 sebanyak 173.527 dan akte perkawinan sebanyak 12.153. Secara rinci data kependudukan serta kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.115
Jumlah Kepemilikan KTP di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah penduduk memiliki KTP	295.950	295.052	291.455	329.850	348.748
2.	Jumlah penduduk wajib KTP	343.900	317.676	341.324	346.609	348.748
	Persentase	86,05	92,88	85,39	95,16	100

Sumber: SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang memiliki KTP setiap tahunnya cenderung meningkat sedangkan pada tahun 2021 telah mencapai 100%. Dari seluruh jumlah penduduk yang memiliki Kartu Keluarga di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021, tercatat jumlah penduduk yang memiliki akte perkawinan sebanyak 12.153 atau bertambah sebanyak 7.408 dari tahun 2020. Dapat dilihat seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.116
Rasio Penduduk yang Memiliki Akte Perkawinan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah penduduk yang memiliki KK	84.192	87.751	92.273	139.900	141.962
2.	Jumlah penduduk yang memiliki akte perkawinan	484	496	481	4.745	12.153
	Rasio	17.40	17,69	19,17	2,95	8,56

Sumber: SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022

Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk adalah jumlah penduduk yang memiliki akte kelahiran/jumlah penduduk x 100 %. Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk di kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.117
Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 penduduk
di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017- 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penduduk yang memiliki Akte Kelahiran	149.650	159.646	159.551	165.885	173.527
2	Jumlah Penduduk	504.324	501.388	503.229	504.876	499.982
3	Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 Penduduk	0,30	0.32	31,71	32,86	34,71

Sumber: SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022

2.3.1.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi agar tercipta masyarakat yang berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial agar mampu memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Lembaga yang memiliki peran didalam pemberdayaan masyarakat adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Persentase Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dapat dilihat dari rata-rata jumlah kelompok binaan PKK yang ada di Kabupaten Labuhanbatu. Pada tahun 2021, jumlah kelompok binaan PKK di Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 3.411 kelompok yang tersebar di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu dan aktif melaksanakan kegiatan di wilayahnya.

Tabel 2.118
Kelompok Binaan PKK Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kelompok binaan PKK	1.734	1.841	1.742	3.585	3.411
2	Jumlah PKK	716	740	740	728	1396
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan	2,42	2,49	2,35	4,92	2,44

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022

b. **Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Aktif**

Persentase Pemberdayaan Kesehatan Keluarga (PKK) yang aktif dapat dilihat dari jumlah PKK yang aktif dengan jumlah PKK yang ada di Kabupaten Labuhanbatu. Pada tahun 2021, jumlah PKK di Kabupaten Labuhanbatu ada sebanyak 1.396 PKK yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Labuhanbatu.

Tabel 2.119
PKK Aktif Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah PKK Aktif	716	740	740	728	1.396
2	Jumlah PKK	716	740	740	728	1.396
3	PKK Aktif	100	100	100	100	100

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022

c. **Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)**

Jumlah Kelompok LPM sebanyak 98 kelompok tersebar di 98 Desa/Kelurahan di Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana dapat diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.120
Jumlah Kelompok Binaan LPM Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kelompok LPM (kelompok)	98	98	98	98	98
2	LPM Berprestasi (kelompok)	98	98	98	98	98

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022

d. **Posyandu Aktif**

Jumlah posyandu yang ada di Kabupaten Labuhanbatu sampai dengan tahun 2021 sedikit berkurang dari tahun sebelumnya dari 552 menjadi 548 posyandu yang tersebar di seluruh Kabupaten Labuhanbatu. Dari total jumlah posyandu tersebut diatas, posyandu yang aktif sudah mencapai 100 persen yang memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya penduduk balita.

Tabel 2.121
Posyandu aktif Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Posyandu aktif (buah)	540	540	552	552	548
2	Total posyandu (buah)	540	540	552	552	548
3	Posyandu aktif	100	100	100	100	100

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022

2.3.1.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Cakupan Peserta Keluarga Berencana Aktif

Program keluarga berencana di Labuhanbatu dilaksanakan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam satu tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama.

Tabel 2.122
Cakupan Akseptor Keluarga Berencana Aktif di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017- 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Akseptor KB Aktif	63,795	69,290	70,157	73,324	60.183
2.	Jumlah Pasangan Usia Subur	85,033	89,200	88,712	89,429	71.763
3	Rasio Akseptor KB Aktif	75,02	77,68	79,08	81,99	83,86

Sumber :SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022

Seiring dengan pertambahan jumlah pasangan usia subur, yang diikuti oleh pertambahan jumlah akseptor KB aktif, maka rasio akseptor KB mengalami peningkatan setiap tahunnya pada tahun 2020 meningkat 2,91 persen dan pada tahun 2021 meningkat sebesar 1,87 persen dari tahun sebelumnya.

b. Rasio Akseptor KB

Dari seluruh jumlah penduduk pasangan usia subur di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021, tercatat jumlah akseptor KB sebanyak 10.965 akseptor menurun sebanyak 2.491 akseptor dari tahun 2020. Sedangkan

rasio akseptor KB cenderung mengalami peningkatan mulai dari tahun 2018-2021 yang tertera pada tabel berikut :

Tabel 2.123
Rasio Akseptor Keluarga Berencana di Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Akseptor KB	16.081	11.541	11.923	13.456	10.965
2.	Jumlah Pasangan Usia Subur	85.033	85.200	88.712	89.429	71.763
3.	Rasio Akseptor KB	18,91	12,94	13,44	15,04	15,28

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022

c. Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I

Keluarga merupakan penopang dasar perkembangan individu dalam masyarakat. Semua aspek kehidupan berawal dari keluarga. Unggul dan kuatnya individu dalam masyarakat pada awal selalu ditopang oleh institusi keluarga yang baik. Keluarga yang bahagia dan sejahtera akan membentuk masyarakat Kabupaten Labuhanbatu yang saling asih, bergotong dan terdorong untuk maju. Jumlah keluarga di Kabupaten Labuhanbatu mulai tahun 2017-2021 cenderung mengalami peningkatan namun pada tahun 2021 jumlah keluarga tidak mengalami perubahan seperti yang terlihat pada table berikut :

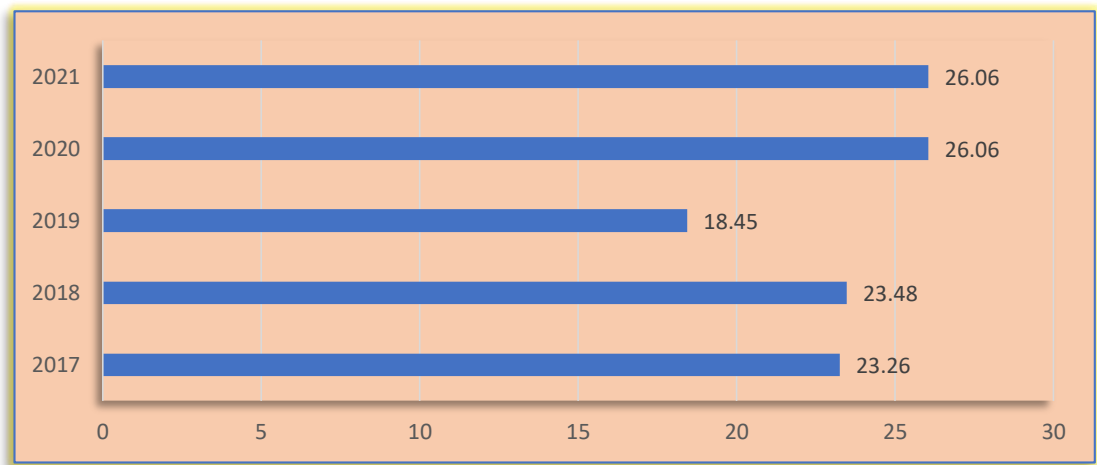
Tabel 2.124
Persentase Pra Sejahtera dan Sejahtera I di Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017- 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I	22.063	22.945	25.036	29.371	29.371
2.	Jumlah Keluarga	94.878	97.724	135.705	112.703	112.703
3	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I	23.26	23,48	18,45	26,06	26,06

Sumber: SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022

Dari table dapat dilihat pada tahun 2021 dari seluruh Jumlah keluarga di Kabupaten Labuhanbatu, jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I adalah sebesar 29.371 keluarga, kondisi ini tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

Grafik 2.28
Persentase Pra Sejahtera dan Sejahtera I di Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017- 2021



2.3.1.2.9. Perhubungan

Pembangunan di sektor perhubungan merupakan bagian integral dari pembangunan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Sektor transportasi mempunyai peran yang penting dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta diyakini sebagai pendorong pembangunan suatu kawasan. Guna mendukung perwujudan kesejahteraan masyarakat, maka fungsi pelayanan umum transportasi harus ditujukan melalui penyediaan jasa transportasi, melayani kebutuhan masyarakat luas serta untuk kelancaran mobilitas distribusi barang dan jasa dan mendorong pertumbuhan sector-sektor ekonomi wilayah sekitarnya. Fungsi pembangunan transportasi tidak sebatas mengurangi kesenjangan dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan, tetapi dapat memperlancar kegiatan perdagangan dan mengurangi perbedaan harga antar wilayah. Transportasi mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan.

a. Jumlah Tangkahan Boat dan Terminal Bis

Jumlah terminal bus dan stasiun kereta api di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 masing-masing sebanyak satu lokasi dan tidak mengalami penambahan. Demikian juga jumlah tangkahan boat dari tahun 2017 sampai tahun 2021 di Kabupaten Labuhanbatu tidak mengalami penambahan, dapat dilihat seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.125
Jumlah Tangkahan Boat dan Terminal Bis di Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Terminal Bus	1	1	1	1	1
2.	Stasiun Kereta Api	1	1	1	1	1
3.	Tangkahan Boat	9	9	9	9	9

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Labuhanbatu 2022

Terkait dengan kepemilikan/kelulusan KIR angkutan umum, diketahui bahwa pada tahun 2021 mencapai 100 %. Peningkatan kepemilikan/kelulusan KIR meningkat, salah satunya dapat melalui kampanye emisi bersih untuk kendaraan bermotor.

Tabel 2.126
Jumlah Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017- 2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Angkutan Umum	194	194	162	221	221
2.	Jumlah Kepemilikan KIR angkutan umum	194	67	163	221	42
3	Jumlah Angkutan Umum yang tidak memiliki KIR	-	-	-	-	-

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022

Selama periode tahun 2017-2021, Kabupaten Labuhanbatu telah dilakukan pemasangan rambu-rambu lalu lintas, pada tahun 2017 jumlah

pemasangan rambu-rambu sebanyak 15 dan menurun pada tahun 2018 menjadi 7. Sedangkan pada tahun 2019-2021 tidak ada pemasangan rambu-rambu lalu lintas, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.127
Persentase Pemasangan Rambu-Rambu di Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017- 2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah pemasangan rambu-rambu	15	7	0	0	0
2.	Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia	650	750	750	750	750
3.	Persentase	2,30	0,93	0	0	0

Sumber :SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022

2.3.1.2.10. Komunikasi dan Informartika

Dengan perkembangan teknologi saat ini pelayanan telekomunikasi tidak hanya mengandalkan jaringan telekomunikasi berbasis kabel, tetap nirkabel juga. Untuk mendukung fungsi dan peran Kabupaten Labuhanbatu maka di arahkan pengembangan jaringan nirkabel di seluruh wilayah.

Sistem jaringan prasarana telepon nirkabel ini berupa menara (*tower*) BTS (*Base Transceiver Station*). Penggunaan system ini lebih populer dibandingkan dengan penggunaan sistem telekomunikasi telepon kabel. Namun dalam penggunaannya bisa menyebabkan terbentuknya hutan menara di kawasan perkotaan akibat tidak adanya pola pengaturan dalam pembangunannya. Untuk itu kedepannya diarah kandengan menerapkan system menara(*tower*) bersama,karena pembangunan menara bersama terkait dengan tingkat kepadatan penduduk, dimana semakin banyak penduduk suatu wilayah berbanding lurus dengan jumlah menara telekomunikasi. Untuk itu pembagian zona pembangunan menara bersama telekomukasi mengikuti gambaran zona kepadatan penduduk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 15 tahun 2009 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama, dimana zona tersebut dibagi dalam zona padat, zona sedang dan zona rendah. Rencana

pengembangan jaringan telekomunikasi nirkabel di Kabupaten Labuhanbatu di arahkan kedaerah-daerah berikut:

Tabel 2.128
Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi
di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1.	BilahHulu	Semuadesa
2.	Pangkalan	- Desa Tebing tinggi Pangkatan, - Desa Tanjung Harapan - Desa Pangkatan - Desa Sennah
3.	BilahHilir	- Desa Sela tBesar - Desa Tjg Haloban - Desa Sei Kasih - Desa Sei Tarolat - Desa Sei Tampang - Perkebunan Negeri Lama - Desa Sidomulyo - Desa Negeri Lama Seberang - Perkebunan Sannah - DesaKP.Bilah - Perkebunan Bilah
4.	Panai Tengah	- Desa Sei Siarti - Desa Selat Beting - Desa Sei Pelancang - Desa Bagan Bilah - Desa Sei Rakyat - Desa Sei Nahodaris
5.	Panai Hilir	- Desa SeiTawar - Desa Wonosari - Desa Sei Lumut - Desa Sei Baru
6.	Panai Hulu	Semua Desa
7.	Bilah Barat	Semua Desa
8.	Rantau Selatan	- Kelurahan Urung Kompas - Kelurahan Siderejo
9.	Rantau Utara	- Kelurahan Kampung Sawah - Kel. Sirandorong/Terminal

Sumber: SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2021/RTRW Kabupaten Labuhanbatu, 2015-2035

Penerapan teknologi informasi melalui media *online* dalam hal ini *website* telah menjadi kebutuhan yang wajib dan sebagai salah satu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi masyarakat luas. Ketersediaan website milik Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu yaitu <http://www.labuhanbatukab.go.id>, yang memuat ragam informasi terkait Kabupaten Labuhanbatu dapat secara mudah diakses oleh siapapun. Transparansi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu menjadi tuntutan yang tidak dapat ditawar lagi. Terbukanya akses informasi pelayanan kepada masyarakat baik mengenai anggaran, pengadaan barang dan jasa, bantuan sosial, layanan perizinan, layanan KTP, Kartu Keluarga (KK), dan surat keterangan lainnya menjadi sebuah keharusan. Adanya kemudahan akses yang diimbangi dengan integritas jajaran pengelola diharapkan akan menghasilkan percepatan pembangunan Kabupaten Labuhanbatu dan meningkatnya kepercayaan publik kepada birokrasi. Kebutuhan kemudahan akses internet bagi masyarakat luas di Kabupaten Labuhanbatu. Kegiatan promosi melalui pameran/expo merupakan media yang cukup efektif dalam memperkenalkan produk/jasa tertentu, yang dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal, Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Labuhanbatu.

a. Jumlah penyiaran radio lokal

Penyiaran Radio lokal di Kabupaten Labuhanbatu sangat berperan dalam peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sampai saat ini penyiaran radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu masih eksis dalam pelayanan informasi dan komunikasi kepada masyarakat Kabupaten Labuhanbatu.

Tabel 2.129
Jumlah Penyiaran radio di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penyiaran Radio Lokal yang masuk ke daerah	4	4	4	4	4

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022

2.3.1.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Jumlah Anggota Koperasi dan jenis lainnya

Berdasarkan data BPS, Koperasi dan UKM sudah terbukti bertahan terhadap gejolak eksternal. Kontribusinya bagi perekonomian daerah memegang peran strategis dan memberikan peluang yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja. Anggota koperasi yang terdata di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021 berjumlah 400 unit dengan anggota 7.025 orang.

Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan salah satu jenis koperasi yang banyak membantu masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu khususnya di pedesaan. KUD adalah Koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi di daerah pedesaan yang merupakan penyatuan dari beberapa Koperasi pertanian yang kecil dan banyak jumlahnya di pedesaan. Jumlah KUD di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2021 berjumlah 19 unit. Data-data koperasi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.130
Jumlah Anggota Koperasi dan Jenis Lainnya di Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Anggota KUD	1.300	2.380	458	458	-
2.	Anggota Koperasi Fungsional	4.200	3.818	4.606	5.972	-
3.	Anggota Koperasi jasa-jasa	220	3.788	129	129	-
4.	Anggota Koperasi jenis lainnya	5.800	8.879	1.125	-	-
	Jumlah	11.520	18.865	6.318	6.559	7.025

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2022.

b. Jumlah Koperasi

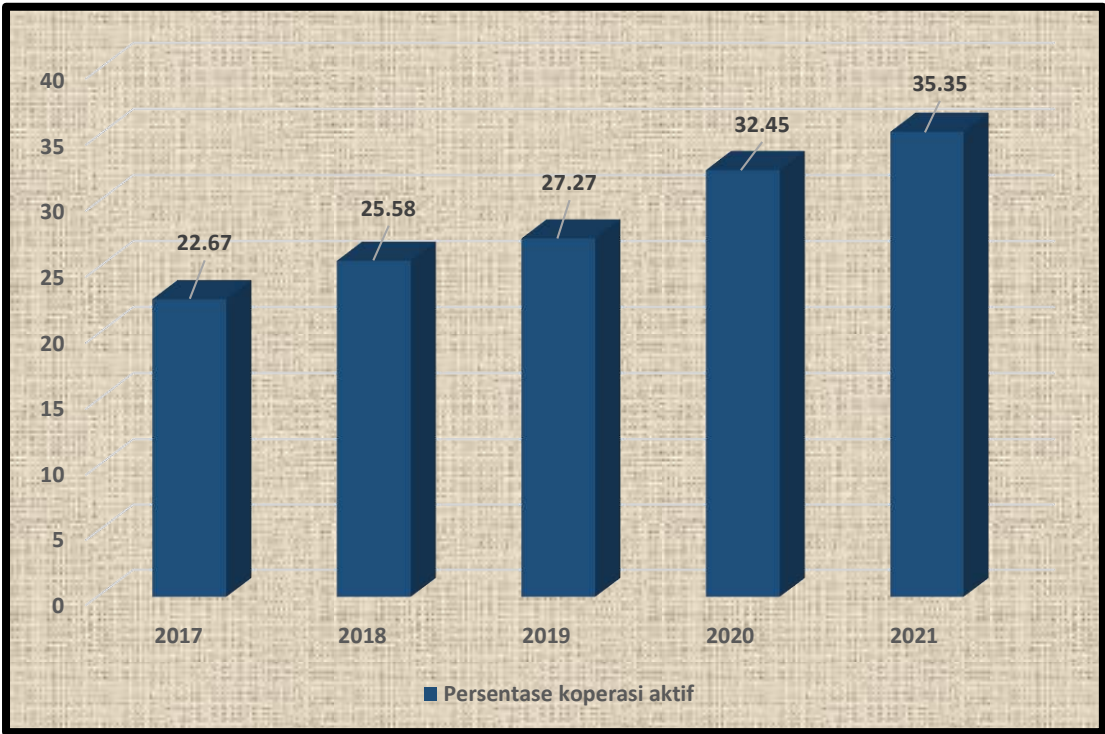
Jumlah koperasi aktif pada tahun 2021 sebanyak 396 Koperasi meningkat dari tahun 2022. Jumlah koperasi aktif di Kabupaten Labuhanbatu dari tahun 2017-2021 terus mengalami peningkatan.

Tabel 2.131
Jumlah Koperasi Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017- 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah koperasi aktif	75	88	96	123	140
2.	Jumlah seluruh Koperasi	331	344	352	379	396
3.	Persentase koperasi aktif	22,67	25,58	27,27	32,45	35,35

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022

Grafik 2.29
Persentase Jumlah Koperasi Aktif Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017- 2021

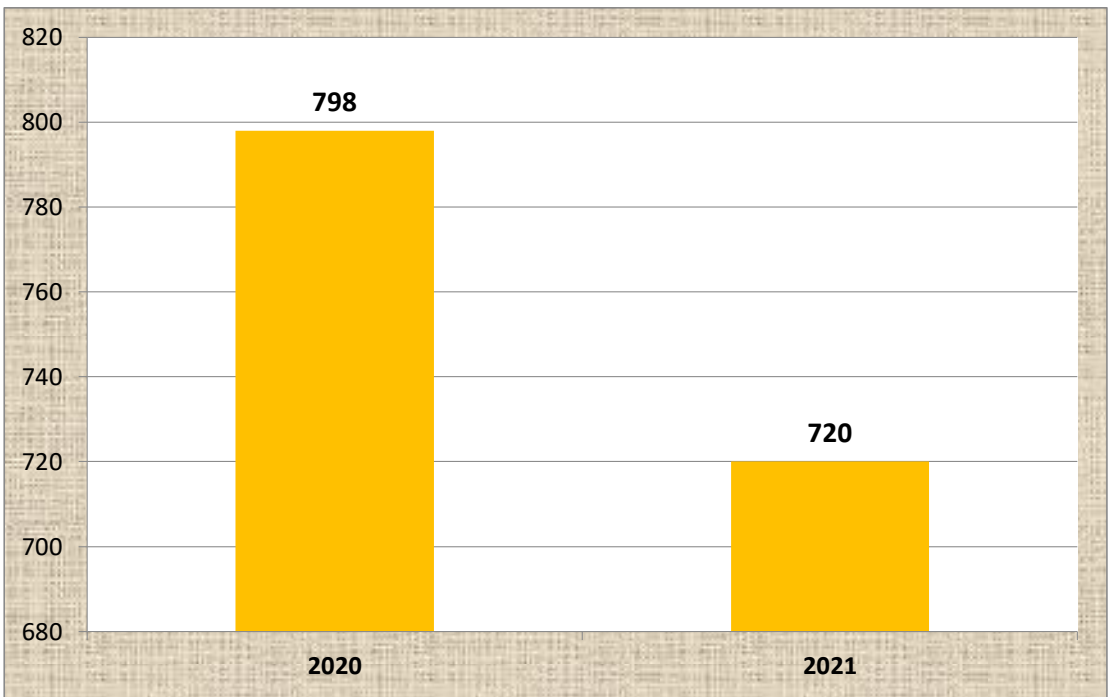


Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022

2.3.1.2.12. Penanaman Modal

Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Administrasi Pemerintah sangat diperlukan oleh penduduk Kabupaten Labuhanbatu, untuk menunjang pelayanan tersebut, Pemerintah Kabupaten sudah membuat suatu kebijakan dalam hal proses pengurusan ijin, dalam setiap pengurusan ijin tersebut dibutuhkan waktu rata-rata selama 3 (tiga) hari.

Grafik 2.30
Jumlah Izin yang dikeluarkan di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2020 – 2021



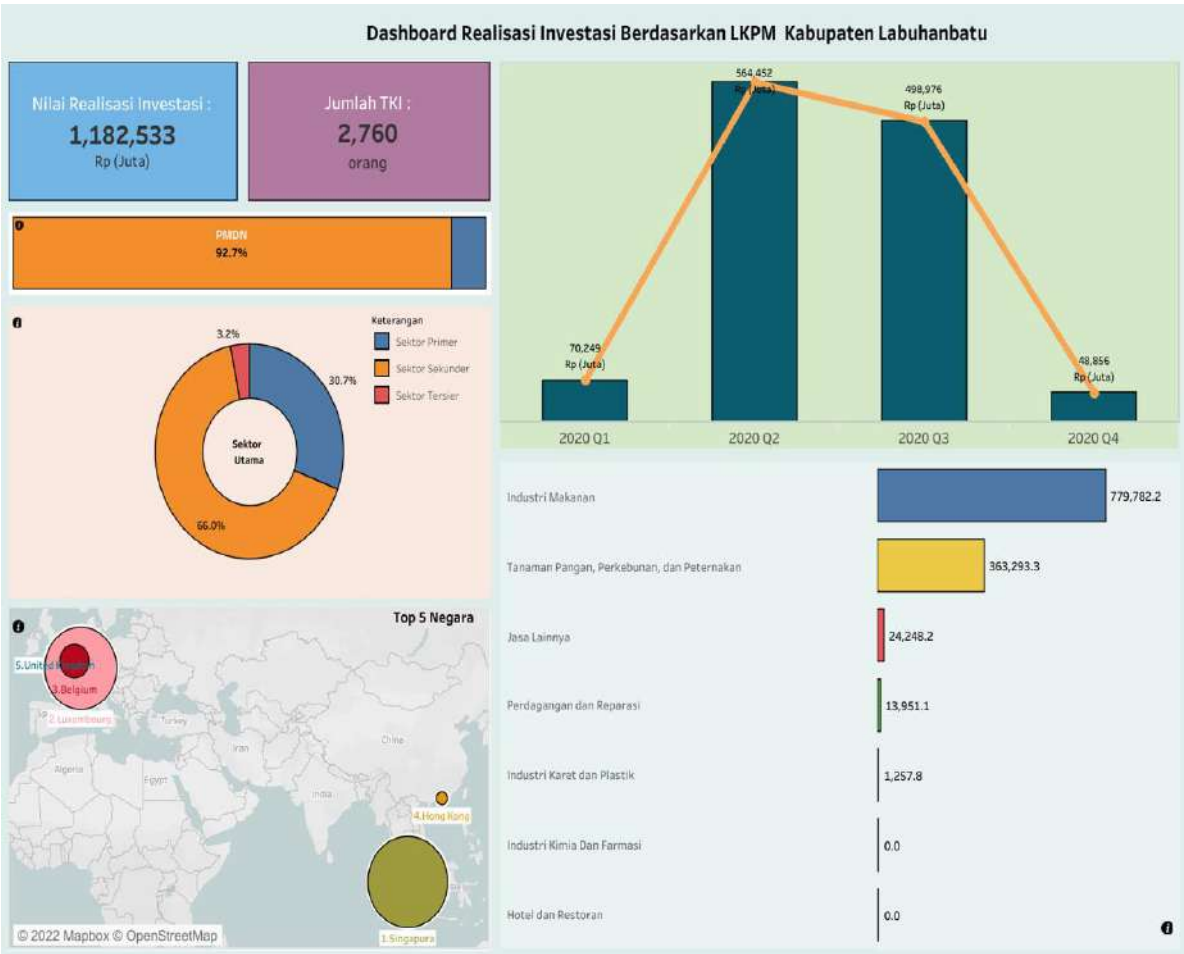
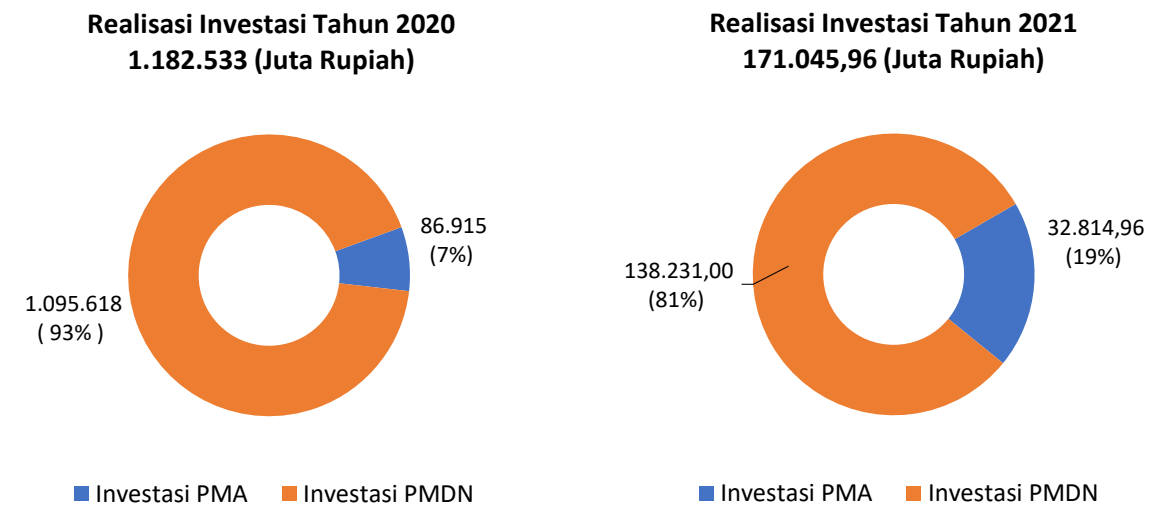
Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022.

Pada grafik 2.30 dapat dilihat bahwa tahun 2020 jumlah izin yang dikeluarkan sebanyak 798 dan pada tahun 2021 jumlah izin yang dikeluarkan hanya sebanyak 720.

Realisasi Investasi di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan data realisasi investasi pada tahun 2020 yaitu sebesar 85,54 persen. Penurunan jumlah realisasi investasi yang cukup signifikan di Kabupaten Labuhanbatu merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang telah terjadi selama dua tahun terakhir.

Nilai Realisasi Investasi di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2020 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada grafik 2.31 berikut ini:

Grafik 2.31
Nilai Realisasi Investasi di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 - 2021



Nilai Realisasi Investasi di Kabupaten Labuhanbatu merasal dari berbagai lapangan usaha diantaranya lapangan usaha Industri Makanan Besar, Lapangan Usaha Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan, Lapangan Usaha Industri Karet dan Plastik, Lapangan Usaha Perdagangan dan Reperasi dan Lapangan Usaha Jasa Lainnya.

Pada tahun 2020 nilai realisasi investasi di Kabupaten Labuhanbatu sebesar 1.182.533 (Juta Rupiah) yang berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 1.095.618 (Juta Rupiah) atau 93 persen dan Penaman Modal Asing (PMA) sebesar 86.915 (Juta Rupiah) atau 7 Persen. Di tahun 2021 nilai realisasi Investasi di Kabuapten sebesar 171.045,96 (Juta Rupiah) yang berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 138.231,00 (Juta Rupiah) atau 81 persen dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 32.814,96 (Juta Rupiah) atau 19 persen.

2.3.1.2.13. Kepemudaan dan Olah raga

a. Jumlah Organisasi Pemuda

Kebutuhan sarana bagi generasi muda untuk mengaktualisasikan diri secara positif merupakan salah satu kebutuhan yang perlu disediakan Pemerintah salah satunya adalah organisasi kepemudaan. Organisasi pemuda di Kabupaten Labuhanbatu sampai tahun 2021 cukup aktif dalam kegiatan kepemudaan, ini terlihat dari jumlah organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu. Induk dari organisasi kepemudaan adalah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang merupakan wadah bagi pemuda dalam memberikan masukan-masukan kepada pemerintah daerah dalam pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu.

Tabel 2.132
Jumlah Organisasi Pemuda di Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017- 2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Organisasi Pemuda	50	50	50	50	49

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022

b. Jumlah Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga

Kegiatan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Labuhanbatu setiap tahun kerap dilaksanakan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta. Diantaranya Turnamen Bola Kaki, Tournamen Volly, Tournamen Basket, Tournamen Bola Futsal, Tournamen Badminton, Tournamen Bilyard, Tinju, Atletik, Maraton dan Motor Cross. Kegiatan ini selalu disambut meriah oleh para pemuda dalam menuangkan hoby dan mengejar prestasi dalam bidang olahraga.

Tabel 2.133
Jumlah Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017- 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah kegiatan kepemudaan	3	3	-	2	2
2.	Jumlah Kegiatan olah raga	5	6	6	4	3

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022

Selama tahun 2017-2021 organisasi olahraga yang ada di Kabupaten Labuhanbatu mengalami penambahan jumlah organisasi olahraga menjadi 36 organisai pada tahun 2021.

Tabel 2.134
Jumlah Organisasi Olahraga di Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017- 2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Organisasi Olahraga	20	30	30	30	36

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022

c. Gelanggang / Balai Remaja

Gelanggang olah raga/balai remaja merupakan salah satu tempat atau wadah bagi para remaja tempat menuangkan waktu dan hoby dalam bidang olahraga yang mendukung kegiatan bagi remaja untuk dapat lebih terarah terhadap hal-hal yang positif. Di Kabupaten Labuhanbatu sarana ini telah ada, sehingga dapat menunjang kegiatan bagi pemuda dalam bidang olahraga.

Tabel 2.135
Jumlah Gelanggang / Balai Remaja di Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017- 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah gelanggang/ Balai Remaja di Kabupaten	3	3	–	–	4
2	Jumlah penduduk	478.593	486.480	494.178	493.899	499.982
3	Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) %	0,00062	0,00062	–	–	0,00080

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022

d. Lapangan Olahraga

Sarana lapangan olah raga di Kabupaten Labuhanbatu sampai tahun 2021 sudah cukup memadai, ini terlihat dengan adanya lapangan olah raga Bina Raga, lapangan olah raga Ika Bina, dan ditambah dengan lapangan olah raga lainnya, seperti lapangan badminton, lapangan bola volly dan lain-lain. Sarana ini juga tersedia di instansi-instansi pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, sehingga kegiatan untuk olah raga di Kabupaten Labuhanbatu dapat terpenuhi.

Tabel 2.136
Jumlah Lapangan Olahraga di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017- 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah lapangan olah raga di Kabupaten	298	298	298	298	298
2	Jumlah penduduk	478.593	486.480	494.178	493.899	499.982
3.	Lapangan olah raga (%)	0,062	0,061	0,060	0,060	0,060

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022

2.3.1.2.14. Statistik

Buku publikasi Labuhanbatu Dalam Angka adalah merupakan produk utama dalam urusan wajib statistik. Sepanjang tahun 2011 s/d 2020 kegiatan ini dilaksanakan atas kerjasama antar Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu, melalui dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Pada saat ini makin dirasakan kebutuhan akan data statistik dari setiap sektor pembangunan. Hal ini menjadikan kita lebih terdorong untuk melengkapi dan menyempurnakan data yang disajikan, baik kuantitas maupun kualitasnya. Data yang disajikan bersumber dari kegiatan rutin, survei dan sensus yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu dan dilengkapi dengan data sekunder yang dikelola oleh instansi pemerintah dan swasta di wilayah Kabupaten Labuhanbatu. Di samping Labuhanbatu Dalam Angka juga diterbitkan publikasi buku Statistik Sektoral Labuhanbatu, Buku Indikator Ekonomi, Buku Publikasi Statistik Kependudukan Labuhanbatu, Buku Statistik Produksi padi dan Palawija, Buku Publikasi PDRB, Buku Publikasi Indeks Harga Konsumen, Buku Publikasi Kecamatan Dalam Angka, Buku Publikasi Statistik Gender dan Buku Publikasi Indikator Pendidikan.

2.3.1.2.15. Persandian

Urusan persandian adalah urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib bagi seluruh pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Dalam pengaturannya secara jelas diamanatkan bahwa instansi pusat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan teknis kepada pemerintah provinsi, selanjutnya pemerintah provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bawahnya. Selama ini di tingkat pusat, Lembaga Sandi Negara sebagai instansi pemerintah yang bertugas di bidang persandian, selama ini sudah secara aktif melakukan pembinaan persandian di lingkup nasional baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.

Fungsi Persandian untuk pengamanan informasi merupakan tantangan berat karena SDM Persandian yang ada saat ini belum mempunyai kompetensi yang mencukupi untuk mengamankan informasi berbasis IT. Adapun Penjabaran Fungsi Persandian pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu diarahkan pada :Tata Kelola Penjaminan Keamanan Informasi Berklasifikasi; Pengelolaan Sumber Daya Persandian; Dukungan Layanan Operasional Persandian untuk Keamanan Informasi; dan Pengawasan Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi Internal.

Urusan Pemerintahan Wajib Persandian merupakan urusan yang muncul tersendiri dalam Undang-undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah. Pada regulasi sebelumnya urusan ini berada pada Urusan Wajib Otonomi Daerah Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

2.3.1.2.16. Kebudayaan

Sebagai wahana untuk melestarikan seni dan budaya yang ada di masyarakat, Kabupaten Labuhanbatu setiap tahun menyelenggarakan festival seni dan budaya bagi warga masyarakat. Pada urusan kebudayaan, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dilaksanakan penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata melalui kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah dengan menggelar pesta budaya lokal yang melibatkan semua etnis di Kabupaten Labuhanbatu. Sarana penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya dimaksud diatas antara lain ; Gedung Kesenian Kabupaten Labuhanbatu di Jalan Pramuka Rantauprapat, Gedung Nasional di Jalan Ahmad Yani Rantauprapat dan Lapangan Ika Bina Jalan Ahmad Yani Rantauprapat.

Tabel 2.137
Penyelenggaraan festival seni/sarana di Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017- 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	3	3	3	3	3

2	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	2	2	2	2	5

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022

2.3.1.2.17. Perpustakaan

Urusan Pemerintahan Wajib Perpustakaan merupakan urusan yang baru dalam Undang-undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah. Perpustakaan diartikan sebuah ruangan atau gedung yang digunakan untuk menyimpan buku atau terbitan lainnya yang biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu. Ada dua unsur utama dalam perpustakaan yaitu buku dan ruangan, namun di jaman sekarang koleksi perpustakaan bukan saja terbatas pada buku-buku tetapi bisa berupa film, slide, dan lainnya yang bisa diterima perpustakaan sebagai sumber informasi.

Perpustakaan Daerah Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah satu unit pelayanan kepada masyarakat telah berdiri dan telah melayani masyarakat secara umum.

Tabel 2.138
Kondisi Kunjungan dan Koleksi Buku pada Perpustakaan Daerah
Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Perpustakaan (unit)	42	42	114	364	94
2	Jumlah kunjungan ke perpustakaan (kunjungan)	17.935	19.078	19.904	6.799	3.062
3	Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani (orang)	45.586	379.758	122.623	410.484	381.859
4	Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di Perpustakaan daerah (unit)	9.894	10.155	11.626	11.626	11.805
5	Jumlah koleksi buku yg tersedia di Perpustakaan (unit)	24.896	25.418	27.867	27.867	27.867

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022

2.3.1.2.18. Kearsipan

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menitikberatkan pelaksanaan otonomi daerah pada Kabupaten Labuhanbatu melalui penyerahan urusan pemerintahan dalam bentuk urusan wajib dan urusan pilihan. Penetapan besaran organisasi perangkat daerah dilakukan dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang telah dicabut dan diganti menjadi Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Pengelolaan arsip yang baik harus dapat menjamin ketersediaan arsip yang memberikan kepuasan bagi pengguna, serta menjamin keselamatan arsip itu sendiri. Perkembangan penerapan pengelolaan arsip secara baku di Kabupaten Labuhanbatu tahun 8 sudah mencapai 56,8%. Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) pengelola kearsipan yang handal dan profesional perlu ditingkatkan agar arsip dapat dijamin keselamatannya, baik secara fisik ataupun informasinya.

Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Labuhanbatu dalam meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan khususnya di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.139
Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah OPD yang telah menerapkan Arsip secara Baku	25	25	25	25	28
2.	Jumlah OPD	43	43	44	44	44
3.	Pengelolaan Arsip secara baku	58,1	58,1	56,8	56,8	63,64

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022.

Tabel 2.140
Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Kearsipan di Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022

2.3.2. Urusan Pemerintahan Pilihan

2.3.2.1. Kelautan dan Perikanan

a. Jumlah Produksi ikan menurut Jenis Komoditi di Kabupaten Labuhanbatu.

Produksi ikan menurut jenis komoditi di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.141
Perkembangan Produksi Ikan menurut Jenis Komoditi
di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Ikan	3.146,17	4.002,34	3.865,47	4.443,55	1.611,47
2.	Teri	750,20	1062,8	215,73	40,83	41,58
3.	Udang	124,70	14,15	739,18	802,02	653,33
4.	Kerang	30,45	13,40	15,31	13,28	13,87
5.	Cumi	15,26	13,10	146,90	147,36	152,39
6.	Sotong	11,21	13,60	203,18	1.167,24	745,22
7.	Kepiting	15,67	2,80	2,80	-	389,01
8.	Rajungan	14,54	15,10	15,10	374,05	-
Jumlah		962,03	5.137,29	5.203,67	6.988,33	3.606,87

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu 2022.

Berdasarkan tabel di atas, jumlah perkembangan produksi ikan menurut jenis komoditi pada tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

b. Kontribusi Sub Sektor Perikanan dan Kelautan Terhadap PDRB

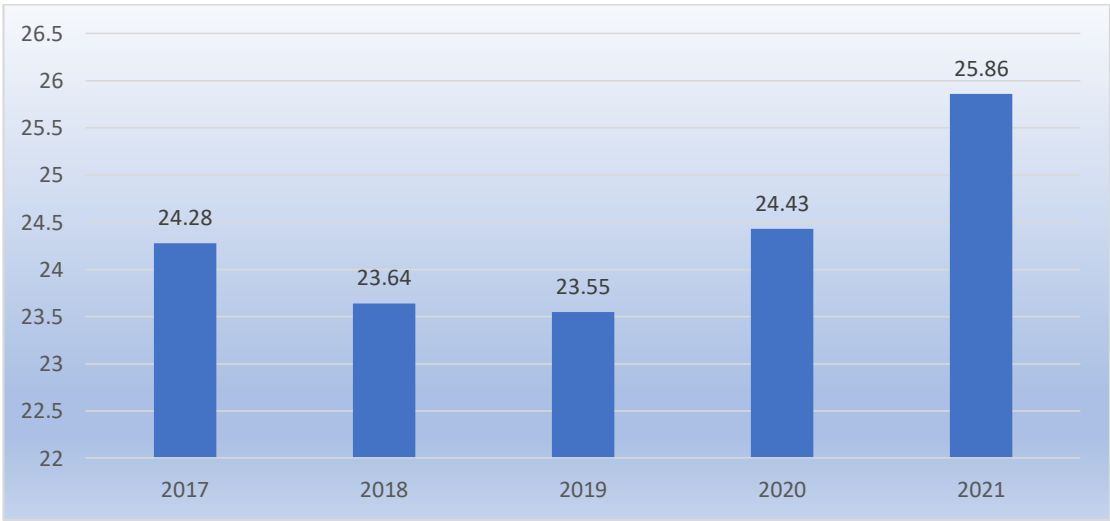
Kontribusi Sub Sektor perikanan terhadap perekonomian Kabupaten Labuhanbatu tidak sampai dengan 1 persen dan perkembangannya semakin menurun. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.142
Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB Total ADHB di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	PDRB Subsektor Perikanan	7.047,77	7.398,82	7.914,23	8.465,90	9.724,26
2.	PDRB Total ADHB	29.030.570,4	31.302.582,60	33.610,43	34.653,18	37.606,88
3.	Kontribusi Subsektor Perikanan Terhadap PDRB Total	24,28	23,64	23,55	24,43	25,86

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu 2022

Grafik 2.32
Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB Total ADHB di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021



2.3.2.2. Pertanian

a. Luas Panen dan Produksi Padi

Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah satu lumbung padi di Provinsi Sumatera Utara. Dari tahun 2017-2021 luas panen mengalami kenaikan setiap tahun yang juga berpengaruh terhadap produksi perton pertahunnya. Pada tahun 2020 jumlah produksi padi sebesar 60.930 ton dan pada tahun 2021 meningkat sebesar 11.623,3 ton menjadi 72.553,3 ton. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.143
Luas Tanaman dan Produksi Padi di Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Padi Sawah		
	• 2017	38.555	208.311
	• 2018	45.289	244.906
	• 2019	25.873	140.487
	• 2020	12.231	60.930
	• 2021	13.301,2	72.553,3
2	Padi Ladang		
	• 2017	165	492
	• 2018	-	-
	• 2019	-	-
	• 2020	-	-
	• 2021	-	-
3	Jumlah		
	• 2017	38.720	208.803
	• 2018	45.298	244.907
	• 2019	25.873	140.487
	• 2020	12.231	60.930
	• 2021	13.301,2	72.553,3

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu 2022

b. Luas Panen dan Produksi Perkebunan

Tabel 2.144
Luas Panen dan Produksi Perkebunan di Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Kelapa Sawit		
	• 2017	38.026	91.514,00
	• 2018	35.160	125.775,01
	• 2019	38.558	102.771,90
	• 2020	38.629	116.853,00
	• 2021	47.247	126.262,00
2	Kelapa		
	• 2017	3.278	2.625,75
	• 2018	3.380	2.943,00
	• 2019	3.454	2.859,10
	• 2020	3.477	3.545,17
	• 2021	1.723	1.179,00
3	Karet		
	• 2017	22.775	23.225,00
	• 2018	901	901,00
	• 2019	21.529	21.731,00
	• 2020	21.712	21.875,99
	• 2021	16.728	16.420,00
4	Kakao		
	• 2017	435	263,34
	• 2018	495	253,68
	• 2019	523	299,90
	• 2020	522	258,97
	• 2021	428	231,00

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu 2022

Produksi perkebunan karet dan kakao relatif menurun pada tahun 2021 sedangkan tanaman kelapa sawit dan kelapa relatif meningkat karena dipengaruhi oleh menurunnya luas panen karet dan kakao serta meningkatnya luas panen kelapa sawit dan kelapa.

c. **Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)**

Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2021 dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.145
Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) berdasarkan status kepegawaian di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021

No.	Status Petugas PPL	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	45 Orang
2.	Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK)	12 Orang
3	Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantuan Penyuluh Pertanian (TBPP) Provinsi	2 Orang
Total		59 Orang

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022

Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Kabupaten Labuhanbatu bertugas melakukan pembinaan terhadap masyarakat petani dan kelompok tani yang ada di Kabupaten Labuhanbatu. Pada tahun 2021 kelompok tani di Kabupaten Labuhanbatu yang telah dibentuk sebanyak 1044 yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Labuhanbatu.

d. **Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021 menurut data dari BPS Labuhanbatu tahun 2022 sebesar 37.606,88 miliar rupiah. Kontribusi sektor pertanian berfluktuatif dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Kontribusi sektor pertanian tahun 2020 sebesar 24,43 persen kemudian tahun 2021 sebesar 25,86 meningkat sebesar 1,43 persen. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2017-2021 atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.146
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB Atas ADHB
di Kabupaten Labuhanbatu (Miliar Rupiah) Tahun 2017-2021

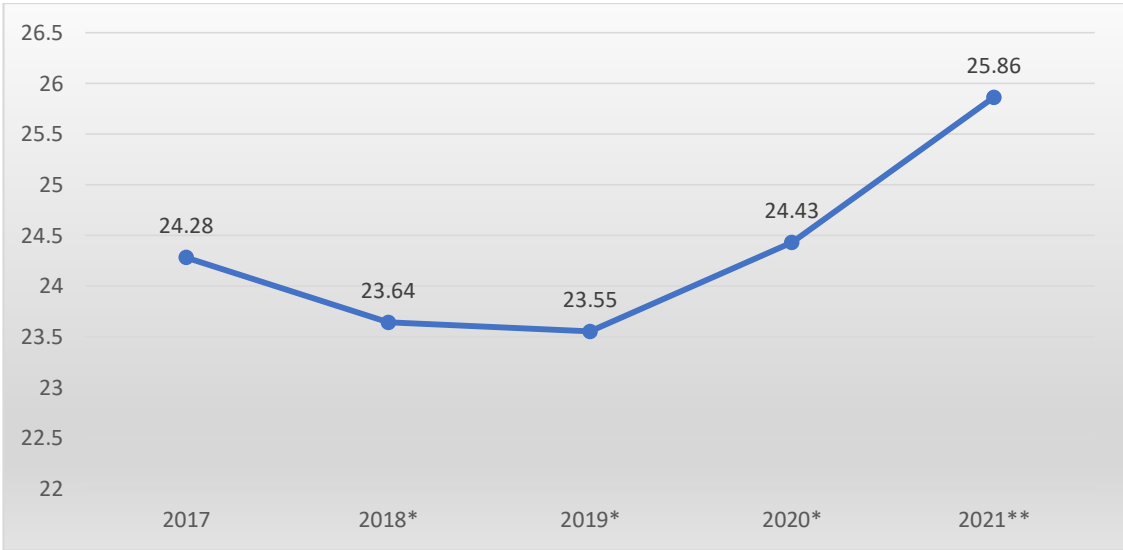
No	Uraian	2017	2018*	2019*	2020*	2021**
1.	PDRB Pertanian ADHB	7.047,77	7.398,82	7.914,23	8.465,90	9.724,26
2.	PDRB Labuhanbatu ADHB	29.030,57	31.302,58	33.610,43	34.653,18	37.606,88
3.	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian	24,28	23,64	23,55	24,43	25,86

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu 2022

: *Angka Sementara

: **Angka sangat sementara

Grafik 2.33
Persentase Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB Atas ADHB di
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021



b. Jumlah Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021

Berdasarkan data tahun 2021 populasi ternak yang mengalami peningkatan adalah Sapi dan Domba sebesar 27.030 dan 13.915, sedangkan populasi ternak yang mengalami penurunan adalah Kerbau, Kambing dan Babi. Kondisi ini menggambarkan optimalnya dukungan terhadap peningkatan populasi ternak di Kabupaten Labuhanbatu.

Tabel 2.147
Perkembangan Populasi Ternak menurut Jenis Ternak
Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021

Tahun	Jenis Ternak				
	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba	Babi
2017	28.483	251	16.583	11.407	12.918
2018	29.390	227	19.071	13.181	14.856
2019	31.702	702	15.703	13.209	13.055
2020	26.848	256	11.723	12.945	6.666
2021	27.030	209	11.535	13.915	3.645

Sumber: SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022./ BPS Kab. Labuhanbatu 2022

c. Jumlah Produksi Daging Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021.

Secara keseluruhan, produksi daging berdasarkan jenis ternak di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2021 jumlah produksi yang besar adalah daging sapi dengan nilai produksi 346. 208 kg sedangkan produksi daging kerbau dalah produksi terkecil sebanyak 2.206 kg, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.148
Perkembangan Produksi Daging menurut Jenis Ternak
di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021

Tahun	Jenis Ternak				
	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba	Babi
2017	551.388	-	75.541	36.104	67.033
2018	634.096	6.301	86.872	41.522	80.432
2019	350.847	3.197	32.536	28.775	70.506
2020	343.227	3.536	6.144	3.552	65.160
2021	346.108	2.206	6.288	4.175	60.506

Sumber: SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022. / BPS Kab. Labuhanbatu 2022

d. Jumlah Populasi unggas menurut Jenis unggas di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021

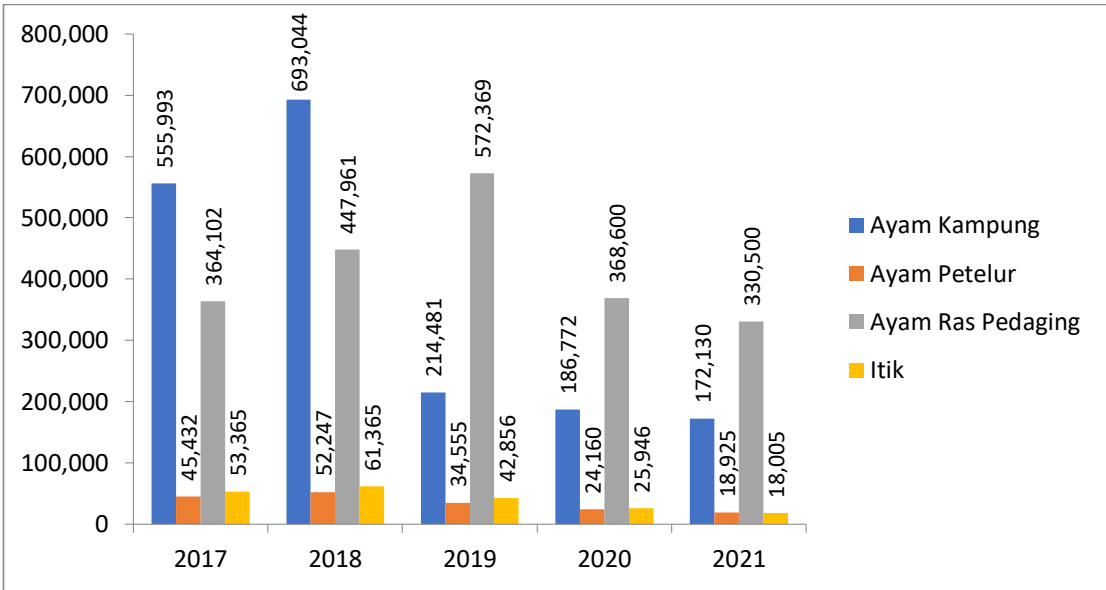
Populasi unggas dari tahun 2017-2021 didominasi oleh unggas jenis ayam ras pedaging, dimana perkembangan populasinya dari tahun 2016-2020 mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2021 terjadi penurunan. Sedangkan popuasi terkecil adalah unggas jenis itik, dimana di tahun 2021 hanya sejumlah 18.005 ekor, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.149
Perkembangan Populasi Unggas Menurut Jenis Unggas di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021

Tahun	Jenis Ternak			
	Ayam Kampung	Ayam Petelur	Ayam Ras Pedaging	Itik
2017	555.993	45.432	364.102	53.365
2018	693.044	52.247	447.961	61.365
2019	214.481	34.555	572.369	42.856
2020	186.772	24.160	368.600	25.946
2021	172.130	18.925	330.500	18.005

Sumber: SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022. / BPS Kab. Labuhanbatu 2022

Grafik 2.34
Perkembangan Populasi Unggas Menurut Jenis Unggas di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021



e. Jumlah Produksi daging menurut Jenis unggas di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2017-2021

Daging ternak ayam pedaging merupakan produksi terbesar dari jenis unggas di Kabupaten Labuhanbatu dari tahun 2017-2021 dengan data terakhir tahun 2021 jumlah sebanyak 7.0131.060 kg, diikuti oleh daging ternak ayam kampung dengan total produksi tahun 2020 sebanyak 91.714 kg, seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.150
Perkembangan Produksi Daging menurut Jenis Unggas di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021

Tahun	Jenis Ternak			
	Ayam Kampung	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik
2017	175.424	40.866	3.080.075	6.808
2018	201.732	46.995	3.542.088	7.608
2019	100.101	16.469	5.304.650	4.248
2020	93.621	14.331	6.267.150	4.468
2021	91.714	8.039	7.013.060	3.093

Sumber: SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2021. / BPS Kab. Labuhanbatu 2022

Secara nasional standar konsumsi daging adalah sebesar 7,2 kg perkapita/pertahun. Dengan demikian pada tahun 2020, dengan jumlah penduduk sebanyak 493.899 jiwa, dan produksi daging (menurut jenis unggas dan jenis ternak) sebanyak 6.267.150 kg, maka konsumsi daging adalah sebanyak 6,55 kg perkapita/tahun. Hal ini berarti ketersediaan produksi daging di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2020 telah memenuhi kebutuhan penduduk.

2.3.2.3. Kehutanan

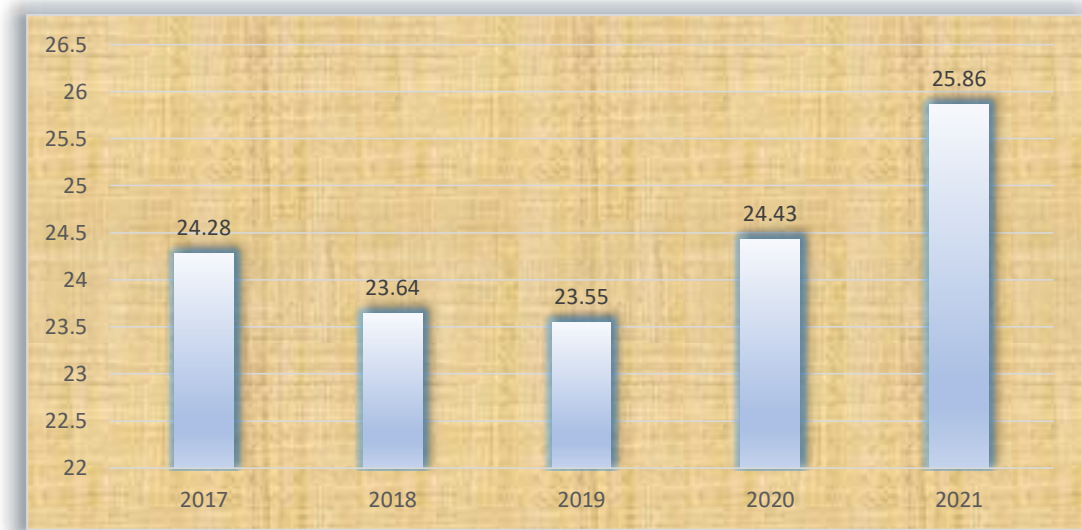
Pada urusan kehutanan dijelaskan kontribusi subsektor kehutanan terhadap PDRB Labuhanbatu. Pada tahun 2020 kontribusi subsektor ini sebesar 24,43 persen mengalami kenaikan menjadi 25,86 persen pada tahun 2021. Dalam rentang periode 2017-2021 kontribusi subsektor kehutanan mengalami peningkatan.

Tabel 2.151
Kontribusi Subsektor Kehutanan terhadap PDRB Atas ADHB
di Kabupaten Labuhanbatu (Miliar Rupiah)
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	PDRB Subsektor Kehutanan	7.047,77	7.398,82	7.914,23	8 465,90	9.724,26
2.	PDRB Total ADHB	29.030,57	31.302,58	33.610,43	34.653,18	37.606,88
3.	Kontribusi Subsektor Kehutanan Terhadap PDRB Total	24,28	23,64	23,55	24,43	25,86

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu 2022

Tabel 2.35
Kontribusi Subsektor Kehutanan terhadap PDRB Atas ADHB
di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021



2.3.2.4. Energi dan Sumber Daya Mineral

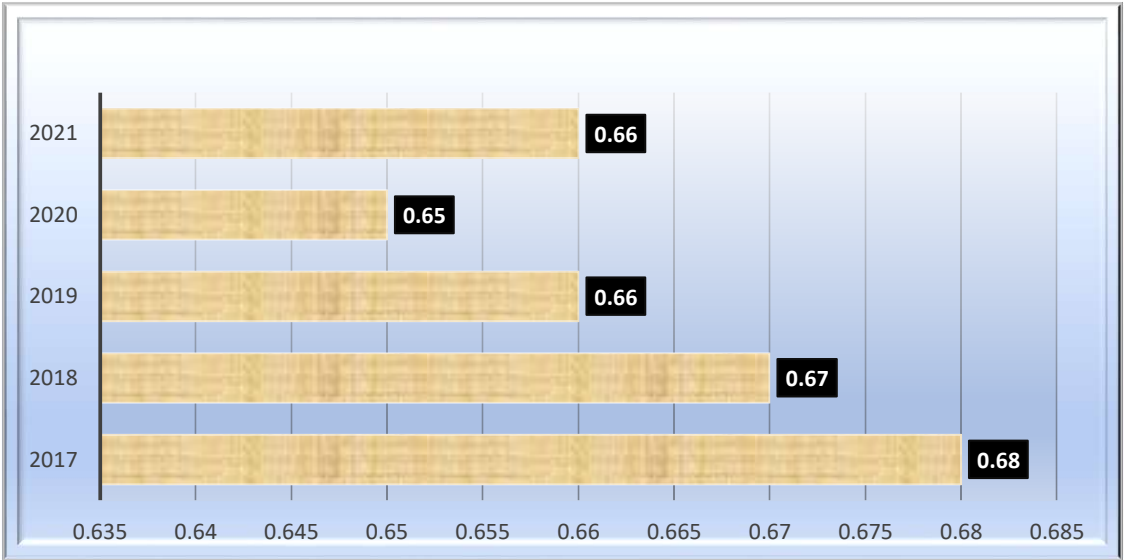
Pada urusan ini, dijelaskan Kontribusi Sektor Penggalian terhadap PDRB atas ADHB di Kabupaten Labuhanbatu. Pada tahun 2017 Kontribusi Sektor Penggalian terhadap PDRB sebesar 0,68 persen. Di tahun 2019 Kontribusi Sektor Penggalian terhadap PDRB 0,66 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 yang berkurang 0,1 persen menjadi 0,65, sedangkan pada tahun 2021 terjadi kenaikan nilai Kontribusi Sektor penggalian terhadap PDRB sebesar 0,1 persen, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.152
Kontribusi Sektor Penggalian terhadap PDRB Atas ADHB
Di Kabupaten Labuhanbatu (miliar rupiah) Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	PDRB Sektor Penggalian	197,85	209,08	221,55	226,56	250,45
2.	PDRB Total ADHB	29.030,57	31.302,58	33.610,43	34.653,18	37.606,88
3.	Kontribusi Sektor Penggalian Terhad. PDRB Total	0,68	0,67	0,66	0,65	0,66

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu 2022

Grafik 2.36
Kontribusi Sektor Penggalian terhadap PDRB Atas ADHB
Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021



2.3.2.5. Perdagangan

a. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Atas ADHB

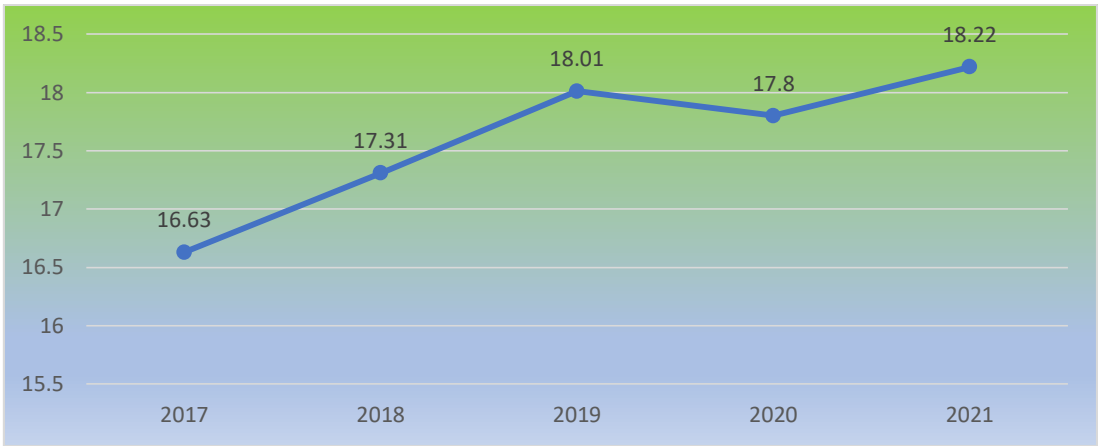
Sektor perdagangan berkaitan dengan produksi dari sektor pertanian, penggalian, industri, konstruksi, serta sektor listrik, gas, dan air minum. Dimana produksi dari sektor-sektor tersebut pada akhirnya akan dijual didalam dan diluar kabupaten Labuhanbatu. Semakin besar produksi sektor-sektor tersebut, semakin besar output sektor perdagangan, sehingga akan memperbesar PDRB sektor perdagangan. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Labuhanbatu semakin meningkat dari tahun 2017 sampai dengan 2021, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.153
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Atas ADHB
Di Kabupaten Labuhanbatu (Miliar Rupiah) Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	PDRB Sektor Perdagangan	4.827,05	5.418,87	6.054,30	6 170,04	6.581,07
2.	PDRB Total ADHB	29.030,57	31.302,58	33.610,43	34.653,18	37.606,88
3.	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	16,63	17,31	18,01	17,80	18,22

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu 2022

Grafik 2.37
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Atas ADHB
Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021



b. Jumlah Sarana perdagangan menurut jenisnya

Sarana perdagangan di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021 terdapat 16 pasar dimana 11 diantaranya merupakan pasar umum, sedangkan sisanya 5 pasar merupakan pasar desa/pekanan.

Pada tahun 2021 Terdapat 97 perdagangan besar, 1.486 pedagang menengah dan 2122 pedagang kecil. Pasar dan tempat berperdagangan terbanyak berada di Rantau Utara yaitu sebesar 3.599 dengan tipe tempat berjualan terbanyak adalah Los sebesar 1.787 unit.

Tabel 2.154
Jumlah Sarana Perdagangan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021

No.	Jenis Sarana Perdagangan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pasar Umum/ Tradisional	9	11	11	13	13
2	Pasar Desa	5	5	5	5	5
3	Toko	65	72	72	411	421
4	Kios	1475	1475	1475	1590	1590
5	Los	19	19	19	6709	6709
6	Warung	127	127	127	130	135
7	Rumah Makan/ Restoran	18	20	20	85	87
Jumlah		1718	1729	1729	8941	8958

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu 2022

c. Unit Kerja UPTD Metrologi

Unit kerja UPTD Metrologi Legal di Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 1 unit yang bertugas untuk melakukan standarisasi pada alat ukur dibidang perdagangan.

2.3.2.6. Perindustrian

a. Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB atas ADHB di Kabupaten Labuhanbatu periode 2017-2021. Pada tahun 2021 kontribusi sebesar 33,70 persen seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.155
Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB ADHB di Kabupaten Labuhanbatu (Miliar Rupiah) Tahun 2017-2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	PDRB Sektor Industri	9.128,17	10.269,39	11.131,39	11.639,16	12.035,48	13.049,57
2.	PDRB Total ADHB	26.505,23	29.030,57	31.302,58	33.610,43	34.653,18	37.606,88
3.	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	34,44	35.37	35,56	34,79	34,73	33,70

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu 2022

b. Pertumbuhan Jumlah Industri

Pada tahun 2021 perusahaan industri besar dan sedang yang terdapat di Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 22 terjadi penurunan dibanding dengan tahun 2017. Dimana industri ini tersebar hampir diseluruh kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu. Penetapan skala industri besar, sedang dan Industri Kecil dilihat berdasarkan data Jumlah tenaga kerja.

Tabel 2.156
Jumlah Industri Besar, Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Industri Besar dan Sedang	25	22	22	22	22
2.	Jumlah Industri Kecil	-	3.832	3.602	-	-

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara 2022

Salah satu dampak negatif Covid 19 terhadap Industri Besar sedang dan Industri Kecil adalah terjadinya penurunan secara drastis jumlah Industri Besar, Sedang dan Industri Kecil yang diakibatkan oleh terjadinya pemutusan hubungan kerja, terhentinya operasional di pabrik, terhentinya distribusi barang antar daerah atau wilayah yang mengakibatkan tidak adanya keuntungan yang diterima oleh perusahaan melainkan kerugian yang sangat besar sehingga tidak beroperasi.

Tabel 2.157
Data Industri Besar di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021

No	Badan Usaha	Nama Perusahaan	Desa/Kel	Kecamatan	Jenis Produk
1	PT	Siringo-ringo	Bandar Kumbul	Bilah Barat	Sawit
2	PT	PTPN III Janji	Janji		Karet
3	PT	Hock Lie	Pardamean	Rantau Selatan	Karet
4	PT	SMA Aek Nabara	S2 Aek Nabara	Bilah Hulu	Sawit
5	PT	PTPN III Aek Nabara	Aek Nabara		Sawit
6	PT	Citra Indah Pertiwi	Pematang Seleng		Sawit
7	PT	Lingga Tiga	Lingga Tiga		Sawit
8	PT	Daya Labuhan Indah Pangkatan	Pangkatan	Pangkatan	Sawit
9	PT	Indo Sepadan Jaya	Kampung Padang		Sawit
10	PT	Pangkatan Indonesia	Perk. Pangkatan		Sawit
11	PT	Sawita Unggul Jaya	Tanah Tinggi	Bilah Hilir	Sawit
12	PT	Cisadane	Sei Siarti		Sawit
13	PT	Hari Sawit Jaya I	Sidomulyo		Sawit
14	PT	Hari Sawit Jaya II	Sidomulyo		Sawit
15	PT	Socfindo	Perk. Negeri Lama		Sawit
16	PT	Daya Labuhan Indah Wonosari	Sei Tampang		Sawit
17	PT	Sinar Pandawa	Perk. Sennah	Panai Hulu	Sawit
18	PT	PTPN IV Ajamu	Ajamu		Sawit

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022

Salah satu dampak positif dari perkembangan industri yaitu bertambahnya lapangan pekerjaan. Begitu pula yang terjadi di Kabupaten Labuhanbatu. berdasarkan data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu berkembangnya industri telah menyerap semakin banyak tenaga kerja.

2.3.2.7. Pariwisata

Dalam rangka mewujudkan misi ke 3 dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis potensi daerah melalui peningkatan produktifitas koperasi dan UMKM serta industri kreatif. Ada beberapa Objek pariwisata di Kabupaten Labuhanbatu yang harus dikembangkan diantaranya:

Tabel 2.158
Potensi Pariwisata di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021

Jenis Objek Wisata	Nama Objek Wisata	Alamat
Alam	Wisata Alam Pasuruan Jaya	Jl. Pasuruan Kec. Rantau Utara
	Wisata Puncak Penetapan Bukit Permai	Jl. Pasuruan Kec. Rantau Utara
	Air Terjun Salah Belok	Jl. Tahalak Simin Kec. Rantau Utara
	Air Terjun Sampuran	Jl. Pasuruan Kec. Rantau Utara
	Air Terjun Linggahara	Jl. Lobusona Kec. Rantau Selatan
	Air Terjun Sirao-Rao	Lingga Tiga Kec. Rantau Selatan
	Air Terjun Si Onggal-Onggal	Desa Tanjung Medan Kec. Bilah Barat
	Wisata Alam Markusasak	Desa Bandar Tinggi Kec. Bilah Hulu
	Pulau Sikantan	Labuhan Bilik Kec. Panai Tengah
	Pantai Alam Lestari/Hutan Mangrove	Desa Sei Tawar Kec. Panai Tengah
	Wisata Alam Gunung Gajah	Desa Lingga Tiga Kec. Bilah Hulu
	Wisata Alam Pantai Geger	Desa Kampung Dalam Kec. Bilah Hulu
Wisata Sungai	Pemandian Aek Pala	Desa Janji
	Pemandian Aek Mata Kucing	Desa Tanjung Medan
	Pemandian Aek Beko	Desa Tanjung Medan

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022

2.3.3. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah

2.3.3.1 Perencanaan Pembangunan

Unsur Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan salah satu urusan penunjang pemerintahan daerah untuk perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui pelaksanaan fungsi sebagai berikut:



- Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan
- Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan
- Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan
- Pelaksanaan administrasi badan di bidang perencanaan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dokumen perencanaan Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.159
Dokumen Perencanaan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021

No.	Nama Dokumen	Nomor PERDA
1	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2005-2025	Perda Kabupaten Labuhanbatu no 4 Tahun 2015
2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016-2021	Perda Kabupaten Labuhanbatu no 4 Tahun 2016
3	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015-2030	Perda Kabupaten Labuhanbatu no 3 Tahun 2016
4	Rencana Induk Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 – 2026	Perda Kabupaten Labuhanbatu no 3 Tahun 2021

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022

2.3.3.2 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan data terakhir dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Labuhanbatu, seperti dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.160
Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021

No.	OPD	GOL I		GOL II		GOL III		GOL IV		TOTAL
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	
1	Sekretariat Daerah	2	0	12	5	38	37	38	8	140
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1	0	16	3	12	15	5	1	53
3	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	0	0	1	0	18	16	3	1	39
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	3	3	7	4	2	1	20
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	0	9	0	7	6	3	0	26
6	Badan Pendapatan Daerah	0	0	13	3	18	13	2	1	50
7	Badan Penelitian dan Pengembangan	0	0	0	0	7	15	2	2	26
8	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0	0	2	3	13	22	3	0	43
9	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	0	0	0	1	6	10	5	2	24
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	0	0	1	0	10	6	3	2	22
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0	3	3	5	21	3	3	38
12	Dinas Kesehatan	1	0	25	302	68	390	3	27	817
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	0	13	7	14	6	2	0	42
14	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	0	0	2	7	4	13	1	2	29
15	Dinas Lingkungan Hidup	0	0	3	0	7	16	2	2	30
16	Dinas Pangan	0	0	3	2	11	22	4	1	43
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	0	29	4	45	9	3	2	93
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	0	2	1	13	8	2	1	27
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	0	1	0	4	9	1	7	22
20	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	0	0	0	0	14	11	5	2	32
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0	2	0	18	8	2	0	30
22	Dinas Pendidikan	4	0	72	55	279	874	175	647	2106
23	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	0	1	3	2	20	1	6	33

No.	OPD	GOL I		GOL II		GOL III		GOL IV		TOTAL
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0	0	8	4	15	9	6	0	42
25	Dinas Perhubungan	2	0	26	2	16	3	2	1	52
26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	0	2	1	9	9	3	2	26
27	Dinas Pertanahan	0	0	4	0	4	4	3	3	20
28	Dinas Pertanian	1	0	6	1	20	30	15	5	78
29	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1	0	7	1	12	7	2	0	30
30	Dinas Peternakan	0	0	4	2	3	7	2	1	19
31	Dinas Sosial	0	0	0	3	4	14	4	3	28
32	Dinas Tenaga Kerja	0	0	1	0	6	10	4	2	23
33	Inspektorat Daerah	0	0	5	3	17	21	11	3	60
34	Rumah Sakit Umum Daerah	0	0	17	25	83	284	16	20	445
35	Satuan Polisi Pamong Praja	6	0	41	2	24	7	4	0	84
36	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	0	0	0	0	0	4	0	0	4
37	Kantor Camat Bilah Barat	1	0	5	6	5	5	0	0	22
38	Kantor Camat Bilah Hilir	0	0	3	2	10	4	0	0	19
39	Kantor Camat Bilah Hulu	0	0	8	9	7	7	1	0	32
40	Kantor Camat Panai Hilir	1	0	7	1	4	2	1	0	16
41	Kantor Camat Panai Hulu	0	0	9	3	0	2	2	0	16
42	Kantor Camat Panai Tengah	0	0	10	1	5	5	1	0	22
43	Kantor Camat Pangkatan	0	0	7	0	6	2	2	0	17
44	Kantor Camat Rantau Selatan	0	0	10	7	27	22	1	1	68
45	Kantor Camat Rantau Utara	0	1	6	9	38	33	1	1	89
JUMLAH TOTAL		22	1	399	484	938	2042	351	760	4997

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Labuhanbatu berjumlah 4.997 orang yang terdiri dari 3.279 orang perempuan dan 1.698 orang laki-laki. Perangkat Daerah Dinas Pendidikan memiliki jumlah PNS terbanyak 2.106 orang yang terdiri dari 520 orang laki-laki dan 1.576 orang perempuan. Disusul Dinas Kesehatan dengan jumlah PNS sejumlah 817 orang yang terdiri dari 98 orang laki-laki dan 719 orang perempuan.

Tabel 2.161
Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Latar Belakang Pendidikan di
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021

No.	PERANGKAT DAERAH	Latar Belakang Pendidikan																	Jumlah
		Ekonomi	Hukum	Pertanian	Pertambangan	Teknik Sipil	Teknik Elektro	Arsitektur	Sosial Politik	Kesehatan	Pendidikan	Psikologi	Pemerintahan	Manajemen	Komputer	SLTA	SLTP & SD	DLL	
1	Sekretariat Daerah	18	9	7		4	1		4		1	1	12	47	7	27	2		140
2	Sekretariat Dewan	6	1			2				1	2		6	15		19	1		53
3	Inspektorat	21	8	2		4			1	1			6	10		7			60
4	Dinas Kesehatan	7							1	761				11	2	34		1	817
5	Dinas Pendidikan	8	3	2			1				1962		2	45	3	58	22		2106
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	1						9	1			2	6	17	4	1		42
7	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	11	2	1					1				2	9		3			29
8	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	4	1	2		1	1			1	2		1	13	2	12		2	42
9	Dinas Perhubungan	3	1				5						3	9		28	3		52
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6	4			2			2					7		6			27
11	Dinas Lingkungan Hidup	4	1						1	6			2	5		3		8	30
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3	1	2					2				2	9		6		1	26
13	Dinas Pertanahan	2	1	1		2					2		2	3		6		1	20
14	Dinas Sosial	6	1	2		1				4				8		5		1	28
15	Dinas Tenaga Kerja	6	6			1							2	5		3			23
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12	3						1		1		2	10	3	6			38
17	Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata	3				1					12		2	7		5		2	32
18	Dinas Penanaman Modan dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	2	4			1		1	1				3	8	1	8		1	30
19	Dinas Pertanian	1		67										3		3	2	2	78
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	2	1			2			1					7		2		7	22
21	Dinas Peternakan		1	2									1			8		7	19
22	Dinas Pangan	3	1	27							2			2		6		2	43
23	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			1						7	1		2	7		4			22
24	Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana	4								21	1		3	3				1	33
25	Dinas Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	3	1		3	33	1	5						9	2	35	1		93
26	Dinas Perkim	3				8	3	3						3		7	1	2	30
27	Badan Kepegawaian dan	3	3			1					2	3	5	14	7		1		39

No.	PERANGKAT DAERAH	Latar Belakang Pendidikan																	Jumlah
		Ekonomi	Hukum	Pertanian	Pertambangan	Teknik Sipil	Teknik Elektro	Arsitektur	Sosial Politik	Kesehatan	Pendidikan	Psikologi	Pemerintahan	Manajemen	Komputer	SLTA	SLTP & SD	DLL	
	Pelatihan																		
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	4											8	1	6			20
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3				1	2		1		1		2	5		9	2		26
30	Badan Pendapatan Daerah	2	4										4	18	2	18	1	1	50
31	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	10	1	2							1			17	3	8		1	43
32	Badan Penelitian dan Pengembangan	7	1	2					1	1	2			4	6			2	26
33	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	2	3	3		1				1	1		2	9		1		1	24
34	Rumah Sakit Umum Daerah	7				1				412				11	2	9		3	445
35	Satuan Polisi Pamong Praja	3	1						6				3	19		45	7		84
36	Komisi Pemilihan Umum	2												1		1			4
37	Kantor Kecamatan Rantau Utara	5	5	2		1					3		5	31	4	31	1	1	89
38	Kantor Kecamatan Rantau Selatan	3	2	1		1				5				21	5	26	1	3	68
39	Kantor Kecamatan Bilah Barat	1		1										2		15	1	2	22
40	Kantor Kecamatan Bilah Hulu					2			1		1			9		17	2		32
41	Kantor Kecamatan Pangkatan	3		1		1					1			3		8			17
42	Kantor Kecamatan Bilah Hilir	3	2											4	1	8		1	19
43	Kantor Kecamatan Panai Hulu	2	1											2		10	1		16
44	Kantor Kecamatan Panai Tengah	1		1									1	4		15			22
45	Kantor Kecamatan Panai Hilir	1									2			3		8	2		16
JUMLAH TOTAL		198	78	129	3	71	14	9	33	1222	2000	4	77	446	68	540	52	53	4997

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022

Jenjang pendidikan SDM PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu didominasi Strata 1 (S-1) sebanyak 4.352 orang, paling banyak Sarjana Pendidikan sejumlah 2.000 orang, diikuti 1.222 orang sarjana bidang kesehatan, kemudian sarjana bidang manajemen 446 orang, ekonomi (akuntansi) 198 orang diikuti sarjana S-1 di bidang lainnya. PNS berpendidikan SLTA sejumlah 540 orang serta SLTP dan SD sebanyak 52 orang.

2.3 Realisasi Anggaran Pengembangan Sumber Daya Manusia

Gambaran tentang besaran realisasi anggaran pengembangan sumber daya

manusia 3 (tiga) tahun terakhir dan rasio perbandingan dengan belanja pegawai dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.162
Rasio Realisasi Anggaran Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Belanja Pegawai Tahun 2018-2020

Indikator	2018	2019	2020
Realisasi Anggaran Pengembangan Sumber Daya Manusia (Rp.)	16.893.270.806	18.282.541.931	8.377.149.962
Belanja Pegawai (Rp.)	64.133.091.330	82.087.852.778	87.044.183.100
Rasio	0,26	0,22	0,096

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022

2.3.3.3 Penelitian dan Pengembangan

Arah Kebijakan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu diarahkan pada Rencana aksi Penguatan Sistem Inovasi Daerah merupakan wujud implementasi strategis Penguatan SIDA Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2024 yang mengukur keberhasilan terhadap Kawasan Pertanian Integrasi Sei Penggantungan, Kampung Nelayan Maju 4 Desa (Sei Berombang, Sei Sakat, Sei Baru, Sei Sanggul), Desa Inovasi 4 Desa (Selat Beting, Sei Pelancang, Sei Siarti, Bagan Bilah), Panai Natural And Historical Park (Sei Tawar Dan Labuhanbilik) dan Ekowisata Linggahara, Salah Belok, Si Onggol Onggol, Aek Beko.

Ukuran keberhasilan ditentukan dengan pilar dan dimensi yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Dalam rencana aksi ini mendeskripsikan parameter setiap pilar yang digunakan dan ukuran perkembangan Kawasan yang ditunjukkan dengan tahapan yang telah dicapai. Rencana aksi ini focus pada penguatan SIDA secara substantif pada lima Kawasan, sedangkan rencana aksi terkait dukungan administrasi dan kegiatan menjadi domain yang telah dilengkapi bersamaan dengan penyusunan Roadmap SIDA. Adapun dukungan administrasi yang dimaksud adalah telah tersedianya Tim

Koordinasi SIDA Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2024, Tim Sekretariat SIDA Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2024. Dalam tataran kegiatan administratif yang melekat selama berjalannya Roadmap SIDA Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2024 adalah Penguatan SIDA bertujuan untuk pelaksanaan pengukuran pilar, dimensi dan indicator keberhasilan SIDA terhadap Kawasan Pertanian Integrasi Sei Penggantungan, Kampung Nelayan Maju 4 Desa (Sei Berombang, Sei Sakat, Sei Baru, Sei Sanggul), Desa Inovasi 4 Desa (Selat Beting, Sei Pelancang, Sei Siarti, Bagan Bilah), Panai Natural And Historical Park (Sei Tawar Dan Labuhanbilik) dan Ekowisata Linggahara, Salah Belok, Si Onggol Onggol, Aek Beko. Di samping itu adalah kegiatan Monitoring dan Evaluasi Roadmap SIDA yang bertujuan untuk mendeskripsikan capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh perangkat daerah dan stakeholder terkait dalam rangka mendukung target yang telah ditentukan dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2024.

2.3.3.4 Pengawasan

Urusan Pengawasan merupakan urusan penunjang Pemerintahan Daerah, salah satu indikator urusan pengawasan pemerintahan daerah adalah Opini yang dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan Undang-undang nomor 15 tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*
2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*
3. Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*
4. Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)

Selama tahun 2017 sampai dengan 2021 opini laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.163
Capaian Indikator Kinerja Utama Opini Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Target (%)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Realisasi (%)	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
3	Capaian kinerja (%)	75,00	75,00	75,00	75,00	-

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022

2.3.3.5 Sekretariat Dewan

Tugas utama dari Sekretariat Dewan Kabupaten Labuhanbatu adalah menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan daerah bidang fasilitasi pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD dalam penyelenggaraan urusan umum, program dan keuangan, persidangan dan perundang-undangan, fasilitasi penganggaran dan pengawasan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah.

Tabel 2.164
Komposisi Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Berdasarkan Partai
Politik Dan Gender Periode 2019-2024

No	Partai Politik	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan Karya	8	2	10
2	Gerindra	5	1	6
3	Hanura	3	2	5
4	Nasdem	4	-	4
5	PDI Perjuangan	3	1	4
6	Perindo	3	1	4
7	PAN	4	-	4
8	PPP	1	2	3
9	PBB	3		3
10	Partai Berkarya	1		1
11	PKB	1		1
Jumlah		36	9	45 Orang

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka terhadap persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. secara rinci aspek daya saing daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1 Produktivitas Total Daerah

Kemampuan ekonomi daerah menjelaskan tentang pencapaian terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dan pengeluaran konsumsi non pangan per kapita.

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Salah satu indikator untuk mengukur kemampuan ekonomi suatu daerah adalah dengan pengeluaran konsumsi per kapita yang disesuaikan. Indikator ini menunjukkan derajat daya beli masyarakat terhadap barang atau jasa. Kebutuhan makanan merupakan kebutuhan utama sehingga kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan tersebut semakin meningkat. Pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita penduduk Kabupaten Labuhanbatu semakin meningkat dari tahun ke tahun dengan mengalami peningkatan sebesar 2,3 persen dari tahun 2017 sampai tahun 2021.

Tabel 2.165
Angka Konsumsi RT per Kapita Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	Tahun (Ribuan Rupiah)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Total Pengeluaran RT (Per Tahun)	13.999	15.285	16.165	11.904	17.230
2	Jumlah RT	107.833	110.819	111.344	112.960	112.586
3	Rasio	0,130	0,138	0,145	0,105	0,153

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu 2022

b. **Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita**

Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita penduduk Kabupaten Labuhanbatu juga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pengeluaran per kapita untuk pengeluaran bukan makanan pada tahun 2021 sebesar Rp.5.183.784,- meningkat sebesar 11,01 persen dari tahun 2017.

Tabel 2.166
Persentase Konsumsi RT Non Pangan Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	Tahun (Rupiah)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Total Pengeluaran RT Non Pangan (Per Tahun)	3.777.540	5.396.040	5.462.244	5.309.880	5.183.784
2	Jumlah RT	107.833	110.819	111.344	112.960	112.586
3	Rasio (%)	35,03	48,69	49,06	47,01	46,04

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu 2022

2.4.1.2 Nilai Tukar Petani

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Potensi pertanian di wilayah Kabupaten Labuhanbatu beraneka ragam dan tersebar di seluruh kecamatan. Bidang pertanian unggulan di Kabupaten Labuhanbatu yaitu tanaman pangan padi.

Nilai tukar petani adalah salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk atau komoditas yang dihasilkan atau yang dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi atau usaha maupun untuk konsumsi rumah tangga.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.2.1 Perhubungan

Pembangunan sarana dan prasarana wilayah atau infrastruktur direncanakan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu. Sarana dan prasarana wilayah pada dasarnya merupakan elemen pendukung bagi berlangsungnya kehidupan suatu wilayah karena masyarakat yang tinggal di suatu wilayah akan membutuhkan sarana prasarana untuk melangsungkan kegiatan. Fokus wilayah/infrastruktur merupakan penjelasan mengenai pencapaian indikator-indikator seperti rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah penginapan/hotel, persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih dan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik.

1. Aksesibilitas Daerah

Kedudukan wilayah Kabupaten Labuhanbatu cukup strategis, yaitu berada pada jalur lintas timur Sumatera dan berada pada persimpangan menuju Provinsi Sumatera Barat dan Riau yang menghubungkan pusat-pusat perkembangan wilayah di Sumatera dan Jawa serta mempunyai akses ke luar negeri karena berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Selain itu, Kawasan Kabupaten Labuhanbatu terdiri dari kawasan perkotaan, perdesaan, kawasan pesisir/pantai dan kawasan perbatasan/ pedalaman.

a. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaran merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perekonomian suatu daerah menyebabkan jumlah perjalanan/mobilisasi yang dilakukan setiap individu semakin meningkat. Oleh karenanya kebutuhan akan transportasi umum akan semakin tinggi. Meningkatnya kebutuhan transportasi harus disertai dengan pengembangan sarana dan prasarana transportasi (kendaraan, jalan dan lingkungan).

Ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2019 mencapai 1 : 133 yang berarti bahwa setiap panjang jalan sepanjang 1 km dapat di akses kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 sebanyak 133 kendaraan. Data perkiraan tahun 2021 rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan di Kabupaten Labuhanbatu yaitu sebesar 1:229 yang artinya sepanjang 1 km dapat di akses kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 sebanyak 229 kendaraan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.167
Rasio Panjang Jalan Per Kendaraan di Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Panjang Jalan (Km)	806,08	806,08	1.107,17	1.107,17	1.107,17
2	Jumlah Kendaraan	-	-	147.393	193.203*	253.250*
	Rasio	-	-	0,0075	0,0057	0,0044

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu 2022. Ket : * = Data Sementara
SIPD Provinsi Sumatera Utara 2022

b. Jumlah Orang yang Terangkut Kereta Api

Kereta api merupakan salah satu sarana transportasi yang sering digunakan oleh masyarakat Kabupaten Labuhanbatu. Selama tahun 2020, jumlah penumpang kereta api yang berangkat dari stasiun Rantauprapat sebanyak 48.994 orang yang terdiri dari 26.421 penumpang kelas eksekutif dan 22.573 penumpang kelas bisnis. Jumlah ini menurun dari tahun-tahun sebelumnya akibat penghentian sementara angkutan Kereta Api Medan-Rantauprapat oleh PT. KAI akibat dampak Pandemi Covid-19.

Tabel 2.168
Persentase Penumpang Kereta Api di Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017- 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penduduk	478.953	486.480	494.178	493.899	499.982
2	Penumpang Kereta Api	128.287	215.741	136.689	48.994	-
	Persentase (%)	26,78	44,34	27,66	9,92	-

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu 2022

c. Jumlah Orang yang Melalui Dermaga per Tahun

Jumlah orang yang diangkut melalui Dermaga Sei Berombang terus menurun dalam lima tahun terakhir. Dari 8.997 orang pada tahun 2017 berkurang menjadi 75 orang pada tahun 2021. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya sarana dan prasarana jalan dan jembatan yang ada di Kabupaten labuhanbatu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.169
Jumlah orang yang melalui Dermaga Sei Berombang
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017- 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Dermaga	8997	7800	7582	1437	75

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu 2021

2.4.2.2 Komunikasi dan Informatika

Teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini berkembang sangat pesat menuntut kesiapan pengguna dalam hal Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan informasi yang mutakhir. Selain itu peningkatan kualitas pengawasan dan pengevaluasian oleh publik, salah satunya ditempuh melalui pemanfaatan website. Oleh karenanya sasaran utama dari program dan kebijakan di bidang urusan komunikasi dan informatika diarahkan untuk mencapai sasaran “terinformasikannya hasil-hasil penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat dan swasta” sehingga masyarakat dapat mengetahui, menilai dan memberikan masukan atas jalannya pemerintahan dan pembangunan, baik menyangkut *input, output, outcome, benefit* maupun *impact* yang dirasakan dari keluarnya suatu kebijakan.

2.4.2.3 Penataan Ruang

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Labuhanbatu pada hakikatnya untuk meningkatkan kompetensi atau daya saing daerah dalam menghadapi globalisasi dengan cara peningkatan mutu sumber daya

manusia, optimalisasi pemanfaatan sumber daya lahan dan pangan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga pembangunan yang berlangsung dapat berkelanjutan melalui struktur ruang.

a. Kawasan Hutan Produksi

Dalamarahantata ruang, kawasan budidaya hutan memiliki fungsi antara lain sebagai penghasil kayu dan bukan kayu untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industry dan pengolahan kayu, sebagai daerah resapan air hujan untuk kawasan sekitarnya, membantu penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat di samping fungsi lindungdan konservasi, serta mendukung kehidupan dan ekosistem. Kawasan hutan produksi di wilayah Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan SK.5 7 9 /Menhut-II/2015 seluas total kurang lebih 17.873 Ha, yang berada di Kecamatan Panai Hilir.

b. Kawasan Peruntukan Industri

Kriteria kawasan peruntukan industri adalah sebagai berikut :

- 3 Harus memperhatikan kelestarian lingkungan;
- 4 Harus dilengkapi dengan unit pengolahan limbah;
- 5 Harus memperhatikan suplai air bersih;
- 6 Jenis industri yang dikembangkan adalah industri yang ramah lingkungan dan memenuhi kriteria tambang limbah yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup;
- 7 Pengelolaan limbah untuk industri yang berkumpul di lokasi berdekatan sebaiknya dikelola secara terpadu;
- 8 Pembatasan pembangunan perumahan baru di kawasan peruntukan industri;
- 9 Harus memenuhi syarat AMDAL sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- 10 Memperhatikan penataan kawasan perumahan di sekitar kawasan industri;
- 11 Pembangunan kawasan industri minimal berjarak 2 Km dari permukiman dan berjarak 15-20 Km dari pusat kota;

- 12 Kawasan industri minimal berjarak 5 Km dari sungai tipe C atau D;
- 13 Penggunaan lahan pada kawasan industri terdiri dari penggunaan kaveling industri, jalan dan saluran, ruang terbuka hijau, dan fasilitas penunjang.

Berdasarkan kriteria tersebut maka ditetapkan kawasan peruntukan industri di Kabupaten Labuhanbatu dengan luas total 175 (seratus tujuh puluh lima) Ha. Kawasan peruntukan industri berada di Kecamatan Bilah Hulu yang berupa pengolahan hasil perkebunan sedangkan untuk pengolahan hasil perikanan berada di Kecamatan Panai Hilir.

2.4.2.4 Fasilitas Keuangan (Bank dan Non Bank)

a. Jenis dan Jumlah Bank

Dalam pengembangan perekonomian di Kabupaten Labuhanbatu sektor Perbankan juga memiliki peran yang sangat penting. Pada saat ini, telah banyak berdiri kantor cabang atau kantor cabang pembantu Bank Nasional dan Bank Daerah di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu. Pada tahun 2017 - 2021, Bank Indonesia menginformasikan jumlah kantor cabang Bank Nasional sebanyak 12 kantor, kantor cabang pembantu sebanyak 14 kantor, kantor kas sebanyak 4 kantor dan 90 unit Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Jumlah kantor cabang dan kantor cabang pembantu perbankan nasional terus bertambah seiring dengan semakin tumbuhnya perekonomian Kabupaten Labuhanbatu. Disamping perbankan, lembaga keuangan bukan Bank lainnya juga telah banyak berdiri di Kabupaten Labuhanbatu seperti pegadaian, asuransi, koperasi dan lain-lain.

2.4.2.5 Ketersediaan Rumah Makan/Restoran dan Penginapan

a. Rumah Makan/Restoran

Di Kabupaten Labuhanbatu terdapat berbagai Rumah Makan/Restoran yang menyediakan berbagai jenis makanan/kuliner berciri khas makanan lokal/daerah atau luar daerah, antara lain makanan khas Melayu, Minang, Jawa, Mandailing, Batak Toba, dan lain lain yang berada di pusat kota Rantauprapat.

b. Jenis dan Jumlah Penginapan

Ketersediaan penginapan sangat menunjang dalam pelaksanaan pembangunan perekonomian suatu daerah. Banyaknya penginapan dapat menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi pada suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan ketersediaan penginapan salah satunya dapat dilihat dari jumlah hotel/penginapan. Pada tahun 2021, jumlah penginapan di Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 30 unit, terdiri dari 5 unit Hotel Berbintang dan 25 unit Hotel Non Berbintang. Data dari tahun 2017-2021 menunjukkan adanya peningkatan jumlah Hotel Non Berbintang di Kabupaten Labuhanbatu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.170
Jenis dan Jumlah Penginapan di Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Hotel Berbintang	5	5	5	5	5
2	Hotel Non Berbintang	20	21	28	31	25
	Jumlah	25	26	33	36	30

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu 2022

Salah satu hal penting untuk meningkatkan daya tarik investasi dan mendorong meningkatnya kunjungan wisatawan domestik disuatu daerah adalah ketersediaan fasilitas hotel dan akomodasi hotel lainnya. Berikut ini adalah kondisi fasilitas hotel dan akomodasi hotel lainnya yang ada di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2021 yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.171
Jumlah Akomodasi, Kamar, dan Tempat Tidur yang Tersedia pada Hotel
Bintang dan Non Bintang Menurut Kecamatan
di Kabupaten Labuhanbatu, 2017–2021

No.	Kecamatan	Uraian	2017		2018		2019		2020		2021	
			H. Bintang	H. NonBintang	H. Bintang	H. Non Bintang	H. Bintang	H. Bintang	H. Bintang	H. Non Bintang	H. Bintang	H. Non Bintang
1	Bilah Hulu	Akomodasi	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
		Kamar	-	61	-	61	-	61	-	61	-	61
		T. Tidur	-	67	-	67	-	67	-	64	-	64
2	Pang-Katan	Akomodasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kamar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T. Tidur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Bilah Barat	Akomodasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kamar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T. Tidur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bilah Hilir	Akomodasi	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1
		Kamar	-	-	-	16	-	16	-	14	-	14
		T. Tidur	-	-	-	16	-	16	-	28	-	28
5	Panai Hulu	Akomodasi	-	2	-	2	-	1	-	2	-	2
		Kamar	-	28	-	28	-	16	-	30	-	30
		T. Tidur	-	28	-	28	-	16	-	30	-	30
6	Panai Tengah	Akomodasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kamar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T. Tidur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Panai Hilir	Akomodasi	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1
		Kamar	-	-	-	10	-	10	-	7	-	6
		T. Tidur	-	-	-	10	-	10	-	7	-	6
8	Rantau Selatan	Akomodasi	3	6	3	7	3	7	3	7	3	2
		Kamar	151	114	151	182	151	182	151	151	153	38
		T. Tidur	290	134	290	253	280	253	292	177	280	76
9	Rantau Utara	Akomodasi	2	16	2	17	2	16	2	19	2	18
		Kamar	115	318	115	317	114	306	121	416	114	367
		T. Tidur	199	591	199	605	205	594	216	661	201	648

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu, 2022

2.4.2.6 Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih

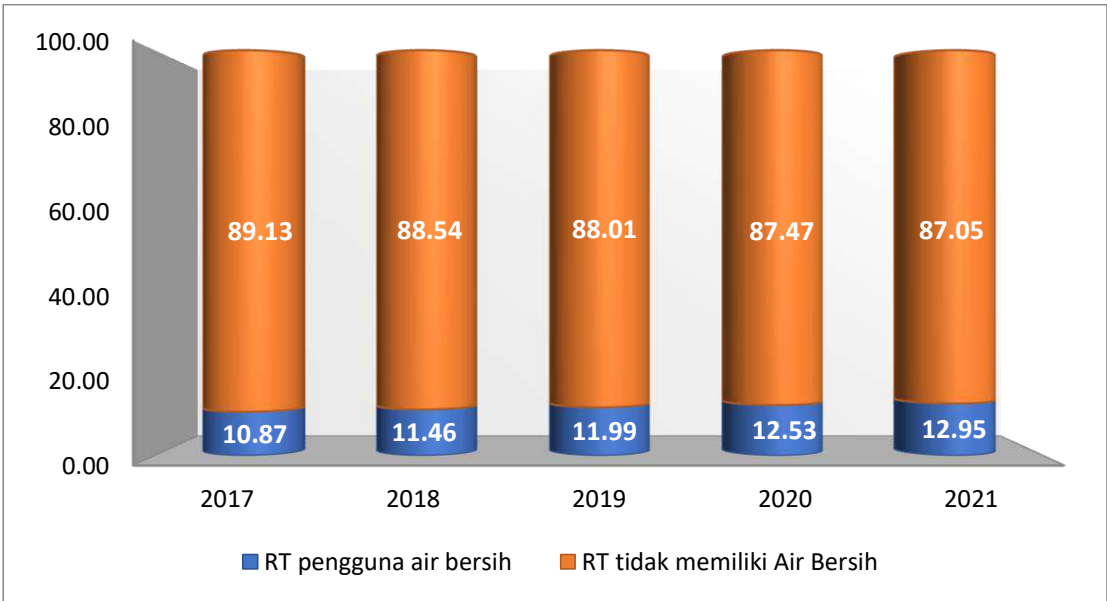
Air minum atau air bersih yang disalurkan (water distributed) oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) Tirta Bina Labuhanbatu pada tahun 2021 dengan pelanggan sebanyak 16.581 pelanggan. Pelanggan yang terbanyak merupakan rumah tangga yaitu sebanyak 14.576 pelanggan. Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih sejak tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini .

Tabel 2.172
Persentase Rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Rumah Tangga (RT)	107.833	110.819	111.344	112.960	112.586
2	RT pengguna air bersih	11.720	12.697	13.348	14.158	14.576
	Rasio	1 : 9	1 : 9	1 : 8	1 : 8	1 : 8

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu 2022

Grafik 2.38
Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017-2021



2.4.2.7 Ketersediaan Energi Listrik

Energi listrik sudah menjadi kebutuhan setiap orang dan pemenuhan kebutuhan listrik menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu. Ketersediaan energi listrik di Kabupaten Labuhanbatu terus meningkat setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2020 daya yang terpasang sebesar 150.812.315 VA dan meningkat pada tahun 2021 sebesar 182.025.060 VA.

Tabel 2.173
Ketersediaan Daya Listrik Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 - 2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Daya terpasang	136.360.580	137.006.444	144.262.867	150.812.315	182.025.060

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu 2022

a. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

Dewasa ini ketergantungan terhadap ketersediaan energi listrik semakin hari semakin meningkat. Keberlangsungan berbagai macam bentuk aktivitas dimasyarakat, sangat tergantung kepada tersedianya energi listrik. Oleh karena itu sektor ketenagalistrikan mempunyai peranan yang sangat strategis dan menentukan, dalam upaya mensejahterakan masyarakat.

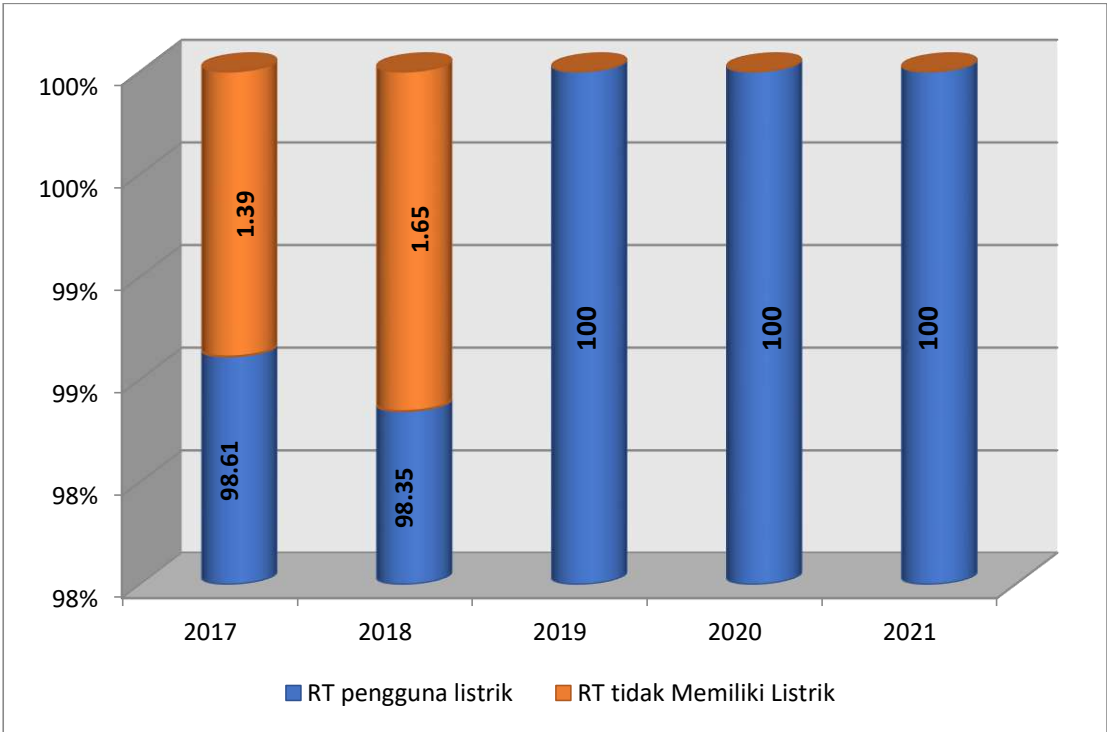
Pertumbuhan ekonomi saat ini memerlukan dukungan pasokan energi yang handal termasuk tenaga listrik. Kebutuhan tenaga listrik akan semakin meningkat sejalan dengan perkembangan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Semakin meningkatnya ekonomi pada suatu daerah mengakibatkan konsumsi tenaga listrik akan semakin meningkat pula. Kondisi ini tentu harus diantisipasi sedini mungkin agar penyediaan tenaga listrik dapat tersedia dalam jumlah yang cukup dan harga yang memadai. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik di Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagaimana diperlihatkan pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.174
Persentase Rumah tangga (RT) yang menggunakan listrik
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Rumah Tangga (RT)	107.833	110.819	111.344	112.960	112.586
2	RT pengguna listrik	106.336	108.986	113.433	115. 686	121.266
	Rasio (%)	97,31	98,61	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu 2022

Grafik 2.39
Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017-2021



2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saiang investasi berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh faktor ekonomi seperti jumlah dan macam pajak daerah. Namun selain faktor ekonomi iklim investasi Kabupaten labuhanbatu dipengaruhi oleh faktor lain seperti layanan birokrasi pemerintahan daerah khususnya perijinan usaha yang telah memenuhi SOP.

2.4.3.1 Angka Kriminalitas

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu aspek strategis yang perlu dijaga untuk mewujudkan stabilitas daerah. Iklim investasi juga salah satunya dipengaruhi oleh tingkat keamanan dan ketertiban yang ada.

Data lengkap tentang angka kriminalitas di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.175
Angka Kriminalitas Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021

No	Jenis Kriminalitas	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kasus Narkoba	740	588	936	202	257
2	Jumlah Kasus Pembunuhan	29	16	19	–	2
3	Jumlah Kasus Seksual	9	5	8	4	12
4	Jumlah Kasus Penganiayaan	63	11	51	15	30
5	Jumlah Kasus Pencurian	122	110	284	147	214
6	Jumlah Kasus Penipuan	6	1	18	4	3
7	Jumlah Kasus Materai, Merk dan Surat	-	0	–	–	2
8	Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	1.337	884	1.629	485	637

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu 2022

Jumlah kasus narkoba meningkat dari tahun 2020 sebanyak 202 kasus menjadi 257 kasus pada tahun 2021, hal ini disebabkan belum tertanganinya secara optimal peredaran narkoba. Oleh karena itu perlu dilakukan optimalisasi program pembinaan pemuda.

2.4.3.2 Lama Proses Perizinan

Investasi asing yang akan masuk ke suatu wilayah atau daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh wilayah/daerah yang bersangkutan. Pembentukan daya saing investasi berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kemudahan perizinan. Rata-rata lama proses perizinan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dalam kaitannya dengan investasi/usaha di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.

2.4.3.3 Jumlah dan Macam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku,

yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku). Sedangkan retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan /atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Jenis Pajak Daerah yang direncanakan menjadi bagian Pendapatan Asli Kabupaten Labuhanbatu meliputi: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan rumah makan, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan & Pengolahan Bahan Galian Gol. C, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan, Pajak Air Tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan. Rincian hasil pajak daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.176
Jumlah dan Macam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pajak Hotel	869.727.030,00	928.158.743	912.000.000	725.000.000	947.000.000
2	Pajak Restoran dan RumahMakan	1.773.938.829,00	1.973.793.449	2.478.000.000	1.819.000.000	1.958.000.000
3	Pajak Hiburan	468.276.369,00	598.304.818	1.904.000.000	529.000.000	367.000.000
4	Pajak Reklame	809.162.570,00	1.021.581.686	1.091.000.000	895.000.000	869.000.000
5	Pajak Penerangan Jalan	20.137.182.349,00	22.512.025.184	23.804.000.000	23.593.000.000	24.958.000.000
6	Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Gol C	407.412.000,0	875.570.750	-	1.328.000.000	510.000.000
7	Pajak Sarang Burung Walet	60.972.700,00	210.046.609	52.000.000	214.000.000	374.000.000
8	Pajak Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan	484.211.115,00	613.421.817,64	7.226.000.000	786.000.000	792.000.000
9	Pajak Air Tanah	49.550.000,00	62.550.000	675.000.000	76.000.000	107.000.000
10	Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan Perkotaan	4.832.941.828,00	4.381.569.077	4.559.000.000	6.101.000.000	5.187.000.000
11	Retribusi Daerah	4.184.945.326,00	5.875.009.521,20	4.890.000.000	5.644.000.000	78.637.000.000

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu 2022

2.4.3.4 Desa Swasembada

Dari tahun 2021 di Kabupaten Labuhanbatu terjadi penurunan jumlah desa/kelurahan swasembada sebanyak 13 desa dari tahun sebelumnya. Desa yang mendapat kategori swasembada seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.177
Jumlah Desa/Kelurahan Swasembada di Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017- 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Desa/kelurahan swasembada	11	13	16	18	5
2	Jumlah desa/kelurahan	98	98	98	98	98
3	Persentase (%)	11,2	13,26	16,32	18.36	5,10

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022

Desa/Kelurahan yang mendapat kategori swasembada di Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut :

- Tahun 2017 yaitu, Desa Sei Nahodaris, Desa sei Jawi jawi, Desa Tanjung Medan, Desa Sibargot,Desa Cinta Makmur, Desa Tanjung Sarang Elang , Desa Selat Besar, Desa Negeri Lama,Desa Sei Pelancang, Desa Teluk Sentosa, Desa Sei Tawar;
- Tahun 2018 yaitu, Desa Sei Nahodaris, Desa sei Jawi jawi, Desa Tanjung Medan, Desa Sibargot,Desa Cinta Makmur, Desa Tanjung Sarang Elang, Desa Selat Besar, Desa Negeri Lama, Desa Sei Pelancang, Desa Sei Tawar, Desa Sei Siarti , Desa Teluk Sentosa, Desa Sei Rakyat;
- Tahun 2019 Desa Nahodaris, Desa Sei Jawi- jawi, Desa Tanjung Medan, Desa Sibargot, Desa Cinta Makmur, Desa Tanjung Sarang Elang, Desa Selat Besar, Desa Negeri Lama, Desa Sei Pelancang, Desa Sei Tawar, Desa Sei Siarti, Desa Teluk Sentosa, Desa Sei Rakyat, Desa Sei Pegantungan, Desa Wonosari, Desa Negeri Lama Seberang;
- Tahun 2020 Desa Sei Nahodaris, Desa Sei Jawi- jawi, Desa Tanjung Medan, Desa Sibargot, Desa Cinta Makmur, Desa Tanjung Sarang Elang, Desa Selat Besar, Desa Negeri Lama, Desa Sei Pelancang, Desa Sei Tawar, Desa Sei Siarti, Desa Teluk Sentosa, Desa Sei Rakyat, Desa Sei

- Pegantungan, Desa Wonosari, Desa Negeri Lama Seberang, Desa Selat Beting, Desa Sei Baru;
- Tahun 2021 Desa Janji, Desa Kampung Padang, Desa Pangkatan, Desa Sei Kasih dan Desa Selat Besar.

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Penduduk merupakan salah satu unsur yang berperan vital mempengaruhi kualitas suatu daerah. Daerah yang maju disebabkan oleh kualitas penduduk-penduduknya. Jumlah penduduk yang besar jika diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi dapat menjadi modal dasar pembangunan di daerah tersebut karena memiliki peranan besar dalam pembangunan ekonomi. Indikator kemajuan suatu daerah dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusianya, begitu pula sebaliknya karena keduanya memiliki efek timbal balik.

a. Rasio Ketergantungan

Tingkat ketergantungan adalah angka jumlah penduduk usia lebih kecil 15 tahun dan lebih besar dari 64 tahun terhadap jumlah penduduk usia lebih besar 15 tahun dan lebih kecil dari 64 tahun. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Labuhanbatu selama kurun waktu tahun 2017-2021.

Tabel 2.178
Rasio Ketergantungan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Penduduk Usia < 15 Tahun	159.315	160.847	162.146	141.667	142.124
2	Jumlah Penduduk Usia > 64 Tahun	15.969	16.877	17.906	19.058	20.434
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif	175.284	177.724	180.052	160.725	162.558
4	Jumlah Penduduk usia 15 - 64 Tahun (Produktif)	303.309	308.756	314.126	333.174	337.514
5	Rasio Ketergantungan	57,79	57,56	57,32	48,24	48,16

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2022

Data Rasio Ketergantungan Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2021 sebesar 48,16 adalah penduduk usia tidak produktif di Kabupaten Labuhanbatu mempunyai tingkat ketergantungan sebesar 48,16% terhadap penduduk usia produktif, sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu.

2.5 Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Sistem Inovasi Daerah merupakan suatu bentuk cara pandang/pendekatan pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, inovatif, holistik, berkelanjutan, dengan lebih menekankan kerja kolaboratif antar stakeholders pembangunan daerah. Sistem Inovasi Daerah juga dapat dikatakan sebagai suatu kesatuan dari sehimpunan pelaku pembangunan, kelembagaan (termasuk kebijakan), hubungan interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusi inovasi, termasuk teknologi, dan praktek baik/terbaik serta proses pembelajarannya.

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah, Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah. Peraturan tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam mendorong Sistem Inovasi Daerah yang ada di daerahnya, sehingga terbentuk keselarasan dalam pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017, yang dimaksud inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tujuan dari Inovasi Daerah tersebut adalah untuk meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun bentuk inovasi daerah menurut Peraturan Pemerintah dimaksud yaitu inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Berikut inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam hal tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

2.5.1 Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah

Dalam hal inovasi tata kelola Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam membangun dan mengembangkan tata kelola yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, atau lebih dikenal dengan istilah e-Government. SIM/aplikasi dibangun/dikembangkan sebagai bentuk inovasi tata kelola, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.179
Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2018-2021

No	Nama Inovasi	Urusan Pemerintah	2018	2019	2020	2021
1	e-MUSRENBANG	Perencanaan	√	-	√	-
2	e-KINERJA	Kepegawaian	√	√	√	-
3	ALIS (Aparatur Labuhanbatu Information System)	Kepegawaian	-	-	-	√
4	OLA (Online Labuhanbatu Absensi)	Kepegawaian	-	-	-	√
5	AJAMU (Aplikasi Jaringan Aspirasi Musrenbang)	Perencanaan	-	√	√	-
6	Program APMP2D (Akselerisasi Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Dasar)	Pendidikan	√	√	√	-
7	SIANDI (Sistem Informasi Anggaran Daerah Integrasi)	Perencanaan, Keuangan	-	√	√	-
8	SIMPAD (Sistem Informasi Pendapatan Daerah)	Pendapatan	-	√	-	-

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022

2.5.2 Inovasi Pelayanan Publik

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang prima dan dituntut untuk terus melahirkan inovasi-inovasi. Begitu halnya dengan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang berupaya membuat inovasi-inovasi untuk pelayanan publik dalam beberapa tahun terakhir, antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.180
Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2018-2021

No	Nama Inovasi	Urusan Pemerintah	2018	2019	2020	2021
1	ANAK PABOLO	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	-	-	√	√
2	GOBAT (Pelayanan Pengantaran Obat)	Kesehatan	-	-	√	√
3	KEBAYA DARI BATIK (Kembangkan Budaya Baca Dari Membaca Timbul Karya)	Perpustakaan	√	√	√	-
4	FAST TRACK	Kesehatan	√	√	√	-
5	LOPUS (Laporan Obat Puskesmas)	Kesehatan	√	√	√	-
6	ANGKAT TAS ANDALAN AKHIR BAHIR (Pelayanan Akte Kelahiran Bayi Baru Lahir di RSUD Rantauprapat)	Kesehatan	√	√	√	-
7	PESTA BUDAYA	kepemudaan dan olah raga	√	√	√	-
8	SIPANDA (Pemutakhiran Data Kemiskinan)	Social	-	√	√	-
9	APOK CITEN (Aplikasi Pelayanan On Line)	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	√	√	√
10	SENDI RUSADA (Senam Diabetes pada RSUD Rantauprapat)	Kesehatan	√	√	√	-
11	FPBR (Forum Peduli Bedah Rumah)	perumahan rakyat dan kawasan permukiman	-	√	√	-
12	SILASMI (Fasilitator Kampung KB)	pengendalian penduduk dan keluarga berencana	√	√	√	-
13	Stiker Kencana Kampung KB	pengendalian penduduk dan keluarga berencana	√	√	-	-

No	Nama Inovasi	Urusan Pemerintah	2018	2019	2020	2021
14	SIASWAN PUJI (Aplikasi E-Aspirasi DPRD Puja Indah)	DPRD	-	√	-	-
15	SIPERINDAH (Aplikasi E-Perizinan Puja Indah)	Perizinan	-	√	-	-
16	SiCANTIK (Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik)	penanaman modal	√	√	√	√
17	BKM (Bantuan Kredit Modal) bagi pelaku UMKM	koperasi, usaha kecil, dan menengah	-	-	√	-
18	Bantuan Kredit Modal Tanpa Bunga bagi Pelaku UMKM	koperasi, usaha kecil, dan menengah	√	√	-	-
19	PESAN (Pemasaran Sanitasi)	Kesehatan	√	-	√	-
20	KAMPUNG IKA LA JAMBAN	kesehatan,perumahan rakyat dan kawasan permukiman	-	√	√	-
21	SIKESPINDAH (Aplikasi E-Kesehatan Puja Indah)	Kesehatan	-	√	-	-
22	PR Anak (Puskesmas Ramah Anak)	Kesehatan	-	√	√	-
23	PRAGTIS (Pakaian Seragam Sekolah Gratis)	Pendidikan	√	√	√	-
24	SIDIK PUJI (Aplikasi E-Pendidikan Puja Indah)	Pendidikan	-	√	-	-
25	YANI PEKA (Pelayanan Kerohanian Peduli Kepada Pasien)	Kesehatan	√	√	√	√
26	Tenaga kerja Siap Pakai	tenaga kerja	√	√	√	-
27	SINAKERJI (Aplikasi E-Tenaga Kerja Puja Indah)	Tenaga Kerja	-	√	-	-
28	SIDUKCAPINDAH (Aplikasi E-Dukcapil Puja Indah)	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	√	-	-

No	Nama Inovasi	Urusan Pemerintah	2018	2019	2020	2021
29	Inseminasi buatan	Pangan	√	√	√	-
30	PAKAR (Pemanfaatan Pekarangan)	Pangan	-	√	√	-
31	KOTAK PERMATA (Permasalahan Tanah)	Pertanahan	-	-	√	√
32	BEROMBANG (Berita dan Opini Masyarakat Berimbang)	Komunikasi dan Informasi	-	-	-	√
33	SI PINK (Imunisasi Pink)	kesehatan,pengendalian penduduk dan keluarga berencana	√	√	√	-
34	BULETER (Budi Daya Lele Terpal) Kewirausahaan Pemuda	pangan,kepemudaan dan olah raga	-	-	√	√

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022

2.5.3 Inovasi Daerah Lainnya Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu tidak hanya dituntut menciptakan inovasi dalam hal tata kelola dan pelayanan publik, tetapi menciptakan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, antara lain:

Tabel 2.181
Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018-2021

No	Nama Inovasi	Urusan Pemerintah	2018	2019	2020	2021
1	ALG (Anak Lupa Gadget)	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	-	-	√	√
2	DIGITAL LIBRARY	Perpustakaan	-	√	√	-

No	Nama Inovasi	Urusan Pemerintah	2018	2019	2020	2021
3	BERSINAR (Bersih Narkoba)	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	-	-	√	√
4	Bank Sampah	Lingkungan Hidup	√	-	-	-
5	SATU SABU (Sampah bertuah Sampah berbuah)	lingkungan hidup	-	√	√	-
6	ERGONOMI OFFICE	Penelitian dan Pengembangan	-	-	√	-
7	PENERBITAN BUHAKAPENDA (Buku Hasil Karya Penulis Daerah) Labuhanbatu	perpustakaan,kearsipan	√	-	√	-
8	IBU KARPED (Ilmu Buku Hasil Karya Penulis Daerah)	Perpustakaan, Kearsipan	-	√	-	-
9	PUD (Produk Unggulan Daerah) Kabupaten Labuhanbatu	koperasi, usaha kecil, dan menengah,perdagangan, perindustrian	√		√	-
10	AKTAMAS (Asuransi Kenyamanan Tanaman Masyarakat Aman dan Sejahtera)	Pangan	-	√	√	√
11	KIM (Kelas Ibu Membaca)	perpustakaan,kearsipan	-	√	√	-
12	IMAN (Iqro, Al-Quran Bersama)	Pendidikan	-	√		-
13	PEKAR (Pemanfaatan Pekarangan)	Pangan	√	-	-	-
14	Triple Helix ABG (Academisi, Bisnis, dan Goverment)	Penelitian dan Pengembangan	-	√	√	√
15	GAUL Berinovasi (Gerakan Aksi Untuk Labuhanbatu Berinovasi)	Penelitian dan Pengembangan	-	√	√	√

No	Nama Inovasi	Urusan Pemerintah	2018	2019	2020	2021
16	RUNYAM (Ruang Nyaman)	Penelitian dan Pengembangan	-	√	-	-
17	SATDUS (Pusat Daur Ulang Sampah)	lingkungan hidup	-	-	√	√
18	Jumat Bersih, Sabtu Hijau, Minggu Sehat	lingkungan hidup	√	√	√	-
19	IBT (Inkubator Bisnis dan Teknologi) PABOLO Labuhanbatu	Penelitian dan Pengembangan	-	-	√	√
20	Lomba KRENOVA (Kreativitas dan Inovasi) Masyarakat Labuhanbatu	Penelitian dan Pengembangan	-	√	√	√
21	Taman ASRI (Aman Sehat Riag Interaktif) Rantauprapat	Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	√
22	POKEN “BAYA” (Poken Bersih Aman dan Nyaman)	Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	√
23	HORAS (Hotelku Rumahku Aman dan Steril)	Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	√
24	TANGKAHAN (Transportasi Penyebrangan Geraakan Kehidupan)	Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	√
25	STEAK RANTAU (Restoran Higienis Aman Covid 19, Rezeki Lancar tak Perlu Galau)	Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	√
26	SAYUR LABU (Swalayan Aman Nyaman Untuk Masyarakat Labuhanbatu)	Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	√

No	Nama Inovasi	Urusan Pemerintah	2018	2019	2020	2021
27	SIPATEN LAGI (Siap Panen Tanam Lagi)	pangan, pertanian	-	√	√	√
28	StoTel (Story Telling)	pendidikan,perpustakaan	-	√	√	√
29	TBM PENA (Taman Bacaan Masyarakat Pendidikan dan Amal)	pendidikan,perpustakaan	-	√	√	-
30	AKSI Minum (Air Keran Siap di minum)	PUDAM	-	√		-

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022

2.6 Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Sampai Dengan Tahun 2020

2.6.1. Hasil Evaluasi RPJMD Tahun 2016-2021

RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi RPJMD sampai dengan tahun 2020. Evaluasi dilakukan terhadap RPJMD Kabupaten Labuhanbatu tahun 2016-2021 periode evaluasi tahun 2016-2020 dengan melihat Capaian Indikator Makro dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah.

a. Capaian Indikator Makro

Indikator Makro dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016-2021 menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka menengah. Indikator makro pembangunan yang dimaksud meliputi Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Berdasarkan Harga Konstan, PDRB Per Kapita Berdasarkan HargaBerlaku, Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Inflasi. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (Impact) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional dan nasional sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pelaku pembangunan lainnya.

Tabel 2.182
Capaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016-2021

No.	Indikator	Satuan	2016			2017			2018			2019			2020		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	70,79	70,52	99,62	71,35	71,00	99,51	71,91	71,39	99,28	72,47	71,95	99,28	73,03	72,01	98,60
2	PDRB Berdasarkan Harga Konstan	Juta Rupiah	21.941.919,96	20.046.019,12	91,36	25.233.207,95	21.048.165,60	83,41	29.018.189,17	22.112.343,76	76,20	33.370.917,52	23.232.708,00	69,62	38.376.555,15	23.252.746,31	60,59
3	PDRB Perkapita Berdasarkan Harga Berlaku	Rupiah	60.047.431,70	56.332.872,00	93,81	69.054.546,46	60.658.159,00	87,84	79.412.728,42	64.345.060,00	81,03	91.324.637,69	68.012.800,00	74,47	105.023.333,34	69.085.836	65,78
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,24	5,06	96,57	5,45	5,00	91,74	5,67	5,06	89,24	5,90	5,07	85,93	6,13	0,09	1,47
5	Tingkat Inflasi	Persen	5,0	4,76	95,20	4,70	3,10	65,96	4,40	2,15	48,86	4,10	1,54	37,56	3,80	2,78	73,16

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018, 2019, 2020

Capaian indikator makro RPJMD Kabupaten Labuhanbatu pada Tahun 2016-2021 menunjukkan bahwa:

- a. Indeks Pembangunan Manusia dengan tingkat capaian rata-rata dari tahun 2016-2020 sebesar 99,25%. Angka ini sudah cukup bagus.
- b. PDRB Berdasarkan Harga Konstan dengan capaian rata-rata dari tahun 2016-2020 sebesar 76,24%;
- c. PDRB Per Kapita Berdasarkan Harga Berlaku dengan capaian rata-rata dari tahun 2016-2020 sebesar 80,59%;
- d. Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan capaian rata-rata dari tahun 2016-2020 sebesar 72,99%. Angka ini belum menunjukkan percepatan pertumbuhan perekonomian di Labuhanbatu. Di mana khusus di tahun 2016-2020 Laju Pertumbuhan Ekonomi sangat terganggu oleh Pandemi Covid-19;
- e. Tingkat Inflasi dengan capaian rata-rata dari tahun 2016-2020 sebesar 64,15%. Angka ini mengalami penurunan yang menunjukkan kestabilan harga komoditi pangan yang berpengaruh terhadap inflasi.

b. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016-2021 menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka menengah. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dimaksud meliputi indikator sasaran dalam RPJMD tahun 2016-2021.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu tahun 2016-2021 dilihat berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Periode 2016-2020. Hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.183
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016-2021

Misi 1 : Menyelenggarakan Pemerintahan yang tanggap dan peduli untuk melayani masyarakat serta membantu aparat hukum dalam memberantas KKN, mencegah tindak kriminal dan menegakkan HAM secara profesional, berdedikasi, bersih dan berwibawa

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN TARGET	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019			2020			Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
					Tar-get	Realisasi	Capaian (%)	Tar-get	Realisasi	Capaian (%)	Tar-get	Realisasi	Capaian (%)	Tar-get	Realisasi	Capaian (%)	Tar-get	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	24
Tujuan 1 : Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel.																				
1.	Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good & clean governance)	Persentase kualifikasi pendidikan aparatur -SD s.d. SLTA	%	29,71	26,97	Tidak masuk IKU	-	24,32	Tidak masuk IKU	-	21,49	Tidak masuk IKU	-	17,75	Tidak masuk IKU	-	17,00	Tidak masuk IKU	-	16,00
		-D-3	%	20,65	18,92			17,22			15,46			16,29			14,00			12,00
		-S-1/D-4	%	48,11	52,54			56,87			61,44			64,33			67,20			70,00
		-S-2	%	1,53	1,55			1,57			1,59			1,61			1,60			1,60
		-S-3	%	0,00	0,002			0,02			0,02			0,02			0,20			0,40
		Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten dari BPK RI	Opini	n.a	WTP	WTP	100%	WTP	WDP	75%	WTP	WDP	75%	WTP	WDP	75%	WTP	WDP	-	WTP
		Tersusunnya LKPJ Bupati dan Peningkatan hasil evaluasi LPPD Tingkat Provinsi	Peringkat	-	6	Tidak masuk IKU	-	5	Tidak masuk IKU	-	4	Tidak masuk IKU	-	3	Tidak masuk IKU	-	3	Tidak masuk IKU	-	2

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN TARGET	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019			2020			Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
					Tar-get	Realisasi	Capaian (%)	Tar-get	Realisasi	Capaian (%)	Tar-get	Realisasi	Capaian (%)	Tar-get	Realisasi	Capaian (%)	Tar-get	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	24
		Capaian hasil verifikasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	%	70,83	75	Tidak masuk IKU	-	80	Tidak masuk IKU	-	85	Tidak masuk IKU	-	90	Tidak masuk IKU	-	93	Tidak masuk IKU	-	95
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Prediket	n.a	B	CC	-	B	CC (55,89)	93,15	B	CC (53,96)	89,93	B	CC (56,23)	93,72	B	CC (56,68)	94,47	A
		Persentase Nilai AKIP SKPD - A - B - CC - C - D	% % % % %	15,79 78,95 5,26 - -	17,00 78,00 5,00 - -	Tidak masuk IKU	-	19.00 78.00 3.00 - -	Tidak masuk IKU	-	21.00 79.00 - - -	Tidak masuk IKU	-	23.00 77.00 - - -	Tidak masuk IKU	-	24.00 76.00 - - -	Tidak masuk IKU	-	25.00 75.00 - - -

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN TARGET	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019			2020			Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
					Tar-get	Realisasi	Capaian (%)	Tar-get	Realisasi	Capaian (%)	Tar-get	Realisasi	Capaian (%)	Tar-get	Realisasi	Capaian (%)	Tar-get	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	24
		Persentase implementasi e-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan																		
		- Sistem e-Planning	%	-	-			-			100			100			100			100
		- Sistem e-Budgetting	%	-	-			100			100			100			100			100
		- Sistem e-Procurement	%	100	100	Tidak masuk IKU		-	Tidak masuk IKU		100	Tidak masuk IKU		100	Tidak masuk IKU		100	Tidak masuk IKU		100
		- Sistem e-Office	%	-	-			-			100			100			100			100
- Sistem e-Performance	%	-	-			100			100			100			100			100		
		Persentase SKPD Menerapkan SPIP	%	n.a	13,16	Tidak masuk IKU	-	26,32	Tidak masuk IKU	-	52,63	Tidak masuk IKU	-	78,95	Tidak masuk IKU	-	85,00	Tidak masuk IKU	-	100
		Rasio penduduk memiliki KTP-el per wajib KTP-el	%	73,05	76,50	250,10	328,08	81,00	86,30	106,54	84,50	92,80	109,92	87,00	85,39	98,15	89,00	Tidak masuk IKU	-	91,00
		Rasio penduduk 0-18 tahun memiliki akte kelahiran	%	51,02	77,00	205,25	266,56	79,00	60,50	76,58	82,00	89,00	108,54	85,00	88,60	104,24	86,00	Tidak masuk IKU	-	87,00
Tujuan 2 : Terwujudnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat																				
1.	Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan melalui	%	21,95	78,05	Tidak masuk IKU	-	78,05	Tidak masuk IKU	-	78,05	Tidak masuk IKU	-	78,05	Tidak masuk IKU	-	78,05	Tidak masuk IKU	-	78,05

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN TARGET	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019			2020			Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
					Tar-get	Realisasi	Capaian (%)	Tar-get	Realisasi	Capaian (%)	Tar-get	Realisasi	Capaian (%)	Tar-get	Realisasi	Capaian (%)	Tar-get	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	24
	tanggap dan peduli	PTSP.																		
		Lama peroleh ijin usaha	Hari	3	3	Tidak masuk IKU	-	2	2	100	2	2	100	2	2	100	2	2	100	1
		Inovasi Pelayanan Publik	Kajian dan Penerapan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase usulan masyarakat yang ditampung dalam dokumen perencanaan RKPD	%	-	-	Tidak masuk IKU	-	30	Tidak masuk IKU	-	30	Tidak masuk IKU	-	30	Tidak masuk IKU	-	30	Tidak masuk IKU	-	30
Tujuan 3 : Terpeliharanya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan tertib																				
1.	Meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah tempat tinggalnya.	Cakupan pos kamling aktif	%	36,12	-	Tidak masuk IKU	-	31,13	29,37	94,35	33,61	60,00	178,52	36,09	33,61	93,13	37,33	-	-	37,33
Tujuan 4 : Terwujudnya tata pemerintahan yang aspiratif dan partisipatif																				
1.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik	Persentase pemilih dalam menggunakan hak pilih dalam pemilu. - Pemilu kadusung Gubsu dan Wagubsu 2018	%	-	-	Tidak masuk IKU	-	-	Tidak masuk IKU	-	75,00	65,34	87,12	-	-	-	-	Tidak masuk IKU	-	75,00

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN TARGET	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019			2020			Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
					Tar-get	Realisasi	Capaian (%)	Tar-get	Realisasi	Capaian (%)	Tar-get	Realisasi	Capaian (%)	Tar-get	Realisasi	Capaian (%)	Tar-get	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	24
		- Pileg 2019 - Pilpres 2019 - Pilkada Bupati dan wakil Bupati 2020		- - 63,53	- - -		- - -			- - -	- - -	- - -	- - -	85,00 75,00 -	78,65 78,65 -	92,53 104,87 -	- - 75,00			85,00 75,00 75,00
		Persentase Keterwakilan politik perempuan di DPRD Kabupaten Labuhanbatu	%	31,11	31,11	Tidak masuk IKU		31,11	Tidak masuk IKU	-	31,11	Tidak masuk IKU	-	33,33	Tidak masuk IKU	-	33,33	Tidak masuk IKU	-	33,33
Tujuan 5 : Meningkatnya penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan																				
1.	Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapat layanan konfrehensif	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan	%	41	55	Tidak masuk IKU	-	60	Tidak masuk IKU	-	65	Tidak masuk IKU	-	70	Tidak masuk IKU	-	73	Tidak masuk IKU	-	75
		Persentase pengaduan kasus anak yang ditindak lanjuti	%	100	100	Tidak masuk IKU	-	100	Tidak masuk IKU	-	100	Tidak masuk IKU	-	100	Tidak masuk IKU	-	100	Tidak masuk IKU	-	100

Misi 2 : Menciptakan SDM berkualitas yang mampu menguasai dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi/IPTEK yang mempunyai integritas, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan dilandasi akhlak mulia sebagai kunci untuk keberhasilan pelaksanaan program yang mandiri guna membentuk karakter masyarakat Labuhanbatu yang mempunyai ciri khas berbudaya Labuhanbatu, ramah, santun dan beretika

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN TARGET	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019			2020			Kondisi Kinerja pada
		KINERJA			Tar- get	Real- sasi	Capai- an (%)	Tar- get	Real- sasi	Capai- an (%)	Tar- get	Real- sasi	Capai- an (%)	Tar- get	Real- sasi	Capai- an (%)	Tar- get	Real- sasi	Capai- an (%)	Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	24
Tujuan 1 : Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas disemua jenjang pendidikan baik formal maupun non formal secara merata di seluruh wilayah kabupaten Labuhanbatu																				
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik	- Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV SD	Persentase	75	76	88,95	117,04	80	74,99	93,74	81,5	81,24	99,68	83,5	94,71	113,43	86	-	-	87
		- Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV SMP	Persentase	86	87,5	66,94	76,5	88	78,24	88,91	89,5	87,05	97,26	91	91,21	100,23	93,5	-	-	94
		- Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) Online	Nilai	5,2	6,5	5,4	83,08	7	5,2	74,29	7,5	5,25	70	8	5,25	65,63	8	-	-	8
2.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pendidikan	- Sekolah pendidikan TK/PAUD/RA kondisi bangunan baik	Persentase	50	55	-	-	60	-	-	70	-	-	80	-	-	90	-	-	92
		- Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persentase	42,05	42,5	-	-	49	-	-	55	-	-	61	-	-	67	-	-	69
		- Sekolah pendidikan SMP/MTS kondisi bangunan baik	Persentase	36,77	42,5	-	-	46	-	-	52,5	-	-	56	-	-	59,5	-	-	62
		- Rasio ruang kelas	Persentase	01:43,	01:3	-	-	01:3	-	-	01:3	-	-	01:3	-	-	01:3	-	-	01:32

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN TARGET	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019			2020			Kondisi Kinerja pada
		KINERJA			Tar- get	Real- isasi	Capai- an (%)	Tar- get	Real- isasi	Capai- an (%)	Tar- get	Real- isasi	Capai- an (%)	Tar- get	Real- isasi	Capai- an (%)	Tar- get	Real- isasi	Capai- an (%)	Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	24
3.	Meningkatnya kualitas dan mutu pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu	siswa SD/MI		5	6			5			4			3			2			
		- Rasio ruang kelas siswa SMP/MTS	Persentase	01:42	01:39	-	-	01:38	-	-	01:38	-	-	01:37	-	-	01:36	-	-	01:36
		- APM PAUD/TK/RA	Persentase	32	32	29,71	92,84	33	-	-	34	-	-	35	-	-	35	-	-	38
		- APM SD/MI	Persentase	87,1	87,3	89,83	102,9	87,5	-	-	87,8	-	-	88	-	-	88,2	-	-	89
		- APM SMP/MTS	Persentase	52,71	54	76,4	141,48	55,5	-	-	57	-	-	58,5	-	-	61	-	-	65
		- Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persentase	99	99,1	100	100,91	99,1	-	-	99,2	-	-	99,2	-	-	99,3	-	-	99,4
		- Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persentase	99	99,1	100	100,91	99,1	-	-	99,2	-	-	99,2	-	-	99,3	-	-	99,4
		- Angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTS	Persentase	86,5	100	-	-	100	-	-	100	-	-	100	-	-	100	-	-	100
		- Angka melanjutkan SMP/MTS ke SMA/SMK/MA	Persentase	71,47	83	-	-	84	-	-	85	-	-	86	-	-	87	-	-	88
		- Angka melek aksara penduduk usia diatas 15 tahun	Persentase	99,29	99,29	99,5	100,21	99,3	-	-	99,31	-	-	99,31	-	-	99,31	-	-	99,38
		- Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	Persentase	94,1	94,3	101,37	107,5	94,5	-	-	94,8	-	-	95	-	-	95,2	-	-	95,8
		- Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persentase	87,1	87,3	89,83	102,9	87,5	-	-	87,8	-	-	88	-	-	88,2	-	-	89
		- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	Persentase	67,42	67,6	87,84	130,29	67,8	-	-	68	-	-	68,2	-	-	68,4	-	-	68,8

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN TARGET	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019			2020			Kondisi Kinerja pada
		KINERJA			Tar- get	Real- sasi	Capai- an (%)	Tar- get	Real- sasi	Capai- an (%)	Tar- get	Real- sasi	Capai- an (%)	Tar- get	Real- sasi	Capai- an (%)	Tar- get	Real- sasi	Capai- an (%)	Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	24
		- Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persentase	52,43	54	76,4	141,48	56	71,71	128,05	58	-	-	60	-	-	62	-	-	64
		- Rasio guru murid SD/MI	Rasio	01:23	01:17	-	-	01:17	-	-	01:18	-	-	01:18	-	-	01:18	-	-	01:17
		- Rasio guru murid SMP/MTS	Rasio	01:17	01:15	-	-	01:15	-	-	01:16	-	-	01:16	-	-	01:16	-	-	01:16
Tujuan 2 : Mewujudkan generasi yang toleran dalam beragama																				
1.	Terwujudnya kehidupan harmoni, internal dan antar umat beragama	- APM PAUD/TK/RA	Persentase	32	32	-	-	33	-	-	34	-	-	35	-	-	35	-	-	38
		- APM SD/MI	Persentase	87,1	87,3	-	-	87,5	-	-	87,8	-	-	88	-	-	88,2	-	-	89
		- APM SMP/MTS	Persentase	52,71	54	-	-	55,5	-	-	57	-	-	58,5	-	-	61	-	-	65
Tujuan 3 : Mewujudkan generasi yang berkarakter dan berbudaya																				
1.	Terwujudnya masyarakat Labuhanbatu yang berbudaya	- APM PAUD/TK/RA	Persentase	32	32	-	-	33	-	-	34	-	-	35	-	-	35	-	-	38
		- APM SD/MI	Persentase	87,1	87,3	-	-	87,5	-	-	87,8	-	-	88	-	-	88,2	-	-	89
		- APM SMP/MTS	Persentase	52,71	54	-	-	55,5	-	-	57	-	-	58,5	-	-	61	-	-	65

Misi 3: Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjamin/assurance, terjangkau, merata dan berkeadilan sesuai dengan standart Internasional

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN TARGET	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019			2020			Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
					Tar-get	Realisasi	Capaian (%)	Tar-get	Realisasi	Capaian (%)	Tar-get	Realisasi	Capaian (%)	Tar-get	Realisasi	Capaian (%)	Tar-get	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	24
Tujuan 1 : Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel.																				
1.	Meningkatnya status kesehatan, akses dan kualitas pelayanan kesehatan terhadap ibu, bayi, balita, remaja, usia produktif dan usia lanjut	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	69,26	69	69,46	100,67	70	69,44	99,20	71	69,60	98,03	71	69,86	98,39	72	69,93	97,13	72
		Jumlah kematian ibu maternal	Kasus	10	9	11	81,82	8	15	53,33	7	4	175	6	9	66,67	5	4	125	4
		Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 KH	7	6	6	100	5	5	100	4	6	66,67	3	6	50	2	3	66,67	1
		Prevelensi kekurangan gizi (gizi kurang dan gizi buruk) pada anak balita	Persen-tase (%)	23	21	0,64	100	20	2,91	100	18	3,45	100	18	1,45	100	15	9,05	100	<15
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen-tase (%)	92,41	100	93,97	93,97	100	96,22	96,22	100	96,88	96,88	100	94,66	94,66	100	93,08	93,08	100
		Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Persen-tase (%)	66,98	100	81,36	81,36	100	84,48	84,48	100	90,90	90,90	100	89,94	89,94	100	84,60	84,60	100

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN TARGET	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019			2020			Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
					Tar-get	Realisasi	Capaian (%)	Tar-get	Realisasi	Capaian (%)	Tar-get	Realisasi	Capaian (%)	Tar-get	Realisasi	Capaian (%)	Tar-get	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	24
		Persentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen-tase (%)	91,91	100	80,89	80,89	100	84,45	84,45	100	91,05	91,05	100	91,62	91,62	100	91,18	91,18	100
		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen-tase (%)	92,49	100	96,60	96,60	100	88,57	88,57	100	82,70	82,70	100	73,03	73,03	100	91,71	91,71	100
		Persentase anak pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan	Persen-tase (%)	97,94	100	100	100	100	99,75	99,75	100	100	100	100	100	100	100	21,55	21,55	100
2.	Meningkatnya standar pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah sesuai Standar Internasional dengan sertifikasi akreditasi versi 2012 dan Joint Commision International (JCI)	Sertifikasi Akreditasi Versi 2012 dan Joint Commision International (JCI)	Predikat	-	-	-	-	Madya	Utama	125	Utama	Pari-purna	125	Pari-purna	Pari-purna	100	JCI	-	-	JCI
3.	Meningkatnya akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta informasi	puskesmas yang memiliki sertifikat akreditasi Puskesmas	Puskesmas	0	3	2	66,67	6	2	33,33	9	8	88,89	12	15	125	15	15	100	15

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN TARGET	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019			2020			Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
					Tar-get	Realisasi	Capaian (%)	Tar-get	Realisasi	Capaian (%)	Tar-get	Realisasi	Capaian (%)	Tar-get	Realisasi	Capaian (%)	Tar-get	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	24
	kesehatan																			
Tujuan 3 : Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit																				
4.	Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular	Angka kesakitan malaria (Annual Paracite Index-API) per 1000 penduduk	Per 1000 pddk	0,07	<1	0,11	100	<1	0,006	100	<1	0,03	100	<1	0,004	100	<1	0,02	100	<1
		Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persentase (%)	6,57	100	1,16	1,16	100	6,90	6,90	100	9,96	9,96	100	6,68	6,68	100	45,00	45,00	100
		Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persentase (%)	38,66	100	100	100	100	92,80	92,80	100	84	84	100	39,20	39,20	100	86,80	86,80	100
		Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	Persentase (%)	100	100	94,3	94,3	100	92,80	92,80	100	100	100	100	63,58	63,58	100	32,35	32,35	100

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN TARGET	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019			2020			Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
					Tar-get	Realisasi	Capaian (%)	Tar-get	Realisasi	Capaian (%)	Tar-get	Realisasi	Capaian (%)	Tar-get	Realisasi	Capaian (%)	Tar-get	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	24
		Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV	Persentase (%)	44,70	100	100	100	100	96,74	96,74	100	70	70	100	51,86	51,86	100	24,40	24,40	100
		Cakupan desa/kel UCI	Persentase (%)	94,90	96	94,9	98,85	97	92,86	95,73	98	96,94	98,92	99	93,88	94,83	100	98,98	98,98	100
Tujuan 4 : Memberdayakan Individu, keluarga dan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat																				
5	Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat	Persentase RT yang ber PHBS	persentase (%)	64,44	64	66,57	104,02	64	61,50	96,09	64	65	101,56	65	60,69	93,37	65	52,05	80,77	65
Tujuan 5 : Meningkatkan kesehatan lingkungan																				
6	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih dan air minum berkualitas serta sanitasi dasar	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	persentase (%)	72,38	73	74,25	101,71	73	77,64	106,36	74	78,21	105,69	74	81,20	109,73	75	81,89	109,19	75
		Persentase penduduk dengan akses sanitasi layak	persentase (%)	83,32	84	86,39	102,85	84	87	103,57	84	88,05	104,82	85	93,68	110,21	85	92	-	85

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN TARGET	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019			2020			Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
					Tar-get	Realisasi	Capaian (%)	Tar-get	Realisasi	Capaian (%)	Tar-get	Realisasi	Capaian (%)	Tar-get	Realisasi	Capaian (%)	Tar-get	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	24
Tujuan 6 : Meningkatkan perlindungan jaminan kesehatan masyarakat																				
7	Meningkatnya perlindungan jaminan kesehatan masyarakat	Persentase penduduk yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	persentase (%)	47,00	47,00	46,19	98,28	58	43	74,14	63	51,15	81,19	78	54,69	70,12	95	-	-	95
Tujuan 7 : Memperkuat akses pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang merata dan berkualitas																				
8	Menurunnya Angka Kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun)	Angka kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR) per WUS (15-49 tahun)	persentase (%)	2,96	2,86	-	-	2,75	3,20	85,94	2,60	2,77	93,86	2,57	3,02	85,10	2,20	-	-	2,18
9	Meningkatnya Pembinaan Peserta KB Aktif	Jumlah Pembinaan Peserta KB Aktif	persentase (%)	65	67,50	-	-	68,10	63,79	93,67	69,15	77,68	112,34	69,35	75,02	108,18	69,75	-	-	69,50
10	Meningkatnya Peserta KB Baru	Jumlah Peserta KB Baru	persentase (%)	60,81	61,81	-	-	64,70	109,84	169,77	67,56	100,77	149,16	70,80	77,01	108,77	73,20	-	-	73,50

Misi 4 : Membangun Perekonomian yang kuat untuk menjamin pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui Perluasan Lapangan Kerja, peningkatan kuantitas dan kualitas produksi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, penguatan lembaga keuangan dan koperasi serta pengembangan potensi kawasan wisata

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN TARGET	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019			2020			Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	24
Tujuan 1. Meningkatnya kondisi perekonomian makro.																				
1	Mewujudkan Perekonomian yang maju dan mandiri.	1. Pertumbuhan Ekonomi	%	5,04	5,24	5,06	96,57	5,45	5	91,74	5,67	5,06	89,24	5,9	5,07	85,93	6,13	0,09	1,47	6,38
		2. PDRB berdasarkan harga berlaku	Juta Rupiah	24.133.376,1	28.503.502,86	26.505.235,8	92,99	31.916.389,89	29.030.570,40	90,96	36.703.848,8	31.302.580	85,28	42.209.425,63	33.610.429,38	79,63	48.540.839,49	34.653.178,7	71,39	55.821.965,40
		3. PDRB berdasarkan harga konstan	Juta Rupiah	19.079.930,40	21.941.919,96	20.046.191,2	91,36	25.233.207,95	21.048.165,6	83,42	29.018.189,17	22.112.343,76	76,20	33.370.917,52	23.232.708,00	69,62	38.376.555,15	23.252.746,31	60,59	44.133.038,42
		4. Product Domestic Regional Bruto (PDRB) per kapita berdasarkan harga berlaku	Rupiah	52.215.158,00	60.047.431,70	56.333.300	93,82	69.054.546,46	60.660.250	87,84	79.412.728,42	64.345.060	81,03	91.324.637,69	68.012.800	74,47	105.023.333,34	69.085.836	65,78	120.776.833,34
		5. Tingkat Inflasi	%	5,4	5	4,76	95,2	4,7	3,1	65,96	4,4	2,15	48,86	4,1	1,54	37,56	3,8	2,78	73,16	3,57
		6. Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,23	70,79	70,52	99,62	71,35	71	99,51	71,91	71,39	99,28	72,47	71,95	99,28	73,03	72,01	98,60	73,58

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN TARGET	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019			2020			Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Meningkatnya produksi pertanian dan perkebunan.	1. Produkti-fitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal lainnya perhektar																		
		- Padi	Kw/Ha	50,25	52,31	52,6	100,55	52,76	53,39	101,19	53,24			53,67			54,33			55.00
		- Jagung	Kw/Ha	35,35	47,57	43,3	91,02	47,95	44,27	92,33	48,36			48,88			49,21			50.00
		- Kedele	Kw/Ha	14,75	14,84	15,95	107,48	15,24	15,88	104,20	15,55			15,78			15,91			16.50
		2. Persentase Ketersediaan Pangan Utama	%	109	110	Tidak ada data	-	111	111	100	111	271	244,14	112			113			114
		3. Skor Pola Pangan Harapan	SPPH	81	87,5	Tidak ada data	-	90	Tidak ada data	-	93			94,5			96			97
		4. Persentase Kenaikan Produksi Perkebunan	%	2,3	2,5	Tidak ada data	-	2,6	Tidak ada data	-	2,75			3			3			3.50
2	Meningkatnya Kesejahteraan petani, peternak dan nelayan.	1. Nilai Tukar Petani																		
		- Padi	%	893	915,3	Tidak ada data	-	938,2	165,8	17,67	961,7	172,18	17,90	985,7	172,18	17,47	1010,3			1035.6
		- Jagung	%	516	528,9	Tidak ada data	-	542,1	203,46	37,53	555,7	203,46	37,53	569,6	196,32	34,47	583,8			598.4
		- Kedelai	%	314	321,9	Tidak ada data	-	329,9	86,46	26,21	338,1	100,76	29,80	340,1	100,76	29,63	348,6			357.3

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN TARGET	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019			2020			Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta daya saing produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan.	1. Persentase Produksi Perikanan	%	-	85,8	Tidak ada data	-	86,75	64,4	74,24	87,21	62,52	71,69	87,6	53,14	60,66	87,9			88,7
		2. Cakupan Bina Kelompok Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.	%	38,82	37,95	Tidak ada data	-	46,85	55,77	119,04	55,52	54,3	97,80	64,09	48,61	75,80	72,78			81,18
		3. Persentase Peternak dengan Usaha Intensif dan Semi Intensif.	%	8,39	8,39	Tidak ada data	-	8,96			9,57			10,22			10,91			11,65
		4. Cakupan Bina Kelompok Tani.	%	78,2	83,09	Tidak ada data	-	87,98			92,86			97,75			99,02			100
		5. Persentase Luas Lahan Intensifikasi.	%	30	40	Tidak ada data	-	50	100	200	60	50	83,33	70	75	107,14	90			80
		6. Cakupan Bina Kelompok Tani.	%	70	72	Tidak ada data	-	74			77			79			80			85
Tujuan 3. Meningkatnya perekonomian melalui pengembangan Koperasi,UMKM dan Industri Kecil Menengah.																				
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas koperasi dan UMKM	1. Persentase Usaha Mikro.	%	87,12	87,18	51	58,50	87,23	50	57,32	87,29			87,34			87,39			87,44
		2. Persentase Koperasi Aktif.	%	62,26	70,13	112,64	160,62	77,99	55,27	71,25	85,85	100	116,48	93,71	59	62,96	100			100
		3. Jumlah Usaha Mikro.	Unit	4091	4181	270	6,46	4271			4361			4451			4541			4631

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN TARGET	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019			2020			Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
		4. Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah.	Unit	4696	4796	250	5,21	4896			4996			5096			5196			5296
2	Berkembangnya sentra Industri Potensial, Ekonomi Kreatif dan Industri Kecil Menengah	1. Pertumbuhan Industri	%	2,46	4,42	Tidak ada data		5,12	6	117,19	6,12	7	114,38	6,92	18,4	265,85	7,87			7,3
		2. Jumlah Industri Kecil Menengah.	Unit	1948	2038			2148			2288			2458			2668			2878
3	Meningkatnya Keinginan Masyarakat untuk berwirausaha di sektor Usaha Mikro dan IKM.	1. Jumlah Usaha Mikro Binaan.	Unit	5	10			15			20			25			30			35
4	Meningkatnya Pasar Tradisional.	1. Revitalisasi Pasar Tradisional.	Unit	1	1			2			2			2			2			3
		2. Terbangunnya Pasar Tradisional.	Unit	-	-			-			1			-			-			-
Tujuan 4. Pembangunan Industri berbasis potensi daerah.																				
1	Tersedianya industri turunan berbasis potensi daerah.	1. Terbangunnya Pabrik Minyak Goreng.	Unit	-	-	-	-	-	1	-	-									
		2. Terbangunnya Pabrik Sabun.	Unit	-	-	-	-	-	1	-	-									

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN TARGET	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019			2020			Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Menurunnya tingkat Pengangguran Terbuka .	1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.	%	59,95	62,67	Tidak ada data	-	65,39	56,2	85,95	68,11	67,1	98,52	70,83	62,39	88,8	73,55			76.27
		2. Pencari Kerja yang ditempatkan	%	26,4	30,5	Tidak ada data	-	30,6	Tidak ada data	-	30,7	18,16	59,15	30,8	28,81	93,53	30,83	11,98	38,86	31.00
		3. Rasio Penduduk yang Bekerja	%	39,95	45,22	Tidak ada data	-	50,49	92,9	184	55,76	92,55	165,98	61,03	94,3	154,51	66,3			71.57
2	Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	1. Rasio Peningkatan upah minimum kabupaten/upah minumum sektor kabupaten (UMK/UMSK)	%	11,5	8	8,5	106,25	8,5	8,71	102,47	9	8,03	89,22	9,5	8,51	89,58	10			10,5
		2. Rasio pekerja /buruh yang menjadi peserta Jamsostek	%	98	95	72	75,79	95,5	10	10,47	96	19,76	20,58	96,5	7,28	7,54	97			97,5
Tujuan 6. Mengembangkan potensi wisata daerah yang berdaya saing Global.																				
1	Meningkatnya Objek Wisata daerah yang mampu bersaing secara global	1. Kunjungan Wisata	Kali	-	2880	-	-	3240	Tidak IKU		3600	Tidak IKU	-	3960	Tidak IKU	-	7200	Tidak IKU	-	7560
2	Meningkatnya nilai wisata sektor bahari dan budaya yang	1. Terbangunnya lokasi wisata Bahari Pulau Sikantan Kec. Panai Tengah	Lokasi	-	-	-	-	-	Tidak IKU	-	-	Tidak IKU	-	1	Tidak IKU	-	-	Tidak IKU	-	-

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN TARGET	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019			2020			Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
	didukung promosi yang efektif, kreatif, terpadu dan berkelanjutan.	2. Terbangunnya lokasi wisata Bahari Desa Sei Tawar Kec. Panai Hilir	Lokasi	-	-	-	-	-	Tidak IKU	-	-	Tidak IKU	-	-	Tidak IKU	-	1	Tidak IKU	-	-
		3. Penetapan Cagar Budaya	Lokasi	-	-	-	-	-	Tidak IKU	-	-	Tidak IKU	-	1	Tidak IKU	-	-	Tidak IKU	-	-
		4.Terbangunnya Monumen Labuhanbatu di Desa Sei Siarti Kec. Panai Tengah	Lokasi	-	-	-	-	-	Tidak IKU	-	-	Tidak IKU	-	-	Tidak IKU	-	1	Tidak IKU	-	-
		5.Terbangunnya rumah-rumah Penginapan Tradisional di Lokasi Wisata.	Unit	-	-	-	-	-	Tidak IKU	-	4	Tidak IKU	-	4	Tidak IKU	-	5	Tidak IKU	-	5
		6.Berkembangnya Pemanfaatan Areal Hutan Mangrove menjadi lokasi wisata.	Lokasi	-	-	-	-	-	Tidak IKU	-	1	Tidak IKU	-	1	Tidak IKU	-	-	Tidak IKU	-	-
		7.Terbangunnya Properti Vital di Kawasan Dermaga Tanjung Sarang Elang dan Sei Berombang.	Lokasi	-	-	-	-	-	Tidak IKU	-	1	Tidak IKU	-	1	Tidak IKU	-	-	Tidak IKU	-	-
		8.Tersedianya Angkutan Wisata	Unit	-	-	-	-	-	Tidak IKU	-	3	Tidak IKU	-	3	Tidak IKU	-	4	Tidak IKU	-	4

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN TARGET	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019			2020			Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
3	Pembentukan Kemitraan dengan pihak ke 3 (tiga) dalam pengembangan potensi wisata daerah.	Lama Proses Perizinan	Hari	3 hari	3 hari	-	-	2 hari	Tidak IKU	-	2 hari	Tidak IKU	-	2 hari	Tidak IKU	-	1 hari	Tidak IKU	-	1 hari
		Jumlah Perda yang mendukung Iklim Usaha	Perda	-	-	-	-	1	Tidak IKU	-	1	Tidak IKU	-	-	Tidak IKU	-	1	Tidak IKU	-	1

Misi 5 : Menciptakan sinergi pembangunan di bidang insfrastruktur, pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN TARGET	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019			2020			Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	24
1	Terwujudnya sarana dan prasarana infrastruktur	1. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	57,77	62,67	49,54	79,05	66,48	49,54	74,52	70,36	-	-	73,23	60,89	83,15	75,42			77,72
		2. Persentase panjang jaringan jalan lingkungan yang tertangani	%	50,23	54,25	-	-	58,59	-	-	63,27	-	-	68,34	-	-	73,80	-	-	79,71
		3. Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	79,02	80,64	52,56	65,18	83,09	52,56	63,26	84,93	-	-	86,76	69,35	79,93	88,73	-	-	90,69
Tujuan 2 : Meningkatkan sistem transportasi																				
1		1. Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang	%	80	80	-	-	100	-	-	100	-	-	100	-	-	100	-	-	100

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN TARGET	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019			2020			Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	24
		terbangun																		
		2.Persentase simpul antar moda yang terbangun	%	-	-	-	-	20	-	-	25	-	-	30	-	-	35	-	-	40
		3.Kendaraan angkutan umum laik jalan/lulus uji KIR	%	85	90	-	-	100	-	-	100	-	-	100	-	-	100	-	-	100
		1.Lapangan Udara perintis	%	-	-	-	-	2,5	-	-	25	-	-	50	-	-	90	-	-	90
		2.Dermaga pengangkutan laut	%	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-	-	25	-	-	50	-	-	50
Tujuan 3 : Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan umum																				
1	Meningkatnya ketersediaan dan pemeliharaan prasarana dasar berupa air minum,	1.Persentase rumah tangga pengguna air bersih	%	5,49	10	25,30	253	25	25,30	253	45	100	222,22	65			85			100
		2.Persentase layanan air limbah	%	0,84	2	-	-	8	-	-	15	-	-	26			40			50

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN TARGET	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019			2020			Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	24
	sanitasi, pengelolaan persampahan, drainase dan permukiman.	3.Tempat Pembuangan Akhir Sampah	Unit	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1			1			1
		4.Rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk	%	0,16	0,2	-	-	0,22	-	-	0,25	-	-	0,28			0,29			0,31
		1. Persentase penanganan sampah per satuan penduduk	%	7,98	8,2	-	-	8,9	-	-	9,6	-	-	10,7			11,7			12,3
		Jumlah Bank Sampah	Unit	1	2	-	-	3	-	-	4	-	-	5			6			7
		Persentase panjang saluran drainase/gorong-gorong yang tertangani	%	60,08	62,49	51,80	82,89	64,99	51,80	79,70	67,59	30	46,16	70,29	51,20	72,84	73,10	-	-	76,03
		Persentase luasan wilayah kumuh	%	100	80,40	-	-	64,32	-	-	48,24	-	-	32,16	-	-	16,08	-	-	0

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN TARGET	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019			2020			Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	24
	Meningkatnya sarana dan prasarana jaringan irigasi/rawa, air baku dan jaringan pengairan lainnya.	Persentase luas cakupan layanan jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	40,52	45,37	-	-	48,89	32,86	67,21	52,62	-	-	56,02	56,02	100	57,26	-	-	58,49
Tujuan 4 : Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan dan penanggulangan bencana yang handal																				
1	Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana RTH	Persentase ruang terbuka hijau	%	3,08	4	2,26	56,50	7	2,26	32,29	10	-	-	13	10	76,92	16	-	-	20
2	Meningkatnya Pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan tertanggulangi nya bencana secara dini	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	60	60	60	100	65	60	92,31	68	66	97,06	70	-	-	72	-	-	75
		Jumlah alat pemantau kualitas udara	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1
		Jumlah dokumen AMDAL atau UKL/UPL	Dok	10	15	-	-	15	-	-	15	-	-	20	-	-	20	-	-	20
		Penegakan hukum lingkungan	%	100	100	-	-	100	-	-	100	-	-	100	-	-	100	-	-	100

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN TARGET	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	2016			2017			2018			2019			2020			Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	24
		Pencemaran status mutu air	%	100	100	-	-	100	-	-	100	-	-	100	-	-	100	-	-	100
		Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	%	100	100	-	-	100	-	-	100	-	-	100	-	-	100	-	-	100
		Persentase luas penanganan kawasan rawan longsor	%	12,23	13,81	6	43,45	15,79	6	38	18,27	-	-	21,24	19,46	91,62	23,71	-	-	26,19
Tujuan 5 : Meningkatkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan																				
5	Meningkatkan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten	Jumlah dokumen acuan penataan ruang	Dokumen	8	8	-	-	9	-	-	11	-	-	12	-	-	13	-	-	14

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018, 2019, 2020

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa:

- **Misi 1 : Menyelenggarakan Pemerintahan yang tanggap dan peduli untuk melayani masyarakat serta membantu aparat hukum dalam memberantas KKN, mencegah tindak kriminal dan menegakkan HAM secara profesional, berdedikasi, bersih dan berwibawa.**

Berdasarkan data dari tahun 2016-2019, sebanyak 5 (lima) IKU yang memenuhi capaian rata-rata yaitu Rasio penduduk memiliki KTP-el per wajib KTP-el, Rasio penduduk 0-18 tahun memiliki akte kelahiran, Lama Proses Perijinan dan Capaian Poskamling Aktif, Pemilihan Presiden sedangkan 2 (dua) IKU yaitu Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan dan Pengaduan kasus anak yang ditindaklanjuti mencapai target dengan masing-masing capaian rata-rata dari tahun 2017-2019 adalah 132,24% dan 100%; Pada tahun 2020 ketujuh IKU tersebut di atas tidak menjadi IKU Kabupaten Labuhanbatu. Selama tahun 2016-2020 hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan daerah, Kabupaten Labuhanbatu hanya sekali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun 2016 dan selama 2017-2020 mendapatkan opini Wajar dengan Pengecualian (WDP). Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Labuhanbatu selama tahun 2016-2020 memperoleh predikat CC dengan nilai 56,68.

- **Misi 2 : Menciptakan SDM berkualitas yang mampu menguasai dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi/IPTEK yang mempunyai integritas, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan dilandasi akhlak mulia sebagai kunci untuk keberhasilan pelaksanaan program yang mandiri guna membentuk karakter masyarakat Labuhanbatu yang mempunyai ciri khas berbudaya Labuhanbatu, ramah, santun dan beretika.**

Berdasarkan data dari tahun 2016-2019, hanya IKU Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV SD yang memenuhi capaian rata-rata sebesar 105,97% dan pada tahun 2020 IKU ini tidak menjadi IKU Kabupaten Labuhanbatu;

- **Misi 3: Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjamin/assurance, terjangkau, merata dan berkeadilan sesuai dengan standart Internasional.**

IKU pada misi ini sebagian besar belum mencapai target per tahunnya tetapi untuk IKU Persentase anak pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan, Sertifikasi Akreditasi Versi 2012 dan Joint Commision International (JCI), Meningkatnya akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta informasi Kesehatan, Angka kesakitan malaria (Annual Paracite Index-API) per 1000 penduduk, Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan, dengan mencapai target pada tahun 2019 masing-masing 100% bahkan puskesmas yang memiliki sertifikat akreditasi Puskesmas, Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas, Persentase penduduk dengan akses sanitasi layak mengalami peningkatan, Jumlah Pembinaan Peserta KB Aktif dan Jumlah Peserta KB Baru melampaui 100% yaitu 125%, 105,87%, 105,36%, 108,18% dan 108,77% untuk tahun 2019. Pada tahun 2020, IKU tersebut tidak menjadi IKU Kabupaten Labuhanbatu;

- **Misi 4: Membangun Perekonomian yang kuat untuk menjamin pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui Perluasan Lapangan Kerja, peningkatan kuantitas dan kualitas produksi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, penguatan lembaga keuangan dan koperasi serta pengembangan potensi kawasan wisata.**

Tingkat Inflasi dengan capaian rata-rata dari tahun 2016-2020 sebesar 64,15%. Angka ini mengalami penurunan yang menunjukkan kestabilan harga komoditi pangan yang berpengaruh terhadap inflasi.

- **Misi 5: Menciptakan sinergi pembangunan di bidang insfrastruktur, pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan;**

IKU Persentase rumah tangga pengguna air bersih dan Persentase luas cakupan layanan jaringan irigasi dalam kondisi baik yang hanya

mencapai target pada tahun 2019 sebesar 218,93% dan 100%. Pada tahun 2020, IKU tersebut tidak menjadi IKU Kabupaten Labuhanbatu.

Indikator Kinerja Utama pada tahun 2019 dan 2020 mengalami perubahan berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi bahwa IKU Kabupaten Labuhanbatu tahun 2019-2020 tidak banyak menunjukkan outcome (hasil) yang ingin dicapai, lebih didominasi oleh output (keluaran). Hal ini berdampak pada sulitnya pada pengukuran kinerja OPD sehingga dilakukan penyesuaian target IKU Kabupaten Labuhanbatu tahun 2019-2020 sesuai dengan rapat koordinasi dan evaluasi penyusunan target IKU tahun 2019 dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 -2021 dan rapat koordinasi dan evaluasi penyusunan target IKU tahun 2020 dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021.

2.6.2. Hasil Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2017-2021

2.6.2.1. Bidang Urusan Pendidikan murni

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu meliputi:

- I. Pendidikan Dasar;
- II. Pendidikan Kesetaraan; dan
- III. Pendidikan Anak Usia Dini.

Tabel 2.184
Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan
di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Satuan	Target	Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021
I	Pendidikan Dasar							
I	Jumlah Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	100	93,78	95,01	95,21	94,84	92,27
II	Pendidikan Kesetaraan							
I	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	14,30	12,96	17,62	16,39	51
III	Pendidikan Anak Usia Dini							
I	Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	100	39,40	47,87	43,36	56,29	72

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022

Dari hasil di atas bahwa Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2021 dengan Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar, Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Anak Usia Dini belum mencapai target 100%.

2.6.2.2. Bidang Urusan Kesehatan

Jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan capaian indicator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2017-2021 sesuai dengan tertera dalam Tabel berikut:

Tabel 2.185
Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan
Tahun 2017-2021 Kabupaten Labuhanbatu

No.	Uraian	Satuan	Target	Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021
I	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							
1	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	84,44	90,89	89,94	84,60	45,55
II	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin							
1	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	81,96	89,39	91,62	91,18	45,86
III	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir							
1	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	97,66	93,74	94,66	93,08	47,49
IV	Pelayanan kesehatan balita							
1	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	88,57	87,60	73,03	91,71	52,39
V	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar							
1	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	98,73	25,60	100	21,55	0
VI	Pelayanan kesehatan pada usia produktif							
1	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	2,46	15,60	10,78	56,70	11,10
VII	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut							
1	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	62,27	64,10	73,59	70,59	39,17
VIII	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi							
1	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	92,83	10,00	6,68	45,00	12,27
IX	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus							
1	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	84,00	39,20	86,80	47,53
X	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat							
1	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	%	100	NA	2,30	100	100	75,26
XI	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis							

No.	Uraian	Satuan	Target	Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	63,58	32,35	10,42
XII	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)							
1	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	53,50	51,86	24,40	17,53

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022

Dari hasil di atas bahwa Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2021 belum mencapai target 100%.

2.6.2.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Labuhanbatu dan capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2021 sesuai dengan tertera dalam Tabel berikut:

Tabel 2.186
Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum
Tahun 2017-2021 Kabupaten Labuhanbatu

No.	Uraian	Satuan	Target	Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021
I	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari							
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100	62,90	67,45	86,57	90,37	94,34
II	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik							
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	%	100	54,43	59,94	72,44	79,06	81,50

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022

Capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2017-2021 Bidang Urusan Pekerjaan Umum mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan 2021 walaupun belum dapat mencapai target 100%.

2.6.2.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2017-2021 sesuai dengan tertera dalam Tabel berikut:

Tabel 2.187
Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat
Tahun 2017-2021 Kabupaten Labuhanbatu

No.	Uraian	Satuan	Target	Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021
I	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota							
1	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	0	0	0	0	0
II	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota							
1	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	0	0	0	0	0

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022

Jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Labuhanbatu dan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2017-2021 tidak dapat terealisasi karena tidak adanya masyarakat korban bencana yang membutuhkan rumah layak huni dan terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu dari tahun 2017-2021.

2.6.2.5. Bidang Urusan Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2017-2021 sesuai dengan tertera dalam Tabel berikut:

Tabel 2.188
Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Keamanan, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Satuan	Target	Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021
I	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum							
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	%	100	100	100	100	100	100
II	Pelayanan informasi rawan bencana							
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	0	0	0	0	0
III	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana							
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	0	0	82	65	30
IV	Pelayanan informasi rawan bencana							
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	80	84	83	89	90
V	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran							
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu 2021

Indikator Pelayanan Dasar bagi masyarakat yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara serta yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sudah mencapai target 100% pada tahun 2017 sampai tahun 2021.

Masyarakat yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana belum mencapai target 100%.

Indikator Pelayanan Dasar bagi masyarakat yang memperoleh layanan informasi rawan bencana tidak dapat terealisasi karena belum ada sistem layanan informasi rawan bencana.

2.6.2.6. Bidang Urusan Sosial

Jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial dan capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2016-2020 sesuai dengan tertera dalam Tabel berikut:

Tabel 2.189
Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial
Tahun 2017-2021 Kabupaten Labuhanbatu

No.	Uraian	Satuan	Target	Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021
I	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti							
1	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	0,20	0,22	0,27	0	0
II	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti							
1	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	0	0	0	0	20%
III	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti							
1	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	0	0	0	0	20%
IV	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti							
1	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	%	100	0	0	0	0	40%
V	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota							
1	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	100	0	100	100	100	0

Sumber : SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2022

Capaian jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti pada tahun 2021 sebesar 0% karena kegiatan ini tidak dianggarkan karena keterbatasan anggaran dan capaian jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada tahun 2021 sebesar 0% karena anggaran direcofusing akibat dampak pandemik Covid-19.

2.6.3. Hasil Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG’s)
Tahun 2016-2020

Rencana Pembangunan Daerah menurut Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dirumuskan secara berkelanjutan yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia sehingga perlu mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG’s) yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030 ke dalam RPJMD.

Untuk pencapaian sasaran TPB Daerah, Gubernur menyusun RAD TPB 5 (lima) tahunan bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pihak terkait lainnya.

Berikut penyajian capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG’s) Tahun 2016-2020 sebagai bahan evaluasi penyusunan RPJMD Tahun 2016-2020 Kabupaten Labuhanbatu.

Dari 220 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten, kemudian dilakukan identifikasi indikator yang sesuai dengan karakteristik Kabupaten Labuhanbatu maka diperoleh 203 indikator TPB yang akan dievaluasi. Dari jumlah tersebut sumber data paling banyak teridentifikasi berasal dari Perangkat Daerah Kabupaten yakni 93%, dari instansi vertikal 7%.

Tabel 2.190
Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG’s)
Tahun 2016-2020 Kabupaten Labuhanbatu

NO. INDI-KA-TOR	INDIKATOR	IN-STAN-SI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Ke-sim-Pulan	BAU	Target Capaian
			2016	2017	2018	2019 Base	BAU 2020			2026	2030
1.5.1. (a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	BPBD	-	-		NA	-	Meningkat menjadi 39 daerah	B		Meningkat menjadi 39 daerah

NO. INDI-KA-TOR	INDIKATOR	IN-STAN-SI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Ke-sim-Pu-lan	BAU 2026	Target Capaian 2030
			2016	2017	2018	2019 Base	BAU 2020				
1.5.1. (e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	BPBD	-	-	-	NA	-	Menurun menjadi 118,6	B		Menurun menjadi 118,6
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD	-	-	-	NA	-	Ada	B		Ada
11.5.1. (a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	BPBD	-	-	-	NA	-	Menurun menjadi 30%	B		Menurun
11.b.2 *	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	BPBD	-	-	-	NA	-	Ada	B		Ada
13.1.1 *	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD	-	-	-	NA	-	Ada	B		Ada
15.3.1. (a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	DLH	0	0	0	0	0	Luas=12.098 ,38 Ha	B		
15.9.1. (a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaraga	DLH	-	-	-	NA	-	Ada	B		Ada

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	INSTANSI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Kesimpulan	BAU 2026	Target Capaian 2030
			2016	2017	2018	2019 Base	BAU 2020				
	man hayati.										
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	DISPORBUDPAR	-	-	-	NA	-	Meningkat menjadi 8%	B		Meningkat Lebih dari 8%
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	DISPORBUDPAR	-	-	-	24	-	Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)	B		Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	DISPORBUDPAR	-	-	-	NA	-	Meningkat	B		Meningkat
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	DISDIK	-	-	-	NA	-	Menigkat	B		Menigkat
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana Dinsos yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/Madrasah Aman Bencana)	BPBD	-	-	-	NA	-	Meningkat menjadi 450 skala nasional	B		Meningkat menjadi 450 skala nasional
0	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja	DUPR	-	-	-	NA	-	Meningkat	B		Meningkat

NO. INDI-KA-TOR	INDIKATOR	IN-STAN-SI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Ke-sim-Pu-l-an	BAU 2026	Target Capaian 2030
			2016	2017	2018	2019 Base	BAU 2020				
	perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).										
11.7.1. (a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	DPU PR	-	-	-	NA	-	Meningkat	B		Meningkat
12.7.1. (a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	DLH	-	-	-	NA	-	Meningkat	B		Meningkat
12.8.1. (a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	DLH	-	-	-	NA	-	Meningkat	B		
17.18. 1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik	BPS	-	-	-	NA	-	Meningkat	B		Meningkat

NO. INDI-KA-TOR	INDIKATOR	IN-STAN-SI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Ke-sim-Pu-lan	BAU 2026	Target Capaian 2030
			2016	2017	2018	2019 Base	BAU 2020				
	(SIRuSa).										
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	DLH	-	-	-	NA	-	Meningkat	B		Meningkat
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	DIN-SOS	8,95	8,89	8,61	8,44	8,27	Menurun menjadi 7-8%	SB	7,18	0,00
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	DIN-KES	24	24	26	55,46	56,45	Meningkat menjadi 95%	SB	100	Meningkat lebih dari 95 %
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	PU-DAM	91,70 %	92,00 %	75,10 %	79,80 %	88,55 %	Meningkat menjadi 100%	SB	70,7%	100,0%
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses	DPER-KIM	95,1%	91,0%	91,9%	97,86 %	96,2%	Meningkat menjadi 100%	SB	100,0 %	100,0%

NO. INDI-KA-TOR	INDIKATOR	IN-STAN-SI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Ke-sim-Pu-lan	BAU	Target Capaian
			2016	2017	2018	2019 Base	BAU 2020			2026	2030
	terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.										
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	BPBD	-	4.390.000.000	3.950.000.000	26.250.000.000	33.390.000.000	Menurun	SB	122.371.746.031,75	Menurun
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	DIN-KES	10	10	11	11	10	Menurun Menjadi 0,11	SB	13	Menurun
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	DIN-KES	10,027	9,928	10,229	10,552	10,688	Menurun	SB	11,856	Menurun
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	DIN-KES	10,027	9,993	11,039	10,552	11,058	Menurun	SB	12,631	Menurun
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	DIN-KES	10,008	10,046	10,224	10,398	10,506	Meningkat menjadi 95%	SB	11,315	100
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	DIN-KES	7,2%	7,2%	9,1%	9,1%	10,1%	Menurun menjadi 5,4%	SB	14,6%	2,1%

NO. INDI-KA-TOR	INDIKATOR	IN-STAN-SI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Ke-sim-Pu-l-an	BAU 2026	Target Capaian 2030
			2016	2017	2018	2019 Base	BAU 2020				
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	DIN-KES	25,8	25,8	32,9	32,9	36,5%	Menurun menjadi 24,3%	SB	53,5%	21,6%
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	DIN-KES	15,4%	15,4%	24,7%	24,7%	29,4%	2019=15,4 Menurun	SB	51,7%	Menurun
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	DIN-KES	15	15	15	15	15	Meningkat	SB	15	Meningkat
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	DIN-KES	-	-	28,01	28,01	28,01	Menurun	SB	28,01	Menurun
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	DIN-KES	-	682	632	679	663	Meningkat	SB	654	Meningkat
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	DISDIK	60,00 %	63,00 %	64,00 %	64,30 %	66,30 %	2019=84,20 %	SB	72,6%	100%
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	DISDIK	56,00 %	62,00 %	65,00 %	62,30 %	66,80 %	2019=81,00 % Meningkat	SB	73,0%	100,0%
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	DISDIK	94,30 %	101,3 0%	102,2 0%	99,50 %	103,50 %	2019=114,0 9% Meningkat	SB	106,0 %	130,8%

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	INSTANSI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Kesimpulan	BAU 2026	Target Capaian 2030
			2016	2017	2018	2019 Base	BAU 2020				
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	DISDIK	67,60 %	87,80 %	92,30 %	93,80 %	106,20 %	2019=106,94%	SB	147,5 %	124,1%
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	DISDIK	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	2019=8,8	SB	9,4	10,31
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	DISDIK	60,40 %	59,00 %	62,00 %	64,50 %	65,30 %	2019=77,20 Meningkat	SB	77,2%	96,9%
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	DPPPA	-	3	3	6	7	2019=35/2020=39	SB	16	79
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	DPPKB	12,70 %	11,96 %	12,30 %	13,40 %	13%	2019=9,9 Menurun	SB	15%	7,2%
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	DPPKB	60,84 %	62,12 %	69,31 %	70,18 %	74%	2019=85,00	SB	96%	93,1%

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	IN-STANSI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Kesimpul-an	BAU 2026	Target Capaian 2030
			2016	2017	2018	2019 Base	BAU 2020				
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	PU-DAM	91,70 %	92,00 %	75,10 %	79,80 %	88,55	Meningkat	SB	68,9%	100%
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	DPER-KIM	0,05	0,07	0,08	0,08	0,09	2019=118,60	SB	303,29	303,29
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	DPER-KIM	91,70 %	92,00 %	75,10 %	79,80 %	88,55 %	2019=100	SB	68,9%	100%
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	DPER-KIM	95,10 %	91,00 %	91,90 %	97,86 %	96,2%	2019=100%	SB	100,0 %	100%

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	IN-STANSI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Kesimpulan	BAU 2026	Target Capaian 2030
			2016	2017	2018	2019 Base	BAU 2020				
11.5.1 (b)	Jumlah Kota Tangguh Yang Terbentuk	BPBD	-	-	-	-	1	Meningkat	SB		Meningkat
11.5.2. (a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	BPBD		4.390.000.000	3.950.000.000	26.250.000.000	33.390.000.000	Menurun	SB	111.603.333,34	Menurun
15.1.1. (a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	DLH	1,76	1,42	1,36	1,22	1,08	Meningkat	SB	0,24	Meningkat
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	BPS	8,11	7,68	6,07	6,07	5,05	Meningkat	SB	0,41	Meningkat
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	DIS-NAKER	8,12	7,68	6,07	5,22%	4,19%	Meningkat	SB	-1,99%	Meningkat
8.5.2.(a)+A6: O11	Tingkat setengah pengangguran.	DIS-NAKER	-	35,8	37,23	38,66	40,09	Menurun	SB	48,67	Menurun
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur per kapita.	DIS-DAGPERIN	0,89%	0,23%	0,25%	0,22%	-0,1%	Meningkat	SB	-1,3%	Meningkat
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	DIS-NAKER	-	7,17%	6,95%	6,73%	6,51%	Meningkat	SB	5,19%	Meningkat

NO. INDI-KA-TOR	INDIKATOR	IN-STAN-SI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Ke-sim-Pu-lan	BAU	Target Capaian
			2016	2017	2018	2019 Base	BAU 2020			2026	2030
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	DIS-KOM-INFO	14,46 %	25,53 %	31,70 %	38,97 %	47,59 %	52%	SB	95,41 %	Meningkat
10.1.1. (a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	DIN-SOS	8,95	8,89	8,61	8,44	8,09	2015=11,13 /2019=8	SB	6,46	4,475
17.1.1. (a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	BPKA D	0,15%	0,17%	0,16%	0,16%	0,16%	2019=12%	SB	0,14%	>12%
16.5.1. (a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	BPS		3,71	3,66	3,7	3,84	Menurun	SB	4,05	5,1
16.6.1 *	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	BPKA D	28,43	24,8	23,9	22,83	24,47	Meningkat	SB	16,98	Meningkat
16.6.1. (d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian /Lembaga dan	ORTA	-	-	42,62 %	44,13 %	45,64 %	2019=45%	SB	54,70 %	Meningkat dari 45 %

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	IN-STANSI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Kesimpulan	BAU 2026	Target Capaian 2030
			2016	2017	2018	2019 Base	BAU 2020				
	Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).										
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	DISKOM-INFO	-	-	-	-	2	Meningkat	SB	-	Meningkat
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	DPANGAN	34,57 %	37,17 %	40,82 %	49,42 %	48,59 %	92,5%	SB	74,97 %	100,0%
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	DINKES	0	0	0,04	0,02	0,09	Menurun	SB	0,19	Menurun

NO. INDI-KA-TOR	INDIKATOR	IN-STAN-SI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Ke-sim-Pu-lan	BAU	Target Capaian
			2016	2017	2018	2019 Base	BAU 2020			2026	2030
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	DIS-KOM-INFO	14,46 %	25,53 %	31,70 %	38,97 %	47,59 %	Meningkat Menjadi 52%	SB	95,41 %	Meningkat
16.9.1 *	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	DIS-DUK-CA-PIL	86,60 %	86,57 %	85,97 %	85,12 %	84,30 %	Meningkat	SB	81,78 %	Meningkat
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	DIN-KES	32%	32%	34%	33,70 %	36,40 %	Meningkat menjadi 50%	SB	42,8%	72%
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	DIN-KES	149	144	146	199	333	Menurun	SB	573	150
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	DPPKB /DIN-KES	3,25	3,2	3,1	3,02	2,95	2,28	SB	2,47	1,16
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	DLH	60	80	80	20	30	Meningkat	SB	0	Meningkat
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)	DKU KM	-	12,24 %	12,24 %	12,24 %	12,24 %	25,00%	SB	12,24 %	44,80%

NO. INDI-KA-TOR	INDIKATOR	IN-STAN-SI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Ke-sim-Pu-lan	BAU 2026	Target Capaian 2030
			2016	2017	2018	2019 Base	BAU 2020				
	ke layanan keuangan.										
8.10.1 *	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	DPMP TSP	-	63	62	61	63	Meningkat	SB	64	Meningkat
5.2.1 *	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	DPPPA	0,34%	0,27%	2,10%	0,32%	1,21%	Menurun	SB	2,29%	Menurun
11.6.1. (a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	DLH	39,30 %	42,20 %	42,50 %	39,90 %	41,50 %	80%	SB	53,2%	100,00%
10.1.1. (d)	Jumlah Desa Mandiri.	DPMD	-	-	-	-	-	Meningkat	SB	-	Meningkat
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Dinsos Bidang Ketenagaker jaan.	DIS-NAKE R	-	9,55%	29,31 %	36,59 %	52%	Meningkat	SS	100%	Meningkat

NO. INDI-KA-TOR	INDIKATOR	IN-STAN-SI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Ke-sim-Pu-lan	BAU 2026	Target Capaian 2030
			2016	2017	2018	2019 Base	BAU 2020				
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	DPPPA	0,006 %	0,006 %	0,017 %	0,010 %	0,015 %	Menurun Menjadi Kurang dari 20,48 %	SS	0,022 %	Menurun
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	DPPPA	0,001 4%	0,000 7%	0,005 2%	0,000 0%	0,0019 %	Menurun	SS	0,0000 %	Menurun
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaa n.	BPBD	-	-	-	-	1	Ada	SS	-	Ada
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Dinsos Bidang Ketenagaker jaan.	DIS-NA-KER	-	9,55	29,31	36,59	52,19	Meningkat	SS	100,00	Meningkat
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	DIN-SOS	-	20,20 %	22,55 %	27,23 %	30,36 %	17,12%	SS	51,45 %	23,39%

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	IN-STANSI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Kesimpulan	BAU 2026	Target Capaian 2030
			2016	2017	2018	2019 Base	BAU 2020				
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	DIN-SOS	7	8	13	13	15	Berkurangnya Keluarga miskin sebesar 6,6%	SS	28	Menurunnya Keluarga Miskin
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	DIN-KES	80,89 %	83,09 %	89,39 %	89,48 %	93,73 %	70%	SS	100%	Meningkat Lebih dari 70 %
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	DPPKB	73,45 %	74,65 %	77,68 %	79,08 %	81,20 %	65%	SS	93,15 %	Meningkat Lebih dari 65 %
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	DISDIK	89,8%	89,8%	92,2%	98,9%	100,1 %	2019=94,78 %	SS	117,9 %	104,58%
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	DISDIK	76,4%	76,4%	78,0%	84,3%	85,1%	2019=82,20	SS	100,3 %	88,37%

NO. INDI-KA-TOR	INDIKATOR	IN-STAN-SI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Ke-sim-Pul-an	BAU 2026	Target Capaian 2030
			2016	2017	2018	2019 Base	BAU 2020				
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	DIS-DUK-CA-PIL	87,14	88,37	89,74	91,06	92,36	2019=77,40	SS	100,00	Meningkat
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	-	##	##	181	98	Menurun	SS	0	Menurun
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana Dinsos.	DIN-SOS	Tidak Ada Bencana Sosial					151.000	SS	-	448.000
1.5.1.(c)	Pendampingan psikoDinsos korban bencana Dinsos.	DIN-SOS	Tidak Ada Bencana Sosial					81.500	SS	-	246.500
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweig ht) pada anak balita.	DIN-KES	10,01 %	10,05 %	10,05 %	10,40 %	10,43 %	2019=17,00 % Menurun	SS	11,15 %	12,29%
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	DPAN GAN	Tidak ada Kerawanan Pangan, Asupan Kalori Minimum Kabupaten Labuhanbatu sudah mencapai diangka 1700					Menurun	SS	-	Menurun

NO. INDI-KA-TOR	INDIKATOR	IN-STAN-SI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Ke-sim-Pu-lan	BAU 2026	Target Capaian 2030
			2016	2017	2018	2019 Base	BAU 2020				
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	DPAN GAN	Asupan Kalori Minimum Kabupaten Labuhanbatu sudah mencapai diangka 1700					8,50%	SS	-	0%
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	DIN-KES	80,89 %	83,09 %	89,39 %	89,48 %	93,73 %	85%	SS	100%	100%
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	DIN-KES	10,027	9,928	11,039	10,552	11,058	Menurun Menjadi 24	SS	12,670	9
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	DPPKB	67,44 %	66,84 %	70,77 %	69,51 %	71,16 %	66%	SS	77,22 %	73,5%

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	IN-STANSI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Kesimpulan	BAU 2026	Target Capaian 2030
			2016	2017	2018	2019 Base	BAU 2020				
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	DPPKB	94,10 %	96,48 %	93,39 %	93,14 %	92,77 %	65%	SS	89,17 %	Meningkat
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	DPPKB	30,24 %	30,77 %	29,25 %	30,87 %	30,39 %	23,50%	SS	30,63 %	33,1%
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	DINKES	69,91 %	73,16 %	86,08 %	74,25 %	82,34 %	Meningkat	SS	97,90 %	Meningkat
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i)	DISDIK	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkat	SS	100%	100%

NO. INDI-KA-TOR	INDIKATOR	IN-STAN-SI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Ke-sim-Pu-lan	BAU 2026	Target Capaian 2030
			2016	2017	2018	2019 Base	BAU 2020				
	membaca, (ii) matematika.										
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/ laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	DISDIK	89,8%	89,8%	92,2%	98,9%	100,1 %	94,78% pada tahun 2019	SS	123,2 %	104,58%
			76,4%	76,4%	78,0%	84,3%	85,1%	82,2% pada tahun 2019	SS	105,3 %	88,37%
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	DISDIK	99,20 %	99,30 %	99,30 %	99,90 %	99,95 %	2019=96,10 % Meningkat	SS	100,00 %	98,7%
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59	DISDIK	99,20 %	99,30 %	99,30 %	99,90 %	100,00 %	Meningkat	SS	100,0 %	Meningkat

NO. INDI-KA-TOR	INDIKATOR	IN-STAN-SI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Ke-sim-Pu-lan	BAU 2026	Target Capaian 2030
			2016	2017	2018	2019 Base	BAU 2020				
	tahun.										
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	DISDIK	86,50 %	87,00 %	87,80 %	89,50 %	90,10 %	Meningkat	SS	97%	Meningkat
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	DISDIK	66,00 %	67,50 %	68,00 %	70,10 %	71,10 %	Meningkat	SS	79,40 %	Meningkat

NO. INDI-KA-TOR	INDIKATOR	IN-STAN-SI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Ke-sim-Pu-lan	BAU	Target Capaian
			2016	2017	2018	2019 Base	BAU 2020			2026	2030
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	DPPPA	100%	100%	100%	100%	100%	2019=70%	SS	100%	100%
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	DPPPA	31,11 %	31,11 %	31,11 %	20,00 %	20%	Meningkat dari 16,60%	SS	0%	Meningkat
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	DPPPA	6%	8%	11%	11%	11%	Meningkat	SS	24%	Meningkat
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	DPPKB	46,61 %	48,14 %	51,34 %	51,20 %	53,57 %	Meningkat	SS	63,75 %	Meningkat

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	INSTANSI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Kesimpulan	BAU 2026	Target Capaian 2030
			2016	2017	2018	2019 Base	BAU 2020				
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.	DISKOMINFO	50,64 %	73,35 %	78,27 %	82,78 %	96,60 %	Meningkat	SS	100%	Meningkat
6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	DPERKIM	5	13	35	39	54	Meningkatnya infrastruktur terbangun	SS	128	Meningkatnya Infrastruktur Terbangunan
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	DPERKIM		0,30%	1,30%	1,59%	2,40%	Meningkat	SS	6,30%	Meningkat
6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	DISPERTA	3,70%	4,00%	4,70%	5,50%	5,60%	Ada	SS	8,50%	Ada
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	DPERKIM		77,80 %	92,40 %	98,00 %	82,50 %	68,50%	SS	100,00 %	Meningkat dari 68,5%

NO. INDI-KA-TOR	INDIKATOR	IN-STAN-SI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Ke-sim-Pul-an	BAU 2026	Target Capaian 2030
			2016	2017	2018	2019 Base	BAU 2020				
11.5.1 *	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	-	311	152	181	98	Menurun	SS	0	Menurun
13.1.2 *	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD		311	152	181	98	Menurun	SS	0	Menurun
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	BPS	56,33 Juta	60,66 Juta	64,34 Juta	68,01 Juta	72,02 Juta	50 Juta pada tahun 2019	SS	95,25 Juta	63,2 Juta
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	DIS-NA-KER	12	14	15	16	17	Meningkat	SS	24	Meningkat
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	DIS-NA-KER	-	7,09	6,98	5,7	5,2	Menurun	SS	1	Menurun
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	DIS-POR-BUD-PAR	2815	3175	3757	3857	4328	Meningkat	SS	6553	Meningkat

NO. INDI-KA-TOR	INDIKATOR	IN-STAN-SI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Ke-sim-Pu-lan	BAU 2026	Target Capaian 2030
			2016	2017	2018	2019 Base	BAU 2020				
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	DIS-HUB	6	6	6	6	7	2014=4 Meningkat	SS	8	Meningkat
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	DIS-DAG-PERIN	2,46%	7,06%	6,50%	7,51%	9,1%	Lebih Tinggi dari Pertumbuha n PDB	SS	17,5%	Lebih Tinggi dari Pertumbu han PDB
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	DIS-DAG-PERIN	52%	65%	42%	54%	66%	Meningkat	SS	76%	Meningkat
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam	DIS-KOM-INFO	50,64 %	73,35 %	78,27 %	82,78 %	96,58 %	Meningkat	SS	100%	Meningkat
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	DIS-KOM-INFO	14,46 %	25,53 %	31,70 %	38,97 %	47,59 %	Meningkat	SS	95,41 %	Meningkat
10.1.1*	Koefisien Gini.	BPS	0,31	0,28	0,29	0,27	0,26	2019=0,36	SS	0,2	0,25
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	DPMD	-	-	27	19	9	Berkurangn ya sebanyak 5000 Desa Skla Nasional	SS	0	Berkurang nya sebanyak 5000 Desa Skla Nasional
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median	DIN-SOS	31,47 %	34,82 %	26,12 %	29,60 %	26,93 %	Menurun	SS	18,35 %	Menurun

NO. INDI-KA-TOR	INDIKATOR	IN-STAN-SI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Ke-sim-Pu-lan	BAU	Target Capaian
			2016	2017	2018	2019 Base	BAU 2020			2026	2030
	pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.										
17.1.1 *	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	BPKA D	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	Meningkat	SS	0,54	Meningkat
17.1.2 *	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	BPKA D	2,93%	3,57%	3,57%	3,33%	3,87%	Meningkat	SS	4,72%	Meningkat
17.18. 1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	BPS	-	-	95,96 %	100%	100%	Meningkat	SS	100%	Meningkat
17.18. 1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	BPS	-	-	63,33 %	74,19 %	85%	Meningkat	SS	100%	Meningkat

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	INSTANSI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Kesesmpul-an	BAU	Target Capaian
			2016	2017	2018	2019 Base	BAU 2020			2026	2030
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	DISDUKCAPIL	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	ADA	SS	-	Ada
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	BPS	6490	7352	6380	9230	7255	Meningkat	SS	10068	Meningkat
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	BPS	-	-	88,67 %	100%	100%	Meningkat	SS	100%	Meningkat
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	POLRES	35	29	16	19	10	Menurun	SS	0	Menurun
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	POLRES	-	0,52%	0,38%	0,27%	0,15%	Menurun	SS	0	Menurun

NO. INDI-KA-TOR	INDIKATOR	IN-STAN-SI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Ke-sim-Pu-lan	BAU 2026	Target Capaian 2030
			2016	2017	2018	2019 Base	BAU 2020				
16.2.1. (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	DPPPA	0%	0%	0%	0%	0%	Menurun	SS	0%	Menurun
16.2.1. (b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki	DPPPA	0,010 %	0,012 %	0,038 %	0,004 %	0,018 %	Menurun Dari 38,62 %	SS	0,000 %	Menurun Dari 38,62 %
	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	DPPPA	0,004 %	0,002 %	0,056 %	0,002 %	0,028 %	Menurun Dari 20,48 %	SS	0,006 %	Menurun Dari 20,48 %
16.2.3. (a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	DPPPA	0%	0%	0%	0%	0%	Menurun	SS	0%	Menurun
16.6.1. (b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilita s Kinerja Pemerintah	ORTA	-	55,89 %	53,96 %	56,23 %	55,70 %	2019=50%	SS	56,72 %	100%

NO. INDI-KA-TOR	INDIKATOR	IN-STAN-SI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Ke-sim-Pu-l-an	BAU 2026	Target Capaian 2030
			2016	2017	2018	2019 Base	BAU 2020				
	(SAKIP) Kementerian /Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).										
16.7.1. (a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	DPPPA	31%	31%	31%	20%	20%	Meningkat dari 16,60% pada tahun 2019	SS	0%	Meningkat dari 16,60%
16.7.1. (b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	DPPPA	6,06%	8,33%	11,11 %	11,11 %	13,62 %	2014=16,39 %	SS	24,36 %	Meningkat
16.9.1. (a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapa tan bawah.	DIS-DUK-CAPIL	87,14 %	88,37 %	89,74 %	91,06 %	92,36 %	2019=77,4	SS	100%	Meningkat
16.9.1. (b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	DIS-DUK-CAPIL	86,09 %	87,14 %	88%	90%	91%	Meningkat Menjadi 85 % di Tahun 2019	SS	98%	Meningkat

NO. INDI-KA-TOR	INDIKATOR	IN-STAN-SI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Ke-sim-Pu-lan	BAU 2026	Target Capaian 2030
			2016	2017	2018	2019 Base	BAU 2020				
14.b.1.(b)	Jumlah Nelayan.	DKP	-	669	429	1578	1801	Meningkat	SS	4528	Meningkat
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	DIN-KES	98,40 %	92,80 %	91,70 %	95,30 %	92%	Meningkat Menjadi 63% pada tahun 2019	SS	85,70 %	Meningkat
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita .	DIN-KES	-	-	-	1,60%	1,50%	Menurun	SS	0,90%	Menurun
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/badut a.	DIN-KES	-	-	-	1,60%	1,80%	Menurun Menjadi Tahun 28% Tahun 2019	SS	3%	Menurun Menjadi 19%
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	DIN-KES	-	-	-	1,80%	1,60%	Menurun	SS	0,40%	Menurun
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	DIN-KES	30%	68%	20%	25%	20%	Menurun menjadi 28% Tahun 2019	SS	0%	Menurun Menjadi 11,26%

NO. INDI-KA-TOR	INDIKATOR	IN-STAN-SI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Ke-sim-Pu-lan	BAU	Target Capaian
			2016	2017	2018	2019 Base	BAU 2020			2026	2030
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	DIN-KES	0,014 %	0,013 %	0,017 %	0,017 %	0,019 %	Menurun Kurang dari 0,5%	SS	0,027 %	Menurun
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	DIN-KES	63%	60%	71%	47%	50%	Menurun	SS	27%	Menurun
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	DPPKB /DIN-KES	27,50 %	27,20 %	26,50 %	26%	25,5%	Menurun Menjadi 38%	SS	26,30 %	Menurun menjadi 19,6%
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	DIN-KES	240	240	260	555	565	Meningkat	SS	1143	Meningkat
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	DIN-KES	18	21	23	23	29	Meningkat	SS	32	Meningkat

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	INSTANSI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Kesimpulan	BAU 2026	Target Capaian 2030
			2016	2017	2018	2019 Base	BAU 2020				
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	DPER-KIM	-	-	-	Ada	-	Ada	SS	-	Ada
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	DIS-PERTA	0,39%	0,38%	0,39%	0,39%	0,40%	Meningkat	SS	0,43%	Meningkat
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	DPPKB /DIN-KES	12,30 %	12,10 %	11,70 %	11,40 %	11%	Menurun	SS	9%	Menurun
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	DPPKB /DIN-KES	19,3 Tahun	20,4 Tahun	20,7 Tahun	21,3 Tahun	22 Tahun	21 tahun pada tahun 2019	SS	25,78 Tahun	22,41 Tahun
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific	DPPKB /DIN-KES	27,5	27,2	26,5	26	25,5	Menurun menjadi 38 pada tahun 2019	SS	22,38	22,3

NO. INDI-KA-TOR	INDIKATOR	IN-STAN-SI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Ke-sim-Pu-lan	BAU 2026	Target Capaian 2030
			2016	2017	2018	2019 Base	BAU 2020				
	Fertility Rate/ASFR).										
12.4.1. (a)	Jumlah peserta proper yang mencapai minimal rangking biru	DLH	3	12	12	12	12	Meningkat	SS	33	Meningkat
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	DIN-KES	82%	84%	91%	92%	96%	Meningkat menjadi 95% pada tahun 2019	SS	100%	100%
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	DIN-KES	24%	24%	26%	55%	56%	Meningkat menjadi minimal 95% pada tahun 2019	SS	100%	100%
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	DIS-NA-KER	-	-	-	-	-	Meningkat	TD	-	Meningkat
16.6.2. (a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan	BALIT-BANG	-	-	-	-	-	Meningkat Menjadi 80% pada tahun 2019	TD	-	Meningkat

NO. INDI-KA-TOR	INDIKATOR	IN-STAN-SI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Ke-sim-Pu-lan	BAU 2026	Target Capaian 2030
			2016	2017	2018	2019 Base	BAU 2020				
	Publik Kementerian /Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).										
2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	DPANGAN	-	-	-	-	-	Menurun	TD	-	Menurun
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	DINKES	-	-	-	-	-	Menurun	TD	-	Menurun
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	POLRES	-	-	-	-	-	Menurun	TD	-	Menurun
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	DINKES	-	-	-	-	-	Meningkat	TD	-	Meningkat
3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	DINKES	-	-	-	-	-	Meningkat Menjadi 34	TD	-	Meningkat

NO. INDI-KA-TOR	INDIKATOR	IN-STAN-SI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Ke-sim-Pu-l-an	BAU 2026	Target Capaian 2030
			2016	2017	2018	2019 Base	BAU 2020				
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	DIN-KES	-	-	-	-	-	Meningkat Menjadi 35	TD	-	Meningkat
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	DIN-KES	-	-	-	-	-	Menurun	TD	-	Menurun
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	DIN-KES	-	-	-	-	-	Menurun Menjadi 0,02 % pada tahun 2019	TD	-	Menurun
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	DIN-KES	-	-	-	-	-	Menurun	TD	-	Menurun
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	DIN-KES	-	-	-	-	-	Menurun menjadi 9,91% pada tahun 2019	TD	-	Menurun
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	DIN-KES	-	-	-	-	-	Menurun	TD	-	Menurun

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	IN-STANSI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Kesimpulan	BAU 2026	Target Capaian 2030
			2016	2017	2018	2019 Base	BAU 2020				
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	DINKES	-	-	-	-	-	Meningkat	TD	-	Meningkat
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	DPERKIM	-	-	-	-	-	Meningkat	TD	-	Meningkat
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	DLH	-	-	-	-	-	Meningkat	TD	-	Meningkat
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	DLH	-	-	-	-	-	Meningkat menjadi 20 ton /hari Skala Naional pada tahun 2019	TD	-	Meningkat
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	DISNAKER	-	-	-	-	-	Meningkat	TD	-	Meningkat

NO. INDI-KA-TOR	INDIKATOR	IN-STAN-SI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Ke-sim-Pu-lan	BAU 2026	Target Capaian 2030
			2016	2017	2018	2019 Base	BAU 2020				
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	DIS-NA-KER	-	-	-	-	-	Meningkat Menjadi 51% pada tahun 2019	TD	-	75,20%
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	DIS-NA-KER	-	-	-	-	-	Meningkat	TD	-	Meningkat
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	DIS-NA-KER	-	-	-	-	-	Meningkat	TD	-	Meningkat
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	DIS-NA-KER	-	-	-	-	-	Meningkat	TD	-	Meningkat
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	DPMP TSP	-	-	-	-	0,65	Menurun	TD	-	Menurun
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	DKUK M	-	-	-	-	-	Meningkat	TD	-	Meningkat
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	DIS-DAG-PERIN	-	-	-	-	-	Meningkat	TD	-	Meningkat

NO. INDI-KA-TOR	INDIKATOR	IN-STAN-SI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Ke-sim-Pu-lan	BAU 2026	Target Capaian 2030
			2016	2017	2018	2019 Base	BAU 2020				
10.1.1. (e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	DPMD	-	-	-	-	-	Meningkat	TD	-	Meningkat
10.3.1. (a)	Indeks Kebebasan Sipil.	DIN-SOS	-	-	-	-	-	Meningkat menjadi 87 Tahun 2019	TD	-	105
17.18. 1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	BAP-PEDA	-	-	-	-	-	Meningkat	TD	-	Meningkat
16.1.4 *	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	POL-RES	-	-	-	-	-	Meningkat	TD	-	Meningkat
16.b.1. (a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	POL-RES	-	-	-	-	-	Ada	TD	-	Ada
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah	BPKA D	-	-	-	-	-	Meningkat	TD	-	Meningkat

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	INSTANSI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Kesimpulan	BAU 2026	Target Capaian 2030
			2016	2017	2018	2019 Base	BAU 2020				
	secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.										
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan Dinsos) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	BPKAD	-	-	-	-	-	Meningkat	TD	-	Meningkat
12.4.2. (a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	DLH	-	-	-	-	-	Meningkat Menjadi 150 Juta Ton skala Nasional pada tahun 2019	TD	-	Meningkat
17.6.2. (b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	DISKOMINFO	-	-	-	-	-	Meningkat	TD	-	Meningkat

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	IN-STANSI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Kesimpul-an	BAU 2026	Target Capaian 2030
			2016	2017	2018	2019 Base	BAU 2020				
17.8.1 *	Proporsi individu yang menggunakan internet.	DIS-KOM-INFO	-	-	-	-	-	Meningkat	TD	-	Meningkat
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	BPKAD	-	-	-	-	-	Ada	TD	-	Ada
17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	BPKAD	-	-	-	-	-	Ada	TD	-	Ada
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Ka	BPKAD	-	-	-	-	-	Meningkat 60% pada tahun 2019	TD	-	Meningkat

NO. INDI-KA-TOR	INDIKATOR	IN-STAN-SI	CAPAIAN KABUPATEN					TARGET (PERPRES 59/2017)	Ke-sim-Pu-lan	BAU	Target Capaian
			2016	2017	2018	2019 Base	BAU 2020			2026	2030
	bupaten/Kota).										
16.6.1. (c)	Persentase penggunaa n E-procurement terhadap belanja pengadaan.	BPKA D	-	-	-	-	-	Meningkat menjadi 80% pada tahun 2019	TD	-	Meningkat

Sumber: Laporan KLHS-RPJMD Kabupaten Tahun 2021-2026

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan komponen paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang kapasitas dan kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Kemampuan pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu tolok ukur utama dalam merumuskan kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat (*public service*), fungsi pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*) dan pengaturan (*regulation*). Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah sehingga dibutuhkan realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.

Untuk memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, maka perlu dicermati gambaran umum keuangan daerah melalui kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Berdasarkan kondisi kinerja keuangan tersebut akan dapat diproyeksikan besarnya pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah sehingga dapat menjadi kerangka pendanaan di masa yang akan datang. Melalui analisis keuangan daerah yang tepat dan terukur akan melahirkan kebijakan yang efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan daerah.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan pada periode yang telah lalu. Dari analisis kinerja masa lalu tersebut akan diketahui rata-rata pertumbuhan yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam melakukan proyeksi keuangan kedepan. Kinerja keuangan masa lalu merupakan kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri atas target dan realisasi

pendapatan daerah, target dan realisasi belanja daerah serta penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Berikut ini adalah gambaran umum terkait dengan kinerja pelaksanaan APBD masa lalu Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu sehingga dapat dijadikan landasan dalam penyusunan proyeksi dan target pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta yang akan tertuang dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu untuk periode 5 tahun kedepan.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya disusun bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia agar tepat sasaran sesuai kebijakan pemerintah. Realisasi anggaran mencerminkan salah satu indikator kinerja pengelolaan keuangan yang baik, realisasi sektor pendapatan mutlak sangat strategis mengingat realisasi pendapatan inilah yang akan membiayai belanja daerah selama satu tahun. Tidak terrealisasinya pendapatan daerah akan mengakibatkan pemerintah daerah tidak dapat membiayai belanja daerah yang telah direncanakan.

Pada sektor belanja, serapan anggaran mencerminkan bagaimana terserapnya manfaat oleh masyarakat pada kurun waktu satu tahun anggaran yang juga akan mendorong *multiplier effect* terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan realisasi pembiayaan menunjukkan bagaimana defisit anggaran dapat ditutupi atau tidak dalam satu tahun anggaran. Untuk mengetahui kinerja pelaksanaan APBD, di bawah ini diuraikan mengenai perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Labuhanbatu selama kurun waktu 2017 sampai dengan 2021.

A. Pendapatan Daerah

Otonomi daerah berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka secara bertahap daerah dituntut untuk mengupayakan kemandirian pendapatannya dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimilikinya. Pendapatan daerah dalam struktur APBD memiliki kedudukan, fungsi dan peranan strategis guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun pemberian pelayanan kepada publik. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah perlu

diperhatikan upaya-upaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) tanpa harus menambah beban bagi masyarakat.

Pendapatan daerah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah didefinisikan sebagai semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hakdaerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Labuhanbatutahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

Tabel 3.1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan (%)		Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	
2017	1.290.315.127.083	1.164.690.896.256	-6,09	-4,70	90,26
2018	1.277.566.050.295	1.221.119.537.811	-0,99	4,84	95,58
2019	1.500.609.870.663	1.172.946.020.793	17,46	-3,95	78,16
2020	1.315.981.548.668	1.164.813.113.464	-12,30	-0,69	88,51
2021	1.363.423.473.097	1.342.106.703.518	3,61	15,22	98,44
Rata-Rata			0,34	2,14	90,19

Sumber : BPKAD Kabupaten Labuhanbatu

Berdasarkan tabel di atas,secara umum kinerja pendapatan Kabupaten Labuhanbatu dilihat dari realisasinya mengalami perkembangan yang berfluktuasi dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Pada tahun 2017, realisasi pendapatan Kabupaten Labuhanbatu sebesar Rp. 1.164,690 miliar dan naik menjadi Rp.1.342,106 miliar pada tahun 2021 dengan rata-rata pertumbuhan realisasi setiap tahunnya sebesar 2,14 persen. Realisasi pendapatan ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan sebelumnya, dimana capaian kinerja realisasi pendapatan daerah selama periode 2017-2021 dibandingkan dengan target secara rata-rata hanya sebesar 90,19 persen.

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Di era otonomi daerah, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan dapat menjadi lokomotif pembangunan daerah dalam percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Semakin besar kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD makasemakin kecil pula tingkat ketergantungan daerah kepada dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berikut ini gambaran capaian kinerja PAD Kabupaten Labuhanbatu selama periode 2017-2021 seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah.

Tabel 3.2. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan (%)		Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	
2017	164.478.008.083	125.068.024.375	19,40	76,77	76,04
2018	180.542.687.295	162.794.472.017	9,77	30,16	90,17
2019	240.318.936.755	90.761.366.444	33,11	-44,25	37,77
2020	225.869.464.200	161.914.846.757	-6,01	78,40	71,69
2021	239.690.323.904	238.194.215.394	6,12	47,11	99,38
Rata-Rata			12,48	37,64	75,01

Sumber : BPKAD Kabupaten Labuhanbatu

Selama periode 2017-2021, realisasi PAD Kabupaten Labuhanbatu mengalami peningkatan dari sebesar Rp.125,068 miliar pada tahun 2017 menjadi sebesarRp.238,194 miliar pada tahun 2021 atau mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 37,64 persen. Untuk peningkatan realisasi PAD yang signifikan terjadi pada tahun 2020 sebesar 78,40 persen atau meningkat dari Rp.90,761 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp. 161,914 miliar pada tahun 2020. Sedangkan tingkat capaian kinerja PAD selama periode 2017-2021 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD pada periode tersebut secara rata-rata mencapai 75,01 persen dengan tingkat capaian kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 99,38 persen. Dengan

demikian, tingkat capaian kinerja untuk PAD Kabupaten Labuhanbatu relatif masih rendah dari target yang telah ditetapkan.

Realisasi capaian pendapatan asli daerah (PAD) tentunya tidak terlepas dari sumber-sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Labuhanbatu yang terdiri dari (a) Pajak Daerah,(b) Retribusi Daerah, (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan (d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Adapun struktur pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan persentase kontribusi masing-masing komponen PAD selama periode 2017-2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3. Kontribusi Komponen PAD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021

Komponen PAD	Kontribusi (%)					Rerata (%)
	2017	2017	2018	2019	2021	
Pajak Daerah	41,69	27,33	24,02	51,03	25,66	33,95
Retribusi Daerah	6,37	3,73	2,68	5,39	2,97	4,23
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18,83	9,62	5,37	17,88	5,09	11,36
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	33,11	59,32	67,93	25,70	66,29	50,47
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Labuhanbatu

Berdasarkan struktur pembentuk PAD menunjukkan bahwa penyumbang terbesar PAD Kabupaten Labuhanbatu adalah komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan kontribusi rata-rata sebesar 50,47 persenselama periode 2017-2021. Komponen lain yang berkontribusi besar terhadap PAD Kabupaten Labuhanbatu adalah Pajak Daerah dengan kontribusi rata-rata sebesar 33,95 persen dan diikuti oleh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 11,36 persen serta Retribusi Daerah sebesar 4,23 persen.

Secara umum, besarnya kontribusi setiap komponen PAD mengalami perkembangan yang fluktuatif.Oleh karena itu, optimalisasiPAD Kabupaten Labuhanbatudiharapkan terus meningkat sehingga struktur PAD semakin menguat.Penguatan PAD salah satunya dapat dilakukandengan optimalisasi penerimaan Pajak Daerah, dimana Pajak Daerah merupakan salah satu yang memiliki kontribusi paling dominan dalam struktur pembentuk PAD Kabupaten

Labuhanbatu. Berikut ini penjabaran masing-masing komponen PAD Kabupaten Labuhanbatu terkait perkembangan target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Labuhanbatu selama periode 2017-2021.

Tabel 3.4. Target dan Realisasi Pajak Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan (%)		Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	
2017	49.550.000.000	34.078.320.116	21,60	15,52	68,78
2018	49.550.000.000	39.170.455.045	0,00	14,94	79,05
2019	52.550.000.000	46.314.885.827	6,05	18,24	88,13
2020	57.700.000.000	41.544.340.012	9,80	-10,30	72,00
2021	113.830.121.950	114.555.278.697	97,28	175,74	100,64
Rata-Rata			26,95	42,83	81,72

Sumber : BPKAD Kabupaten Labuhanbatu

Untuk penerimaan pajak daerah Kabupaten Labuhanbatu periode 2017-2021, realisasinya cenderung meningkat dari Rp. 34,078 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp.114,555 miliar pada tahun 2021 dengan pertumbuhan rata-rata realisasi setiap tahunnya sebesar 42,83 persen. Sedangkan dari capaian kinerjanya menunjukkan tingkat kinerja yang cukup baik dengan rata-rata sebesar 81,72 persen dan untuk capaian kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 100,64 persen.

Selain pajak daerah, sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Labuhanbatu yang cukup strategis guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu adalah retribusi daerah. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi retribusi daerah Kabupaten Labuhanbatu selama periode 2017-2021.

Tabel 3.5. Target dan Realisasi Retribusi Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan (%)		Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	
2017	11.617.949.395	4.651.894.677	25,71	3,28	40,04
2018	11.617.949.395	4.560.767.247	0,00	-1,96	39,26
2019	9.170.131.200	4.889.803.515	-21,07	7,21	53,32
2020	9.170.131.200	4.802.651.684	0,00	-1,78	52,37

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan (%)		Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	
2021	9.225.131.200	5.660.133.871	0,60	17,85	61,36
Rata-Rata			1,05	4,92	49,27

Sumber : BPKAD Kabupaten Labuhanbatu

Berdasarkan data di atas memperlihatkan retribusi daerah memiliki kontribusi terkecil dalam struktur PAD Kabupaten Labuhanbatu dengan rata-rata kontribusi sebesar 1,05% selama periode 2017-2021. Tetapi perkembangan realisasi retribusi daerah selama periode tersebut mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,92 persen dan pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2021 yaitu mencapai 17,85 persen.Sementara itu, realisasi capaian kinerja untuk retribusi daerah Kabupaten Labuhanbatu cenderung rendah dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 49,27 persen. Untuk sumber PAD berikutnya adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dimana sumber PAD ini cukup penting dan berkontribusi nyata bagi pembangunan Kabupaten Labuhanbatu. Berikut ini adalah rincian perkembangan target dan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama periode 2017-2021 seperti pada tabel di bawah.

Tabel 3.6 Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan (%)		Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	
2017	11.988.317.788	11.988.317.788	-10,01	-10,01	100,00
2018	17.500.000.000	8.725.188.771	45,98	-27,22	49,86
2019	26.692.760.555	16.226.589.877	52,53	85,97	60,79
2020	10.440.288.000	8.242.333.014	-60,89	-49,20	78,95
2021	12.135.070.754	12.136.721.336	16,23	47,25	100,01
Rata-Rata			8,77	9,36	77,92

Sumber : BPKAD Kabupaten Labuhanbatu

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan salah satu sumber PAD yang berasal dari bagian laba hasil penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD) yang ada di Kabupaten Labuhanbatu.Oleh karena laba perusahaan bersifat terbatas dan tidak sedinamis pajak dan retribusi daerah, maka wajar apabila perkembangan sumber pendapatan ini

relatif lambat jika dibandingkan dengan sumber-sumber pendapatan lainnya. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memiliki persentase kontribusi yang cukup tinggi dibandingkan dengan komponen PAD yaitu Retribusi Daerah dengan rata-rata sebesar 8,77 persen selama 2017-2021.

Namun demikian, sampai dengan tahun 2021 realisasi pertumbuhan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memiliki perkembangan berfluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,36 persen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 85,97 persen. Begitupun rata-rata capaian kinerja untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mencapai 77,92 persen selama periode 2017-2021 dengan capaian kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2017 dan 2021 yaitu masing-masing sebesar 100 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasi capaian kinerja untuk sumber pendapatan ini pada tahun 2017 dan 2021 telah dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Untuk sumber PAD terakhir yang peranannya cukup penting dalam menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu adalah penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah dengan rincian target dan realisasi selama periode 2017-2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.7 Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan (%)		Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	
2017	91.321.740.900	74.349.491.794	22,68	217,35	81,41
2018	101.874.737.900	110.338.060.954	11,56	48,40	108,31
2019	151.906.045.000	23.330.087.225	49,11	-78,86	15,36
2020	148.559.045.000	107.325.522.047	-2,20	360,03	72,24
2021	104.500.000.000	105.842.081.489	-29,66	-1,38	101,28
Rata-Rata			10,30	109,11	75,72

Sumber : BPKAD Kabupaten Labuhanbatu

Untuk sumber penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah merupakan komponen PAD yang memiliki kontribusi terbesar. Besarnya rata-rata untuk kontribusi penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah adalah sebesar 10,30 persen selama periode 2016-2020. Selain itu, penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah juga memiliki realisasi rata-rata pertumbuhan yang cukup tinggi, yakni sebesar

109,11 persen dengan pertumbuhan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2020 sebesar 360,03 persen. Sedangkan dilihat dari realisasi capaian kinerja mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif dengan rata-rata capaian sebesar 75,72 persen selama periode 2017-2021. Untuk tingkat capaian kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan tingkat ketercapaian sebesar 108,31 persen, sedangkan capaian kinerja terendah terjadi pada tahun 2019, yakni sebesar 15,36 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja untuk penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah telah melampaui target yang telah ditetapkan dan memiliki kinerja yang sangat baik pada tahun 2018.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Untuk transfer Pemerintah Pusat terdiri dari dana perimbangan (dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus) serta dana desa. Sedangkan transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil pajak dan bantuan keuangan. Berikut ini adalah target dan realisasi pendapatan transfer Kabupaten Labuhanbatu selama kurun waktu 2017-2021 seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.8 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan (%)		Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	
2017	1.063.017.837.000	976.588.696.731	-9,45	-11,15	91,87
2018	1.036.704.209.000	977.245.311.794	-2,48	0,07	94,26
2019	1.127.043.031.908	1.012.228.495.149	8,71	3,58	89,81
2020	955.305.713.468	866.368.570.365	-15,24	-14,41	90,96
2021	1.036.240.365.193	1.025.053.249.700	8,47	18,32	98,92
Rata-Rata			-2,00	-0,72	93,16

Sumber : BPKAD Kabupaten Labuhanbatu

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan realisasi pendapatan transfer Kabupaten Labuhanbatu berfluktuasi selama periode 2017-2021 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -0,72 persen. Sedangkan rata-rata capaian kinerja untuk pendapatan transfer Kabupaten Labuhanbatu mencapai 93,16

persen dengan tingkat capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 98,92 persen.

Tabel 3.9. Realisasi dan Proporsi Pendapatan Transfer Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 - 2021

Tahun	Realisasi (Rp)			Proporsi (%)	
	Pendapatan Transfer	Transfer Pusat	Transfer Daerah	Pusat	Daerah
2017	976.588.696.731	908.583.176.239	68.005.520.492	93,04	6,96
2018	977.245.311.794	928.906.312.239	48.338.999.555	95,05	4,95
2019	1.012.228.495.149	925.148.005.724	87.080.489.425	91,40	8,60
2020	866.368.570.365	803.359.127.401	63.009.442.964	-13,16	-27,64
2021	1.025.053.249.700	953.988.763.895	953.988.763.895	92,73	7,84
Rerata				71,81	0,14

Sumber : BPKAD Kabupaten Labuhanbatu

Dilihat dari struktur pendapatan transfer Kabupaten Labuhanbatu, secara rata-rata pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah pusat masih cukup dominan dengan proporsi sebesar 71,81 persen. Sedangkan rata-rata proporsi pendapatan transfer dari pemerintah daerah (provinsi) hanya sekitar 0,14 persen selama periode 2017-2021. Adapun pendapatan transfer yang berasal dari transfer pemerintah pusat adalah Dana Perimbangan (DP) yang terdiri dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terbagi atas dua komponen utama yang meliputi Dana Transfer Umum, dan Dana Transfer Khusus. Untuk Dana Transfer Umum terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Sedangkan Dana Transfer Khusus terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi komponen transfer pemerintah pusat berupa dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu selama periode 2017-2021.

Tabel 3.10. Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan (%)		Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	
2017	956.517.837.000	908.583.176.239	-11,46	-9,64	94,99
2018	938.704.209.000	928.906.312.239	-1,86	2,24	98,96
2019	1.009.737.500.000	925.148.005.724	7,57	-0,40	91,62
2020	849.687.879.118	803.359.127.401	-15,85	-13,16	94,55
2021	881.762.948.193	879.511.346.895	3,77	9,48	99,74
Rata-Rata			-3,57	-2,30	95,97

Sumber : BPKAD Kabupaten Labuhanbatu

Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan yang memegang peranan penting dalam struktur pendapatan daerah di Kabupaten Labuhanbatu. Dari data di atas, realisasi dana perimbangan Kabupaten Labuhanbatu berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -2,30 persen. Untuk tahun 2017, realisasi pertumbuhan dana perimbangan menurun sebesar -9,64 persen dan terjadi penurunan pertumbuhan kembali pada tahun 2020 menjadi sebesar -13,160 persen namun terjadi kenaikan sebesar 9,48 persen pada tahun 2021. Sementara itu, realisasi capaian kinerja untuk dana perimbangan Kabupaten Labuhanbatu secara rata-rata sebesar 95,97% dan capaian kinerja tersebut belum melampaui target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.11. Realisasi dan Proporsi Dana Perimbangan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 - 2021

Tahun	Realisasi (milyar Rp)				Proporsi (%)		
	Dana Perimbangan	DBH	DAU	DAK	DBH	DAU	DAK
2017	908,583	47,660	684,408	176,514	5,25	75,33	19,43
2018	928,906	49,145	680,408	199,352	5,29	73,25	21,46
2019	925,148	41,210	686,644	197,293	4,45	74,22	21,33
2020	803,359	29,07	633,797	140,490	3,62	78,89	17,49
2021	879,511	81,45	638,234	159,82	9,261	72,567	18,17
Rata-Rata					5,57	74,85	19,58

Sumber : BPKAD Kabupaten Labuhanbatu

Berdasarkan struktur dana perimbangan, realisasi rata-rata Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki proporsi yang cukup besar hingga mencapai 74,85 persen dengan realisasi DAU tahun 2017 sebesar Rp.684,408 miliar dan menurun menjadi Rp.638,234 miliar pada tahun 2021. Untuk realisasi Dana

Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Labuhanbatu secara rata-rata memiliki proporsi sebesar 19,58 persen dan proporsi Dana Bagi Hasil (DBH) hanya sekitar 5,57 persen selama periode 2017-2021.

Tabel 3.12 Target dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan (%)		Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	
2017	106.500.000.000	68.005.520.492	22,53	-21,74	63,85
2018	98.000.000.000	48.338.999.555	-7,98	-28,92	49,33
2019	117.305.531.908	87.080.489.425	19,70	80,15	74,23
2020	105.617.834.350	63.009.442.964	-9,96	-27,64	59,66
2021	80.000.000.000	71.064.485.805	-24,26	12,78	88,83
Rata-Rata			0,01	2,93	67,18

Sumber : BPKAD Kabupaten Labuhanbatu

Pendapatan bagi hasil yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk realisasi pendapatan bagi hasil yang diterima Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu mengalami fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 2,93 persen selama periode 2017-2021.

Realisasi pertumbuhan tertinggi untuk pendapatan bagi hasil yang diterima Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu terjadi pada tahun 2019, yakni sebesar 80,15 persen atau meningkat dari Rp. 48,338 miliar tahun 2018 menjadi Rp. 87,080 miliar pada tahun 2019. Sedangkan dilihat dari realisasi capaian kinerjanya menunjukkan tingkat ketercapaian dengan rata-rata sebesar 67,18 persen dengan tingkat capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 88,83 persen dan untuk capaian terendah pada tahun 2018 sebesar 49,33 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja untuk pendapatan bagi hasil yang berasal dari pemerintah provinsi belum mencapai target yang diharapkan.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa sumber pendapatan daerah yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah

yang Sah meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, perkembangan target dan realisasi sumber Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah selama periode 2017-2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.13 Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan (%)		Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	
2017	62.819.282.000	63.034.175.150	0,93	20,84	100,34
2018	60.319.154.000	81.079.754.000	-3,98	28,63	134,42
2019	133.247.902.000	69.956.159.200	120,90	-13,72	52,50
2020	134.806.371.000	136.529.696.342	1,17	95,16	101,28
2021	87.492.784.000	78.859.238.425	-35,10	-42,24	90,13
Rata-Rata			16,78	17,73	95,73

Sumber : BPKAD Kabupaten Labuhanbatu

Untuk periode 2017-2021, realisasi rata-rata pertumbuhan untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 17,73 persen atau meningkat dari Rp.63,034 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp. 136,529 miliar pada tahun 2020 kemudian Rp.78,859 pada tahun 2021. Sedangkan untuk capaian kinerja menunjukkan kinerja yang cukup baik dan telah melampaui target yang direncanakan pada tahun 2017, tahun 2018 dan pada tahun 2020 dengan rata-rata tingkat ketercapaian sebesar 95,73 persen.

Terkait dengan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, salah satu sumber penerimaan tersebut adalah pendapatan hibah.Hibah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain,masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai catatan bahwa penerimaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sejak tahun 2019 dicatat sebagai penerimaan hibah Pemerintah Pusat sesuai ketentuan terkait pengelolaan keuangan daerah. Berikut ini

adalah perkembangan target dan realisasi pendapatan hibah yang diterima Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu selama periode 2017-2021.

Tabel 3.14 Target dan Realisasi Pendapatan Hibah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan (%)		Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	
2017	450.000.000	664.893.150	-95,59	-37,31	147,75
2018	0	0	-	-	-
2019	63.021.800.000	0	-	-	-
2020	63.434.200.000	65.269.670.000	0,65	100,00	102,89
2021	64.000.000.000	62.130.360.000	0,89	-4,81	97,08
Rata-Rata			-18,81	11,58	69,54

Sumber : BPKAD Kabupaten Labuhanbatu

Dari data di atas, realisasi pendapatan hibah BOS yang diterima Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu mengalami penurunan dari Rp. 65,269 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp. 62,130 miliar pada tahun 2021 sedangkan pada tahun 2018 hingga 2019 tidak ada realisasi atau secara rata-rata mengalami penurunan pertumbuhan sebesar -18,81 persen. Sedangkan untuk tingkat capaian kinerja menunjukkan pertumbuhan dengan rata-rata capaian sebesar 69,54 persen dan pada periode 2017 dan 2020, capaian kinerja untuk pendapatan hibah telah melampaui target yang telah ditetapkan.

Selain pendapatan hibah, untuk komponen lain yang masih menjadi sumber pendapatan daerah yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan lainnya yang merupakan penerimaan dana desa namun sejak tahun 2021 dicatat sebagai pendapatan transfer disamping itu juga pada tahun 2021 pendapatan kapitasi JKN juga dicatat pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi pendapatan lainnya yang diterima Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu selama periode 2017-2021.

Tabel 3.15 Target dan Realisasi Pendapatan Lainnya Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan (%)		Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	
2017	62.369.282.000	62.369.282.000	19,84	22,05	100,00
2018	60.319.154.000	81.079.754.000	-3,29	30,00	134,42

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan (%)		Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	
2019	70.226.102.000	69.956.159.200	16,42	-13,72	99,62
2020	71.372.171.000	71.260.026.342	1,63	1,86	99,84
2021	-	-	-	-	-
Rata-Rata			8,65	10,05	108,47

Sumber : BPKAD Kabupaten Labuhanbatu

Untuk periode 2017-2020, realisasi rata-rata pertumbuhan untuk pendapatan lainnya sebesar 10,05 persen atau meningkat dari Rp. 62,369 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp. 71,260 miliar pada tahun 2020. Sedangkan untuk capaian kinerja menunjukkan kinerja yang cukup baik dan telah melampaui target yang direncanakan pada tahun 2017 dan 2018 dengan rata-rata tingkat ketercapaian sebesar 108,47 persen.

B. Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan belanja daerah secara bertahap didasarkan pada anggaran berbasis kinerja dengan orientasi pada pencapaian hasil, dan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa belanja daerah diklasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Sedangkan belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

Sementara itu, belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Selanjutnya belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Analisis belanja daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan selama kurun waktu 2017-2021 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana Belanja Daerah dimasa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi untuk belanja daerah Kabupaten Labuhanbatu selama periode 2017-2021.

Tabel 3.16 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017 – 2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan (%)		Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	
2017	1.388.363.228.149	1.259.574.586.859	-0,24	10,19	90,72
2018	1.386.434.351.725	1.150.307.799.141	-0,14	-8,67	82,97
2019	1.579.560.837.215	1.220.904.687.351	13,93	6,14	77,29
2020	1.347.148.302.852	1.187.215.011.198	-14,71	-2,76	88,13
2021	1.377.938.913.408	1.266.143.502.119	2,29	6,65	91,89
Rata-Rata			0,23	2,31	86,20

Sumber : BPKAD Kabupaten Labuhanbatu

Berdasarkan data realisasi selama periode 2017-2021, rata-rata capaian kinerja untuk belanja daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu sebesar 86,20 persen dan tingkat capaian ini belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan masih adanya deviasi dari capaian realisasi belanja daerah dan besarnya deviasi capaian realisasi belanja tersebut perlu diperhatikan untuk setiap tahun anggaran. Ada beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan untuk meningkatkan realisasi belanja daerah, antara lain : 1).Dalam hal penentuan target yang perlu direncanakan dengan baik, misalnyaterkait capaian tahun sebelumnya, besarnya anggaran dan rencana alokasinya; serta 2). Dalam hal optimalisasi realisasibelanja daerah, khususnya untuk pelaksanaan program maupun kegiatan. Capaian yang baik adalah berada disekitar 100 persen yang mengindikasikan capaian kinerja yang optimal.

Sementara itu, ditinjau dari kontribusi setiap komponen pembentuknya,realisasi belanja daerah Kabupaten Labuhanbatu selama periode 2017-2021 masih didominasi untuk pemenuhan belanja operasi

dengan proporsi rata-rata sebesar 81,45 persen. Sedangkan realisasi belanja modal memiliki proporsi rata-rata sebesar 17,80 persen dan belanja tidak terduga sebesar 0,47 persen. Sementara itu, untuk belanja transfer selama periode 2017-2021 sebesar 0,27

Tabel 3.17. Proporsi Jenis Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 – 2021

Komponen Belanja Daerah	Proporsi (%)					Rerata (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	
Belanja Operasi	77,72	87,44	81,25	86,41	75,86	81,74
Belanja Modal	22,06	12,10	18,46	11,47	14,13	15,64
Belanja Tidak Terduga	0,10	0,12	0,12	1,91	2,77	1,00
Belanja Transfer	0,12	0,34	0,16	0,21	13,13	2,79
Total Belanja Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Labuhanbatu

Berdasarkan data tersebut, struktur pengalokasian belanja daerah di Kabupaten Labuhanbatu sebagian besar masih diarahkan untuk pemenuhan belanja aparatur, khususnya untuk kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan PNS serta belanja barang dan jasa. Sedangkan belanja modal yang memiliki *multiplier effect* dalam menggerakkan roda perekonomian daerah hanya memiliki proporsi rata-rata sebesar 15,64 persen selama periode 2017-2021. Oleh karena itu, dengan semakin tingginya rasio belanja modal terhadap total belanja daerah dapat menjadi indikasi positif terhadap upaya perbaikan kualitas struktur belanja daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Selanjutnya dilihat dari realisasi, belanja operasi setiap tahunnya mengalami pertumbuhan yang berfluktuatif dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -0,40 persen dan untuk belanja modal mengalami pertumbuhan dengan rata-rata sebesar -6,97 persen. Sedangkan belanja tidak terduga mengalami pertumbuhan yang positif dengan rata-rata sebesar 35,11 persen dan untuk belanja transfer mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan sampai dengan tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja tidak terduga dan belanja transfer mengalami perkembangan yang lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan belanja operasi dan belanja modal.

Tabel 3.18 Realisasi Jenis Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021

Komponen Belanja Daerah	Realisasi (milyar Rp)					Rerata Pert. (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	
Belanja Operasi	978,917	1.005,870	991,981	1.025,901	960,442	-0,40%
Belanja Modal	277,921	139,178	225,425	136,125	135,676	-6,97%
Belanja Tidak Terduga	1,203	1,360	1,494,	2,267	3,759	35,11%
Belanja Transfer	1,531	3,897	2,002	2,512	166,264	1662,54 %
Total Belanja Daerah	1.259,57	1.150,31	1.219,41	1.166,81	1.266,14	0,39%

Sumber : BPKAD Kabupaten Labuhanbatu

Terkait dengan realisasi belanja operasi, selama periode 2017-2021 masih didominasi oleh belanja pegawai dengan proporsi rata-rata sebesar 59,49 persen dan diikuti oleh belanja barang dan jasa dengan proporsi rata-rata sebesar 26,59 persen. Sementara itu, besarnya proporsi rata-rata belanja hibah sebesar 3,08 persen serta proporsi rata-rata untuk bantuan keuangan sebesar 10,67 persen. Sementara proporsi rata-rata untuk belanja bunga sebesar 0,00 persen.

Tabel 3.19 Realisasi Rata-Rata Pertumbuhan dan Proporsi Belanja Operasi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021

Komponen Belanja Operasi	Realisasi (milyar Rp)					Rerata Pert. (%)	Rerata Proporsi (%)
	2017	2018	2019	2020	2021		
Belanja Pegawai	583,529	612,089	582,484	585,673	589,896	0,33	59,49
Belanja Barang dan Jasa	236,968	242,525	230,968	252,586	353,769	11,75	26,59
Belanja Bunga	0,001	0	0	-	0	-0,90	0,00
Belanja Hibah	21,117	17,829	30,669	68,763	16,307	26,09	3,08
Belanja Bantuan Sosial	0,277	1,741	1,540	4,986	0,469	162,54	0,18
Belanja Bantuan Keuangan	137,023	131,684	146,319	118,379	0	-27,97	10,67
Total Belanja Operasi	978,92	1.005,87	991,98	1.030,39	960,44	9,31	100,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Labuhanbatu

Selanjutnya, dilihat dari komponen pertumbuhan belanja operasi, realisasi belanja bantuan sosial mengalami peningkatan tertinggi secara rata-rata selama periode 2017-2021 sebesar 162,54 persen. Sedangkan realisasi belanja hibah serta belanja barang dan jasa juga mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan masing-masing sebesar 26,09 persen dan 11,75 persen. Sementara itu, untuk belanja pegawai, belanja bunga dan belanja bantuan keuangan mengalami pertumbuhan negatif dengan rata-rata masing-masing sebesar 0,33 persen, 0,00 persen dan -27,97 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan belanja bantuan sosial masih lebih cepat dibandingkan dengan komponen belanja daerah lainnya.

Untuk belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Adapun komponen belanja modal meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya. Berikut ini adalah pertumbuhan dan proporsi untuk jenis belanja modal Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu selama periode 2017-2021.

Tabel 3.20 . Realisasi Rata-Rata Pertumbuhan dan Proporsi Jenis Belanja Modal Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021

Komponen Belanja Modal	Realisasi (milyar Rp)					Rerata Pert.(%)	Rerata Proporsi (%)
	2017	2018	2019	2020	2021		
Belanja Tanah	0	0	0,028	0	0	-	0,01
Belanja Peralatan dan Mesin	33,526	12,843	26,662	19,886	61,546	57,50	18,62
Belanja Bangunan dan Gedung	52,164	47,333	73,451	37,878	13,262	-25,17	24,59
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	190,216	77,668	122,594	48,114	51,249	-13,89	50,35
Belanja Aset Tetap Lainnya	2,013	1,332	2,688	30,246	9,618	256,25	6,44
Total Belanja Modal	277,92	139,18	225,42	136,12	135,68	68,67	100,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Labuhanbatu

Untuk realisasi jenis belanja modal, proporsi terbesar masih diperuntukan untuk belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dengan rata-rata sebesar 50,35 persen dan belanja modal gedung dan bangunan dengan proporsi rata-rata sebesar 24,59 persen. Sedangkan untuk belanja modal

peralatan dan mesin dengan proporsi rata-rata sebesar 18,62 persen dan proporsi belanja modal aset tetap lainnya sekitar 6,44 persen serta proporsi belanja modal tanah hanya sebesar 0,01 persen.

Sementara itu dilihat dari pertumbuhannya, jenis belanja modal untuk aset tetap lainnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari Rp.2,013 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp. 9,618 miliar pada tahun 2021 atau mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 256,25 persen. Begitupun untuk jenis belanja modal peralatan dan mesin mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama periode 2017-2021 dengan rata-rata tumbuh sebesar 57,50 persen sedangkan jenis belanja modal bangunan dan gedung serta belanja modal jalan, irigasi dan jaringan mengalami pertumbuhan rata-rata yang negatif selama periode 2017-2021 masing-masing sebesar sebesar -25,17 persen dan -13,89 persen.

C. Pembiayaan Daerah

Analisis pembiayaan daerah dilakukan sebagai bahan penentuan kebijakan pembiayaan di masa mendatang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Selain itu, analisis pembiayaan daerah digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah untuk mencukupi pembiayaan akibat selisih kebutuhan dan alokasi belanja. Adapun pembiayaan daerah tersebut terdiri dari:

1. Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Selisih Lebih Perhitungan (SiLPA) Anggaran Tahun Sebelumnya; Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya.
2. Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo; Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Pembentukan Dana Cadangan; Pemberian Pinjaman Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Lainnya.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayarkan kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan

adalah pengeluaran yang akan diterima kembalibaik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaranberikutnya.

Selanjutnya, untuk melihat perkembangan besarnya target dan realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Labuhanbatu selama periode 2017-2021 dapat ditunjukkan seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 3.21. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan (%)		Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	
2017	98.048.101.066	114.459.452.825	454,47	329,83	116,74
2018	108.868.301.430	18.784.429.603	11,04	-83,59	17,25
2019	78.950.966.552	79.650.966.552	-27,48	324,03	100,89
2020	31.166.754.184	30.945.450.546	-60,52	-61,15	99,29
2021	14.515.440.311	14.776.539.877	-53,43	-52,25	101,80
Rata-Rata			64,82	91,37	87,19

Sumber : BPKAD Kabupaten Labuhanbatu

Selama kurun waktu tahun 2017-2021, realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Labuhanbatu cenderung berfluktuasi dari Rp. 114,459 miliar pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp. 79,650 miliar pada tahun 2019 namun pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp.30,945 miliar atau secara rata-rata meningkat sebesar 91,37 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu belum sesuai harapan, dimana kemampuannya untuk menekan defisit anggaran yang semakin besar. Adapun realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Labuhanbatu yang mengalami peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2017 yang mencapai 329,83 persen dan sebesar 324,03 persen pada tahun 2019. Sedangkan dilihat dari realisasi capaian kinerja untuk pembiayaan daerah Kabupaten Labuhanbatu menunjukkan kinerja yang relatif baik selama periode 2017-2021 dengan tingkat capaian rata-rata sebesar 87,19 persen.

Tabel 3.22. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021 (Rp.).

Thn	Realisasi Pembiayaan (Rp)		Pertumbuhan (%)		Capaian Kinerja (%)	
	Penerimaan	Pengeluaran	Penerimaan	Pengeluaran	Penerimaan	Pengeluaran
2017	121.921.021.592	7.461.568.767	309,65	138,11	86,54	100,00
2018	18.784.429.603	0	-84,59	-100,00	17,25	0,00

Thn	Realisasi Pembiayaan (Rp)		Pertumbuhan (%)		Capaian Kinerja (%)	
	Penerimaan	Pengeluaran	Penerimaan	Pengeluaran	Penerimaan	Pengeluaran
2019	89.443.727.107	9.792.760.555	376,16	-	100,00	93,33
2020	31.545.450.546	600.000.000	-64,73	-93,87	98,69	100,00
2021	21.529.972.377	6.753.432.500	-31,75	1026	68,25	1125,57
Rata-Rata			100,94	194,04	74,15	283,78

Sumber : BPKAD Kabupaten Labuhanbatu

Selanjutnya, dilihat dari realisasi pertumbuhan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Labuhanbatu menunjukkan perkembangan yang positif, yakni rata-rata tumbuh sebesar 100,94 persen. Dimana pertumbuhan penerimaan pembiayaan masih lebih rendah dari pertumbuhan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Labuhanbatu yang rata-rata tumbuh sebesar 194,04 persen. Kondisi menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pembiayaan lebih tinggi dibandingkan peningkatan pengeluaran pembiayaan di Kabupaten Labuhanbatu.

Sementara itu dilihat dari realisasi capaian kinerja, selama periode 2017-2021 penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Labuhanbatu memiliki kinerja yang cukup baik. Kondisi ini ditunjukkan dengan rata-rata tingkat capaian kinerja untuk penerimaan pembiayaan daerah yang mencapai 74,15 persen. Sedangkan untuk realisasi pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Labuhanbatu mengalami kenaikan signifikan dari target yang direncanakan dengan tingkat capaian kinerja secara rata-rata sebesar 283,78 persen. Terkait dengan pembiayaan daerah, berikut ini adalah realisasi rincian pembiayaan daerah Kabupaten Labuhanbatu selama periode 2017-2021.

Tabel 3.23. Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Realisasi (milyar Rp)				
		2017	2018	2019	2020	2021
PEMBIAYAAN DAERAH						
A.	Penerimaan Pembiayaan	121,921	18,784	89,443	31,545	21,529
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	121,921	18,443	89,443	31,338	21,529
2.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0,206	0
B.	Pengeluaran Pembiayaan	7,461	0	9,792	0,600	6,753

No.	Uraian	Realisasi (milyar Rp)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5,916	9,192	9,192	0	6,160
2.	Pembayaran Pokok Utang	0,044	0,600	0,600	0,600	0,593
3.	Pemberian Pinjaman Daerah	1,500	0	0	0	0
C.	Pembiayaan Netto	114,459	18,784	79,650	30,945	14,776
D.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	19,575	89,596	31,692	8,543	90,739

Sumber : BPKAD Kabupaten Labuhanbatu

Pembiayaan netto merupakan selisih penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Nominal pembiayaan netto yang positif menunjukkan bahwa daerah mampu mencukupi pengeluaran pembiayaan dikarenakan penerimaan pembiayaan yang lebih besar. Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Labuhanbatu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran pembiayaan. Pada tahun 2017, besarnya SiLPA di Kabupaten Labuhanbatu mencapai Rp. 121,921 miliar dan menjadi Rp. 21,529 miliar pada tahun 2021.

Berdasarkan data di atas, besarnya SiLPA yang dihasilkan menunjukkan masih belum maksimalnya penyerapan belanja daerah. Untuk itu diharapkan pada masa yang akan datang, besarnya SiLPA akan semakin rasional dan terukur dengan semakin membaiknya penyerapan anggaran belanja daerah yang lebih efektif dan efisien.

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan di Kabupaten Labuhanbatu terdiri dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo dan Pemberian Pinjaman Daerah. Penyertaan Modal (Investasi) memegang porsi yang paling besar dalam pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Labuhanbatu selama periode 2017-2021. Untuk tahun 2017, besarnya penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu sebesar Rp. 5,916 miliar dan meningkat menjadi Rp. 6,160 miliar pada tahun 2021.

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Belanja Daerah digunakan dalam mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang

ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini, belanja penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan dan penyediaan infrastruktur berupa fasilitas sosial serta fasilitas umum yang layak.

Analisis belanja dilakukan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan belanja dan pengeluaran pembiayaan pada masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis belanja yang dilakukan mencakup:

- 1. Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur;
- 2. Analisis Pembiayaan.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 3.5. Belanja pemenuhan kebutuhan aparatur diperhitungkan dari belanja gaji dan tunjangan pegawai dan DPRD, iuran BPJS, iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), Belanja Pegawai BLUD serta Tambahan Penghasilan dan Tunjangan Profesi Guru yang pendapatannya berasal dari DAK Non Fisik. Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.24 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021

URAIAN	Realisasi (Rp. Juta)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Total Belanja Pegawai	583,529	612,089	582,484	537.098	589,896
Total Pengeluaran (Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan)	1.267,04	1.150,31	1.230,70	1.347,748	1.272,896

URAIAN	Realisasi(Rp.Juta)				
	2017	2018	2019	2020	2021
ProporsiBelanjaAparatur	46,05%	53,21%	47,32%	39,85%	46,34%

Sumber : BPKAD Kabupaten Labuhanbatu, 2021

Dari tabel dapat dilihat bahwa belanja pegawai lima tahun terakhir berfluktuasi dimana pada tahun 2017 sebesar Rp.583,529 milyar,- dan pada tahun 2021 menjadi Rp.589,896 milyar.Secara proporsi juga berfluktuasi dimana pada tahun 2017 proporsi belanja pegawai sebesar 46,05%, dan tahun 2021 menjadi 46,34%.

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari :Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sedangkan Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari: Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah.Penerimaan Pembiayaan digunakan untuk menutup defisit yang meliputi selisih pendapatan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah. Defisit anggaran tahun 2017- 2021 terlihat pada tabel 3.6 dibawah ini:

Tabel 3.25. Defisit AnggaranKabupaten Labuhanbatu Tahun2017-2021

No.	Uraian	Realisasi Tahun (Rp. Juta)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	PendapatanDaerah	1.164.296,89	1.221.119,54	1.318.715,11	933.747,77	1.342,106
	Dikurangi Realisasi :					
2	BelanjaDaerah	1.259.797,17	1.150.307,80	1.367.519,97	945.701,76	1.266,143
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	7.461,57	0,00	9.792,76	600,00	6,753
	Surplus/Defisitriil	-102.961,85	70.811,74	-58.597,62	-12.553,99	69,210

Sumber : BPKADKabupatenLabuhanbatu, 2021

Dari Tabel 3.6 terlihat bahwa pada tahun 2017, 2019 dan 2020 terdapat defisit, namun pada tahun 2018 dan 2021 terjadi surplus anggaran.

Selanjutnya Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017, 2019 dan 2020 tersebut ditutup dengan penerimaan pembiayaan daerah yang berasal dari Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dengan komposisi sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 3.7 berikut:

Tabel 3.26. Komposisi Penutup Defisit Anggaran Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	Proporsi Dari Total Defisit Anggaran (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Penggunaan SiLPA	120,847	surplus	89,892	31,766	surplus
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	394	surplus	472	0,00	surplus

Sumber: BPKAD Kabupaten Labuhanbatu, 2021

3.3 KERANGKA PENDANAAN

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama serta program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. Lebih lanjut kapasitas keuangan daerah dapat menggambarkan seberapa besar tingkat kemandirian Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah serta melaksanakan tugas-tugas pembantuan sesuai prinsip otonomi daerah. Dalam rangka mendanai kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa mendatang, berikut ini adalah beberapa kebijakan yang terkait dengan peningkatan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah.

3.3.1. Proyeksi Keuangan Daerah

3.3.3.1 Proyeksi Pendapatan Daerah

Pada tahun 2020 telah ditetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid 19. Kebijakan tersebut berdampak pada

pembatasan aktivitas perekonomian masyarakat, terjadinya pemutusan hubungan kerja yang mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat. Disamping itu terdapat kebijakan pemerintah pusat yang mengarahkan penggunaan anggaran belanja daerah fokus kepada penanganan Pandemi Covid19 dan dampaknya melalui refocusing dan realokasi anggaran. Tentu hal tersebut sangat mempengaruhi dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah dengan masih mempertimbangkan dampak atas Pandemi Covid-19.

Pendapatan Daerah untuk tahun 2021-2026 diproyeksikan mengalami kenaikan setiap tahunnya dan rata-rata pertumbuhannya sebesar 1,44 persen, untuk tahun 2021 sebesar Rp. 1.308.215.420.200,- dan di akhir periode RPJMD 2021-2026 menjadi Rp. 1.381.706.867.000,-. Dari tiga komponen pendapatan daerah yang diproyeksikan naik adalah PAD dan Pendapatan Transfer sedang untuk Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diasumsikan berkurang, hal ini disebabkan bahwa pendapatan hibah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak lagi sebagai penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah karena Dana BOS merupakan penerimaan Dana DAK Non Fisik sesuai kebijakan Pemerintah Pusat demikian juga halnya dengan Dana Desa.

Untuk proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan memperhatikan rata-rata pertumbuhan realisasi tahun 2017 – 2021 dan kondisi sosial ekonomi atas dampak pandemi Covid-19 sebagai dasar perkiraan masing-masing potensi ayat penerimaan. Pendapatan Asli Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perhitungan proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2021-2026 diproyeksi akan mengalami kenaikan sebesar 0,99 persen. Tahun 2021 PAD diproyeksi sebesar Rp. 211.905.419.200,- dan setiap tahunnya diproyeksi berfluktuasi sampai dengan tahun 2026 sebesar Rp. 203.465.131.200,-. Dari komponen PAD yang diproyeksi mengalami rata-rata pertumbuhan tinggi pada pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar 1,48 persen dimana pada tahun 2021 diproyeksi sebesar Rp. 13.940.288.000,- dan diproyeksi terus mengalami kenaikan sampai tahun 2026 sebesar Rp. 15.000.000.000,-. Hal ini memperhitungkan kenaikan jumlah deviden yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu sejalan

dengan pertambahan jumlah penyertaan modal (investasi) daerah pada PT. Bank Sumut. Pada tahun 2022 realisasi Lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan yang disebabkan bahwa ayat penerimaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP tidak lagi dicatat sebagai penerimaan pada Lain-lain PAD yang Sah akan tetapi dicatat sebagai pendapatan DAK Non Fisik sesuai kebijakan Pemerintah Pusat. Sedangkan target penerimaan sektor pajak dan retribusi daerah secara umum diproyeksikan sama setiap tahunnya berdasarkan realisasi dan data potensi masing-masing ayat penerimaan.

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan struktur Pendapatan Transfer pada APBD. Yang semula (menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005) Dana Transfer terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, berubah menjadi Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah (menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019). Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan sedangkan Transfer Antar Daerah berasal dari Dana Bagi hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat atau Dana Perimbangan setiap tahunnya diproyeksikan naik yang terdiri dari; Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan rata-rata sebesar 3,00 persen yang diproyeksikan berdasarkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional di kisaran 3% sampai dengan 5% yang tentunya akan mempengaruhi Penerimaan Dalam Negeri Bruto sebagai dasar perhitungan transfer ke daerah dan Dana Desa. Penerimaan pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya yaitu Dana Desa diproyeksikan sama dengan tahun-tahun sebelumnya yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat. Sedangkan Pendapatan transfer Antar Daerah yang merupakan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Sumatera Utara diproyeksikan rata-rata meningkat sebesar 1,22 persen dimana pada tahun 2021 ditetapkan target sebesar Rp.80.000.000.000,- dan pada tahun 2026 menjadi sebesar Rp.81.000.000.000,-.

Proyeksi pendapatan daerah pada tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.27 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 s.d 2026

URAIAN	PROYEKSI (Rp.)						Rata-rata Pert.
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
PENDAPATAN	1.308.215.420.200	1.333.954.232.200	1.319.589.643.660	1.349.359.053.854	1.379.556.046.220	1.411.210.923.217	4,44%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	211.905.419.200	254.195.419.200	202.465.131.200	202.965.131.200	202.965.131.200	203.465.131.200	0,99%
Pendapatan Pajak Daerah	69.240.000.000	126.030.000.000	69.240.000.000	69.240.000.000	69.240.000.000	69.240.000.000	1,09%
Hasil Retribusi Daerah	9.225.131.200	9.225.131.200	9.225.131.200	9.225.131.200	9.225.131.200	9.225.131.200	0,00%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.940.288.000	13.940.288.000	14.000.000.000	14.500.000.000	14.500.000.000	15.000.000.000	1,48%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	119.500.000.000	105.000.000.000	110.000.000.000	110.000.000.000	110.000.000.000	110.000.000.000	0,97%
PENDAPATAN TRANSFER	1.032.310.001.000	1.061.958.813.000	1.102.124.512.460	1.131.393.922.654	1.161.590.915.020	1.192.745.792.017	1,01%
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	952.310.001.000	981.958.813.000	1.017.124.512.460	1.046.393.922.654	1.076.590.915.020	1.107.745.792.017	1,01%
Bagi Hasil Pajak	32.152.920.000	41.989.304.000	44.088.769.200	46.293.207.660	48.607.868.043	51.038.261.445	4,00%
Bagi Hasil Sumber Daya Alam	3.914.030.000	5.153.426.000	5.411.097.300	5.681.652.165	5.965.734.773	6.264.021.512	4,00%
Dana Alokasi Umum	659.351.692.000	638.234.403.000	657.381.435.090	677.102.878.143	697.415.964.487	718.338.443.422	2,00%
Dana Alokasi Khusus	182.413.942.000	228.898.829.000	235.765.793.870	242.838.767.686	250.123.930.717	257.627.648.638	3,00%
Dana Desa	74.477.417.000	67.682.851.000	74.477.417.000	74.477.417.000	74.477.417.000	74.477.417.000	1,00%
Transfer Pemerintah Provinsi	80.000.000.000	80.000.000.000	85.000.000.000	85.000.000.000	85.000.000.000	85.000.000.000	1,22%
Dana Bagi hasil Pajak dari Propinsi	80.000.000.000	80.000.000.000	85.000.000.000	85.000.000.000	85.000.000.000	85.000.000.000	1,22%
Bantuan Keuangan Provinsi	0	0	0	0	0	0	0,00%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	64.000.000.000	17.800.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	-25,19%
Pendapatan Hibah	64.000.000.000	2.800.000.000	0	0	0	0	0,00%
Dana Kapitasi JKN FKTP	0	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	0,00%

Masih menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, salah satu unsur pendapatan daerah adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Hibah yang merupakan penerimaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang pada tahun 2022 tidak lagi dicatat sebagai penerimaan pada Lain-lain Pendapatan Daerah karena merupakan penerimaan DAK Non Fisik. Pada tahun 2022 penerimaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP dicatat sebagai pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang sebelumnya dicatat pada Lain-lain PAD yang Sah. Dengan demikian target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2021-2026 diproyeksikan rata-rata turun sebesar 25,19 persen.

Komponen pendapatan yang diproyeksikan berkontribusi paling besar secara rupiah adalah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat atau Dana Perimbangan. Seperti yang terlihat pada tabel 3.8, walaupun Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan meningkat setiap tahunnya tetapi kontribusi Pendapatan Asli Daerah masih relatif lebih kecil dari Pendapatan Transfer Pemerintah. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada masa yang akan datang, beberapa upaya dan langkah akan ditempuh oleh pemerintah daerah Kabupaten labuhanbatu, antara lain sebagai berikut:

- a) Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
- b) Peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah melalui sosialisasi regulasi pajak dan retribusi daerah kepada masyarakat.
- c) Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- d) Penggunaan Teknologi Informasi dan aplikasi *mobile* secara *online* dan *penggunaan platform uang digital* dalam memberikan kemudahan pembayaran pajak dan retribusi bagi masyarakat termasuk penyediaan *payment point*.
- e) Menaikkan pajak melalui peningkatan/penyesuaian tarif dan perluasan subyek dan obyek pajak dengan meninjau ulang beberapa ketentuan perda tentang pajak dan retribusi daerah.
- f) Pemantapan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah.
- g) Peningkatan kualitas dan optimalisasi pengelolaan aset untuk peningkatan pendapatan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
- h) Penerapan dan penegakkan ketentuan hukum bagi wajib pajak/retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya dan pemberian penghargaan kepada

wajib pajak/ retribusi yang telah memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan.

- i) Peningkatan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi serta SKPD penghasil.
- j) Revitalisasi dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah agar kedepan dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah.
- k) Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Daerah dicantumkan dalam APBD sebagai jenis pendapatan Lain-lain PAD yang Sah.

Dalam upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah, kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut :

- a) Mengoptimalkan penerimaan pajak pusat yang dapat di *sharing* dengan daerah guna meningkatkan bagian dari bagi hasil pajak.
- b) Mengupayakan penyempian persyaratan pendukung penyaluran pendapatan transfer pemerintah pusat.
- c) Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- d) Meningkatkan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah.
- e) Meningkatkan upaya penggalangan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN/PHLN dan APBD Provinsi.
- f) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam pelaksanaan Dana Transfer.

3.3.3.2 Proyeksi Belanja Daerah

Belanja Daerah untuk tahun 2021-2026 diproyeksikan mengalami kenaikan setiap tahunnya dan rata-rata pertumbuhannya sebesar 1,00 persen, untuk tahun 2021 sebesar Rp. 1.352.721.197.188,00,- dan di akhir periode RPJMD 2021-2026 menjadi Rp. 1.381.706.867.000,-. Proyeksi belanja daerah Kabupaten labuhanbatu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Belanja Operasi diproyeksikan naik setiap tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,00 persen dengan perincian:

- a. Rata-rata pertumbuhan belanja pegawai sebesar 1,02 persen per tahun, dengan asumsi bahwa adanya peningkatan jumlah pegawai atau ASN dan kenaikan gaji ASN (PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Kenaikan ini juga sudah memperhitungkan proyeksi kenaikan belanja pegawai pada BLUD.
 - b. Belanja barang dan jasa diasumsikan naik rata-rata sebesar 0,97 persen per tahun yang diprediksikan akan digunakan untuk menyikapi kenaikan-kenaikan tarif listrik dan kebijakan pemerintah seperti jaminan kesehatan menuju *Universal Health Coverage*. Namun demikian kenaikan Belanja Barang dan Jasa tidak linier setiap tahun karena terjadi penurunan pada tahun 2024 disebabkan pengalokasian anggaran belanja hibah yang cukup besar untuk pelaksanaan Pilkada Tahun 2024. Sehingga perlu pencermatan dalam penganggaran di setiap tahun anggaran.
 - c. Proyeksi belanja hibah dialokasikan rata-rata sama setiap tahun sebesar 7,04 persen pertahun kecuali untuk tahun 2024 dikarenakan terdapat alokasi belanja hibah untuk pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun 2024. Terkait dengan belanja hibah Pilkada dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah sudah termasuk belanja hibah BOP PAUD dan BO Kesetaraan serta belanja hibah kepada partai politik kecuali lain ditentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 - d. Proyeksi belanja bantuan sosial mulai tahun 2022 disumsikan tetap per tahunnya sampai dengan tahun 2026, yaitu sebesar Rp.4.500.000.000,-
- 2) Belanja modal diproyeksikan naik dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,01 persen.
 - 3) Belanja Tak Terduga sejak tahun 2023 diasumsikan tetap yaitu sebesar Rp. 5.000.000.000,-/tahun. Namun demikian besaran alokasi Belanja Tidak Terduga dilaksanakan sesuai kebijakan Pemerintah Pusat terkait penanganan pandemi Covid19 dan dampaknya sebagaimana alokasi Belanja Tidak Terduga pada tahun 2022 yang dialokasikan sebesar Rp.50.000.000.000,- sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor

910/4350/SJ tanggal 16 Agustus 2021 tentang Kebijakan Dalam Penyusunan APBD TA.2022 Untuk Penanganan COVID-19.
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu pada Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.28 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 s.d 2026

URAIAN	PROYEKSI (Rp. Miliar)						Rata-rata Pertumb uhan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
BELANJA	1.352.721.197.188,00	1.349.697.945.700,00	1.334.589.643.660,00	1.364.359.053.853,80	1.394.556.046.219,91	1.426.210.923.216,84	1,00%
BELANJA OPERASI	1.040.257.345.733	990.356.665.400	1.010.569.079.360	1.038.788.489.554	1.056.434.780.550	1.083.314.171.772	1,00%
Belanja Pegawai	626.020.564.962	638.934.780.550	638.934.780.550	638.934.780.550	638.934.780.550	664.492.171.772	1,02%
Belanja Barang dan Jasa	395.153.780.771	324.924.534.850	339.134.298.810	335.353.709.004	390.000.000.000	390.322.000.000	0,97%
Belanja Hibah	17.083.000.000	21.997.350.000	28.000.000.000	60.000.000.000	23.000.000.000	24.000.000.000	7,04%
Belanja Bantuan Sosial	2.000.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	1,31%
BELANJA MODAL	160.944.570.255	168.320.716.000	178.000.000.000	179.550.000.000	192.100.701.370	196.876.187.145	1,01%
BELANJA TAK TERDUGA	3.000.000.000	50.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	10,76%
BELANJA TRANSFER	148.519.281.200	141.020.564.300	141.020.564.300	141.020.564.300	141.020.564.300	141.020.564.300	-1,03%

3.3.3.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah untuk tahun 2021-2026 diproyeksikan berfluktuasi dengan penurunan rata-rata sebesar 19,55 persen pertahun. Berkaitan dengan peningkatan kinerja pemerintahan, penerimaan pembiayaan yang berasal dari Silpa tahun 2021 sampai 2026 ditargetkan turun sebesar 15,92 persen pertahun. Selengkapnya proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 ditunjukkan dalam Tabel 3.10 berikut.

Tabel 3.29 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 s.d 2026

URAIAN	PROYEKSI (Rp.)						Rata-rata Pertumb uhan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
PEMBIAYAAN	44.505.776.988	15.743.713.500	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	-19,55%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	47.599.209.488	20.743.713.500	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	-15,92%
Penggunaan SiLPA	47.599.209.488	20.743.713.500	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	-15,92%
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.093.432.500	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	10,08%
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	2.500.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	14,87%
Pembayaran Pokok Pinjaman	593.432.500	-	-	-	-	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : BPKAD Kab. Labuhanbatu, 2021 (diolah)

3.3.2 Analisis Pengeluaran Priodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama merupakan kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten labuhanbatu. Pengeluaran tersebut merupakan komponen belanja operasi, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Belanja Operasi
- Pada pos belanja operasi, pengeluaran periodik wajib dan mengikat meliputi:
- a. Belanja Pegawai, terdiri dari belanja gaji dan tunjangan ASN dan DPRD termasuk iuran BPJS, iuran JKK/JKM serta Tunjangan Profesi dan Tambahan Penghasilan Guru.

b. Belanja Barang dan Jasa, terdiri dari belanja telepon, belanja air, belanja listrik, belanja internet dan belanja premi BPJS Kesehatan bagi warga tidak mampu dan BPJS tenaga kontrak serta pengeluaran lainnya untuk kelangsungan operasional kantor.

c. Belanja Hibah terdiri dari hibah Pilkada, Hibah BOP PAUD dan BO Kesetaraan serta Hibah kepada Partai Politik.
- 2) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya seperti Bencana Alam/Non Alam.

3) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat meliputi setoran modal kepada BUMD PT. Bank Sumut sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam rangka pemenuhan rasio kecukupan modal perseroan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten labuhanbatu Tahun 2021-2026 ditunjukkan Tabel 3.11 berikut.

Tabel 3.30 Proyeksi Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026

No.	Uraian	PROYEKSI (Rp.)						Rata-rata Pertumb
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
A	Belanja Operasi	712.751.321.116,20	711.619.687.520,00	712.461.640.312,00	763.705.522.350,76	724.634.780.550,00	750.256.571.772,00	6,21%
1	Belanja Pegawai	626.020.564.962,00	638.934.780.550,00	638.934.780.550,00	638.934.780.550,00	638.934.780.550,00	664.492.171.772,00	1,20%
2	Belanja Barang dan Jasa	79.030.756.154,20	64.984.906.970,00	67.826.859.762,00	67.070.741.800,76	78.000.000.000,00	78.064.400.000,00	-0,25%
3	Hibah	7.700.000.000	7.700.000.000	5.700.000.000	57.700.000.000	7.700.000.000	7.700.000.000	0,00%
B	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	10,76%
4	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	10,76%
C	Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	10,76%
5	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	10,76%
Jumlah		718.751.321.116,20	721.619.687.520,00	722.461.640.312,00	773.705.522.350,76	734.634.780.550,00	760.256.571.772,00	

Sumber: BPKAD Labuhanbatu, 2021

3.1.1. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Dari uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai program kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan (2021-2026) dapat dilihat pada tabel 3.31 dibawah ini.

Tabel 3.31 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026

URAIAN	PROYEKSI (Rp.)					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pendapatan	1.308.215.420.200	1.333.954.232.200	1.319.589.643.660	1.349.359.053.854	1.379.556.046.220	1.411.210.923.217
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	47.599.209.488	20.743.713.500	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
Total Penerimaan	1.355.814.629.688	1.354.697.945.700	1.339.589.643.660	1.369.359.053.854	1.399.556.046.220	1.431.210.923.217
DIKURANGI						
Belanja Wajib Mengikat	718.751.321.116	721.619.687.520	722.461.640.312	773.705.522.351	734.634.780.550	760.256.571.772
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	637.063.308.572	633.078.258.180	617.128.003.348	595.653.531.503	664.921.265.670	670.954.351.445

3.1.1.1 Proyeksi Pendanaan

Dalam hal ini proyeksi pendapatan dilakukan berdasarkan pertumbuhan rata-rata pendapatan selama lima tahun dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Proyeksi pendapatan ini menggambarkan perkiraan rata-rata pertumbuhan pendapatan selama lima tahun (2021-2026). Namun demikian, proyeksi pendapatan ini merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat indikatif sepanjang faktor-faktor penghitungnya atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan.

Berdasarkan tabel analisa diatas, diperoleh rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun kedepan, dengan menggunakan tabel berikut :

Tabel. 3.32. Rencana Alokasi Pagu Indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 s/d 2026

No.	Nama Perangkat Daerah	Pagu Indikatif RPJMD				
		2022	2023	2025	2025	2026
1	Dinas Pendidikan	351,445,537,000	352,545,537,000	353,630,537,000	353,705,537,000	355,755,537,000

No.	Nama Perangkat Daerah	Pagu Indikatif RPJMD				
		2022	2023	2025	2025	2026
2	Dinas Kesehatan	133,396,656,000	134,523,627,000	136,454,415,000	138,489,124,000	140,027,873,000
3	Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat	139,506,717,000	140,506,717,000	140,906,717,000	142,506,717,000	144,506,717,000
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	125,585,698,000	126,549,458,000	127,521,125,000	128,530,794,000	129,559,552,000
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	12,833,924,000	12,990,485,000	13,313,263,000	13,514,453,000	13,518,476,000
6	Satuan Polisi Pamong Praja	15,129,000,000	15,151,002,000	15,263,364,000	16,166,098,000	16,279,213,000
7	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah	7,635,851,000	7,899,365,000	7,809,365,000	8,199,365,000	8,499,365,000
8	Dinas Sosial	4,534,264,000	4,634,264,000	4,734,264,000	4,775,822,000	5,034,264,000
9	Dinas Tenaga Kerja	3,828,054,000	3,928,054,000	3,908,054,000	4,128,054,000	4,128,054,000
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4,361,613,000	4,461,613,000	4,561,613,000	4,661,613,000	4,761,613,000
11	Dinas Pangan	5,518,259,000	5,622,507,000	5,672,507,000	5,702,507,000	5,802,507,000
12	Dinas Pertanahan	3,762,787,000	3,865,787,000	3,890,377,000	3,901,922,000	3,911,922,000
13	Dinas Lingkungan Hidup	13,702,978,000	12,628,049,000	12,728,199,000	12,828,353,000	12,928,512,000
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6,824,630,000	6,901,987,000	6,927,077,000	6,972,317,000	6,997,716,000
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7,252,843,000	5,667,238,000	5,677,238,000	5,707,238,000	5,737,238,000
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9,509,681,000	9,529,681,000	9,539,681,000	9,549,681,000	9,559,681,000
17	Dinas Perhubungan	9,831,636,000	9,861,636,000	9,871,636,000	9,931,636,000	9,961,636,000
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	9,007,703,000	7,851,554,000	7,984,700,000	8,120,491,000	8,244,005,000
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	5,221,040,000	5,311,040,000	5,341,040,000	5,351,040,000	5,471,040,000
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	4,862,748,000	4,982,748,000	5,002,748,000	5,032,748,000	5,062,748,000

No.	Nama Perangkat Daerah	Pagu Indikatif RPJMD				
		2022	2023	2025	2025	2026
	Terpadu Satu Pintu					
21	Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	8,678,049,000	8,438,179,000	8,488,179,000	8,508,179,000	8,548,179,000
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3,836,064,000	3,858,900,000	3,881,714,000	3,891,714,000	3,911,714,000
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	4,518,153,000	4,568,153,000	4,588,153,000	4,608,153,000	4,618,153,000
24	Dinas Pertanian	11,989,841,000	12,189,841,000	12,289,841,000	12,389,841,000	12,489,841,000
25	Dinas Peternakan	4,976,443,000	5,047,943,000	5,077,943,000	5,087,943,000	5,097,943,000
26	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	13,293,904,000	11,823,904,000	11,833,904,000	11,873,904,000	11,893,904,000
27	Sekretariat Daerah Kabupaten	53,859,240,000	54,859,240,000	55,859,240,000	56,859,240,000	57,859,240,000
28	Sekretariat DPRD Kabupaten	75,146,481,000	76,146,481,000	77,146,481,000	78,146,481,000	78,846,481,000
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7,584,440,000	7,634,440,000	7,664,440,000	7,674,440,000	7,684,440,000
30	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	188,195,856,000	190,417,398,000	191,958,196,000	193,500,218,000	195,043,500,000
31	Badan Pendapatan Daerah	27,605,778,000	28,205,778,000	28,335,778,000	28,645,778,000	28,765,778,000
32	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	7,918,169,000	7,923,169,000	7,938,169,000	7,948,169,000	7,958,169,000
33	Badan Penelitian dan Pengembangan	4,198,597,000	4,248,597,000	4,258,597,000	4,288,597,000	4,298,597,000
34	Inspektorat Daerah Kabupaten	9,809,379,000	9,909,379,000	10,009,379,000	10,109,379,000	10,209,379,000
35	Kecamatan Bilah Hulu	3,360,317,000	3,410,317,000	3,420,317,000	3,460,317,000	3,490,317,000
36	Kecamatan Bilah Barat	2,549,343,000	2,554,343,000	2,569,343,000	2,579,343,000	2,589,343,000
37	Kecamatan Bilah Hilir	3,327,909,000	3,347,909,000	3,357,909,000	3,362,909,000	3,462,909,000
38	Kecamatan Pangkatan	3,462,468,000	1,762,079,000	1,767,079,000	1,817,079,000	1,857,079,000
39	Kecamatan Panai Hulu	2,041,233,000	2,061,233,000	2,071,233,000	2,091,233,000	2,101,233,000
40	Kecamatan Panai Tengah	3,122,699,000	3,142,699,000	3,152,699,000	3,162,699,000	3,172,699,000
41	Kecamatan Panai Hilir	2,297,292,000	2,303,292,000	2,307,292,000	2,314,292,000	2,317,292,000
42	Kecamatan Rantau Utara	12,075,408,000	12,125,408,000	12,175,408,000	12,225,408,000	12,235,408,000
43	Kecamatan Rantau Selatan	9,822,095,000	9,922,095,000	10,024,095,000	10,122,095,000	10,222,095,000

No.	Nama Perangkat Daerah	Pagu Indikatif RPJMD				
		2022	2023	2025	2025	2026
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4,775,505,000	7,243,505,000	7,245,505,000	7,275,505,000	7,285,505,000
J U M L A H		1,342,196,282,000	1,348,556,631,000	1,358,158,814,000	1,369,718,426,000	1,381,706,867,000

Tabel. 3.33. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 s/d 2026

NO	URAIAN	PROYEKSI					
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
I	Kapasitas riil kemampuan keuangan	637.063.308.572	633.078.258.180	617.128.003.348	595.653.531.503	664.921.265.670	670.954.351.445
	Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I						
a.	Belanja Operasi	1.040.257.345.733	990.356.665.400	1.010.569.079.360	1.038.788.489.554	1.056.434.780.550	1.083.314.171.772
b.	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
	Dikurang:						
c.	Belanja Operasi yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	705.051.321.116,20	703.919.687.520,00	706.761.640.312,00	706.005.522.350,76	716.934.780.550,00	742.556.571.772,00
d.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
II	Total Rencana Pengeluaran Prioritas I (a+b)-(c+d)	332.206.024.616,80	281.436.977.880,00	298.807.439.048,00	327.782.967.203,04	334.500.000.000,00	335.757.600.000,00
	Sisa Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Setelah Menghitung Alokasi Pengeluaran Prioritas I (I-II)	304.857.283.955,00	351.641.280.300,00	318.320.564.300,00	267.870.564.300,00	330.421.265.669,91	335.196.751.444,84
	Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas II						
a.	Belanja Hibah	7.700.000.000	7.700.000.000	30.700.000.000	27.700.000.000	7.700.000.000	7.700.000.000
b.	Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
III	Total Rencana Pengeluaran Prioritas II (a+b)	10.700.000.000	12.700.000.000	35.700.000.000	32.700.000.000	12.700.000.000	12.700.000.000
	Surplus Anggaran Riil atau Berimbang (II-III)	294.157.283.955,00	338.941.280.300,00	282.620.564.300,00	235.170.564.300,00	317.721.265.669,91	322.496.751.444,84

Dari total alokasi pagu indikatif diatas kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tersebut, kemudian dialokasikan ke berbagai program/kegiatan sesuai urutan prioritas. Prioritas program/kegiatan dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III, dimana prioritas I merupakan prioritas pertama sebelum prioritas II. Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas I dan II kebutuhan dananya terpenuhi, dengan uraian sebagai berikut:

Prioritas I

Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (duapuluh persen).

Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas II

Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.

Prioritas III

Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Penganggaran belanja hibah salah satunya yang

prioritas adalah penganggaran belanja hibah dalam rangka kebutuhan pelaksanaan Pemilukada serentak tahun 2024 yang terdiri dari belanja hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu serta anggaran pengamanan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu tahun 2024 yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

Tabel. 3.32. Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil
Keuangan Daerah Kab. Labuhanbatu
Tahun 2021 s/d 2026

NO	JENIS DANA	ALOKASI (JUTA)											
		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026	
		%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp
1	Prioritas I	44,82	285.531.774.902	48,66	308.055.880.430	57,71	356.144.570.732	46,35	276.085.411.852	45,21	300.610.904.209	45,00	301.929.458.150
2	Prioritas II	44,31	282.282.752.028	41,60	263.360.555.403	42,29	260.983.432.616	42,93	255.714.061.074	43,57	289.706.195.452	44,10	295.957.964.422
3	Prioritas III	10,87	69.248.781.642	9,74	61.661.822.347	10,22	63.070.481.942	10,73	63.913.623.930	11,22	74.604.166.008	10,90	73.134.024.307
	Total	100	637.063.308.572	100	633.078.258.180	100	617.128.003.348	100,01	595.653.531.503	100	664.921.265.670	100	670.954.351.445

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Proses perencanaan pembangunan melewati beberapa tahapan, bukan hanya disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Nasional dan Provinsi, namun harus dapat mengakomodir kebutuhan daerah dalam konteks pembangunan menyeluruh. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 merupakan tahapan akhir atau periodisasi keempat dalam RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2005-2025. Hal ini menjadikan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 sangat penting dalam pencapaian visi dan misi RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2005-2025. Dalam dokumen RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2005-2025 disebutkan visi **“Labuhanbatu Sentra Jasa dan Agro Industri yang Berdaya Saing Tahun 2025”**. Ukuran keberhasilan yang dituangkan RPJP tersebut adalah :

1. Masyarakat yang sejahtera, maju, berahlak dan bertaqwa kepada Tuhan YME;
2. Berperan di dalam perdagangan dunia sebagai pemasok barang jadi (*finished products*) yang merupakan produk hilir turunan dari hasil perkebunan, pertanian, kehutanan dan perikanan (sektor primer) yang menjadi unggulan daerah sendiri, maupun dari daerah sekitar;
3. Menjadi salah-satu simpul di dalam jaringan transportasi multi-moda yang mencakup matra laut, udara, dan darat sekurang-kurangnya dalam sistem jaringan nasional;
4. Memiliki kawasan industri pengolahan (sektor sekunder) yang memenuhi standar internasional dan fasilitas perdagangan dan jasa (sektor tersier) modern, terintegrasi di dalam kota-kota baru, lengkap dengan pelayanan pelabuhan laut dan pelabuhan udara;
5. Mandiri dalam penelitian dan pengembangan produk unggulan daerah;

Bab ini akan mendeskripsikan permasalahan dan isu strategis yang dihadapi Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu sebagai dasar penting untuk lebih pembangunan selanjutnya, secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian daerah.

Permasalahan yang dimaksudkan adalah uraian kesenjangan antara kinerja yang dicapai dengan target yang direncanakan. Uraian permasalahan terbagi atas uraian permasalahan makro daerah dan uraian permasalahan per urusan pembangunan. Sedangkan isu strategis yang dimaksudkan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan (dikedepankan) dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah di masa datang. Artinya, bila isu tersebut tidak direspon dengan kebijakan yang tepat maka kondisi ideal yang ingin diwujudkan di Kabupaten Labuhanbatu tidak akan terwujud.

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

4.1.1. Permasalahan Makro Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara hal yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan hasil evaluasi rencana pembangunan menengah daerah Tahun 2016-2021, maka beberapa temuan permasalahan pembangunan makro Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut:

1. Melambatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan minimnya investasi dan rendahnya daya saing produk daerah.
2. Masih terdapat kesenjangan pendapatan masyarakat.
3. Masih rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia Sektor Tenaga Kerja yang berakibat pada angka pengangguran.
4. Belum maksimalnya capaian indeks pembangunan manusia pada dimensi pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat.
5. Belum maksimalnya pengelolaan potensi unggulan daerah
6. Belum optimalnya penggalan potensi sumber daya alam dan potensi pariwisata daerah.
7. Belum Optimalnya Pencapaian Tujuan Pembangunan Secara Berkelanjutan secara konprehensif.

8. Masih tingginya rasio belanja pegawai terhadap APBD

Permasalahan daerah berdasarkan sasaran pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021	Permasalahan
1	Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good & clean governance)	- Belum maksimalnya pelaksanaan Sistim e-government - Masih rendahnya kualitas SDM aparatur.
2	Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang tanggap dan peduli	- Masih rendahnya kualitas pelayanan publik yang disebabkan oleh belum maksimalnya inovasi terhadap pelayanan public
3	Meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah tempat tinggalnya	- Masih tingginya angka kriminalitas
5	Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapat layanan konfrehensif	- Masih kurangnya peran aktif masyarakat dalam melapor tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik	- Kualitas tenaga pendidik masih rendah
7	Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pendidikan	- Kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan pemeliharannya secara keseluruhan masih rendah
8	Meningkatnya kualitas dan mutu pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu	- Masih rendahnya kualitas pendidikan
9	Terwujudnya kehidupan harmoni, internal dan antar umat beragama	- Belum optimalnya kordinasi antar umat beragama
10	Terwujudnya masyarakat Labuhanbatu yang berbudaya.	- Masih rendahnya karakter masyarakat yang berbudaya daerah
11	Meningkatnya status kesehatan, akses dan kualitas pelayanan kesehatan	- Belum optimalnya pelayanan kesehatan secara

No	Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021	Permasalahan
	terhadap ibu, bayi, balita, remaja, usia produktif dan usia lanjut	keseluruhan
12	Meningkatnya standar pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah sesuai standar internasional dengan sertifikasi akreditasi versi 2012 dan Joint Commision International (JCI)	- Belum tercapainya standar pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah sesuai standar internasional dengan sertifikasi akreditasi versi 2012 dan Joint Commision International (JCI)
13	Meningkatnya akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta informasi kesehatan	- Akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dasar masih perlu ditingkatkan.
14	Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular	- Pelayanan bagi penderita hipertensi belum maksimal.
15	Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat	- Masih rendahnya Prilaku Hidup Bersih dan Sehat Masyarakat
16	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih dan air minum berkualitas serta sanitasi dasar	- Akses masyarakat terhadap air bersih dan air minum berkualitas dan sanitasi dasar masih perluh ditingkatkan khususnya diwilayah kecamatan pantai.
17	Meningkatnya perlindungan jaminan kesehatan masyarakat	- Belum seluruhnya penduduk menjadi peserta jaminan kesehatan
18	Menurunnya Angka Kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun)	
19	Meningkatnya Pembinaan Peserta KB Aktif	
20	Meningkatnya Peserta KB Baru	
21	Mewujudkan perekonomian yang maju dan mandiri	- Pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil
22	Meningkatnya produksi pertanian dan	- Produksi sektor pertanian

No	Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021	Permasalahan
	perkebunan	masih belum maksimal
	Meningkatnya kesejahteraan petani, peternak dan nelayan	- Rendahnya tingkat kesejahteraan petani
23	Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta daya saing produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan	- Produksi sektor perikanan masih belum maksimal - Rendahnya persentas peternak dalam usaha intensif.
24	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas koperasi dan UMKM	- Rendahnya kualitas produk dan pemasaran UMKM - Data base usaha mikro dan koperasi belum optimal.
25	Berkembangnya sentra industri potensial, ekonomi kreatif dan industri kecil menengah	- Industry potensial, ekonomi kreatif dan IKM belum dikelola secara maksimal, selain itu sistem pemasarannya belum dikelola maksimal.
26	Meningkatnya keinginan masyarakat untuk berwirausaha di sektor usaha mikro dan IKM	- Belum optimalnya fasilitasi terhadap calon wirausaha sektor Mikro dan IKM
27	Meningkatnya pasar tradisional	- Belum optimalnya pemanfaatan pasar tradisional
28	Tersedianya industri turunan berbasis potensi daerah	- Belum tersedianya pabrik industry turunan jenis oleo chemical dan minyak goreng untuk kebutuhan lokal
29	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	- Tingkat pengangguran masih tinggi - Tingkat partisipasi angkatan kerja masih rendah - Rendahnya rasio penduduk yang bekerja
30	Meningkatnya kualitas dan	- Belum semua pekerja/buruh

No	Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021	Permasalahan
	produktifitas tenaga kerja	mendapat upah minimum yang sama - Belum semua pekerja/buruh menjadi peserta jamsostek
31	Meningkatnya Objek Wisata daerah yang mampu bersaing secara global	- Belum didapati objek wisata yang berdaya saing global dan nasional - Objek wisata yang ada belum dikelola secara maksimal
32	Meningkatnya nilai wisata sektor bahari dan budaya yang didukung promosi yang efektif, kreatif, terpadu dan berkelanjutan.	- Promosi dan pembangunan jaringan wisata belum dikelola maksimal. - Belum terbangunnya wisata Pulau Sikantan Kec. Panai Tengah. - Belum terbangunnya wisata bahari desa Sei Tawar Kec. Panai Hilir - Belum terbangunnya monument Labuhanbatu di desa Sei Siarti Kec. Panai Tengah - Belum termanaatkannya hutan mangrove menjadi daerah wisata. - Belum terbangunnya rumah rumah penginapan tradisional di lokasi wisata
33	Pembentukan Kemitraan dengan pihak ke-3 dalam pengembangan potensi wisata daerah	- Proses perizinan masih perlu dipercepat.
34	Terwujudnya sarana dan prasarana infrastruktur	- Masih rendahnya pemeliharaan jalan kabupaten

No	Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021	Permasalahan
		- Belum seluruhnya jalan lingkungan dapat ditangani
35	Meningkatnya kualitas dan ketersediaan sarana prasarana sistem transportasi	- Rendahnya pengadaan dan pembangunan persentase sarana dan prasaran perhubungan - Belum terbangunnya lapangan udara - Belum terbangunnya dermaga pengangkutan laut. - Perlunya pengkajian sistem transportasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi.
36	Meningkatnya ketersediaan dan pemeliharaan prasarana dasar berupa air minum, sanitasi, pengelolaan persampahan, drainase dan permukiman	- Belum tersedianya Tempat Pembuangan Akhir Sampah - Pelayanan persampahan belum menjangkau seluruhnya masyarakat perkotaan. - Masih kurangnya Tempat Penapungan Sampah sementara. - Rendahnya produktifitas bank sampah secara umum - Belum tersedianya sarana dan prasarana wilayah kumuh permukiman secara keseluruhan. - Masih rendahnya persentase panjang saluran drainase dan gorong gorong yang tertangani
37	Meningkatnya sarana dan prasarana jaringan irigasi/rawa, air baku dan jaringan pengairan lainnya	- Rendahnya persentase luas cakupan jaringan

No	Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021	Permasalahan
		irigasi/rawa dan jaringan pengairan lainnya
38	Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana RTH	- Rendahnya Persentase Ruang Terbuka Hijau
39	Meningkatnya Pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan tertanggulangnya bencana secara dini	- Rendahnya pemanfaatan AMDAL - Belum tersedianya alat pemantau kualitas udara. - Rendahnya pengawasan pelaksanaan AMDAL
40	Meningkatkan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten	- Belum dilaksanakannya kajian terhadap pemanfaatan ruang.

4.1.2. Permasalahan per Urusan Pembangunan Daerah

Berdasarkan pada kondisi yang tergambarkan pada Bab II, maka dapat diidentifikasi permasalahan pembangunan pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu yang harus diselesaikan dalam lima tahun kedepan dibahas pada bagian berikut ini.

4.1.2.1. Urusan Wajib

a. Urusan Pendidikan

Permasalahan yang terjadi pada urusan pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
2. Masih perlunya peningkatan kualitas fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dan perlu peningkatan kapasitas sesuai dengan standar
3. Belum dilakukannya pemerataan guru;
4. Belum meratanya pendidikan dan pelatihan guru;
5. Belum meratanya rasio guru kompetensi bidang studi;
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
7. Belum tersedianya kurikulum tentang pendidikan karakter yang mendukung visi Kepala Daerah

8. Belum optimalnya inovasi bidang pendidikan
9. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi

b. Urusan Kesehatan

Permasalahan yang muncul dalam urusan Kesehatan diantaranya adalah:

1. Akses dan kualitas pelayanan kesehatan masih belum optimal;
2. Belum maksimalnya penanganan percepatan penurunan stunting
3. Belum tercapainya standar pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah sesuai standar internasional dengan sertifikasi akreditasi versi 2012 dan Joint Commision International (JCI)
4. Belum optimalnya sistem rujukan pasien dari Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
5. Belum optimalnya pelayanan untuk penderita penyakit tertentu seperti hipertensi, AIDS, jantung, dll.
6. Belum meratanya masyarakat yang kurang mampu untuk menjadi peserta jaminan Kesehatan
7. Derajat kesehatan masyarakat yang belum optimal;
8. Perilaku yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat;
9. Belum optimalnya cakupan imunisasi bayi yang disebabkan kurang kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi.
10. Belum optimalnya inovasi di bidang kesehatan
11. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan yang muncul dalam urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana jalan dalam kondisi baik;
2. Masih rendahnya persentase jalan dalam kondisi baik di wilayah pesisir;
3. Masih rendahnya pemeliharaan jalan kabupaten;
4. Belum seluruhnya jalan lingkungan dapat ditangani;
5. Belum optimalnya sarana dan prasarana penanganan sampah dan limbah domestik;
6. Belum tersedianya Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;

7. Belum optimalnya sistem drainase dan utilitas secara terpadu yang mengakibatkan terjadinya banjir di perkotaan;
8. Belum tersedianya informasi terkait optimalisasi pemanfaatan ruang;
9. Masih tingginya alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan tata ruang;
10. Masih kurangnya fasilitas taman kota;
11. Belum terpenuhinya kebutuhan prasarana irigasi lahan sawah;
12. Belum terpenuhinya akses air minum layak;
13. Masih rendahnya kualitas SDM tenaga konstruksi;
14. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi.

d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan yang muncul dalam urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat kawasan-kawasan kumuh yang belum tertangani dengan baik;
2. Belum optimalnya penanganan sarana dan prasarana infrastruktur serta PSU di permukiman kumuh secara keseluruhan;
3. Belum optimalnya penetapan lokasi khusus kawasan kumuh;
4. Belum optimalnya penanganan rumah tidak layak huni;
5. Belum optimalnya pengelolaan PSU di Perumahan;
6. Pembangunan kawasan permukiman masih kurang memperhatikan aspek tata ruang dan kaidah lingkungan hidup;
7. Minimnya ketersediaan data dan informasi di bidang perumahan rakyat;
8. Belum optimalnya inovasi bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
9. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi.

e. Urusan Sosial

Permasalahan yang muncul dalam urusan Sosial adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemetaan dan pendataan terhadap populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Kurang maksimalnya pembinaan dan pemberdayaan PMKS;
3. Potensi sumber kesejahteraan sosial belum dapat dimanfaatkan secara optimal;

4. Belum tersedianya sarana dan prasarana untuk penanganan PMKS diluar panti;
5. Kurangnya tenaga pendamping sosial untuk pelayanan diluar panti;
6. Belum adanya perda tentang pelayanan sosial diluar panti;
7. Belum optimalnya inovasi bidang sosial;
8. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi.

f. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan yang muncul dalam urusan Kenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Masih belum optimalnya implementasi perda;
2. Masih belum optimalnya penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
3. Belum optimalnya kapasitas Sumber Daya Manusia dalam urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
4. Masih kurang optimalnya kesadaran masyarakat untuk menjalankan peraturan daerah dengan benar;
5. Belum memadainya ketersediaan sarana, prasarana dan teknologi penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
6. Belum memadainya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia LINMAS dan POL PP serta petugas penanggulangan bencana dan kebakaran;
7. Belum tersedianya Perda tentang penanganan bencana;
8. Belum optimalnya inovasi bidang sosial;
9. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi.

4.1.2.2. Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pangan

Permasalahan yang muncul dalam urusan pangan adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur pangan;
2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) masih belum maksimal;
3. Belum terjaminnya ketersediaan dan diversifikasi pangan;
4. Belum optimalnya pengawasan keamanan pangan;
5. Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan daerah;
6. Belum optimalnya inovasi bidang pangan;

7. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi.

b. Urusan Penanaman Modal dan Perizinan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Penanaman Modal dan Perizinan diantaranya adalah:

1. Kurangnya informasi dan promosi terkait potensi investasi;
2. Masih lamanya urusan perizinan investasi;
3. Belum optimalnya kompetensi aparatur dalam penggunaan aplikasi investasi;
4. Realisasi investasi masih terbatas;
5. Rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan perkembangan realisasi investasi;
6. Kurangnya koordinasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan untuk tujuan peningkatan investasi;
7. Belum tersedianya peta investasi Kabupaten Labuhanbatu;
8. Belum optimalnya inovasi bidang Penanaman Modal dan Perizinan ;
9. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi.

c. Urusan Koperasi dan UMKM

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Koperasi dan UMKM diantaranya adalah:

1. Kurangnya keterampilan dan kemampuan manajerial pengelola koperasi;
2. Cukup banyaknya koperasi yang tidak aktif;
3. Belum terciptanya produk unggulan UMKM yang berdaya saing;
4. Tidak tersedianya database yang terkini (update) untuk koperasi dan UMKM;
5. Masih terbatasnya jiwa kewirausahaan masyarakat;
6. Masih sulit untuk mendapatkan modal untuk memulai dan mengembangkan usaha;
7. Belum optimalnya fasilitasi UMKM dalam mendapatkan kemudahan legalitas usaha, permodalan, pemasaran (desiminasi produk), kemitraan serta pendampingan dalam mengembangkan usaha;
8. Belum optimalnya penggunaan aplikasi digital dalam pemasaran produk UMKM;
9. Belum optimalnya inovasi bidang koperasi dan UMKM;

10. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi.

d. Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak adalah:

1. Masih tingginya kasus kekerasan perempuan dan anak;
2. Belum optimalnya penanganan komprehensif terhadap Tindakan kekerasan perempuan dan anak;
3. Kapasitas kelembagaan perlindungan anak masih terbatas dan belum optimalnya upaya pengembangan menuju kota/kabupaten layak anak;
4. Masih perlunya optimalisasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dalam mendukung pemberdayaan perempuan atas partisipasi angkatan kerja perempuan;
5. Belum optimalnya dukungan politik terhadap kesetaraan gender sebagai prioritas pembangunan;
6. Belum memadainya ketersediaan data terpisah dan terpadu serta anggaran berbasis gender yang mendukung pengembangan kebijakan pemberdayaan perempuan dan anak di berbagai bidang;
7. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan kelembagaan perlindungan perempuan;
8. Belum optimalnya inovasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
9. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi.

e. Urusan Ketenagakerjaan

Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Ketenagakerjaan adalah:

1. Belum optimalnya perencanaan dan evaluasi ketenagakerjaan;
2. Terbatasnya lapangan pekerjaan belum mampu menampung jumlah pencari kerja;
3. Masih rendahnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja;
4. Masih rendahnya kreativitas dan produktivitas angkatan kerja dalam menciptakan lapangan usaha baru;
5. Kurangnya keterampilan yang dimiliki angkatan kerja;

6. Masih tingginya angka pengangguran dan rendahnya Tingkat Partisipasi Angkat Kerja;
7. Masih rendahnya kemampuan pemuda dalam memasuki dunia usaha.;
8. Belum optimalnya jaminan keselamatan kerja;
9. Belum memadainya keterampilan dan keahlian tenaga kerja baru, disamping masih minimnya upaya-upaya peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui diklat dan pelatihan tenaga kerja lokal;
10. Belum berkembangnya sinergi kebijakan ketenagakerjaan yang memadukan pemerintah, dunia usaha dan pendidikan guna terciptanya peningkatan penyerapan dan penyaluran tenaga kerja;
11. Belum tersedianya sarana dan prasarana balai latihan kerja;
12. Belum optimalnya inovasi dibidang tenaga kerja;
13. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi.

f. Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib lingkungan hidup adalah:

1. Belum optimalnya ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup;
2. Masih terjadinya pencemaran dan kerusakan Lingkungan;
3. Masih adanya kerusakan hutan dan lahan;
4. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara lingkungan;
5. Masih kurangnya sumberdaya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup;
6. Belum terpenuhinya Ruang Terbuka Hijau;
7. Belum optimalnya pengawasan terhadap izin lingkungan;
8. Pelayanan dan manajemen pengelolaan persampahan masih belum optimal;
9. Masih belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana serta teknologi pengelolaan persampahan;
10. Belum terpenuhinya sarana tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) yang memadai;
11. Pelayanan persampahan belum menjangkau seluruh masyarakat;
12. Rendahnya produktifitas bank sampah;

13. Belum optimalnya pendataan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
14. Belum optimalnya inovasi dibidang lingkungan hidup;
15. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi.

g. Urusan Pertanahan

Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Pertanahan antara lain adalah:

1. Belum optimalnya kinerja pelayanan pertanahan dalam penataan batas wilayah desa dan kecamatan;
2. Masih adanya tanah masyarakat yang belum mempunyai bukti kepemilikan yang sah/disertifikatkan;
3. Masih adanya konflik/sengketa kepemilikan lahan;
4. Masih kurangnya penataan dan penegakan hukum dalam pengelolaan pertanahan;
5. Belum optimalnya inovasi dibidang pertanahan;
6. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi.

h. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain adalah:

1. Masih adanya penduduk wajib ber KTP yang belum memiliki e-KTP;
2. Kurang optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan terintegrasi;
3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus surat-surat administrasi kependudukan;
4. Kondisi sarana dan prasarana pelayanan kependudukan yang belum optimal;
5. Belum optimalnya kapasitas Sumber Daya Manusia bidang Administrasi Kependudukan;
6. Belum optimalnya inovasi dibidang catatan sipil;
7. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi.

i. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain adalah:

1. Pembinaan dan kemandirian peserta KB belum optimal;
2. Pengetahuan dan kesadaran remaja dan pasangan usia subur tentang KB dan kesehatan reproduksi masih rendah;
3. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pengendalian kependudukan;
4. Adanya kecenderungan penurunan akseptor KB;
5. Belum optimalnya inovasi dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
6. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi.

j. Urusan Perhubungan

Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Perhubungan antara lain adalah:

1. Rendahnya pengadaan dan pembangunan persentase sarana dan prasarana perhubungan;
2. Belum adanya terminal tipe C;
3. Belum optimalnya koordinasi perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana dermaga pengangkutan sungai;
4. Kurangnya fasilitas perlengkapan dan keselamatan pengguna jalan;
5. Belum optimalnya pengelolaan pengangkutan umum perkotaan;
6. Masih rendahnya wawasan serta pemahaman masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas;
7. Belum memadainya ketersediaan lampu penerangan jalan dan traffic light di berbagai titik strategis perkotaan sehingga kurang memberikan estetika dan efek penertiban lalu lintas perkotaan;
8. Belum memadainya ketersediaan rambu-rambu lalu lintas di sekitar wilayah perkotaan;
9. Belum tersedianya kajian lokasi Zona Aman Sekolah (ZOS);
10. Belum optimalnya peningkatan dan kelayakan Pengoperasian Kendaraan bermotor melalui prasarana pengujian kendaraan;
11. Belum tertibnya pengangkutan barang di perkotaan;
12. Belum optimalnya pengelolaan perparkiran yang terintegrasi dengan teknologi informasi;

13. Belum optimalnya inovasi dibidang perhubungan;
14. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi.

k. Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Komunikasi dan Informatika antara lain adalah:

1. Belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta layanan komunikasi dan informatika untuk kegiatan yang produktif;
2. Belum tersedianya command center beserta infrastrukturnya;
3. Penggunaan media digital berbasis teknologi Informasi yang terpusat, terpercaya dan real time di lingkungan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu masih rendah;
4. Belum optimalnya pengelolaan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE);
5. Informasi yang tersedia pada website perangkat daerah masih bersifat statis dan belum disajikan informasi terkini (update);
6. Belum tersedianya pusat data yang menjadi basis kendali penyelenggaraan informasi pemerintahan daerah;
7. Belum terbangunnya smart regency (Kabupaten cerdas);
8. Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
9. Belum optimalnya inovasi bidang komunikasi dan informatika;
10. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi.

l. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa antara lain adalah:

1. Belum optimalnya penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan keuangan dan asset desa;
2. Belum optimalnya integrasi penyusunan perencanaan pemanfaatan anggaran pemerintah desa dan kabupaten;
3. Masih belum memadainya kapasitas sumber daya manusia aparatur desa;
4. Belum berkembangnya inisiatif pengembangan potensi ekonomi desa melalui BUMDes;

5. Belum berkembangnya koordinasi dan sinergi program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat;
6. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam upaya percepatan pembangunan desa.
7. Belum terlaksananya kerjasama antar desa dan penataan batas desa;
8. Belum adanya kajian potensi desa wisata;
9. Belum optimalnya upaya peningkatan status desa mandiri;
10. Belum optimalnya inovasi bidang pemberdayaan masyarakat desa;
11. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi.

m. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Kepemudaan dan Olahraga adalah:

1. Belum optimalnya jiwa patriotisme, rasa nasionalisme dan kebangsaan dikalangan pemuda;
2. Belum maksimalnya sistem manajemen olahraga, dan masih rendahnya SDM olahraga
3. Belum berkembangnya cabang olahraga;
4. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;
5. Masih lemahnya kelembagaan pemuda dan olahraga.
6. Belum optimalnya prestasi olahraga dan seni pemuda pada event-event regional Sumatera Utara maupun nasional;
7. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan;
8. Masih rendahnya persentase pemuda yang berwirausaha mandiri;
9. Belum optimalnya inovasi bidang kepemudaan dan olahraga;
10. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi.

n. Urusan Kebudayaan

Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Kebudayaan adalah:

1. Kurangnya Pelestarian adat budaya daerah;

2. Belum optimalnya pengelolaan kekayaan cagar budaya dan keragaman budaya;
3. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana seni dan budaya;
4. Belum optimalnya pembinaan dan pagelaran potensi seni dan budaya tradisional guna mendukung aktualisasi pengembangan ekonomi kreatif;
5. Kurang memadainya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia pelaku kebudayaan dan ekonomi kreatif;
6. Belum optimalnya inovasi bidang kebudayaan;
7. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi.

o. Perpustakaan

Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Perpustakaan adalah:

1. Masih rendahnya sarana dan prasarana perpustakaan;
2. Masih rendahnya minat baca penduduk Kabupaten Labuhanbatu;
3. Terbatasnya jumlah dan jenis perpustakaan yang dekat dengan masyarakat serta keberagaman koleksi (termasuk koleksi digital);
4. Terbatasnya SDM perpustakaan baik kualitas, kuantitas maupun persebaran;
5. Belum optimalnya inovasi bidang perpustakaan;
6. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi.

p. Kearsipan

Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Kearsipan adalah:

1. Masih rendahnya ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
2. Belum munculnya kesadaran arti penting pengelolaan arsip daerah;
3. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola arsip;
4. Rendahnya digitalisasi kearsipan daerah;
5. Belum optimalnya inovasi bidang kearsipan;
6. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi.

4.1.3. Urusan Pilihan

a. Urusan Pariwisata

Permasalahan yang terjadi pada urusan pariwisata adalah:

1. Belum optimalnya ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan pariwisata kabupaten;
2. Belum berkembangnya Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) andalan Kabupaten Labuhanbatu;
3. Masih belum dilaksanakannya penataan dan diversifikasi daya tarik pariwisata;
4. Belum adanya event promosi pariwisata yang mampu menjadi daya tarik wisata Kabupaten Labuhanbatu;
5. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata masih kurang;
6. Belum optimalnya pembinaan, koordinasi dan sinergi antar stakeholders kepariwisataan;
7. Belum optimalnya pembangunan sarana dan prasarana menuju destinasi wisata di Kabupaten Labuhanbatu;
8. Belum optimalnya inovasi bidang pariwisata;
9. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi.

b. Urusan Pertanian

Permasalahan utama yang dihadapi urusan pilihan Pertanian adalah:

1. Masih rendahnya produktivitas hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan;
2. Rendahnya Indeks Pertanaman (IP) lahan sawah tadah hujan;
3. Berkurangnya lahan pertanian tanaman pangan akibat alih fungsi lahan menjadi tanaman perkebunan;
4. Belum adanya perda lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
5. Rendahnya persentase luas cakupan jaringan irigasi/rawa dan jaringan pengairan lainnya;
6. Rendahnya kualitas sumber daya pelaku agribisnis pertanian dan peternakan;
7. Belum optimalnya penerapan Teknologi Pertanian dan peternakan;
8. Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan petani dan peternak dalam hal budidaya, integrasi ternak dan tanaman serta penganekaragaman produk pengolahan hasil pertanian dan peternakan;
9. Manajemen produk mulai dari masa panen sampai dengan system pemasaran belum optimal;
10. Belum optimalnya penanganan kesehatan hewan;

11. Rasio ternak unggul terhadap ternak lokal masih rendah;
12. Masih rendahnya kualitas produk hasil pertanian dan perkebunan daerah;
13. Masih rendahnya jumlah kelompok tani yang termasuk kedalam kelas Madya;
14. Belum optimalnya inovasi bidang pertanian dan peternakan;
15. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi.

c. Urusan Perdagangan

Permasalahan utama yang dihadapi urusan pilihan Perdagangan adalah:

1. Belum optimalnya penanganan produk unggulan daerah yang berorientasi ekspor;
2. Belum optimalnya promosi dan pemasaran produk unggulan daerah;
3. Belum optimalnya penyediaan fasilitas perdagangan dan jasa yang memadai;
4. Belum optimalnya penataan, pembinaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
5. Belum optimalnya pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa;
6. Belum optimalnya upaya revitalisasi pasar tradisional;
7. Belum optimalnya pengendalian fluktuasi harga pada saat hari besar keagamaan;
8. Belum optimalnya uji alat-alat ukur, takar, timbang dan pelengkapannya;
9. Belum optimalnya inovasi bidang perdagangan;
10. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi.

d. Urusan Perindustrian

Permasalahan utama yang dihadapi urusan pilihan Perindustrian adalah:

1. Rendahnya daya saing Industri Kecil dan Menengah (IKM)
2. Pemasaran produk hasil industri kecil masih belum tertata dengan baik dan masih bersifat lokal, yang disebabkan belum terpenuhinya standar mutu produk;
3. Rendahnya penerapan peralatan modern dalam usaha industri kecil dan menengah yang mengakibatkan rendahnya kualitas dan peroduktifitas;

4. Belum efisien dan efektifnya sistem distribusi daerah yang disebabkan oleh panjangnya rantai distribusi;
5. Belum tersedianya sistem informasi harga;
6. Masih terbatasnya kemampuan permodalan para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM);
7. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang industry;
8. Masih rendahnya pelaku IKM yang memiliki ijin usaha;
9. Belum optimalnya inovasi bidang perindustrian;
10. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi.

4.1.4. Urusan Penunjang

a. Urusan Pemerintahan Umum

Permasalahan yang muncul pada urusan pemerintahan umum antara lain adalah:

1. Tata Kelola pemerintahan yang belum optimal;
2. Belum optimalnya kapasitas sumber daya dalam mendukung pelaksanaan tata Kelola pemerintaah yang baik;
3. Belum optimalnya Penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi kebijakan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
4. Belum optimalnya monitoring dan pengendalian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
5. Belum optimalnya penataan kelembagaan pemerintah daerah;
6. Belum optimalnya inovasi bidang pemerintahan umum;
7. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi.

b. Urusan Penunjang Pengawasan

Permasalahan yang muncul pada urusan pengawasan adalah:

1. Belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan penyelenggaraan pembangunan daerah;
2. Belum optimalnya fungsi pengawasan dan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
3. Belum optimalnya tindaklanjut hasil pemeriksaan;
4. Belum optimalnya penanganan pengaduan masyarakat;

5. Belum optimalnya inovasi bidang pengawasan;
6. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi.

c. Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah

Permasalahan yang terjadi pada urusan perencanaan pembangunan daerah adalah:

1. Keterbatasan dalam ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan perencanaan pembangunan;
2. Keterbatasan SDM dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan;
3. Belum optimalnya implementasi dokumen perencanaan yang dihasilkan melalui system perencanaan Bottom-Up;
4. Kurangnya sinergi dan koordinasi antar OPD dalam penyediaan data serta perencanaan program dan kegiatan;
5. Masih kurangnya pemanfaatan data-data pembangunan daerah untuk pengembangan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Belum optimalnya asistensi aspirasi masyarakat dan pelaku pembangunan daerah dalam Musrenbang dan Forum OPD;
7. Belum optimalnya perencanaan daerah berbasis Tematik, Holistic, Integratif dan Spasial (THIS);
8. Belum optimalnya kolaborasi antar perangkat daerah dan stakeholders lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
9. Belum optimalnya perencanaan integrasi peluang sumber-sumber pendanaan non pemerintah seperti Corporate Social Responsibility (CSR) dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sesuai dengan prioritas pembangunan daerah;
10. Belum optimalnya inovasi dibidang perencanaan pembangunan daerah;
11. Belum optimalnya penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program pembangunan daerah.

d. Urusan Keuangan Daerah

Permasalahan yang terjadi pada urusan keuangan daerah adalah

1. Kemandirian keuangan daerah masih rendah karena kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah masih rendah;

2. Belum optimalnya penatausahaan dan pengelolaan barang dan aset daerah;
3. Masih belum diterapkannya secara optimal Analisis Standar Belanja Daerah (ASB) sebagai instrumen penyusunan APBD untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas anggaran;
4. Terbatasnya kemampuan daerah dalam menggali potensi sumber-sumber strategis penerimaan daerah;
5. Belum optimalnya inovasi bidang keuangan daerah;
6. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi.

e. Urusan Aparatur dan Kepegawaian

Permasalahan yang terjadi pada urusan aparatur dan kepegawaian adalah:

- a. Belum optimalnya SDM dalam hal penyelenggaraan pemerintahan baik;
- b. Belum optimalnya pemanfaatan kapasitas Sumber Daya Manusia aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi;
- c. Belum optimalnya sistem manajemen kinerja Aparatur Sipil Negara;
- d. Belum optimalnya inovasi bidang aparatur dan kepegawaian;
- e. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi.

4.2. ISU STRATEGIS

4.2.1. Isu Stategis Internasional

4.2.1.1. Isu Perkembangan Ekonomi Global

Perekonomian global mengalami berbagai ketidakpastian yang ditunjukkan dari berbagai tantangan peristiwa ekonomi global terjadi di sepanjang tahun 2019, seperti krisis utang Yunani, Brexit, ketidakpastian kebijakan Amerika Serikat seperti proteksionisme perdagangan dan normalisasi kebijakan moneter, proses penyesuaian (*rebalancing*) ekonomi Tiongkok, dan berakhirnya era *commodity boom*. Ketegangan hubungan perdagangan AS-Tiongkok menjadi pemicu dinamika perekonomian global. Selain itu, risiko geopolitik semakin menambah tidak kondusifnya ekonomi global. Perundingan keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit), kerusakan yang berkepanjangan di Hongkong, Iran dan Irak turut mengganggu upaya pemulihan ekonomi dunia. Kondisi global yang kurang kondusif tersebut menurunkan pertumbuhan ekonomi global menjadi 2,9% pada tahun 2019, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan 2018 sebesar 3,6%.

Pembaikan ekonomi global kemudian mulai muncul di akhir tahun 2019 dan semakin membaik di tahun 2020. Diperkirakan kondisi perekonomian global dapat tumbuh sekitar 3,3%. Harapan pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 yang lebih tinggi mulai terlihat pertengahan Desember 2019, ketika dilaporkan AS-China telah setuju untuk fase pertama damai dagang. Kondisi ini membuat IMF sedikit lebih optimis untuk 2020 dengan pertumbuhan 3,4 persen melebihi pertumbuhan ekonomi global 3,0 persen seperti di tahun 2019. Seluruh lembaga internasional melakukan proyeksi bahwa perekonomian dunia akan lebih baik yang kemudian ditandai dengan meningkatkan harga minyak dunia, batubara dan komoditas. Indonesia sebagai negara eksportir komoditas yang dibutuhkan negara-negara di dunia ikut mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi menjadi 5,3 persen tahun 2020 dan pada tahun 2021 diperkirakan dapat tumbuh mencapai 6 persen.

Sinyal awal pemulihan ekonomi global pada akhir 2019 tertahan akibat wabah Coronavirus (Covid-19). Wabah Covid-19 pertama kali muncul di Wuhan (Tiongkok) dan telah menginfeksi lebih dari 200.000 orang di 176 negara (19 Maret'20). Sekitar 86.000 orang (43%) telah pulih, namun 9.000 orang lainnya (4,5%) meninggal. Pemerintah Tiongkok telah menerapkan restriksi yang ketat untuk memutus rantai penyebaran virus. Sejumlah provinsi diisolasi (*lockdown*) dan pasien yang terinfeksi dipantau secara ketat. Langkah Tiongkok membuahkan hasil. Kurang dari tiga bulan, wabah Covid-19 dapat diatasi. Namun, penyebaran Covid-19 justru meluas ke berbagai negara. Jumlah orang yang terinfeksi di luar Tiongkok mencapai sekitar 140.000 (63%). Italia, Iran, Spanyol, Jerman, dan Amerika Serikat adalah negara dengan kenaikan kasus tertinggi. Banyak negara di dunia pun meniru langkah-langkah yang dilakukan Tiongkok yaitu menerapkan *lockdown* untuk mencegah penyebaran virus.

Penyebaran Covid-19 dan kebijakan restriksi ketat telah memukul kinerja ekonomi Tiongkok. Kebijakan restriksi ini menyebabkan aktivitas masyarakat turun tajam, dan aktivitas produksi perusahaan terhenti sementara. Dampak Covid-19 terhadap ekonomi Tiongkok telah terlihat

pada awal 2020. Sejumlah indikator turun tajam pada Januari dan Februari 2020. Penjualan ritel, produksi perusahaan, dan kegiatan investasi menurun signifikan. Kondisi ini akan menyebabkan ekonomi Tiongkok turun tajam pada TW1-20. Merespons hal itu, sejumlah langkah kebijakan ditempuh pemerintah dan bank sentral Tiongkok seperti menurunkan suku bunga kebijakan dan menerapkan berbagai stimulus lainnya untuk menjaga *confident*, kecukupan likuiditas, dan stabilitas keuangan. Kebijakan juga ditempuh pemerintah Tiongkok untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap sektor pariwisata, UMKM, dan perdagangan. Sejalan dengan itu, ekonomi Tiongkok diperkirakan pulih secara gradual.

Pandemi Covid-19 akan mempengaruhi per-ekonomian global melalui beberapa jalur, yaitu pariwisata, perdagangan dan supply chain, serta pasar keuangan. Pariwisata adalah salah satu sektor yang paling terpukul oleh wabah Covid-19, baik dari sisi supply maupun demand. Kebijakan travel restrictions dan pembatalan serta pengurangan frekuensi penerbangan telah menurunkan supply jasa pariwisata (domestic maupun internasional). Sementara demand pariwisata terus menurun, terutama dari wisatawan Tiongkok—menempati posisi teratas dari aspek pengeluaran (outbound spending).

Wilayah Asia Pasifik diperkirakan paling terdampak atas penurunan pariwisata akibat Covid-19. UNWTO memperkirakan kedatangan wisatawan internasional ke Asia Pasifik akan turun 9% hingga 12% yoy pada 2020—terutama karena Tiongkok telah menghentikan semua tur kelompok domestik dan internasional untuk menahan penyebaran Covid-19. Industri di sektor pariwisata (transportasi dan perhotelan) mengalami penurunan kinerja, sementara penjualan ritel dan pengeluaran bisnis juga telah terdampak. Sektor pariwisata Hong Kong dan Thailand diperkirakan terdampak paling signifikan, diikuti Vietnam, Singapura dan Malaysia. Potensi dampak terhadap Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan negara lain.

Di jalur perdagangan, penghentian sementara aktivitas produksi perusahaan di Tiongkok telah mengganggu perdagangan global.

Kuatnya peranan Tiongkok dalam perdagangan dunia mengakibatkan beberapa negara utama memiliki ketergantungan tinggi terhadap ekspor dan impor dari Tiongkok. Beberapa negara itu diantaranya AS, Hong Kong, dan Jepang. AS merupakan tujuan ekspor terbesar Tiongkok (16,8% pada 2019), diikuti Hong Kong (11,2%) dan Jepang (5,7%). Sementara itu, negara pengimpor terbesar Tiongkok adalah Korsel (8,4%), diikuti Jepang dan Taiwan (8,3%). Beberapa negara lainnya memiliki keterkaitan perdagangan yang relatif tidak terlalu besar dengan Tiongkok.

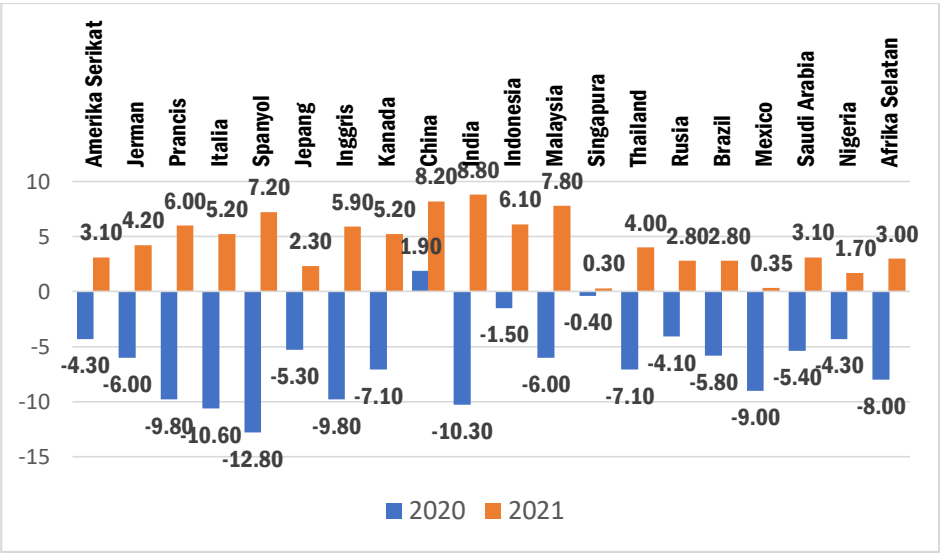
Dari jalur keuangan, Covid-19 telah memicu ketidakpastian yang sangat tinggi sehingga menekan kinerja pasar keuangan global. Pasar global telah memasuki periode uncertainty yang meningkat tajam sehingga mengakibatkan penurunan signifikan pada pasar saham, komoditas, dan mendorong peningkatan aliran modal keluar dari EMs. Kinerja saham diberbagai negara utama turun signifikan, antara lain di Italia, Denmark, Jepang, dan AS. Kekhawatiran investor juga memicu aliran modal keluar dari negara emerging.

Dampak Virus Covid-19 (Corona) terhadap perekonomian dunia semakin mengkhawatirkan. Banyak negara yang sudah mengambil kebijakan menutup diri (lockdown) sehingga menghentikan sejumlah aktivitas ekonomi. Berhentinya aktivitas ekonomi ini sebagai antisipasi merebaknya virus Corona yang semakin cepat terutama di Eropa dan Amerika. Konsekuensinya, pertumbuhan ekonomi global juga dijangka akan mengalami perlambatan yang cukup tinggi. Morgan Stanley memperkirakan pertumbuhan global dapat berkontraksi hingga 0,9% tahun ini atau terendah sejak krisis keuangan global tahun 2008-2009. Lembaga internasional lainnya Morgan memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2020 sebesar -1,1%, dan The Economic Intelligent Units memproyeksikan resesi ekonomi dunia mencapai -2,2%. Dana Moneter Internasional (IMF) menilai pandemi Covid-19 telah mengubah kondisi perekonomian global. Seluruh negara di dunia telah masuk ke dalam krisis. Tahun 2020, IMF memperkirakan ekonomi global akan mengalami resesi hingga -3,0%. Proyeksi ini jauh lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2019 sebesar 2,9%. Sejalan dengan proyeksi tersebut, Asian Development

Bank (ADB) juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh 2,5% pada 2020 di tengah Pandemi Virus Corona. Meski Indonesia memiliki landasan makroekonomi yang kuat, wabah COVID-19 yang tengah berlangsung telah mengubah arah perekonomian Indonesia, dengan memburuknya kondisi lingkungan eksternal dan melemahnya permintaan dalam negeri.

Untuk pertama kalinya sejak great depression atau depresi besar (1929 – 1932), ekonomi serta negara-negara maju dan negara berkembang, juga negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi (*emerging market*), berada dalam situasi yang sama, yakni menghadapi resesi atau kelesuan ekonomi. Proyeksi ini dipengaruhi kondisi dunia yang dikepung pandemi Covid-19. Krisis yang terjadi saat ini menimbulkan ketidakpastian dan berdampak pada kehidupan masyarakat. Banyak negara mengalami multikrisis, antara lain kesehatan, keuangan, dan harga komoditas yang anjlok. Kondisi ini kemudian menimbulkan situasi yang kompleks. Tak satu negara pun bisa terhindar dari krisis akibat pandemi Covid-19 ini. Negara-negara yang mengandalkan pariwisata, perjalanan, dan hiburan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi akan menghadapi disruptsi besar.

Gambar 4. 1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Dunia Tahun 2020 sampai 2021 Akibat Pandemi Covid-19



Sumber: IMF, World Economics Outlook

Prospek perekonomian global untuk tahun 2020 masih tergantung dari penanganan dampak Covid-19 terhadap kesehatan telah tuntas. Jika wabah Covid-19 dapat dituntaskan pada kuartal II 2020, maka perekonomian dunia akan membaik dan gelombang krisis dapat dihindari, namun jika berlanjut hingga semester II, maka tidak ada satupun negara di dunia yang terhindar dari krisis ekonomi. Meski demikian, jika pandemi bisa diatasi pada semester II-2020 dan kebijakan yang dilakukan di seluruh dunia efektif mencegah kebangkrutan usaha, menjaga kehilangan pekerjaan, dan menopang sistem keuangan, maka pertumbuhan ekonomi 2021 akan berbalik positif ke arah 5,8 persen.

4.2.1.2. Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Paradigma pembangunan ini sebetulnya sudah didengungkan sejak lama dengan diakui pentingnya Pembangunan Berkelanjutan sejak KTT Bumi pertama tahun 1972. Selama 40 tahun, Pembangunan Berkelanjutan menjadi perdebatan karena dinilai abstrak (sulit dimengerti dengan indikator terukur), dinilai menghambat pembangunan khususnya pertumbuhan ekonomi. Perjalanan kesepakatan pembangunan lingkungan yang baik dan keterkaitannya dengan pembangunan di berbagai aspek sudah dilakukan sejak lama. Isu lingkungan pertama kali menjadi agenda internasional dalam pertemuan internasional di Stockholm tahun 1972.

Pada tanggal 25 September 2015, sejarah mencatat komitmen 193 negara di dunia, termasuk Indonesia terhadap Agenda Pembangunan Global Pasca 2015. Komitmen ini tertuang dalam Resolusi PBB nomor 70/1 yang menghasilkan Outcome Document of the United Nations Summit for the Adoption of the Post-2015 Development Agenda: “Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development.

Mulai tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals / SDGs) tahun 2015-2030 secara resmi merupakan tahun transisi dari berakhirnya Millenium Development Goals (MDGs). SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan adalah kelanjutan dari program MDGs. Berbeda dengan MDGs yang hanya memiliki 8 tujuan, SDGs memiliki 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 169 target. Oleh karena itu SDGs memiliki cakupan yang lebih luas dan diharapkan mampu lebih

tanggap akan kebutuhan universal. Adapun tujuan SDGs mencakup tiga dimensi dari pembangunan berkelanjutan yaitu: pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, serta perlindungan terhadap lingkungan.

SDGs dibuat berdasarkan momentum keberhasilan MDGs. Tujuan SDGs mencakup lebih banyak aspek kehidupan, dengan 5 poin yang menjadi pondasi dalam pelaksanaannya yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tujuan tersebut di tahun 2030 maka disusunlah 17 tujuan global sebagai berikut : 1). Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*); 2). Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*); 3). Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan (*Good Health and Well-being*); 4). Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*); 5). Kesenjangan Gender (*Gender Equality*); 6). Air Bersih dan Sanitasi (*Clean Water and Sanitation*); 7). Energi Bersih dan Terjangkau (*Affordable and Clean Energy*); 8). Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (*Decent Work and Economic Growth*); 9). Industri, Inovasi dan Infrastruktur (*Industry, Innovation and Infrastructure*); 10). Mengurangi Kesenjangan (*Reduced Inequalities*); 11). Keberlanjutan Kota dan Komunitas (*sustainable Cities and Communities*); 12). Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab (*Responsible Consumption and Production*); 13). Aksi Terhadap Iklim (*Climate Action*); 14). Kehidupan Bawah Laut (*Life Below Water*); 15). Kehidupan di Darat (*Life on Land*); 16). Institusi Keadilan yang Kuat dan Kedamaian (*Peace, Justice and Strong Institutions*); 17). Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*Partnership for the Goals*).

4.2.1.3. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

KTT ASEAN ke-9 di Bali pada tahun 2003 menghasilkan kesepakatan Concord yang menyepakati pembentukan ASEAN Community untuk mempererat integrasi ASEAN. Dari kesepakatan tersebut terbentuk tiga komunitas dalam ASEAN Community yang disesuaikan ke dalam tiga pilar di dalam ASEAN Vision 2021, yakni bidang keamanan politik (*ASEAN Political-Security Community*), ekonomi (*ASEAN Economic-Security Community*), dan sosial budaya (*ASEAN Socio-Culture Community*). MEA adalah tujuan akhir integrasi ekonomi seperti yang dicanangkan dalam ASEAN Vision 2021.

Untuk membantu terwujudnya integrasi ASEAN melalui MEA, maka disusun Blue Print MEA yang terdiri dari 4 pilar utama, yaitu : (1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas; (2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, dan e-commerce; (3) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil, dan menengah; (4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

Konsekuensi logis dari hal tersebut adalah, Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di kawasan ASEAN akan menjadi pasar terbuka dan kesatuan yang berbasis produksi; serta mobilitas arus barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja akan bergerak bebas. Secara umum, tantangan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi MEA antara lain adalah meningkatkan daya saing produk dan sumberdaya manusia Indonesia. Indonesia masih harus mengembangkan industri yang berbasis nilai tambah. Oleh karena itu Indonesia perlu kerja keras melakukan hilirisasi produk. Dari sisi hulu, Indonesia sudah menjadi produsen yang dapat diandalkan mulai dari pertanian, kelautan dan perkebunan. Tetapi semua produk tersebut belum sampai ke hilir untuk mengurangi impor barang jadi, karena Indonesia telah memiliki bahan baku yang cukup.

Secara khusus, tantangan daerah dalam menghadapi MEA dapat dituangkan kedalam 5 (lima) strategi, yakni :

Strategi 1 : Meningkatkan daya saing produk unggulan daerah. Strategi ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk-produk unggulan daerah, melalui : (1) menjalin kerjasama riset dengan universitas; (2) mendukung UKM dalam pengembangan produk dan kemasan; (3) mengembangkan produk daerah yang berorientasi ekspor. Kemudian dapat pula dilakukan dengan upaya mendorong ekspansi dan

promosi produk unggulan baik barang maupun jasa, melalui : (1) memfasilitasi dan mendorong eksportir untuk mengembangkan pasar di ASEAN; (2) memberikan fasilitas promosi bagi UKM; (3) meningkatkan jaringan kerjasama dan mitra usaha dengan negara ASEAN.

Strategi 2 : Mendorong investasi daerah. Strategi ini dapat dilakukan melalui : (1) menyederhanakan prosedur, mempersingkat waktu, serta transparansi proses perijinan investasi/memulai usaha; (2) menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerah melalui tata kelola investasi, kualitas sumberdaya manusia dan kualitas pelayanan dan perizinan; (3) mengoptimalkan kinerja dan efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); (4) meningkatkan promosi sektor unggulan yang belum menjadi target investasi.

Strategi 3 : Meningkatkan daya saing sumber daya manusia daerah. Strategi ini dapat dilakukan dengan cara : (1) meningkatkan utilisasi balai pelatihan tenaga kerja daerah; (2) bekerjasama dengan lembaga sertifikasi di daerah untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pekerja sehingga diakui di dunia internasional.

Strategi 4 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur daerah. Strategi ini dapat dilakukan dengan cara : (1) meningkatkan proporsi anggaran daerah untuk pembangunan sistem transportasi dan infrastruktur yang terintegrasi, yaitu jalan raya, pelabuhan, dan bandara, serta ketersediaan pasokan energi dan listrik untuk mendukung keterhubungan antar provinsi di Indonesia; (2) mengoptimalkan peran dan kerjasama dengan swasta dalam pengembangan infrastruktur melalui mekanisme Public Private Partnership (PPP).

Strategi 5 : Meningkatkan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Strategi ini dapat dilakukan melalui sinkronisasi kerangka regulasi kebijakan dan program pusat dan daerah dalam menghadapi MEA.

4.2.2. Isu atau Kebijakan Nasional

Isu-isu Nasional menjadi perhatian dalam setiap proses perencanaan pembangunan di daerah maupun nasional. Bagaimanapun isu-isu yang dirumuskan kedepannya berusaha untuk menjawab serta mengantisipasi tantangan serta ancaman dalam jangka panjang. Terkait dengan sinkronisasi dokumen perencanaan nasional, dan provinsi, berikut ini adalah isu-isu

nasional yang menjadi perhatian dalam perumusan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu, yaitu:

1. Pertumbuhan Ekonomi yang stagnan

Selepas krisis ekonomi 1998, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya pada kisaran 5,3 persen per tahun. Bahkan dalam empat tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan pada kisaran 5,0 persen. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut, sulit bagi Indonesia untuk dapat naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi atau mengejar ketertinggalan pendapatan per kapita negara.

Stagnannya pertumbuhan ekonomi disebabkan utamanya oleh tingkat produktivitas yang rendah seiring tidak berjalannya transformasi struktural. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat adalah: (1) regulasi yang tumpang tindih dan birokrasi yang menghambat; (2) sistem perpajakan dan besarnya penerimaan pajak belum cukup memadai; (3) kualitas infrastruktur yang masih rendah terutama konektivitas dan energi; (4) rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja; dan (5) intermediasi sektor keuangan yang rendah dan pasar keuangan yang dangkal.

2. Reformasi birokrasi, tata Kelola pemerintah dan institusi

Sejalan dengan pembangunan aparatur negara berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan melanjutkan Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 – 2025, berbagai kebijakan ditujukan untuk mewujudkan 8 area perubahan di dalam Reformasi Birokrasi Nasional, meliputi mental aparatur, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, peraturan perundang-undangan, serta pelayanan publik. Agenda reformasi birokrasi menjadi perhatian penting di dalam Rencana.

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 – 2019 yang menekankan birokrasi bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta memiliki pelayanan publik berkualitas. Beragam kebijakan, program, dan kegiatan dalam kerangka reformasi birokrasi nasional, telah menunjukkan capaian yang sejalan dengan sasaran pembangunan bidang aparatur negara.

Perwujudan birokrasi yang bersih dan akuntabel terlihat dengan semakin meningkatnya jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), skor B atas SAKIP, dan persentase penerapan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik seiring dengan ditetapkannya Perpres No.16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dari semakin membaiknya nilai Indeks RB yang didukung dengan penetapan PP No.11/2017 tentang Manajemen PNS, PP No. 49/2018 tentang Manajemen PPPK dan Perpres No. 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Selain itu dari sisi penataan kelembagaan, birokrasi yang efektif dan efisien ditandai dengan 21 Lembaga Non Struktural (LNS) dibubarkan, 2 diintegrasikan, serta 1 disempurnakan. Dari sisi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negera (ASN) telah dikembangkan Talent Management sebagai bagian dari penguatan kompetensi, profesionalitas, dan daya saing nasional. Perbaikan kualitas pelayanan publik terlihat dengan penerapan digitalisasi pelayanan publik (e-Services), peningkatan tingkat kepatuhan atas standar pelayanan publik sesuai dengan UU No. 25/2009 tentang pelayanan publik, integrasi sistem pengaduan masyarakat (LAPOR!-SP4N), pembentukan Mall Pelayanan Publik.

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Kesehatan

Sistem kesehatan akan tertata dengan baik yang dicerminkan melalui penyediaan pelayanan kesehatan berkualitas, merata, dan responsif yang didukung oleh ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memadai dan merata. Angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat penyakit diharapkan menurun secara signifikan termasuk penyakit tropis terabaikan.

Ke depan, upaya promotif dan preventif serta upaya penyelesaian permasalahan gizi masyarakat mengalami peningkatan secara progresif. Taraf pendidikan penduduk diharapkan mengalami perbaikan, dengan layanan pendidikan yang semakin merata antar wilayah, serta menjangkau daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Kebijakan afirmatif pendidikan yang diterapkan diharapkan dapat menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu, dan anak tidak sekolah (ATS) sehingga dapat menyelesaikan pendidikan, minimal sampai jenjang pendidikan menengah. Selain itu, upaya penguatan kualitas pembelajaran dan pengajaran diharapkan dapat menumbuhkan kecakapan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*) peserta didik, yang akan menghasilkan lulusan yang berkualitas, berdaya saing dan berperan penting sebagai pelaku utama pembangunan nasional dan daerah. Selain itu, penjaminan mutu yang terus dilakukan diharapkan dapat memastikan adanya pemerataan kualitas layanan pendidikan antarwilayah dan antarsatuan pendidikan. Pendidikan vokasi yang diperkuat dengan peningkatan kerjasama swasta/industri, sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai, penguatan *teaching factory/teaching industry*, peningkatan kualitas pendidik/instruktur vokasi, serta penguatan sertifikasi kompetensi, diharapkan dapat meningkatkan serapan lulusan pendidikan di pasar kerja. Dalam struktur pasar kerja, proporsi tenaga kerja berpendidikan menengah dan tinggi juga akan meningkat dilengkapi dengan pengetahuan, keterampilan teknis, dan kecakapan hidup yang memadai. Pengembangan metode penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berbasis teknologi informasi dan pengembangan pendidikan tinggi melalui program diploma (tidak harus S1) berdasarkan keahlian yang dibutuhkan pasar kerja akan mampu meningkatkan kesempatan masyarakat menempuh pendidikan tinggi. Selain itu, pengembangan perguruan tinggi sebagai pusat unggulan melalui riset ilmiah bersifat *thematic-based* yang berorientasi pada pemecahan masalah dengan pendekatan lintas disiplin ilmu dan SDM yang berkualitas akan mampu meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.

4. Memperkuat Karakter Bangsa

Pendidikan merupakan pilar kebangsaan yang memiliki peran penting dalam menumbuhkembangkan semangat cinta tanah air dan bela negara, membangun karakter dan meneguhkan jati diri bangsa, serta memperkuat identitas nasional. Pendidikan karakter dan budi pekerti sebagai salah satu pusat dari proses pembentukan kepribadian anak didik sangat diperlukan untuk membangun watak yang baik, memupuk mental yang tangguh, membina perangai yang lembut, dan menanamkan nilai-nilai

kebajikan yang selaras dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang hidup di dalam masyarakat. Namun pendidikan karakter dan budi pekerti belum sepenuhnya dapat mewujudkan lingkungan sekolah dan budaya belajar yang mampu menumbuhkan kebiasaan perilaku yang baik. Hal ini tercermin dari rendahnya indeks integritas sekolah dalam mengikuti Ujian Nasional, yakni masih 30 persen daerah yang memiliki indeks integritas UN rendah (Kemdikbud, 2017). Pelajar pengguna Narkoba juga masih tinggi, dari 3,3 juta pengguna Narkoba, sebanyak 24 persen atau 810.267 orang pengguna adalah pelajar (BNN, 2017). Selain itu kekerasan fisik di kalangan pelajar juga masih marak terjadi, sekitar 32,7 persen pelajar pernah setidaknya satu kali diserang secara fisik (SNKBS, 2015).

5. Penyediaan infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Perhatian pemerintah di bidang infrastruktur pada beberapa tahun terakhir telah berdampak pada peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur di Indonesia. Namun demikian, daya saing infrastruktur Indonesia masih perlu terus ditingkatkan. The Global Competitiveness Report tahun 2018 menempatkan posisi daya saing infrastruktur Indonesia di posisi 71 dari 140 negara, masih tertinggal jika dibandingkan negara ASEAN lainnya, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Beberapa hal yang masih memerlukan percepatan antara lain pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi, pemerataan pelayanan dasar di seluruh Indonesia, dan pembangunan infrastruktur untuk menopang perkembangan berbagai kota seiring dengan urbanisasi di Indonesia. Untuk itu pada periode 2020-2024, pembangunan infrastruktur diprioritaskan pada infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, pembangunan ekonomi, dan perkotaan. Fokus utama tersebut akan ditopang oleh pembangunan energi dan ketenagalistrikan, serta pelaksanaan transformasi digital. Selain itu, pembangunan infrastruktur 2020-2024 juga akan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa pengarusutamaan seperti tujuan pembangunan berkelanjutan, transformasi digital serta modal sosial dan budaya.

Dalam upaya mencapai target pertumbuhan PDB dalam RPJMN 2020-2024, kebutuhan belanja infrastruktur mencapai Rp 6.445 triliun sementara kemampuan pemerintah untuk mendanai hanya sebesar Rp 2.385 triliun (hanya 37 persen dari total kebutuhan). Untuk itu diperlukan upaya inovatif untuk mendorong peran serta investasi masyarakat dan badan usaha melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan skema pembiayaan kreatif lainnya. Hal ini sesuai dengan paradigma baru pendanaan infrastruktur yang menjadikan APBN/APBD sebagai alternatif sumber pendanaan terakhir.

6. Pengurangan ketimpangan wilayah

Pertumbuhan ekonomi di tiap wilayah diharapkan berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan di tiap wilayah diharapkan dapat selaras dengan kebijakan di tingkat nasional, dengan tetap memperhatikan keunggulan dan permasalahan yang unik dengan karakteristik wilayah masing-masing.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat pada Jawa dan Sumatera. Wilayah di luar Jawa dan Sumatera diperkirakan sudah dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Ketimpangan antarprovinsi di dalam wilayah pulau paling tinggi adalah di Pulau Jawa-Bali dan Kalimantan. Ketimpangan antardesa-kota dalam wilayah pulau paling tinggi adalah di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Sulawesi. Penting untuk menjadi catatan adalah tingkat ketimpangan antarwilayah yang rendah belum tentu merefleksikan keberhasilan kebijakan distribusi pembangunan. Namun demikian, tingkat ketimpangan yang rendah bisa jadi mencerminkan tingkat pembangunan yang rendah dan merata di seluruh wilayah, seperti halnya yang terjadi di wilayah Pulau Maluku.

7. Lingkungan Hidup dan Bencana

Keterbatasan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan dapat didefinisikan sebagai batas kemampuan sumber daya alam untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya; serta kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Kondisi

tersebut wajib menjadi pertimbangan dalam setiap proses perencanaan pembangunan mengingat sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan modal utama yang menentukan keberlanjutan pembangunan.

Penurunan kualitas lingkungan hidup serta deplesi sumber daya alam berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bertumpu pada sektor komoditas dan sumber daya alam. Selain itu, karakteristik Indonesia yang memiliki risiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim dapat menimbulkan kehilangan, kerugian, dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang apabila tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik.

Memperhatikan kondisi tersebut, upaya membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional di dalam RPJMN 2020-2024. Secara lebih spesifik, prioritas nasional tersebut diuraikan ke dalam tiga kelompok kebijakan, yakni: (1) meningkatkan kualitas lingkungan hidup; (2) meningkatkan ketahanan bencana dan iklim; serta (3) menerapkan pendekatan pembangunan rendah karbon.

8. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi; supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia; birokrasi yang bersih dan terpercaya; rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut merupakan prasyarat untuk mendukung terlaksananya pembangunan nasional.

Pembangunan Polhukhankam memperhatikan perkembangan yang terjadi di dalam dan luar negeri. Beberapa isu domestik yang perlu diantisipasi selama lima tahun mendatang adalah intoleransi, demokrasi prosedural, kompleksitas pelayanan birokrasi dan penegakan hukum, perilaku koruptif, potensi ancaman keamanan dan kedaulatan negara.

Pada tingkat global, isu yang perlu menjadi perhatian adalah depolarisasi gravitasi politik internasional, pergeseran arena pertarungan negara besar ke arena maritim, deglobalisasi dan populisme yang menyebabkan kebijakan unilateral beberapa negara, dan instabilitas di kawasan Timur Tengah. Arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam terfokus pada 5 (lima) bidang yaitu Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Pemantapan Sistem Hukum Nasional, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, serta Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional.

4.2.3. Isu Strategis atau Kebijakan Provinsi Sumatera Utara

Adapun isu-isu strategis Provinsi Sumatera Utara yang menjadi landasan dalam perumusan isu-isu strategis dan visi misi pembangunan Kabupaten Labuhanbatu ke depan adalah:

1. Ketimpangan dan Pendapatan

Ketimpangan antar wilayah di Provinsi Sumatera Utara tidak terlepas dari adanya keragaman potensi sumber daya alam, letak geografis, kualitas sumber daya manusia, ikatan etnis atau politik. Keberagaman ini dapat menjadi sebuah keunggulan dalam satu sisi, namun disisi lain dapat berpotensi menjadi sumber instabilitas sosial. Untuk itu, maka penyelenggaraan pembangunan secara terencana dan berorientasi terhadap pengurangan kesenjangan antar wilayah menjadi sangat penting untuk dilakukan. Pemahaman secara komprehensif terhadap persoalan kesenjangan tersebut perlu menjadi acuan dalam perumusan perencanaan pembangunan, sehingga dapat mendukung upaya pemerataan pembangunan di Sumatera Utara.

Kesenjangan pendapatan di suatu daerah akan menimbulkan berbagai permasalahan, seperti peningkatan migrasi dari daerah yang miskin ke daerah yang lebih maju, kriminalitas, dan konflik antar masyarakat. Dalam konteks kenegaraan kesenjangan akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang kemudian akan mengancam keutuhan suatu negara. Maka dari itu, kesenjangan harus diatasi oleh pemerintah dengan mendorong daerah yang miskin untuk mampu mengejar ketertinggalan perekonomiannya terhadap daerah yang sudah kaya.

Penyebab terjadinya kesenjangan yang terjadi antar daerah di Sumatera Utara diantaranya dapat diakibatkan oleh kesenjangan ketersediaan infrastruktur dan kemampuan keuangan antardaerah. Infrastruktur yang layak dan tepat dapat membantu mendorong berbagai kegiatan ekonomi melalui fungsinya yang dapat melancarkan proses produksi dan mobilitas manusia, barang, dan jasa. Sementara itu kesenjangan dari sisi kemampuan keuangan antar daerah dapat dilihat dari aspek jumlah pendapatan daerah, dan kualitas belanja daerah.

Kedua aspek di atas memiliki pengaruh nyata terhadap kinerja perekonomian daerah. Selain kedua aspek tersebut diatas, masalah klasik dan mendasar terjadinya kesenjangan antardaerah tersebut potensi ekonomi yang tidak sama. Permasalahan yang masih dihadapi adalah masih terdapatnya ketimpangan pembangunan antar wilayah di Sumatera Utara. Indikasi ketimpangan pembangunan tersebut dapat dilihat dari perbedaan tingkat kesejahteraan dan perkembangan ekonomi antar wilayah.

2. Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial

Kemiskinan saat ini menjadi isu global sejalan dengan Amanat Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 bahwa tujuan globalnya adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menurunkan kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Sumatera Utara masih relatif tinggi yakni 8,94 persen terhadap total penduduk pada bulan September 2018. Persoalan kemiskinan bukan saja sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi akar penyebab kemiskinan salah satunya adalah pola hidup konsumtif. Dimensi lain yang perlu diperhatikan dalam persoalan kemiskinan adalah tingkat kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2). Kemiskinan lebih banyak terjadi di desa dibandingkan dengan perkotaan, kemiskinan di pedesaan disebabkan oleh rendahnya akses pelayanan dasar, akses ekonomi dan infrastruktur serta pola hidup masyarakat.

Pengangguran merupakan salah satu masalah penting yang harus segera dituntaskan, dimana berdasarkan data BPS tercatat terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari tahun 2015 sebesar 6.71 persen menjadi 5.56 persen pada Tahun 2018. Jumlah penduduk yang merupakan

angkatan kerja pada Agustus 2018 sebanyak 7,12 juta jiwa yang terdiri dari 6,73 juta jiwa terkategori bekerja dan sebesar 396 ribu jiwa terkategori pengangguran, banyaknya pengangguran ini disebabkan karena adanya keterbatasan kesempatan kerja baru serta tidak adanya link and match antara kompetensi yang dimiliki tenaga kerja dengan pasar kerja. Ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas, banyak PHK, kurangnya minat pencari kerja untuk usaha mandiri menjadi faktor-faktor pemicu terjadinya pengangguran di Sumatera Utara.

Permasalahan sosial muncul karena adanya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Permasalahan sosial berkaitan dengan masalah kemiskinan, kedisabilitas, keterlantaran, ketunasosialan dan bencana alam/bencana sosial. Rendahnya kualitas penanganan kedisabilitas berdampak pada kondisi dimana penyandang Disabilitas masih menghadapi kendala untuk kemandirian, produktifitas dan hak untuk hidup normal yang meliputi antara lain akses ke pelayanan sosial dasar, hal ini berkaitan dengan terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga pelayanan sosial untuk berbagai jenis ke disabilitas serta aksesibilitas terhadap pelayanan umum untuk mempermudah kehidupan masyarakat. Masalah ketunasusilaan yang terdiri dari gelandangan, pengemis serta tuna susila, selain disebabkan oleh kemiskinan juga diakibatkan ketidakmampuan individu untuk hidup dan bekerja sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Masalah keterlantaran sebagai akibat dari kemiskinan yang terjadi pada anak, keluarga serta lanjut usia. Peristiwa bencana alam merupakan kejadian yang sulit diperkirakan secara tepat sehingga sering timbul kelemahan-kelemahan dalam penanganan pada saat bencana telah terjadi. Disamping itu sikap sebagian warga masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah rawan bencana yang menghambat penanganan bencana.

3. Pendidikan dan Kesehatan

Peningkatan kualitas manusia menjadi hal yang penting agar masyarakat Sumatera Utara mampu bersaing secara global. Namun saat ini masih terkendala dengan beberapa permasalahan terkait perkembangan sumber daya manusia antara lain masih rendahnya pelayanan pendidikan di Sumatera Utara yang ditunjukkan dengan Angka Partisipasi sekolah yang

paling rendah di Provinsi Sumatera Utara yaitu pada kelompok usia 19-24 tahun atau pada jenjang perguruan tinggi.

Selain peningkatan pelayanan pendidikan hal lain yang harus dituntaskan adalah peningkatan kualitas tenaga pengajar, dimana kondisi saat ini belum meratanya ketersediaan guru terutama guru di daerah terpencil, serta nilai rata-rata uji kompetensi guru masih relative rendah. belum sinergisnya pembagian tata kelola Pendidikan antara pemerintah provinsi dan Kota/kota terkait dengan kewenangan, masih rendahnya mutu dan kualitas pendidikan, Tata kelola Pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam peningkatan daya saing seperti masih banyak sekolah yang belum memiliki perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional perpustakaan, baik sarana prasarananya, koleksi, SDM maupun aspek-aspek perpustakaan lainnya, belum terintegrasinya layanan perpustakaan sekolah dengan perpustakaan daerah milik pemerintah dalam memberikan layanan literasi melalui program perpustakaan keliling, belum ada regulasi yang mengatur tentang pengelola perpustakaan sekolah untuk bekerja sama dengan komunitas literasi seperti forum perpustakaan desa/kelurahan atau forum perpustakaan taman bacaan masyarakat.

Selain permasalahan Pendidikan, permasalahan pelayanan Kesehatan di Sumatera Utara saat ini juga belum optimal, yang ditandai dengan masih rendahnya kesehatan ibu dan anak, masih rendahnya status gizi masyarakat dan masih tingginya angka kesakitan (Morbiditas). Guna untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berencana untuk meningkatkan Rumah Sakit Regional dari Tipe C ke tipe B antara lain : RSUD Kota Padang Sidempuan, RSUD Gunung Sitoli, RSUD Samosir dan RSUD Toba Samosir, serta peningkatan Rumah Sakit Haji Medan menuju Rumah Sakit bertaraf Internasional. Selain masalah Pendidikan dan kesehatan, masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak perlu ditingkatkan. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai bagaimana pemenuhan hak anak dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak, perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya (ABK) dan belum optimalnya peran kelembagaan anak dan atau masyarakat yang fokus pada upaya

perlindungan anak, menjadikan isu terkait dengan perlindungan anak menjadi satu isu yang harus menjadi perhatian dalam pembangunan daerah di Sumatera Utara.

4. Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup

Pasca telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah di Provinsi Sumatera Utara mulai memasuki tahapan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dibutuhkan regulasi turunan melalui regulasi Rencana rinci tata ruang sebagai dasar pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hingga saat ini, Provinsi Sumatera Utara belum memiliki data dasar (baseline) kesesuaian perwujudan RTRW, yang digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai seberapa besar pencapaian kinerja penataan ruang terhadap perwujudan RTRW. Sehubungan dengan hal tersebut, maka yang menjadi isu strategis penataan ruang di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

- Penyediaan regulasi penataan ruang yang lengkap, harmonis, dan berkualitas;
- Perwujudan tertib pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, dan
- Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah.

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. IKLH Sumatera Utara adalah sebesar 55,02 Hal ini dapat diartikan bahwa kualitas lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara tidak baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain erupsi gunung Sinabung dan Kebakaran Hutan.

Selanjutnya yang menjadi isu strategis lingkungan hidup adalah terkait dengan sampah, dan menjadi masalah dari tahun ke tahun. Namun saat ini yang menjadi penekanan terhadap pengelolaan sampah adalah bagaimana pengelolaan sampah di setiap Kabupaten/kota ditangani dengan baik seperti meminimalisasi timbunan sampah, meningkatkan jumlah Tempat

Penampungan Sementara (TPS) Sampah, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah, Sistem Operasional TPA dan Sarana Pengangkutan Sampah.

Pertambahan penduduk, geliat perekonomian yang mulai membaik dan kecenderungan kehidupan masyarakat yang konsumtif meningkatkan volume sampah, serta jenis dan karakteristik yang semakin beragam. Untuk menanggulangi berbagai permasalahan pengelolaan sampah di Provinsi Sumatera Utara khususnya di perkotaan, pemerintah melakukan upaya mengembangkan kualitas layanan dasar permukiman baik perkotaan maupun diperdesaan yang terdapat di wilayah pesisir dan dataran tinggi, berupa sistem pengelolaan air minum dan pembangunan sanitasi, meliputi air limbah, persampahan dan drainase, serta penyediaan ruang terbuka hijau.

5. Infrastruktur

Kondisi ekonomi daerah yang produktif sangat sulit dicapai apabila tidak didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai. Oleh sebab itu infrastruktur merupakan kunci bagi pertumbuhan ekonomi, termasuk pemerataan pembangunan. Sampai dengan Tahun 2018, berbagai pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Sumatera Utara terus dipacu. Seiring dengan pertumbuhan penduduk maka pemenuhan infrastruktur semakin besar. Untuk itu pembangunan infrastruktur menjadi sesuatu yang harus diprioritaskan untuk menjadi solusi atas masalah-masalah utama yang dihadapi Sumatera Utara berkaitan dengan kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, kesenjangan, pelayanan dasar serta pemerataan pembangunan.

Beberapa infrastruktur di Sumatera Utara yang perlu diprioritaskan selain transportasi yang menghubungkan inter dan intra wilayah, yaitu Perumahan dan Permukiman yakni menyangkut Rehabilitasi rumah tidak layak huni, Pembangunan pembangkit listrik, air minum, sanitasi, dan sampah. Selain itu, untuk menunjang produksi hasil pertanian dan ketahanan pangan, maka infrastruktur irigasi masih perlu ditingkatkan.

6. Reformasi Birokrasi

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan tata pemerintahan yang bersih (*clean government*), serta profesionalisme

pelayanan publik menjadi salah satu agenda utama dalam pembangunan Provinsi Sumatera Utara. Pola pikir (mindset) dan budaya kerja belum tumbuh dan membudaya di lingkungan kerja pemerintah sehingga belum mampu sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional serta benar-benar memiliki pola pikir yang melayani masyarakat dan pencapaian kinerja yang lebih baik.

Peningkatan kapasitas aparatur menjadi salah satu prioritas untuk menghasilkan kinerja yang baik. Selain itu sistem pemerintahan yang bersih juga dihasilkan dari transparansi dalam menjalankan pemerintahan. Tuntutan dalam melaksanakan e-government menjadi salah satu hal penting dalam melaksanakan tata pemerintahan yang bersih. Tantangan dalam pengembangan e-government cukup besar mengingat SDM aparatur yang mempunyai kompetensi Informasi Teknologi (IT) terbatas. Kinerja pengelolaan keuangan daerah belum optimal dan pengawasan internal belum secara optimal mendukung terciptanya kinerja pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

4.2.4 Hasil Telaahan KLHS RPJMD Labuhanbatu TAHUN 2021 - 2026

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS merupakan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan rencana dan/atau program. Dengan tujuan untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan

suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), lebih mengutamakan pendekatan strategis, sehingga bukan KRP dalam RPJMD yang dinilai dampaknya, tetapi lebih memastikan strategi pembangunan berkelanjutan sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDG"s), yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, telah diintegrasikan ke dalam Rancangan RPJMD.

Pembuatan dan pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD mengacu pada Permendagri Nomor 7 tahun 2018. Pemerintah Daerah membuat dan melaksanakan KLHS RPJMD untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. KLHS RPJMD menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD. Berdasarkan pasal 3 dari Permendagri Nomor 7 Tahun 2018, pembuatan KLHS RPJMD dilakukan dengan mekanisme :

- a. Pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD;
- b. Pengkajian pembangunan berkelanjutan;
- c. Perumusan skenario pembangunan berkelanjutan; dan
- d. Penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi KLHS RPJMD.

Isu strategis tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan analisa indikator capaian tujuan pembangunan berkelanjutan serta analisa kondisi daya dukung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian dan non pertanian, serta kerjasama dengan perguruan tinggi, swasta dan masyarakat dalam hal investasi.
- 2) Melanjutkan reformasi birokrasi dan menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas.
- 3) Meningkatkan layanan kesehatan ibu dan anak, promosi pola hidup sehat, serta tata kelola kesehatan, serta pengendalian penduduk.

- 4) Peningkatan kualitas lingkungan dan keanekaragaman hayati.
- 5) Meningkatkan rumah layak huni serta menjamin ketersediaan air bersih dan peningkatan pengelolaan sanitasi.

4.2.5 Isu Strategis Kabupaten Labuhanbatu

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa depan. Isu strategis kabupaten Labuhanbatu diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu; (1) Permasalahan pembangunan Kabupaten Labuhanbatu; (2) Isu-isu internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Labuhanbatu; (3) Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Labuhanbatu; (4) Kebijakan pembangunan Kabupaten Labuhanbatu yang antara lain terdiri dari RPJPD dan RTRW/RDTR; dan (5) KLHS RPJMD. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka ditetapkan 7 (tujuh) isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Labuhanbatu yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi yang stagnan

Perekonomian Labuhanbatu tahun 2020 jika dibandingkan tahun sebelumnya tumbuh sebesar 0,09 persen. Berdasarkan pendekatan produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 5,35 persen. Diikuti oleh dan Lapangan Usaha Informasi dan Telekomunikasi sebesar 4,74 persen dan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 3,20 persen. Berdasarkan pendekatan pengeluaran, pertumbuhan tertinggi pada komponen Ekspor sebesar 1,00 persen, namun komponen lain mengalami kontraksi.

Sektor yang berkontribusi besar pada pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Labuhanbatu tahun 2020 adalah sektor industri pengolahan yang merupakan sektor yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Labuhanbatu sebesar 34,73%. Yang diikuti dengan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 24,43%. Kemudian, yang ketiga diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 17,81%, serta sektor konstruksi sebesar 8,60%.

2. Kemiskinan, Ketimpangan dan Masalah Sosial

Berdasarkan data (BPS, 2021) pada tahun 2020 jumlah kepadatan penduduk di kabupaten labuhanbatu adalah 493.899 jiwa. Dilihat dari perkembangannya, tampak bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Labuhanbatu mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 terdapat kenaikan standar garis kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu menjadi 425.305 Rp/kapita/bulan. Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan menjadi 42.170 jiwa, dari jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 yang berjumlah 41.520 jiwa. Yang sempat terjadi penurunan jumlah penduduk Miskin Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 37.500 jiwa. Namun, Pada tahun berikutnya terus meningkat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa secara umum tingkat kesejahteraan Labuhanbatu masih dibawah rata-rata. Namun jika ditinjau dari data BPS tahun 2021 terkait persentase penduduk miskin yang semakin tahun semakin menurun maka keberhasilan pembangunan dianggap mengalami keberhasilan.

Program-program pengentas kemiskinan sudah mulai menampakkan hasil. Walaupun belum mencapai hasil maksimal dan sesuai harapan. Karena kompleksnya masalah kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor yang mempengaruhi terciptanya kemiskinan. Ketimpangan tersebut dapat terjadi baik pedesaan maupun perkotaan, terutama penduduk dengan tingkat pendidikan rendah. Ketimpangan wilayah yang juga merupakan salah satu faktor terjadinya kemiskinan, juga terjadi di Labuhanbatu yang disebabkan karena wilayah daerah pesisir pantai belum dapat dikelola potensinya secara optimal. Hal ini dikarenakan masih minimnya kondisi infrastruktur yang tersedia di daerah tersebut. Masih besarnya angka kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu memacu pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja dalam mensejahterakan masyarakat. Pemkab Labuhanbatu menargetkan angka kemiskinan akan ditekan hingga 7 persen dari jumlah penduduk.

3. Pembangunan Modal Manusia (*Human Capital*)

Pembangunan manusia dan Pertumbuhan Ekonomi di Labuhanbatu terus mengalami kemajuan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya indeks

pembangunan manusia (IPM) Labuhanbatu sebesar 0,55 poin atau tumbuh sebesar 0,77 % dibandingkan tahun 2018 menjadi 71,94 pada tahun 2019 dan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,07 %. Seluruh komponen pembentuk IPM Labuhanbatu pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Umur harapan hidup meningkat dari 69,6 tahun menjadi 69,86 tahun. Harapan lama sekolah meningkat dari 12,6 tahun menjadi 12,67 tahun. Rata-rata lama sekolah meningkat dari 9,04 tahun menjadi 9,23 tahun. Dan komponen terakhir pengeluaran perkapita masyarakat meningkat dari 11,05 juta rupiah menjadi 11,19 juta rupiah. Berikut beberapa item pendukung capaian tersebut.

(1) Perkembangan IPM Labuhanbatu Tahun 2019.

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*elarging people choice*). Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia tersebut dengan mengukur kualitas taraf hidup manusia disuatu daerah adalah IPM. IPM menjelaskan keadaan penduduk dalam mengakses hasil pembangunan seperti memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Pada prakteknya IPM digunakan untuk menentukan peringkat/level pembangunan suatu daerah atau sebagai ukuran kinerja pemerintah dalam penentuan alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu, pengetahuan, standart hidup layak, dan umur panjang serta hidup sehat. Dimensi pengetahuan diukur melalui angka harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Dimensi standar hidup layak diukur melalui pengeluaran perkapita disesuaikan. Dimensi terakhir yaitu umur panjang dan hidup sehat diukur melalui Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH). Selanjutnya nilai IPM dihitung menggunakan rata-rata geometrik dari ketiga indeks tersebut.

Pembangunan manusia di Labuhanbatu terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2019. Selama periode tersebut, IPM Labuhanbatu meningkat 5,06 poin, yaitu dari 66,88 pada tahun 2010 menjadi 71,94 pada tahun 2019, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar

0,81% pertahun. Selain itu, seratus pembangunan manusia di Labuhanbatu meningkat dari status "sedang" menjadi "tinggi" sejak tahun 2014. Dalam periode itu juga IPM Labuhanbatu cenderung berada di atas IPM Sumatera Utara.

(2) Perkembangan Komponen Pembentukan IPM Labuhanbatu.

IPM dibentuk melalui tiga indeks, yaitu indeks pendidikan, indeks pengeluaran, dan indeks kesehatan. Dengan demikian, kenaikan IPM erat kaitannya dengan kenaikan dari ketiga indeks tersebut. Pertumbuhan IPM Labuhanbatu sejak 2010 hingga 2019 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini disebabkan seluruh komponen pembentuk IPM di Labuhanbatu juga mengalami peningkatan selama 10 tahun terakhir, ini dapat dilihat dari beberapa bagian dimensi.

a) Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yang merepresentasikan dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 hingga 2019 Labuhanbatu telah berhasil meningkatkan UHH saat lahir Labuhanbatu sebesar 0,7 tahun. Selama periode tersebut, secara rata-rata UHH tumbuh sebesar 1,01% pertahun. Pada 2010, UHH saat lahir di Labuhanbatu sebesar 69,16 tahun. Dan pada tahun 2019 telah mencapai 69,86 tahun.

b) Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan dibentuk oleh dua indikator, yaitu HLS dan RLS. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama 2010 hingga 2019 HLS di Labuhanbatu telah meningkat sebesar 1,96 tahun, sementara RLS meningkat 1,06 tahun. Selama periode tersebut, HLS dan RLS secara rata-rata tumbuh masing-masing sebesar 1,96 dan 1,37%/tahun.

Peningkatan harapan lama sekolah di Labuhanbatu menandakan bahwa semakin banyak penduduk di Labuhanbatu yang melanjutkan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi. Pada tahun 2019, angka HLS di Labuhanbatu mencapai 12,67 tahun, yang

berarti bahwa anak-anak di Labuhanbatu memiliki harapan untuk dapat mengenyam Pendidikan hingga Diploma 1.

RLS Labuhanbatu juga terus tumbuh positif setiap tahunnya, RLS Labuhanbatu pada tahun 2019 sebesar 9,23 tahun, yang menandakan bahwa penduduk usia 25 tahun keatas di Labuhanbatu telah menyelesaikan pendidikan selama 9,23 tahun atau setara dengan duduk di kelas X pada tingkatan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Peningkatan keduanya menunjukkan bahwa kualitas manusia di Labuhanbatu dalam hal pendidikan terus mengalami kemajuan. Hal ini merupakan modal yang penting untuk dapat merubah dan memperbaiki kesejahteraan penduduk Labuhanbatu melalui beberapa indeks.

(3) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2019

Dengan melihat angka HLS Kabupaten/Kota di Sumatera Utara pada tahun 2019 dapat dikatakan bahwa Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah satu Kabupaten/Kota dengan HLS terendah. HLS Labuhanbatu pada tahun 2019 sebesar 12,67 tahun menunjukkan Labuhanbatu diperingkat ke-26 dari 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Jika di perhatikan lebih lanjut angka rata-rata lama sekolah (RLS) Labuhanbatu pada tahun 2019 dibanding kota yang ada di Sumatera Utara belum mampu untuk kategori sebagai salah satu Kabupaten/Kota dengan RLS tertinggi sebesar 9,23 tahun menempatkan kabupaten ini pada posisi ke 15 di banding kota lainnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa HLS maupun RLS Labuhanbatu mengalami peningkatan setiap tahunnya namun belum dapat dikategorikan sebagai salah satu Kabupaten dengan HLS dan RLS tertinggi.

a) Dimensi Standart Hidup Layak

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang ditunjukkan oleh pengeluaran perkapita. Pada tahun 2019, pengeluaran perkapita masyarakat Labuhanbatu mencapai 11,19 juta per tahun. Selama periode 2010 hingga 2019 pengeluaran perkapita masyarakat Labuhanbatu meningkat sebesar 1,43 juta rupiah melalui.

b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Labuhanbatu Tahun 2019

Selanjutnya dapat diketahui bahwa pengeluaran perkapita/pertahun Labuhanbatu pada 2019 dalam kategori sedang dibanding Kabupaten/Kota lain di provinsi Sumatera Utara. Berada diperingkat 16, pengeluaran perkapita Labuhanbatu sebesar 11,96 juta rupiah pertahun 2019. Dengan pengeluaran perkapita tertinggi yaitu kota Medan disusul kota Tebingtinggi dan Kabupaten Karo, oleh sebab itu, dapat di katakan bahwa pengeluaran perkapita pertahun masyarakat Labuhanbatu terus mengalami peningkatan namun masih dikategorikan sedang dibanding kota lain.

4. Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan Kawasan Strategis adalah percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah terutama di luar Jawa. Dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur. Hal ini dicapai melalui strategi pengembangan potensi ekonomi wilayah, percepatan pembangunan konektivitas, peningkatan kemampuan SDM dan IPTEK, regulasi dan kebijakan, serta peningkatan iklim investasi dan iklim usaha.

- a. Strategi untuk mewujudkan kebijakan penguatan peran sentra-sentra perkotaan, adalah :
 - a. Mengembangkan pusat perdagangan dan jasa;
 - b. Mengembangkan pusat agro industri dan transportasi laut;
 - c. Mengembangkan pusat perdagangan dan transportasi udara;
 - d. Mengembangkan ibu kota kecamatan lainnya sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL); dan
 - e. Mengembangkan strategis perkotaan.
- b. Strategi untuk mewujudkan kebijakan peningkatan aksesibilitas internal dan eksternal Kabupaten Labuhanbatu, adalah :
 - f. Mengembangkan jaringan transportasi darat, laut dan udara;
 - g. Meningkatkan aksesibilitas antara pusat-pusat pelayanan (PKW, PKL, PPK) dengan desa-desa sekitarnya;
 - h. Membangun bandar udara dan pelabuhan laut; dan

- i. Mengembangkan jaringan rel kereta api.
- c. Strategi untuk mewujudkan kebijakan peningkatan pelayanan infrastruktur, adalah :
 - j. Menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, perniagaan dengan orientasi pelayanan skala regional;
 - k. Memfasilitasi perkembangan kegiatan perbankan dan jasa lainnya;
 - l. Membangun jaringan listrik ke desa-desa yang belum terlayani;
 - m. Mengembangkan sistem pengelolaan persampahan secara terpadu dan berwawasan lingkungan;
 - n. Mengembangkan sistem pengelolaan air limbah secara terpadu dan berwawasan lingkungan;
 - o. Mengembangkan sistem jaringan air bersih di PKW, PKL dan PPL, serta pada desa-desa rawan air bersih;
 - p. Mengembangkan sistem jaringan drainase di perkotaan dan wilayah rawan banjir; dan
 - q. Mengoptimalkan pelayanan jaringan sumber daya air.

5. Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup

Arah kebijakan pengembangan tata ruang wilayah nasional adalah pengembangan struktur tata ruang dan pengembangan pola ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kabupaten Labuhanbatu didasarkan atas azas :

- Manfaat yaitu pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan kegiatan dan sistem jaringan;
- Keseimbangan dan keserasian yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang dalam suatu wilayah;
- Kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antara manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang. Tujuan dari Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Pasal 3, yaitu berbunyi: “RTRW Kabupaten Labuhanbatu bertujuan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhanbatu yang serasi dan optimal sesuai dengan ketentuan dan kemampuan daya dukung lingkungan

serta sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan nasional dan provinsi Sumatera Utara.”

- Memberikan arahan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budaya;
- Memberikan arahan pengembangan kawasan budidaya, sistem pusat-pusat permukiman, sistem sarana dan prasarana wilayah, dan kawasan yang perlu diprioritasnya pengembangannya;
- Memberikan arahan kebijaksanaan yang menyangkut tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, tata guna hutan dan tata guna sumber daya alam lainnya serta kebijaksanaan penunjang penataan ruang yang direncanakan.

Strategi pengembangan sistem prasarana dan sarana yaitu Strategi pengembangan kawasan prioritas. Untuk menjamin kelestarian lingkungan dan keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam, sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

a. Strategi pemanfaatan kawasan lindung adalah sebagai berikut:

- Kawasan hutan lindung, kawasan hutan suaka alam dan kawasan hutan wisata, serta kawasan-kawasan lainnya sesuai dengan kriteria Keppres Nomor 32 Tahun 1990 dipertahankan sebagai kawasan lindung;
- Mencegah adanya dampak sosial ekonomi akibat dari penetapan areal kawasan lindung dengan pengarahannya bentuk kegiatan, pembatasan-pembatasan, penerapan perangkat insentif dan disinsentif.

b. Strategi pengembangan kawasan tanaman pangan adalah:

- Melanjutkan dan meningkatkan usaha-usaha diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi serta rehabilitasi secara terpadu, serasi dan merata sesuai dengan kondisi tanah, air dan iklim dan lingkungan hidup serta mempertahankan tatanan kehidupan masyarakat;
- Peningkatan kondisi tanaman pangan untuk memantapkan swasembada pangan dan sekaligus memperbaiki gizi;
- Diterapkannya prinsip pembatasan terhadap kemungkinan pergeseran atau pengalihan penggunaan lahan sawah yang menjadi jenis

penggunaan lainnya, terutama dalam hal ini adalah lahan sawah beririgasi.

c. Strategi pengembangan kawasan perkebunan adalah:

- Peningkatkan produksi ditujukan untuk ekspor dan memenuhi kebutuhan dalam negeri terutama untuk keperluan industri.
- Perluasan areal perkebunan terutama perkebunan besar beserta pola PIR dilakukan secara selektif pada daerah yang memungkinkan perluasannya dikaitkan dengan perluasan lapangan kerja.
- Peningkatkan kualitas perkebunan melalui perbaikan teknik bercocok tanam, rehabilitasi, dan upaya diversifikasi.

d. Strategi pengembangan perikanan adalah:

- Peningkatan produksi untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi serta meningkatkan ekspor melalui usaha budidaya di daerah pantai, tambak dan air tawar.
- Peningkatan usaha penangkapan ikan di daerah pantai dan lepas pantai termasuk pemanfaatan zona ekonomi eksklusif, serta pengembangan pelabuhan perikanan.
- Perlindungan dan pengembangan perikanan rakyat dalam rangka meningkatkan pendapatan dan taraf hidup nelayan serta memajukan desa-desa pantai.

e. Strategi pengembangan peternakan, adalah:

- Peningkatan produksi yang berorientasi pada peningkatan pendapatan, perluasan kesempatan kerja melalui usaha agribisnis agroindustri dan efisiensi usaha dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi serta ekspor;
- Pengembangan peternakan lebih diarahkan kepada pola pengembangan intensif, dan dapat terintegrasi dengan kegiatan yang saling mendukung untuk meningkatkan nilai tambah usaha;
- Mendorong pengembangan peternakan rakyat serta meningkatkan peranan Koperasi dan swasta.

f. Strategi pengembangan pertambangan, adalah:

- Peningkatan usaha pertambangan agar tetap berpedoman pada pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

- Mendorong tumbuh dan berkembangnya pertambangan rakyat melalui penyuluhan dan pembinaan keterampilan teknologi pertambangan rakyat.

g. Strategi pengembangan kepariwisataan, adalah:

- Pengembangan kepariwisataan berorientasi kepada pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- Menggali potensi pariwisata baru;
- Peningkatan kualitas pengelolaan dan kualitas objek wisata.

h. Strategi pengembangan industri, adalah:

- Pengembangan industri diarahkan kepada jenis industri yang berorientasi ekspor dan memiliki nilai tambah yang tinggi;
- Pengembangan industri secara selektif dalam pengertian berorientasi pada pengembangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- Pengembangan sarana dan prasarana yang akan mendukung pengembangan industri;
- Peningkatan kemampuan teknologi masyarakat setempat yang sesuai dengan jenis industri yang berkembang sekaligus dalam rangka perluasan kesempatan kerja.

i. Strategi pengembangan kegiatan jasa, adalah:

- Pengembangan kegiatan jasa berdasarkan jenis lingkup dan jangkauan pelayanannya disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan sekaligus dikaitkan dengan kesempatan kerja.
- Pengembangan kegiatan jasa diselaraskan dengan pola pelayanan dari pusat-pusat pelayanan yang ada dalam wilayah baik untuk jangkauan pelayanan internal wilayah maupun eksternal wilayah.

Untuk mengembangkan kota-kota dalam satu kesatuan sistem hirarki kota agar berfungsi sebagai pusat-pusat pertumbuhan, maka strategi pengembangan perkotaan menurut Pasal 14 adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan perkotaan harus dapat menunjang kawasan pedesaan yang merupakan wilayah belakangnya dan memperhatikan perkembangan kota itu sendiri;
- b. Untuk dapat melaksanakan fungsi tersebut di atas kualitas prasarana dan sarana kota akan ditingkatkan secara terpadu;

- c. Untuk lebih meningkatkan keterkaitan antar kota dan antara kota dengan wilayah belakangnya perlu dilakukan pemantapan orde kota.

Di Wilayah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Peninjauan kembali merupakan upaya memperbaiki rencana agar rencana selalu dapat digunakan sebagai dasar untuk pemanfaatan ruang dalam mewujudkan tujuan pembangunan. Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan Pola dan Struktur Ruang yang diinginkan di masa yang akan datang yang paling tepat untuk mewujudkan tujuan pembangunan di suatu wilayah. Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang dilakukan pengkajian aspek-aspek sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan, perumusan konsepsi dan strategi yang didasarkan pada asumsi tertentu dan faktor dinamika sosial yang bersifat internal maupun eksternal terhadap wilayah.

Dalam rangka penataan dan pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Rantauprapat yang terletak di Kecamatan Rantau Utara dan Rantau Selatan terdiri dari 19 Kelurahan telah dilakukan proses Penyusunan Perkada terkait dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Wilayah Perencanaan Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 – 2041 dengan luas deliniasi kawasan 4.902,17 Ha. Adapun tujuan penataan dan pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Rantauprapat yaitu :

“MEWUJUDKAN KAWASAN PERKOTAAN RANTAUPRAPAT SEBAGAI PUSAT KEGIATAN PERDAGANGAN, JASA, PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG RAMAH LINGKUNGAN”

Dengan prinsip penataan ruang sebagai berikut:

1. Mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa berskala regional;
2. Tersedianya aksesibilitas internal dan eksternal yang baik;
3. Tersedianya kebutuhan permukiman dan perumahan yang kompak dan berkelanjutan;
4. Mengembangkan sistem jaringan prasarana secara hirarkis
5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kawasan

Pembagian Satuan Wilayah Perencanaan (SWP) Perkotaan Rantauprapat di dalam RDTR :

1. SWP A dengan Fungsi Utama Kawasan perkantoran dan perdagangan jasaterdiri dari • Kelurahan Aek Paing • Kelurahan Padang Matinggi • Kelurahan Pulo Padang
2. SWP B dengan fungsi utama pusat kota/central business district terdiri dari • Kelurahan Binaraga • Kelurahan Cendana • Kelurahan Kartini • Kelurahan Padang Bulan • Kelurahan Rantauprapat • Kelurahan Sirandorung • Kelurahan Siringo-Ringo
3. SWP C dengan fungsi utama simpul kegiatan transportasi terdiri dari : • Kelurahan Bakaran Batu • Kelurahan Sioldengan
4. SWP D dengan fungsi utama kawasan pemerintahan skala kabupaten terdiri dari : • Kelurahan Lobusona • Kelurahan Pardamean • Kelurahan Sidorejo • Kelurahan Sigambal • Kelurahan Ujung Bandar
5. SWP E dengan fungsi utama kawasan baru pendukung fungsi pergudangan, sport center dan civic center.terdiri dari : • Kelurahan Danau Bale • Kelurahan Urung Kompas

Rencana Pusat Pelayanan terdiri dari :

Pusat Pelayanan Kota/ Kawasan Perkotaan (PPK Utara) :

1. Kelurahan Kartini
2. Kelurahan Rantau Prapat
3. Kelurahan Cendana
4. Kelurahan Siringo-ringo
5. Kelurahan Binaraga

Pusat Pelayanan Kota/ Kawasan Perkotaan (PPK Selatan) :

1. Kelurahan Ujung Bandar

Sub Pusat Pelayanan Kota/ Kawasan Perkotaan :

1. Kelurahan Aek Paing
2. Kelurahan Sioldengan
3. Kelurahan Sirandorung
4. Kelurahan Sigambal
5. Kelurahan Danau Bale

Pusat Pelayanan Lingkungan :

1. Kelurahan Urung Kompas
2. Kelurahan Perdamean
3. Kelurahan Bakaran Batu
4. Kelurahan Padang Bulan
5. Kelurahan Siderojo
6. Kelurahan Pulo Padang
7. Kelurahan Lobusona
8. Kelurahan Padang Matinggi

6. Optimalisasi Pengelolaan Potensi Unggulan Daerah

Dalam rangka membangun perekonomian yang kuat untuk menjamin pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan lapangan kerja, peningkatan kuantitas dan kualitas produksi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, penguatan lembaga keuangan dan koperasi serta pengembangan potensi kawasan wisata perlu adanya kebijakan yang mampu menciptakan kemitraan yang sinergis antara masyarakat, swasta, akademisi dan pemerintah.

Penyusunan rencana pembangunan daerah saat ini selain mengacu kepada Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 juga Permendagri No. 86 Tahun 2017 yang mana diamanatkan pada Pasal 9 yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan : a.holistik-tematik; b.integratif; dan c. spasial. Pada Pasal 10 dijelaskan bahwa :

1. Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
2. Pendekatan integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
3. Pendekatan spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c,

dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Melalui implementasi pendekatan perencanaan tersebut diharapkan dapat menjadi solusi di tengah perekonomian global yang masih dalam tahap pemulihan dikarenakan adanya pandemic covid 19. Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*) melalui pengembangan potensi dan keunggulan yang dimiliki Kabupaten Labuhanbatu dengan memperkuat investasi (*pro investment*) di berbagai sektor dan ekonomi yang berbasis kerakyatan dengan kemitraan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat ditandai juga oleh upaya pemerataan dengan *trickle down effect* yang tinggi. Pembangunan ekonomi dan pemerataannya harus bertujuan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah penduduk miskin dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Adapun Potensi unggulan daerah Kabupaten Labuhanbatu antara lain pada sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, Pariwisata, Kehutanan (Perhutanan Sosial). Dalam rangka mengoptimalkan potensi unggulan dimaksud maka perlu dilakukan perencanaan pengelolaan potensi unggulan daerah secara terintegrasi dari hulu sampai hilir mencakup :

- a. Kegiatan hulu : budidaya pertanian, budidaya peternakan, budidaya perikanan dan perikanan tangkap serta kegiatan budidaya lainnya di kawasan perhutanan sosial;
- b. Kegiatan hilir : pengolahan hasil pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata.

Memperhatikan potensi unggulan berbasis kewilayahan maka Perencanaan pengembangan kawasan di kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut :

A. Kawasan Pertanian Terintegrasi

Implementasi kawasan pertanian terintegrasi di Kabupaten Labuhanbatu pada sentra tanaman pangan difokuskan pada wilayah yang memiliki lahan sawah terluas dalam satu hamparan di Kabupaten Labuhanbatu yakni Desa Sei Penggantungan Kecamatan Panai Hilir dengan luas lahan 5.456 Ha (Dinas Pertanian Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2019).

Meskipun dilokasi ini merupakan sawah tadah hujan dengan Indeks Pertanaman (IP) 1 (1 musim tanam dalam satu tahun).

Pengembangan kawasan terintegrasi di Desa Sei Penggantungan dimaksudkan untuk mengoptimalkan potensi sumberdaya alam dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas produk unggulan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan.

B. Kawasan Kampung Nelayan Maju

Gambaran umum kampung nelayan pada saat ini dengan karakteristik yang hampir sama diantaranya : Pemukiman yang padat penduduk dan miskin; Lingkungan kumuh dan kotor; Jalan lingkungan dan drainase yang kurang memadai; Minimnya sarana ketersediaan sumber air bersih; Pengelolaan sampah yang belum optimal; Minimnya kesadaran masyarakat terhadap Pentingnya menjaga kebersihan & kesehatan.

Pengembangan kampung nelayan maju diantaranya dengan penataan permukiman nelayan melalui : Perbaikan jalan lingkungan, drainase, Penyediaan air bersih, Pengelolaan persampahan, Pembenahan saluran air dan lingkungan bersih. Sedangkan untuk perubahan perilaku dan peningkatan SDM Nelayan dilakukan dengan membangun spiritual/kultur nelayan yang baik dan maju. Metode yang dilakukan dengan pendekatan keagamaan dan kearifan lokal (mis. melibatkan peran da'i/pemuka agama, asosiasi pesantren bahari) dan pendekatan sosial-budaya Penyebarluasan wawasan kelautan perikanan.

Adapun Strategi Kegiatan Penataan Kampung Nelayan Maju adalah :

- Menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan;
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat;
- Memupuk rasa kebersamaan, gotong royong dan partisipasi masyarakat (padat karya);
- Mengutamakan penggunaan tenaga kerja dan material/bahan baku;
- Perencanaan dan pelaksanaan penataan kampung nelayan dengan melibatkan kelompok nelayan (Koperasi/KUB/Perkumpulan nelayan lainnya);
- Sinergi kegiatan penataan kawasan dengan K/L terkait;

- Sinergi kegiatan pemberdayaan nelayan, pembinaan dan pemeliharaan kesehatan dan lingkungan dengan K/L terkait.

C. Kawasan Desa Berinovasi

Desa Berinovasi adalah desa atau kelurahan yang mampu membangun kapasitas inovasi untuk kehidupan yang berkelanjutan, menghargai budaya yang ada, dan menemukan peluang bisnis melalui pengembangan infrastruktur pedesaan, penerapan teknologi dan inovasi untuk pengembangan produk unggulan, membangun keterampilan/kompetensi, melalui sinergi komunitas/masyarakat, dunia usaha, akademisi dan pemerintah pusat/ daerah.

Implementasi Model Desa Berinovasi adalah upaya membangun wahana inovasi yang dikembangkan secara profesional dan didukung oleh kolaborasi antar pemangku kepentingan baik pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi/lembaga penelitian dan pengembangan, komunitas, masyarakat dan media guna meningkatkan kualitas dan nilai tambah PUD yang berdampak pada peningkatan produktifitas, daya saing dan perekonomian di desa.

Pengembangan kawasan desa berinovasi bertujuan untuk: a. Meningkatkan sinergi triple helix inovasi dalam rangka implementasi model Desa Berinovasi; dan b. Melaksanakan pembangunan, pengembangan, monitoring dan evaluasi terhadap implementasi model Desa inovatif.

Sasaran yang ingin dicapai adalah: a. Peningkatan sinergi triple helix inovasi dalam rangka implementasi model Desa Berinovasi; dan b. Terlaksananya pembangunan, pengembangan, monitoring dan evaluasi terhadap implementasi model Desa inovatif.

Pengembangan kawasan desa berinovasi di Kabupaten Labuhanbatu direncanakan beberapa lokasi desa yang memiliki karakteristik potensi wilayah yang hampir sama yaitu Desa Sei Siarti, Selat Beting, Sei Pelancang, Bagan Bilah, Sei Rakyat dan Sei Nahodaris Kecamatan Panai Tengah.

D. Kawasan Pariwisata “*Panai Natural and Historical Park*”

Panai Natural and Historical Park merupakan rencana pengembangan kawasan pariwisata di Kabupaten Labuhanbatu yang berada

di wilayah pesisir yang berbatasan dengan Selat Malaka. Potensi wisata yang rencananya akan dikembangkan secara terpadu yaitu antara Kota Tua Labuhan Bilik dan Wisata Pantai Alam Lestari (Kahona) dan Hutan Mangrove di Desa Sei Tawar Kecamatan Panai Hilir.

Melalui upaya penataan kawasan pariwisata Kota Tua Labuhan Bilik dan Pantai Alam Lestari (Kahona)/Hutan Mangrove yang didukung oleh akses yang baik dengan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan akan menjadi daya tarik investor untuk mengembangkan berbagai fasilitas pariwisata seperti perhotelan, home stay, restoran, wahana wisata buatan, dan lain sebagainya. Aktivitas pariwisata juga akan mendorong UMKM untuk lebih produktif menyediakan oleh-oleh berupa bahan makanan maupun kerajinan yang sesuai dengan potensi lokal.

Wisata Kota Tua Labuhan Bilik dan Pantai Kahona memiliki potensi sebagai alternatif destinasi wisata yang cukup menjanjikan. Salah satu alasannya adalah dua jenis destinasi wisata ini yaitu wisata sejarah dan wisata pantai mangrove belum ada di Labuhanbatu. Selain mengembangkan daerah wisata sekaligus melestarikan bangunan dan situs bersejarah yang ada di Labuhan Bilik. Pengembangan daerah wisata di Pantai Kahona juga bertujuan untuk melestarikan hutan mangrove yang sudah banyak tumbang dan dieksplotasi di daerah Pantai Kahona. Hal ini juga yang melatarbelakangi proyek Panai Natural and Historical Park yang merupakan kawasan wisata dari kota tua Labuhan Bilik di Kecamatan Panai Tengah sampai ke Pantai Kahona di Kecamatan Panai Hilir.

E. KAWASAN PERHUTANAN SOSIAL

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan Negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan (PermenLHK No.83/2016).

- A. Ketentuan melakukan perhutanan sosial berdasarkan UU No. 11 Tahun 2019 tentang Cipta Kerja

Pasal 29 A

- (1) Pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dan pasal 28 dapat dilakukan perhutanan sosial
- (2) Perhutanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada :
 - a. Perseorangan
 - b. Kelompok Tani Hutan
 - c. Koperasi

Pasal 29 B

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan kegiatan perhutanan sosial diatur dalam peraturan pemerintah

- Kepastian hukum untuk memayungi P83/2016; P39/2017 dan P17/2020 memastikan keadilan akses dan Pengelolaan hutan lestari oleh rakyat dengan prinsip keseimbangan ekologis, kohesi sosial yang mensejahterakan.
- Mandat menyusun PP regim baru perhutanan sosial yang mengatur 5 skema plus hutan hak. UU 41/1999 dan PP 6/2007 perhutanan sosial masuk dalam pemberdayaan masyarakat.

B. Kondisi Dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didalam/Sekitar Hutan

Kondisi masyarakat disekitar hutan :

- Desa di dalam/Sekitar Hutan = 25.863 desa
- Penduduk miskin di areal hutan 10,2 jt (36,73% dari total penduduk miskin di Indonesia)
- Ketidakadilan pemanfaatan hutan, total pemanfaatan hutan 42 juta ha, swasta 40,46 juta ha (96%) dan masyarakat 1,75 juta ha (4%)
- Konflik Tenurial,
- Kriminalisasi Masyarakat
- Kesenjangan Kota desa (Urbanisasi)

Upaya peningkatan kesejahteraan :

- Perhutanan Sosial = 12,7 juta Ha (30%)

- Program pemerataan ekonomi
- C. Tujuan Perhutanan Sosial: On-Farm -> Off-Farm
Meningkatkan proporsi hak kelola masyarakat terhadap hutan hingga 10% (setara dengan 12,7 juta ha) dalam bentuk hutan sosial
- D. Dampak Jangka Pendek
 1. Perbaikan dan adaptasi sistem, tersedianya indikasi wilayah kelola dan perbaikan proses bisnis hutan sosial;
 2. Perbaikan modal sosial
 3. Perbaikan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro (BLU);
 4. Pendampingan dan akses pasar terhadap produk masyarakat;
 5. Peningkatan Kapasitas manajemen masyarakat
- E. Dampak Jangka Menengah
 1. Pengembangan Ekonomi Domestik
 2. Sentra produksi hasil hutan
 3. Penurunan konflik tenurial
 4. Kelestarian Huta
- F. Dampak Jangka Panjang
Terbangun pusat-pusat ekonomi domestik dan pertumbuhan desa sentra produksi hasil hutan berbasis desa yang menyerap tenaga kerja dan mengentaskan kemiskinan.

7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Tata kelola pemerintahan atau *good governance* secara umum menyangkut pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan dapat ditinjau dari segi fungsional maupun pemerintah, Dari segi fungsional, yaitu dari segi aspek governance, yaitu apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan, atau justru sebaliknya dimana pemerintahan tidak berfungsi secara efektif dan terjadi inefisiensi, untuk itu, diperlukan tiga kaki yakni *Economic governance*, *Political governance*, *Administrative governance*.

Good governant merupakan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang universal, karena itu seharusnya diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Upaya menjalankan prinsip-prinsip *good governance* perlu dilakukan dalam penyelenggaraan. Ada masalah birokrasi yang dihadapi semua Pemerintahan Daerah sehubungan dengan pelaksanaan *good governance* di dalam Pemerintahan Daerah, baik segi struktur dan kultur serta nomenklatur program yang mendukungnya. Sampai sekarang penerapan prinsip *good governance* di pemerintah daerah masih bersifat sloganistik.

Secara umum ada lima prinsip dasar yang terkandung dalam *good corporate goverment* atau tata kelola yang baik menurut Daniri (42 : 2005). Dimana kelima prinsip tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, indenpendensi, dan kesetaraan/kewajaran. Selanjutnya lebih rinci dijelaskan kelima prinsip dasar tata kelola yang baik adalah sebagai berikut :

1. Transparansi (*transparency*) yaitu keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi.
2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ lembaga sehingga pengelolaan lembaga dapat terlaksana dengan baik.
3. Responsibilitas (*Responsibility*) yaitu kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan lembaga terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industri, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, atandar pengkajian dan perjaingan yang sehat.
4. Indenpendensi (*Indenpendency*) yaitu suatu keadaan di mana lembaga dikelola secara profesionalitas tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) yang secara sederhana dapat di definisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan peraturan menteri keuangan No. 7 Tahun 2006 dan permendagri No.61 Tahun 2007, pola tata kelola merupakan peraturan

internal yang dimaksudkan sebagai upaya untuk menjadikan lembaga pelayanan publik menjadi lebih efisien, efektif dan produktif. Pola tata kelola ini mengatur mengenai organisasi, tatalaksana, akuntabilitas dan transparansi.

Sekarang masa reformasi tampaknya sulit untuk melakukan perubahan sikap mental dan perilaku sistem pemerintahan birokrasi kita. Partai-partai politik yang memerintah ribut untuk menanamkan pengaruh dan orang-orangnya ke dalam birokrasi pemerintah. Cerita lama terulang kembali, ramai-ramai mendirikan “bangunan pengaruh” ke dalam birokrasi pemerintah sebagai sumber kekuatan untuk menyiapkan diri memenangkan pemilu mendatang.

Reformasi birokrasi, adalah salah satu cara untuk membangun kepercayaan rakyat. Pengertian reformasi birokrasi sendiri ialah, suatu usaha perubahan pokok dalam suatu sistem yang tujuannya mengubah struktur, tingkah laku, dan keberadaan atau kebiasaan yang sudah lama. Reformasi birokrasi ruang lingkupnya tidak hanya terbatas pada proses dan prosedur, tetapi juga mengaitkan perubahan pada tingkat struktur dan sikap serta tingkah laku. Hal ini berhubungan dengan permasalahan yang bersinggungan dengan authority atau formal power (kekuasaan). Tujuan utama reformasi birokrasi yaitu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga bisa memberikan kesejahteraan dan rasa keadilan pada masyarakat banyak. Di sisi lain birokrasi sangat sarat dengan banyak tugas dan fungsi, karena tidak saja hanya terfokus kepada pelayanan publik, tetapi juga bertugas dan berfungsi sebagai motor pembangunan dan aktivitas pemberdayaan. Proses reformasi yang harus dilakukan birokrasi nampaknya bukan hal yang mudah karena harus memformat ulang dengan penuh kritik dan tindakan korektif struktur dan konfigurasi birokrasi itu dari yang serba sakral feodal ke serba rasional dan profesional.

Strategi-strategi reformasi birokrasi, yaitu :

1. *Level kebijakan*, harus diciptakan berbagai kebijakan yang mendorong Birokrasi yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak sipil warga (kepastian hukum, batas waktu, prosedur, partisipasi, pengaduan, gugatan).

2. *Level organisational*, dilakukan melalui perbaikan proses rekrutmen berbasis kompetensi, pendidikan dan latihan yang sensitif terhadap kepentingan masyarakat, penciptaan Standar Kinerja Individu, Standar Kinerja Tim dan Standar Kinerja Instansi Pemerintah.
3. *Level operasional*, dilakukan perbaikan melalui peningkatan service quality meliputi dimensi *tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan empathy*.
4. Instansi Pemerintah secara periodik melakukan pengukuran kepuasan pelanggan dan melakukan perbaikan.

Selain memerlukan strategi-strategi, diperlukan pula tahapan-tahapan reformasi birokrasi, yaitu meningkatkan pelayanan publik guna mendapatkan kembali kepercayaan rakyat, pelayanan publik yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, serta perbaikan tingkat kesejahteraan pegawai. Reformasi birokrasi dibutuhkan untuk menjamin terlaksananya reformasi di bidang lain dalam suatu pemerintahan yang mengaplikasikan konsep administrasi pembangunan. Oleh karena itu, tanpa mengabaikan reformasi di bidang lain rekomendasi yang pertama harus dilakukan adalah reformasi birokrasi yang meliputi kelembagaan dan ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dan pengawasan dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Reformasi kelembagaan dilakukan melalui perampingan struktur organisasi birokrasi pemerintah di pusat dan daerah untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsinya. Penyusunan organisasi yang didasarkan pada analisis jabatan ini harus terus diupayakan. Oleh karena adanya tuntutan yang mendesak dan harus dilakukan untuk mendorong proses percepatan reformasi birokrasi, upaya-upaya khusus di bidang kelembagaan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan redefinisi kelembagaan birokrasi termasuk melakukan penataan kelembagaan sesuai dengan *standard operating procedure* atau SOP.
2. Melakukan penerapan audit institusi.
3. Di bidang ketatalaksanaan perlu dipertimbangkan sistem rekrutmen dan promosi pegawai sesuai dengan kecakapan dan kemampuannya dan dapat diberhentikan jika bekerja secara buruk sebagaimana yang berlaku di lingkungan swasta.

8. Lingkungan Hidup Berkualitas dan Optimalisasi Pengelolaan Persampahan

Menurut UU No 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Penanganan masalah lingkungan di tingkat publik membutuhkan kesadaran bersama yang lebih tinggi. Kebijakan terhadap suatu proyek yang memberi dampak terhadap lingkungan hidup hendaknya dikaji secara matang, dengan mempertimbangkan resiko, bukan saja kepada manusia tetapi juga berdampak pada keseimbangan ekosistem dan kelangsungan hidup makhluk lainnya.

Untuk merumuskan isu strategis pengelolaan persampahan perlu dilakukan identifikasi data dan informasi dari dokumen-dokumen perencanaan pembangunan. Sarana persampahan di kabupaten Labuhanbatu telah memiliki sistem pengumpulan sampah sementara (TPS) dengan menyediakan tempat-tempat sampah yang tersedia di pusat kota, selanjutnya sampah diangkut dengan menggunakan dump truk menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang menggunakan sistem *open dumping*. Sedangkan sebahagian besar lagi pengelolaan sampah yang ada masih dilakukan sendiri oleh penduduk dengan menimbun dan membakar, dibuang ke lahan kosong dan saluran. Pengelolaan sampah dengan penggunaan *dump truk* langsung ke sumber sampah seperti yang dikembangkan saat ini memiliki kendala sebagai berikut:

- a. Sulit melayani pemukiman padat pada jalan-jalan lingkungan yang relatif sempit untuk dilalui truk sampah.
- b. Pengumpulan sampah menggunakan truk akan cenderung mengurangi efektivitas pengangkutan sampah-sampah sehingga ritasi per hari ke TPA berkurang.

Pengembangan sistem sampah secara "*off site system*" kemungkinan akan lebih efisien dilakukan dengan pengembangan sebagai berikut :

- Pengumpulan sampah menggunakan becak sampah atau gerobak sampah pada wilayah yang sulit dilalui oleh truk sampah.

- Penyediaan lokasi transfer sampah dari becak/gerobak ke truk sampah untuk lokasi permukiman padat yang tidak dapat dilalui truk sampah.

Program/kegiatan persampahan yang melibatkan masyarakat antara lain menginformasikan :

- Program/kegiatan Persampahan Berbasis Masyarakat yang berhasil terdapat di lokasi kabupaten/kota.
- Faktor yang menyebabkan keberhasilan program/kegiatan tersebut seperti : melibatkan partisipasi aktif masyarakat, mempertimbangkan kebutuhan dan juga melibatkan laki-laki dan perempuan secara seimbang, berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah, program/kegiatan persampahan dijadikan program masyarakat yang dikelola oleh masyarakat, ada tokoh masyarakat/natural leader yang menggerakkan masyarakat, ada iuran operasi dan pengelolaan sarana sesuai dengan layanan yang diterima dan kemampuan masyarakat, ada lembaga yang mengelola layanan persampahan, ada kordinasi yang baik antara SKPD/Instansi terkait.

Pada kawasan-kawasan perkotaan pembuangan sampah diarahkan secara kolektif dengan menyediakan tempat sampah umum berupa tempat pembuangan sementara (TPS) yang kemudian akan dibuang bersama pada lokasi yang ditentukan. Untuk menunjang sistem pembuangan sampah secara kolektif, perlu direncanakan sistem pengumpulan sampah. Jenis pengumpulan sampah terdiri dari :

- Pengumpulan sampah rumah tangga (*house hold/domestic waste*);
- Pengumpulan sampah pasar (*market waste*);
- Pengumpulan sampah pertokoan dan jalan.

Proyeksi timbunan sampah didasarkan pada proyeksi jumlah penduduk hingga tahun 2027 dengan asumsi tingkat pelayanan persampahan mencapai 100%. Timbunan sampah per kapita diperkirakan sebesar 3 liter/orang/hari. Komposisi sampah domestik mencapai 80% dan sampah non domestik sebesar 20%. Faktor kompaksi sampah sebesar 50%.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi

Visi adalah pandangan jauh kedepan tentang sesuatu yang ingin dicapai. Pedoman utama penyusunan visi adalah kesesuaian dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan atau kondisimasa depandaerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka Visi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026.

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LABUHANBATU YANG BERKARAKTER, MAJU DAN SEJAHTERA TAHUN 2024”

Visi pembangunan Kabupaten Labuhanbatu dapat diuraikan sebagai berikut :

5.1.1. Berkarakter

Berkarakter Masyarakat Labuhanbatu yang memiliki sikap jujur, bertanggungjawab atas segala tindakan dan perbuatan, mengetahui hak dan kewajiban, disiplin, bekerja keras, percaya diri, mandiri, cinta sesama, berfikir logis dan inovatif, peduli terhadap lingkungan, menghargai perbedaan dan keragaman, memiliki nilai-nilai kebangsaan serta sikap-sikap positif lainnya. Seluruh komponen masyarakat dalam setiap kegiatannya menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, berkepribadian, demokratis-rasional dan berkeadilan sosial masyarakat yang menjunjung tingi nilai-nilai agama dan sosial budaya pada setiap tindakan dan perbuatannya.

5.1.2. Maju

Majuditandai dengan sistem dan pengelolaan pemerintahan yang bersih dan profesional. Peningkatan pembangunan dan kualitas infrastruktur diberbagai bidang. Meningkatnya taraf kehidupan masyarakat dibidangnekonomo, pendidikan, kesehatan serta kehidupan sosial lainnya. Kemajuan juga mencakup segala bidang baik bidang fisik ekonomi, mental

spritual (berkalakul karimah) keagamaan, kebudayaan, dan non fisiklainnya sehingga tercapai masyarakat sejahtera bahagia lahir dan batin.

5.1.3. Sejahtera

Masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, meliputi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Memperoleh fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan secara layak dan berkualitas. Terbukanya kesempatan kerja dan berwirausaha sehingga berpebghasilan memadai untuk dapat memenuhi kebutuhan lebih dari sekedar kebutuhan hidup.

5.2 MISI

Visi tersebut merupakan kondisi Kabupaten Labuhanbatu yang ingin dicapai melalui misi pembangunan sebagai berikut :

5.2.1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang merakyat, bersih dan profesional.

Pada misi ini yang akan dicapai adalah terlaksananya percepatan reformasi birokrasi pemerintahan yang baik dan profesional, dan terwujudnya kualitas pelayanan masyarakat untuk semua suku, ras dan golongan yang ada di wilayah pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu.

5.2.2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk membangun karakter SDM yang produktif yang inovatif.

Pada misi kedua ini, yang menjadi prioritas adalah meningkatkan pelayanan pendidikan yang dan kesehatan yang berkualitas, dan ditandai dengan peningkatan Produktifitas dan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang baik dengan terus melakukan inovasi.

5.2.3. Meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis potensi daerah melalui peningkatan produktivitas koperasi dan UMKM serta industri kreatif.

Meningkatnya Nilai daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah yang ditandai dengan meningkatnya aktivitas dan nilai tambah ekonomi berbasis potensi daerah dan inovatif, Meningkatnya perekonomian masyarakat melalui pengembangan Koperasi, UMKM dan Industri kreatif.

5.2.4. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan guna percepatan pengembangan wilayah dan kawasan.

Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan umum, infrastruktur dasar dalam mendukung perekonomian daerah, serta meningkatnya system transportasi, dan mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup menjadi hal penting untuk meningkatkan pelayanan akses infrastruktur.

5.2.5. Meningkatnya rasa aman, nyaman dan penuh kekeluargaan ditengah kehidupan masyarakat yang majemuk.

Rasa aman dan nyaman, selain dapat menciptakan pola pikir positif, juga menjadi dasar kuat untuk mendorong motivasi harmonisasi dan investasi. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban serta kenyamanan ditengah kehidupan bermasyarakat yang majemuk menjadi salah satu dasar percepatan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu.

5.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan analisis isu-isu strategis.

5.3.1 Tujuan

Tujuan adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu 2021-2026 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPJMD. Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan pembangunan daerah menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Untuk itu perlu dibuat tujuan dan sasaran pembangunan daerah dikaitkan dengan visi dan misi Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021– 2026. Tujuan

merupakan implementasi pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Kabupaten Labuhanbatu secara tepat mengetahui arahan untuk mencapai visi dan misi dengan mempertimbangkan sumber daya daerah dan kemampuan yang dimiliki secara aktual maupun potensial. Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai dan dihasilkan dalam jangka lima tahun ini menjadi dasar penyusunan performance (kinerja) pembangunan daerah secara menyeluruh dan komprehensif.

5.3.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja pembangunan Kabupaten Labuhanbatu serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh.

Tabel 5.1. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026
Visi : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LABUHANBATU
YANG BERKARAKTER, MAJU DAN SEJAHTERA TAHUN 2024

Misi1: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang merakyat, bersih dan profesional.

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES) SASARAN		SATUAN		CAPAIAN KINERJA							KONDISI AKHIR PERENCANAAN
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.1.	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih danTransparan	1	Indeks Reformasi Birokrasi				Nilai	42	48,56	50,50	52,50	55,00	57,50	60,50	60,50		
				1.1.1.	Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1	Opin BPK	Poin	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		
			1.1.2.	Meningkatnya Kinerja Birokrasi	1	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Skor	CC	2,68	3	3,20	3,25	4,55	3,60	3,65		

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES) SASARAN		SATUAN	CAPAIAN KINERJA							KONDISI AKHIR PERENCANAAN
									2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
						2	Nilai Evaluasi SAKIP	Predikat	56	56,99	61	62	64	67	70	70,50
						1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	n/a	n/a	80	85	90	95	100	100
				1.1.3.	Meningkatnya Pelayanan Publik yang berkualitas											

Misi 2: Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk membangun karakter SDM yang produktif yang inovatif

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES) SASARAN		SATUAN	CAPAIAN KINERJA							KONDISI AKHIR PERENCANAAN
									2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2.1.	Meningkatkan akses dan kualitas mutu pendidikan serta pelayanan kesehatan yang prima	1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)					Nilai	72..01	72.8	73.35	74	74.2	74.6	75.2	75.2
				2.1.1	Meningkatnya akses dan kualitas mutu layanan pendidikan yang merata	1	Harapan Lama Sekolah Pendidikan Dasar	Tahun	12.6	12.6	14.2	14.3	14.35	14.4	14.45	14.45
						2	Rata rata lama sekolah	Tahun	9.37	9.53	9.69	9.87	10.05	10.24	10.44	10.44
						3	Indeks Kualitas Pendidikan	Poin	n/a	n/a	80.2	82.3	83.4	84.5	85.6	85.6

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES) SASARAN		SATUAN	CAPAIAN KINERJA							KONDISI AKHIR PERENCANAAN
									2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
				2.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas layanan kesehatan	1	Usia harapan hidup	Tahun	69.93	69.95	69.97	69.98	70.00	70.00	70	70
2.2.	Meningkatkan kualitas SDM yang berkarakter dan inovatif	1.	Tingkat Kemiskinan					Persen	8.44	8.74	8.6	8.5	8.4	8.3	8.2	8.2
				2.2.1.	Terciptanya generasi mandiri yang berprestasi	1	Persentase Wirausaha Muda	Persen	n/a	60%	63%	67%	73%	87%	89	89

Misi 3 : Meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis potensi daerah melalui peningkatan produktivitas koperasi dan UMKM serta industri kreatif.

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES) SASARAN		SATUAN	CAPAIAN KINERJA							KONDISI AKHIR PERENCANAAN
									2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3.1.	Meningkatnya Daya Saing Potensi Produk Unggulan Daerah	1.	Indeks Daya Saing Saing Daerah					Poin	n/a	n/a	3.4	4	4.5	5	6	6
				3.1.1.	Meningkatnya Kualitas Produk Unggulan Daerah yang berorientasi ekspor	1	Peningkatan NilaiEksporPerdagangan	Persen	n/a	5	10	15	20	25	30	30
3.2.	Meningkatkan potensi ekonomi daerah melalui pengembangan koperasidan UMKM serta industry kreatif	1.00	Pertumbuhan Ekonomi					Persen	-3.44	2.57	4.78	5	5.2	5.4	5.6	5.6

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES) SASARAN		SATUAN	CAPAIAN KINERJA							KONDISI AKHIR PERENCANAAN
									2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
				3.2.1.	Meningkatnya peranan sektor koperasi dan UMKM serta industry kreatif	1.	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)	Persen	2	2	3	4	5	67	7	8
						2.	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Persen	3	3	3	3	3	3	3	3
3.3.	Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan	1.	Gini Ratio					Poin	0.31	0.3	0.285	0.28	0.27	0.26	0.25	0.25

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES) SASARAN		SATUAN	CAPAIAN KINERJA							KONDISI AKHIR PERENCANAAN
									2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
				3.3.1.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	1	Pendapatan Perkapita ADHB	Juta Rupiah	69.085.836	72.560.537	75.621.546	78.787.717	82.090.639	85.686.659	89.404.313	89.404.313
						2	Persentase Fakir Miskin yang tertangani	Persen	87	56	57	58	59	59	60	60
						3	Persentase anak terlantar yang tertangani	Persen	0	0	20	20	40	55	75	75
				3.3.2.	Meningkatnya kesempatan kerja melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan	1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,05	5,75	5,47	5,20	4,94	4,70	4,47	4,47

Misi 4 : Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan guna percepatan pengembangan wilayah dan kawasan

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES) SASARAN		SATUAN		CAPAIAN KINERJA							KONDISI AKHIR PERENCANAAN
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
4.1.	Meningkatkan kualitas infrastruktur yang merata dan berwawasan lingkungan	1.	Indeks Infrastruktur				Poin	n/a	n/a	40.00	45.00	48.00	50.00	55.00	55.00		
				4.1.1.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Publik yang merata	1	Rasio Rumah Layak Huni	Persen	46.27	51.91	57.05	62.2	67.34	74.12	79.23	79.23	
						2	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak	Persen	80.92	85.01	90.01	95.7	100	100	100	100	
						3	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	Persen	64.57	68.81	73.05	77.29	81.52	85.76	90	90	

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES) SASARAN		SATUAN	CAPAIAN KINERJA							KONDISI AKHIR PERENCANAAN
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
				4.1.2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	57,91	58,03	58,66	57,18	57,48	58.00	58.50	58,50
					2	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	Persen	1.7	1.5	1.3	1.1	0.9	0.4	0	0
				4.1.3. Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	1	Indeks Resiko Bencana	Poin	n/a	n/a	140	145	148	150	152	152
4.2.	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk percepatan pengembangan wilayah dan kawasan	1.	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten				Persen	64,19	62,14	65.00	67,22	68,55	70,00	80,50	80,50

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES) SASARAN		SATUAN	CAPAIAN KINERJA							KONDISI AKHIR PERENCANAAN
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
				4.2.1. Meningkatnya pemerataan pembangunan yang didukung konektivitas antar wilayah dan kawasan	1	Indeks Wiliamson	Poin	n/a	n/a	0.4	0.35	0.33	0.2	0.1	0.1

Misi 5 : Meningkatnya Rasa Aman, nyaman dan penuh kekeluargaan ditengah kehidupan masyarakat yang majemuk

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES) SASARAN		SATUAN		CAPAIAN KINERJA							KONDISI AKHIR PERENCANAAN
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
5.1.	Meningkatnya Ketertiban, Ketentraman dan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	1.00	Indeks Ketentraman dan Ketertiban				Poin	n/a	n/a	90	91	93	94	95	95		
				5.1.1.	Meningkatnya Keimanan dan Kerukunan Umat Beragama dalam Kerangka Demokrasi	1	Indeks Kerukunan Beragama	Poin	n/a	n/a	80	84	86	87	88	88	
				5.1.2.	Meningkatnya Rasa Kepedulian dan Tanggungjawab Sosial	1	Persentase Penurunan Angka Kriminalitas	Persen	n/a	n/a	20	25	30	35	40	40	
						2	Persentase penurunan Kasus Penggunaan Narkoba	Persen	n/a	n/a	20	30	40	50	60	60	

Tabel 5.2. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJPD Kabupaten Labuhanbatu periode2005-2025 dengan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Periode 2021-2026.

Visi, Misi Tujuan Sasaran	RPJP 2005-2025	RPJMD 2021-2026
Visi	Labuhanbatu Sentra Jasa dan AgroIndustriyang Berdaya Saing Tahun 2030	Terwujudnya Masyarakat Labuhanbatu yang berkarakter, maju dan sejahtera tahun 2024.
Misi	Misi 1. Industrialisasi Labuhanbatu melalui pengembangan seluruh industri turunan kelapa sawit dan karet yang terintegrasi secara vertikal dan horisontal	Misi 3. Meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis potensi daerah melalui peningkatan produktivitas koperasi dan UMKM serta industry kreatif
	Misi 2. Mengembangkan wilayah dengan pembangunan perkotaan sebagai sentra agribisnis	Misi4.Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan guna percepatan pengembangan wilayah dan kawasan
	Misi 3. Mengembangkan prasarana utama dalam sistem transportasi darat, udara, dan laut sebagai tulang punggung pengembangan perdagangan produk industri turunan kelapa sawit dan karet	Misi4.Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan guna percepatan pengembangan wilayah dan kawasan
	Misi 4. Meningkatkan kualitas sosial, ekonomi, keimanan dan ketakwaan sumber daya masyarakat	Misi 3. Meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis potensi daerah melalui peningkatan produktivitas koperasi dan UMKM serta industry kreatif
	Misi 5. Mengembangkan kelembagaan pemerintah daerah, meliputi (1) SDM Aparatur, (2) birokrasi yang berorientasi pelayanan, (3) organisasi yang memiliki sistem jaringan, (3) pengembangan lembaga profesional	Misi 1.Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang merakyat, bersih dan profesional.
Tujuan	Tuj 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Tuk 3.3.Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan
	Tuj 2. Meningkatkan pelayanan umum	Tuj.11.Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Transparan

Visi, Misi Tujuan Sasaran	RPJP 2005-2025	RPJMD 2021-2026
		Tuj 5.1. Meningkatnya Ketertiban, Ketentraman dan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat
	Tuj 3. Meningkatkan daya saing daerah	Tuj 2.1.Meningkatkan akses dan kualitas mutu pendidikan serta pelayanan kesehatan yang prima
		Tuj 2.2. Meningkatkan kualitas SDM yang berkarakter dan inovatif
		Tuj. 3.1. Meningkatnya Daya Saing Potensi Produk Unggulan Daerah
		Tuj 4.1.Meningkatkan kualitas infrastruktur yang merata dan berwawasan lingkungan
		Tuj 4.1.Meningkatnya ketersediaan infrastruktur untuk percepatan pengembangan wilayah dan kawasan
Sasaran	S.1. Terbangunnya industri hilir, jasa dan perdagangan berbasis produk unggulan daerah.	S.3.1.1.Meningkatnya Kualitas Produk Unggulan Daerah yang berorientasi ekspor dan Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah
	S.2. Terwujudnya pertumbuhan pendapatan domestik regional bruto (PDRB).	S.3.2.1.Meningkatnya peranan sektor koperasi dan UMKM serta industri kreatif
	S.3.Terwujudnya pertumbuhan pendapatan asli daerah yang proporsional terhadap PDRB	S.1.1.1.Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang bersih dan akuntabel
	S.4. Terciptanya lapangan pekerjaan baru bagi pertambahan penduduk	S.3.3.2.Meningkatnya kesempatan kerja melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan
	S.5.. Terwujudnya pengembangan wilayah perkotaan sebagai <i>forward linkages</i> produk unggulan daerah	S.3.1.1.Meningkatnya Kualitas Produk Unggulan Daerah yang berorientasi ekspor dan Ketahanan Pangan Daerah
	S.6. Terwujudnya perluasan dan diversifikasi aktivitas ekonomi wilayah.	S.4.2.1.Meningkatnya pemerataan pembangunan yang didukung konektivitas antar wilayah dan kawasan

Visi, Misi Tujuan Sasaran	RPJP 2005-2025	RPJMD 2021-2026
	S.7. Terbangunnya jaringan transportasi yang terintegrasi antara darat, laut, dan udara bagi kegiatan ekonomi (aksesibilitas daerah barang, orang dan jasa).	S.4.1.1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Publik yang merata
	S.8. Terbangunnya infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi dan masyarakat yaitu listrik, air bersih, perumahan, sanitasi, dan fasilitas umum	S.4.1.1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Publik yang merata
	S.9. Terbangunnya jaringan irigasi sebagai pendukung peningkatan intensitas tanam sub sektor tanaman pangan	S.3.1.1.Meningkatnya Kualitas Produk Unggulan Daerah yang berorientasi ekspor dan meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah
	S.10. Terbangunnya infrastruktur telekomunikasi dan teknologi informasi	S.4.1.1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Publik yang merata
	S.11. Terbangunnya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat yakni pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	S.2.1.1.Meningkatnya akses dan kualitas mutu layanan pendidikan yang merata
		S.2.1.2.Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas layanan kesehatan
	S.12. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM daerah yang ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM), indeks pembangunan gender (IPG), dan tingkat kesehatan masyarakat.	S.2.1.1.Meningkatnya akses dan kualitas mutu layanan pendidikan yang merata
		S.2.1.2.Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas layanan kesehatan
	S.13. Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, kerukunan antar umat beragama, supremasi hukum, dan penghargaan HAM	S.5.1.1.Meningkatnya Keimanan dan Kerukunan Umat Beragama dalam Kerangka Demokrasi
	S.14. Terlaksananya pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah secara langsung, jujur, dan adil	S.5.1.1.Meningkatnya Keimanan dan Kerukunan Umat Beragama dalam Kerangka Demokrasi

Visi, Misi Tujuan Sasaran	RPJP 2005-2025	RPJMD 2021-2026
	S.15. Terbangunnya sistem pelayanan satu atap untuk pelayanan umum dan usaha	S.1.1.3.Meningkatnya Pelayanan Publik yang berkualitas
	S.16. Meningkatnya kualitas (profesionalisme dan kompetensi) SDM aparatur pemerintah daerah	S.1.1.1.Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang bersih dan akuntabel
	S.17. Meningkatnya kualitas (profesionalisme dan kompetensi) SDM pendidikan dan kesehatan.	S.2.1.1.Meningkatnya akses dan kualitas mutu layanan pendidikan yang merata
		S.2.1.2.Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas layanan kesehatan
	S.18. Terwujudnya akuntabilitas pelayanan umum pemerintah daerah.	S.1.1.1. Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang bersih dan akuntabel
	S.19. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, profesional, dan bebas KKN.	S.1.1.1. Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang bersih dan akuntabel
		S.1.1.2. Meningkatnya Kinerja Birokrasi
		S.1.1.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang berkualitas

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1 Strategi

Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua:

1. Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
2. Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Perencanaan sekaligus dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja yang actionable. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis.

6.2 Arah Kebijakan

Disamping Strategi, hal yang penting lainnya adalah menentukan arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu dan menyelaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan arah kebijakan pembangunan provinsi Sumatera Utara maka dapat dirumuskan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu yaitu “Mewujudkan Kabupaten Cerdas dan mengembangkan Kawasan Pesisir Terpadu.” Arah kebijakan perencanaan pembangunan pertahun Kabupaten Labuhanbatu dapat dijabarkan dengan tema-tema per tahun sebagai berikut:

1. Tahun 2022 : Menciptakan Kabupaten Cerdas dalam Kawasan Perkotaan Rantauprapat sebagai Pusat Kegiatan Perdagangan, Jasa, Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang ramah lingkungan dan mengembangkan Kawasan Desa Inovatif Terintegrasi
2. Tahun 2023 : Membangun Kabupaten Cerdas dengan mewujudkan Kawasan Perkotaan Rantauprapat sebagai Pusat Kegiatan Perdagangan, Jasa, Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang ramah lingkungan dan mengembangkan Kawasan Kampung Nelayan Maju
3. Tahun 2024 : Menumbuhkan Kabupaten Cerdas melalui Kawasan Perkotaan Rantauprapat sebagai Pusat Kegiatan Perdagangan, Jasa, Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang ramah lingkungan dan mengembangkan Kawasan Panai Natural and Historical Park
4. Tahun 2025 : Mengembangkan Kawasan Perkotaan Rantauprapat sebagai Kabupaten Cerdas untuk Pusat Kegiatan Perdagangan, Jasa, Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang ramah lingkungan dan Kawasan Pertanian Terintegrasi
5. Tahun 2026 : Melestarikan Kawasan Perkotaan Rantauprapat sebagai Kabupaten Cerdas untuk Pusat Kegiatan Perdagangan, Jasa, Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang ramah lingkungan dan mengembangkan Kawasan Perhutanan Sosial

Arah kebijakan pengembangan kewilayahan Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan arah kebijakan nasional, provinsi Sumatera Utara dan kabupaten sebagaimana termuat dalam RTRW Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut:

1. Program Strategis Nasional (Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Proyek Strategis Nasional).

Program strategis nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Labuhanbatu terkait dua sektor, yaitu:

- a. Sektor Jalan dan Jembatan
 - 1) Jalan Tol Rantau Prapat - Kisaran - bagian dari Trans Sumatera
 - 2) Jalan Toi Dumai - Sp. Sigambal - Rantau Prapat - bagian dari Trans Sumatera

b. Sektor Kereta Api
Kereta Api Rantau Prapat - Duri Pekanbaru

2. Tinjauan Kebijakan Nasional (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional)



RAHAAN KEBIJAKAN

Arahan	Pengembangan
Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang	Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki;
Strategi Peningkatan Akses Pelayanan Perkotaan dan Pusat Pertumbuhan ekonomi wilayah	- Menjaga dan mewujudkan keterkaitan antarkawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya; - Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya; - Mengembangkan kota dan kawasan perkotaan baru secara holistik dan terintegrasi, inklusif, serta berkelanjutan.
Strategi Untuk Pengendalian Perkembangan Kegiatan Budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	- Mengembangkan perkotaan metropolitan dan kota besar dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak; - Mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; - Membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan metropolitan dan kota besar untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya; - Mengendalikan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kota sedang sebagai kawasan perkotaan penyangga arus urbanisasi desa ke kota;
Pengembangan PKW Labuhanbatu (Rantau Prapat)	- Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN; - Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; - Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau

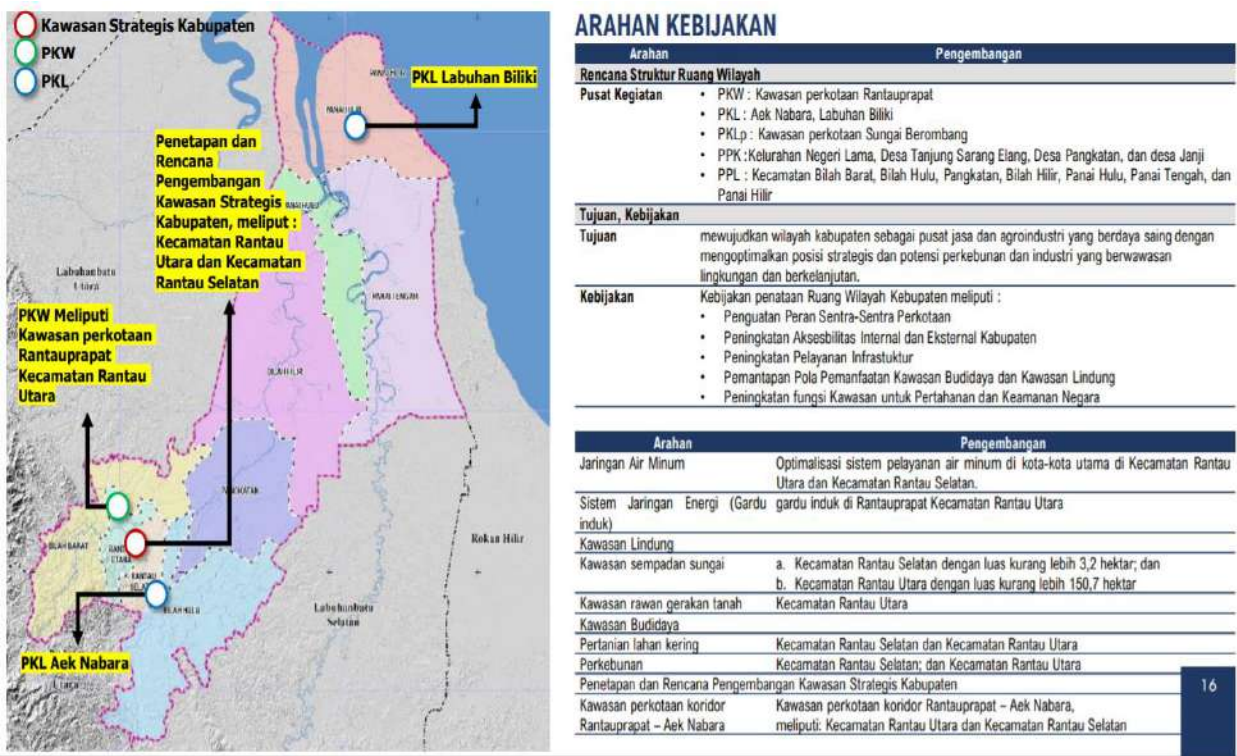
3. Tinjauan Kebijakan Provinsi Sumatera Utara (Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 – 2037).



RAHAAN KEBIJAKAN

Arahan	Pengembangan
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH	
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumber daya Air	Pengembangan sumber daya air pada kawasan rawa yang tersebar di Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Asahan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Karo, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Tapanuli Utara.
RENCANA POLA RUANG WILAYAH	
Rencana Pengembangan Kawasan Yang Memberikan Perlindungannya terhadap Kawasan Bawahannya	Kawasan lahan gambut yang menyebar di wilayah Kabupaten Langkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal; Kabupaten Nias; dan
Rencana Pengembangan Kawasan Peternakan	Pengembangan kawasan budidaya peternakan hewan besar dilakukan di wilayah yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan peternakan hewan besar antara lain Kabupaten Labuhanbatu.
Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertambangan	Pengembangan kawasan pertambangan dilakukan di wilayah yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan pertambangan antara lain : - Tambang minyak dan gas bumi di Kabupaten Labuhanbatu; - Tambang Timah di Kabupaten Labuhanbatu - Tambang Arsen di Kabupaten Labuhanbatu.
RENCANA KAWASAN STRATEGIS	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Labuhanbatu dan sekitarnya.

4. Tinjauan Kebijakan Kabupaten (Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015-2035).



- Sistem perkotaan Kabupaten Labuhanbatu memiliki tingkatan tata jenjang pusat permukiman pusat-pusat pelayanan, yaitu :
- a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), yaitu merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kotayang ditetapkan secara nasional;
 - b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yaitu merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan yang ditetapkan dalam RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi);
 - c. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp), yaitu merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan yang dipromosikan dalam RTRWK (Rencana TataRuang Wilayah Kabupaten);
 - d. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), yaitu merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa; dan
 - e. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), yaitu merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Perencanaan Strategik pada bagian ini dituangkan secara lebih rinci ke dalam Misi 1 sampai dengan Misi 5 berdasarkan Strategi dan Arah Kebijakan sebagai berikut:

MISI 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang merakyat, bersih dan profesional.

Tabel 6.1
Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 1

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)	
1.1. Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Transparan	1.1.1. Meningkatkan Kualitas Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1.1.1.1 Pengelolaan Pemerintahan yang baik dan taat hukum	1.1.1.1.1 Peningkatan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan melalui e - Government.	1	Opini BPK
			1.1.1.1.2 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Informasi Publik Berbasis SPBE		
			1.1.1.1.3 Peningkatan Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel		
		1.1.1.2 Meningkatkan Pendapatan Daerah	1.1.1.2.1 Meningkatkan Potensi Pendapatan Asli Daerah	1	Persentase PAD terhadap pendapatan
	1.1.2. Meningkatkan Kinerja Birokrasi	1.1.2.1 Implementasi Reformasi Birokrasi	1.1.2.1.1 Meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja Birokrasi.	1	Nilai Evaluasi LPPD
				2	Nilai SAKIP
	1.1.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang berkualitas	1.1.3.1 Implementasi Pelayanan Publik dengan Optimalisasi Pencapaian Target.	1.1.3.1.1. Peningkatan Kualitas dan Efektivitas Pelayanan Publik	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik (IKM)

MISI 2 : Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk membangun karakter SDM yang produktif yang inovatif.

Tabel 6.2
Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 2

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)	
2.1. Meningkatkan akses dan kualitas mutu pendidikan serta pelayanan kesehatan yang prima	2.1.1 Meningkatkan akses dan kualitas mutu layanan pendidikan yang merata	2.1.1.1 Peningkatan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, kurikulum, ketersediaan tenaga pendidik sesuai dengan kewenangan kabupaten	2.1.1.1.1 Peningkatan mutu dan standarisasi sarana dan prasarana, kuantitas tenaga pendidik sesuai kebutuhan dan jumlah siswa serta manajemen	1	Harapan Lama Sekolah Pendidikan Dasar
				2	Rata-rata lama sekolah
		2.1.1.2 Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga pendidikan	2.1.1.1.2 Peningkatan kualitas materi pembelajaran pendidikan dasar, anak usia dini dan non formal bermuatan lokal	3	Indeks Kualitas Pendidikan
			2.1.1.2.1 Pemerataan jumlah dan mutu tenaga kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dasar, PAUD dan nonformal/ kesetaraan		
			2.1.1.3 Peningkatan pengawasan dan pengendalian pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat		
		2.1.1.4 Pengembangan, Pembinaan, dan perlindungan bidang sastra dan bahasa daerah	2.1.1.4.1 Pemberian penghargaan bidang bahasa dan sastra yang menjadi kewenangan daerah		
			2.1.1.4.2 Pengadaan dan publikasi		

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)	
			bahasa dan sastra daerah		
		2.1.1.5 Peningkatan Kualitas Mahasiswa/l Berprestasi	2.1.1.5.1 Pemberian Beasiswa kepada Mahasiswa/l Berprestasi dan kurang mampu		
	2.1.2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas layanan kesehatan	2.2.1.1 Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi	2.2.1.1.1 Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi	1	Usia harapan hidup
			2.2.1.1.2 Percepatan perbaikan gizi untuk pencegahan dan penanganan permasalahan gizi		
			2.2.1.1.3 Peningkatan Pengendalian Penyakit		
			2.2.1.1.4 Penguatan Sistem Kesehatan		
			2.2.1.1.5 Pembudayaa n Perilaku Hidup Sehat Melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat		
			2.2.1.1.6 Meningkatkan Kualitas dan Cakupan Layanan Keluarga Berencana		

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)
2.2 Meningkatkan kualitas SDM yang berkarakter dan inovatif	2.2.1 Terciptanya generasi mandiri yang berprestasi	2.2.1.1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas kelompok generasi mandiri dan atlet berprestasi	2.2.1.1.1 Meningkatkan kuantitas serta Kualitas SDM kelompok dan kelembagaan kepemudaan	1 Persentase Wirausaha Muda

MISI 3: Meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis potensi daerah melalui peningkatan produktivitas koperasi dan UMKM serta industri kreatif

Tabel 6.3
Strategi dan Arah Kebijakan di Misi 3

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)
3.1. Meningkatkan Daya Saing Potensi Produk Unggulan Daerah	3.1.1. Meningkatkan Kualitas Produk Unggulan Daerah yang berorientasi ekspor	3.1.1.1. Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam daerah	3.1.1.1.1. Peningkatan produksi/produktivitas bahan pangan dan tanaman perkebunan berbasis teknologi, terintegrasi dan berkelanjutan	1 Nilai Ekspor Perdagangan
			3.1.1.1.1.2. Optimalisasi Peran Penyuluh Pertanian Berbasis Teknologi Informasi	
			3.1.1.1.1.3. Peningkatan pengolahan produk hasil pertanian/peternakan/perikanan	
			3.1.1.1.1.4. Distribusi dan Jaringan pemasaran hasil pertanian/peternakan/perikanan berbasis ekspor	
3.2. Meningkatkan	3.2.1. Meningkatnya	3.2.1.1. Fasilitasi	3.2.1.1.1. Peningkatan	1. Kontribusi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)
n potensi ekonomi daerah melalui pengembangan koperasi dan UMKM serta industri kreatif	peranan sektor koperasi dan UMKM serta industri kreatif	Pengembangan Produk Unggulan Daerah melalui Pemberdayaan UMKM, Koperasi, Perdagangan dan Industri yang berkelanjutan berbasis Teknologi Informasi	Strandarisasi Perlindungan Konsumen	Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)
			3.2.1.1.2. Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pasar yang Berkualitas	
			3.2.1.1.3. Mendorong Peningkatan Kualitas, Promosi serta Pemasaran Produk	
			Unggulan Daerah yang berorientasi Pasar Domestik Dan Internasional	
			3.2.1.1.4. Peningkatan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
			3.2.1.1.5 Mendorong kemitraan Usaha antara Pelaku Industri,pasar modern dengan pelaku mikro dan kecil	
			3.2.1.1.6 Peningkatan Pengendalian Izin Usaha Industri	
			3.2.1.1.7 Peningkatan Teknologi untuk Perencanaan Pembangunan Industri	
			3.2.1.1.8 Peningkatan kualitas tatakelola dan koordinasi pengaktifan koperasi	
			3.2.1.1.9 Peningkatan Status Pasar dan atau Pembentukan Perusahaan	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)	
			Daerah		
		3.2.1.2. Menciptakan Iklim Investasi bagi Dunia Usaha yang Kondusif dan Berwawasan Lingkungan	3.2.1.2.1. Meningkatkan Nilai Investasi		
			3.2.1.2.2. Mendorong pemetaan dan promosi potensi-potensi investasi yang di dukung sistem perijinan berkualitas berbasis teknologi		
		3.2.1.3. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur desa dalam rangka pengelolaan desa yang berfokus pada kemakmuran ekonomi dan ketentaraman sosial bagi masyarakat desa	3.2.1.3.1 Meningkatkan Kemandirian Desa yang didukung Aparatur Desa yang Berkualitas		
			3.2.1.3.2 Mengembangkan Kelembagaan Perekonomian Desa		
			3.2.1.3.3 Optimalisasi Potensi Desa dengan Pemberdayaan Masyarakat Desa		
		3.2.1.4. Meningkatkan Kualitas Pariwisata Lokal	3.2.1.4.1. Peningkatan Kelayakan dan Ketersediaan Destinasi Wisata	1.	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB
		3.2.1.5 Mendorong dinamika kehidupan yang memiliki seni dan budaya	3.2.1.5.1. Meningkatkan kualitas pengembangan dan pemanfaatan bidang seni dan budaya		

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)	
				3.2.1.5.2	Pembinaan SDM dan kapasitas lembaga kesenian tradisional	
				3.2.1.5.3	Peningkatan kualitas sejarah lokal	
				3.2.1.5.4	Meningkatkan pelestarian nilai-nilai tradisi	
		3.2.1.6	Kemudahan akses pendaftaran museum	3.2.1.6.1	Meningkatkan Pendataan Museum	
3.3 Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan	3.3.1 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	3.3.1.1	Peningkatan dan kemudahan akses kesejahteraan dan Standar Hidup Sosial Masyarakat	3.3.1.1.1	Penguatan Kapasitas dan kualitas Kebijakan Sosial	1 2 Pendapatan Perkapita ADHB Persentase Fakir Miskin yang tertangani
				3.3.1.1.2	Peningkatan Kualitas Gender, Perempuan dan Anak	1. Persentase Anak terlantar yang tertangani
				3.3.1.1.3	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam penegakan hukum dan penguatan keamanan	
	3.3.2 Meningkatkan kesempatan kerja melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan	3.3.2.1	Penguatan Kelembagaan dan kerjasama Sektor ketenagakerjaan	3.3.2.1.1	Peningkatan Potensi Lapangan kerja Baru	1 Tingkat Pengangguran Terbuka
				3.3.2.1.2	Penguatan Wirausaha Muda melalui Kerja Sama Organisasi Pengusaha	

MISI 4 :Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan guna percepatan pengembangan wilayah dan kawasan

Tabel 6.4
Strategi dan Arah Kebijakan di Misi 4

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)
4.1. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang merata dan berwawasan lingkungan	4.1.1. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Publik yang merata	4.1.1.1. Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Permukiman serta Akses Pelayanan Air Minum dan Sanitasi	4.1.1.1.1. Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rasio Rumah Layak Huni
			4.1.1.1.2. Penambahan Jumlah Akses dan Pelayanan Air Limbah Domestik layak dan berkelanjutan	1 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak
		4.1.1.2 Peningkatan Sarana dan Prasana Infrastruktur Pelayanan Umum dan Penataan Ruang	4.1.1.2.1 Peningkatan kualitas jalan dan jembatan	1 Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik
			4.1.1.2.2 Peningkatan kualitas Manajemen konstruksi	
			4.1.1.2.3 Peningkatan Kualitas Penataan Ruang Kabupaten	
			4.1.1.2.4 Peningkatan kualitas penataan gedung dan lingkungan	
	4.1.2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	4.1.2.1. Meningkatkan kemudahan akses ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan	4.1.2.1.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana serta manajemen Pengelolaan Persampahan	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
				2 Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)
	4.1.3 Meningkatkan Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	4.1.3.1 Optimalisasi Penanggulangan Bencana	4.1.3.1.1 Peningkatan sarana dan prasarana ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	1 Indeks Resiko Bencana
4.2 Meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk percepatan pengembangan wilayah dan kawasan	4.2.1 Meningkatkan pemerataan pembangunan yang didukung konektivitas antar wilayah dan kawasan	4.2.1.1 Meningkatkan Kualitas dan kemudahan akses antar wilayah dan kawasan	4.2.1.1.1 Peningkatan pembiayaan pengembangan Konektivitas kawasan	1 Indeks Williamson

MISI 5 : Meningkatnya rasa aman, nyaman dan penuh kekeluargaan ditengah kehidupan masyarakat yang majemuk.

Tabel 6.5
Strategi dan Arah Kebijakan di Misi 5

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)
5.1 Meningkatnya Ketertiban, Ketentraman dan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	5.1.1 Meningkatkan Keimanan dan Kerukunan Umat Beragama dalam Kerangka Demokrasi	5.1.1.1 Optimalisasi Harmonisasi Kerukunan Umat Beragama	5.1.1.1.1 Peningkatan Kualitas Keimanan dalam kehidupan demokrasi	1 Indeks Kerukunan Beragama
	5.1.2 Meningkatkan Rasa Kepedulian dan Tanggungjawab Sosial	5.1.2.1 Meningkatkan Kualitas tanggungjawab sosial	5.1.2.1.1 Peningkatan Kualitas keamanan dan Kenyamanan Masyarakat	1 Persentase Penurunan Angka Kriminalitas 2 Persentase Penurunan Kasus Penggunaan Narkoba

6.3. Program Prioritas dan Kegiatan Strategis Daerah.

Program Prioritas Kabupaten Labuhanbatu, yang dicapai melalui kegiatan strategis daerah tahun 2022-2026 direncanakan untuk mencapai visi dan misi daerah yang tentunya diharapkan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan selama lima tahun kedepan.

Tabel 6.6
Program Prioritas dan Kegiatan Strategis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022-2026

No	Visi & Misi	Prioritas	Kegiatan strategis Daerah	Satuan	Target tahun ke -					Keterangan
					2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Terwujudnya masyarakat Labuhanbatu yang berkarakter, maju dan sejahtera tahun 2024									
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang merakyat, bersih dan professional									
		Peningkatan Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Sosial	Pemenuhan Standar Pelayanan secara langsung dan Online di RSUD	Paket			1			
			Pemenuhan Standar Pelayanan secara langsung dan Online di Kantor Pencatatan Sipil	Paket		1				
2	Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk membangun karakter SDM yang produktif dan inovatif									
		Peningkatan Layanan Kesehatan yang Berkualitas	Pembangunan Sekolah Model Terpadu dan Berkarakter tingkat SD, SMP bertaraf nasional dan Internasional	Sekolah			1 SD, 1 SMP	1 SD, 1 SMP	1 SD, 1 SMP	
		Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan yag Berbasis Teknologi Informasi	Peningkatan Puskesmas Standar Nasional	Unit		1	1	1	1	

No	Visi & Misi	Prioritas	Kegiatan strategis Daerah	Satuan	Target tahun ke -					Keterangan
					2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Pembangunan Sport Center	Paket			1			
			Pemberian Beasiswa bagi Siswa/i dan Mahasiswa/I Berprestasi Kurang Mampu	Orang	100	100	100	100	100	
3	Meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis potensi daerah melalui peningkatan produktivitas koperasi dan UMKM serta industri kreatif									
		Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah Secara Terintegrasi dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan	Pemberian Asuransi Usaha Tani Padi untuk tanaman Padi di Kec. Panai Tengah dan Panai Hilir	Ha			10.000			
			Pemberian Benih Padi di Kec. Panai tengah dan Panai Hilir	Kg			250.000			
			Pemberian Benih Ikan Lele	Benih	500.000	550.000	600.000	650.000	700.000	
			Pemberian Benih Ikan Nila	Benih		500.000	550.000	600.000	650.000	
			Pemberian Benih Ikan Mas	Benih		100.000	150.000	200.000	200.000	
			Pemberian Benih Ikan Gurami	Benih		550.000	600.000	650.000	700.000	
			Pemberian Bantuan Ternak Sapi	Ekor	30	40	50	60	70	
			Pemberian Bantuan Ternak Kambing/Domba	Ekor	25	50	750	100	125	
			Pemberian Bantuan Ternak Ayam	Ekor	1.000	2.000	3.000	4.000	6.000	

No	Visi & Misi	Prioritas	Kegiatan strategis Daerah	Satuan	Target tahun ke -					Keterangan
					2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Pemberian Bantuan Ternak itik	Ekor	1.000	2.000	3.000	4.000	6.000	
			Pembangunan Pasar Hewan di Kecamatan Bilah Hulu	Paket				1		
			Rehabilitasi TPI di Kecamatan Panai Hilir, Sei Berombang	Paket			1			
			Pembangunan Sentra UKM dan penerapan E-Market	Paket			1			
			Pendirian BUMD Pengelolaan Pasar	Paket		1				
			Penataan dan Pembinaan Wisata Kuliner di Pusat Kota Rantauprapat	paket		1	1			
			Penataan Kota Tua untuk Peningkatan Pariwisata di Labuhanbilik	Paket			1	1		
			Pembangunan BLK di Kecamatan Rantau Selatan	Paket			1			
4	Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan guna percepatan pengembangan wilayah dan kawasan									
		Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Penambahan dan Pemeliharaan LPJU di Kota Rantauprapat	Paket	100	100	100	100	100	
			Pemeliharaan Priodik Jalan Kota Rantauprapat	Km	10	13	16	18	19	
			Pembangunan Kanalisasi Sungai Tahalak Simin	Paket	1	1	1			

No	Visi & Misi	Prioritas	Kegiatan strategis Daerah	Satuan	Target tahun ke -					Keterangan
					2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Pemeliharaan Sistem drainase Dalam Kota Rantauprapat	M	20.000	26.000	32.000	36.000	38.000	
			Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Kumuh	Unit	50	50	50	50	50	
			Peningkatan Akses Air Minum Layak	KK/SR	5.000	10.000	15.000	200	400	
			Peningkatan Akses Sanitasi Layak	KK						
			Pembangunan TPA	Paket			1		1	
			Penambahan TPS3R	Paket		2	2	2	3	
			Penataan dan Pengolaan Bank Sampah	Paket	14	14	14	14	14	
			Peningkatan Jalan di Kawasan Pesisir	Km	10	15	20	25	40	
			Pengaspalan Jalan di Desa Janji - Aek Buru Selatan	Km		12				
5	Meningkatkan rasa aman, nyaman dan penuh kekeluargaan ditengah kehidupan masyarakat yang majemuk									
		Peningkatan Kerukunna dan Harmonisasi antar Umat Beragama.	Pembangunan Wisata Rohani di Mesjid Raya Rantauprapat	Paket		1				
			Rehabilitasi Rumah-rumah Ibadah Lainnya	Unit		100	120	130	140	

Untuk mendukung prioritas-prioritas tersebut selain dengan pendanaan melalui APBD juga diharapkan dapat melalui Non APBD seperti APBN, CSR, KPBU, Swasta, Pinjaman Daerah, dan lain-lain. Program-program strategis yang diarahkan untuk pendanaan Non APBD antara lain:

1. Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kawasan Panai Natural and Historical Park di Kecamatan Panai Hulu, Panai Tengah dan Panai Hilir (Sudah dalam tahapan Studi Pendahuluan, yang memenangkan Juara pertama kompetisi North Sumatera Invest Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia dan Dinas PMPTSP Provinsi Sumatera Utara dan direncanakan untuk pengajuan pendanaan secara KPBU)
2. Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah dengan alternatif lokasi di Bandar Kumbul Kecamatan Bilah Barat
3. Peningkatan Infrastruktur RSUD Rantauprapat
4. Pembangunan Jalan Sei Rakyat menuju Sei Berombang Kecamatan Panai Tengah
5. Pembangunan Jalan Sei Rakyat menuju Sei Siarti Kecamatan Panai Tengah
6. Pembangunan Jalan Sidomakmur menuju Sei Penggantungan Kecamatan Panai Hilir
7. Pembangunan Irigasi di Desa Sei Penggantungan Kecamatan Panai Hilir
8. Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK)
9. Pembangunan Pasar Hewan
10. Pembangunan/Rehabilitasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Labuhanbatu
11. Pembangunan Bandar Udara Rantauprapat di Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu

Program prioritas tersebut di atas sudah dijabarkan ke dalam 5 Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang didukung oleh Program-program Pembangunan Daerah yang terdapat dalam Tabel 6.7.

Tabel 6.7
Program Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1			Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang merakyat, bersih dan profesional															
	1.1		Terciptanya Tata Kelola Pemerintah an yang Bersih dan Transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	48,56 Nilai	50,50 Nilai		52,50 Nilai		55,00 Nilai		57,50 Nilai		60,50 Nilai		60,50 Nilai		
		1.1.1	Meningkatn ya Kinerja Birokrasi	Nilai Evaluasi SAKIP	56,99	61,00 Nilai		62,00 Nilai		64,00 Nilai		67,00 Nilai		70,50 Nilai		70,50 Nilai		
				Kinerja Penyelenggaraa n Pemerintah Daerah	2,68	3,00 Skor		3,20 Skor		3,25 Skor		4,55 Skor		3,60 Skor		3,65 Skor		
		1	PROGRAM PEMERINTA HAN DAN KESEJAHT ERAN RAKYAT	Penyusunan Dok LPPD dan LKPJ Tepat Waktu	100 %	100 %	15.836.382.000	100 %	15.836.382.000	100 %	15.836.382.000	100 %	15.836.382.000	100 %	15.836.382.000	100 %	0	Sekretariat Daerah Kabupaten
		2	PROGRAM PENGELOLA AN BARANG MILIK DAERAH	Indeks Pengelolaan Aset	100 %	100 %	1.320.317.000	100 %	1.359.926.000	100 %	1.400.724.000	100 %	1.442.746.000	100 %	1.486.028.000	100 %	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		3	PROGRAM PENGELOL AAN KEUANGA N DAERAH	Rasio Anggaran Sisa terhadap total belanja dalam APBD Tahun sebelumnya (IKK Outcomes)	9 %	9 %	156.064.430.000	8 %	160.746.363.000	7,5 %	160.746.363.000	7 %	160.746.363.000	7 %	160.746.363.000	6,5 %	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		4	PROGRAM PENGELOL AAN PENDAPAT AN DAERAH	Persentase PAD terhadap Pendapatan	100 %	100 %	1.259.624.000	100 %	1.359.624.000	100 %	1.389.624.000	100 %	1.399.624.000	100 %	1.419.624.000	100 %	0	Badan Pendapatan Daerah
		5	PROGRAM PEREKONO MIAN DAN PEMBANG UNAN	Persentase Kegiatan Strategis Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi-UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan Pangan yang Dikoordinasikan	100 %	100 %	3.183.285.000	100 %	3.183.285.000	100 %	3.183.285.000	100 %	3.183.285.000	100 %	3.183.285.000	100 %	0	Sekretariat Daerah Kabupaten

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.1.2	Meningkatn ya Kualitas Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK	WDP Poin	WTP Poin		WTP Poin		WTP Poin		WTP Poin		WTP Poin				
		1	PROGRAM ADMINISTR ASI UMUM SEKRETARI AT DPRD KABUPATE N/KOTA	Persentase capaian pengadministras ian umum DPRD	100 %	100 %	25.323.609.000	100 %	25.323.609.000	100 %	25.323.609.000	100 %	25.323.609.000	100 %	25.323.609.000	100 %	0	Sekretariat DPRD
		2	PROGRAM APLIKASI INFORMATI KA	Persentase terbangunnya aplikasi dan infrastruktur TIK terintegrasi	80 %	80 %	2.852.633.000	80 %	1.638.212.000	80 %	1.726.358.000	80 %	1.817.149.000	80 %	1.910.663.000	80 %	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
		3	PROGRAM DUKUNGA N PELAKSAN AAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan pembahasan Perda	100 %	100 %	33.654.659.000	100 %	33.654.659.000	100 %	33.654.659.000	100 %	33.654.659.000	100 %	33.654.659.000	100 %	0	Sekretariat DPRD
		4	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKA SI PUBLIK	Persentase pemenuhan informasi kepada masyarakat	80 %	80 %	1.379.395.000	80 %	1.379.395.000	80 %	1.379.395.000	80 %	1.379.395.000	80 %	1.379.395.000	80 %	0	Dinas Komunikasi dan Informatika

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5	PROGRAM KEPEGAWA IAN DAERAH	Persentase peningkatan kerja ASN	82 %	85 %	947.811.000	87 %	947.811.000	88 %	947.811.000	90 %	947.811.000	91 %	947.811.000	91 %	0	Badan Kepegawaia n, Pendidikan dan Pelatihan
		6	PROGRAM KOORDINA SI DAN SINKRONIS ASI PERENCAN AAN PEMBANG UNAN DAERAH	Kesesuaian rencana pembangunan terhadap RTRW	70 %	80 %	50.000.000	80 %	50.000.000	85 %	50.000.000	85 %	50.000.000	85 %	50.000.000	85 %	0	Badan Perencanaan Pembangun an Daerah
				Cakupan Dokumen Perencanaan yang terfasilitasi sesuai dengan ketentuan	75 %	80 %	1.185.696.000	85 %	1.185.696.000	85 %	1.185.696.000	85 %	1.185.696.000	90 %	1.185.696.000	90 %	0	Badan Perencanaan Pembangun an Daerah
		7	PROGRAM PELESTARIA N KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase terlestarikannya Koleksi Nasional dan Naskah Kuno serta berkembangnny a koleksi budaya	100 %	100 %	43.357.000	100 %	43.357.000	100 %	43.357.000	100 %	43.357.000	100 %	43.357.000	100 %	0	Dinas Perpustakaa n dan Kearsipan

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		8	PROGRAM PEMBINAA N DAN PENGAWA SAN PEMERINTA HAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	N/A %	N/A %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	0	Kecamatan Bilah Hulu
				Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	N/A %	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	0	Kecamatan Pangkatan
				Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	N/A %	N/A %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	0	Kecamatan Bilah Barat
				Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	74.620.000	100 %	74.620.000	100 %	74.620.000	100 %	74.620.000	100 %	74.620.000	100 %	0	Kecamatan Bilah Hilir
				Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	N/A %	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	0	Kecamatan Panai Hulu
				Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	N/A %	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	0	Kecamatan Panai Tengah

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	N/A %	100 %	5.000.000	100 %	5.000.000	100 %	5.000.000	100 %	5.000.000	100 %	5.000.000	100 %	0	Kecamatan Panai Hilir
		9	PROGRAM PEMBINAA N PERPUSTAK AAN	Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	50 %	52 %	305.678.000	55 %	305.678.000	58 %	305.678.000	60 %	305.678.000	61 %	305.678.000	61 %	0	Dinas Perpustakaa n dan Kearsipa n
		10	PROGRAM PENGELOL AAN ARSIP	Persentase Nilai Pengawasan Kearsipan dengan kategori Baik	100 %	100 %	15.000.000	100 %	15.150.000	100 %	15.301.000	100 %	15.301.000	100 %	15.301.000	100 %	0	Dinas Perpustakaa n dan Kearsipan
		11	PROGRAM PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase peningkatan fungsi teknis, manajerial dan fungsional	70 %	75 %	1.119.548.000	80 %	1.119.548.000	82 %	1.119.548.000	85 %	1.119.548.000	90 %	1.119.548.000	90 %	0	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		12	PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATE N/KOTA	Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 %	249.847.877.000	85 %	249.867.877.000	90 %	249.887.877.000	90%	248.927.877.000	95 %	249.947.877.000	95 %	0	Dinas Pendidikan
				Tingkat capaian kinerja penunjang urusan	80 %	85 %	74.704.803.000	85 %	75.704.803.000	90 %	76.704.803.000	90 %	77.704.803.000	95 %	78.704.803.000	95 %	0	Dinas Kesehatan

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				pemerintahan														
				Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 %	138.506.717.000	85 %	139.506.717.000	90 %	139.906.717.000	90 %	141.506.717.000	95 %	143.506.717.000	95 %	0	Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapa t
				Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 %	14.518.482.000	85 %	14.568.482.000	90 %	14.598.482.000	90 %	14.638.482.000	95 %	14.688.482.000	95 %	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 %	4.586.201.000	85 %	4.886.201.000	90 %	4.986.201.000	90 %	5.186.201.000	95 %	5.486.201.000	95 %	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 %	9.882.379.000	85 %	9.892.379.000	90 %	9.992.379.000	90 %	10.882.379.000	95 %	10.982.379.000	95 %	0	Satuan Polisi Pamong Praja
				Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 %	4.985.357.000	85 %	4.985.357.000	90 %	4.995.357.000	90 %	5.185.357.000	95 %	5.385.357.000	95 %	0	Badan Penangguna ngan Bencana Daerah

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 %	3.604.205.000	85 %	3.704.205.000	90 %	3.804.205.000	90 %	3.904.205.000	95 %	4.104.205.000	95 %	0	Dinas Sosial
				Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 %	2.914.294.000	85 %	2.984.294.000	90 %	2.994.294.000	90 %	3.114.294.000	95 %	3.214.294.000	95 %	0	Dinas Tenaga Kerja
				Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 %	3.243.292.000	85 %	3.343.292.000	90 %	3.443.292.000	90 %	3.543.292.000	95 %	3.643.292.000	95 %	0	Dinas Pemberdaya an Perempuan dan Perlindunga n Anak
				Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 %	4.609.647.000	85 %	4.709.647.000	90 %	4.759.647.000	90 %	4.789.647.000	95 %	4.889.647.000	95 %	0	Dinas Pangan
				Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 %	3.100.500.000	85 %	3.150.500.000	90 %	3.170.500.000	90 %	3.180.500.000	95 %	3.190.500.000	95 %	0	Dinas Pertanahan
				Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 %	5.437.796.000	85 %	5.537.796.000	90 %	5.637.796.000	90 %	5.737.796.000	95 %	5.837.796.000	95 %	0	Dinas Lingkungan Hidup

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 %	4.846.062.000	85 %	4.864.062.000	90 %	4.884.062.000	90 %	4.924.062.000	95 %	4.944.062.000	95 %	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 %	3.752.090.000	85 %	3.782.090.000	90 %	3.792.090.000	90 %	3.822.090.000	95 %	3.852.090.000	95 %	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 %	4.091.138.000	85 %	4.111.138.000	90 %	4.121.138.000	90 %	4.131.138.000	95 %	4.141.138.000	95 %	0	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 %	6.550.505.000	85 %	6.580.505.000	90 %	6.590.505.000	90 %	6.650.505.000	95 %	6.680.505.000	95 %	0	Dinas Perhubungan
				Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 %	4.708.947.000	85 %	4.758.947.000	90 %	4.788.947.000	90 %	4.818.947.000	95 %	4.838.947.000	95 %	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 %	3.912.016.000	85 %	3.952.016.000	90 %	3.982.016.000	90 %	3.992.016.000	95 %	4.112.016.000	95 %	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 %	4.027.523.000	85 %	4.077.523.000	90 %	4.097.523.000	90 %	4.127.523.000	95 %	4.157.523.000	95 %	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 %	4.754.016.000	85 %	4.784.016.000	90 %	4.834.016.000	90 %	4.854.016.000	95 %	4.894.016.000	95 %	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
				Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 %	3.375.829.000	85 %	3.395.829.000	90 %	3.415.829.000	90 %	3.425.829.000	95 %	3.445.829.000	95 %	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 %	3.424.974.000	85 %	3.474.974.000	90 %	3.494.974.000	90 %	3.514.974.000	95 %	3.524.974.000	95 %	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 %	10.927.544.000	85 %	11.127.544.000	90 %	11.227.544.000	90 %	11.327.544.000	95 %	11.427.544.000	95 %	0	Dinas Pertanian
				Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 %	3.573.522.000	85 %	3.593.522.000	90 %	3.623.522.000	90 %	3.633.522.000	95 %	3.643.522.000	95 %	0	Dinas Peternakan

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 %	6.556.166.000	85 %	6.586.166.000	90 %	6.596.166.000	90 %	6.636.166.000	95 %	6.656.166.000	95 %	0	Dinas Perdaganga n dan Perindustrian
				Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 %	38.022.858.000	85 %	39.022.858.000	90 %	40.022.858.000	90 %	41.022.858.000	95 %	42.022.858.000	95 %	0	Sekretariat Daerah Kabupaten
				Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 %	16.168.213.000	85 %	17.168.213.000	90 %	18.168.213.000	90 %	19.168.213.000	95 %	19.868.213.000	95 %	0	Sekretariat DPRD
				Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 %	4.647.673.000	85 %	4.697.673.000	90 %	4.727.673.000	90 %	4.737.673.000	95 %	4.747.673.000	95 %	0	Badan Perencanaan Pembangun an Daerah
				Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 %	30.811.109.000	85 %	31.311.109.000	90 %	31.811.109.000	90 %	32.311.109.000	95 %	32.811.109.000	95 %	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
				Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 %	26.346.154.000	85 %	26.846.154.000	90 %	26.946.154.000	90 %	27.246.154.000	95 %	27.346.154.000	95 %	0	Badan Pendapatan Daerah

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 %	5.850.810.000	85 %	5.855.810.000	90 %	5.870.810.000	90 %	5.880.810.000	95 %	5.890.810.000	95 %	0	Badan Kepegawaia n, Pendidikan dan Pelatihan
				Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 %	3.738.597.000	85 %	3.788.597.000	90 %	3.798.597.000	90 %	3.828.597.000	95 %	3.838.597.000	95 %	0	Badan Penelitian dan Pengemban gan
				Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 %	8.297.257.000	85 %	8.397.257.000	90 %	8.497.257.000	90 %	8.597.257.000	95 %	8.697.257.000	95 %	0	Inspektorat Daerah
				Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 %	3.134.113.000	85 %	3.184.113.000	90 %	3.194.113.000	90 %	3.234.113.000	95 %	3.264.113.000	95 %	0	Kecamatan Bilah Hulu
				Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 %	1.590.248.000	85 %	1.595.248.000	90 %	1.600.248.000	90 %	1.650.248.000	95 %	1.690.248.000	95 %	0	Kecamatan Pangkatan
				Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 %	2.394.708.000	85 %	2.399.708.000	90 %	2.414.708.000	90 %	2.424.708.000	95 %	2.434.708.000	95 %	0	Kecamatan Bilah Barat

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 %	2.963.742.000	85 %	2.983.742.000	90 %	2.993.742.000	90 %	2.998.742.000	95 %	3.098.742.000	95 %	0	Kecamatan Bilah Hilir
				Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 %	1.863.803.000	85 %	1.883.803.000	90 %	1.893.803.000	90 %	1.913.803.000	95 %	1.923.803.000	95 %	0	Kecamatan Panai Hulu
				Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 %	2.797.944.000	85 %	2.817.944.000	90 %	2.827.944.000	90 %	2.837.944.000	95 %	2.847.944.000	95 %	0	Kecamatan Panai Tengah
				Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 %	2.082.965.000	85 %	2.088.965.000	90 %	2.092.965.000	90 %	2.099.965.000	95 %	2.102.965.000	95 %	0	Kecamatan Panai Hilir
				Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 %	7.177.580.000	85 %	7.277.580.000	90 %	7.377.580.000	90 %	7.477.580.000	95 %	7.577.580.000	95 %	0	Kecamatan Rantau Selatan
				Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 %	8.833.418.000	85 %	8.883.418.000	85 %	8.933.418.000	85 %	8.983.418.000	85 %	8.993.418.000	90 %	0	Kecamatan Rantau Utara

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 %	2.581.503.000	85 %	2.589.503.000	90 %	2.591.503.000	90 %	2.621.503.000	95 %	2.631.503.000	95 %	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		13	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Terselenggaranya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang efektif dan efisien	100 %	100 %	459.329.000	100 %	459.329.000	100 %	459.329.000	100 %	459.329.000	100 %	459.329.000	100 %	0	Inspektorat Daerah
				Persentase jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti	75 %	75 %	539.329.000	80 %	539.329.000	85 %	539.329.000	95 %	539.329.000	100 %	539.329.000	100 %	0	Inspektorat Daerah
		14	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase terpenuhinya keamanan informasi	80 %	80 %	20.088.000	80 %	25.000.000	80 %	30.000.000	80 %	35.000.000	80 %	40.000.000	80 %	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
		15	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tersedianya data statistik sektoral	1 Dokumen	1 Dokumen	46.640.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		16	PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM	Tingkat Kinerja Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan	100 %	100 %	155.540.000	100 %	155.540.000	100 %	155.540.000	100 %	155.540.000	100 %	155.540.000	100 %	0	Kecamatan Bilah Hulu
				Tingkat Kinerja Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan	100 %	100 %	1.725.389.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	0	Kecamatan Pangkatan
				Tingkat Kinerja Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan	100 %	100 %	119.976.000	100 %	119.976.000	100 %	119.976.000	100 %	119.976.000	100 %	119.976.000	100 %	0	Kecamatan Bilah Barat
				Tingkat Kinerja Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan	100 %	100 %	93.048.000	100 %	93.048.000	100 %	93.048.000	100 %	93.048.000	100 %	93.048.000	100 %	0	Kecamatan Bilah Hilir
				Tingkat Kinerja Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan	100 %	100 %	115.574.000	100 %	115.574.000	100 %	115.574.000	100 %	115.574.000	100 %	115.574.000	100 %	0	Kecamatan Panai Hulu
				Tingkat Kinerja Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan	100 %	100 %	132.425.000	100 %	132.425.000	100 %	132.425.000	100 %	132.425.000	100 %	132.425.000	100 %	0	Kecamatan Panai Tengah

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Tingkat Kinerja Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan	100 %	100 %	194.327.000	100 %	194.327.000	100 %	194.327.000	100 %	194.327.000	100 %	194.327.000	100 %	0	Kecamatan Panai Hilir
				Tingkat Kinerja Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan	100 %	100 %	99.990.000	100 %	99.990.000	100 %	99.990.000	100 %	99.990.000	100 %	99.990.000	100 %	0	Kecamatan Rantau Utara
				Tingkat Kinerja Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan	100 %	100 %	227.515.000	100 %	227.515.000	100 %	227.515.000	100 %	227.515.000	100 %	227.515.000	100 %	0	Kecamatan Rantau Selatan
		17	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi program RKPD ke dalam APBD	70 %	75 %	701.071.000	80 %	701.071.000	85 %	701.071.000	90 %	701.071.000	90 %	701.071.000	95 %	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	70 %	80 %	1.000.000.000	80 %	1.000.000.000	80 %	1.000.000.000	85 %	1.000.000.000	90 %	1.000.000.000	95 %	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		18	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Layanan Izin Kearsipan	100 %	100 %	10.000.000	100 %	10.100.000	100 %	10.100.000	100 %	10.100.000	100 %	10.100.000	100 %	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		19	PROGRAM PERLINDU NGAN DAN PENYELAM ATAN ARSIP	Persentase Penyelamatan Arsip Akibat Bencana	100 %	100 %	86.200.000	100 %	88.786.000	100 %	91.449.000	100 %	91.449.000	100 %	91.449.000	100 %	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		20	PROGRAM PERUMUSA N KEBIJAKAN, PENDAMPI NGAN DAN ASISTENSI	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	118 Kali	123 Kali	513.464.000	161 Kali	513.464.000	166 Kali	513.464.000	201 Kali	513.464.000	206 Kali	513.464.000	211 Kali	0	Inspektorat Daerah
		1.1.3	Meningkatn ya Pelayanan Publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	N/A	80 Nilai	1.813.880.000	85 Nilai	1.868.297.000	90 Nilai	1.868.297.000	95 Nilai	1.868.297.000	100 Nilai	1.868.297.000	100 Nilai	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1	PROGRAM PENCATAT AN SIPIL	Persentase Peristiwa Pencatatan Sipil	80 %	80 %	47.000.000	80 %	48.410.000	80 %	49.863.000	80 %	51.358.000	80 %	52.898.000	90 %	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	PROGRAM PENDAFTA RAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang terdaftar	90 %	90 %		90 %		90 %		90 %		90 %		95 %		

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Informasi administrasi kependudukan	80 %	80 %	104.038.000	%	107.159.000	80 %	110.374.000	80 %	113.685.000	80 %	117.096.000	90 %	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		4	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Penyusunan Profil Kependudukan skala kabupaten	100 %	100 %	13.650.000	100 %	14.059.000	100 %	14.481.000	100 %	14.915.000	100 %	15.363.000	100 %	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	N/A %	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	0	Kecamatan Bilah Hulu
				Tingkat Kinerja Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	N/A %	100 %	108.831.000	100 %	108.831.000	100 %	108.831.000	100 %	108.831.000	100 %	108.831.000	100 %	0	Kecamatan Pangkatan

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Tingkat Kinerja Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	N/A %	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	0	Kecamatan Bilah Barat
				Tingkat Kinerja Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	N/A %	N/A %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	0	Kecamatan Bilah Hilir
				Tingkat Kinerja Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	N/A %	100 %	14.696.000	100 %	14.696.000	100 %	14.696.000	100 %	14.696.000	100 %	14.696.000	100 %	0	Kecamatan Panai Hulu
				Tingkat Kinerja Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	N/A %	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	0	Kecamatan Panai Tengah
				Tingkat Kinerja Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	N/A %	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	0	Kecamatan Panai Hilir

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	N/A %	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	0	Kecamatan Rantau Selatan
				Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	N/A %	N/A %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	0	Kecamatan Rantau Utara
2			Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk membangun karakter SDM yang produktif dan inovatif															
	2.1		Meningkatkan akses dan kualitas mutu pendidikan serta pelayanan kesehatan yang prima	Indeks Pembangunan Manusia	72,80 Nilai	73,35 Nilai		74 Nilai		74,2 Nilai		74,6 Nilai		75,2 Nilai		75,2 Nilai		
		2.1.1	Meningkatnya akses dan kualitas mutu layanan pendidikan yang merata	Indeks kualitas Pendidikan	N/A	80,2 Nilai		82,3 Nilai		83,4 Nilai		84,5 Nilai		85,6 Nilai		85,6 Nilai		
				Harapan Lama Sekolah Pendidikan Dasar	12,6	14,2 Tahun		14,3 Tahun		14,35 Tahun		14,40 Tahun		14,45 Tahun		14,45 Tahun		
				Rata rata lama sekolah	9,53	9,69 Tahun		9,87 Tahun		10,05 Tahun		10,24 Tahun		10,44 Tahun		10,44 Tahun		

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDI KAN	Persentase Ketercukupan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	70 %	75 %	730.426.000	80 %	750.426.000	85 %	780.426.000	90 %	790.426.000	95 %	800.426.000	95 %	0	Dinas Pendidikan
		2	PROGRAM PENGELOL AAN PENDIDIKA N	Tersedianya sekolah model terpadu bertarap nasional	NA Tingkatan	3 Tingkat an	10.000.000	3 Tingkat an	10.000.000	3 Tingkatan	10.000.000	3 Tingkat an	10.000.000	3 Tingkat an	10.000.000	3 Tingkatan	0	Dinas Pendidikan
				Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 %	100 %	100.767.234.00 0	100 %	101.817.234.000	100 %	102.827.234.000	100 %	103.837.234.000	100 %	103.847.234.000	100 %	0	Dinas Pendidikan
		3	PROGRAM PENGEMBA NGAN KURIKULU M	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal	50 %	60 %	50.000.000	70 %	60.000.000	80 %	65.000.000	90 %	75.000.000	100 %	80.000.000	100 %	0	Dinas Pendidikan
		4	PROGRAM PENGENDA LIAN PERIZINAN PENDIDIKA N	Persentase ketersediaan izin penyelenggara pendidikan oleh masyarakat	100 %	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	70.000.000	100 %	75.000.000	100 %	80.000.000	100 %	0	Dinas Pendidikan
		2.1.2	Meningkatn ya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas layanan kesehatan	Usia Harapan Hidup	69,95	69,97 Tahun		69,98 Tahun		70,00 Tahun		70 Tahun		70 Tahun		70 Tahun		

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1	PROGRAM PEMBERDA YAAN DAN PENINGKAT AN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	80 %	82 %	2.598.024.000	85 %	2.598.024.000	90 %	2.598.024.000	95 %	2.598.024.000	100 %	2.598.024.000	100 %	0	Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	PROGRAM PEMBERDA YAAN MASYARAK AT BIDANG KESEHATA N	Persentase Rumah Tangga Berprilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	53 %	53 %	2.099.159.000	54 %	2.162.130.000	55 %	2.226.998.000	57 %	2.293.808.000	60 %	2.362.622.000	60 %	0	Dinas Kesehatan
		3	PROGRAM PEMBINAA N KELUARGA BERENCAN A (KB)	Persentase peningkatan kualitas keluarga berencana	80 %	82 %	2.555.431.000	85 %	2.555.431.000	90 %	2.555.431.000	95 %	2.555.431.000	100 %	2.555.431.000	100 %	0	Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana
		4	PROGRAM PEMENUH AN UPAYA KESEHATA N PERORANG AN DAN UPAYA KESEHATA N MASYARAK	Persentase Capaian SPM Terkait Siklus Hidup	100 %	100 %	13.139.033.000	100 %	13.639.033.000	100 %	14.139.033.000	100 %	14.639.033.000	100 %	14.939.033.000	100 %	0	Dinas Kesehatan

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			AT															
				Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Terkait Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	100 %	100 %	6.000.000.000	100 %	5.500.000.000	100 %	5.800.000.000	100 %	6.200.000.000	100 %	6.300.000.000	100 %	0	Dinas Kesehatan
				Persentase Fasilitas Kesehatan dengan Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Sesuai Standar >70%	53 %	67 %	35.320.304.000	80 %	35.320.304.000	93 %	35.320.304.000	100 %	35.320.304.000	100 %	35.320.304.000	100 %	0	Dinas Kesehatan

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan rumah sakitPersentase Terpenuhinya Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit)	83 %	83 %	5.000.000.000	84 %	5.000.000.000	84 %	5.000.000.000	85 %	5.000.000.000	85 %	5.000.000.000	85 %	0	Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat
		5	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Layanan KIE KB	80 %	82 %	265.088.000	85 %	265.088.000	90 %	265.088.000	95 %	265.088.000	100 %	265.088.000	100 %	0	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		6	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang	65 %	70 %	2.035.000.000	75 %	2.096.050.000	80 %	2.158.931.000	85 %	2.223.699.000	90 %	2.290.410.000	90 %	0	Dinas Kesehatan

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATA N	Kompeten														
				Persentase ketersediaan SDM sesuai standar Rumah Sakit	100 %	100 %	100.000.000	100 %	200.000.000	100 %	250.000.000	100 %	300.000.000	100 %	350.000.000	100 %	0	Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat
		7	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATA N DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Tempat Pengelolaan (TPP) yang Memenuhi Syarat Sesuai Standar	78 %	80 %	33.357.000	82 %	34.357.000	83 %	35.388.000	84 %	36.450.000	85 %	37.543.000	85 %	0	Dinas Kesehatan
				Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar	30 %	40 %	65.000.000	50 %	66.950.000	60 %	68.958.000	65 %	71.027.000	75 %	73.158.000	75 %	0	Dinas Kesehatan
	2.2		Meningkatk an kualitas SDM yang berkarakter dan inovatif	Tingkat Kemiskinan	8,74 %	8,6 %		8,5 %		8,4 %		8,3 %		8,2 %		8,2 %		

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.2.1	Terciptanya generasi muda dan mandiri yang berprestasi	Persentase wirausaha muda	60	63 %		67 %		73 %		87 %		89 %		89 %		
				Pembangunan Sport Center	0	0 %		0 %		0 %		1 Unit		0 %		0 %		
		1	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan jumlah wisata	100 %	100 %	0	100 %	172.000.000	100 %	172.000.000	100 %	172.000.000	100 %	172.000.000	100 %	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
		2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Cabor yang di Bina	100 %	100 %	1.325.312.000	100 %	1.325.312.000	100 %	1.325.312.000	100 %	1.325.312.000	100 %	1.325.312.000	100 %	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
		3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase cakupan pemberdayaan organisasi kepemudaan	100 %	100 %	1.102.103.000	100 %	602.103.000	100 %	602.103.000	100 %	602.103.000	100 %	602.103.000	100 %	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		4	PROGRAM PENGEMBA NGAN KAPASITAS KEPRAMUK AAN	Persentase Cakupan Pemberdayaan Kepramukaan	100 %	100 %	800.000.000	100 %	800.000.000	100 %	800.000.000	100 %	800.000.000	100 %	800.000.000	100 %	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
		5	PROGRAM PENGEMBA NGAN SUMBER DAYA PARIWISAT A DAN EKONOMI KREATIF	Cakupan peningkatan kapsitas sdm pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif	30 %	35 %	36.223.000	40 %	36.223.000	45 %	36.223.000	50 %	36.223.000	65 %	36.223.000	70 %	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
		6	PROGRAM PENINGKAT AN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISAT A	Cakupan destinasi wisata yang dikembangkan	0 %	100 %	64.225.000	100 %	64.225.000	100 %	64.225.000	100 %	64.225.000	100 %	64.225.000	100 %	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
3			Meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis potensi daerah melalui peningkatan produktivitas koperasi dan UMKM serta industri kreatif															
	3.1		Meningkatk an Daya Saing Potensi Produk Unggulan Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	2,57 Poin	3,40 Poin		4,00 Poin		4,50 Poin		5,00 Poin		6,00 Poin		6,00 Poin		

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		3.1.1	Meningkatn ya Kualitas Produk Unggulan Daerah yang berorientasi ekspor dan Ketahanan Pangan Daerah	Peningkatan Nilai ekspor perdagangan	5	10 %		15 %		20 %		25 %		30 %		30 %		
		1	PROGRAM PENANGA NAN KERAWAN AN PANGAN	Persentase tingkat capaian indeks ketahanan pangan	100 %	100 %	25.400.000	100 %	25.400.000	100 %	25.400.000	100 %	25.400.000	100 %	25.400.000	100 %	0	Dinas Pangan
		2	PROGRAM PENELITIA N DAN PENGEMBA NGAN DAERAH	Persentase pengembangan inovasi dan teknologi	100 %	100 %	115.000.000	100 %	115.000.000	100 %	115.000.000	100 %	115.000.000	100 %	115.000.000	100 %	0	Badan Penelitian dan Pengembanga n
				Persentase ketersediaan penelitian dan pengembangan pemerintahan dan pengkajian peraturan	100 %	100 %	115.000.000	100 %	115.000.000	100 %	115.000.000	100 %	115.000.000	100 %	115.000.000	100 %	0	Badan Penelitian dan Pengembanga n

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Persentase ketersediaan dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	100 %	100 %	115.000.000	100 %	115.000.000	100 %	115.000.000	100 %	115.000.000	100 %	115.000.000	100 %	0	Badan Penelitian dan Pengembangan
				Persentase ketersediaan dokumen penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	100 %	100 %	115.000.000	100 %	115.000.000	100 %	115.000.000	100 %	115.000.000	100 %	115.000.000	100 %	0	Badan Penelitian dan Pengembangan
		3	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan	100 %	100 %	71.000.000	100 %	71.000.000	100 %	71.000.000	100 %	71.000.000	100 %	71.000.000	100 %	0	Dinas Pangan
		4	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terjaminnya pelestarian spesies ikan yang dilindungi	1 spesies	1 spesies	42.354.000	1 spesies	42.354.000	1 spesies	42.354.000	1 spesies	42.354.000	1 spesies	42.354.000	1 spesies	0	Dinas Kelautan dan Perikanan

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5	PROGRAM PENGELOL AAN PERIKANA N BUDIDAYA	Meningkatnya kualitas dan produksi perikanan budidaya	900 ton	978 ton	590.083.000	1078 ton	590.083.000	1132 ton	590.083.000	1189 ton	590.083.000	1248 ton	590.083.000	1248 ton	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
		6	PROGRAM PENGELOL AAN PERIKANA N TANGKAP	Meningkatnya kualitas dan produksi perikanan tangkap	6854 ton	7215 ton	402.849.000	7287 ton	402.849.000	7615 ton	402.849.000	7996 ton	402.849.000	8396 ton	402.849.000	8396 ton	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
		7	PROGRAM PENGELOL AAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULAT AN DAN KEMANDIRI AN PANGAN	Persentase penyedia infrastruktur pangan	100 %	100 %	141.600.000	100 %	145.848.000	100 %	145.848.000	100 %	145.848.000	100 %	145.848.000	100 %	0	Dinas Pangan
		8	PROGRAM PENGEMBA NGAN EKSPOR	Cakupan produk unggulan daerah yang berorientasi ekspor	20 %	30 %	445.131.000	40 %	445.131.000	50 %	445.131.000	60 %	445.131.000	65 %	445.131.000	70 %	0	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		9	PROGRAM PENGENDA LIAN DAN PENANGG ULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulanga n bencana pertanian kabupaten	100 %	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	0	Dinas Pertanian
		10	PROGRAM PENGENDA LIAN KESEHATA N HEWAN DAN KESEHATA N MASYARAK AT VETERINER	Persentase ternak yang sehat	60 %	65 %	181.181.000	70 %	181.181.000	75 %	181.181.000	80 %	181.181.000	85 %	181.181.000	85 %	0	Dinas Peternakan
		11	PROGRAM PENGOLAH AN DAN PEMASARA N HASIL PERIKANA N	Cakupan kelompok pengolahan hasil perikanan yang difasilitasi	0 klpk	0 klpk	57.893.000	5 klpk	57.893.000	6 klpk	57.893.000	7 klpk	57.893.000	8 klpk	57.893.000	8 klpk	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
		12	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN	Capaian skor pola pangan	90 %	92 %	670.612.000	94 %	670.612.000	96 %	670.612.000	98 %	670.612.000	100 %	670.612.000	100 %	0	Dinas Pangan

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT															
		13	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana dalam kondisi baik	50 %	50 %	133.900.000	60 %	133.900.000	70 %	133.900.000	80 %	133.900.000	90 %	133.900.000	90 %	0	Dinas Pertanian
				Persentase peternak yang melakukan kegiatan usaha yang semi intensif	25 %	27 %	19.292.000	30 %	19.292.000	32 %	19.292.000	35 %	19.292.000	37 %	19.292.000	37 %	0	Dinas Peternakan
		14	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan produktivitas tanaman pangan dan perkebunan	3 %	5 %	460.761.000	6 %	460.761.000	7 %	460.761.000	8 %	460.761.000	9 %	460.761.000	9 %	0	Dinas Pertanian
				Cakupan ternak unggul sapi, kambing, domba	69 %	71 %	1.202.448.000	74 %	1.202.448.000	76 %	1.202.448.000	79 %	1.202.448.000	82 %	1.202.448.000	82 %	0	Dinas Peternakan

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		15	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kenaikan kelas kelompok tani	3 %	3 %	367.636.000	5 %	367.636.000	8 %	367.636.000	10 %	367.636.000	10 %	367.636.000	10 %	0	Dinas Pertanian
		16	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Tindak Lanjut Pengawasan Hasil Perizinan	0 %	0 %	0	100 %	51.500.000	100 %	51.500.000	100 %	51.500.000	100 %	51.500.000	100 %	0	Dinas Petrernakan
	3.2		Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan	Gini Ratio	0,300 Poin	0,285 Poin		0,280 Poin		0,270 Poin		0,260 Poin		0,250 Poin		0,250 Poin		
		3.2.1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Pendapatan Per Kapita	72,560537	75,621546 Juta Rupiah		78,787717 Juta Rupiah		82,090639 Juta Rupiah		85,686659 Juta Rupiah		89,404313 Juta Rupiah		89,404313 Juta Rupiah		
				Persentase Fakir Miskin yang tertangani	56	57 %		58 %		59 %		59 %		60 %		60 %		
				Persentase Anak Terlantar yang tertangani	0	20 %		20 %		40 %		55 %		75 %		75 %		

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1	PROGRAM PEMBINAA N DAN PENGEMBA NGAN KETAHANA N EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase etnis/suku/aga ma/ormas dan LSM yang memahami tentang ketahanan ekonomi sosial dan budaya	100 %	100 %	824.950.000	100 %	824.950.000	100 %	824.950.000	100 %	824.950.000	100 %	824.950.000	100 %	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		2	PROGRAM PEMENUH AN HAK ANAK (PHA)	Cakupan layanan kualitas hidup anak	80 %	80 %	181.632.000	80 %	181.632.000	85 %	181.632.000	85 %	181.632.000	90 %	181.632.000	90 %	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		3	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDA YAAN PEREMPUA N	Cakupan kelembagaan penyediaan layanan pemberdayaan perempuan	80 %	80 %	70.193.000	80 %	70.193.000	85 %	70.193.000	85 %	70.193.000	90 %	70.193.000	90 %	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		4	PROGRAM PENGELOL AAN SISTEM DATA GENDER	Cakupan ketersediaan data gender dan anak	80 %	80 %	70.350.000	80 %	70.350.000	85 %	70.350.000	85 %	70.350.000	90 %	70.350.000	90 %	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			DAN ANAK															
		5	PROGRAM PENGUATA N IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSA AN	persentase etnis/suku/aga ma/ormas dan LSM yang paham terhadap idiologi pancasila dan wawasan kebangsaan	100 %	100 %	164.940.000	100 %	664.940.000	100 %	664.940.000	100 %	664.940.000	100 %	664.940.000	100 %	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		6	PROGRAM PENINGKAT AN KEWASPAD AAN NASIONAL DAN PENINGKAT AN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGA NAN KONFLIK SOSIAL	persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	100 %	100 %	185.847.000	100 %	185.847.000	100 %	185.847.000	100 %	185.847.000	100 %	185.847.000	100 %	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		7	PROGRAM PENINGKAT AN KUALITAS KELUARGA	Persentase peningkatan kualitas keluarga	80 %	80 %	99.456.000	80 %	99.456.000	85 %	99.456.000	85 %	99.456.000	90 %	99.456.000	90 %	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		8	PROGRAM PENINGKAT AN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBA NGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik	12 partai	12 partai	698.912.000	12 partai	698.912.000	12 partai	698.912.000	12 partai	698.912.000	12 partai	698.912.000	12 partai	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		9	PROGRAM PERLINDU NGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Layanan terhadap perlindungan khusus anak	80 %	80 %	141.846.000	80 %	141.846.000	80 %	141.846.000	85 %	141.846.000	90 %	141.846.000	90 %	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		10	PROGRAM PERLINDU NGAN PEREMPUA N	Cakupan Layanan terhadap Perlindungan Perempuan	80 %	80 %	554.844.000	80 %	554.844.000	85 %	554.844.000	85 %	554.844.000	90 %	554.844.000	90 %	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		3.2.2	Meningkatn ya kesempatan kerja melalui percepatan pengemba ngan wilayah dan kawasan	Tingkat pengangguran terbuka	5,75	5,47 %		5,20 %		4,94 %		4,70 %		4,47 %		4,47 %		
		1	PROGRAM HUBUNGA N INDUSTRIA L	Persentase Perusahaan yang Mematuhi Peraturan Perundang- Undangan	7,5 %	10 %	167.263.000	15 %	167.263.000	20 %	167.263.000	25 %	167.263.000	30 %	167.263.000	30 %	0	Dinas Tenaga Kerja
		2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTI VITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang dilatih dan produktif	50 %	55 %	538.956.000	60 %	538.956.000	65 %	538.956.000	70 %	538.956.000	75 %	538.956.000	75 %	0	Dinas Tenaga Kerja

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		3	PROGRAM PENEMPAT AN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan/ Difasilitasi	31 %	32 %	207.541.000	33 %	207.541.000	34 %	207.541.000	35 %	207.541.000	36 %	207.541.000	36 %	0	Dinas Tenaga Kerja
		4	PROGRAM PERENCAN AAN TENAGA KERJA	Terencananya Ketenagakerjaa n	0 %	0 %	0	100 %	30.000.000	0 %	0	100 %	100.000.000	0 %	0	100 %	0	Dinas Tenaga Kerja
	3.3		Meningkatk an potensi ekonomi daerah melalui pengemba ngan koperasi dan UMKM serta industri kreatif	Pertumbuham Elonomi (PDRB ADHK)	2,57 %	4,78 %	5,00 %	5,20 %	5,40 %	5,60 %	5,60 %							
		3.3.1	Meningkatn ya peranan sektor koperasi dan UMKM serta industri kreatif	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ADHB	3	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %							

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan kualitas aparatur pemerintahan desa	75 %	77 %	1.794.230.000	78 %	178.625.000	80 %	178.625.000	83 %	178.625.000	85 %	178.625.000	90 %	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Meningkatnya usaha simpan pinjam	50 %	70 %	0	80 %	50.000.000	85 %	50.000.000	90 %	50.000.000	95 %	50.000.000	100 %	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Cakupan fasilitas pelaksanaan perizinan	65 %	65 %	0	72 %	20.000.000	83 %	20.000.000	90 %	20.000.000	98 %	20.000.000	98 %	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		4	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	terdatanya Cagar Budaya di Kabupaten Labuhanbatu	100 %	100 %	15.175.000	100 %	15.175.000	100 %	15.175.000	100 %	15.175.000	100 %	15.175.000	100 %	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
		5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi sehat, persentase koperasi baik, persentase koperasi maju	50 %	100 %	210.036.000	100 %	210.036.000	100 %	210.036.000	100 %	210.036.000	100 %	210.036.000	100 %	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		6	PROGRAM PEMBERDA YAAN LEMBAGA KEMASYAR AKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAK AT HUKUM ADAT	Persentase Kategori indeks inovasi desa	30 %	40 %	1.067.723.000	50 %	1.067.723.000	60 %	1.067.723.000	70 %	1.067.723.000	80 %	1.067.723.000	90 %	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		7	PROGRAM PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan Desa	N/A %	N/A %	47.664.000	100 %	47.664.000	100 %	47.664.000	100 %	47.664.000	100 %	47.664.000	100 %	0	Kecamatan Bilah Hulu
				Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat melalui Lembaga Masyarakat Desa	N/A %	100 %	34.160.000	100 %	34.160.000	100 %	34.160.000	100 %	34.160.000	100 %	34.160.000	100 %	0	Kecamatan Panai Hulu
				Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat melalui Lembaga	N/A %	100 %	3.129.000.000	100 %	3.129.000.000	100 %	3.129.000.000	100 %	3.129.000.000	100 %	3.129.000.000	100 %	0	Kecamatan Rantau Utara

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Kemasyarakatan Kelurahan														
				Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	N/A %	100 %	2.404.000.000	100 %	2.404.000.000	100 %	2.404.000.000	100 %	2.404.000.000	100 %	2.404.000.000	100 %	0	Kecamatan Rantau Selatan
				tingkat kinerja pemberdayaan masyarakat melalui lembaga kelurahan	N/A %	100 %	2.000.000	100 %	2.000.000	100 %	2.000.000	100 %	2.000.000	100 %	2.000.000	100 %	0	Kecamatan Panai Hilir
				tingkat kinerja pemberdayaan masyarakat melalui lembaga kelurahan	N/A %	100 %	169.330.000	100 %	169.330.000	100 %	169.330.000	100 %	169.330.000	100 %	169.330.000	100 %	0	Kecamatan Panai Tengah
				Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan Desa	NA %	100 %	11.659.000	100 %	11.659.000	100 %	11.659.000	100 %	11.659.000	100 %	11.659.000	100 %	0	Kecamatan Bilah Barat

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan Desa	N/A %	100 %	5.000.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	0	Kecamatan Pangkatan
				Tingkat kinerja pemberdayaan masyarakat melalui lembaga kelurahan	N/A %	100 %	83.299.000	100 %	83.299.000	100 %	83.299.000	100 %	83.299.000	100 %	83.299.000	100 %	0	Kecamatan Bilah Hilir
		8	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM aktif dan produktif	50 %	70 %	293.248.000	75 %	293.248.000	80 %	293.248.000	85 %	293.248.000	90 %	293.248.000	100 %	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		9	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Tercapainya pembinaan sejarah di Kabupaten Labuhanbatu	100 %	100 %	0	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		10	PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan Jumlah Desa tertata	100 %	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		11	PROGRAM PENDIDIKA N DAN LATIHAN PERKOPER ASIAN	Persentase pelaku UMKM dan Koperasi yang dilatih	50 %	50 %	375.508.000	70 %	375.508.000	75 %	375.508.000	80 %	375.508.000	85 %	375.508.000	90 %	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		12	PROGRAM PENGAWA SAN DAN PEMERIKSA AN KOPERASI	Cakupan koperasi yang melakukan kegiatan sesuai izin	100 %	100 %	162.232.000	100 %	162.232.000	100 %	162.232.000	100 %	162.232.000	100 %	162.232.000	100 %	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		13	PROGRAM PENGELOL AAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAM AN MODAL	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi	0 %	60 %	0	70 %	50.000.000	80 %	50.000.000	85 %	50.000.000	90 %	50.000.000	100 %	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		14	PROGRAM PENGEMBA NGAN IKLIM PENANAM AN MODAL	Persentase Keterbukaan informasi penanaman modal	0 %	100 %	412.126.000	100 %	412.126.000	100 %	412.126.000	100 %	412.126.000	100 %	412.126.000	100 %	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		15	PROGRAM PENGEMBA NGAN KEBUDAYA AN	Persentase pengelolaan kebudayaan dan kelestarian kesenian tradisional	100 %	100 %	279.125.000	100 %	279.125.000	100 %	279.125.000	100 %	279.125.000	100 %	279.125.000	100 %	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
		16	PROGRAM PENGEMBA NGAN KESENIAN TRADISION AL	Persentase terbinanya masyarakat dalam bidang kesenian	100 %	100 %	310.000.000	100 %	310.000.000	100 %	310.000.000	100 %	310.000.000	100 %	310.000.000	100 %	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
		17	PROGRAM PENGEMBA NGAN UMKM	persentase pelaku UMKM dengan pemasaran produknya berbasis online	90 UMKM	120 UMK M	200.000.000	170 UMK M	200.000.000	240 UMK M	200.000.000	350 UMK M	200.000.000	400 UMK M	200.000.000	560 UMK M	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		18	PROGRAM PENGENDA LIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATE N/KOTA	Persentase industri yang memiliki izin usaha	40 %	40 %	50.000.000	60 %	50.000.000	70 %	50.000.000	80 %	50.000.000	90 %	50.000.000	100 %	0	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		19	PROGRAM PENGENDA LIAN PELAKSAN AAN PENANAM AN MODAL	Persentase ketaatan terhadap perizinan	80 %	80 %	398.123.000	85 %	398.123.000	90 %	398.123.000	95 %	398.123.000	100 %	398.123.000	100 %	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		20	PROGRAM PENILAIAN KESEHATA N KSP/USP KOPERASI	Persentase peningkatan status koperasi	50 %	70 %	68.000.000	75 %	68.000.000	80 %	68.000.000	85 %	68.000.000	90 %	68.000.000	100 %	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		21	PROGRAM PENINGKAT AN KERJASAM A DESA	Persentase Kerjasama antar Desa	10 %	40 %	28.800.000	45 %	28.800.000	50 %	28.800.000	55 %	28.800.000	60 %	28.800.000	65 %	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		22	PROGRAM PENINGKAT AN SARANA DISTRIBUSI PERDAGAN GAN	Persentase pasar rakyat yang sesuai standard	50 %	50 %	4.566.782.000	70 %	3.066.782.000	80 %	3.066.782.000	90 %	3.066.782.000	95 %	3.066.782.000	100 %	0	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		23	PROGRAM PERENCAN AAN DAN PEMBANG UNAN INDUSTRI	Persentase IKM produktif	50 %	60 %	1.288.946.000	70 %	1.288.946.000	80 %	1.288.946.000	85 %	1.288.946.000	90 %	1.288.946.000	100 %	0	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		24	PROGRAM PROMOSI PENANAM AN MODAL	Persentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	56,79 %	100 %	24.976.000	100 %	24.976.000	100 %	24.976.000	100 %	24.976.000	100 %	24.976.000	100 %	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		25	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	78 %	78 %	102.460.000	80 %	102.460.000	90 %	102.460.000	100 %	102.460.000	100 %	102.460.000	100 %	0	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		26	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan perlindungan uji alat- alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya	50 %	70 %	284.419.000	80 %	284.419.000	85 %	284.419.000	90 %	284.419.000	95 %	284.419.000	100 %	0	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
4			Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan guna percepatan pengembangan wilayah dan kawasan															
	4.1		Meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk	Tingkat Kemapanan Jalan Kabupaten	62,14 %	65,00 %		67,22 %		68,55 %		70,00 %		80,50 %		80,50 %		

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			percepatan pengemba ngan wilayah dan kawasan															
		4.1.1	Meningkatn ya pemerataan pembangu nan yang didukung konektivitas antar wilayah dan kawasan	Indeks Wiliamson	NA	0,4 Poin		0,35 Poin		0,33 Poin		0,2 Poin		0,1 Poin		0,1 Poin		
		1	PROGRAM PENATAGU NAAN TANAH	Persentasi Fasilitasi Batas Desa/Kecamata n di Kabupaten Labuhanbatu	0 %	22 %	244.333.000	44 %	244.333.000	66 %	244.333.000	77 %	244.333.000	88 %	244.333.000	88 %	0	Dinas Pertanahan
		2	PROGRAM PENETAPA N TANAH ULAYAT	Cakupan Penetapan Tanah Ulayat di Kabupaten Labuhanbatu	0 %	0 %	0	95 %	50.000.000	95 %	51.500.000	100 %	53.045.000	100 %	53.045.000	100 %	0	Dinas Pertanahan
		3	PROGRAM PENGELOL AAN IZIN LOKASI	Persentase Izin Lokasi Penggunaan Tanah Sesuai Peruntukannya	100 %	100 %	35.005.000	100 %	35.005.000	100 %	35.005.000	100 %	35.005.000	100 %	35.005.000	100 %	0	Dinas Pertanahan

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		4	PROGRAM PENGELOL AAN IZIN MEMBUKA TANAH	Cakupan Fasilitasi Izin Membuka Tanah	0 %	0 %	50.000.000	95 %	51.500.000	95 %	53.045.000	100 %	53.045.000	100 %	53.045.000	100 %	0	Dinas Pertanahan
		5	PROGRAM PENGELOL AAN PELAYARA N	Persentase Fasilitas Pelabuhan Sungai yang Standart	100 %	100 %	102.600.000	100 %	102.600.000	100 %	102.600.000	100 %	102.600.000	100 %	102.600.000	100 %	0	Dinas Perhubungan
		6	PROGRAM PENGELOL AAN PENERBAN GAN	Persentase Progres Pembangunan Bandara	3 %	5 %	11.835.000	10 %	11.835.000	15 %	11.835.000	20 %	11.835.000	25 %	11.835.000	25 %	0	Dinas Perhubungan
		7	PROGRAM PENGELOL AAN TANAH KOSONG	Cakupan Peningkatan Penataan dalam Pemanfaatan Tanah Kosong	0 %	0 %	50.000.000	95 %	51.500.000	95 %	53.045.000	100 %	53.045.000	100 %	53.045.000	100 %	0	Dinas Pertanahan
		8	PROGRAM PENYELEN GGARAAN JALAN	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	75 %	80 %	80.600.383.000	85 %	80.600.383.000	90 %	80.600.383.000	95 %	80.600.383.000	100 %	80.600.383.000	100 %	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		9	PROGRAM PENYELEN GGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTA	Tingkat Kepuasan Masyarakat Pengguna Jalan	55 %	65 %	3.166.696.000	70 %	3.166.696.000	75 %	3.166.696.000	80 %	3.166.696.000	85 %	3.166.696.000	85 %	0	Dinas Perhubungan

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			N JALAN (LLAJ)															
		10	PROGRAM PENYELESA IAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANG UNAN	Cakupan Fasilitasi Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah	0 %	20 %	49.287.000	40 %	49.287.000	60 %	49.287.000	80 %	49.287.000	100 %	49.287.000	100 %	0	Dinas Pertanahan
		11	PROGRAM PENYELESA IAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Sengketa Tanah yang Selesai di Fasilitasi	100 %	100 %	150.960.000	100 %	150.960.000	100 %	150.960.000	100 %	150.960.000	100 %	150.960.000	100 %	0	Dinas Pertanahan
		12	PROGRAM REDISTRIBU SI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH	Cakupan Fasilitasi Usulan Objek TORA	100 %	100 %	82.702.000	100 %	82.702.000	100 %	82.702.000	100 %	82.702.000	100 %	82.702.000	100 %	0	Dinas Pertanahan

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			ABSENTEE															
	4.2		Meningkatk an kualitas infrastrukt ur yang merata dan berwawasa n lingkungan	Indeks Infrastruktur	NA Poin	40 Poin		45 Poin		48 Poin		50 Poin		55 Poin		55 Poin		
		4.2.1	Meningkatn ya ketahanan daerah dalam penanggul angan bencana	Indeks Resiko Bencana	NA	140 Poin		145 Poin		148 Poin		150 Poin		152 Poin		152 Poin		
		1	PROGRAM PENANGG ULANGAN BENCANA	Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana	40 %	80 %	2.650.494.000	90 %	2.914.008.000	90 %	2.814.008.000	90 %	3.014.008.000	90 %	3.114.008.000	90 %	0	Badan Penanggulan Bencana Daerah

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		4.2.2	Meningkatn ya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	58,03	58,66 Poin		57,18 Poin		57,48 Poin		58,00 Poin		58,50 Poin		58,50 Poin		
				Persentase lingkungan permukiman kumuh	1,5 %	1,3 %		1,1 %		0,9 %		0,4 %		0 %		0 %		
		1	PROGRAM PEMBINAA N DAN PENGAWA SAN TERHADAP IZIN LINGKUNG AN DAN IZIN PERLINDU NGAN DAN PENGELOL	Presentase Ketaatan Sesuai Izin yang Diberikan	95 %	95 %	12.864.000	95 %	13.249.000	95 %	13.249.000	95 %	13.249.000	95 %	13.249.000	95 %	0	Dinas Lingkungan Hidup

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			AAN LINGKUNG AN HIDUP (PPLH)															
		2	PROGRAM PENANGA NAN PENGADU AN LINGKUNG AN HIDUP	Cakupan pengaduan Masyarakat yang terselesaikan	100 %	100 %	6.064.000	100 %	6.245.000	100 %	6.245.000	100 %	6.245.000	100 %	6.245.000	100 %	0	Dinas Lingkungan Hidup
		3	PROGRAM PENGAKUA N KEBERADA AN MASYARAK AT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan MHA yang terkait PPLH	25 %	30 %	11.964.000	35 %	12.322.000	40 %	12.322.000	50 %	12.322.000	60 %	12.322.000	60 %	0	Dinas Lingkungan Hidup

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Labuhanbatu	15 %	20 %	1.210.365.000	30 %	1.210.365.000	30 %	1.210.365.000	35 %	1.210.365.000	50 %	1.210.365.000	50 %	0	Dinas Lingkungan Hidup
		5	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah	25 %	45 %	6.447.311.000	65 %	5.258.730.000	80 %	5.258.730.000	90 %	5.258.730.000	100 %	5.258.730.000	100 %	0	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase Pengurangan Sampah	0 %	5 %	173.675.000	10 %	178.885.000	20 %	178.885.000	30 %	178.885.000	40 %	178.885.000	40 %	0	Dinas Lingkungan Hidup
		6	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Infrastruktur Permukiman Strategis Dalam Kondisi Baik	65 %	75 %	4.209.990.000	80 %	4.336.289.000	85 %	4.466.378.000	90 %	4.600.369.000	95 %	4.738.381.000	95 %	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		7	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Terbangunnya Prasarana Persampahan	60 %	75 %	610.000.000	80 %	628.300.000	85 %	647.149.000	90 %	666.563.000	95 %	686.560.000	95 %	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		8	PROGRAM PENGENDALI AN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Kegiatan/usaha yang mempunyai izin limbah B3dan melakukan pengelolaan limbah B3 dengan baik	50 %	75 %	0	80 %	5.000.000	85 %	5.150.000	90 %	5.304.000	95 %	5.463.000	95 %	0	Dinas Lingkungan Hidup
		9	PROGRAM PENGENDA LIAN PENCEMAR AN DAN/ATAU KERUSAKA N LINGKUNG AN HIDUP	Indeks Kualitas Air	52.45 poin	53.81 poi	106.322.000	53.91 poi	106.322.000	54.01 poi	106.322.000	54.11 poi	106.322.000	54.21 poi	106.322.000	54.21 poi	0	Dinas Lingkungan Hidup
				Indeks Kualitas Udara	76.85 poin	76.95 poi	106.322.000	77.05 poi	106.322.000	77.15 poi	106.322.000	77.25 poi	106.322.000	77.35 poi	106.322.000	77.45 poi	0	Dinas Lingkungan Hidup
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan	24.05 poin	25.05 poi	106.322.000	26.05 poi	106.322.000	27.05 poi	106.322.000	28.05 poi	106.322.000	29.05 poi	106.322.000	30.05 poi	0	Dinas Lingkungan Hidup

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		10	PROGRAM PENGHARG AAN LINGKUNG AN HIDUP UNTUK MASYARAK AT	Persentase Masyarakat/Dun ia Usaha/Dunia Pendidikan yang menerima Penghargaan berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup dan berkelanjutan	80 %	80 %	23.014.000	80 %	23.704.000	80 %	23.704.000	80 %	23.704.000	80 %	23.704.000	80 %	0	Dinas Lingkungan Hidup
		11	PROGRAM PENINGKAT AN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNG AN HIDUP UNTUK MASYARAK AT	Persentase Masyarakat yang telah dibina dan melakukan kegiatan peduli lingkungan hidup	80 %	80 %	13.307.000	80 %	13.706.000	80 %	13.706.000	80 %	13.706.000	80 %	13.706.000	80 %	0	Dinas Lingkungan Hidup
		12	PROGRAM PERENCANA AN LINGKUNG AN HIDUP	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	70 %	75 %	47.652.000	80 %	49.081.000	80 %	49.081.000	80 %	49.081.000	80 %	49.081.000	80 %	0	Dinas Lingkungan Hidup

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		4.2.3	Peningkata n kualitas infrastrukturu publik yang merata	Rasio Rumah Layak Huni	51,91	57,05 %	62,2 %	67,34 %	74,12 %	79,23 %	79,23 %							
				Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	68,81	73,05 %	77,29 %	81,52 %	85,76 %	90,0 %	90,0 %							
				Persentase penduduk berakses air minum layak	85,01	90,01 %		95,7 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
		1	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Pengurangan Kawasan Kumuh	18 %	20 %	699.668.000	50 %	700.000.000	60 %	700.000.000	70 %	700.000.000	90 %	700.000.000	90 %	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN ANNYA	Persentasi Bangunan dan Lingkungan Dalam Kondisi Baik	70 %	75 %	857.500.000	80 %	883.225.000	85 %	909.721.000	90 %	937.013.000	95 %	965.123.000	95 %	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		3	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentasi Bangunan Negara Dalam Kondisi Baik	70 %	80 %	11.356.252.000	85 %	11.696.939.000	90 %	12.047.847.000	95 %	12.409.283.000	100 %	12.761.561.000	100 %	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah memiliki SPAL yang Layak	75 %	80 %	3.185.271.000	85 %	3.280.829.000	90 %	3.379.254.000	95 %	3.480.632.000	100 %	3.585.051.000	100 %	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	70 %	80 %	4.102.419.000	85 %	4.225.249.000	90 %	4.352.256.000	95 %	4.482.824.000	100 %	4.617.309.000	100 %	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Peningkatan Akses Air Minum Layak (Bukan Jaringan Perpipaan)	75 %	80 %	1.839.343.000	85 %	1.894.522.000	90 %	1.951.358.000	95 %	2.009.899.000	100 %	2.070.196.000	100 %	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		7	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Penurunan Luas Kawasan Terkena Dampak Banjir	70 %	75 %	1.207.500.000	80 %	1.243.725.000	85 %	1.281.036.000	90 %	1.319.467.000	95 %	1.359.051.000	95 %	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		8	PROGRAM PENGEMBA NGAN JASA KONSTRUK SI	Persentase SDM Pelaku Jasa Konstruksi yang Kompeten dan Siap Kerja	75 %	80 %	1.003.737.000	85 %	1.033.849.000	90 %	1.064.865.000	95 %	1.096.811.000	100 %	1.129.715.000	100 %	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		9	PROGRAM PENGEMBA NGAN PERUMAH AN	Persentase Penyediaan Rumah Korban Bencana dan Program Relokasi Kabupaten/Kota	100 %	100 %	747.713.000	100 %	775.000.000	100 %	804.000.000	100 %	830.325.000	100 %	857.550.000	100 %	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		10	PROGRAM PENINGKAT AN PELAYANA N SERTIFIKASI , KUALIFIKAS I, KLASIFIKASI , DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAH AN DAN KAWASAN PERMUKIM AN	Persentase Pengembang Perumahan dengan kualifikasi kecil yang bersertifikat	17 %	20 %	30.000.000	45 %	50.000.000	55 %	30.900.000	75 %	32.000.000	80 %	33.000.000	80 %	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		11	PROGRAM PENINGKAT AN PRASARAN A, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU Di Perumahan Dalam Kondisi Baik	15 %	20 %	6.670.342.000	25 %	6.429.284.000	30 %	6.592.161.000	35 %	6.559.927.000	40 %	5.932.725.000	40 %	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		12	PROGRAM PENYELEN GGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap Tataruang Wilayah	70 %	80 %	2.094.821.000	85 %	2.157.666.000	90 %	2.222.396.000	95 %	2.289.068.000	100 %	2.357.740.000	100 %	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		13	PROGRAM PERUMAH AN DAN KAWASAN PERMUKIM AN KUMUH	Cakupan Penanganan Pencegahan Kawasan Kumuh	20 %	25 %	100.000.000	30 %	150.000.000	35 %	200.000.000	40 %	206.000.000	45 %	212.000.000	45 %	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5			Meningkatkan rasa aman, nyaman dan penuh kekeluargaan ditengah kehidupan masyarakat yang majemuk															
	5.1		Meningkatn ya Ketertiban, Ketentrama n dan Kenyamana n dalam Kehidupan Masyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	NA Poin	90 Poin		91 Poin		93 Poin		94 Poin		95 Poin		95 Poin		
		5.1.1	Meningkatn ya Keimanan dan Kerukunan Umat Beragama dalam Kerangka Demokrasi	Indeks Kerukunan Beragama	NA	80 Poin		84 Poin		86 Poin		87 Poin		88 Poin		88 Poin		
		1	PROGRAM PEMBERDAY AAN DAN PENGAWASA N ORGANISASI KEMASYARA	Persentase penanganan konflik ormas (persentase ormas yang mendapatkan	100 %	100 %	133.506.000	100 %	133.506.000	100 %	133.506.000	100 %	133.506.000	100 %	133.506.000	100 %	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			KATAN	fasilitasi dan pembinaan)														
		5.1.2	Meningkatn ya Rasa Kepedulian dan Tanggungj awab Sosial	Persentase Penurunan Angka Kriminalitas	NA	20 %		25 %		30 %		35 %		40 %		40 %		
				Persentase Penurunan Kasus Penggunaan narkoba	10	20 %		30 %		40 %		50 %		60 %		60 %		
		I	PROGRAM KOORDINA SI KETENTRA MAN DAN KETERTIBA N UMUM	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Desa/Kelurahan	N/A %	N/A %	3.000.000	100 %	3.000.000	100 %	3.000.000	100 %	3.000.000	100 %	3.000.000	100 %	0	Kecamatan Bilah Hulu
				Tingkat koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	N/A %	100 %	3.000.000	100 %	3.000.000	100 %	3.000.000	100 %	3.000.000	100 %	3.000.000	100 %	0	Kecamatan Pangkatan

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Tingkat koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	N/A %	100 %	3.000.000	100 %	3.000.000	100 %	3.000.000	100 %	3.000.000	100 %	3.000.000	100 %	0	Kecamatan Bilah Barat
				Tingkat koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	N/A %	N/A %	103.200.000	100 %	103.200.000	100 %	103.200.000	100 %	103.200.000	100 %	103.200.000	100 %	0	Kecamatan Bilah Hilir
				Tingkat koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	N/A %	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	0	Kecamatan Panai Hulu
				Tingkat koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	N/A %	100 %	3.000.000	100 %	3.000.000	100 %	3.000.000	100 %	3.000.000	100 %	3.000.000	100 %	0	Kecamatan Panai Tengah
				Tingkat koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	N/A %	100 %	3.000.000	100 %	3.000.000	100 %	3.000.000	100 %	3.000.000	100 %	3.000.000	100 %	0	Kecamatan Panai Hilir
				Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Desa/Kelurahan	N/A %	100 %	3.000.000	100 %	3.000.000	100 %	3.000.000	100 %	3.000.000	100 %	3.000.000	100 %	0	Kecamatan Rantau Selatan
				Tingkat koordinasi ketentraman	N/A %	N/A %	3.000.000	100 %	3.000.000	100 %	3.000.000	100 %	3.000.000	100 %	3.000.000	100 %	0	Kecamatan Rantau Utara

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				dan ketertiban umum														
		2	PROGRAM PEMBERDA YAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	70 %	70 %	527.318.000	75 %	527.318.000	75 %	527.318.000	75 %	527.318.000	75 %	527.318.000	75 %	0	Dinas Sosial
		3	PROGRAM PENANGA NAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	70 %	70 %	58.442.000	70 %	58.442.000	70 %	58.442.000	75 %	58.442.000	75 %	58.442.000	75 %	0	Dinas Sosial
		4	PROGRAM PENCEGAH AN, PENANGG ULANGAN, PENYELAM ATAN KEBAKARA N DAN PENYELAM ATAN NON KEBAKARA N	Persentase Sumber Daya Manusia Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	95 %	80 %	400.076.000	85 %	412.078.000	90 %	424.440.000	95 %	437.174.000	100 %	450.289.000	100 %	0	Satuan Polisi Pamong Praja
		5	PROGRAM PENGELOLA AN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pemeliharaan taman makam pahlawan	75 %	75 %	30.780.000	75 %	30.780.000	80 %	30.780.000	80 %	30.780.000	85 %	30.780.000	85 %	0	Dinas Sosial

No.			MISI/ TUJUAN/ PROGRAM PEMBANG UNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		6	PROGRAM PENINGKAT AN KETENTERA MAN DAN KETERTIBA N UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman Ketertiban Umum	100 %	100 %	4.846.545.000	100 %	4.846.545.000	100 %	4.846.545.000	100 %	4.846.545.000	100 %	4.846.545.000	100 %	0	Satuan Polisi Pamong Praja
		7	PROGRAM PERLINDU NGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga Miskin yang sudah menerima bantuan sosial	56 %	57 %	247.995.000	58 %	247.995.000	59 %	247.995.000	60 %	247.995.000	60 %	247.995.000	65 %	0	Dinas Sosial
		8	PROGRAM REHABILITA SI SOSIAL	Persentase PMKS di Luar Panti yang dapat penanganan	20 %	25 %	65.524.000	25 %	65.524.000	25 %	65.524.000	25 %	65.524.000	25 %	65.524.000	25 %	0	Dinas Sosial

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN
DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. KERANGKA PENDANAAN

Berdasarkan gambaran keuangan daerah yang dijelaskan dalam bab III, proyeksibelanja tahun 2021-2026 ditunjukkan dalam Gambar 7.1 berikut.

Tabel 7.1. Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2021 s.d 2026

URAIAN	PROYEKSI (Rp. Milyar)						Rata-rata Pertumb uhan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
BELANJA	1.352.721.197.188,00	1.349.697.945.700,00	1.252.455.344.850,00	1.284.105.344.850,00	1.295.771.844.850,00	1.323.012.401.072,00	1,00%
BELANJA OPERASI	1.040.257.345.733	990.356.665.400	943.434.780.550	973.434.780.550	983.434.780.550	1.008.992.171.772	1,00%
Belanja Pegawai	626.020.564.962	638.934.780.550	638.934.780.550	638.934.780.550	638.934.780.550	664.492.171.772	1,02%
Belanja Barang dan Jasa	395.153.780.771	324.924.534.850	280.000.000.000	280.000.000.000	320.000.000.000	320.000.000.000	0,97%
Belanja Hibah	17.083.000.000	21.997.350.000	20.000.000.000	50.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	3,20%
Belanja Bantuan Sosial	2.000.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	1,31%
BELANJA MODAL	160.944.570.255	168.320.716.000	165.000.000.000	166.650.000.000	168.316.500.000	169.999.665.000	1,01%
BELANJA TAK TERDUGA	3.000.000.000	50.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	0,00%
BELANJA TRANSFER	148.519.281.200	141.020.564.300	141.020.564.300	141.020.564.300	141.020.564.300	141.020.564.300	-1,03%

Sumber : Badan Keuangan Daerah 2021

7.2. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Indikasi rencana program dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 merupakan rencana program pembangunan daerah yang menunjang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Program Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

7.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

7.2.1.1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Pendidikan,

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Capaian SPM Pendidikan.

2. Program Pengembangan Kurikulum

Indikator yang akan dicapai yaitu Cakupan ketersediaan kurikulum muatan lokal.

3. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan.

4. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase ketersediaan izin penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat.

5. Program Pengembangan bahasa dan sastra

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase tersedianya buku cerita rakyat daerah.

7.2.1.2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Capaian Layanan SPM Terkait Siklus Hidup, Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Terkait Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular, Persentase Fasilitas Kesehatan dengan Ketersediaan Sarana, Prasarana dan alat Kesehatan sesuai standar >70% Dan Tersedianya Bangunan rumah sakit sesuai Standar Rumah Sakit

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang kompeten, Dan Jumlah Tenaga Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (RSUD)

3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar dan Persentase

Sarana Kefarmasian yang memenuhi standar

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

7.2.1.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Jalan

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik..

2. Program Pengembangan Jasa Kontruksi

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase SDM Pelaku Jasa Konstruksi yang Kompeten dan Siap Kerja

3. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Ketaatan Terhadap Tataruang Wilayah

4. Program Penataan Bangunan Gedung

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentasi Bangunan Negara Dalam Kondisi Baik

5. Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Bangunan an Lingkungan Dalam Kondisi Baik

6. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Terbangun nya Prasarana Persampahan

7. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Rumah memiliki SPAL yang Layak

8. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik

9. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Peningkatan Akses Air Minum Layak (Bukan Jaringan Perpipaan)

10. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Indikator yang dicapai yaitu Persentase Penurunan Luas Kawasan Terkena Dampak Banjir

11. Program Pengembangan Permukiman

Indikator yang dicapai yaitu Persentase Infrastruktur Permukiman Strategis Dalam Kondisi Baik

7.2.1.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Perumahan

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Penyediaan Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Kabupaten/Kota

2. Program Perumahan dan kawasan Pemukiman Kumuh

Indikator yang akan dicapai yaitu Cakupan Penanganan Pencegahan Kawasan Kumuh

3. Program Peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan Dan Kawasan Permukiman

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Pengembang Perumahan dengan kualifikasi kecil yang bersertifikat

4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase PSU diperumahan dalam kondisi baik

5. Program Kawasan Permukiman

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pengurangan kawasan kumuh

7.2.1.5 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penanggulangan Bencana

Indikator yang akan dicapai yaitu Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Sumber Daya Manusia Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

3. Program Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Cakupan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

7.2.1.6 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Sosial

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Diberdayakan

2. Program Rehabilitasi Sosial

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase PMKS diluar Panti Yang Tertangani

3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Keluarga Miskin yang Sudah Menerima Bantuan Sosial

4. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

5. Program Penanganan Bencana

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

7.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

7.2.2.1 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja

2. Program Penempatan Tenaga Kerja

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Ketersediaan Kesempatan Kerja

3. Program Hubungan Industrial

Indikator yang akan dicapai yaitu Cakupan peningkatan Kapasitas Lembaga Ketenagakerjaan

4. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Perencanaan Ketenagakerjaan

7.2.2.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Indikator yang akan dicapai yaitu Cakupan Kelembagaan Penyediaan Layanan Pemberdayaan Perempuan

2. Program Perlindungan Perempuan

Indikator yang akan dicapai yaitu Cakupan Layanan Terhadap Perlindungan Perempuan

3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Peningkatan Kualitas

Keluarga

4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Indikator yang akan dicapai yaitu Cakupan Layanan Kualitas Hidup Anak

5. Program Perlindungan Khusus Anak

Indikator yang akan dicapai yaitu Cakupan Layanan Terhadap Perlindungan Anak

6. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Indikator yang akan dicapai yaitu Cakupan Ketersediaan Data Gender dan Anak

7.2.2.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Indikator yang akan dicapai yaitu Capaian skor pola pangan harapan

2. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase tingkat capaian indeks ketahanan pangan

3. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pengawasan keamanan pangan

4. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase penyediaan infrastruktur pangan

7.2.2.4 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penatagunaan Tanah

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentasi Fasilitasi Batas Desa/Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu

2. Program Penetapan Tanah Ulayat

Indikator yang akan dicapai yaitu Cakupan Penetapan Tanah Ulayat di Kabupaten Labuhanbatu

3. Program Pengelolaan Izin Lokasi

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentasi Izin Lokasi Penggunaan Tanah Sesuai Peruntukannya

4. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah

Indikator yang akan dicapai yaitu Cakupan Fasilitasi Izin Membuka Tanah

5. Program Pengelolaan Tanah Kosong

Indikator yang akan dicapai yaitu Cakupan Peningkatan Penataan dalam Pemanfaatan Tanah Kosong

6. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Indikator yang akan dicapai yaitu Cakupan Fasilitasi Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah

7. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Sengketa Tanah yang Selesai di Fasilitasi

8. Program Redistribusi Tanah , Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee

Indikator yang akan dicapai yaitu Cakupan Fasilitasi Usulan Objek TORA

7.2.2.5 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Indikator yang akan dicapai yaitu Presentase Ketaatan Sesuai Izin yang Diberikan

2. Program Penanganan Dan Pengaduan Lingkungan Hidup

Indikator yang akan dicapai yaitu Cakupan pengaduan Masyarakat yang terselesaikan

3. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan MHA yang terkait PPLH

4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Labuhanbatu

5. Program Pengelolaan Persampahan

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Penanganan Sampah dan Persentase Pengurangan Sampah

6. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Kegiatan/usaha yang mempunyai izin limbah B3 dan melakukan pengelolaan limbah B3 dengan baik

7. Program Pengendalian Pencemaran Dan /Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Indikator yang akan dicapai yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Tutupan Lahan Dan Indeks Kualitas Udara

8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang menerima Penghargaan berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup dan berkelanjutan

9. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Masyarakat yang telah dibina dan melakukan kegiatan peduli lingkungan hidup

10. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Ketersediaan Dokumen
Perencanaan Lingkungan Hidup

**7.2.2.6 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi
 Kependudukan DanPencatatan Sipil**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1, Program Pendaftaran Penduduk

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Penduduk yang Terdaftar

2. Program Pencatatan Sipil

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Peristiwa Pencatatan Sipil

3. Program Pengelolaan Informasi Adm. Kependudukan

Indikator yang akan dicapai yaitu Cakupan Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan

4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Indikator yang akan dicapai yaitu Cakupan Penyusunan Profil
Kependudukan Skala Kabupaten

7.2.2.7 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Indikator yang akan dicapai yaitu Cakupan kualitas Aparatur Pemerintah
Desa

2. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Kerjasama antar Desa

**3. Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan
 Masyarakat Hukum Adat**

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase kategori indeks inovasi desa

4. Program Penataan Desa

Indikator yang akan dicapai yaitu Cakupan jumlah Desa tertata

7.2.2.8 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan

Keluarga Berencana

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Penduduk

Indikator yang akan dicapai yaitu Tersedia data kependudukan dan keluarga

2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Indikator yang akan dicapai yaitu Terlaksananya layanan KIE KB

3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Indikator yang akan dicapai yaitu Terlaksananya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

7.2.2.9 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Indikator yang akan dicapai yaitu JumlahTingkat Kepuasan Masyarakat Pengguna Jalan

2. Program Pengelolaan Pelayaran

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Fasilitas Pelabuhan Sungai yang Standart

3. Program Pengelolaan Penerbangan

Indikator yang akan dicapai yaituPersentase Progres Pembangunan Bandara

7.2.2.10 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pemenuhan Informasi Kepada Masyarakat

2. Program Aplikasi Informatika

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase terbangunnya Aplikasi dan infrastruktur TIK terintegrasi

7.2.2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Indikator yang akan dicapai yaitu Cakupan koperasi yang melakukan kegiatan sesuai izin

2. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase peningkatan status koperasi

3. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pelaku UMKM dan Koperasi yang dilatih

4. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase koperasi sehat, persentase koperasi baik, persentase koperasi maju

5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro(UMKM)

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase UMKM aktif dan produktif

6. Program Pengembangan UMKM

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pelaku UMKM dengan pemasaran produknya berbasis online

7. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Indikator yang akan dicapai yaitu Cakupan usaha simpan pinjam

7.2.2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase keterbukaan informasi penanaman modal

2. Program Promosi Penanaman Modal

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase peningkatan kepuasan (IKM)

3. Program Pelayanan Penanaman Modal

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase cakupan fasilitas pelaksanaan perizinan

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase ketaatan terhadap perizinan

5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase ketersediaan data dan informasi

7.2.2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Pengembangan dan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Indikator yang akan dicapai yaitu Teciptanya pemuda yang berdaya saing dalam bidang keolahragaan

3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Indikator yang akan dicapai yaitu Meningkatnya kualitas SDM dan keorganisasian kepramukaan

7.2.2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

Indikator yang akan dicapai yaitu Tersedianya data statistik sektoral

7.2.2.15 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase terpenuhinya Keamanan Informasi

7.2.2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kebudayaan

Indikator yang akan dicapai yaitu Terkelolanya kebudayaan dan kelestarian kesenian tradisional

2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Indikator yang akan dicapai yaitu Terbinanya masyarakat dalam bidang kesenian

3. Program Pembinaan Sejarah

Indikator yang akan dicapai yaitu Kemudahan akses sarana dan informasi sejarah yang berkualitas

4. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

Indikator yang akan dicapai yaitu Meningkatnya pengelolaan dan promosi cagar budaya keluar daerah

5. Program Pengelolaan Permuseuman

Indikator yang akan dicapai yaitu Terlaksananya pendataan dan pendaftaran museum

7.2.2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pembinaan Perpustakaan

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan

2. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Terlestarikannya koleksi nasional dan naskah kuno serta berkembangnya koleksi budaya

7.2.2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Arsip

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Nilai Pengawasan

Kearsipan dengan kategori baik

2. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Penyelamatan arsip akibat bencana

3. Program Perizinan Penggunaan Arsip

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase layanan izin kearsipan

7.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

7.2.3.1 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Indikator yang akan dicapai yaitu Terjaminnya pelestarian spesies ikan yang dilindungi

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Indikator yang akan dicapai yaitu Meningkatnya kualitas dan produksi perikanan budidaya dan Meningkatnya Jumlah masyarakat yang melakukan pengolahan ikan hasil budidaya

3. Program Pengolahan Dan Perikanan tangkap

Indikator yang akan dicapai yaitu Meningkatnya kualitas dan produksi perikanan tangkap

4. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Indikator yang akan dicapai yaitu Cakupan kelompok pengolah hasil perikanan yang difasilitasi

7.2.3.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Indikator yang akan dicapai yaitu Meningkatnya kualitas pariwisata melalui kerjasama dan pemasaran yang profesional serta meningkatkan hubungan kerjasama di sektor pariwisata

2. Program Pemasaran Wisata

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pemasaran pariwisata

3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Keayaan Intelektual

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berexpressi

4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Indikator yang akan dicapai yaitu Cakupan peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif

7.2.3.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Peningkatan produktivitas padi, jagung dan kelapa sawit dan Peta Luas lahan perhutanan sosi

2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Indikator yang akan dicapai yaitu Meningkatnya kualitas pemanfaatan prasarana pertanian dan Persentase Prasarana dalam kondisi baik

3. Program Perizinan Usaha Pertanian

Indikator yang akan dicapai yaitu Cakupan pelaku usaha tani yang memiliki izin usaha pertanian

4. Program Penyuluhan Pertanian

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase kenaikan kelas kelompok tani

5. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase ternak yang sehat

6. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten

7.2.3.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

Indikator yang akan dicapai yaitu Cakupan layanan perizinan

2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pasar rakyat yang sesuai standart

3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

4. Program Pengembangan Ekspor

Indikator yang akan dicapai yaitu Cakupan produk unggulan daerah yang berorientasi ekspor

5. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

Indikator yang akan dicapai yaitu Cakupan perlindungan uji alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya

6. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Indikator yang akan dicapai yaitu Cakupan Promosi, Pemasaran dan Penggunaan Produk Dalam Negeri

7.2.3.5 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase IKM produktif

2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase industri yang memiliki izin usaha

3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Indikator yang akan dicapai yaitu Cakupan Fasilitas teknologi sistem

produksi

7.2.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

7.2.4.1 Sekretariat Daerah

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Indikator yang akan dicapai yaitu Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu

2. Program Perekonomian Dan Pembangunan

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Kegiatan Strategis Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi-UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan Pangan Yang di Koordinasikan

7.2.4.2 Sekretariat DPRD

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Indikator yang akan dicapai yaitu Cakupan Pembahasan Perda

7.2.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

7.2.5.1 Perencanaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Indikator yang akan dicapai yaitu Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam APBD

2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator yang akan dicapai yaitu Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW

7.2.5.2 Keuangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator yang akan dicapai yaitu Tersedianya rencana anggaran daerah (KUA-PPAS APBD)

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase PAD terhadap pendapatan

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Indikator yang akan dicapai yaitu Indeks Pengelolaan Asset

7.2.5.3 Kepegawaian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Kepegawaian Daerah

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Peningkatan kinerja ASN

7.2.5.4 Pendidikan Dan Pelatihan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase meningkatnya fungsi teknis, manajerial dan fungsional

7.2.5.5 Penelitian Dan Pengembangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase ketersediaan penelitian dan pengembangan pemerintahan dan pengkajian peraturan, Persentase ketersediaan dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan, Persentase ketersediaan dokumen penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan dan Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi

7.2.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

7.2.6.1 Inspektorat Daerah

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Jmlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Indikator yang akan dicapai yaitu Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

7.2.7. Unsur Kewilayahan

7.2.7.1 Kecamatan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Indikator yang akan dicapai yaitu Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Indikator yang akan dicapai yaitu Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan Desa

3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Indikator yang akan dicapai yaitu Terciptanya sistem keamanan lingkungan Desa/Kelurahan

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum

Indikator yang akan dicapai yaitu Tingkat Kinerja Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan

7.2.8. Unsur Pemerintahan Umum

7.2.8.1 Kesatuan Bangsa Dan Politik

Program

yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. **Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya**

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami tentang ketahanan ekonomi sosial dan budaya

2. **Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase penanganan konflik ormas (persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan)

3. **Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan**

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan

4. **Program Peningkatan Peran Partai politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**

Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik

5. **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial**

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial

Non Urusan

7.2.8.2 Non Urusan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah
Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Labuhanbatu

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungj ab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAA NPENDIDIKAN	Tersedianya sekolah model terpadu bertarap nasional	NA Tingka tan	3 Tingk at an	10,000,0 00	3 Ting kat an	10,000,0 00	3 Ting kat an	10,000,0 00	3 Tingk at an	10,000,0 00	3 Ting kat an	10,000,0 00	3 Ting kat an	0	Dinas Pendi kan
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAA NPENDIDIKAN	Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 %	10 0 %	100,767, 234,000	100 %	101,817, 234,000	100 %	102,827, 234,000	100 %	103,837, 234,000	100 %	103,847, 234,000	100 %	0	Dinas Pendi kan
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANG AN	Persentase ketersediaan kurikulum	50 %	60 %	50,000,0 00	70 %	60,000,0 00	80 %	65,000,0 00	90 %	75,000,0 00	100 %	80,000,0 00	100 %	0	Dinas Pendi kan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			KURIKULUM	muatan lokal														
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DANTENAGA KEPENDIDIKA N	Persentase Ketercukupan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	70 %	75 %	730,426,000	80 %	750,426,000	85 %	780,426,000	90 %	790,426,000	95 %	800,426,000	95 %	0	Dinas Pendi di kan
1	01	05	PROGRAM PENGENDALIA NPERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase ketersediaan izin penyelengga ra pendidikan oleh masyarakat	100 %	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	70,000,000	100 %	75,000,000	100 %	80,000,000	100 %	0	Dinas Pendi di kan
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAA NPENDIDIKAN	Tersedianya sekolah model	NA Tingka tan	3 Tingk	10,000,000	3 Tingkat	10,000,000	3 Tingkat	10,000,000	3 Tingkat	10,000,000	3 Tingkat	10,000,000	3 Tingkat	0	Dinas Pendi di kan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
																K	Rp	
				terpadu bertaraf nasional		at an		an		an		an		an		an		
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Terkait Siklus Hidup	100 Persen	100 Persen	13,139,033,000	100 Persen	13,639,033,000	100 Persen	14,139,033,000	100 Persen	14,639,033,000	100 Persen	14,939,033,000	100 Persen	0	Dinas Keseha tan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Terkait Penyakit Menular dan	100 Persen	100 Persen	6,000,000,000	100 Persen	5,500,000,000	100 Persen	5,800,000,000	100 Persen	6,200,000,000	100 Persen	6,300,000,000	100 Persen	0	Dinas Keseha tan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			MASYARAKAT	Penyakit Tidak Menular														
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasilitas Kesehatan dengan Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Sesuai Standar >70%	53 Persen	67 Persen	35,320,304,000	80 Persen	35,320,304,000	93 Persen	35,320,304,000	100 Persen	35,320,304,000	100 Persen	35,320,304,000	100 Persen	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat	83 Persen	83 Persen	5,000,000,000	84 Persen	5,000,00	84	5,000,00	85	5,000,00	85	5,000,00	85	0	Rumah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
			PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	kesehatan rumah sakitPersentase Terpenuhinya Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit)				0,000	Persen	0,000	Persen	0,000	Persen	0,000	Persen		Sakit Umum Daerah Rantau prapat	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Kompeten	65 Persen	70 Per se n	2,035,000,000	75 Pers en	2,096,050,000	80 Pers en	2,158,931,000	85 Perse n	2,223,699,000	90 Perse n	2,290,410,000	90 Pers en	0	Dinas Keseha tan
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase ketersediaan SDMsesuai standar Rumah Sakit	100 persen	100 pe rse n	100,000,000	100 pers e n	200,000,000	100 pers e n	250,000,000	100 perse n	300,000,000	100 pers e n	350,000,000	100 pers e n	0	Rumah Sakit Umum Daerah Rantau prapat
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI,ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN	Persentase Tempat Pengelolaan (TPP) yang Memenuhi Syarat Sesuai	78 Persen	80 Per se n	33,357,000	82 Pers en	34,357,000	83 Pers en	35,388,000	84 Perse n	36,450,000	85 Perse n	37,543,000	85 Pers en	0	Dinas Keseha tan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			MINUMAN	Standar														
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI,ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar	30 Persen	40 Per se n	65,000,000	50 Pers en	66,950,000	60 Pers en	68,958,000	65 Perse n	71,027,000	75 Perse n	73,158,000	75 Pers en	0	Dinas Keseha tan
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga Berprilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	53 Persen	53 Per se n	2,099,159,000	54 Pers en	2,162,130,000	55 Pers en	2,226,998,000	57 Perse n	2,293,808,000	60 Perse n	2,362,622,000	60 Pers en	0	Dinas Keseha tan
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
																K	Rp	
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Penurunan Luas Kawasan Terkena Dampak Banjir	70 %	75 %	1,207,500,000	80 %	1,243,725,000	85 %	1,281,036,000	90 %	1,319,467,000	95 %	1,359,051,000	95 %	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah memiliki SPAL yang Layak	75 %	80 %	3,185,271,000	85 %	3,280,829,000	90 %	3,379,254,000	95 %	3,480,632,000	100 %	3,585,051,000	100 %	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase Drainase	70 %	80 %	4,102,419,000	85 %	4,225,249,000	90 %	4,352,256,000	95 %	4,482,824,000	100 %	4,617,309,000	100 %	0	Dinas Pekerja

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			N DAN PENGEMBANG AN SISTEM DRAINASE	Dalam Kondisi Baik						%								an Umum dan Penata an Ruang
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANG AN PERMUKIMAN	Persentase Infrastruktur Permukiman Strategis Dalam Kondisi Baik	65 %	75 %	4,209,990,000	80 %	4,336,289,000	85 %	4,466,378,000	90 %	4,600,369,000	95 %	4,738,381,000	95 %	0	Dinas Pekerja an Umum dan Penata an Ruang
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentasi Bangunan Negara Dalam	70 %	80 %	11,356,252,000	85 %	11,696,939,000	90 %	12,047,847,000	95 %	12,409,283,000	100 %	12,761,561,000	100 %	0	Dinas Pekerja an Umum

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Kondisi Baik														dan Penata an Ruang
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN NYA	Persentasi Bangunan dan Lingkungan Dalam Kondisi Baik	70 %	75 %	857,500,000	80 %	883,225,000	85 %	909,721,000	90 %	937,013,000	95 %	965,123,000	95 %	0	Dinas Pekerja an Umum dan Penata an Ruang
1	03	10	PROGRAM PENYELENGG ARAAN JALAN	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	75 %	80 %	80,600,383,000	85 %	80,600,383,000	90 %	80,600,383,000	95 %	80,600,383,000	100 %	80,600,383,000	100 %	0	Dinas Pekerja an Umum dan Penata

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																		an Ruang
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANG ANJASA KONSTRUKSI	Persentase SDM Pelaku Jasa Konstruksi yang Kompeten dan Siap Kerja	75 %	80 %	1,003,737,000	85 %	1,033,849,000	90 %	1,064,865,000	95 %	1,096,811,000	100 %	1,129,715,000	100 %	0	Dinas Pekerja an Umum dan Penata an Ruang
1	03	12	PROGRAM PENYELENGG ARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap Tataruang Wilayah	70 %	80 %	2,094,821,000	85 %	2,157,666,000	90 %	2,222,396,000	95 %	2,289,068,000	100 %	2,357,740,000	100 %	0	Dinas Pekerja an Umum dan Penata an Ruang

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANG AN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan Rumah Korban Bencana dan Program Relokasi Kabupaten/K ota	100 %	100 %	747,713,000	100 %	775,000,000	100 %	804,000,000	100 %	830,325,000	100 %	857,550,000	100 %	0	Dinas Peruma han Rakyat dan Kawasa n Permuk iman
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penguranga nKawasan Kumuh	18 %	20 %	699,668,000	50 %	700,000,000	60 %	700,000,000	70 %	700,000,000	90 %	700,000,000	90 %	0	Dinas Peruma han Rakyat dan Kawasa n Permuk

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																		iman
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan Penanganan Pencegahan Kawasan Kumuh	20 %	25 %	100,000,000	30 %	150,000,000	35 %	200,000,000	40 %	206,000,000	45 %	212,000,000	45 %	0	Dinas Peruma han Rakyat dan Kawasa n Permuk iman
1	04	05	PROGRAM PENINGKATA N PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU Di Perumahan Dalam Kondisi Baik	15 %	20 %	6,670,342,000	25 %	6,429,284,000	30 %	6,592,161,000	35 %	6,559,927,000	40 %	5,932,725,000	40 %	0	Dinas Peruma han Rakyat dan Kawasa n

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
																		Permuk iman
1	0	0	PROGRAM PENINGKATA N PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Pengembang Perumahan dengan kualifikasi kecil yang bersertifikat	17 %	20 %	30,000,0 00	45 %	50,000,0 00	5 5 %	30,900,0 00	75 %	32,000,0 00	80 %	33,000,0 00	80 %	0	Dinas Peruma han Rakyat dan Kawasa n Permuk iman
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
1	0	0	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAM	Persentase Penanganan Gangguan	100 %	10 0	4,846,54 5,000	100 %	4,846,54 5,000	1 0	4,846,54 5,000	100 %	4,846,54 5,000	100 %	4,846,54 5,000	100 %	0	Satuan Polisi

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			AN DAN KETERTIBAN UMUM	Ketentraman Ketertiban Umum		%					0 %							Pamon gPraja
1	0	0	PROGRAM PENANGGULA NGAN BENCANA	Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana	40 persen	80 persen	2,650,494,000	90 persen	2,914,008,000	90 persen	2,814,008,000	90 persen	3,014,008,000	90 persen	3,114,008,000	90 persen	0	Badan Penang gulangan Bencan a Daerah
	5	3																
1	0	0	PROGRAM PENCEGAHAN , PENANGGULA NGAN,	Persentase Sumber Daya Manusia Melalui	95 persen	80 persen	400,076,000	85 persen	412,078,000	90 persen	424,440,000	95 persen	437,174,000	100 persen	450,289,000	100 persen	0	Satuan Polisi PamongPraja
	5	4																

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			PENYELAMAT AN KEBAKARAN DAN PENYELAMAT AN NON KEBAKARAN	Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat														
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYA AN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraa n Sosial yang diberdayakan	70 persen	70 pe rse n	527,318, 000	75 pers en	527,318, 000	75 pers en	527,318, 000	75 perse n	527,318, 000	75 pers en	527,318, 000	75 pers en	0	Dinas Sosial
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS di Luar Pantiyang dapat penanganan	20 persen	25 pe rse n	65,524,0 00	25 pers en	65,524,0 00	25 pers en	65,524,0 00	25 perse n	65,524,0 00	25 pers en	65,524,0 00	25 pers en	0	Dinas Sosial

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	0	0	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga Miskin yang sudah menerima bantuan sosial	56 persen	57 persen	247,995,000	58 persen	247,995,000	59 persen	247,995,000	60 persen	247,995,000	60 persen	247,995,000	65 persen	0	Dinas Sosial
1	0	0	PROGRAM PENANGANA BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	70 persen	70 persen	58,442,000	70 persen	58,442,000	70 persen	58,442,000	75 persen	58,442,000	75 persen	58,442,000	75 persen	0	Dinas Sosial
1	0	0	PROGRAM	Persentase	75	75	30,780,0	75	30,780,0	80	30,780,0	80	30,780,0	85	30,780,0	85	0	Dinas

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	6	7	PENGELOLAA N TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Pemeliharaa ntaman makam pahlawan	persen	pe rse n	00	pers en	00	pers en	00	perse n	00	pers en	00	pers en		Sosial
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
2	07	02	PROGRAM PERENCANAA NTENAGA KERJA	Terencanany a Ketenagakerj aan	0 %	0 %	0	100 %	30,000,0 00	0 %	0	100 %	100,000, 000	0 %	0	100 %	0	Dinas Tenaga Kerja
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITA S TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang dilatih dan produktif	50 %	55 %	538,956, 000	60 %	538,956, 000	65 %	538,956, 000	70 %	538,956, 000	75 %	538,956, 000	75 %	0	Dinas Tenaga Kerja
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN	Persentase Pencari Kerja	31 %	32 %	207,541, 000	33 %	207,541, 000	34 %	207,541, 000	35 %	207,541, 000	36 %	207,541, 000	36 %	0	Dinas Tenaga

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			TENAGA KERJA	yang Ditempatkan / Difasilitasi														Kerja
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Mematuhi Peraturan Perundang-Undangan	7.5 %	10 %	167,263,000	15 %	167,263,000	20 %	167,263,000	25 %	167,263,000	30 %	167,263,000	30 %	0	Dinas Tenaga Kerja
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUT AMAAN GENDERDAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan kelembagaan penyediaan layanan pemberdayaan perempuan	80 persen	80 persen	70,193,000	80 persen	70,193,000	85 persen	70,193,000	85 persen	70,193,000	90 persen	70,193,000	90 persen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlind

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																		ungan Anak
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGA NPEREMPUAN	Cakupan Layanan terhadap Perlindungan Perempuan	80 persen	80 pe rse n	554,844,000	80 pers en	554,844,000	85 pers en	554,844,000	85 perse n	554,844,000	90 pers en	554,844,000	90 pers en	0	Dinas Pember dayaan Peremp uan dan Perlind ungan Anak
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase peningkatan kualitas keluarga	80 persen	80 pe rse n	99,456,000	80 pers en	99,456,000	85 pers en	99,456,000	85 perse n	99,456,000	90 pers en	99,456,000	90 pers en	0	Dinas Pember dayaan Peremp uan dan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
																	Perlind ungan Anak	
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAA N SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan ketersediaan datagender dan anak	80 persen	80 pe rse n	70,350,000	80 pers en	70,350,000	85 pers en	70,350,000	85 perse n	70,350,000	90 pers en	70,350,000	90 pers en	0	Dinas Pember dayaan Peremp uan dan Perlind ungan Anak
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan layanan kualitas hidup anak	80 persen	80 pe rse n	181,632,000	80 pers en	181,632,000	85 pers en	181,632,000	85 perse n	181,632,000	90 pers en	181,632,000	90 pers en	0	Dinas Pember dayaan Peremp uan dan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
																K	Rp	
																		Perlind ungan Anak
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Layanan terhadap perlindungan khusus anak	80 persen	80 persen	141,846,000	80 persen	141,846,000	80 persen	141,846,000	85 persen	141,846,000	90 persen	141,846,000	90 persen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN															
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK	Persentase penyedia infrastruktur pangan	100 persen	100 persen	141,600,000	100 persen	145,848,000	100 persen	145,848,000	100 persen	145,848,000	100 persen	145,848,000	100 persen	0	Dinas Pangan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN															
2	0	0	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Capaian skor pola pangan	90 persen	92 pe rse n	670,612,000	94 pers en	670,612,000	96 pers en	670,612,000	98 perse n	670,612,000	100 pers e n	670,612,000	100 pers e n	0	Dinas Pangan
2	0	0	PROGRAM PENANGANA N KERAWANAN PANGAN	Persentase tingkat capaian indeks ketahanan pangan	100 persen	100 pe rse n	25,400,000	100 pers e n	25,400,000	100 pers e n	25,400,000	100 perse n	25,400,000	100 pers e n	25,400,000	100 pers e n	0	Dinas Pangan
2	0	0	PROGRAM PENGAWASA	Persentase Pengawasan	100 persen	100	71,000,000	100 pers	71,000,000	100 pers	71,000,000	100 perse	71,000,000	100 pers	71,000,000	100 pers	0	Dinas Pangan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			NKEAMANAN PANGAN	Keamanan Pangan		pe rse n		e n		e n		n		e n		e n		
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN															
2	10	02	PROGRAM PENGELOLAA N IZINLOKASI	Persentase Izin Lokasi Penggunaan Tanah Sesuai Peruntukkan nya	100 %	100 %	35,005,000	100 %	35,005,000	100 %	35,005,000	100 %	35,005,000	100 %	35,005,000	100 %	0	Dinas Pertana han
2	10	04	PROGRAM PENYELESAIA N SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Sengketa Tanahyang Selesai di Fasilitas	100 %	100 %	150,960,000	100 %	150,960,000	100 %	150,960,000	100 %	150,960,000	100 %	150,960,000	100 %	0	Dinas Pertana han
2	10	05	PROGRAM PENYELESAIA N GANTI KERUGIAN	Cakupan Fasilitas Penyelesaian	0 %	20 %	49,287,000	40 %	49,287,000	60 %	49,287,000	80 %	49,287,000	100 %	49,287,000	100 %	0	Dinas Pertana

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUN AN	Ganti Kerugian dan Santunan Tanah													han	
2	10	06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DANTANAH ABSENTEE	Cakupan Fasilitas Usulan Objek TORA	100 %	100 %	82,702,000	100 %	82,702,000	100 %	82,702,000	100 %	82,702,000	100 %	82,702,000	100 %	0	Dinas Pertana han
2	1	0	PROGRAM	Cakupan Penetapan	0 %	0	0	95	50,000,0	95 %	51,500,0	100	53,045,0	100	53,045,0	100	0	Dinas

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	0	7	PENETAPAN TANAH ULAYAT	Tanah Ulayat di Kabupaten Labuhanbatu		%		%	00		00	%	00	%	00	%		Pertana han
2	1	0	PROGRAM PENGELOLAA NTANAH KOSONG	Cakupan Peningkatan Penataan dalam Pemanfaatan Tanah Kosong	0 %	0 %	50,000,0 00	95 %	51,500,0 00	95 %	53,045,0 00	100 %	53,045,0 00	100 %	53,045,0 00	100 %	0	Dinas Pertana han
2	1	0	PROGRAM PENGELOLAA N IZIN MEMBUKA TANAH	Cakupan Fasilitas Izin Membuka Tanah	0 %	0 %	50,000,0 00	95 %	51,500,0 00	95 %	53,045,0 00	100 %	53,045,0 00	100 %	53,045,0 00	100 %	0	Dinas Pertana han
2	1	0	PROGRAM PENATAGUNA ANTANAH	Persentasi Fasilitas Batas	0 %	22 %	244,333, 000	44 %	244,333, 000	66 %	244,333, 000	77 %	244,333, 000	88 %	244,333, 000	88 %	0	Dinas Pertana han

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Desa/Kecam atan di Kabupaten Labuhanbatu														
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
2	11	02	PROGRAM PERENCANAA N LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	70 %	75 %	47,652,000	80 %	49,081,000	80 %	49,081,000	80 %	49,081,000	80 %	49,081,000	80 %	0	Dinas Lingku ngan Hidup
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIA N PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	52.45 poin	53.81 poin	106,322,000	53.91 poin	106,322,000	54.01 poin	106,322,000	54.11 poin	106,322,000	54.21 poin	106,322,000	54.21 poin	0	Dinas Lingku ngan Hidup

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	1	0	PROGRAM PENGENDALIA N PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Udara	76.85 poin	76.95 poi n	106,322,000	77.05 poi n	106,322,000	77.15 poi n	106,322,000	77.25 poi n	106,322,000	77.35 poi n	106,322,000	77.45 poi n	0	Dinas Lingku ngan Hidup
2	1	0	PROGRAM PENGENDALIA N PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	24.05 poin	25.05 poi n	106,322,000	26.05 poi n	106,322,000	27.05 poi n	106,322,000	28.05 poi n	106,322,000	29.05 poi n	106,322,000	30.05 poi n	0	Dinas Lingku ngan Hidup
2	1	0	PROGRAM PENGELOLAA N	Persentase Pengelolaan Keanekaraga	15 %	20 %	1,210,365,000	30 %	1,210,365,000	30 %	1,210,365,000	35 %	1,210,365,000	50 %	1,210,365,000	50 %	0	Dinas Lingku ngan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			KEANEKARAG AMAN HAYATI (KEHATI)	man Hayati Kabupaten Labuhanbatu														Hidup
2	1	0	PROGRAM PENGENDALIA N BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Kegiatan/usa ha yang mempunyai izin limbah B3dan melakukan pengelolaan limbahB3 dengan baik	50 %	75 %	0	80 %	5,000,00 0	85 %	5,150,00 0	90 %	5,304,00 0	95 %	5,463,00 0	95 %	0	Dinas Lingku ngan Hidup
2	1	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASA	Presentase Ketaatan	95 %	95 %	12,864,0 00	95 %	13,249,0 00	95 %	13,249,0 00	95 %	13,249,0 00	95 %	13,249,0 00	95 %	0	Dinas Lingku

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			N TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGA N DAN PENGELOLAA N LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Sesuai Izin yang Diberikan														ngan Hidup
2	1	0	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA	Persentase Pemberdaya an Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan	25 %	30 %	11,964,000	35 %	12,322,000	40 %	12,322,000	50 %	12,322,000	60 %	12,322,000	60 %	0	Dinas Lingku ngan Hidup

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			YANG TERKAIT DENGANPPLH	MHAyang terkait PPLH														
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Masyarakat yangtelah dibina dan melakukan kegiatan peduli lingkungan hidup	80 %	80 %	13,307,000	80 %	13,706,000	80 %	13,706,000	80 %	13,706,000	80 %	13,706,000	80 %	0	Dinas Lingku ngan Hidup
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAA N LINGKUNGAN	Persentase Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang	80 %	80 %	23,014,000	80 %	23,704,000	80 %	23,704,000	80 %	23,704,000	80 %	23,704,000	80 %	0	Dinas Lingku ngan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			HIDUP UNTUK MASYARAKAT	menerima Penghargaan berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan hidupdan berkelanjutan														Hidup
2	11	10	PROGRAM PENANGANA N PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan pengaduan Masyarakat yang terselesaikan	100 %	100 %	6,064,000	100 %	6,245,000	100 %	6,245,000	100 %	6,245,000	100 %	6,245,000	100 %	0	Dinas Lingku ngan Hidup
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAA N PERSAMPAHA	Persentase Penanganan Sampah	25 %	45 %	6,447,311,000	65 %	5,258,730,000	80 %	5,258,730,000	90 %	5,258,730,000	100 %	5,258,730,000	100 %	0	Dinas Lingku ngan Hidup

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			N															
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Sampah	0 %	5 %	173,675,000	10 %	178,885,000	20 %	178,885,000	30 %	178,885,000	40 %	178,885,000	40 %	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk yang terdaftar	90 persen	90 persen	1,813,880,000	90 persen	1,868,297,000	90 persen	1,868,297,000	90 persen	1,868,297,000	95 persen	1,868,297,000	95 persen	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Peristiwa Pencatatan	80 persen	80 persen	47,000,000	80 persen	48,410,000	80 persen	49,863,000	80 persen	51,358,000	80 persen	52,898,000	90 persen	0	Dinas Kependudukan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				Sipil		n												dan Pencat atan Sipil
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAA N INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUK AN	Cakupan Pengelolaan Informasi administrasi kependuduk an	80 persen	80 pe rse n	104,038, 000	pers en	107,159, 000	80 pers en	110,374, 000	80 perse n	113,685, 000	80 pers en	117,096, 000	90 pers en	0	Dinas Kepend udukan dan Pencat atan Sipil
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAA N PROFIL KEPENDUDUK AN	Cakupan Penyusunan Profil Kependuduk an skala kabupaten	100 persen	10 0 pe rse n	13,650,0 00	100 pers e n	14,059,0 00	100 pers e n	14,481,0 00	100 perse n	14,915,0 00	100 pers e n	15,363,0 00	100 pers e n	0	Dinas Kepend udukan dan Pencat atan Sipil

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan Jumlah Desa tertata	100 Persen	100 Persen	10,000,000	100 Persen	10,000,000	100 Persen	10,000,000	100 Persen	10,000,000	100 Persen	10,000,000	100 Persen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Kerjasama antarDesa	10 Persen	40 Persen	28,800,000	45 Persen	28,800,000	50 Persen	28,800,000	55 Persen	28,800,000	60 Persen	28,800,000	65 Persen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHA	Cakupan kualitas aparatur	75 Persen	77 Persen	1,794,230,000	78 Persen	178,625,000	80 Persen	178,625,000	83 Persen	178,625,000	85 Persen	178,625,000	90 Persen	0	Dinas Pemberdayaan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			N DESA	pemerintaha n desa		n												Masyar akat dan Desa
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYA AN LEMBAGA KEMASYARAK ATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kategori indeksinovasi desa	30 Persen	40 Per se n	1,067,72 3,000	50 Pers en	1,067,72 3,000	60 Pers en	1,067,72 3,000	70 Perse n	1,067,72 3,000	80 Perse n	1,067,72 3,000	90 Pers en	0	Dinas Pember dayaan Masyar akat dan Desa
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIA NPENDUDUK	Persentase Layanan KIE KB	80 Persen	82 Per se n	265,088, 000	85 Pers en	265,088, 000	90 Pers en	265,088, 000	95 Perse n	265,088, 000	100 Perse n	265,088, 000	100 Pers e n	0	Dinas Pngen dalian Pendud uk dan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
																		Keluarg a Berenc ana
2	1	0	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase peningkatan kualitas keluarga berencana	80 Persen	82 Per se n	2,555,43 1,000	85 Pers en	2,555,43 1,000	90 Pers en	2,555,43 1,000	95 Perse n	2,555,43 1,000	100 Perse n	2,555,43 1,000	100 Pers e n	0	Dinas Pengen dalian Pendud uk dan Keluarg a Berenc ana
2	1	0	PROGRAM PEMBERDAYA AN DAN PENINGKATAN KELUARGA	Persentase Pembinaan ketahanan dan kesehjateraa	80 Persen	82 Per se n	2,598,02 4,000	85 Pers en	2,598,02 4,000	90 Pers en	2,598,02 4,000	95 Perse n	2,598,02 4,000	100 Perse n	2,598,02 4,000	100 Pers e n	0	Dinas Pengen dalian Pendud uk dan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			SEJAHTERA (KS)	nkeluarga														Keluarg a Berenc ana
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN															
2	15	02	PROGRAM PENYELENGG ARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Tingkat Kepuasan Masyarakat Pengguna Jalan	55 %	65 %	3,166,69 6,000	70 %	3,166,69 6,000	75 %	3,166,69 6,000	80 %	3,166,69 6,000	85 %	3,166,69 6,000	85 %	0	Dinas Perhub ungan
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAA NPELAYARAN	Persentase Fasilitas Pelabuhan Sungai yang Standart	100 %	10 0 %	102,600, 000	100 %	102,600, 000	100 %	102,600, 000	100 %	102,600, 000	100 %	102,600, 000	100 %	0	Dinas Perhub ungan
2	15	04	PROGRAM PENGELOLAA	Persentase Progres	3 %	5 %	11,835,0 00	10 %	11,835,0 00	15 %	11,835,0 00	20 %	11,835,0 00	25 %	11,835,0 00	25 %	0	Dinas Perhub

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			N PENERBANGA N	Pembanguna n Bandara														ungan
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
2	16	02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase pemenuhan informasi kepada masyarakat	80 persen	80 pe rse n	1,379,39 5,000	80 pers en	1,379,39 5,000	80 pers en	1,379,39 5,000	80 perse n	1,379,39 5,000	80 pers en	1,379,39 5,000	80 pers en	0	Dinas Komuni kasidan Inform atika
2	16	03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase terbangunnya a aplikasi dan infrastruktur TIK terintegrasi	80 persen	80 pe rse n	2,852,63 3,000	80 pers en	1,638,21 2,000	80 pers en	1,726,35 8,000	80 perse n	1,817,14 9,000	80 pers en	1,910,66 3,000	80 pers en	0	Dinas Komuni kasidan Inform atika
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH															
2	1	0	PROGRAM PELAYANAN	Meningkatny a usaha	50	70	0	80	50,000,0	85	50,000,0	90	50,000,0	95	50,000,0	100 pers	0	Dinas Kopera

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	7	2	IZINUSAHA SIMPAN PINJAM	simpan pinjam	persen	pe rse n		pers en	00	pers en	00	perse n	00	pers en	00	e n		si, Usaha Kecil dan Menen gah
2	17	03	PROGRAM PENGAWASA N DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Cakupan koperasi yang melakukan kegiatan sesuai izin	100 persen	10 0 pe rse n	162,232, 000	100 pers e n	162,232, 000	100 pers e n	162,232, 000	100 perse n	162,232, 000	100 pers e n	162,232, 000	100 pers e n	0	Dinas Kopera si, Usaha Kecil dan Menen gah
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP	Persentase peningkatan status koperasi	50 persen	70 pe rse n	68,000,0 00	75 pers en	68,000,0 00	80 pers en	68,000,0 00	85 perse n	68,000,0 00	90 pers en	68,000,0 00	100 pers e n	0	Dinas Kopera si, Usaha

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			KOPERASI															Kecil dan Menen gah
2	1	0	PROGRAM PENDIDIKAN DANLATIHAN PERKOPERASI AN	Persentase pelaku UMKM dan Koperasi yang dilatih	50 persen	50 pe rse n	375,508, 000	70 pers en	375,508, 000	75 pers en	375,508, 000	80 perse n	375,508, 000	85 pers en	375,508, 000	90 pers en	0	Dinas Kopera si, Usaha Kecil dan Menen gah
2	1	0	PROGRAM PEMBERDAYA ANDAN PERLINDUNGA N KOPERASI	Persentase koperasi sehat, persentase koperasi baik, persentase	50 persen	10 0 pe rse n	210,036, 000	100 pers e n	210,036, 000	100 pers e n	210,036, 000	100 perse n	210,036, 000	100 pers e n	210,036, 000	100 pers e n	0	Dinas Kopera si, Usaha Kecil dan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				koperasi maju														Menen gah
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANG ANIKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Keterbukaan informasi penanaman modal	0 persen	100 persen	412,126,000	100 persen	412,126,000	100 persen	412,126,000	100 persen	412,126,000	100 persen	412,126,000	100 persen	0	Dinas Penana man Modal dan Pelayan an Terpad u Satu Pintu
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	56,79 persen	100 persen	24,976,000	100 persen	24,976,000	100 persen	24,976,000	100 persen	24,976,000	100 persen	24,976,000	100 persen	0	Dinas Penana man Modal dan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				(IKM)														Pelayan an Terpad u Satu Pintu
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Cakupan fasilitas pelaksanaan perizinan	65 persen	65 pe rse n	0	72 pers en	20,000,000	83 pers en	20,000,000	90 perse n	20,000,000	98 pers en	20,000,000	98 pers en	0	Dinas Penana man Modal dan Pelayan an Terpad u Satu Pintu
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIA N	Persentase ketaatan terhadap	80 persen	80 pe rse	398,123,000	85 pers en	398,123,000	90 pers en	398,123,000	95 perse n	398,123,000	100 pers e	398,123,000	100 pers e	0	Dinas Penana man

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	perizinan		n								n		n		Modal dan Pelayan an Terpad u Satu Pintu
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi	0 %	60 %	0	70 %	50,000,000	80 %	50,000,000	85 %	50,000,000	90 %	50,000,000	100 %	0	Dinas Penana man Modal dan Pelayan an Terpad u Satu Pintu
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	1	0	PROGRAM PENGEMBANG ANKAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase cakupan pemberdaya an organisasi kepemudaan	100 persen	100 persen	1,102,103,000	100 persen	602,103,000	100 persen	602,103,000	100 persen	602,103,000	100 persen	602,103,000	100 persen	0	Dinas Kepem udaan dan Olahra ga, Kebuda yaan dan Pariwis ata
2	1	0	PROGRAM PENGEMBANG ANKAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGA AN	Persentase Cabor yang di Bina	100 persen	100 persen	1,325,312,000	100 persen	1,325,312,000	100 persen	1,325,312,000	100 persen	1,325,312,000	100 persen	1,325,312,000	100 persen	0	Dinas Kepem udaan dan Olahra ga, Kebuda yaan dan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																		Pariwis ata
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANG ANKAPASITAS KEPRAMUKAA N	Persentase Cakupan Pemberdayaa n Kepramukaa n	100 persen	100 persen	800,000,000	100 persen	800,000,000	100 persen	800,000,000	100 persen	800,000,000	100 persen	800,000,000	100 persen	0	Dinas Kepem udaan dan Olahra ga, Kebuda yaan dan Pariwis ata
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK															
2	20	02	PROGRAM PENYELENGG ARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tersedianya data statistik sektoral	1 Dokumen	1 Dokumen	46,640,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	60,000,000	1 Dokumen	70,000,000	1 Dokumen	75,000,000	1 Dokumen	0	Dinas Komuni kasidan Inform

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																		atika
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN															
2	21	02	PROGRAM PENYELENGG ARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANA N INFORMASI	Persentase terpenuhinya keamanan informasi	80 persen	80 pe rse n	20,088,0 00	80 pers en	25,000,0 00	80 pers en	30,000,0 00	80 perse n	35,000,0 00	80 pers en	40,000,0 00	80 pers en	0	Dinas Komuni kasi dan Inform atika
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANG AN KEBUDAYAAN	Persentase pengelolaan kebudayaan dan kelestarian kesenian tradisional	100 persen	10 0 pe rse n	279,125, 000	100 pers e n	279,125, 000	100 pers e n	279,125, 000	100 perse n	279,125, 000	100 pers e n	279,125, 000	100 pers e n	0	Dinas Kepem udaan dan Olahra ga, Kebuda yaan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																		dan Pariwis ata
2	2	0	PROGRAM PENGEMBANG ANKESENIAN TRADISIONAL	Persentase terbinanya masyarakat dalam bidang kesenian	100 persen	10 0 pe rse n	310,000, 000	100 pers e n	310,000, 000	100 pers e n	310,000, 000	100 perse n	310,000, 000	100 pers e n	310,000, 000	100 pers e n	0	Dinas Kepem udaan dan Olahra ga, Kebuda yaan dan Pariwis ata
	2	3																
2	2	0	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Tercapainya pembinaan sejarah di Kabupaten	100 persen	10 0 pe rse n	0	100 pers e n	50,000,0 00	100 pers e n	50,000,0 00	100 perse n	50,000,0 00	100 pers e n	50,000,0 00	100 pers e n	0	Dinas Kepem udaan dan Olahra ga,
	2	4																

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
																K	Rp	
				Labuhanbatu														Kebuda yaan dan Pariwis ata
2	2	0	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAA N CAGAR BUDAYA	terdatanya Cagar Budaya di Kabupaten Labuhanbatu	100 persen	10	15,175,000	100	15,175,000	100	15,175,000	100	15,175,000	100	15,175,000	100	0	Dinas Kepem udaan dan Olahra ga, Kebuda yaan dan Pariwis ata
	2	5				0		pers e n		pers e n		pers e n		pers e n		pers e n		
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN															
2	2	0	PROGRAM PEMBINAAN	Persentase Peningkatan	50 Persen	52 Per	305,678,000	55 Pers	305,678,000	58 Pers	305,678,000	60 Perse	305,678,000	61 Perse	305,678,000	61 Pers	0	Dinas Perpust

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			PERPUSTAKAA N	Pengunjung Perpustakaan		se n		en		en		n		n		en		akaan dan Kearsip an
2	23	03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DANNASKAH KUNO	Persentase terlestariann ya Koleksi Nasional dan NaskahKuno serta berkembang nnyakoleksi budaya	100 Persen	100 Persen	43,357,000	100 Persen	43,357,000	100 Persen	43,357,000	100 Perse n	43,357,000	100 Perse n	43,357,000	100 Persen	0	Dinas Perpust akaan dan Kearsip an
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN															
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAA NARSIP	Persentase Nilai Pengawasan Kearsipan dengan	100 Persen	100 Persen	15,000,000	100 Persen	15,150,000	100 Persen	15,301,000	100 Perse n	15,301,000	100 Perse n	15,301,000	100 Persen	0	Dinas Perpust akaan dan Kearsip

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				Kategori Baik													an	
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Penyelamata n Arsip Akibat Bencana	100 Persen	100 Per sen	86,200,000	100 Persen	88,786,000	100 Persen	91,449,000	100 Perse n	91,449,000	100 Perse n	91,449,000	100 Persen	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Layanan Izin Kearsipan	100 Persen	100 Per sen	10,000,000	100 Persen	10,100,000	100 Persen	10,100,000	100 Perse n	10,100,000	100 Perse n	10,100,000	100 Persen	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAA	Meningkatnya kualitas dan produksi	6854 ton	7215	1,217,400,000	7287 ton	1,250,431,991	7615 ton	1,284,454,942	7996 ton	1,319,498,581	8396 ton	1,355,593,529	8396 ton	0	Dinas Kelautan dan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			N PERIKANAN TANGKAP	perikanan tangkap		to n											Perikan an	
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAA N PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatny a kualitas dan produksi perikanan budidaya	900 ton	97 8 to n	546,000,0 00	107 8 ton	579,031,9 91	1132 ton	613,054,9 42	1189 ton	648,098, 581	1248 ton	684,193,5 29	124 8 ton	0	Dinas Kelauta n dan Perikan an
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terjaminnya pelestarian spesies ikan yang dilindungi	12 kali	12 kal i	40,000,00 0	12 kali	73,091,99 1	12 kali	107,054,9 42	12 kali	142,098, 581	12 kali	178,193,5 29	12 kali	0	Dinas Kelauta n dan Perikan an
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Cakupan kelompok pengolah hasil perikanan yang difasilitasi	0 klpk	0 klp k	0	5 klpk	183,031,9 90	6 klpk	217,054,9 41	7 klpk	252,098, 580	8 klpk	288,193,5 28	8 klpk	0	Dinas Kelauta n dan Perikan an

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA															
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Cakupan destinasi wisata yang dikembangkann	0 persen	100 persen	64,225,000	100 persen	64,225,000	100 persen	64,225,000	100 persen	64,225,000	100 persen	64,225,000	100 persen	0	Dinas Kebudayaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan jumlah wisata	100 persen	100 persen	0	100 persen	172,000,000	100 persen	172,000,000	100 persen	172,000,000	100 persen	172,000,000	100 persen	0	Dinas Kebudayaan dan Olahraga, Kebudayaan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
																		yaan dan Pariwis ata
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANG ANSUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Cakupan peningkatan kapsitassdm pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif	30 persen	35 pe rse n	36,223,000	40 pers en	36,223,000	45 pers en	36,223,000	50 perse n	36,223,000	65 pers en	36,223,000	70 pers en	0	Dinas Kepem udaan dan Olahra ga, Kebuda yaan dan Pariwis ata
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN															
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN	Persentase Peningkatan produktivitas	3 persen	5 pe rse	460,761,000	6 pers en	460,761,000	7 pers en	460,761,000	8 perse n	460,761,000	9 pers en	460,761,000	9 pers en	0	Dinas Pertani an

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			PENGEMBANG AN SARANA PERTANIAN	tanaman pangandan perkebunan		n												
3	2	0	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANG AN SARANA PERTANIAN	Cakupan ternak unggul sapi, kambing, domba	69 persen	71 pe rse n	1,202,44 8,000	74 pers en	1,202,44 8,000	76 pers en	1,202,44 8,000	79 perse n	1,202,44 8,000	82 pers en	1,202,44 8,000	82 pers en	0	Dinas Peterna kan
3	2	0	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANG AN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana dalamkondisi baik	50 persen	50 pe rse n	133,900, 000	60 pers en	133,900, 000	70 pers en	133,900, 000	80 perse n	133,900, 000	90 pers en	133,900, 000	90 pers en	0	Dinas Pertani an
3	2	0	PROGRAM PENYEDIAAN	Persentase peternak	25 persen	27 pe	19,292,0 00	30 pers	19,292,0 00	32 pers	19,292,0 00	35 perse	19,292,0 00	37 pers	19,292,0 00	37 pers	0	Dinas Peterna

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			DAN PENGEMBANG AN PRASARANA PERTANIAN	yang melakukan kegiatan usahayang semi intensif		rse n		en		en		n		en		en		kan
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIA NKESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase ternak yang sehat	60 %	65 %	181,181,000	70 %	181,181,000	75 %	181,181,000	80 %	181,181,000	85 %	181,181,000	85 %	0	Dinas Peterna kan
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIA NDAN PENANGGULA NGAN BENCANA	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalia n dan penanggulan gan bencana	100 %	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	0	Dinas Pertani an

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			PERTANIAN	pertanian kabupaten														
3	27	06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Tindak Lanjut Pengawasan Hasil Perizinan	0 %	0 %	0	100 %	51,500,000	100 %	51,500,000	100 %	51,500,000	100 %	51,500,000	100 %	0	Dinas Peternakan
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kenaikan kelas kelompok tani	3 %	3 %	367,636,000	5 %	367,636,000	8 %	367,636,000	10 %	367,636,000	10 %	367,636,000	10 %	0	Dinas Pertanian
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN															
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI	Persentase pasar rakyat yangsesuai standard	50 %	50 %	4,566,782,000	70 %	3,066,782,000	80 %	3,066,782,000	90 %	3,066,782,000	95 %	3,066,782,000	100 %	0	Dinas Perdaganganan dan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			PERDAGANGA N															Perindu strian	
3	3	0	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	78 %	78 %	102,460,000	80 %	102,460,000	90 %	102,460,000	100 %	102,460,000	100 %	102,460,000	100 %	0	Dinas Perdag angan dan Perindu strian
3	3	0	05	PROGRAM PENGEMBANG ANEKSPOR	Cakupan produk unggulan daerah yang berorientasi ekspor	20 %	30 %	445,131,000	40 %	445,131,000	50 %	445,131,000	60 %	445,131,000	65 %	445,131,000	70 %	0	Dinas Perdag angan dan Perindu strian

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan perlindungan uji alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya	50 %	70 %	284,419,000	80 %	284,419,000	85 %	284,419,000	90 %	284,419,000	95 %	284,419,000	100 %	0	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN															
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM produktif	50 %	60 %	1,288,946,000	70 %	1,288,946,000	80 %	1,288,946,000	85 %	1,288,946,000	90 %	1,288,946,000	100 %	0	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN USAHA INDUSTRI	Persentase industri yang memiliki izin	40 %	40 %	50,000,000	60 %	50,000,000	70 %	50,000,000	80 %	50,000,000	90 %	50,000,000	100 %	0	Dinas Perdagangan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			KABUPATEN/K OTA	usaha														dan Perindu strian
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	01		SEKRETARIAT DAERAH															
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHA N DAN KESEJAHTERA AN RAKYAT	Penyusunan Dok LPPD dan LKPJ Tepat Waktu	100 persen	100 persen	15,836,382,000	100 persen	15,836,382,000	100 persen	15,836,382,000	100 persen	15,836,382,000	100 persen	15,836,382,000	100 persen	0	Sekreta riat Daerah Kabupa ten
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMI ANDAN PEMBANGUN AN	Persentase Kegiatan Strategis Bidang Perindustrian , Perdagangan , Koperasi-UKM, BUMD,	100 persen	100 persen	3,183,285,000	100 persen	3,183,285,000	100 persen	3,183,285,000	100 persen	3,183,285,000	100 persen	3,183,285,000	100 persen	0	Sekreta riat Daerah Kabupa ten

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan Pangan yaang Dikoordinasik an														
4	02		SEKRETARIAT DPRD															
4	02	01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/K OTA	Persentase capaian pengadminis trasian umum DPRD	100 persen	100 persen	25,323,609,000	100 persen	25,323,609,000	100 persen	25,323,609,000	100 persen	25,323,609,000	100 persen	25,323,609,000	100 persen	0	Sekreta riat DPRD
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANA A	Cakupan pembahasan	100 persen	100 pe	33,654,659,000	100 pers e	33,654,659,000	100 pers e	33,654,659,000	100 perse n	33,654,659,000	100 pers e	33,654,659,000	100 pers e	0	Sekreta riat

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			N TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Perda		rse n		n		n				n		n		DPRD
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	01		PERENCANAAN															
5	01	02	PROGRAM PERENCANAA N, PENGENDALIA N DAN EVALUASI PEMBANGUN ANDAERAH	Penjabaran Konsistensi program RKPD ke dalam APBD	70 persen	75 pe rse n	701,071, 000	80 pers en	701,071, 000	85 pers en	701,071, 000	90 perse n	701,071, 000	90 pers en	701,071, 000	95 pers en	0	Badan Perenc anaan Pemba nguna n Daerah
5	01	02	PROGRAM PERENCANAA N, PENGENDALIA N DAN EVALUASI PEMBANGUN	penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalamRKPD	70 persen	80 pe rse n	1,000,00 0,000	80 pers en	1,000,00 0,000	80 pers en	1,000,00 0,000	85 perse n	1,000,00 0,000	90 pers en	1,000,00 0,000	95 pers en	0	Badan Perenc anaan Pemba nguna n

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			ANDAERAH														Daerah	
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAA N PEMBANGUN AN DAERAH	Kesesuaian rencana pembanguna n terhadap RTRW	70 persen	80 pe rse n	50,000,000	80 pers en	50,000,000	85 pers en	50,000,000	85 perse n	50,000,000	85 pers en	50,000,000	85 pers en	0	Badan Perenc anaan Pemba nguna n Daerah
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAA N PEMBANGUN AN DAERAH	Cakupan Dokumen Perencanaan yang terfasilitasi sesuai dengan ketentuan	75 persen	80 pe rse n	1,185,696,000	85 pers en	1,185,696,000	85 pers en	1,185,696,000	85 perse n	1,185,696,000	90 pers en	1,185,696,000	90 pers en	0	Badan Perenc anaan Pemba nguna n Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5	02		KEUANGAN															
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rasio Anggaran Sisa terhadap total belanja dalam APBD Tahun sebelumnya (IKK Outcomes)	9 persen	9 persen	156,064,430,000	8 persen	160,746,363,000	7,5 persen	160,746,363,000	7 persen	160,746,363,000	7 persen	160,746,363,000	6,5 persen	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indeks Pengelolaan Aset	100 persen	100 persen	1,320,317,000	100 persen	1,359,926,000	100 persen	1,400,724,000	100 persen	1,442,746,000	100 persen	1,486,028,000	100 persen	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase PAD	100	100	1,259,62	100 pers	1,359,62	100 pers	1,389,62	100 perse	1,399,62	100 pers	1,419,62	100 pers	0	Badan Pendap

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2	4	N PENDAPATAN DAERAH	terhadap Pendapatan	persen	pe rse n	4,000	e n	4,000	e n	4,000	n	4,000	e n	4,000	e n		atan Daerah
5	03		KEPEGAWAIAN															
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIA NDAERAH	Persentase peningkatan kerjaASN	82 persen	85 pe rse n	947,811, 000	87 pers en	947,811, 000	88 pers en	947,811, 000	90 perse n	947,811, 000	91 pers en	947,811, 000	91 pers en	0	Badan Kepega waian, Pendidi kan dan Pelatih an
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN															
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANG ANSUMBER DAYA MANUSIA	Persentase peningkatan fungsiteknis, manajerial dan	70 persen	75 pe rse n	1,119,54 8,000	80 pers en	1,119,54 8,000	82 pers en	1,119,54 8,000	85 perse n	1,119,54 8,000	90 pers en	1,119,54 8,000	90 pers en	0	Badan Kepega waian, Pendidi kan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				fungsional														dan Pelatih an
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	Persentase pengembang aninovasi dan teknologi	100 persen	100 pe rse n	115,000,000	100 pers e n	115,000,000	100 pers e n	115,000,000	100 perse n	115,000,000	100 pers e n	115,000,000	100 pers e n	0	Badan Peneliti an dan Penge mbang an
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	Persentase ketersediaan penelitian dan pengembang an pemerintaha n dan pengkajian	100 persen	100 pe rse n	115,000,000	100 pers e n	115,000,000	100 pers e n	115,000,000	100 perse n	115,000,000	100 pers e n	115,000,000	100 pers e n	0	Badan Peneliti an dan Penge mbang an

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				peraturan														
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	Persentase ketersediaan dokumen penelitian dan pengembang an bidang ekonomi dan pembanguna n	100 persen	100 persen	115,000,000	100 persen	115,000,000	100 persen	115,000,000	100 persen	115,000,000	100 persen	115,000,000	100 persen	0	Badan Peneliti an dan Penge mbang an
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	Persentase ketersediaan dokumen penelitian dan pengembang	100 persen	100 persen	115,000,000	100 persen	115,000,000	100 persen	115,000,000	100 persen	115,000,000	100 persen	115,000,000	100 persen	0	Badan Peneliti an dan Penge mbang

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				an bidang sosial dan kependuduk an														an
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN															
6	01		INSPEKTORAT DAERAH															
6	01	02	PROGRAM PENYELENGG ARAAN PENGAWASA N	Terselenggar anya pengeolaan dan pertanggung jawaban keuanga yang efektif dan efisien	100 persen	100 persen	459,329,000	100 persen	459,329,000	100 persen	459,329,000	100 persen	459,329,000	100 persen	459,329,000	100 persen	0	Inspekt orat Daerah
6	01	02	PROGRAM PENYELENGG ARAAN PENGAWASA	Persentase jumlah rekomendasi yang	75 persen	75 persen	539,329,000	80 persen	539,329,000	85 persen	539,329,000	95 persen	539,329,000	100 persen	539,329,000	100 persen	0	Inspekt orat Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			N	ditindaklanju ti		n												
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPING ANDAN ASISTENSI	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintaha n Daerah	118 Kali	123 Kal i	513,464,000	161 Kali	513,464,000	166 Kali	513,464,000	201 Kali	513,464,000	206 Kali	513,464,000	211 Kali	0	Inspekt orat Daerah
7			UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01		KECAMATAN															
7	01	02	PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelengga raan Pemerintaha ndan Pelayanan Publik di Kecamatan	N/A %	100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	100 %	0	Kecam atan Bilah Hulu

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelengga raan Pemerintaha ndan Pelayanan Publik di Kecamatan	N/A %	100 %	108,831,000	100 %	108,831,000	100 %	108,831,000	100 %	108,831,000	100 %	108,831,000	100 %	0	Kecam atan Pangka tan
7	01	02	PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelengga raan Pemerintaha ndan Pelayanan Publik di Kecamatan	N/A %	100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	100 %	0	Kecam atan Bilah Barat

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7	0	0	PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelengga raan Pemerintaha ndan Pelayanan Publik di Kecamatan	N/A %	N/ A %	10,000,0 00	100 %	10,000,0 00	100 %	10,000,0 00	100 %	10,000,0 00	100 %	10,000,0 00	100 %	0	Kecam atan Bilah Hilir
7	0	0	PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelengga raan Pemerintaha ndan Pelayanan Publik di Kecamatan	N/A %	10 0 %	14,696,0 00	100 %	14,696,0 00	100 %	14,696,0 00	100 %	14,696,0 00	100 %	14,696,0 00	100 %	0	Kecam atan Panai Hulu

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelengga raan Pemerintaha ndan Pelayanan Publik di Kecamatan	N/A %	100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	100 %	0	Kecam atan Panai Tengah
7	01	02	PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelengga raan Pemerintaha ndan Pelayanan Publik di Kecamatan	N/A %	100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	100 %	0	Kecam atan Panai Hilir

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelengga raan Pemerintaha ndan Pelayanan Publik di Kecamatan	N/A %	100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	100 %	0	Kecam atan Rantau Selatan
7	01	02	PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelengga raan Pemerintaha ndan Pelayanan Publik di Kecamatan	N/A %	N/A %	10,000,000	100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	100 %	0	Kecam atan Rantau Utara

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Kinerja Pemberdaya an Masyarakat melalui Lembaga Kemasyaraka tan Desa	N/A %	N/ A %	47,664,0 00	100 %	47,664,0 00	100 %	47,664,0 00	100 %	47,664,0 00	100 %	47,664,0 00	100 %	0	Kecam atan Bilah Hulu
7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Kinerja Pemberdaya an Masyarakat melalui Lembaga Masyarakat Desa	N/A %	10 0 %	34,160,0 00	100 %	34,160,0 00	100 %	34,160,0 00	100 %	34,160,0 00	100 %	34,160,0 00	100 %	0	Kecam atan Panai Hulu

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
703	PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Kinerja Pemberdaya an Masyarakat melalui Lembaga Kemasyaraka tan Kelurahan	N/A %	100 %	3,129,000,000	100 %	3,129,000,000	100 %	3,129,000,000	100 %	3,129,000,000	100 %	3,129,000,000	100 %	0	Kecam atan Rantau Utara		
703	PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Kinerja Pemberdaya an Masyarakat melalui Lembaga Kemasyaraka	N/A %	100 %	2,404,000,000	100 %	2,404,000,000	100 %	2,404,000,000	100 %	2,404,000,000	100 %	2,404,000,000	100 %	0	Kecam atan Rantau Selatan		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
K	Rp					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				tan Kelurahan														
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	tingkat kinerja pemberdaya an masyarakat melalui lembaga kelurahan	N/A %	100 %	2,000,000	100 %	2,000,000	100 %	2,000,000	100 %	2,000,000	100 %	2,000,000	100 %	0	Kecam atan Panai Hilir
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	tingkat kinerja pemberdaya an masyarakat melalui lembaga	N/A %	100 %	169,330,000	100 %	169,330,000	100 %	169,330,000	100 %	169,330,000	100 %	169,330,000	100 %	0	Kecam atan Panai Tengah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				kelurahan														
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Kinerja Pemberdaya an Masyarakat melalui Lembaga Kemasyaraka tan Desa	NA %	100 %	11,659,000	100 %	11,659,000	100 %	11,659,000	100 %	11,659,000	100 %	11,659,000	100 %	0	Kecam atan Bilah Barat
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Kinerja Pemberdaya an Masyarakat melalui Lembaga	N/A %	100 %	5,000,000	100 %	15,000,000	100 %	15,000,000	100 %	15,000,000	100 %	15,000,000	100 %	0	Kecam atan Pangka tan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Kemasyaraka tan Desa														
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat kinerja pemberdaya an masyarakat melalui lembaga kelurahan	N/A %	100 %	83,299,000	100 %	83,299,000	100 %	83,299,000	100 %	83,299,000	100 %	83,299,000	100 %	0	Kecam atan Bilah Hilir
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Desa/Kelurah an	N/A %	N/ A %	3,000,000	100 %	3,000,000	100 %	3,000,000	100 %	3,000,000	100 %	3,000,000	100 %	0	Kecam atan Bilah Hulu

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
																K	Rp	
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	N/A %	100 %	3,000,000	100 %	3,000,000	100 %	3,000,000	100 %	3,000,000	100 %	3,000,000	100 %	0	Kecam atan Pangka tan
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	N/A %	100 %	3,000,000	100 %	3,000,000	100 %	3,000,000	100 %	3,000,000	100 %	3,000,000	100 %	0	Kecam atan Bilah Barat
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	N/A %	N/A %	103,200,000	100 %	103,200,000	100 %	103,200,000	100 %	103,200,000	100 %	103,200,000	100 %	0	Kecam atan Bilah Hilir

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	N/A %	100 %	30,000,000	100 %	30,000,000	100 %	30,000,000	100 %	30,000,000	100 %	30,000,000	100 %	0	Kecam atan Panai Hulu
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	N/A %	100 %	3,000,000	100 %	3,000,000	100 %	3,000,000	100 %	3,000,000	100 %	3,000,000	100 %	0	Kecam atan Panai Tengah
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	N/A %	100 %	3,000,000	100 %	3,000,000	100 %	3,000,000	100 %	3,000,000	100 %	3,000,000	100 %	0	Kecam atan Panai Hilir

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Desa/Kelurah an	N/A %	100 %	3,000,000	100 %	3,000,000	100 %	3,000,000	100 %	3,000,000	100 %	3,000,000	100 %	0	Kecam atan Rantau Selatan
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	N/A %	N/A %	3,000,000	100 %	3,000,000	100 %	3,000,000	100 %	3,000,000	100 %	3,000,000	100 %	0	Kecam atan Rantau Utara
7	0	0	PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAHA N UMUM	Tingkat Kinerja Pemerintaha nUmum di Wilayah Kecamatan	100 %	100 %	155,540,000	100 %	155,540,000	100 %	155,540,000	100 %	155,540,000	100 %	155,540,000	100 %	0	Kecam atan Bilah Hulu

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
																K	Rp	
7	0	0	PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAHA N UMUM	Tingkat Kinerja Pemerintaha nUmum di Wilayah Kecamatan	100 %	10 0 %	1,725,38 9,000	100 %	30,000,0 00	1 0 0 %	30,000,0 00	100 %	30,000,0 00	100 %	30,000,0 00	100 %	0	Kecam atan Pangka tan
7	0	0	PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAHA N UMUM	Tingkat Kinerja Pemerintaha nUmum di Wilayah Kecamatan	100 %	10 0 %	119,976, 000	100 %	119,976, 000	1 0 0 %	119,976, 000	100 %	119,976, 000	100 %	119,976, 000	100 %	0	Kecam atan Bilah Barat
7	0	0	PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAHA N UMUM	Tingkat Kinerja Pemerintaha nUmum di Wilayah	100 %	10 0 %	93,048,0 00	100 %	93,048,0 00	1 0 0 %	93,048,0 00	100 %	93,048,0 00	100 %	93,048,0 00	100 %	0	Kecam atan Bilah Hilir

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				Kecamatan														
7	0	0	PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAHA N UMUM	Tingkat Kinerja Pemerintaha nUmum di Wilayah Kecamatan	100 %	10 0 %	115,574, 000	100 %	115,574, 000	100 %	115,574, 000	100 %	115,574, 000	100 %	115,574, 000	100 %	0	Kecam atan Panai Hulu
7	0	0	PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAHA N UMUM	Tingkat Kinerja Pemerintaha nUmum di Wilayah Kecamatan	100 %	10 0 %	132,425, 000	100 %	132,425, 000	100 %	132,425, 000	100 %	132,425, 000	100 %	132,425, 000	100 %	0	Kecam atan Panai Tengah
7	0	0	PROGRAM PENYELENGG ARAAN	Tingkat Kinerja Pemerintaha	100 %	10 0	194,327, 000	100 %	194,327, 000	100 %	194,327, 000	100 %	194,327, 000	100 %	194,327, 000	100 %	0	Kecam atan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			URUSAN PEMERINTAHA N UMUM	nUmum di Wilayah Kecamatan		%												Panai Hilir
7	01	05	PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAHA N UMUM	Tingkat Kinerja Pemerintaha nUmum di Wilayah Kecamatan	100 %	100 %	99,990,000	100 %	99,990,000	100 %	99,990,000	100 %	99,990,000	100 %	99,990,000	100 %	0	Kecam atan Rantau Utara
7	01	05	PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAHA N UMUM	Tingkat Kinerja Pemerintaha nUmum di Wilayah Kecamatan	100 %	100 %	227,515,000	100 %	227,515,000	100 %	227,515,000	100 %	227,515,000	100 %	227,515,000	100 %	0	Kecam atan Rantau Selatan
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN	Persentase Pembinaan dan	N/A %	N/A	10,000,000	100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	100 %	0	Kecam atan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			PENGAWASA N PEMERINTAHA N DESA	Pengawasan Pemerintaha nDesa		%												Bilah Hulu
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASA N PEMERINTAHA N DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaha nDesa	N/A %	100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	100 %	0	Kecam atan Pangka tan
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASA N PEMERINTAHA N DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaha nDesa	N/A %	N/A %	10,000,000	100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	100 %	0	Kecam atan Bilah Barat

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
7	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASA N PEMERINTAHA N DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaha nDesa	100 %	10 0 %	74,620,0 00	100 %	74,620,0 00	100 %	74,620,0 00	100 %	74,620,0 00	100 %	74,620,0 00	100 %	0	Kecam atan Bilah Hilir
7	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASA N PEMERINTAHA N DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaha nDesa	N/A %	10 0 %	10,000,0 00	100 %	10,000,0 00	100 %	10,000,0 00	100 %	10,000,0 00	100 %	10,000,0 00	100 %	0	Kecam atan Panai Hulu
7	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan	N/A %	10 0 %	10,000,0 00	100 %	10,000,0 00	100 %	10,000,0 00	100 %	10,000,0 00	100 %	10,000,0 00	100 %	0	Kecam atan Panai Tengah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			N PEMERINTAHA N DESA	Pemerintaha nDesa														
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASA N PEMERINTAHA N DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaha nDesa	N/A %	100 %	5,000,000	100 %	5,000,000	100 %	5,000,000	100 %	5,000,000	100 %	5,000,000	100 %	0	Kecam atan Panai Hilir
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM															
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN	persentase etnis/suku/a gama/ormas dan LSM yang paham terhadap idiologi	100 persen	100 persen	164,940,000	100 persen	664,940,000	100 persen	664,940,000	100 persen	664,940,000	100 persen	664,940,000	100 persen	0	Badan Kesatu an Bangsa dan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			KARAKTER KEBANGSAAN	pancasila dan wawasan kebangsaan													Politik	
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIKDAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik	12 partai	12 partai	698,912,000	12 partai	698,912,000	12 partai	698,912,000	12 partai	698,912,000	12 partai	698,912,000	12 partai	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
8	0	0	PROGRAM PEMBERDAYA ANDAN PENGAWASA N ORGANISASI KEMASYARAKA TAN	Persentase penanganan konflik ormas (persentase ormas yang mendapatka n fasilitasi dan pembinaan)	100 persen	100	133,506,000	100 pers e n	133,506,000	100 pers e n	133,506,000	100 perse n	133,506,000	100 pers e n	133,506,000	100 pers e n	0	Badan Kesatu an Bangsa dan Politik
8	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANG AN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase etnis/suku/a gama/ormas dan LSM yang memahami tentang ketahanan ekonomi sosial dan budaya	100 persen	100	824,950,000	100 pers e n	824,950,000	100 pers e n	824,950,000	100 perse n	824,950,000	100 pers e n	824,950,000	100 pers e n	0	Badan Kesatu an Bangsa dan Politik

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
8	0	0	PROGRAM PENINGKATA N KEWASPADAA N NASIONAL DAN PENINGKATA N KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANA NKONFLIK SOSIAL	persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	100 persen	10 0 pe rse n	185,847, 000	100 pers e n	185,847, 000	100 pers e n	185,847, 000	100 perse n	185,847, 000	100 pers e n	185,847, 000	100 pers e n	0	Badan Kesatu an Bangsa dan Politik
X																		
X	XX																	
X	X	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA	Tingkat capaian kinerja penunjang	80 %	85 %	249,847, 877,000	85 %	249,867, 877,000	90 %	249,887, 877,000	90 %	248,927, 877,000	95 %	249,947, 877,000	95 %	0	Dinas Pendi di kan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			N DAERAH KABUPATEN/K OTA	urusan pemerintaha n														
X	X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintaha n	80 %	85 %	74,704,8 03,000	85 %	75,704,8 03,000	90 %	76,704,8 03,000	90 %	77,704,8 03,000	95 %	78,704,8 03,000	95 %	0	Dinas Keseha tan
X	X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintaha n	80 %	85 %	138,506, 717,000	85 %	139,506, 717,000	90 %	139,906, 717,000	90 %	141,506, 717,000	95 %	143,506, 717,000	95 %	0	Rumah Sakit Umum Daerah Rantau prapat

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
X	X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintaha n	80 %	85 % 14,518,4 82,000	85 % 14,568,4 82,000	90 % 14,598,4 82,000	90 % 14,638,4 82,000	95 % 14,688,4 82,000	95 % 0	Dinas Pekerja an Umum dan Penata an Ruang						
X	X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintaha n	80 %	85 % 4,586,20 1,000	85 % 4,886,20 1,000	90 % 4,986,20 1,000	90 % 5,186,20 1,000	95 % 5,486,20 1,000	95 % 0	Dinas Peruma han Rakyat dan Kawasa n Permuk iman						

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
																K	Rp	
X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 %	9,882,379,000	85 %	9,892,379,000	90 %	9,992,379,000	90 %	10,882,379,000	95 %	10,982,379,000	95 %	0	Satuan Polisi PamongPraja
X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 %	4,985,357,000	85 %	4,985,357,000	90 %	4,995,357,000	90 %	5,185,357,000	95 %	5,385,357,000	95 %	0	Badan Penang gulangan Bencan a Daerah
X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Tingkat capaian kinerja penunjang	80 %	85 %	3,604,205,000	85 %	3,704,205,000	90 %	3,804,205,000	90 %	3,904,205,000	95 %	4,104,205,000	95 %	0	Dinas Sosial

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			N DAERAH KABUPATEN/KOTA	urusan pemerintahan														
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 %	2,914,294,000	85 %	2,984,294,000	90 %	2,994,294,000	90 %	3,114,294,000	95 %	3,214,294,000	95 %	0	Dinas Tenaga Kerja
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 %	3,243,292,000	85 %	3,343,292,000	90 %	3,443,292,000	90 %	3,543,292,000	95 %	3,643,292,000	95 %	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
																	Anak	
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintaha n	80 %	85 %	4,609,64 7,000	85 %	4,709,64 7,000	90 %	4,759,64 7,000	90 %	4,789,64 7,000	95 %	4,889,64 7,000	95 %	0	Dinas Pangan
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintaha n	80 %	85 %	3,100,50 0,000	85 %	3,150,50 0,000	90 %	3,170,50 0,000	90 %	3,180,50 0,000	95 %	3,190,50 0,000	95 %	0	Dinas Pertana han

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
X	X	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 %	5,437,796,000	85 %	5,537,796,000	90 %	5,637,796,000	90 %	5,737,796,000	95 %	5,837,796,000	95 %	0	Dinas Lingku ngan Hidup
X	X	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 %	4,846,062,000	85 %	4,864,062,000	90 %	4,884,062,000	90 %	4,924,062,000	95 %	4,944,062,000	95 %	0	Dinas Kepend udukan dan Pencat atan Sipil
X	X	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Tingkat capaian kinerja penunjang	80 %	85 %	3,752,090,000	85 %	3,782,090,000	90 %	3,792,090,000	90 %	3,822,090,000	95 %	3,852,090,000	95 %	0	Dinas Pember dayaan Masyar

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			N DAERAH KABUPATEN/KOTA	urusan pemerintahan														akat dan Desa
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 % 4,091,138,000	85 % 4,111,138,000	90 % 4,121,138,000	90 % 4,131,138,000	95 % 4,141,138,000	95 % 0	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 % 6,550,505,000	85 % 6,580,505,000	90 % 6,590,505,000	90 % 6,650,505,000	95 % 6,680,505,000	95 % 0	Dinas Perhubungan						

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			OTA	n														
X	X	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 %	4,708,947,000	85 %	4,758,947,000	90 %	4,788,947,000	90 %	4,818,947,000	95 %	4,838,947,000	95 %	0	Dinas Komuni kasidan Inform atika
X	X	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 %	3,912,016,000	85 %	3,952,016,000	90 %	3,982,016,000	90 %	3,992,016,000	95 %	4,112,016,000	95 %	0	Dinas Kopera si, Usaha Kecil dan Menen gah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 % 4,027,523,000	85 % 4,077,523,000	90 % 4,097,523,000	90 % 4,127,523,000	95 % 4,157,523,000	95 % 0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 % 4,754,016,000	85 % 4,784,016,000	90 % 4,834,016,000	90 % 4,854,016,000	95 % 4,894,016,000	95 % 0	Dinas Kependudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan						

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																		Pariwis ata
X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintaha n	80 %	85 %	3,375,82 9,000	85 %	3,395,82 9,000	90 %	3,415,82 9,000	90 %	3,425,82 9,000	95 %	3,445,82 9,000	95 %	0	Dinas Perpust akaan dan Kearsip an
X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintaha n	80 %	85 %	3,424,97 4,000	85 %	3,474,97 4,000	90 %	3,494,97 4,000	90 %	3,514,97 4,000	95 %	3,524,97 4,000	95 %	0	Dinas Kelauta n dan Perikan an

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 % 10,927,544,000	85 % 11,127,544,000	90 % 11,227,544,000	90 % 11,327,544,000	95 % 11,427,544,000	95 % 0	Dinas Pertanian						
X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 % 3,573,522,000	85 % 3,593,522,000	90 % 3,623,522,000	90 % 3,633,522,000	95 % 3,643,522,000	95 % 0	Dinas Peternakan						
X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Tingkat capaian kinerja penunjang	80 %	85 % 6,556,166,000	85 % 6,586,166,000	90 % 6,596,166,000	90 % 6,636,166,000	95 % 6,656,166,000	95 % 0	Dinas Perdaganganan						

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			N DAERAH KABUPATEN/KOTA	urusan pemerintahan														Perindu strian
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 % 38,022,858,000	85 % 39,022,858,000	90 % 40,022,858,000	90 % 41,022,858,000	95 % 42,022,858,000	95 %	0	Sekreta riat Daerah Kabupa ten					
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 % 16,168,213,000	85 % 17,168,213,000	90 % 18,168,213,000	90 % 19,168,213,000	95 % 19,868,213,000	95 %	0	Sekreta riat DPRD					

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 % 4,647,673,000	85 % 4,697,673,000	90 % 4,727,673,000	90 % 4,737,673,000	95 % 4,747,673,000	95 % 0	Badan Perencanaan Pembangun an Daerah						
X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 % 30,811,109,000	85 % 31,311,109,000	90 % 31,811,109,000	90 % 32,311,109,000	95 % 32,811,109,000	95 % 0	Badan Pengel ola Keuang an dan Aset Daerah						
X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Tingkat capaian kinerja penunjang	80 %	85 % 26,346,154,000	85 % 26,846,154,000	90 % 26,946,154,000	90 % 27,246,154,000	95 % 27,346,154,000	95 % 0	Badan Pendap atan Daerah						

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			N DAERAH KABUPATEN/K OTA	urusan pemerintaha n														
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintaha n	80 %	85 %	5,850,81 0,000	85 %	5,855,81 0,000	90 %	5,870,81 0,000	90 %	5,880,81 0,000	95 %	5,890,81 0,000	95 %	0	Badan Kepega waian, Pendi di kan dan Pelatih an
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintaha n	80 %	85 %	3,738,59 7,000	85 %	3,788,59 7,000	90 %	3,798,59 7,000	90 %	3,828,59 7,000	95 %	3,838,59 7,000	95 %	0	Badan Peneliti an dan Penge mbang an

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
X	X	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 %	8,297,257,000	85 %	8,397,257,000	90 %	8,497,257,000	90 %	8,597,257,000	95 %	8,697,257,000	95 %	0	Inspekt orat Daerah
X	X	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 %	3,134,113,000	85 %	3,184,113,000	90 %	3,194,113,000	90 %	3,234,113,000	95 %	3,264,113,000	95 %	0	Kecam atan Bilah Hulu
X	X	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 %	1,590,248,000	85 %	1,595,248,000	90 %	1,600,248,000	90 %	1,650,248,000	95 %	1,690,248,000	95 %	0	Kecam atan Pangka tan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			N DAERAH KABUPATEN/K OTA	urusan pemerintaha n														
X	X	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintaha n	80 %	85 %	2,394,708,000	85 %	2,399,708,000	90 %	2,414,708,000	90 %	2,424,708,000	95 %	2,434,708,000	95 %	0	Kecam atan Bilah Barat
X	X	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintaha n	80 %	85 %	2,963,742,000	85 %	2,983,742,000	90 %	2,993,742,000	90 %	2,998,742,000	95 %	3,098,742,000	95 %	0	Kecam atan Bilah Hilir

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
X	X	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 %	1,863,803,000	85 %	1,883,803,000	90 %	1,893,803,000	90 %	1,913,803,000	95 %	1,923,803,000	95 %	0	Kecamatan Panai Hulu
X	X	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 %	2,797,944,000	85 %	2,817,944,000	90 %	2,827,944,000	90 %	2,837,944,000	95 %	2,847,944,000	95 %	0	Kecamatan Panai Tengah
X	X	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 %	2,082,965,000	85 %	2,088,965,000	90 %	2,092,965,000	90 %	2,099,965,000	95 %	2,102,965,000	95 %	0	Kecamatan Panai Hilir

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			N DAERAH KABUPATEN/K OTA	urusan pemerintaha n															
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintaha n	80 %	85 % 7,177,58 0,000	85 % 7,277,58 0,000	90 % 7,377,58 0,000	90 % 7,477,58 0,000	95 % 7,577,58 0,000	95 % 7,577,58 0,000	95 % 7,577,58 0,000	95 % 7,577,58 0,000	95 % 7,577,58 0,000	95 % 7,577,58 0,000	95 % 7,577,58 0,000	0	Kecam atan Rantau Selatan	
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintaha n	80 %	85 % 8,833,41 8,000	85 % 8,883,41 8,000	85 % 8,933,41 8,000	85 % 8,983,41 8,000	85 % 8,993,41 8,000	85 % 8,993,41 8,000	85 % 8,993,41 8,000	85 % 8,993,41 8,000	85 % 8,993,41 8,000	85 % 8,993,41 8,000	85 % 8,993,41 8,000	90 % 8,993,41 8,000	0	Kecam atan Rantau Utara

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gungja wab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 % 2,581,503,000	85 % 2,589,503,000	90 % 2,591,503,000	90 % 2,621,503,000	95 % 2,631,503,000	95 % 0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						



BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pada Bab ini program indikator kinerja daerah disusun untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. yang menjadi tanggungjawab perangkat daerah langsung merupakan indikator kinerja sasaran Visi Misi Kabupaten Labuhanbatu. Indikator ini menjadi alat ukur untuk mengetahui ketercapaian Visi dan Misi RPJMD Tahun 2021-2026.

Selanjutnya indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan kewenangan. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari Program Perangkat Daerah yang telah ditetapkan (*outcome*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Labuhanbatu disajikan pada tabel 8.1, sedangkan tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan disajikan pada tabel 8.2

Tabel 8.1.
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Labuhanbatu

NO	INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)	Satuan	CAPAIAN KINERJA						
			KondisiAwal	2022	2023	2024	2025	2026	KondisiAkhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	48,56	50,50	52,50	55,00	57,50	60,50	60,50
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	72.8	73.35	74	74.2	74.6	75.2	75.2
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	8.74	8.6	8.5	8.4	8.3	8.2	8.2
4	Indeks Daya Saing Saing Daerah	Poin	n/a	3.4	4	4.5	5	6	6
5	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	2.57	4.78	5	5.2	5.4	5.6	5.6
6	Gini Ratio	Poin	0.3	0.285	0.28	0.27	0.26	0.25	0.25
7	Indeks Infrastruktur	Poin	n/a	40.00	45.00	48.00	50.00	55.00	55.00
8	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	Persen	62,14	65.00	67,22	68,55	70,00	80,50	80,50
9	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Poin	n/a	90	91	93	94	95	95
10	Opin BPK	Poin	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
11	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Skor	2,68	3	3,20	3,25	4,55	3,60	3,65
12	Nilai Evaluasi SAKIP	Predikat	56,99	61	62	64	67	70	70,50
13	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	n/a	80	85	90	95	100	100
14	Harapan Lama Sekolah PendidikanDasar	Tahun	12.6	14.2	14.3	14.35	14.4	14.45	14.45
15	Rata rata lama sekolah	Tahun	9.53	9.69	9.87	10.05	10.24	10.44	10.44

NO	INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)	Satuan	CAPAIAN KINERJA						
			KondisiAwal	2022	2023	2024	2025	2026	KondisiAkhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Indeks Kualitas Pendidikan	Poin	n/a	80.2	82.3	83.4	84.5	85.6	85.6
17	Usia harapan hidup	Tahun	69.95	69.97	69.98	70.00	70.00	70	70
18	Persentase Wirausaha Muda	Persen	60%	63%	67%	73%	87%	89	89
19	Peningkatan Nilai Ekspor Perdagangan	Persen	5	10	15	20	25	30	30
20.	Kontribusi Sektor Industr iterhadap PDRB (ADHB)	Persen	2	3	4	5	67	7	8
21.	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Persen	3	3	3	3	3	3	3
22	PendapatanPerkapita ADHB	Juta Rupiah	72.560.537	75.621.546	78.787.717	82.090.639	85.686.659	89.404.313	89.404.313
23	Persentase Fakir Miskin yang tertangani	Persen	56	57	58	59	59	60	60
24	Persentase anak terlantar yang tertangani	Persen	0	20	20	40	55	75	75
25.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,75	5,47	5,20	4,94	4,70	4,47	4,47
26	RasioRumah Layak Huni	Persen	51.91	57.05	62.2	67.34	74.12	79.23	79.23
27	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak	Persen	85.01	90.01	95.7	100	100	100	100
28	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	Persen	68.81	73.05	77.29	81.52	85.76	90	90
29	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	58,03	58,66	57,18	57,48	58.00	58.50	58,50
30	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	Persen	1.5	1.3	1.1	0.9	0.4	0	0

NO	INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)	Satuan	CAPAIAN KINERJA						
			KondisiAwal	2022	2023	2024	2025	2026	KondisiAkhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	Indeks Resiko Bencana	Poin	n/a	140	145	148	150	152	152
32	Indeks Wiliamson	Poin	n/a	0.4	0.35	0.33	0.2	0.1	0.1
33	Indeks Kerukunan Beragama	Poin	n/a	80	84	86	87	88	88
34	Persentase Penurunan Angka Kriminalitas	Persen	n/a	20	25	30	35	40	40
35	Persentase Penurunan Kasus Penggunaan Narkoba	Persen	n/a	20	30	40	50	60	60

Tabel 8.2.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2026	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB ADHK)	2.57 %	4.78 %	5.00 %	5.20 %	5.40 %	5.60 %	5.60 %
1.2	Pendapatan Perkapita	72,560537 juta	75,621546 juta	78,787717 juta	82,090639 juta	85,686659 juta	89,404313 juta	89,404313 juta
1.3	Gini Rasio	0,300 poin	0,285 poin	0,280 poin	0,270 poin	0,260 poin	0,250 poin	0,250 poin
	Kesejahteraan Sosial							
1	Pendidikan							
1.1	Angka rata-rata lama sekolah	9,53 tahun	9,69 tahun	9,87 tahun	10,05 tahun	10,24 tahun	10,44 tahun	10,44 tahun
1.2	Indeks Pembangunan manusia	72,80 nilai	73,35 nilai	74 nilai	74,2 nilai	74,6 nilai	75,2 nilai	75,2 nilai

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2026	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3	Indeks kualitas pendidikan	n/a	80,2 nilai	82,3 nilai	83,4 nilai	84,5 nilai	85,6 nilai	85,6 nilai
	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	Pelayanan Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar							
1	Pendidikan							
1.1	Pendidikan dasar							
1.1. 1	Harapan lama sekolah pendidikan dasar	12,6 tahun	14,2 tahun	14,3 tahun	14,35 tahun	14,40 tahun	14,45 tahun	14,45 tahun
2	Kesehatan							
2.1	Usia harapan hidup	69,95 tahun	69,97 tahun	69,98 tahun	70,00 tahun	70,00 tahun	70,00 tahun	70,00 tahun
3	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat							
3.1	Indeks resiko bencana	N/A	140 poin	145 poin	148 poin	150 poin	152 poin	152 poin
3.2	Indeks Williamson	NA	0,4 poin	0,35 poin	0,33 poin	0,2 poin	0,1 poin	0,1 poin
3.3	Indeks ketentraman dan ketertiban	NA	90 poin	91 poin	93 poin	94 poin	95 poin	95 poin
3.4	Indeks kerukunan Beragama	NA	80 poin	84 poin	86 poin	87 poin	88 poin	88 poin
3.5	Presentase penurunan angka kriminalitas	NA	20 persen	25 persen	30 persen	35 persen	40 persen	40 persen
3.6	Presentase penurunan kasus	10	20 persen	30 persen	40 persen	50 persen	60 persen	60 persen

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2026	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	penggunaan narkoba							
4	Sosial							
4.1	Tingkat kemiskinan	8,74 persen	8,6 persen	8,5 persen	8,4 persen	8,3 persen	8,2 persen	8,2 persen
4.2	Presentase anak terlantar yang tertangani	0 %	20 %	20%	40%	55%	75%	75%
4.3	Presentase fakir miskin yang tertangani	56%	57%	58%	59%	59%	60%	60%
	Tidak Terkait Pelayanan Dasar							
1	Tenaga Kerja							
1.2	Tingkat pengangguran terbuka	5,75 %	5,47 %	5,20 %	4,94 %	4,70 %	4,47 %	4,47 %
2	Lingkungan Hidup							
2.1	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	58,03	58,66 poin	57,18 poin	57,48 poin	58 poin	58,50 poin	58,50 poin
3	Koperasi, usaha kecil dan menengah							
3.1	Persentase wirausaha muda	60 %	63 %	67%	73%	87%	89%	89%
	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
	Kemampuan Ekonomi							
1	Penelitian dan pengembangan							
1.1	Indeks daya saing daerah	2,57 poin	3,40 poin	4 poin	4,50 poin	5 poin	6 poin	6 poin

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2026	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Perdagangan							
2.1	Peningkatan Nilai ekspor perdagangan	5%	10%	15%	20%	25%	30%	30%
3	Pariwisata							
3.1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ADHB	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
4	Perindustrian							
4.1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	2 %	3%	4%	5%	6%	7%	8%
	Fasilitas Wilayah/Infrastuktur							
1	Pekerjaan umum dan penataan ruang							
1.1	Presentase Panjang jalan dalam kondisi baik	68,81%	73,05 %	77,29%	81,52%	85,76%	90%	90%
1.2	Indeks infrastruktur	NA	40 poin	45 poin	48poin	50poin	55poin	55poin
1.3	Tingkat kemapanan jalan kabupaten	62,14 %	65%	67,22%	68,55%	70%	80,50%	80,50%
2	Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman							
2.1	Rasio Rumah layak huni	51,91%	57,05%	62,2%	67,34%	74,12%	79,23%	79,23%
2.2	Persentase Penduduk berakses air minum layak	85,01 %	90,01 %	95,7 %	100 %	100 %	100 %	100 %

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2026	Tahun 2026	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
2.3	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	1,5 %	1,3 %	1,1%	0,9 %	0,4%	0 %	0%

BAB IX

PENUTUP

Sebagai upaya untuk menjembatani kekosongan hukum pada masa periode Kepala Daerah dengan periode akhir RPJMD Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021-2026, dan sekaligus sebagai acuan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pada sisa periode tahun 2024-2026, khususnya bagi Perangkat Daerah, maka diatur dalam pedoman Transisi dan Kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

a. Pedoman Transisi

Guna menjamin konsistensi dan keselarasan antar dokumen perencanaan dimasa transisi, maka dirumuskan pedoman transisi sebagai berikut:

1. Dokumen RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021–2026 akan berakhir pada tahun 2026, sedangkan periode Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru menetapkan bahwa pada tahun 2024 akan diadakan Pemilihan Kepala Daerah (serentak) bersamaan dengan pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg), maka diperlukan kepastian hukum dan acuan terkait penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah. RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD masa transisi tersebut sampai dengan adanya ketentuan terbaru yang menyatakan bahwa setelah tahun 2024 harus mengacu pada RPJMD yang baru.
2. Pada masa transisi setelah berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2024, penyusunan RKPD dan APBD tetap mengacu/melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya sampai dengan ditetapkannya RPJMD periode berikutnya dan mengacu pada RPJPD Kabupaten Labuhanbatu serta RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan secara teknis, tatacara penyusunan RKPD tersebut mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD.

b. Kaidah Pelaksanaan

Dokumen RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a) Bupati Labuhanbatu menyebar luaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021–2026 kepada masyarakat;
- b) Penyusunan RKPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan RPJMD ini karena bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026, kemudian untuk penyusunan RKPD Tahun 2023 mengacu sepenuhnya pada RPJMD ini;
- c) Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu agar segera menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021–2026;
- d) Perangkat Daerah (PD) yang mengampu fungsi perencanaan daerah dibawah kepemimpinan Sekretariat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Labuhanbatu dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026;
- e) Seluruh Perangkat Daerah (PD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021–2026;
- f) Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dan para pemangku kepentingan pembangunan lainnya, agar dalam melaksanakan perencanaan pembangunan tetap mendukung pencapaian target kinerja dengan mempedomani dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 – 2026 sesuai tahapan dan

berkelanjutan (*sustainable*);

- g) Dalam keadaan luar biasa yang tidak ada dalam RPJMD maka tetap dilaksanakan kegiatan yang menyangkut tentang kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah yang dianggap tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu disusun sebagai penjabaran atas Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati kedalam program-program pembangunan secara selaras dengan kebijakan dan program pembangunan nasional dan provinsi, sinergi antar program dan sumberdaya, serta terukur ketercapaian target kinerjanya. Dengan konsep pemikiran semacam ini, diharapkan penerahan sumberdaya yang dimiliki oleh Kabupaten Labuhanbatu kedalam sistem pembangunan daerah akan lebih tepat sasaran dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan umum, peningkatan daya saing daerah, serta pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dokumen RPJMD secara langsung ataupun tidak langsung pada dasarnya adalah pengeja wantahan janji politik yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati kepada rakyat pada saat kampanye. Dalam prosesnya, arah kebijakan, strategi, dan juga program pembangunan daerah beserta indikatornya dibahas bersama dengan anggota DPRD yang juga representasi dari rakyat. Kesepakatan politik yang muncul dan tertuang ke dalam dokumen RPJMD ini kemudian menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan tahunan oleh Perangkat Daerah. Oleh karena itu, pada akhir periode jabatan, Bupati dan Wakil Bupati mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas amanah yang telah diberikan rakyat melalui mekanisme Pemilihan Kepala Daerah. Selain itu, sebagai bagian dari penyelenggaraan system pemerintahan Indonesia, Bupati dan Wakil Bupati juga mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Dengan melihat baban tanggungjawab yang sangat besar, maka dengan memanjatkan doa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, kita semua berharap penjabaran visi dan misi yang ada dalam dokumen RPJMD ini dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu di masa yang akan datang.